# RKPD 2024

## RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
## KABUPATEN KARO
## TAHUN 2024

# BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
# TAHUN 2023

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
# KABUPATEN KARO
# TAHUN 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**
**2023**

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 103 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 09);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
PENYUSUNAN RKPD
Pasal 2

(1) RKPD yang disusun memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rencana kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(2) RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
    a. pedoman untuk penyempurnaan rancangan Renja PD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2024; dan
    b. landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
(5) Ketentuan mengenai dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam rangka penyempurnaan rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, PD menggunakan RKPD untuk:
a. menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Karo dengan rencana program dan kegiatan prioritas PD dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya; dan
b. penetapan Renja PD Tahun Anggaran 2024 oleh Kepala PD.

Pasal 4

Dalam rangka penetapan Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan verifikasi Rancangan Renja PD Tahun 2024, sebagai berikut:

a. Kepala…

a. Kepala PD menyampaikan rancangan Renja PD Tahun 2024 kepada Bappedalitbang;
b. Bappedalitbang melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja PD Tahun 2024, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan PD tahun 2024 dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024;
c. Bappedalitbang menghimpun seluruh rancangan akhir Renja PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
d. Penetapan Renja Perangkat Daerah dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut:
a. pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah mencakup perumusan kebijakan Renja PD dan RKPD Kabupaten Karo;
b. Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD;
c. Kepala Bappedalitbang menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing PD;
d. Kepala PD wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja PD bila belum sesuai dengan RKPD;
e. dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan program dan kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD, maka RKPD Tahun 2024 dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf e harus sesuai dengan hasil kesepakatan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah disampaikan sebelum Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten dan telah dituangkan dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
g. kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
h. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
i. untuk memaksimalkan pencapaian target indikator sebagaimana dimaksud pada huruf h sesuai kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf g, PD mengupayakan pendanaan alternatif untuk usulan sebagaimana dimaksud pada huruf f yang belum terdanai;
j. penyesuaian RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan Kepala Bappedalitbang setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati; dan
k. RKPD Tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 serta bahan arahan penyusunan RKA PD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB III...

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

Bappedalitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RKPD
Pasal 7

(1) RKPD Tahun 2024 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan dalam tahun berjalan, seperti:
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
   b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
   c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Perubahan Renja PD dan Perubahan APBD Kabupaten Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 6 Juli 2023
BUPATI KARO,

CORY SERIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 6 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA
BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 15

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Akhir kata, diharapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sehingga pembangunan di Kabupaten Karo terarah pada pemecahan permasalahan yang ada untuk kemajuan Kabupaten Karo.

Kabanjahe, Juli 2023

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

**DAFTAR ISI**


**KATA PENGANTAR ..... i**
**DAFTAR ISI ..... ii**
**DAFTAR TABEL ..... iv**
**DAFTAR GAMBAR ..... x**
**DAFTAR GRAFIK ..... xi**
**DAFTAR PETA ..... xii**
**BAB I PENDAHULUAN ..... I-1**
1.1. Latar Belakang ..... I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... I-6
1.4. Maksud dan Tujuan ..... I-7
1.5. Sistematika Dokumen RKPD ..... I-9

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II-1**
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah ..... II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... ..... II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... ..... II-20
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ..... II-36
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah .....II-114
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD..... .....II-119
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....II-132
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....II-132
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....II-137
2.4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) .....II-152
2.5. Program Strategis Daerah (*Major Project*).....II-153

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH..... III-1**
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III-1
3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional ..... III-1
3.1.2. Arah Kebijakan Bidang Ekonomi Provinsi Sumatera Utara ..... III-3
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Karo ..... III-6
3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 ..... III-14
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... ..... III-17
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III-17
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... III-20
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III-24

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... IV-1**
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... IV-1
4.1.1. Visi Pembangunan Daerah ..... IV-1
4.1.2. Misi Pembangunan Daerah ..... IV-3
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah..... IV-4
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 ..... IV-5
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional ..... IV-5
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara ..... IV-7
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Karo ..... IV-12
4.3. Pokok-pokok Pikiran DPRD..... IV-19
4.4. Inovasi Daerah Kabupaten Karo..... IV-46
4.5. Stunting ..... IV-51
4.6. Kemiskinan Ekstrem ..... IV-52
**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V-1**
**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... VI-1**
**BAB VII PENUTUP..... VII-1**
**LAMPIRAN**

# DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo ..... | II-2 |
| Tabel 2.2 | Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Karo ..... | II-6 |
| Tabel 2.3 | Rekapitulasi Kajian Bahaya Kabupaten Karo ..... | II-11 |
| Tabel 2.4 | Potensi Bahaya Banjir Klasifikasi Tinggi di Kabupaten Karo ..... | II-12 |
| Tabel 2.5 | Potensi Bahaya Banjir Bandang per Kecamatan di Kabupaten Karo ..... | II-13 |
| Tabel 2.6 | Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim per Kecamatan di Kabupaten Karo ..... | II-14 |
| Tabel 2.7 | Potensi Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan di Kabupaten Karo..... | II-15 |
| Tabel 2.8 | Potensi Bahaya di Gunung Api Sinabung dan Sibayak per Kecamatan di Kabupaten Karo ..... | II-17 |
| Tabel 2.9 | Potensi Bahaya di Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Karo..... | II-18 |
| Tabel 2.10 | Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2022..... | II-19 |
| Tabel 2.11 | Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Kabupaten Karo ..... | II-21 |
| Tabel 2.12 | Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Karo ..... | II-22 |
| Tabel 2.13 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo Tahun 2018-2022..... | II-23 |
| Tabel 2.14 | PDRB Perkapita Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... | II-24 |
| Tabel 2.15 | Rasio Gini Kabupaten Karo Tahun 2018-2022..... | II-25 |
| Tabel 2.16 | Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... | II-31 |
| Tabel 2.17 | Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... | II-34 |
| Tabel 2.18 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Karo Tahun 2018-2022..... | II-37 |
| Tabel 2.19 | Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... | II-37 |
| Tabel 2.20 | Angka Partisipasi Murni Kabupaten Karo Tahun 2018-2022..... | II-38 |
| Tabel 2.21 | Fasilitas Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Karo Tahun 2018-2022..... | II-38 |
| Tabel 2.22 | Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Karo Tahun 2018-2022..... | II-39 |
| Tabel 2.23 | Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Per Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 2022..... | II-40 |

Tabel 2.24 Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata Pendidikan Dasar Kabupaten Karo Tahun 2018-2022..... II-41
Tabel 2.25 Persentase Tenaga Pendidik S1/DIV Kabupaten Karo Tahun 2018-2022..... II-42
Tabel 2.26 Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Karo .. II-42
Tabel 2.27 Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita di Kabupaten Karo per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2018-2022..... II-43
Tabel 2.28 Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 .... II-44
Tabel 2.29 Rasio Jumlah Posyandu terhadap Jumlah Balita Kabupaten Karo Tahun 2018-2022..... II-45
Tabel 2.30 Rasio Rumah Sakit dan Rasio Puskesmas, Polindes, Pustu per Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2018-2022..... II-47
Tabel 2.31 Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022..... II-47
Tabel 2.32 Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2022..... II-49
Tabel 2.33 Angka Prevalensi Stunting Tahun 2017-2022 ..... II-51
Tabel 2.34 Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 II-52
Tabel 2.35 Prevalensi Tuberculosis Per 100.000 Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2018-2022..... II-53
Tabel 2.36 Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 .... II-54
Tabel 2.37 Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo Tahun 2022..... II-45
Tabel 2.38 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2018-2022..... II-58
Tabel 2.39 Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2018-2022..... II-58
Tabel 2.40 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karo Tahun 2018-2022..... II-59
Tabel 2.41 Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Kab. Karo... II-59
Tabel 2.42 Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-60
Tabel 2.43 Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Karo ..... II-61
Tabel 2.44 Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Karo Tahun 2018-2022..... II-62
Tabel 2.45 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo Tahun 2018-2022..... II-62

Tabel 2.47 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-64
Tabel 2.48 Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-65
Tabel 2.49 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-66
Tabel 2.50 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-66
Tabel 2.51 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022. II-67
Tabel 2.52 Capaian Pembangunan Pertanahan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-68
Tabel 2.53 Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-69
Tabel 2.54 Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-71
Tabel 2.55 Rasio Pasangan Berakte Nikah Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-71
Tabel 2.56 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-71
Tabel 2.57 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-72
Tabel 2.58 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-73
Tabel 2.59 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-74
Tabel 2.60 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-73
Tabel 2.61 Jumlah Kerjasama Penyeleggaraan Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-73
Tabel 2.62 Rasio Akseptor KB Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 . II-74
Tabel 2.63 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-75
Tabel 2.64 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak Terpenuhi (Unmet need) Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-75
Tabel 2.65 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-76
Tabel 2.66 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-77
Tabel 2.67 Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Kabupaten Karo 2018-2022 ..... II-78

Tabel 2.67 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa Kelurahan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 .....II-78
Tabel 2.68 Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-80
Tabel 2.69 Capaian Indikator Sasaran dan Prioritas Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo 2018-2022.....II-81
Tabel 2.70 Jumlah Koperasi dan Koperasi Aktif Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-83
Tabel 2.71 Indikator Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-84
Tabel 2.72 Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2018-2022..... II-85
Tabel 2.73 Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-86
Tabel 2.74 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-86
Tabel 2.75 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 .....II-87
Tabel 2.76 Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-88
Tabel 2.77 Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Karo 2018-2022 ..II-88
Tabel 2.78 Sistem data dan Statistik yang Terintegrasi Tahun 2018-2022.....II-89
Tabel 2.79 Buku Kabupaten Dalam Angka dan PDRB.....II-89
Tabel 2.80 Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-90
Tabel 2.81 Tabel Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Karo 2018-2022.....II-92
Tabel 2.82 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Karo 2018-2022.....II-92
Tabel 2.83 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-93
Tabel 2.84 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Memiliki Sertifikat Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-94
Tabel 2.85 Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Karo 2018-2022 .....II-95
Tabel 2.86 Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Karo 2018-2022 .....II-96
Tabel 2.87 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-97
Tabel 2.88 Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pariwisata Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-98
Tabel 2.89 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 II-100

Tabel 2.90 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim (Ton) di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ...II-100
Tabel 2.91 Produksi Tanaman Buah-Buahan Tahunan (Ton) di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-101
Tabel 2.92 Produksi Tanaman Hias (Ton) di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-101
Tabel 2.93 Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 .....II-102
Tabel 2.94 Jumlah Populasi Ternak (Ekor) di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-102
Tabel 2.95 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 .....II-102
Tabel 2.96 Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Kehutanan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-103
Tabel 2.97 Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-103
Tabel 2.98 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-104
Tabel 2.99 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 (miliar Rp) .....II-105
Tabel 2.100 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-106
Tabel 2.101 Capaian Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-107
Tabel 2.102 Indikator Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-108
Tabel 2.103 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Penunjang Perencanaan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-108
Tabel 2.104 Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-109
Tabel 2.105 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-112
Tabel 2.106 Penerapan Inovasi Daerah dan Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ....II-113
Tabel 2.107 Pengeluaran RT per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-114
Tabel 2.108 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-117
Tabel 2.109 Menurut Ijazah Diploma I/II, III, IV dan S1 Keatas Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-119
Tabel 2.110 Rasio Ketergantungan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.....II-119
Tabel 2.111 Kinerja Kegiatan dan Keuangan pada Perangkat

Daerah Tahun 2022 .....II-120
Tabel 2.112 Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah Tahun 2022..... .....II-122
Tabel 2.113 Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah..... .....II-123
Tabel 2.114 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Daerah.....II-132
Tabel 3.1 Tren Capaian dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2024 ..... III-17
Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Karo Tahun 2021 s.d tahun 2025..... III-17
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 s.d tahun 2025 ..... III-24
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 s.d tahun 2025 ..... III-25
Tabel 4.1 Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo Tahun 2024 ..... IV-18
Tabel 4.2 Program dan Target Capaian untuk Setiap Indikator dari Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah/ Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karo Tahun 2024 . IV-20
Tabel 4.3 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Karo Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 IV-29
Tabel 4.4 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Karo Terhadap Prioritas Provinsi Tahun 2024 IV-38
Tabel 4.5 Rencana Inovasi Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 IV-48
Tabel 4.6 Angka Penurunan Stunting Tahun 2017-2022 ..... IV-51
Tabel 5.1 Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024..... V-2
Tabel 5.2 Dukungan Program dan Pagu Indikatif terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024..... V-24
Tabel 5.3 Dukungan Anggaran terhadap Tematik Penurunan Stunting ..... V-33
Tabel 5.4 Dukungan Anggaran terhadap Tematik Substainable Development Goals/SDGs ..... V-35
Tabel 5.5 Dukungan Anggaran terhadap Tematik Kemiskinan Ekstrem ..... V-40
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karo Tahun 2024 . VI-1
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Karo. ..... VI-3

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan..... I-7

# DAFTAR GRAFIK


Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo, Sumut dan Indonesia Tahun 2018-2022..... II-23
Grafik 2.2 Gini Rasio Kabupaten Karo Tahun 2018-2022..... II-25
Grafik 2.3 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-25
Grafik 2.4 Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumut Tahun 2022 ..... II-26
Grafik 2.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-27
Grafik 2.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2022 ..... II-28
Grafik 2.7 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-29
Grafik 2.8 Indeks Development Gender Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-30
Grafik 2.9 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-31
Grafik 2.10 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2022..... II-32
Grafik 2.11 Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2022..... II-32
Grafik 2.12 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karo Tahun 2018-2022.. ..... II-32
Grafik 2.13 Posisi Relatif Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2022..... II-34
Grafik 2.14 Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Kabupaten Karo per 1000 Kelahiran Hidup 2018-2022 .. II-44
Grafik 2.15 Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... II-45
Grafik 2.16 Posisi Relatif TPAK Kab. Karo di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.. ..... II-63
Grafik 2.17 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022..... II-54
Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022 (persen)..... III-6
Grafik 3.2 PDRB Per Kapita Kabupaten Karo Atas Dasar Harga Berlaku dan ATas Dasar Harga Konstan (Ribuan Rupiah) Tahun 2018-2022 ..... II-7
Grafik 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Karo (%) Tahun 2018-2022 ..... III-8
Grafik 3.4 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... III-9

Grafik 3.5 Gini Rasio Kabupaten Karo Tahun 2018-2022..... III-10
Grafik 3.6 Indeks Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... III-10

# DAFTAR PETA


| | | |
|---|---|---|
| Peta 2.1 | Administrasi Kabupaten Karo..... | II-1 |
| Peta 2.2 | Topografi Kabupaten Karo ..... | II-3 |
| Peta 2.3 | Geologi Kabupaten Karo..... | II-5 |
| Peta 2.4 | Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Karo ..... | II-12 |
| Peta 2.5 | Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Karo ..... | II-13 |
| Peta 2.6 | Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Karo..... | II-15 |
| Peta 2.7 | Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karo ..... | II-16 |

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Mekanisme dan tata cara perencanaan pembangunan mengacu pada ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaan dari Undang-undang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Memenuhi ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional serta pedoman penyusunan RKPD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pada pasal 14 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam penyusunan RKPD tersebut, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah di Tahun 2024;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 yang akan diusulkan oleh Bupati untuk disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Disamping hal tersebut di atas, RKPD Kabupaten Karo Tahun 2024 juga disusun berdasarkan masukan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan amanat pasal 178 permendagri 86 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa pokok pikiran merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat penyerapan aspirasi melalui reses yang diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Pada dokumen ini, pokok-pokok pikiran DPRD yang diakomodir adalah yang telah melewati tahapan paripurna dan di *entry* ke aplikasi SIPD Kemendagri satu minggu sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten Karo Tahun 2024 sebanyak 1284 usulan dan akan didanai berdasarkan kapasitas riil keuangan daerah tahun 2024.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo;
18. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
29. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026; dan
32. Peraturan Bupati Karo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi, Parameter dan Kamus Usulan Pembangunan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

## 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Memenuhi ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

**Gambar 1.1**
**Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**

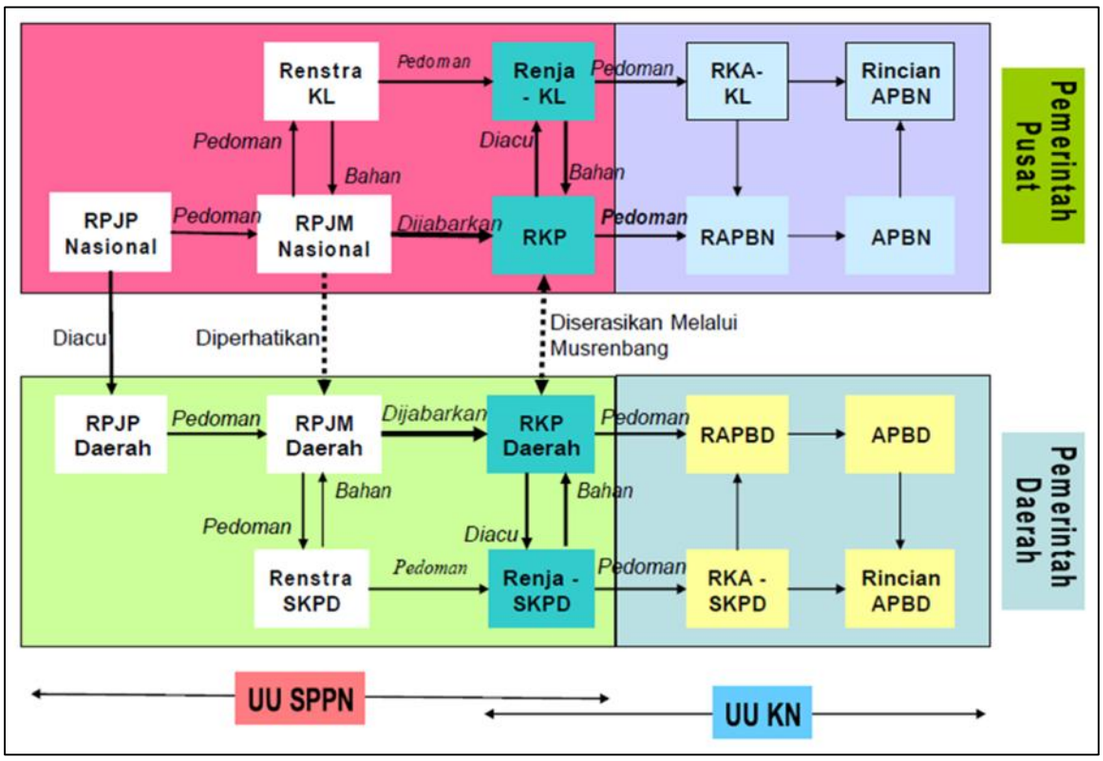


Berdasarkan uraian di atas, maka RKPD Kabupaten Karo Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen-dokumen lain, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten.

## 1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2024 merupakan tahapan dari serangkaian tahapan penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan penyusunan RKPD merupakan konsekuensi dari perencanaan yang berorientasi pada proses dan substansi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan

teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi ke ruangan dalam perencanaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2024.

Mekanisme dan tahapan perencanaan yang dilakukan ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan para pihak untuk berperan dalam proses pembangunan daerah serta secara substansi dapat menghasilkan suatu dokumen perencanaan yang mampu mewujudkan target dan sasaran yang ingin dicapai baik secara tahunan maupun jangka menengah di daerah yang pada akhirnya dapat mendukung untuk pencapaian visi misi kepala daerah terpilih.

Lebih lanjut RKPD Kabupaten Karo Tahun 2024 merupakan implementasi RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 pada tahun 3 (tiga), sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya.

### 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen RKPD

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (*TPB/*SDGs)*
2.5. Program Strategis Daerah (*Major Project*)

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024
4.3. Pokok-pokok Pikiran DPRD
4.4. Inovasi Daerah Kabupaten Karo
4.5. Stunting
4.6. Kemiskinan Ekstrem

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**BAB VII PENUTUP**

**LAMPIRAN**

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kondisi umum daerah Kabupaten Karo pada bab ini menjelaskan dan menyajikan dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

**A. Luas dan batas wilayah administrasi**

Secara Geografis letak Kabupaten Karo berada diantara 2.500–3.190 Lintang Utara dan 97.550–98.380 Bujur Timur dengan luas 2.127,25 Km2 atau 2,97 persen dari luas Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Karo terletak pada jajaran Bukit Barisan dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Dua gunung berapi aktif terletak di wilayah ini sehingga rawan gempa vulkanik. Batas Administrasi Kabupaten Karo dapat dilihat pada peta di bawah ini.

**Peta 2.1**
**Administrasi Kabupaten Karo**

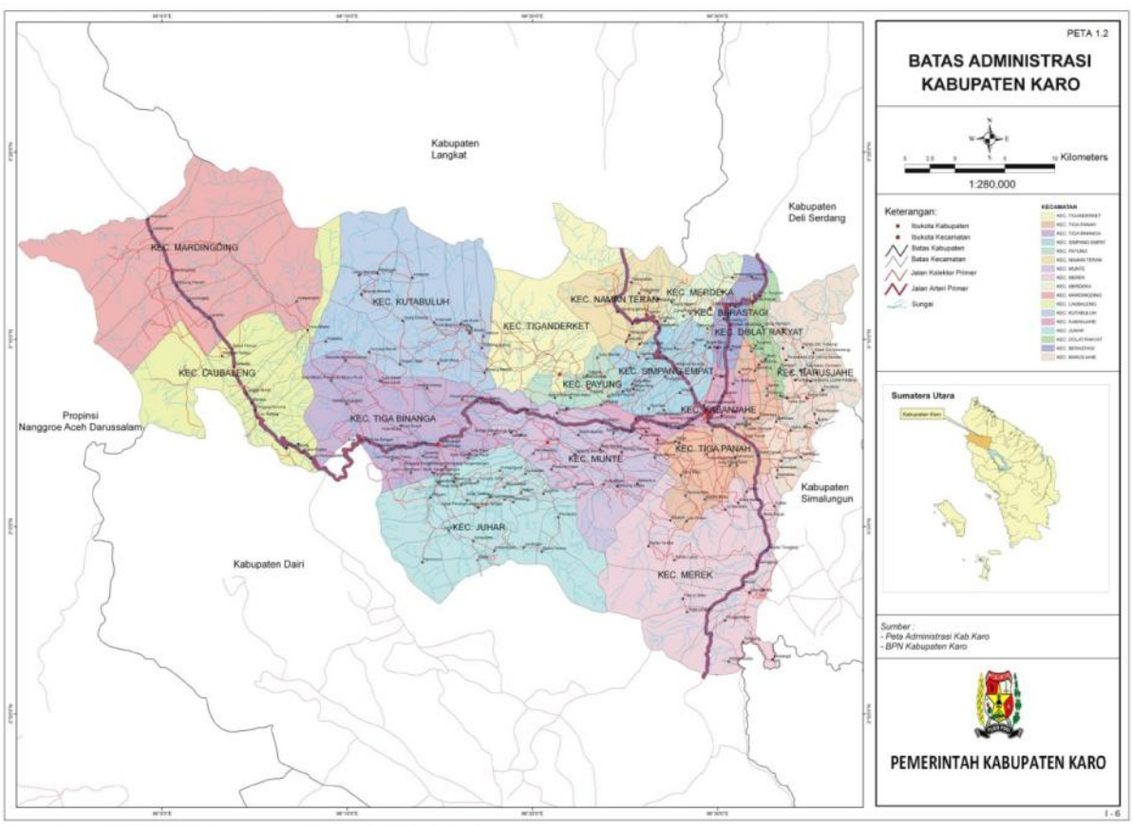


*Sumber: RTRW Kabupaten Karo 2022-2042*

Wilayah Kabupaten Karo di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Simalungun, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Karo berdasarkan luas wilayah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**
**Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo**

| NO | KECAMATAN | LUAS WILAYAH ($KM^2$) | PERSENTASE THD LUAS KAB. (%) | JUMLAH DESA | JUMLAH KELURAHAN | JUMLAH KEL/DESA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardingding | 267,11 | 12,56 | 12 | - | 12 |
| 2 | Laubaleng | 252,60 | 11,87 | 15 | - | 15 |
| 3 | Tigabinanga | 160,38 | 7,54 | 19 | 1 | 20 |
| 4 | Juhar | 218,56 | 10,27 | 25 | - | 25 |
| 5 | Munte | 125,64 | 5,91 | 22 | - | 22 |
| 6 | Kutabuluh | 195,70 | 9,20 | 16 | - | 16 |
| 7 | Payung | 47,24 | 2,22 | 8 | - | 8 |
| 8 | Tiganderket | 86,76 | 4,08 | 17 | - | 17 |
| 9 | Simpang Empat | 93,48 | 4,39 | 17 | - | 17 |
| 10 | Naman Teran | 87,82 | 4,13 | 14 | - | 14 |
| 11 | Merdeka | 44,17 | 2,08 | 9 | - | 9 |
| 12 | Kabanjahe | 44,65 | 2,10 | 8 | 5 | 13 |
| 13 | Berastagi | 30,50 | 1,43 | 6 | 4 | 10 |
| 14 | Tigapanah | 186,84 | 8,78 | 26 | - | 26 |
| 15 | Dolat Rayat | 32,25 | 1,52 | 7 | - | 7 |
| 16 | Merek | 125,51 | 5,90 | 19 | - | 19 |
| 17 | Barusjahe | 128,04 | 6,02 | 19 | - | 19 |
| **Jumlah** | | **2 127,25** | **100** | **259** | **10** | **269** |

*Sumber: BPS Karo, 2023*

Dari Tabel Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo dapat dilihat bahwa kecamatan di Kabupaten Karo sebanyak 17 (Tujuh belas) kecamatan. Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 269 (Dua ratus enam puluh sembilan) yang terdiri dari 259 desa dan 10 kelurahan. Wilayah kecamatan yang terluas adalah kecamatan Mardinding dengan luas 267,11 $km^2$ (12,56% dari luas kabupaten) dan luas terkecil adalah Kecamatan Berastagi seluas 30,50 $km^2$ (1,43% dari luas kabupaten).

## B. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Karo berada pada posisi geografis 2°50’ sampai 3°19’ Lintang Utara dan 97°55’ sampai 98°38’ Bujur Timur, dan berada pada wilayah Dataran Tinggi Bukit Barisan.

Letak geografis Kabupaten Karo yang berada di dataran tinggi bukit barisan dengan hawa sejuk, dan berada pada jalur perlintasan Kota Medan dengan Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Samosir dan beberapa kabupaten/Kota Provinsi NAD sehingga posisinya menjadi sangat strategis dalam pengembangan ekonomi dan daerah tujuan wisata.

Kabupaten Karo merupakan wilayah dengan karakter agraris yang ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk sektor pertanian seluas 197.525 ha atau sebesar 92,85% dari luas wilayah Kabupaten Karo.

## C. Topografi

Kondisi topografi adalah bentuk permukaan bumi dan karakteristik fisiknya, seperti gunung, lembah, dan lainnya. Tujuan utama topografi adalah mengetahui posisi geografis dan ketinggian di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Karo dengan elevasi terendah +77 m di atas permukaan laut berada di Paya Lah-lah (Kecamatan Mardinding) dan elevasi tertinggi +2.447 m di atas permukaan laut adalah di Gunung Sinabung.

Daerah Kabupaten Karo yang berada di daerah dataran tinggi bukit barisan dengan kondisi topografi yang berbukit dan bergelombang, maka di wilayah ini ditemui banyak lembah dan alur sungai yang dalam dan lereng-lereng bukit yang curam/terjal.

**Peta 2.2**
**Topografi Kabupaten Karo**

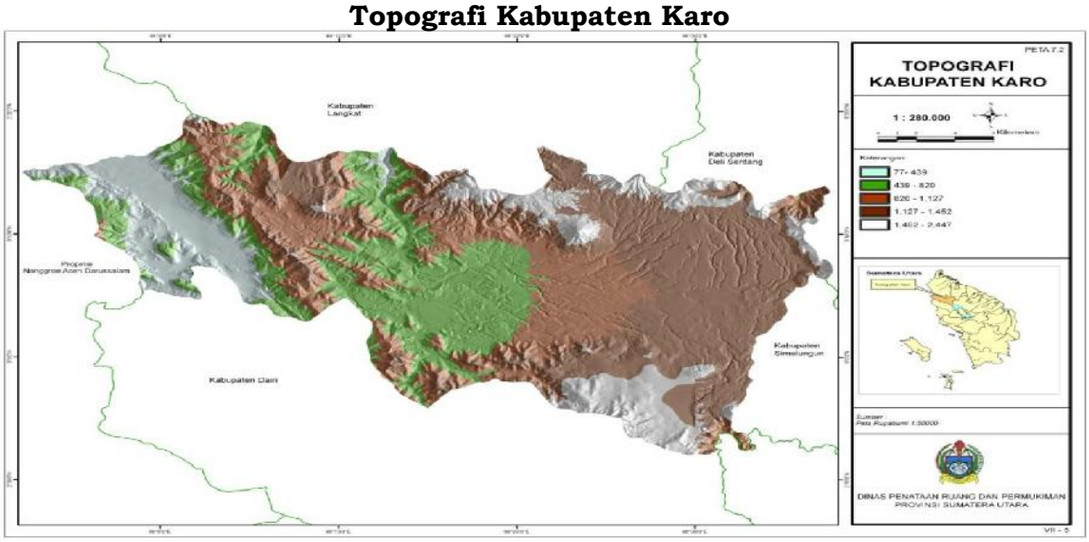


*Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara*

**D. Geologi**

Geologi adalah pengetahuan bumi yang menyelidiki lapisan-lapisan batuan yang ada dalam kerak bumi. Di dalam kerak bumi terdapat bermacam-macam batuan dan diantar lapisan-lapisan kerak bumi terdapat air yang gunakan sehari-hari, sedangkan peta geologi adalah gambaran kecil permukaan bumi, gambaran ini mengenai informasi sebaran dan juga jenis serta sifat batuan, umur, struktur, tektonika, dan lain-lain yang berhubungan dengan adanya sumber daya.

Keadaan Geologi di Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

a. Qh: Kerikil, pasir, lempung. Jenis batuan ini banyak terdapat di Kecamatan Mardingding dan Lau Baleng.
b. Qvsn, Erupsi Sinabung: Lava andesit-dasit. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Tiganderket dan Payung.
c. Qvba, Erupsi Sibayak, Satuan Sibayak: Andesit, Dasit piroklastik. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Berastagi dan Merdeka.
d. Qvbr, Erupsi Barus: Lava andesit piroklastik. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di sebelah utara Kecamatan Dolat Rayat.
e. Qvbs, Erupsi Sibayak, Satuan Singkut: Andesit, dasit,mikrodiorit,tufa. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Barusjahe, Kabanjahe, Simpang Empat, Payung, Dolat Rayat, Berastagi, Merdeka, Naman Teran dan Tiga Panah.
f. Qpm, Formasi Melaboh: Gravel, pasir dan lempung
g. Qvss, Erupsi Sipiso-piso: Dasit dan Andesit. Jenis batuan ini terdapat di bagian Timur Kecamatan Merek.
h. Qpk, Formasi Kotacane: Kerikil, pasir, lempung. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Mardingding dan Lau Baleng.
i. Qvtsu, Erupsi Toba, Satuan Sibutar: Campuran lava riolitik dan piroklastik. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Merek.
j. Qvt, Erupsi Toba: Tufa riodasit sebagian terelaskan. Jenis batuan ini merupakan jenis batuan yang mendominasi di Kabupaten Karo. Hampir semua kecamatan memiliki jenis batuan ini, akan tetapi yang lebih mendominasi adalah Kecamatan Merek, Tiga Panah, Munte dan Kutabuluh.
k. QTvm, Erupsi Takurtakur, Satuan Mentar: Piroklastik andesitik–dasitik. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Barusjahe.

l. QTvk, Erupsi Takurtakur, Satuan Takurtakur: Andesit, dasit dan piroklastik. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di sebelah Utara Kabupaten Karo, yaitu Kecamatan Kutabuluh, Tiganderket, Naman Teran dan Merdeka.

m. Tmvh, Formasi Gunung Api Haranggaol: Andesit, dasit, piroklastik

n. Tlbu, Formasi Butar: Selang seling batu pasir dengan batu pasir, batu lumpur. Formasi Tlbu juga termasuk formasi yang banyak terdapat di Kabupaten Karo. Jenis batuan ini melingkupi sebagian Kecamatan Mardingding, Lau Baleng, Tiga Binanga, Kutabuluh dan Tiganderket.

o. Ppbl, Formasi Batu gamping Batu milmil: Batu gamping dan rijan. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Kutabuluh dan Tiganderket.

p. Mpikt: Intrusi Granit. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Munte.

q. Mpik: Intrusi granit

r. Ppal, Formasi Alas, Anggota Batu gamping: Batu gamping oolit atau batu gamping kristalin. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Mardingding dan sebagian Kecamatan Lau Baleng.

s. Ppa, Formasi Alas: Batuserpih, batulanau, batupasir, konglomerat, *wacke.* Jenis batuan ini terdapat di sebelah Barat Kecamatan Mardingding.

t. Puk, Formasi Kluet: Batu sabak, filit, meta batu pasir, meta batu lempung. Jenis batuan ini terletak di sebelah Selatan Kabupaten Karo, melingkupi sebagian Kecamatan Juhar dan Merek.

u. Pub, Formasi Bahorok: batu *metawacke*, batu sabak, meta batu lanau, meta batu pasir arenit meta batu konglomerat. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Mardingding dan Kutabuluh.

**Peta 2.3**
**Geologi Kabupaten Karo**

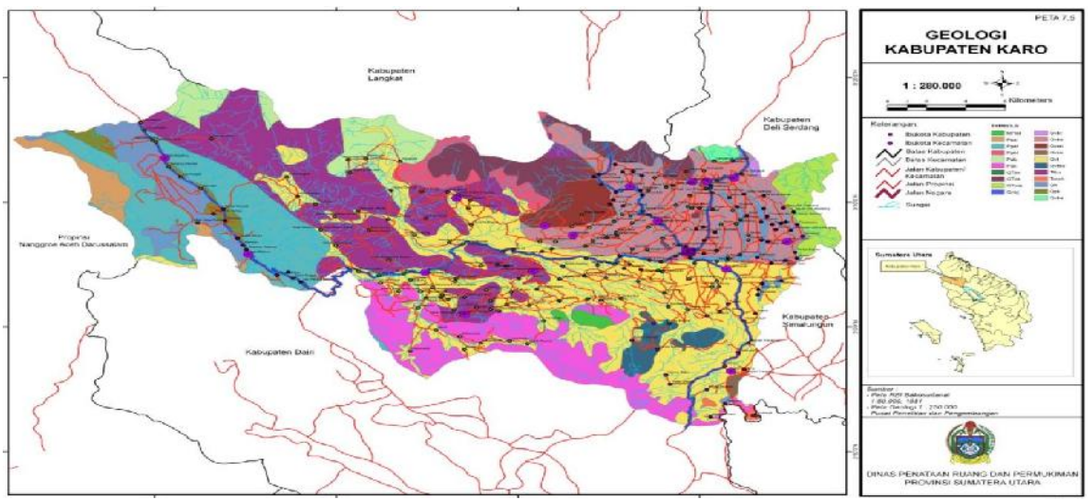


*Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara*

## E. Hidrologi

Kabupaten Karo dilalui oleh dua sungai utama yaitu Sungai Wampu (Lau Biang) yang bermuara ke Selat Malaka dan Sungai Lau Renun (Lau Bengap) yang bermuara Samudra Hindia. Jumlah anak-anak sungai yang bermuara ke kedua sungai diatas tercatat lebih kurang 43 buah. Pada umumnya Daerah Aliran Sungai (DAS) anak-anak sungai tersebut relatif kecil dan mempunyai kemiringan relatif tinggi.

Selain dari pada air dalam bentuk aliran sungai dan anak-anak sungai juga terdapat air permukaan dalam bentuk danau yakni Danau Lau Kawar di Kecamatan Naman Teran dan Danau Toba di Kecamatan Merek.

Wilayah aliran sungai di Kabupaten Karo terdiri dari 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Alas, DAS Deli, DAS Percut, DAS Sei Ular, DAS Serdang, dan DAS Wampu.

## F. Klimatologi

Kabupaten Karo terletak dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga keadaan iklim di Kabupaten Karo tergolong ke dalam daerah beriklim tropis yang mempunyai 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan hujan. Tipe iklim daerah Kabupaten Karo adalah E2 menurut klasifikasi *Oldeman* dengan bulan basah lebih tiga bulan dan bulan kering berkisar 2–3 bulan atau A menurut *Koppen* dengan curah hujan rata-rata di atas 1.000 mm/tahun dan merata sepanjang tahun. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.000–4.000 mm/tahun. Musim hujan pertama mulai bulan Agustus sampai dengan Januari dan musim kedua pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei, sedangkan musim kemarau biasanya pada bulan Februari, Juni dan Juli. Curah hujan dan hari hujan kabupaten karo dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**
**Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Karo**

| Bulan (Month) | Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm) | Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day) |
|---|---|---|
| Januari/January | 348 | 17 |
| Februari/February | 21 | 2 |
| Maret/March | 39 | 10 |
| April/April | 74 | 15 |
| Mei/May | 73 | 10 |
| Juni/June | 206 | 18 |
| Juli/July | 189 | 12 |
| Agustus/August | 346 | 16 |

| Bulan (Month) | Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm) | Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day) |
|---|---|---|
| September/September | 331 | 18 |
| Oktober/October | 317 | 12 |
| November/November | 395 | 25 |
| Desember/December | 206 | 15 |

*Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka, 2023*

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa curah hujan di Kabupaten Karo tahun 2021 tertinggi pada bulan November sebesar 395 mm dan terendah pada bulan Februari sebesar 21 mm. Sedangkan jumlah hari hujan tertinggi pada bulan November sebanyak 25 hari dan terendah pada bulan Februari sebanyak 2 hari.

Suhu udara di Kabupaten Karo berkisar antara 17,4$^0$C–23,6$^0$C dengan kelembaban udara antara 86,9–117,7%. Sedangkan arah angin di Kabupaten Karo terbagi atas dua musim yakni:

a. Angin berhembus dari arah Barat, kira-kira bulan Oktober sampai dengan bulan Maret.
b. Angin berhembus dari arah Timur dan Tenggara, antara bulan April sampai dengan bulan September.

**G. Penggunaan Lahan**

Kabupaten Karo memiliki lahan pertanian yang luas. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Karo pada tahun 2021, dipergunakan untuk lahan sawah sebesar 10.223 ha (4,81%), lahan pertanian bukan sawah 187.302 ha (88,05%), dan Lahan penggunaan lainnya 15.200 ha (7,14%).

### 2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo 2022–2042 Adapun pemanfaatan dan pengembangan wilayah Kabupaten Karo terbagi dalam rencana struktur ruang dan pola ruang.

**A. Rencana Struktur Ruang**

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Karo erdiri dari:

1. Sistem Pusat Permukiman yang terdiri dari:
   a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, dan Merdeka.

b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Kecamatan Berastagi, Kabanjahe, Kutabuluh, Merek, Tigabinanga.
c. Pusat-Pusat Lain terdiri dari Pusat Pelayanan Kawasan yang meliputi Kecamatan Munte, Simpang Empat, Tiganderket, Tigapanah, dan Pusat Pelayanan Lingkungan yeng meliputi Kecamatan Juhar, Laubaleng, Mardingding, Naman Teran dan Payung.

2. Sistem jaringan prasarana yang terdiri dari:
   a. Sistem Jaringan Transportasi berupa sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
   b. Sistem Jaringan Energi berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
   c. Sistem Jaringan Telekomunikasi berupa Jaringan Tetap dan Jaringan Bergerak.
   d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air berupa Prasarana Sumber Daya Air yang meliputi sistem jaringan irigasi; dan sistem pengendalian banjir.
   e. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (Spal), Sistem Jaringan Persampahan dan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.

**B. Rencana Pola Ruang**

Rencana Pola Ruang Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo 2022–2042 meliputi:

1. Kawasan Lindung yang meliputi
   a. Badan Air dengan luas kurang lebih 355 (tiga ratus lima puluh lima) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Kabanjahe, Kecamatan Kutabuluh, Laubaleng, Munte, Naman Teran, Payung, Tigabinanga, Tigapanah, dan Tiganderket.
   b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 63.291 (enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Juhar, Kutabuluh, Laubaleng, Mardingding, Merdeka, Merek, Munte, Simpang Empat dan Tigabinanga.

c. Kawasan konservasi berupa Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional meliputi Taman Nasional seluas kurang lebih 23.525 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Kutabuluh, Laubaleng, Mardingding, Merdeka, Naman Teran, Payung dan Tiganderket.

2. Kawasan Budi Daya yang meliputi :

a. Kawasan Hutan Produksi terdiri dari Hutan Produksi Terbatas seluas kurang lebih 9.528 (sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar, meliputi Kecamatan Juhar, Kutabuluh, Laubaleng, Mardingding; Merdeka, Naman Teran, Payung, Simpang Empat dan Tiganderket, serta Hutan Produksi Tetap seluas kurang lebih 6.689 (enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan) hektar, meliputi Kecamatan Berastagi, Juhar, Kutabuluh, Merek, Munte dan Tigabinanga.

b. Kawasan Pertanian terdiri dari:

- Kawasan Tanaman Pangan seluas kurang lebih 37.093 (tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Juhar, Kabanjahe, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merek, Munte, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigapanah, Tigabinanga, Tiganderket.
- Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 47.371 (empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu) hektar, meliputi Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Juhar, Kabanjahe, Kutabuluh, Laubaleng, Mardingding, Merdeka, Merek, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigapanah, Tigabinanga dan Tiganderket.
- Kawasan Perkebunan seluas kurang lebih 21.621 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Juhar, Kutabuluh, Laubaleng, Mardingding, Merdeka, Merek, Munte, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigapanah, Tigabinanga dan Tiganderket.

- Kawasan Peternakan seluas kurang lebih 709 (tujuh ratus sembilan) hektar, meliputi Kecamatan Laubaleng, Merek dan Tigapanah.
- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) merupakan bagian dari Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 12.768 (dua belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan) hektar, meliputi: Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Juhar, Kabanjahe, Kutabuluh, Laubaleng, Mardingding, Merdeka, Merek, Munte, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigabinanga, Tiganderket dan Tigapanah.

- Kawasan Pariwisata seluas kurang lebih 795 (tujuh ratus sembilan puluh lima) hektar, meliputi Kecamatan Berastagi, Merek, Merdeka dan Munte.
- Kawasan Permukiman terdiri dari Kawasan Permukiman Perkotaan seluas kurang lebih 2.809 (dua ribu delapan ratus sembilan) hektar meliputi Kecamatan Berastagi, Kabanjahe, Merdeka, Merek, Tigabinanga, Tigapanah.
- Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 4.922 (empat ribu sembilan ratus dua puluh dua) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Juhar, Kabanjahe, Kutabuluh, Laubaleng, Mardingding, Merdeka, Merek, Munte, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigabinanga, Tiganderket dan Tigapanah.
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan 23 (dua puluh tiga) hektar, meliputi:
  - Markas Komando Distrik Militer 0205/TK di Kecamatan Berastagi
  - Batalyon Infantri (Yonif) 125/Simbisa Tanah Karo di Kecamatan Kabanjahe
  - Komando Rayon Militer 01/Barusjahe di Kecamatan Barusjahe;
  - Komando Rayon Militer 02/Tigapanah di Kecamatan Tigapanah
  - Komando Rayon Militer 03/Berastagi di Kecamatan Berastagi

- Komando Rayon Militer 04/Simpang Empat di Kecamatan Simpang Empat
- Komando Rayon Militer 05/Payung di Kecamatan Payung
- Komando Rayon Militer 06/Munte di Kecamatan Munte;
- Komando Rayon Militer 07/Juhar di Kecamatan Juhar
- Komando Rayon Militer 08/Tigabinanga di Kecamatan Tigabinanga
- Komando Rayon Militer 09/Laubaleng di Kecamatan Laubaleng.

### 2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Dari Analisis Kajian Resiko Bencana Kabupaten Karo juga terdapat beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Karo yaitu bencana gempa bumi, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Melalui Kajian Resiko Bencana terdapat 4 (empat) prioritas jenis bencana yaitu, letusan Gunung Api Sinabung, getampa bumi, longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Rekapitulasi kajian bahaya di Kabupaten karo dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3**
**Rekapitulasi Kajian Bahaya Kabupaten Karo**

| JENIS BAHAYA | BAHAYA | |
|---|---|---|
| | Total Luas (ha) | Kelas |
| Banjir | 7.542 | Tinggi |
| Banjir Bandang | 3.185 | Tinggi |
| Cuaca Ekstrim | 164.569 | Tinggi |
| Gempa Bumi | 212.723 | Tinggi |
| Kebakaran Hutan dan Lahan | 66.117 | Tinggi |
| Kekeringan | 212.723 | Tinggi |
| Letusan Gunung Api Sibayak | 10.110 | Tinggi |
| Letusan Gunung Api Sinabung | 44.635 | Tinggi |
| Longsor | 103.845 | Sedang |

*Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022*

- **Banjir**

Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal, antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan yang tinggi dan sejenisnya. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan dan bahkan merenggut nyawa manusia.

Berdasarkan parameter bahaya banjir, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya banjir di Kabupaten Karo.

**Tabel 2.4**
**Potensi Bahaya Banjir Klasifikasi Tinggi di Kabupaten Karo**

| NO | KECAMATAN | BAHAYA | |
|---|---|---|---|
| | | Total Luas (ha) | Kelas |
| 1 | Laubaleng | 2.951 | Tinggi |
| 2 | Mardingding | 4.591 | Tinggi |
| **Total Kabupaten Karo** | | **7.542** | **Tinggi** |

*Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022*

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana banjir di Kabupaten Karo terdapat pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Laubaleng dan Mardinding. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana banjir di Kabupaten Karo adalah **7.542 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

**Peta 2.4**
**Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Karo**

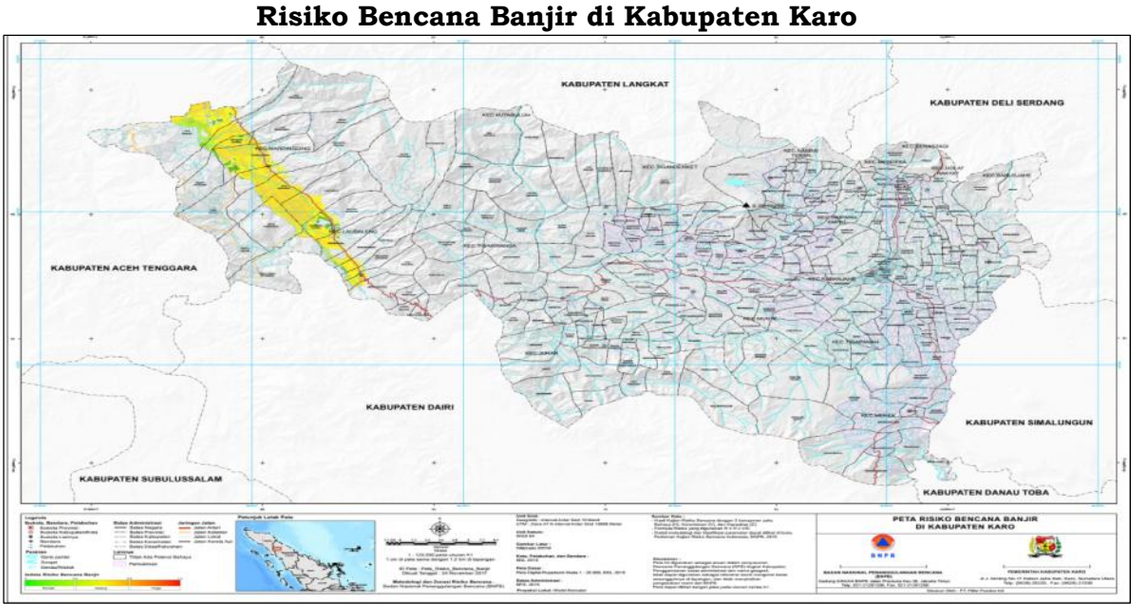


*Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022*

### ❖ Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh kosentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa

aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai.

**Tabel 2.5**
**Potensi Bahaya Banjir Bandang per Kecamatan di Kabupaten Karo**

| NO | KECAMATAN | BAHAYA | |
|---|---|---|---|
| | | Total Luas (ha) | Kelas |
| 1 | Juhar | 518 | Tinggi |
| 2 | Kabanjahe | 51 | Tinggi |
| 3 | Kutabuluh | 624 | Tinggi |
| 4 | Laubaleng | 7 | Tinggi |
| 5 | Mardingding | 397 | Tinggi |
| 6 | Munte | 465 | Tinggi |
| 7 | Payung | 160 | Tinggi |
| 8 | Simpang Empat | 54 | Tinggi |
| 9 | Tigabinanga | 515 | Tinggi |
| 10 | Tiganderket | 393 | Tinggi |
| **Total Kabupaten Karo** | | **3.185** | **Tinggi** |

*Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022*

Dari tabel tersebut di atas dapat menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana banjir bandang, diperoleh potensi luas bahaya banjir bandang di Kabupaten Karo di 10 (Sepuluh) kecamatan, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana banjir bandang di Kabupaten Karo total luas bahaya adalah **3.185 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak.

**Peta 2.5**
**Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Karo**

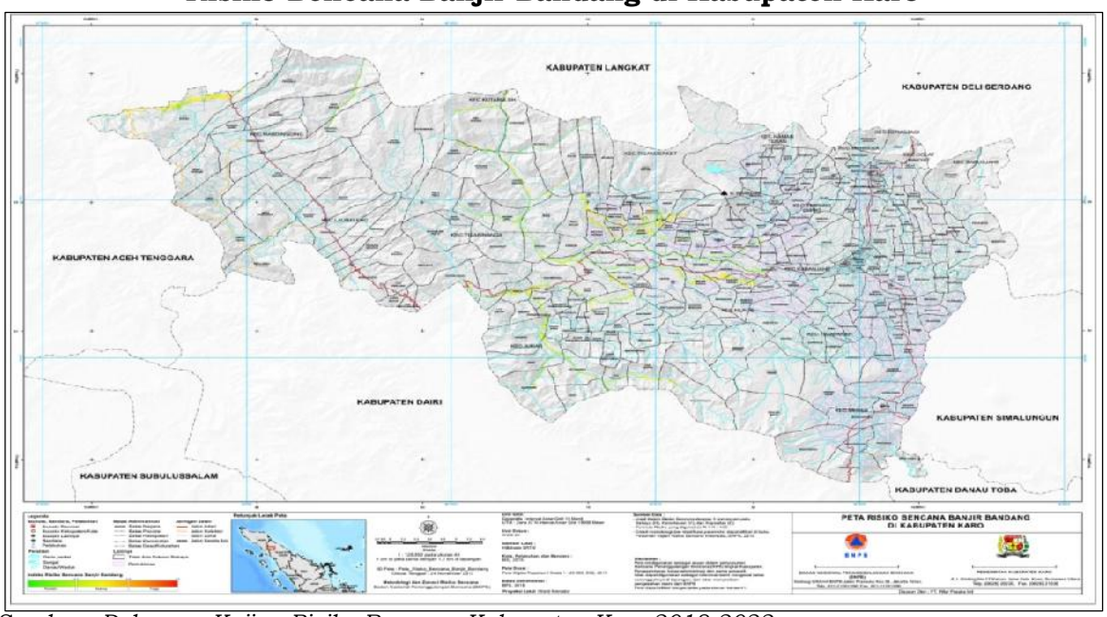


*Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022*

❖ **Cuaca Ekstrim**

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Potensi bahaya cuaca Ekstrim per kecamatan di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.6**
**Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim per Kecamatan di Kabupaten Karo**

| NO | KECAMATAN | BAHAYA | |
|---|---|---|---|
| | | TOTAL LUAS (HA) | KELAS |
| 1 | Barusjahe | 12.267 | Tinggi |
| 2 | Berastagi | 3.050 | Tinggi |
| 3 | Dolat Rakyat | 3.225 | Tinggi |
| 4 | Juhar | 13.789 | Tinggi |
| 5 | Kabanjahe | 4.465 | Tinggi |
| 6 | Kutabuluh | 11.153 | Tinggi |
| 7 | Laubaleng | 16.620 | Tinggi |
| 8 | Mardingding | 17.910 | Tinggi |
| 9 | Merdeka | 4.393 | Tinggi |
| 10 | Merek | 7.292 | Tinggi |
| 11 | Munte | 11.326 | Tinggi |
| 12 | Naman Teran | 6.884 | Tinggi |
| 13 | Payung | 4.517 | Tinggi |
| 14 | Simpang Empat | 9.346 | Tinggi |
| 15 | Tigabinanga | 14.277 | Tinggi |
| 16 | Tiganderket | 5.371 | Tinggi |
| 17 | Tigapanah | 18.684 | Tinggi |
| **Total Kabupaten Karo** | | **164.569** | **Tinggi** |

*Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022*

Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrim tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Karo, sebagaimana tabel tersebut di atas dapat menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana cuaca ekstrim diperoleh bahwa potensi luas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Karo terdapat di 17 kecamatan dan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Karo total luas bahaya adalah **164.569 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan

kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Karo dapat dilihat sebagai mana peta berikut.

**Peta 2.6**
**Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Karo**

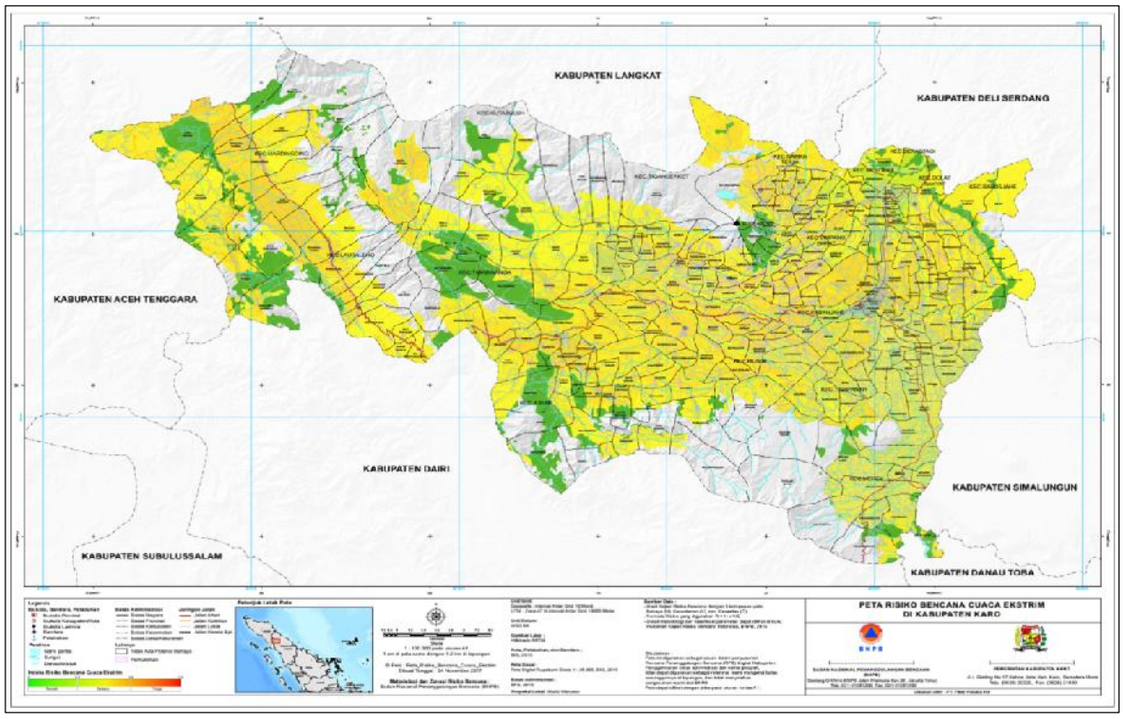


*Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022*

## ❖ Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan (*BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id*).

Luas bahaya gempa bumi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.7**
**Potensi Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan di Kabupaten Karo**

| NO | KECAMATAN | BAHAYA | |
|---|---|---|---|
| | | TOTAL LUAS (HA) | KELAS |
| 1 | Barusjahe | 12.804 | Sedang |
| 2 | Berastagi | 3.050 | Sedang |
| 3 | Dolat Rakyat | 3.225 | Sedang |
| 4 | Juhar | 21.857 | Tinggi |
| 5 | Kabanjahe | 4.465 | Sedang |
| 6 | Kutabuluh | 19.569 | Tinggi |
| 7 | Laubaleng | 25.260 | Tinggi |
| 8 | Mardingding | 26.710 | Tinggi |
| 9 | Merdeka | 4.417 | Sedang |
| 10 | Merek | 12.551 | Tinggi |
| 11 | Munte | 12.564 | Sedang |

| NO | KECAMATAN | BAHAYA | |
|---|---|---|---|
| | | TOTAL LUAS (HA) | KELAS |
| 12 | Naman Teran | 8.782 | Sedang |
| 13 | Payung | 4.725 | Sedang |
| 14 | Simpang Empat | 9.348 | Sedang |
| 15 | Tigabinanga | 16.039 | Tinggi |
| 16 | Tiganderket | 8.675 | Sedang |
| 17 | Tigapanah | 18.684 | Sedang |
| **Total Kabupaten Karo** | | **212.723** | **Tinggi** |

*Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022*

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana gempa bumi di Kabupaten Karo terdapat di 17 (Tujuh belas) kecamatan dan berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut sedangkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana gempa bumi di Kabupaten Karo adalah **212.723 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak. Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karo dapat dilihat pada pada peta berikut.

**Peta 2.7**
**Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karo**

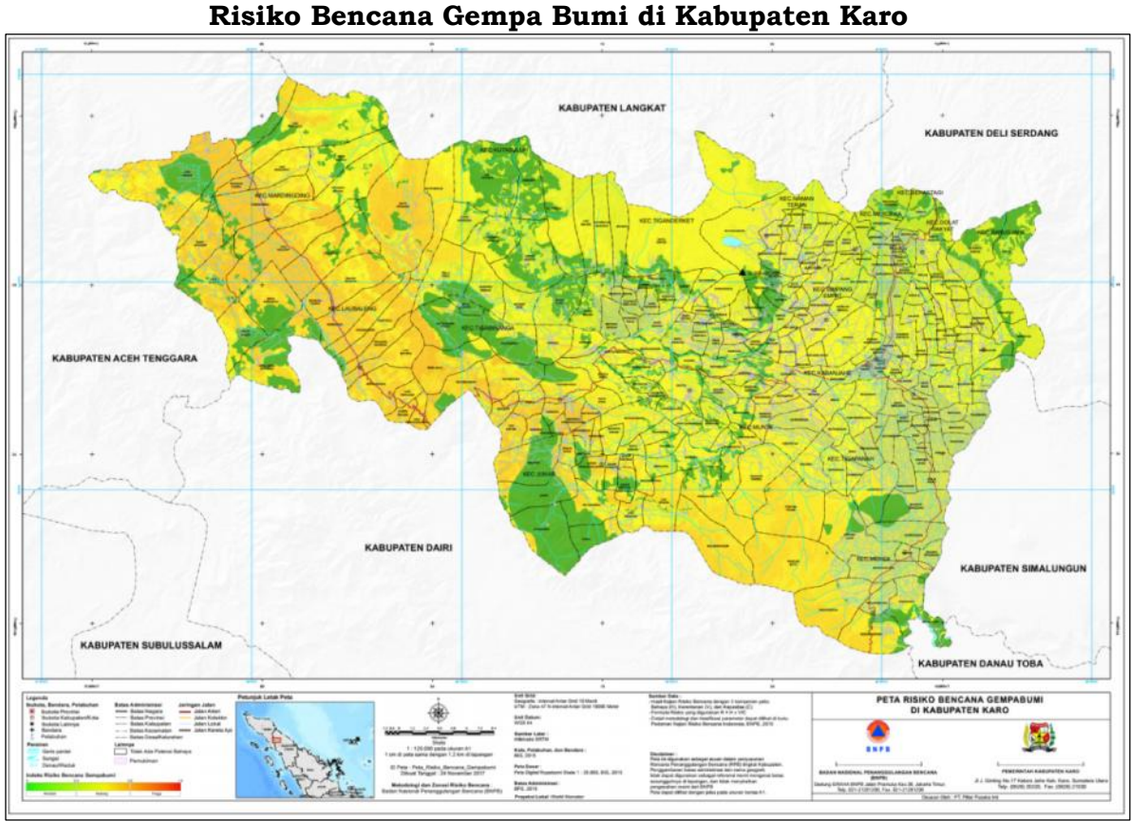


*Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022*

❖ **Letusan Gunung Api Sibayak dan Sinabung**

Letusan gunung api bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun dan banjir lahar (*Definisi dan Jenis Bencana, BNPB*). Paramater yang digunakan untuk menghitung luas bahaya letusan gunung api antara lain zona aliran (aliran lava, aliran piroklastik, gas beracun, lahar erupsi, dan suage), dan zona jatuhan (jatuhan piroklastik). Hasil dari pengkajian potensi bahaya berdasarkan parameter tersebut menentukan kelas bahaya setiap wilayah Kabupaten Karo. Maka diperoleh hasil kajian bahaya letusan Gunung Api Sibayak dan Sinabung untuk Kabupaten Karo seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.8**
**Potensi Bahaya di Gunung Api Sinabung dan Sibayak per Kecamatan di Kabupaten Karo**

| NO | KECAMATAN | BAHAYA | |
|---|---|---|---|
| | | **Total Luas (Ha)** | **Kelas** |
| ***Letusan Gunung Api Sibayak*** | | | |
| 1 | Berastagi | 1.042 | Rendah |
| 2 | Merdeka | 7.389 | Sedang |
| 3 | Naman Teran | 1.679 | Tinggi |
| **Total Kabupaten Karo** | | **10.110** | **Tinggi** |
| ***Letusan Gunung Api Sinabung*** | | | |
| 1 | Kabanjahe | 144 | Rendah |
| 2 | Kutabuluh | 31 | Rendah |
| 3 | Merdeka | 90 | Rendah |
| 4 | Munte | 444 | Rendah |
| 5 | Naman Teran | 13.687 | Tinggi |
| 6 | Payung | 14.771 | Tinggi |
| 7 | Simpang Empat | 8.812 | Tinggi |
| 8 | Tigabinanga | 12 | Rendah |
| 9 | Tiganderket | 6.639 | Tinggi |
| **Total Kabupaten Karo** | | **44.635** | **Tinggi** |

*Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022*

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana Gunung Api Sibayak dan Sinabung, diketahui potensi luas bahaya letusan Gunung Api Sibayak tersebar di 3 (Tiga) kecamatan dan Gunung Api Sinabung pada 9 (Sembilan) kecamatan. Berdasarkan luas dan kelas bahaya, dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana letusan Gunung Api Sibayak adalah

**10.110 ha** yang berada pada kelas **tinggi** dan luas bencana Gunung Api Sinabung adalah **44.635 ha** yang berada pada kelas **tinggi**.

❖ **Longsor**

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (*BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id*). Faktor utama penyebab terjadinya tanah longsor adalah jenis tanah pada lapisan atas permukaan (*top soil*), vegetasi penutup, kemiringan lereng, dan tinggi rendahnya curah hujan.

Dari parameter bahaya tanah longsor tersebut, maka dapat ditentukan potensi luas bahaya terpapar bencana tanah longsor per kecamatan di Kabupaten Karo. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya tanah longsor di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.9**
**Potensi Bahaya di Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Karo**

| NO | KECAMATAN | BAHAYA | |
|---|---|---|---|
| | | TOTAL LUAS (HA) | KELAS |
| 1 | Barusjahe | 6.438 | Sedang |
| 2 | Berastagi | 1.101 | Sedang |
| 3 | Dolat Rakyat | 1.172 | Sedang |
| 4 | Juhar | 14.992 | Sedang |
| 5 | Kabanjahe | 373 | Sedang |
| 6 | Kutabuluh | 15.032 | Sedang |
| 7 | Laubaleng | 16.257 | Sedang |
| 8 | Mardingding | 16.570 | Sedang |
| 9 | Merdeka | 2.434 | Sedang |
| 10 | Merek | 4.634 | Sedang |
| 11 | Munte | 3.038 | Sedang |
| 12 | Naman Teran | 3.770 | Sedang |
| 13 | Payung | 1.366 | Sedang |
| 14 | Simpang Empat | 1.794 | Sedang |
| 15 | Tigabinanga | 8.756 | Sedang |
| 16 | Tiganderket | 4.426 | Sedang |
| 17 | Tigapanah | 1.694 | Sedang |
| **Total Kabupaten Karo** | | **103.845** | **Sedang** |

*Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022*

Tabel tersebut diatas menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana tanah longsor. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya tanah longsor di Kabupaten Karo terdapat di 17 (tujuh belas) kecamatan seperti yang tertera pada tabel di atas. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas wilayah yang

berpotensi mengalami bencana tanah longsor di Kabupaten Karo, total luas bahaya adalah **103.845 ha** yang berada pada kelas **sedang**.

### 2.1.1.4. Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Secara demografi, pada tahun 2022 Penduduk Kabupaten Karo berjumlah 414.429 jiwa yang mendiami wilayah seluas 2.127,25 km². Kepadatan penduduk diperkirakan sebesar 195 jiwa/km². Laju Pertumbuhan Penduduk Karo adalah sebesar 1,31 persen per tahun.

Jumlah desa, luas wilayah dan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.10**
**Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2022**

| Kecamatan | | Penduduk (ribu) | Persentase Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | Kepadatan Penduduk per km2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mardingding | 20 470 | 4,94 | 1,44 | 77 |
| 20 | Laubaleng | 21 173 | 5,11 | 1,4 | 84 |
| 30 | Tigabinanga | 22 803 | 5,5 | 1,05 | 142 |
| 40 | Juhar | 15 034 | 3,63 | 0,98 | 69 |
| 50 | Munte | 23 478 | 5,67 | 1,38 | 187 |
| 60 | Kutabuluh | 12 972 | 3,13 | 1,61 | 66 |
| 70 | Payung | 12 483 | 3,01 | 1,1 | 264 |
| 71 | Tiganderket | 14 767 | 3,56 | 0,87 | 170 |
| 80 | Simpang Empat | 21 736 | 5,24 | 1,04 | 233 |
| 81 | Naman Teran | 14 933 | 3,6 | 1,21 | 170 |
| 82 | Merdeka | 15 985 | 3,86 | 1,44 | 362 |
| 90 | Kabanjahe | 75 387 | 18,19 | 1,37 | 1 688 |
| 100 | Berastagi | 49 197 | 11,87 | 1,13 | 1 613 |
| 110 | Tigapanah | 35 143 | 8,48 | 1,43 | 188 |
| 111 | Dolat Rayat | 10 132 | 2,44 | 1,58 | 314 |
| 120 | Merek | 23 672 | 5,71 | 2,17 | 189 |
| 130 | Barusjahe | 25 064 | 6,05 | 0,97 | 196 |
| **Jumlah** | | **414 429** | **100** | **1,31** | **195** |

*Sumber: BPS Karo, 2023*

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Kabanjahe, dengan kepadatan penduduk sebanyak 1.688 jiwa/km². Kemudian diikuti oleh Kecamatan Berastagi sebanyak 1.613 jiwa/km². Kepadatan penduduk

terdapat di kecamatan tersebut, disebabkan karena Kecamatan Kabanjahe sebagai ibukota kabupaten yang merupakan pusat kegiatan jasa dan perdagangan di wilayah Kabupaten Karo, kemudian Kecamatan Berastagi sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara, serta banyaknya kegiatan jasa dan perhotelan, sehingga banyak masyarakat berdomisili untuk melakukan aktivitas kegiatan bidang pariwisata.

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari 2 (dua) fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya dan olahraga. Masing-masing fokus tersebut akan dibahas pada bagian di bawah ini.

#### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Karo, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial. Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup pertumbuhan PDRB, tingkat inflasi, perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karo, pendapatan regional dan penduduk di atas garis kemiskinan.

**1) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentuyang dihitung berdasarkan 17 (Tujuh belas) sektor strategis. PDRB dapat disajikan berdasarkan atas harga berlaku (PDRB ADHB) dan berdasarkan atas harga konstan (PDRB ADHK). PDRB atas harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar. PDRB atas dasar harga konstan akan memperlihatkan perkembangan produktivitas secara rill karena pengaruh perubahan harga (inflasi/deflasi) sudah dikeluarkan. Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.11**
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022 (dalam Miliar Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Kabupaten Karo**

| No | Sektor | 2018 | | 2019 | | 2020* | | 2021* | | 2022** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Milyar Rp) | % | (Milyar Rp) | % | (Milyar Rp) | % | (Milyar Rp) | % | (Milyar Rp) | % |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 10.411,28 | 54,17 | 10.964,8 | 53,27 | 11.268,55 | 53,72 | 11.779,76 | 53,98 | 13 005,30 | 54,24 |
| 2 | Pertambangan & Penggalian | 43,28 | 0,23 | 46,15 | 0,22 | 43,60 | 0,21 | 45,13 | 0,21 | 49,09 | 0,20 |
| 3 | Industri Pengolahan | 703,37 | 3,66 | 763,53 | 3,71 | 779,12 | 3,71 | 829,08 | 3,80 | 923,06 | 3,85 |
| 4 | Pengadaan Listrik, Gas, | 13,31 | 0,07 | 14,55 | 0,07 | 15,16 | 0,07 | 15,86 | 0,07 | 16,9 | 0,07 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 16,13 | 0,08 | 17,43 | 0,08 | 17,68 | 0,08 | 17,96 | 0,08 | 18,52 | 0,08 |
| 6 | Konstruksi | 1.436,74 | 7,47 | 1.569,1 | 7,62 | 1.558,61 | 7,43 | 1.605,89 | 7,36 | 1 728,21 | 7,21 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor | 2.019,26 | 10,51 | 2.212,37 | 10,75 | 2.217,78 | 10,57 | 2.370,49 | 10,86 | 2 668,59 | 11,13 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 874,1 | 4,55 | 948,56 | 4,61 | 948,64 | 4,52 | 969,86 | 4,44 | 1 107,80 | 4,62 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 495,5 | 2,58 | 540,5 | 2,63 | 537,68 | 2,56 | 546,07 | 2,50 | 589,96 | 2,46 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 143,21 | 0,75 | 156,34 | 0,76 | 165,95 | 0,79 | 181,03 | 0,83 | 198,46 | 0,83 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 263,076 | 1,37 | 284,02 | 1,38 | 284,02 | 1,35 | 313,91 | 1,44 | 354,53 | 1,48 |
| 12 | Real Estate | 654,17 | 3,40 | 713,56 | 3,47 | 733,56 | 3,50 | 743,09 | 3,40 | 813,29 | 3,39 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 39,42 | 0,21 | 42,83 | 0,21 | 42,73 | 0,20 | 43,71 | 0,20 | 47,85 | 0,20 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib | 1.151,88 | 5,99 | 1.254,02 | 6,09 | 1.283,32 | 6,12 | 1.259,38 | 5,77 | 1 274,18 | 5,31 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 448,94 | 2,34 | 500,38 | 2,43 | 510,59 | 2,43 | 530,66 | 2,43 | 557,11 | 2,32 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 248,51 | 1,29 | 270,65 | 1,31 | 279,72 | 1,33 | 278,51 | 1,28 | 296,11 | 1,24 |
| 17 | Jasa Lainnya | 258,72 | 1,35 | 285,93 | 1,39 | 287,88 | 1,37 | 293,73 | 1,35 | 326,61 | 1,36 |
| | **PDRB** | **19.220,88** | **100** | **20.584,73** | **100** | **20.974,57** | **100** | **21.824,14** | **100** | **23 975,57** | **100** |

*Sumber: BPS Karo, 2023*
**Angka sementara*
***Angka sangat sementara*

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku untuk tahun 2018-2022 cenderung meningkat setiap tahunnya yaitu dari Rp19.220,88 miliar pada tahun 2018 terus meningkat hingga menjadi Rp23.975,57 miliar pada tahun 2022. Terdapat 3 (Tiga) lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB ADHB tahun 2022 yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi.

Perkembangan PDRB ADHB juga memperlihatkan kecenderungan yang sama dengan PDRB ADHK.

**Tabel 2.12**
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022 (dalam Miliar Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Karo**

| No | Sektor | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021* | | 2022** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Milyar Rp) | % | (Milyar Rp) | % | (Milyar Rp) | % | (Milyar Rp) | % | (Milyar Rp) | % |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 7.729,99 | 56,24 | 7.883,42 | 54,84 | 7.876,71 | 55,23 | 8106,36 | 53,98 | 8 421,76 | 54,24 |
| 2 | Pertambangan & Penggalian | 33,72 | 0,25 | 36,21 | 0,25 | 32,56 | 0,23 | 33,28 | 0,21 | 34,91 | 0,20 |
| 3 | Industri Pengolahan | 437,59 | 3,18 | 480,70 | 3,34 | 467,42 | 3,28 | 480,79 | 3,80 | 506,93 | 3,85 |
| 4 | Pengadaan Listrik, Gas | 12,41 | 0,09 | 13,33 | 0,09 | 13,83 | 0,10 | 14,37 | 0,07 | 14,96 | 0,07 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 11,21 | 0,08 | 12,05 | 0,08 | 12,20 | 0,09 | 12,25 | 0,08 | 12,52 | 0,08 |
| 6 | Konstruksi | 924,97 | 6,73 | 999,22 | 6,95 | 958,86 | 6,72 | 960,59 | 7,36 | 988,31 | 7,21 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor | 1389,20 | 10,11 | 1.485,19 | 10,33 | 1.458,89 | 10,23 | 1519,81 | 10,86 | 1 604,46 | 11,13 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 630,96 | 4,59 | 682,2 | 4,75 | 658,7 | 4,62 | 654,79 | 4,44 | 711,77 | 4,62 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 346,84 | 2,52 | 375,37 | 2,61 | 369,98 | 2,59 | 375,29 | 2,50 | 396,89 | 2,46 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 131,24 | 0,95 | 142,04 | 0,99 | 148,72 | 1,04 | 158,76 | 0,83 | 169 | 0,83 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 172,02 | 1,25 | 184,37 | 1,28 | 184,42 | 1,29 | 195,29 | 1,44 | 203,65 | 1,48 |
| 12 | Real Estate | 435,31 | 3,17 | 470,86 | 3,28 | 475,93 | 3,34 | 469,35 | 3,40 | 490,27 | 3,39 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 26,32 | 0,19 | 28,38 | 0,20 | 27,37 | 0,19 | 27,36 | 0,20 | 28,57 | 0,20 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib | 771,63 | 5,61 | 836,03 | 5,82 | 831,03 | 5,83 | 815,96 | 5,77 | 818,69 | 5,31 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 344,91 | 2,51 | 373,04 | 2,59 | 373,09 | 2,62 | 386,25 | 2,43 | 404,73 | 2,32 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 168,52 | 1,23 | 182,3 | 1,27 | 182,25 | 1,28 | 179,49 | 1,28 | 187,49 | 1,24 |
| 17 | Jasa Lainnya | 177,32 | 1,29 | 191,59 | 1,33 | 189,51 | 1,32 | 192,34 | 1,35 | 202,63 | 1,36 |
| | **PDRB** | **13.744,17** | **100,00** | **14.376,28** | **100,00** | **14.261,47** | **100,00** | **14.582,33** | **100,00** | **15 197,52** | **100** |

*Sumber: BPS Karo, 2023*
**Angka sementara*
***Angka sangat sementara*

Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Karo pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp13.744,17 miliar terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi sebesar Rp15.197,52 miliar. Kontribusi lapangan usaha utama terhadap PDRB ADHK sama dengan PDRB ADHB mencakup 3 (Tiga) sektor yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi.

**2) Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Dalam 5 (Lima) tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo cenderung fluktuatif. Penurunan yang sangat dominan terjadi pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Karo mengalami kontraksi dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB terkontraksi minus 0.80 persen, penurunan pertumbuhan ini akibat pandemi *Covid-19* sehingga mengakibatkan penurunan yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang terkontraksi.

**Tabel 2.13**
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laju Pertumbuhan Ekonomi | 4,55 | 4,6 | -0,8 | 2.25 | 4,22 |

*Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2023 (diolah)*

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo memiliki pola pertumbuhan yang mirip. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 2.1**
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo, Sumut dan Indonesia**
**Tahun 2018-2022**

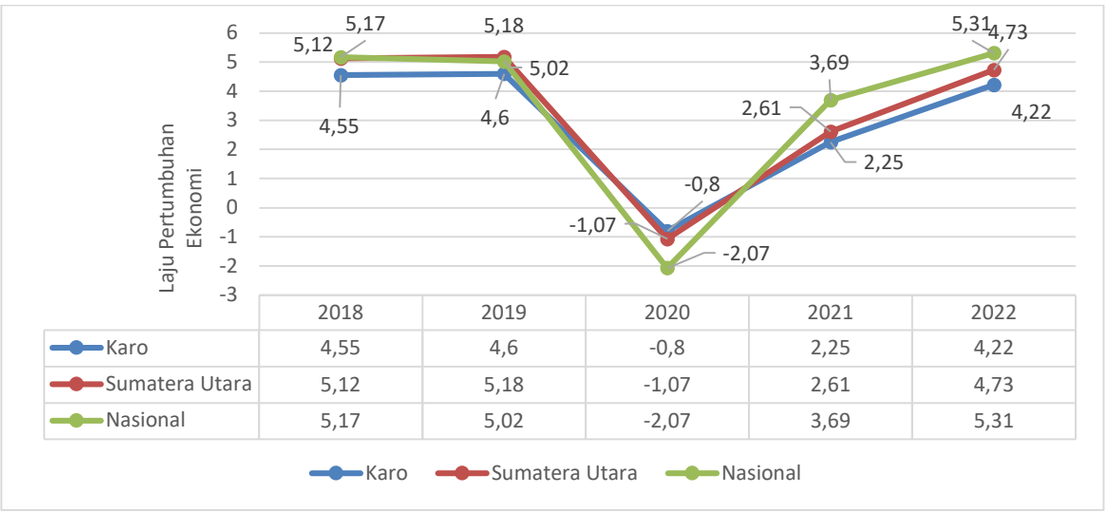


*Sumber : BPS, 2023 (diolah)*

Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo tercatat pada tahun 2022 sebesar 4,22 persen berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,73 persen dan nasional sebesar 5,31 persen.

Selanjutnya, untuk melihat perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo dengan kabupaten tetangga yang berada pada dataran tinggi bukit barisan Sumatera Utara dapat dilihat melalui tabel berikut.

### 3) PDRB per Kapita Kabupaten Karo

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita dapat digunakan sebagai barometer bagi tingkat kemakmuran suatu daerah, meskipun data tersebut belum dapat sepenuhnya digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan.

**Tabel 2.14**
**PDRB Perkapita Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | ADH BERLAKU (RP) | ADH KONSTAN (RP) |
|---|---|---|
| 2018 | 46.917.380 | 33.548.970 |
| 2019 | 49.028.530 | 34.241.300 |
| 2020 | 51.961.250 | 35.330.580 |
| 2021 | 53.349.720 | 35.646.920 |
| 2022 | 57.852.057 | 36.670.986 |

*Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2023 (diolah)*

PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu sebesar Rp46.917.380 menjadi Rp57.852.057. Sama halnya dengan PDRB perkapita atas dasar harga konstan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan juga menunjukkan peningkatan yaitu sebesar Rp33.548.970 di tahun 2018 dan mencapai Rp36.670.986 di tahun 2022.

Gambaran PDRB perkapita tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat periode tahun 2018 sampai 2022 berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun Harga Konstan cenderung meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara riil terjadi peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Karo yang dibarengi dengan pengendalian laju pertambahan penduduk.

### 4) Gini Ratio

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan

penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Koefisien Gini Kabupaten pada periode tahun 2018 sampai 2022 fluktuatif setiap tahunnya. Akan tetapi, secara umum dapat disimpulkan dari periode 5 (lima) tahun tersebut menunjukkan hasil yang positif yaitu penurunan gini rasio dari angka 0,268 di tahun 2018 menjadi 0,236 di tahun 2022.

**Tabel 2.15**
**Rasio Gini Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gini Ratio** | 0,268 | 0,264 | 0,271 | 0,233 | 0,236 |

Nilai Rasio Gini Kabupaten Karo tersebut dapat diartikan berada pada kategori rendah atau semakin merata. Pemerataan pembangunan perlu terus ditingkatkan dengan fokus pembangunan pada wilayah yang relatif tertinggal. Untuk melihat perkembangan Rasio Gini di Kabupaten Karo dapat dilihat grafik sebagai berikut:

**Grafik 2.2**
**Gini Rasio Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

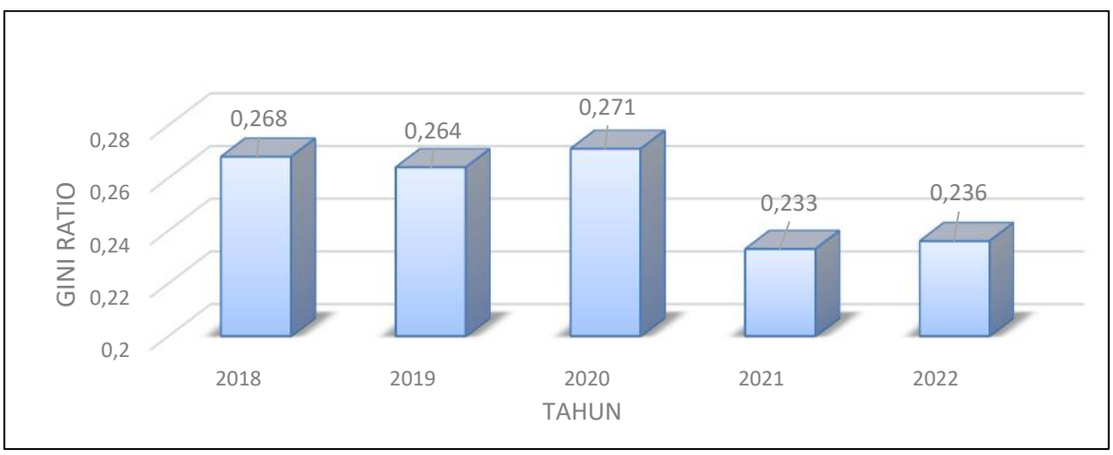


*Sumber: BPS Sumatera Utara Tahun 2023 (diolah)*

**5) Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan**

Perkembangan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Karo dari tahun 2018-2022 berlangsung fluktuatif. Secara *trend* dalam periode 5 (lima) tahun tersebut menunjukkan nilai positif dimana persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dari tahun 2018 sebesar 8,67% menurun menjadi 8,17% di tahun 2022.

Peningkatan persentase kemiskinan terjadi akibat dampak bencana erupsi Gunung Sinabung yang merusak lahan dan tanaman pertanian sehingga produksi pertanian menjadi menurun yang berdampak pada penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat serta dampak *Covid-19.*

**Grafik 2.3**
**Perkembangan Persentase Penduduk Miskin**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

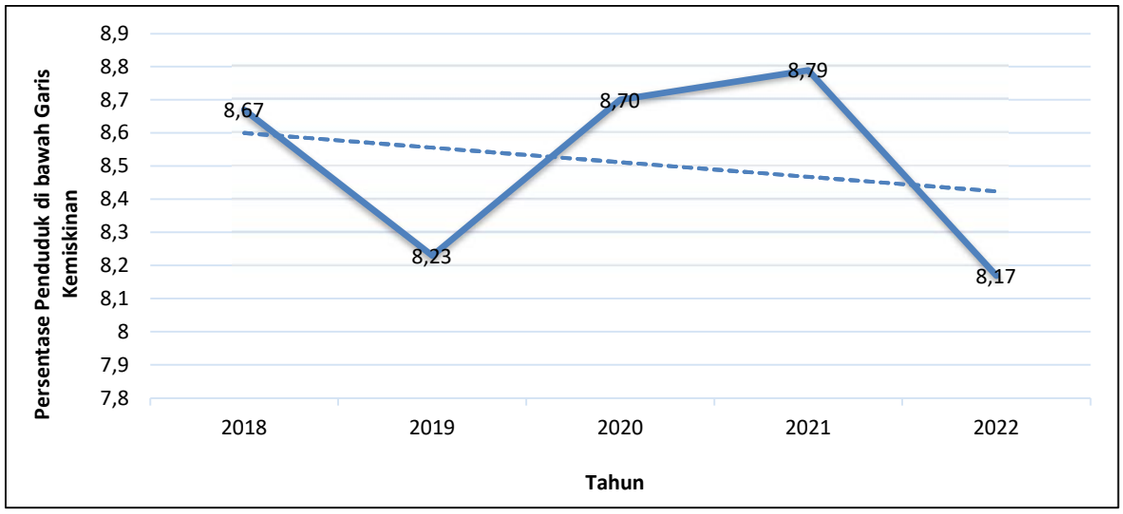


*Sumber: BPS Kab. Karo, 2023*

Kondisi tingkat kemiskinan di Kabupaten Karo pada tahun 2022 sebesar 8,17%, tingkat kemiskinan ini berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat kemiskinan sebesar 8,42%. Tingkat kemiskinan Kabupaten Karo berada di urutan ke 11 (sebelas) terendah diantara 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Persentase tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Nias Barat sebesar 24,75% dan terendah di Kabupaten Deli Serdang sebesar 3,62%.

**Grafik 2.4**
**Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karo**
**Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2022**

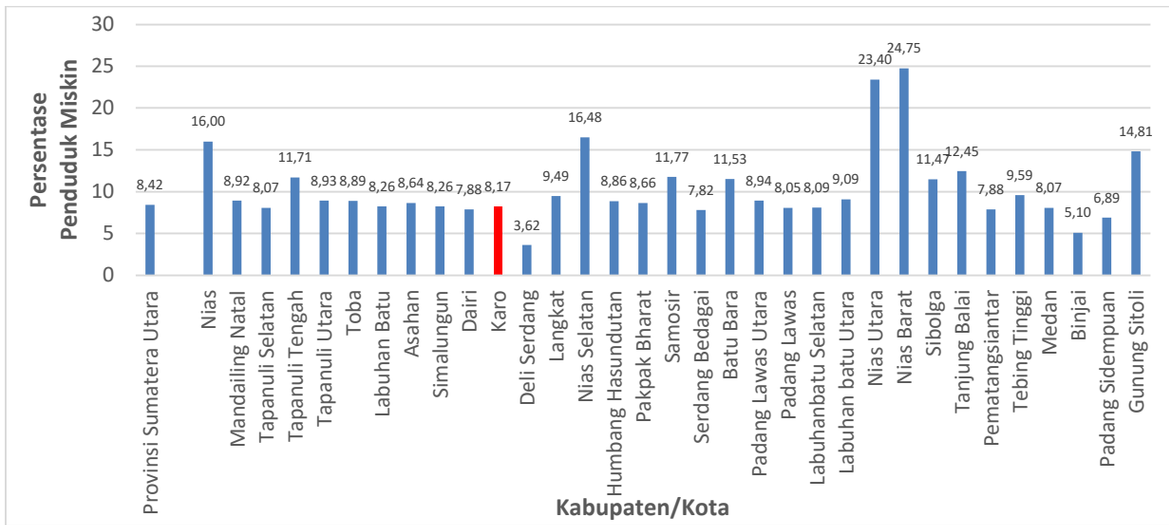


*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023 (diolah)*

**6) Indeks Pembangunan Manusia**

Untuk melihat suatu negara maju, berkembang atau terbelakang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (Tiga) dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Perkembangan IPM Kabupaten Karo tahun 2018-2022 disajikan pada grafik berikut.

**Grafik 2.5**
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

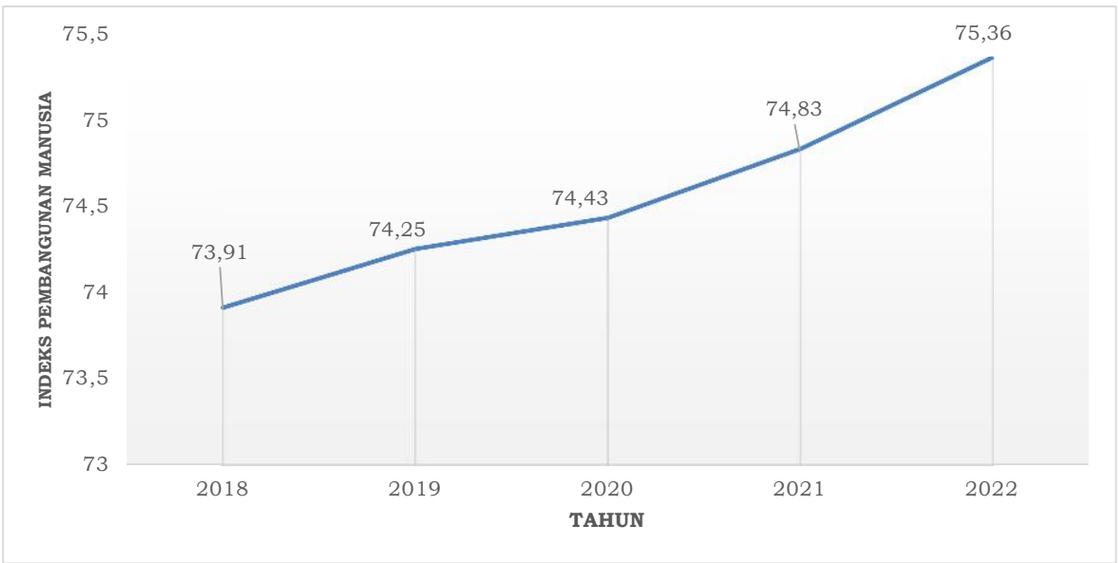


*Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2023 (Diolah)*

Grafik tersebut menunjukkan bahwa angka IPM Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut terlihat dari angkat IPM Kabupaten Karo tahun 2018 sebesar 73,91 menjadi 75,36 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Karo mengalami peningkatan baik dari pengetahuan, kesehatan maupun standar hidup layak.

Jika dilihat posisi relatif IPM Kabupaten Karo dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Utara, posisi IPM Kabupaten Karo berada diurutan ke-8 (delapan) terbaik diantara 33 (Tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Sumatera Utara. IPM paling tinggi berada di Kota Medan sebesar 81,76 sedangkan paling rendah berada di Kabupaten Nias Barat sebesar 62,93. Jika dibandingkan dengan daerah sekawasan dataran tinggi, kabupaten yang memiliki IPM di atas Kabupaten Karo yaitu Kabupaten Toba yang memiliki IPM sebesar 75,96 poin.

**Grafik 2.6**
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo**
**Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2022**

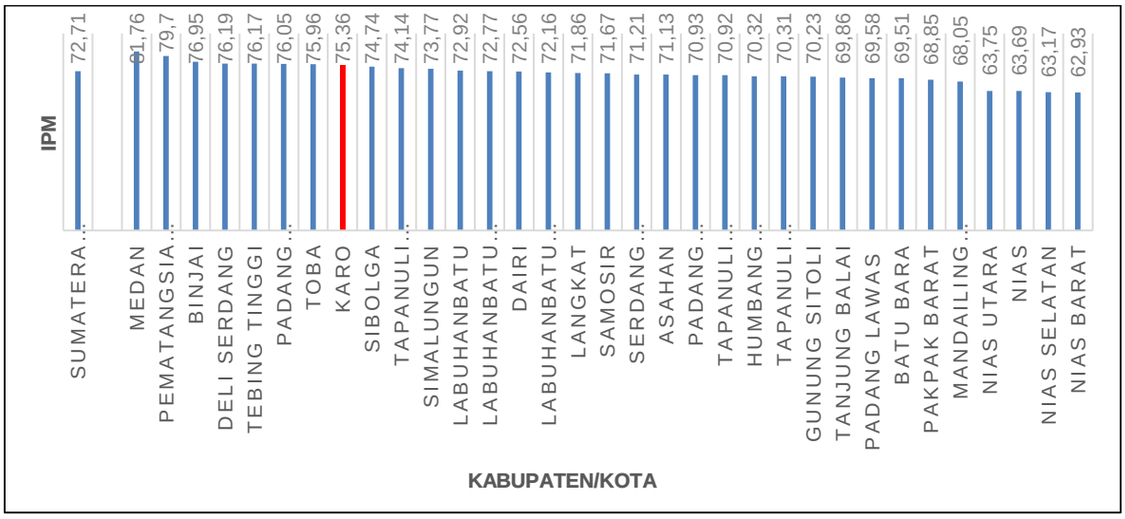


*Sumber : BPS, 2023 (Diolah)*

IPM Kabupaten Karo sebesar 75,36 berada di atas capaian IPM Provinsi Sumatera Utara sebesar 72,71. IPM Kabupaten Karo tahun 2022 tersebut berada pada IPM kategori sedang dan untuk menuju IPM tinggi di atas 80% pemerintah perlu kerja keras dan membuat strategi dalam meningkatan kualitas 3 (tiga) dimensi dasar komponen IPM yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak.

### 7) Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender

Salah satu indikasi terciptanya kesetaraan gender adalah kontribusi yang sama dalam sektor publik antara laki-laki dan perempuan. Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang dihitung oleh UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari 3 (tiga) indeks yang dibentuk dari 3 (tiga) komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.

Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender

dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Dengan fenomena tersebut maka sebagai sasaran pendidikan keluarga adalah meningkatkan pemahaman keluarga terhadap gender, maka dipandang perlu untuk memberikan pelayanan pendidikan keluarga berbasis gender terhadap masyarakat. Data Indeks Pembangunan Gender untuk mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan yang memiliki variabel sama dengan IPM, artinya jika IPM tinggi maka Indeks Pembangunan Gender juga tinggi.

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karo tahun 2018 sebesar 96,27, pada tahun 2019 meningkat menjadi 96,31 tetapi pada tahun 2020 menurun menjadi 96,19, pada tahun 2021 menjadi 95,90 dan pada tahun 2022 menurun menjadi 96,38. Dari data dapat disimpulkan bahwa kualitas pembangunan perempuan terjadi fluktuasi dalam kurun waktu dua tahun terakhir (tahun 2020-2022), akan tetapi pada tahun 2022 merupakan peningkatan paling tinggi pada periode tersebut. Data perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 disajikan pada grafik di bawah.

**Grafik 2.7**
**Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

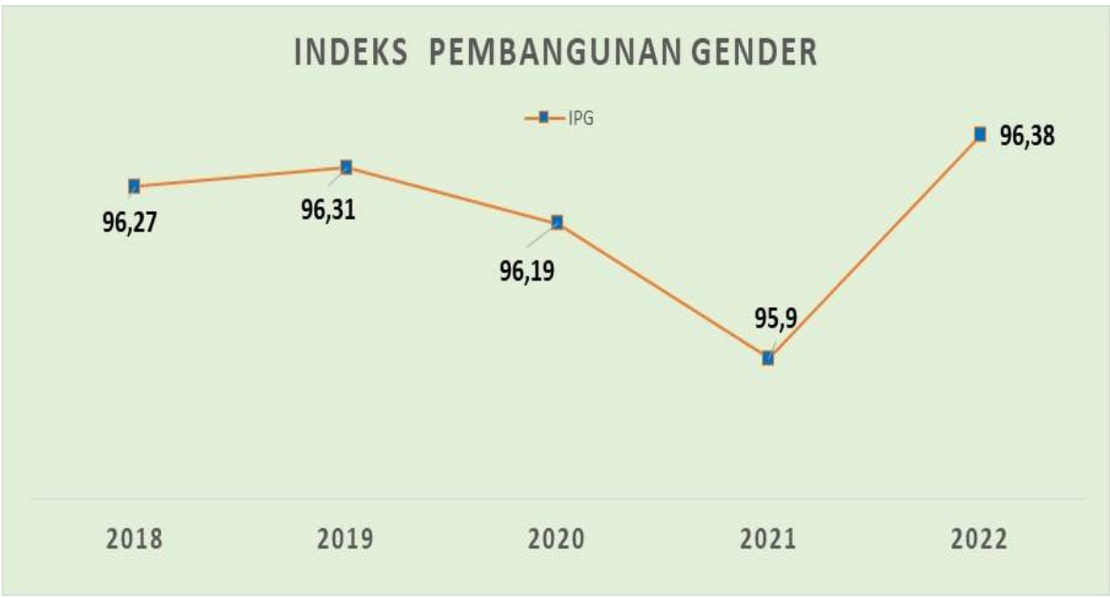


*Sumber : BPS, 2023*

Untuk Indeks Pemberdayaan Gender yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi

dan politik di Kabupaten Karo tahun 2018 sebesar 76,71, pada tahun 2019 menurun menjadi 75,32, pada tahun 2021 meningkat menjadi 81,53 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 82,28, berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya peningkatan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik di Kabupaten Karo. Data selengkapnya disajikan pada gambar berikut.

**Grafik 2.8**
**Indeks Development Gender Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

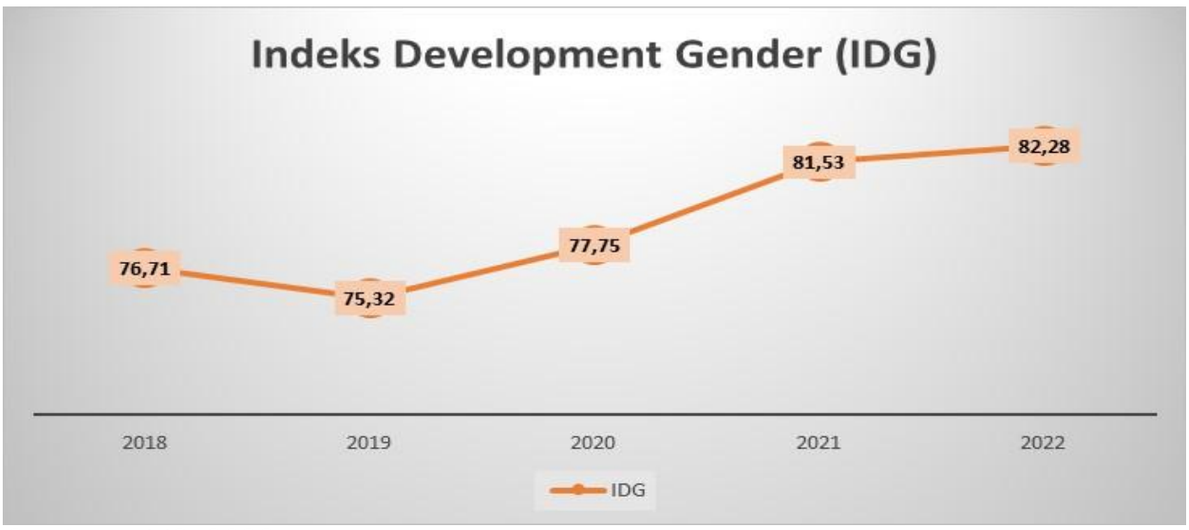


*Sumber : BPS, 2023*

### 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan masyarakat sebagai berikut.

**A. Pendidikan**

**Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah**

Berdasarkan BPS, rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 (enam) tahun, tamat SMP selama 9 (sembilan) tahun dan tamat SMA selama 12 (dua belas) tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Sedangkan harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan masyarakat mulai dari usia 7 (tujuh) tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari penduduk yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun ke atas.

**Tabel 2.16**
**Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah**
**Kabupaten Karo Tahun 2018–2022**

| NO | URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | 9,55 | 9,62 | 9,79 | 10,00 | 10,02 |
| 2 | Harapan Lama Sekolah (tahun) | 12,73 | 12,75 | 12,76 | 12,77 | 12,95 |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023*

Indikator rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Karo dari periode tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebesar 9,55 tahun dan diakhir periode tahun 2022 menjadi 10,02 tahun. Harapan lama sekolah pada tahun 2022 sebesar 12,95 tahun berarti secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 12,95 tahun atau hampir menamatkan kelas X.

Berikut disajikan grafik perkembangan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Karo pada tahun 2018-2022.

**Grafik 2.9**
**Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

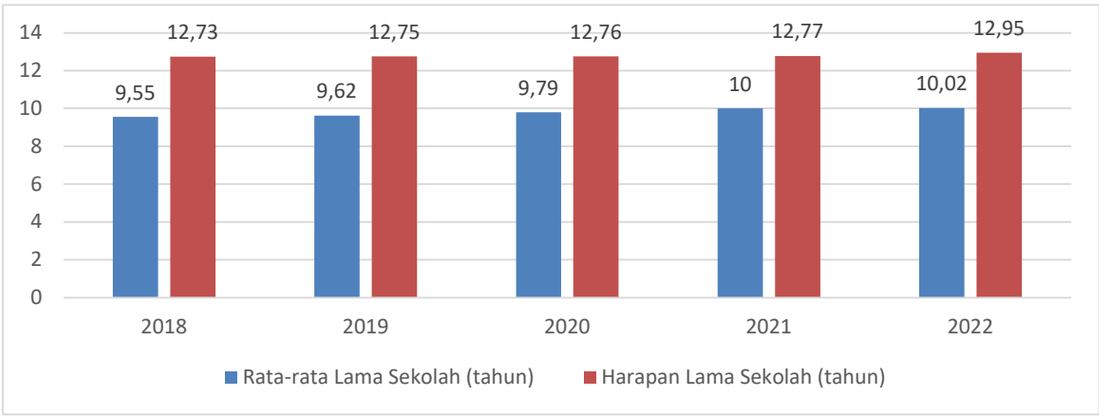


*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2022*

Selaras dengan indikator rata-rata lama sekolah, indikator harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022, yaitu 12,73 tahun di tahun 2018 dan 12,95 tahun di tahun 2022. Untuk indikator harapan lama sekolah pada tahun 2022 sebesar 12,95 dapat

diartikan secara rata-rata anak usia 7 (tujuh) tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,95 tahun atau setara dengan Diploma I.

**Grafik 2.10**
**Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2022**

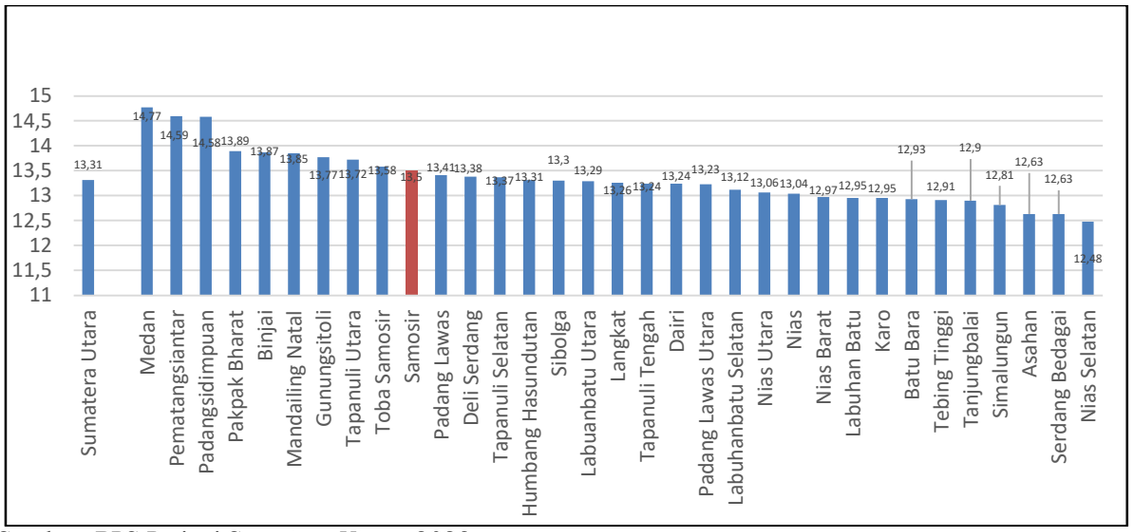


*Sumber: BPS Prvinsi Sumatera Utara, 2023*

Posisi relatif HLS Kabupaten Karo tahun 2022 adalah 12,95 tahun, berada diurutan ke-10 (sepuluh) dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Capaian harapan lama sekolah paling tinggi berada di Kota Medan sebesar 14,77 tahun dan yang paling rendah berada di Kabupaten Nias Selatan sebesar 12,48 tahun.

**Grafik 2.11**
**Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2022**

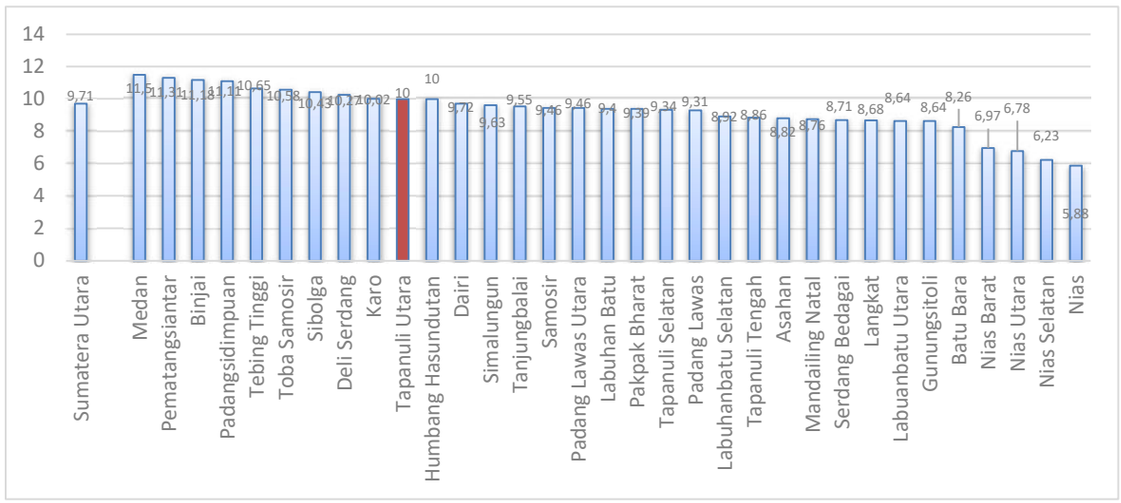


*Sumber: BPS, 2023*

Angka relatif rata-rata lama sekolah Kabupaten Karo tahun 2022 adalah 10,02 tahun, berada di urutan ke-10 (kesepuluh) dari 33 (tiga puluh

tiga) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Capaian rata-rata lama sekolah paling tinggi berada di Kota Medan sebesar 11,5 tahun dan yang paling rendah berada di Kabupaten Nias sebesar 5,88 tahun.

## B. Kesehatan

Indikator kesehatan adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Nilai tersebut dapat memberikan petunjuk atau indikasi tentang keadaan keseluruhan atau populasi tertentu atau sekelompok orang.

### 1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Angka harapan hidup Kabupaten Karo dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti yang terlihat pada grafik di bawah.

**Grafik 2.12**
**Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

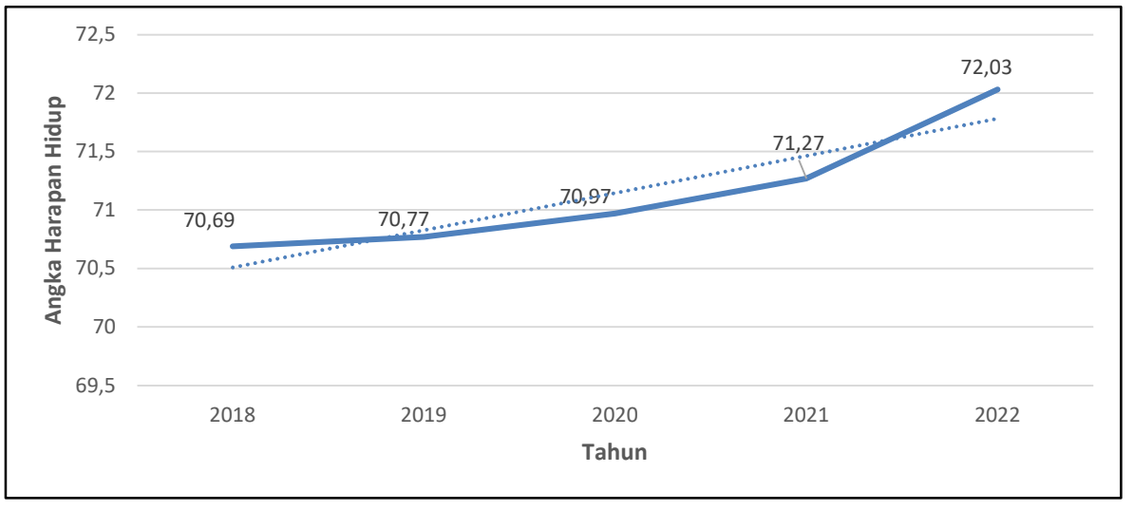


*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2019-2023*

Selama periode 5 (lima) tahunan, angka harapan hidup Kabupaten Karo tahun 2018 sebesar 70,69 tahun secara linear mengalami peningkatan menjadi 72,03 tahun di tahun 2022.

**Grafik 2.13**
**Posisi Relatif Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2022**

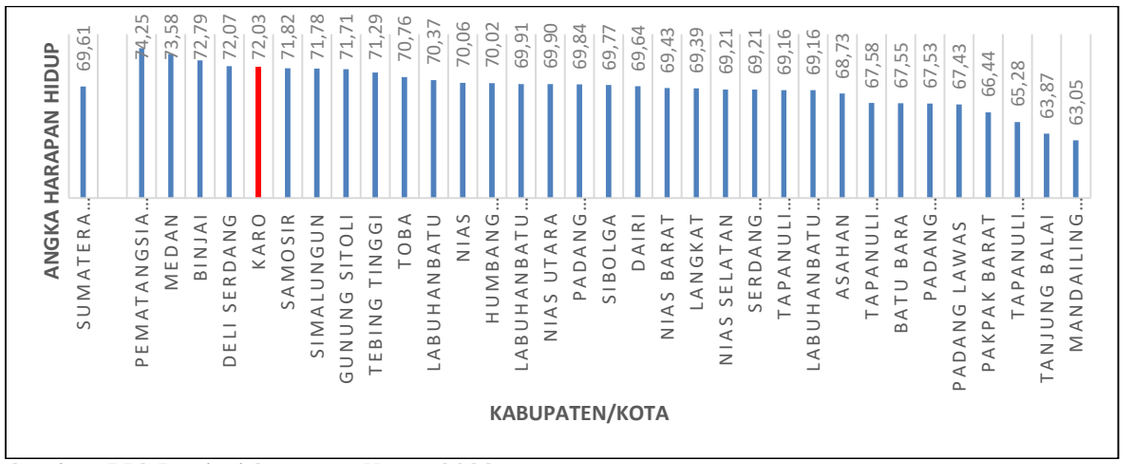


*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023*

Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2022 pada grafik tersebut berada pada posisi ke-5 (ke-lima) diantara 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Sumatera Utara. Angka harapan hidup Kabupaten Karo tersebut juga berada di atas rata-rata provinsi sebesar 69,61 tahun.

### 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga dapat diketahui dari pengelolaan kebudayaan dan olahraga dengan indikator meliputi jumlah grup kesenian, jumlah klub dan gedung olahraga. Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan seni dan budaya dan olah raga Kabupaten Karo tahun 2018-2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.17**
**Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Karo**
**Tahun 2018–2022**

3.

| NO | CAPAIAN PEMBANGUNAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah grup kesenian/10.000 penduduk | 0,314 | 0,314 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| 2 | Jumlah gedung kesenian/10.000 penduduk | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 3 | Jumlah klub olahraga/10.000 penduduk | 0,0078 | 0,0078 | 2,4 | 2,4 | 2,7 |
| 4 | Jumlah gedung olahraga/10.000 penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Sumber : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo*

**4. Seni Budaya**

Pembangunan bidang seni dan budaya di Kabupaten Karo ditujukan untuk mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Perkembangan bidang seni dan budaya sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat terutama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab dan berkualitas. Kabupaten Karo yang terdiri dari 17 kecamatan dan 269 desa/kelurahan, memiliki berbagai adat istiadat serta kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada di masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan daerah.

Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Karo perlu mendapat perhatian jika dilihat dari jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk dari tahun 2018-2020 tidak mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,314. Sedangkan tahun 2021-2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,80. Selanjutnya, Ketersediaan gedung kesenian tidak mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022 sebesar 0,026. Kondisi tersebut tentu membutuhkan sentuhan langsung dari pemerintah dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan dalam bidang seni dan budaya, baik melalui regulasi maupun program dan kegiatan yang memicu perkembangan seni dan budaya daerah. Perkembangan seni dan budaya tersebut diharapkan dapat memberi efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

**5. Olahraga**

Pembinaan keolahragaan diarahkan pada pengembangan berbagai cabang olahraga yang sudah tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Sasaran pengembangan tersebut adalah untuk membentuk manusia yang sportif, tangguh dan sehat disamping untuk pengembangan prestasi. Perkembangan olahraga di Kabupaten Karo, dilihat dari jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk pada tahun 2018-2020 cenderung *stagnan* sebesar 0,0078. Hal ini dikarenakan jumlah klub olahraga yang dibina tidak mengalami peningkatan. Tahun 2021-2022 jumlah klub olahraga yang dibina mengalami peningkatan sebesar 2,4. Permasalahan lainnya bahwa keberadaan klub olahraga tidak diiringi dengan pembangunan sarana olahraga, Kabupaten Karo belum memiliki gedung olahraga.

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

**A. Bidang Urusan Pendidikan**

Bidang pendidikan berperan strategis bagi penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mampu melakukan transformasi perubahan peradaban ke arah yang lebih baik. Selain itu, dengan berbekal sumber daya manusia berkualitas akan mampu mengelola dengan baik sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia masa depan ditentukan oleh keberhasilan bidang pendidikan.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk, tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut:

❖ **Pendidikan Anak Usia Dini**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal paling banyak terdapat pada usia dini dan pendidikan dasar adalah TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran yang terdapat di masjid dan Sekolah Minggu di gereja. Selain itu, terdapat juga berbagai jenis kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar dan sebagainya. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

**Tabel 2.18**
**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH SISWA PADA JENJANG TK/RA/PENITIPAN ANAK (JIWA) | JUMLAH ANAK USIA 4-6 TAHUN (JIWA) | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6.021 | 33.204 | 18,13 |
| 2019 | 5.798 | 33.544 | 17,28 |
| 2020 | 5.798 | 33.846 | 17,13 |
| 2021 | 5.798 | 33.846 | 17,13 |
| 2022 | 5.488 | 33.846 | 16,21 |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Karo, 2023*

Berdasarkan tabel di atas, persentase jumlah pendidikan anak usia dini Kabupaten Karo cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 persentase jumlah pendidikan anak usia dini adalah 18,13% mengalami penurunan sampai pada angka 16,21% di tahun 2022. Capaian target tersebut tentunya tidak terlepas dari kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada pendidikan anak usia dini.

❖ **Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah untuk melihat partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan (berapa pun usianya) sesuai dengan jenjang pendidikan sebagai salah satu indikator keberhasilan program pendidikan yang diselenggarakan. APK tingkat SD/MI di Kabupaten Karo tahun 2018 sebesar 107,03% sedangkan tahun 2022 meningkat menjadi 109,57%. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs tahun 2018 sebesar 88,67% dan tahun 2021 meningkat menjadi 92,78%.

**Tabel 2.19**
**Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SD/MI (%) | 107,03 | 107,80 | 106,58 | 106,58 | 109,57 |
| 2. | SMP/MTs (%) | 88,67 | 89,81 | 90,55 | 90,55 | 92,78 |

*Sumber: Karo Dalam Angka 2023 (BPS)*

Persentase nilai APK Kabupaten Karo pada jenjang SD/MI lebih besar dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Misalnya, pada tahun 2022 APK SD/MI sebesar 109,57% Artinya terdapat 9,57% penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun tetapi bersekolah di SD/MI. Lain halnya dengan persentase nilai APK untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2022 yang tidak mencapai 100% yaitu sebesar 92,78%. Hal ini berarti bahwa masih ada penduduk usia 13-15 tahun yang ada di Kabupaten Karo tidak bersekolah

di jenjang SMP/MTs.

❖ **Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika persentase APM=100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Persentase APM Kabupaten Karo pada tahun 2022 adalah sebesar 99,50%. Artinya, masih ada penduduk yang tidak sekolah tepat waktu pada jenjang SD/MI sebesar 0,50%. Angka APM Kabupaten Karo pada jenjang SMP/MTs sebesar 84,17%, yang artinya masih ada penduduk yang tidak sekolah tepat waktu pada jenjang tersebut sebesar 15,83%.

**Tabel 2.20**
**Angka Partisipasi Murni Kabupaten Karo Tahun 2017-2021**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APM SD/MI/Paket A | 99,15 | 98,64 | 98,74 | 98,74 | 99,50 |
| 2 | APM SMP/MTs/Paket B | 83,14 | 83,15 | 84,05 | 84,05 | 84,17 |

*Sumber: BPS Karo, 2023*

❖ **Fasilitas Pendidikan**

Fasilitas pendidikan adalah sarana dan prasarana yang harus tersedia untuk melancarkan kegiatan pendidikan di sekolah. Sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan untuk proses pendidikan di sekolah, meliputi gedung, ruang belajar/kelas, media belajar, meja dan kursi. Sarana pendidikan sebagai segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan sedangkan prasarana pendidikan adalah jenis alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan.

**Tabel 2.21**
**Fasilitas Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik (%) | 84,72 | 84,32 | 89,54 | 89,54 | 81,60 |
| 2 | Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) | 87,32 | 79,72 | 81,76 | 81,76 | 82,00 |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2023*

Fasilitas pendidikan meliputi sarana dan prasarana yang perlu dan penting dikelola dengan baik serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen pendidikan. Seperti gedung, tanah, perlengkapan administrasi sampai pada sarana yang digunakan langsung dalam proses belajar mengajar di kelas. Sarana dan prasarana pendidikan

juga sebagai salah satu dari unsur manajemen pendidikan yang memiliki peranan penting dalam proses belajar mengajar, sarana pendidikan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Sarana dan prasarana pendidikan juga digunakan untuk mempermudah pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan dengan mengunakan sarana dan prasarana pendidikan yang tepat dalam program kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Karo dalam kondisi baik belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan masih memerlukan anggaran yang besar untuk pemeliharaan dan rehabilitasi sehingga kondisi menjadi lebih baik.

**Rasio Guru/Murid**

Periode waktu 2018-2022, jumlah tenaga pendidikan dan peserta didik juga harus disesuaikan untuk menciptakan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI) rasio guru dan murid paling tinggi pada tahun 2019 yaitu 677,78 dan paling rendah pada tahun 2018 sebesar 597,73 tahun 2022 mencapai 666,40 artinya tersedia 666 orang guru untuk 10.000 orang siswa. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) rasio jumlah guru dan murid di Kabupaten Karo paling tinggi pada tahun 2020 sebesar 690,84 sedangkan paling rendah pada tahun 2022 sebesar 628,74 artinya bahwa pada tahun 2022 tersedia kurang lebih 628 orang guru untuk 10.000 orang siswa.

**Tabel 2.22**
**Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD/MI | | | | | |
| 1.1 | Jumlah Guru | 2.701 | 2.992 | 3.057 | 2.677 | 2.782 |
| 1.2 | Jumlah Murid | 45.188 | 44.144 | 45.979 | 42.137 | 41.747 |
| 1.3 | Rasio Guru per 10.000 siswa | 597,73 | 677,78 | 664,87 | 635,31 | 666,40 |
| 2. | SMP/MTs | | | | | |
| 2.1 | Jumlah Guru | 1.342 | 1.489 | 1.596 | 1.367 | 1.312 |
| 2.2 | Jumlah Murid | 21.076 | 22.763 | 23.102 | 21.403 | 20.867 |
| 2.3 | Rasio Guru per 10.000 siswa | 636,74 | 654,13 | 690,85 | 638,70 | 628,74 |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2023*

Penumpukan guru di daerah tertentu dan kekurangan guru di daerah terpencil dan perbatasan menjadi permasalahan pendidikan yang harus diperhatikan. Pemerataan dan penataan guru menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasio guru terhadap jumlah siswa yang proporsional di setiap daerah sehingga dapat memperbaiki kualitas proses pembelajaran disekolah. Melalui regulasi yang sudah dibuat bahwa setiap guru yang ditempatkan harus memenuhi masa tugas selama 5 tahun untuk bisa bertugas ditempat lain. Begitu juga mengatasi guru yang berada di daerah terpencil dan perbatasan akan dibuat regulasi yang mengatur insentif khusus. Pemerintah juga melakukan distribusi tenaga pendidikan di setiap kecamatan untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI). Pada tahun 2022 jumlah guru paling banyak berada di Kecamatan Kabanjahe yakni sebanyak 430 guru dengan jumlah murid 8.530 jiwa dan yang paling rendah di Kecamatan Merdeka sebanyak 60 guru dengan jumlah murid sebanyak 875 jiwa. Rasio jumlah guru dan murid paling tinggi berada di Kecamatan Payung sebesar 1.158,02 dan terendah di Kecamatan Berastagi sebesar 483,44. Jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) jumlah guru paling banyak di Kecamatan Kabanjahe sebanyak 254 guru dengan jumlah murid 5.891 jiwa, sedangkan paling sedikit berada di Kecamatan Dolat Rayat sebanyak 15 guru dengan jumlah siswa 160 jiwa sedangkan di Kecamatan Merdeka belum memiliki gedung sekolah tingkat SMP sederajat. Rasio jumlah guru dan murid paling tinggi di Kecamatan Tiganderket sebesar 1.417,80 dan terendah di Kecamatan Laubaleng sebesar 417,91. Rasio jumlah guru/murid menurut kecamatan di Kabupaten Karo dapat disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.23**
**Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar**
**Per Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 2022**

| No | Kecamatan | SD/MI | | | SMP/MTs | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio |
| 1 | Mardingding | 185 | 2500 | 740,00 | 86 | 1.093 | 786,83 |
| 2 | Lau Baleng | 150 | 2369 | 633,18 | 42 | 1.005 | 417,91 |
| 3 | Tigabinanga | 185 | 2355 | 785,56 | 86 | 1.448 | 593,92 |
| 4 | Juhar | 115 | 1235 | 931,17 | 42 | 594 | 707,07 |
| 5 | Munte | 190 | 2218 | 856,63 | 46 | 518 | 888,03 |
| 6 | Kutabuluh | 105 | 1252 | 838,66 | 57 | 587 | 971,04 |

| No | Kecamatan | SD/MI | | | SMP/MTs | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio |
| 7 | Payung | 96 | 829 | 1158,02 | 57 | 508 | 1.122,05 |
| 8 | Tiganderket | 121 | 1420 | 852,11 | 94 | 663 | 1.417,80 |
| 9 | Simpang Empat | 125 | 1579 | 791,64 | 66 | 737 | 895,52 |
| 10 | Naman Teran | 102 | 1465 | 696,25 | 37 | 444 | 833,33 |
| 11 | Merdeka | 60 | 875 | 685,71 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | Kabanjahe | 435 | 8.530 | 509,96 | 254 | 5.891 | 431,17 |
| 13 | Berastagi | 308 | 6.371 | 483,44 | 208 | 3.983 | 592,52 |
| 14 | Tigapanah | 211 | 3.090 | 682,85 | 106 | 1.336 | 793,41 |
| 15 | Dolat Rayat | 80 | 792 | 1010,10 | 15 | 160 | 937,50 |
| 16 | Merek | 158 | 2.740 | 576,64 | 61 | 896 | 680,80 |
| 17 | Barusjahe | 156 | 2.127 | 733,43 | 115 | 1.004 | 1.145,42 |
| | **Jumlah** | **2.782** | **41.747** | **666,40** | **1.372** | **20.867** | **657,50** |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2023*

**Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata**

Rasio guru/murid per kelas rata-rata merupakan jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas dibagi dengan jumlah murid pendidikan dasar dalam 1.000 jumlah penduduk. Indikator rasio guru/murid per kelas rata-rata Kabupaten Karo dari tahun 2018-2022 terlihat pada table berikut.

**Tabel 2.24**
**Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata Pendidikan Dasar**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| No | Jenjang Pendidikan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar | 19,0 | 16,5 | 15,5 | 15,5 | 16 |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2023*

Rasio guru/murid per kelas rata-rata di Kabupaten Karo tahun 2018-2022 untuk pendidikan dasar cenderung fluktuatif. Nilai rasio pada tahun 2018 adalah sebesar 19,0 cenderung fluktuatif di tahun berikutnya dan pada tahun 2022 rasionya menjadi 16.

**Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV**

Persentasi tenaga pendidik dengan memenuhi kualifikasi S-1/D-IV di Kabupaten Karo tahun 2018-2022 masih perlu ditingkatkan, hal ini terlihat dari persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S-1/D-IV tahun 2020 masih sebesar 89,47%. Untuk itu, guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1/D-IV perlu ditingkatkan, terutama kepala sekolah yang memiliki sertifikat diklat kepala sekolah serta

peningkatan kompetensinya. Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S-1 /D-IV tersebut dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.25**
**Persentase Tenaga Pendidik S1/DIV**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guru yang memenuhi S1/DIV | 81,65 | 84,15 | 89,47 | 89,47 | 94,74 |
| 2 | Kepala Sekolah yang memenuhi S1/DIV | 90 | 86,39 | 91,18 | 100 | 100 |
| 3 | Kepala Sekolah yang memiliki Sertifikat Kepala Sekolah | 7 | 44 | 44 | 242 | 242 |
| 4 | Pengawas Sekolah yang memenuhi S1/DIV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2023*

**Tabel 2.26**
**Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Karo**

| No | SPM | Target 2022 (%) | Realisasi (%) | Tingkat Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Anak Usia Dini | 100 | 60,88 | 60,88 |
| 2. | Pendidikan Dasar (SD) | 100 | 82,99 | 82,99 |
| 3. | Pendidikan Menengah (SMP) | 100 | 87,88 | 87,88 |
| 4. | Pendidikan Kesetaraan | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2023*

Berdasarkan data diatas realisasi pencapaian SPM yang mencapai 100% hanya pada indikator pendidikan Kesetaraan, sedangkan indikator lainnya belum mencapai 100%, Pendidikan Anak Usia Dini (60,88%), Pendidikan Dasar (SD) (82,99%), dan Pendidikan Menengah (SMP) (87,88%).

## B. Bidang Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah investasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku hidup yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu perencanaan pembangunan kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, serta dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan seluruh komponen bangsa dalam pelaksanaannya.

Pembangunan Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, supaya terwujud derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa kesehatan adalah keadaan yang sehat, baik fisik dan mental maupun spiritual dan sosial, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

**1. Angka Kematian Bayi dan Balita**

Angka kematian bayi dan balita adalah jumlah bayi dan balita yang meninggal per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi dan balita berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup anak dan menggambarkan kondisi sosial, ekonomi serta lingkungan tempat anak-anak tinggal, termasuk pemeliharaan kesehatannya. Indikator ini juga berkaitan langsung dengan kehamilan dan pelayanan kesehatan pasca melahirkan.

Formula untuk menghitung Angka Kematian Bayi dan Balita adalah Angka Kematian Bayi sama dengan Jumlah kematian bayi dan Balita selama tahun tertentu/Jumlah Kelahiran Hidup dikali 1000.

**Tabel 2.27**
**Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita**
**Kabupaten Karo per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH KELAHIRAN | JUMLAH KEMATIAN BAYI DAN BALITA | ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1.000 KELAHIRAN |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6.602 | 26 | 3,94 |
| 2019 | 6.725 | 15 | 2,23 |
| 2020 | 6.537 | 46 | 7,04 |
| 2021 | 6.101 | 29 | 4,75 |
| 2022 | 6.136 | 30 | 4,90 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2023*

**Grafik 2.14**
**Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita**
**Kabupaten Karo per 1000 Kelahiran Hidup 2018-2022**

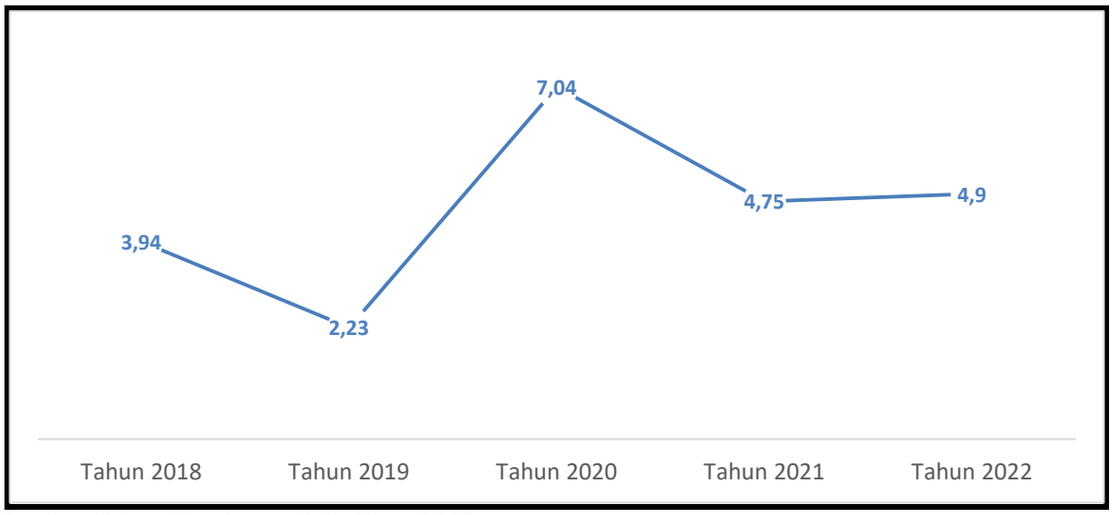


*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2023*

Perkembangan angka kematian bayi dan balita dari tahun 2018-2022 masih cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 angka kematian bayi dan balita sebesar 3,94 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2019 meningkat menjadi 2,23 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2020 menurun menjadi 7,04 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2021 meningkat menjadi 4,75 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup dan tahun 2022 menurun menjadi 4,9 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup.

**2. Angka Kematian Ibu**

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

**Tabel 2.28**
**Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH KELAHIRAN | JUMLAH IBU KEMATIAN | ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6.602 | 7 | 106,03 |
| 2019 | 6.725 | 3 | 44,60 |
| 2020 | 6.537 | 6 | 91,79 |
| 2021 | 6.101 | 6 | 98,34 |
| 2022 | 6.136 | 2 | 32.60 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, 2023*

**Grafik 2.15**
**Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

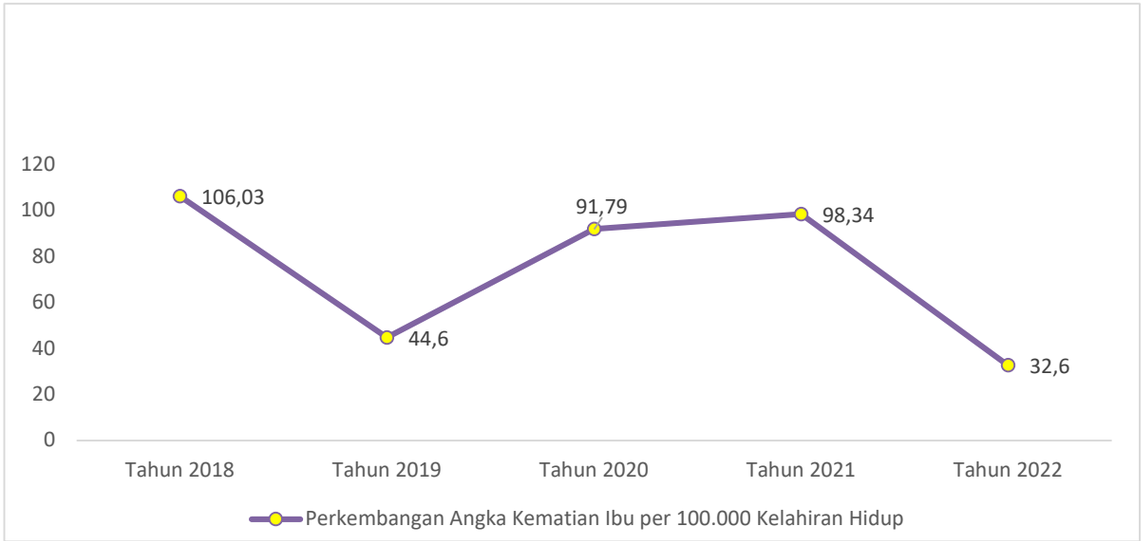


*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2023*

Perkembangan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup tahun 2018-2022 di Kabupaten Karo bersifat fluktuatif. Angka kematian ibu tahun 2018 meningkat menjadi 106,03 per 100.000 kelahiran hidup (7 kasus), pada tahun 2019 menurun menjadi 44,6 per 100.000 kelahiran hidup (3 kasus), akan tetapi pada tahun 2020 meningkat menjadi 91,79 per 100.000 kelahiran hidup (6 kasus), tahun 2021 meningkat menjadi 98,34 per 100.000 kelahiran hidup (6 kasus) dan pada tahun 2022 turun menjadi 32,6 per 100.000 kelahiran hidup (2 kasus).

### 3. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Berikut disajikan rasio posyandu di Kabupaten Karo tahun 2018-2022.

**Tabel 2.29**
**Rasio Posyandu Per Satuan Balita**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Posyandu | 403 | 377 | 377 | 377 | 375 |
| 2 | Jumlah Balita | 43.260 | 42.954 | 42.659 | 42.954 | 39.025 |
| 3 | Rasio Posyandu Per Jumlah Balita | 9,32 | 8,78 | 8,84 | 8,84 | 9,60 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2023*

Jumlah posyandu di Kabupaten Karo pada tahun 2022 sebanyak 375 posyandu dan jumlah balita sebanyak 39 jiwa. Dengan demikian rasio posyandu terhadap balita mencapai 9 yang berarti bahwa dari 1 posyandu Kabupaten Karo melayani 9 balita.

**4. Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk**

Rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Karo tahun 2022 mencapai 0,01 atau 1 : 86.849 artinya satu rumah sakit melayani 86.849 penduduk, idealnya satu rumah sakit melayani 100.000 penduduk. Kabupaten Karo dengan penduduk sebesar 434.246 jiwa dengan demikian rumah sakit sebanyak 5 (lima) belum dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.

Rasio Puskesmas mencapai 0,043 atau 1 : 22.855 artinya satu puskesmas melayani melayani 22.855 penduduk, sedangkan rasio pustu mencapai 0,485 atau 1 : 2.058 artinya 1 Pustu melayani 2.058 penduduk. Bila dibandingkan dengan konsep wilayah kerja puskesmas dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata 30.000 penduduk, dengan jumlah pelayanan puskesmas di Kabupaten Karo berada di bawah 30.000 penduduk hal ini diharapkan Puskesmas dan Pustu sudah dapat menjangkau penduduk sasaran di wilayah kerjanya. Dari data tersebut dengan adanya Puskesmas dan Pustu di setiap kecamatan diharapkan pelayanan kesehatan dapat diakses semua penduduk di Kabupaten Karo.

Selain terkait rasio infrastruktur fasilitas kesehatan, yang menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan yaitu masih terdapat sarana puskesmas pembantu dan rumah dinas tenaga kesehatan dalam keadaan rusak serta belum terbangunnya Rumah Sakit Umum Daerah hal ini terkait status kepemilikan lahan Rumah Sakit Umum Daerah dimiliki oleh Moderamen GBKP dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo sudah melakukan upaya dengan menyediakan lahan dan tahap pembangunan bangunan fisik secara bertahap dan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan biaya anggaran yang besar.

**Tabel 2.30**
**Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, dan Pustu**
**per Satuan Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Rumah sakit | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Jumlah Puskesmas | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Jumlah Pustu | 161 | 211 | 210 | 211 | 211 |
| Jumlah Penduduk | 409.675 | 415.878 | 404.998 | 409.077 | 434.246 |
| *Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk* | 0,009 | 0,012 | 0,009 | 0,012 | 0,011 |
| *Rasio Puskesmas Persatuan penduduk* | 0,046 | 0,045 | 0,046 | 0,046 | 0,043 |
| *Rasio Pustu Per Satuan Penduduk* | 0,392 | 0,507 | 0,518 | 0,515 | 0,485 |

*Sumber: BPS Kab. Karo, 2023*

## 5. Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk

Ketersediaan sumber daya manusia menjadi faktor pendukung dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah telah menyediakan tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan dan di seluruh puskesmas di Kabupaten Karo. Adapun jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2022 yaitu dokter umum sebanyak 75 orang, dokter spesialis sebanyak 21 orang, dokter gigi sebanyak 34 orang dan tenaga paramedis sebanyak 856 orang. Berikut disajikan tabel rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Karo tahun 2018-2022. Berikut disajikan tabel rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Karo tahun 2018-2022.

**Tabel 2.31**
**Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Puskesmas dan Dinas Kesehatan** | | | | | |
| Jumlah Dokter Umum | 61 | 75 | 74 | 70 | 66 |
| Jumlah Dokter Spesialis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Dokter Gigi | 23 | 22 | 22 | 26 | 30 |
| Jumlah Tenaga Paramedis | 890 | 885 | 857 | 913 | 767 |
| **RSUD Kabanjahe** | | | | | |
| Jumlah Dokter Umum | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 |
| Jumlah Dokter Spesialis | 18 | 21 | 21 | 20 | 21 |
| Jumlah Dokter Gigi | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Tenaga Paramedis | 211 | 214 | 216 | 161 | 89 |
| **Total Puskesmas, Dinas Kesehatan dan RSU Kabanjahe** | | | | | |
| Jumlah Dokter Umum | 72 | 87 | 86 | 82 | 75 |
| Jumlah Dokter Spesialis | 18 | 21 | 21 | 20 | 21 |
| Jumlah Dokter Gigi | 25 | 24 | 24 | 30 | 34 |
| Jumlah Tenaga Paramedis | 1,101 | 1,099 | 1,073 | 1.074 | 856 |
| Jumlah penduduk | 409,675 | 415,878 | 404,998 | 409.077 | 434.246 |
| **Rasio Total Tenaga Kesehatan Puskesmas , Dinas Kesehatan dan RSU Kabanjahe Per Satuan Penduduk** | | | | | |
| Rasio Dokter Umum | 175,75 | 209,20 | 212,35 | 0,20 | 0,17 |
| Rasio Dokter Spesialis | 43,94 | 50,50 | 51,85 | 0,05 | 0,05 |
| Rasio Dokter Gigi | 61,02 | 57,71 | 59,26 | 0,07 | 0,08 |
| Rasio Tenaga Paramedis | 515,04 | 514,57 | 533,34 | 0,39 | 0,20 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Karo, 2023*

Dari data tenaga kesehatan di atas, keadaan rasio dokter umum pada tahun 2022 adalah sebesar 0,17 atau 1 : 5.789 dan dokter spesialis sebesar 0,05 atau 1 : 20.678, sementara menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia bahwa hak asasi manusia atas kesehatan untuk indikator rasio dokter umum idealnya sebesar 1 : 2.500 dan dokter sepesialis sebesar 1 : 16.000, artinya untuk ketersediaan dokter umum dan dokter spesialis di Kabupaten Karo belum memenuhi standar sesuai peraturan.

Untuk menunjang pelayanan kesehatan Kabupaten Karo masih memerlukan tenaga dokter spesialis, karena masih kurangnya ketersediaan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah yaitu Dokter Dokter Spesialis Mata, Anestesi, dan Rehapmedik, Patologoklinik dan Radiologi.

Serta untuk meningkatkan derajat masyarakat dilakukan melalui Posbindu, akan tetapi permasalahannya masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan kader posbindu didesa dalam melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat.

**Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan**

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang

berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Pelayanan kesehatan ibu hamil; b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; d. Pelayanan kesehatan balita; e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif. Pencapaian SPM urusan kesehatan Kabupaten Karo tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.32**
**Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2022**

| NO | STANDAR PELAYANAN MINIMAL | TARGET 2022 | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN | PERMASALAHAN | SOLUSI/ REKOMENDASI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 % | 78 % | 78% | Target sasaran/proyeksi terlalu tinggi, pencatatan dan pelaporan belum terkordinir dengan baik, kurangnya kunjungan rumah | Melaksanakan pencataan dan pelaporan dengan aplikai E-Kohort, meningkatkan kunjungan rumah, dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi program |
| 2 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 100 % | 72 % | 72% | Target sasaran/proyeksi terlalu tinggi, pencatatan dan pelaporan belum terkordinir dengan baik, kurangnya kunjungan rumah | Melaksanakan pencataan dan pelaporan dengan aplikai E-Kohort, meningkatkan kunjungan rumah, dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi program |
| 3 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100% | 82% | 82% | Target sasaran/proyeksi terlalu tinggi, pencatatan dan pelaporan belum terkordinir dengan baik, kurangnya kunjungan rumah | Melaksanakan pencataan dan pelaporan dengan aplikai E-Kohort, meningkatkan kunjungan rumah, dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi program |
| 4 | Persentase layanan kesehatan balita sesuai standar | 100% | 75% | 75% | Target sasaran/proyeksi terlalu tinggi, pencatatan dan pelaporan belum terkordinir dengan baik, kurangnya kunjungan rumah | Melaksanakan pencataan dan pelaporan dengan aplikai E-Kohort, meningkatkan kunjungan rumah, dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi program |
| 5 | Perentase anak usia pendidikan | 100% | 91% | 91% | Puskesmas telah melakukan pelayanan | Mengaktifkan Unit Kesehatan Sekolah |

| NO | STANDAR PELAYANAN MINIMAL | TARGET 2022 | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN | PERMASALAHAN | SOLUSI/ REKOMENDASI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | usia dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | kesehatan ke setiap sekolah di wilayah kerjanya, namun pelyanan tersebut tidak mencapai 100% karena Siswa yang hadir ke sekolah yang di periksa, dan siswa yg tidak hadir hanya sebagian yg memeriksakan diri ke Puskesmas | |
| 6 | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 25% | 25% | Target sasaran/proyeksi terlalu tinggi, posbindu PTM belum terlaksana dengan maksimal. | Mengaktifkan kembali kader Posbindu, memberikan insentif kader Posbindu dari dana desa |
| 7 | Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 61,15% | 61,15% | Pelaksanaan pelayanan pada lansia terkendala karena lansia masih ragu untuk datang ke posyandu lansia | Meningkatkan pelayanan kesehatan lansia dengan mengaktifkan kader lansia |
| 8 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 34% | 34% | terkendalanya pelayanan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara rutin dalam upaya deteksi dini penyakit hipertensi | Petugas Puskesmas perlu melakukan home visit (kunjungan rumah) terhadap penderita hipertensi |
| 9 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 24% | 24% | terkendalanya pelayanan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara rutin dalam upaya deteksi dini penyakit DM | Mengaktifkan kembali Posbindu di desa |
| 10 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 20% | 20% | Keluarga enggan membawa saudaranya untuk memeriksakan kesehatan jiwa, petugas kesehatan jiwa Puskesmas belum ada yang dilatih, belum ada dokter kesehatan jiwa di Rumah Sakit Kabupaten | Perlu melatih petugas Puskesmas tentang kesehatan jiwa, perlu menyediaakan dokter spesialis jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah, dan memfasilitasi pembuatan KTP dan kepesertaan JKN bagi penderita penyakit jiwa |

| NO | STANDAR PELAYANAN MINIMAL | TARGET 2022 | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN | PERMASALAHAN | SOLUSI/ REKOMENDASI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 70% | 70% | Terkendalanya pelayanan karena tingginya target sasaran/proyeksi, pasien lebih mengutamakan pemeriksaan klinis (rontgen) | Melaksanakan skrining secara aktif dan masif serta melaksanakan investigasi kontak TB |
| 12 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 32% | 32% | Terkendalanya pelayanan karena masih kurangnya kegiatan testing/skrining pada populasi kunci / beresiko | Meningkatkan pelaksanaan testing / skrining pada populasi kunci |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2023*

Berdasarkan data di atas dijelaskan bahwa tingkat capaian SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2022 belum ada yang mencapai 100%, bahkan pada beberapa indikator capaian berada di bawah 50%. Selain permasalahan diatas permasalahan lainnya yaitu terkait terbatasnya jumlah personil pendukung dalam pencapaian SPM bidang Kesehatan.

**Stunting**

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Berdasarkan data Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 angka stunting di Kabupaten Karo sebesar 25,35% dan menurun pada tahun 2022 menjadi 24,9% artinya dari tahun 2021 ke tahun 2022 penurunan stunting di Kabupaten Karo mengalami penurunan sebesar 0,45%. Sedangkan target nasional pada tahun 2024 prevalensi stunting sebesar 14%. Dilihat dari posisi relatif prevalensi stunting di Kabupaten Karo yang lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Utara (21,1%) dan berada di posisi peringkat 17 paling tinggi pada 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, untuk itu Kabupaten Karo harus bekerja keras dalam menurunkan prevalensi stunting pada tahun 2023.

**Tabel 2.33**
**Angka Prevalensi Stunting Tahun 2017-2022**

| No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penurunan Stunting (%) | 30,77 | 29,58 | 38,46 | 25,35 | 24,90 |

*Sumber: SSGI, 2023*

Dari data di atas, menggambarkan adanya fluktuasi penurunaan prevalensi stunting selama 5 tahun, prevalensi stunting paling tinggi pada tahun 2019 dengan angka 38,48% sedangkan penurunannya pada tahun 2022 menjadi 24,90% dari 25,35% pada tahun 2021 hanya terjadi penurunan sebesar 0,45% artinya belum tercapai penurunan prevalensi stunting yang signifikan hal ini disebabkan beberapa hal antara lain :

1. Belum maksimalnya konvergensi penurunan stunting mulai dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, Swasta dan pihak lainnya.
2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan penanggulangan stunting terkait pola asuh keluarga, penataan kesehatan dan gizi masyarakat.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan gizi keluarga, dengan ketersediaan keanekaragaman dan akses sayur, buah dan protein akan tetapi keluarga masih enggan untuk mengolah makanan yang bergizi untuk mencegah stunting.

**Prevalensi HIV/AIDS**

*Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya (HIV) adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS). AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan tubuh. Untuk meihat gambaran angka positif HIV/AIDS suatu daerah dilihat dari Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi yaitu Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama.

**Tabel 2.34**
**Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| Tahun | Jumlah Kasus | Jumlah Penduduk | Prevalensi HIV/AIDS (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | | 409.675 | - |
| 2019 | 126 | 415.878 | 0,00030 |
| 2020 | 46 | 404.998 | 0,01136 |
| 2021 | 20 | 409.077 | 0,00489 |
| 2022 | 58 | 434.246 | 0,01336 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2023*

Berdasarkan data diatas periode tahun 2018-2022 terjadi fluktuasi penurunan prevalensi HIV/AIDS, pada tahun 2019 prevalensi HIV/AIDS sebesar 0,00030 atau sebanya 126 kasus dan merupakan jumlah kasus

yang paling tinggi pada periode tersebut, kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 0,01136 atau sebanyak 46 kasus, pada tahun 2021 kembali turun menjadi 0,00489 atau sebanyak 20 kasus, akan tetapi pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 0,01336 atau sebanyak 58 kasus.

**Prevalensi *Tuberculosis***

Tuberculosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium Tuberculosis. Prevalensi Tuberkulosis* adalah banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) dibagi jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu.

Perkembangan tingkat prevalensi *tuberculosis* per 100.000 penduduk di Kabupaten Karo disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.35**
**Prevalensi *Tuberculosis Per 100.000 Penduduk***
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| Tahun | Jumlah Kasus | Jumlah Penduduk | Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk |
|---|---|---|---|
| 2018 | 989 | 409.675 | 241 |
| 2019 | 858 | 415.878 | 206 |
| 2020 | 589 | 404.998 | 145 |
| 2021 | 508 | 409.077 | 124 |
| 2022 | 812 | 434.246 | 186 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2023

Berdasarkan data diatas periode tahun 2018-2022 terjadi fluktuasi penurunan prevalensi *tuberculosis* per 100.000 penduduk, pada tahun 2018 prevalensi *tuberculosis* sebesar 241 atau sebanyak 989 kasus dan berupakan jumlah kasus yang paling tinggi pada periode tersebut, kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 206 atau sebanyak 858 kasus, pada tahun 2020 kembali turun menjadi 145 atau sebanyak 589 kasus, pada tahun 2021 juga menurun menjadi 124 atau sebanyak 508 kasus, akan tetapi pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 186 atau sebanyak 812 kasus.

## C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kewenangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 10 sub urusan meliputi sumberdaya air, air minum,

persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang.

Perkembangan pembangunan urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.36**
**Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo Tahun 2018–2022**

| NO | URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **1.** | **Pekerjaan Umum** | | | | | |
| | Indeks Daya Saing Infrastruktur (IDSI) | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 |
| 1. | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 61,06% | 63,36% | 61.65% | 61.37% | 61.54% |
| 2. | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | 0.00297 | 0.00293 | 0.00301 | 0.00298 | 0.00295 |
| 3. | Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Persentase rumah tinggal bersanitasi (%) | 73 | 73,58 | 73,58 | 73,97 | 74.57 |
| 5. | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%) | 46,7 | 48 | 49,61 | 50,98 | 49.35 |
| 6. | Rasio jaringan irigasi (panjang saluran irigasi/luas lahan budidaya pertanian) | 80 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 7. | Persentase penduduk berakses air minum (%) | 68 | 68,7 | 68,7 | 69,23 | 70.35 |
| 8. | Rasio Tempat Ibadah per satuan penduduk | 0,00281 | 0,00275 | 0,00298 | 0,00301 | 0,00301 |
| 9. | Kondisi Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik | N/A | N/A | 60 | 61 | 61,5 |
| **2.** | **Penataan Ruang** | | | | | |
| 1. | Luasan RTH publik wilayah kota/kawasan perkotaan | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% |
| 2. | Ketaatan terhadap RTRW (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 72% |
| 3. | Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,1 | 0.1 |

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo,2023*

Pada suburusan jalan, proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai 2019 dari 61,06% menjadi 63,36%, akan tetapi mengalami mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 61,65% bahkan pada tahun 2021 menjadi 61,37%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya 2 (dua) ruas jalan dalam kondisi baik yang kewenangannya dialihkan dari kewenangan kabupaten menjadi provinsi, berkurangnya dana pemeliharaan yang dipengaruhi oleh kondisi pandemi bahkan pada tahun 2021 akibat curah hujan yang sangat tinggi sepanjang tahun banyak jalan kabupaten yang mengalami kerusakan. Di

sisi lain, tahun 2021, pada suburusan sumber daya air menunjukan rasio jaringan irigasi berada pada persentase 55%, dan terjadi peningkatan persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dari 49,61% pada tahun 2020 menjadi 50,98% pada tahun 2021 namun kembali mengalami penurunan menjadi 49,35% pada tahun 2022 akibat banyaknya kerusakan pada jaringan yang telah berusia lama. Sementara itu, untuk persentase rumah tinggal bersanitasi menunjukan sedikit peningkatan dari tahun 2018 sebesar 73 % menjadi 74,57% pada tahun 2022 yang dapat diartikan bahwa melalui penyediaan sarana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, masyarakat terpicu untuk berperilaku hidup bersih. Hal yang sama juga terlihat pada penduduk berakses air minum, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti dapat dilihat pada tabel di atas, yaitu 68% tahun 2018 menjadi 70,35% pada tahun 2022

Selain itu, salah satu indikator yang penting terkait urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah kondisi Gedung pemerintah dalam kondisi baik. Kondisi Gedung pemerintah pada saat ini masih banyak yang kurang layak sehingga perlu rehabilitasi bahkan perlu pembangunan gedung baru seperti halnya Gedung DPRD Kabupaten Karo, Kantor Dinas PUPR, beberapa Kantor Camat dan juga Kantor Kelurahan

**Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang wajib diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Capaian SPM Kabupaten Karo tahun 2022 Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang seperti tertera pada tabel di bawah.

**Tabel 2.37**
**Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
**Kabupaten Karo Tahun 2022**

| NO | STANDAR PELAYANAN MINIMAL | TARGET 2022 | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase rumah tinggal bersanitasi (%) | 100 | 74.57 | 74.57 |
| 2 | Persentase penduduk berakses air minum (%) | 100 | 70.35 | 70.35 |

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Karo 2023*

`Dari tabel capaian SPM di atas dapat dilihat bahwa SPM untuk urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ada dua yakni persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 74,57% dan persentase penduduk berakses air minum sebesar 70,35% yang mana keduanya masih jauh dari target yang seharusnya dipenuhi yakni sebesar 100%. Capaian akses air minum dan sanitasi di Kabupaten Karo masih di bawah SPM disebabkan beberapa hal antara lain kurangnya ketersediaan anggaran dan masalah nonteknis seperti tidak tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang merupakan salah satu *readiness criteria* yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pendanaan dari Pemerintah Pusat.

**D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Kewenangan urusan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 5 suburusan meliputi perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, sarana prasarana dan utilitas (PSU), sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Sesuai RTRW Kabupaten Karo tahun 2022-2042, kawasan permukiman di Kabupaten Karo memiliki luas 7.731 ha dengan rincian permukiman perdesaan seluas 4.922 ha dan permukiman perkotaan seluas 2.809 ha dengan jumlah penduduk mencapai 404.998 jiwa dan kepadatan 190,39 jiwa/km$^2$ pada tahun 2021.

**Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu fokus dari urusan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) pada saat ini. Pengertian dan konsep Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Penilaian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Kebutuhan Rumah RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni di wilayah Kabupaten Karo pada tahun 2022 adalah 95,22%, artinya masih ada 4,78% rumah

masyarakat yang masih belum layak. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah melaksanakan penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karo sejak tahun 2017 melalui kegiatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, dan Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

**Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai berikut, yaitu: 1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman; 2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi; 3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat (batasan sarana dan prasarana ditetapkan dalam lingkup keciptakaryaan), yaitu: a. Jalan Lingkungan, b. Drainase Lingkungan, c. Penyediaan Air Bersih/Minum, d. Pengelolaan Persampahan, e. Pengelolaan Air Limbah, f. Pengamanan Kebakaran dan g. Legalitas Lahan.

Karakteristik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam mendukung upaya penanganan permukiman kumuh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan bahwa terdapat dua bentuk penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan, yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas.Tindakan pencegahan ditujukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, yang dilaksanakan melalui: a. Pengawasan dan Pengendalian, b. Pemberdayaan Masyarakat. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, antara lain: 1. Pemugaran, 2. Peremajaan, 3. Permukiman Kembali.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah melaksanakan pananganan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Karo sejak tahun 2016 melalui Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Program Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dan Program Kota Tanpa Kumuh.

**Tabel 2.38**
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Rasio rumah layak huni | 94,75 | 95,06 | 95,14 | 95,14 | 95,82 |
| 2 | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani | 20 | 20 | 20 | - | 25,09 |
| 3 | Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | 96,28 | 96,28 | 96,28 | 96,28 | 97,10 |
| 4 | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 81,30 |
| 5 | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyedia rumah yang layak huni | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |

*Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Karo, 2023*

Rasio rumah layak huni meningkat dari 94,75% di tahun 2018 menjadi 95,82 % di tahun 2022. Pada Tahun 2022, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Karo adalah sebanyak 3.852 unit.

**Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang dasar yang wajib diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

**Tabel 2.39**
**Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 84,31 | 95,11 | 97,51 | 99,91 | 99,91 |
| 2. | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Karo, 2023*

Dari tabel capaian SPM di atas dapat dilihat bahwa SPM untuk urusan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ada dua yakni persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/provinsi yang memperoleh fasilitasi penyedeiia rumah yang layak huni. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Kabupaten Karo mengalami kenaikan dari 84,31% tahun 2018 menjadi 99,91% tahun 2022.

## E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.40**
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/orang | 27 | 26 | 28 | 28 | 28 |
| 2 | Persentase Penegakan PERDA | 66,66 | 71,87 | 72,72 | 72,72 | 73,83 |
| 3 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten | 0,65 | 0,65 | 0,02 | 0,02 | 0,41 |
| 4 | Tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 0,69 | 0,46 | 0,38 | 0,38 | 1,6 |

*Sumber: -Badan Kesbang pol Kab. Karo, 2023*
*- Satpol Pamong Praja Kab. Karo, 2023*

**Standar Pelayanan Minimum Urusan Trantibumlinmas (Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat)**

Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Urusan Trantibumlinmas (Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat) Kabupaten Karo Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.41**
**Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Karo**

| NO | SPM | TARGET 2022 | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standar Operasional Prosedur Satpol PP | Tersedia | Proses Pembuatan | 80 |
| 2 | Standar Sarana Prasarana Satpol PP | Terpenuhi sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja | Tahap pemenuhan secara berkala sesuai Pagu Anggaran yang tersedia | 30 |

| NO | SPM | TARGET 2022 | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada | 100% | 0% | 0% |

*Sumber : Satpol PP Kab. Karo, 2023*

Realisasi capaian SPM urusan Trantibumlinmas mencapai 100% pada kegiatan Pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal sedangkan kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan realisasi sebesar 86,27% dan kegiatan peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat mencapai 90%.

## F. Bidang Urusan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yakni seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar, yang menjadi sasaran pembangunan di bidang sosial.

**Tabel 2.42**
**Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH PMKS DALAM 1 (SATU) TAHUN YANG MENJADI PESERTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KUBE ATAU KELOMPOK SOSIAL EKONOMI SEJENIS | JUMLAH PMKS DALAM 1 (SATU) TAHUN YANG SEHARUSNYA MENJADI PESERTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KUBE ATAU KELOMPOK SOSIAL EKONOMI SEJENIS |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 |
| 2019 | 50 | 100 |
| 2020 | 20 | 85 |
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas Sosial Kab.Karo, 2023*

Dari tabel di atas, kondisi PMKS yang diberdayakan melalui KUBE pada rentang tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Karo mendapat bantuan dari pemerintah pusat, untuk tahun selanjutnya kegiatan dimaksud dibiayai anggaran daerah yang terbatas anggarannya.

Dalam hal kriteria pemberian bantuan KUBE yakni dari Kelompok Usaha Bersama yang merupakan usaha dari masyarakat yang kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dan penilaian usaha yang masih sangat membutuhkan bantuan modal.

**Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial**

Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Urusan Sosial Kabupaten Karo Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.43**
**Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Karo**

| NO | SPM | TARGET 2022 | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | 100% | 85,33% | 85,33% |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti | 100% | 90,67% | 90,67% |
| 3 | Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | 100% | 89,33% | 89,33% |
| 4 | Rehabilitas sosial dasar tuna daksa khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | 100% | 90,67% | 90,67% |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten | 100% | 88% | 88% |

*Sumber : Dinas Sosial Kab. Karo, 2023*

Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Tahun 2022 dengan capaian realisasi 100% belum ada, akan tetapi rata-rata capaian sudah mencapai diatas 80% bahkan ada indikator yag sudah mencapai realisasi 90% yaitu pada kegiatan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti (90,67%) dan rehabilitas sosial dasar tuna daksa khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti (90,67%), sedangkan kegiatan lainnya mencapai realisasi di bawah 90% dengan rincian rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti (85,33%), Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti (89,33%), dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten (88%).

### 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

**A. Bidang Urusan Tenaga Kerja**

**1. Rasio penduduk yang bekerja**

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan

kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.44**
**Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio Penduduk yang bekerja dalam Angkatan Kerja (%) | 98,50 | 98,91 | 90,54 | 98,05 | 97,25 |

*Sumber: BPS Kab. Karo, 2023*

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Karo berfluktuasi setiap tahunnya dimana tahun 2018 dan 2019 meningkat dari 98,50 persen menjadi 98,91 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2020 . Hal ini disebabkan karena adanya Pandemi *Covid-19* yang sangat berdampak pada perekonomian di Kabupaten Karo yang ditandai dengan adanya perusahaan yang "merumahkan" sebagian karyawannya. Pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 98,05 persen namun pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 97,25.

Pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja sangat diperlukan agar siap pakai untuk bekerja sesuai dengan keterampilan juga sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu akses informasi pekerjaan bagi tenaga kerja juga sangat diperlukan. Untuk itu Kabupaten Karo tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja, mengupayakan percepatan pertumbuhan lapangan kerja, serta memberikan perlindungan kepada pekerja.

**2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah angka yang menunjukkan rasio antara banyaknya angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sendiri merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei.

**Tabel 2.45**
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 84,10 | 83,73 | 83,93 | 84,56 | 85,11 |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023*

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja untuk Kabupaten Karo cenderung meningkat disetiap tahunnya kecuali pada tahun 2019 turun

dari 84,10 pada tahun 2018 turun menjadi 83,73 pada tahun 2019. Mulai tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan dimana tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 83,93 persen, tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 84,56 persen dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 85,11 persen. Semakin meningkatnya angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi.

**Grafik 2.16**
**Posisi Relatif TPAK Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022**

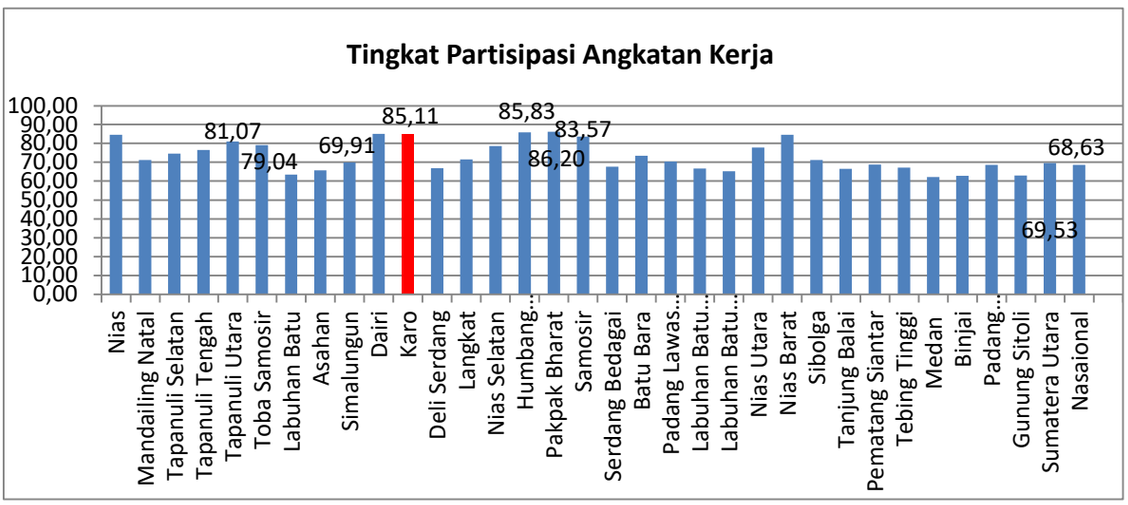


*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023*

Jika dilihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di kawasan dataran tinggi Provinsi Sumatera Utara, TPAK Kabupaten Karo berada pada peringkat ketiga setelah Humbang Hasundutan sebesar 85,83 persen dan Pakpak Barat yaitu sebesar 86,20 persen. Angka TPAK di bawah Kabupaten Karo diikuti oleh Dairi sebesar 85,01, Humbang Hasundutan sebesar 84,17 persen, Tapanuli Utara sebesar 81,07 persen, Toba sebesar 79,04 dan yang paling rendah adalah Simalungun sebesar 69,91 persen. Jika dibandingkan TPAK Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia maka TPAK Kabupaten Karo masih berada di atas TPAK Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia.

### 3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat Pengangguran di Kabupaten Karo termasuk pengangguran dalam skala

kecil jika dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Karo tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.47**
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO. | URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 1,50 | 1,09 | 1,83 | 1,95 | 2,71 |

*Sumber: BPS Karo, 2023*

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 di Kabupaten Karo sebesar 2,71 persen. TPT tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,76 persen dari tahun 2021. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya pendatang yang masuk ke Kabupaten karo yang masih mencari pekerjaan selain itu meningkatnya TPT disebabkan karena adanya tamatan SMA/SMK yang tidak melanjutkan Pendidikan dan tindak mendapatkan pekerjaan sehingga meningkatnya angkatan kerja.

Posisi relatif tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 2.17**
**Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka**
**Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022**

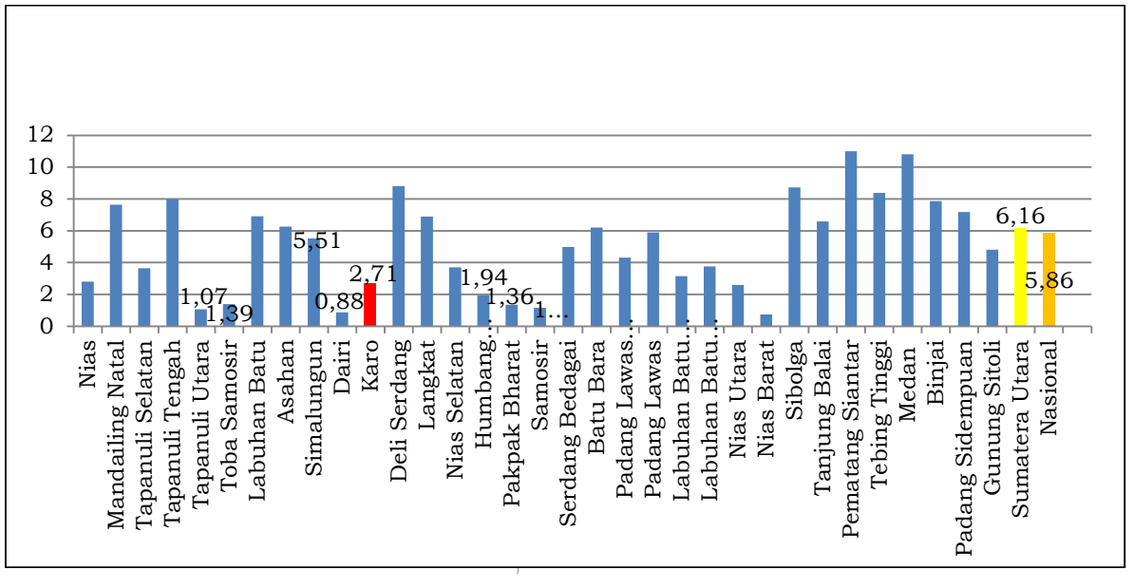


*Sumber : BPS, Sumatera Dalam Angka (Diolah)*

Angka TPT Kabupaten Karo berada di bawah angka Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara. Jika dicermati TPT di Kabupaten Karo cenderung berada di bawah 10 persen. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Karo bekerja pada sektor pertanian,

sehingga tidak sulit mendapat pekerjaan walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Tingkat pengangguran dapat ditekan dengan meningkatkan keterampilan/pendidikan, meningkatkan kewirausahaan, memperluas lapangan kerja sehingga pekerja tidak dibayar/keluarga pada sektor pertanian dapat meningkatkan pendapatan yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan/kondisi ekonomi yang lebih baik.

Jika dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka di kawasan dataran tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo berada pada peringkat keenam dari angka TPT yang paling rendah. TPT yang paling rendah terdapat di Kabupaten Dairi sebesar 0,88 persen, diikuti kabupaten Tapanuli Utara sebesar 1,07, Toba Samosir sebesar 1,39 persen, Humbang Hasundutan sebesar 1,9 persen dan Simalungun sebesar 5,51 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia, angka TPT Kabupaten Karo berada di bawah TPT Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia.

## B. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator pembangunan daerah terkait pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karo digambarkan melalui indikator pertisipasi perempuan di lembaga pemerintahan.

**Tabel 2.48**
**Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KASUS) | JUMLAH RUMAH TANGGA (KK) | RASIO KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5 | 120.966 | 0,004 |
| 2019 | 2 | 120.966 | 0,002 |
| 2020 | 3 | 129.798 | 0.002 |
| 2021 | 9 | 129.798 | 0.007 |
| 2022 | 11 | 129.798* | 0,008 |

*Sumber: DP3AP2KB Kab. Karo, 2023*

Indikator untuk perlindungan anak dan perempuan dapat dilihat melalui rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan tabel diatas dapat diihat bahwa pada tahun 2018-2022. Rasio KDRT pada tahun 2018 sebesar 0,004 dengan KDRT sebanyak 5 kasus, pada tahun 2019 menjadi 0,002 dengan KDRT sebanyak 2 kasus, pada tahun 2020 sebesar 0,002 dengan KDRT sebanyak 3 kasus dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,007 dengan KDRT sebanyak 9 kasus, serta pada tahun 2022 meningkat menjadi dengan KDRT sebanyak 11 kasus.

Peningkatan KDRT hal ini disebabkan pada masa Covid 19 membuat beban berlapis di rumah tangga misalnya beban sosial dan ekonomi serta ditambah dengan terbatasnya ruang sosial selama pembatasan dimasa pandemi.

**Tabel 2.49**
**Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH PENGADUAN/LAPORAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH UNIT PELAYANAN TERPADU | JUMLAH LAPORAN/PENGADUAN YANG MASUK KE UNIT PELAYANAN TERPADU | CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH DI DALAM UNIT PELAYANAN TERPADU (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 36 | 36 | 100,00 |
| 2019 | 57 | 57 | 100,00 |
| 2020 | 49 | 49 | 100,00 |
| 2021 | 71 | 71 | 100,00 |
| 2022 | 75 | 75 | 100.00 |

*Sumber: DP3AP2KB Kab. Karo, 2023*

Adapun indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2018-2022 sudah mencapai 100%.

**Tabel 2.50**
**Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH KORBAN MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM | JUMLAH KORBAN YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN HUKUM | CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN LAYANAN (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 36 | 36 | 100 |
| 2019 | 35 | 35 | 100 |
| 2020 | 30 | 30 | 100 |
| 2021 | 9 | 9 | 100 |
| 2022 | 75 | 75 | 100 |

*Sumber : DP3AP2KB Kab. Karo, 2023*

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum tahun 2018-2022 sudah mencapai 100% dimana setiap korban kekerasan sudah bisa mendapat layanan hukum.

## C. Bidang Urusan Pangan

Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai kecukupan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga sekaligus kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan oleh setiap anggotanya. Ketersediaan pangan merupakan sub sistem ketahanan yang cukup

penting. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan/miskin. Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang.

Masyarakat Kabupaten Karo masih sangat tergantung pada beras sebagai bahan pangan utama. Untuk itu, diversifikasi pangan perlu dilakukan untuk minimalisasi konsumsi beras dan juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sehingga nutrisi yang diterima oleh tubuh dapat bervariasi dan seimbang. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang meningkat, perubahan iklim, dan kondisi geografis yang ekosistemnya tidak selalu sesuai untuk budidaya padi akan menimbulkan kerentanan dimasa yang akan datang.

**Tabel 2.51**
**Capaian Indikator Pembangunan Daerah**
**Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketersediaan pangan utama (%) | 100 | 111 | 105 | 105 | 105 |
| 2 | Ketersediaan energi dan protein (kkal/kap/hari) | 2.404 energi, 68 protein | 3.598 energi, 73.06 protein | 9.941 energi, 216,69 protein | 6.701 energi, 165,78 Protein | 4400 energi, 99,89 protein |
| 3 | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan pangan (%) | 60% | 72% | 90% | 100% | 100% |

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Karo, 2023*

Tabel tersebut menunjukkan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Karo cenderung meningkat. Hal ini tentu dapat mendukung ketahanan pangan di tingkat daerah maupun daerah sekitar Kabupaten Karo. Ketersediaan energi dan protein perkapita di Kabupaten Karo di tahun 2022 mengalami penurunan, pada periode tahun 2018-2021 dikatakan baik hal ini berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 yang merekomendasikan ketetapan angka penyediaan energi dan protein yaitu masing masing sebanyak 2.400 kkal dan 63 gram perkapita per hari. Selanjutnya, Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan juga terus mengalami peningkatan dimana tahun 2022

mencapai 100 persen, hal ini disebabkan karena jumlah sampel yang diawasi sudah semakin bertambah dari tahun sebelumnya.

Pembangunan urusan pangan perlu untuk terus ditingkatkan karena merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah menetapkan tujuan kedua yaitu tanpa kelaparan dengan menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, sehingga urusan pangan sangat membutuhkan sinergi dari berbagai sektor yang berkaitan.

## D. Bidang Urusan Pertanahan

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan bidang pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi a.) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten, b). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah, c). penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten, d). penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten dan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten, e). penerbitan izin membuka tanah dan f) perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

**Tabel 2.52**
**Capaian Pembangunan Pertanahan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | INDIKATOR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lahan Pemerintah Daerah Bersertifikat (bidang) | 5 | 77 | 77 | 77 | 0 |
| 2 | Penyelesaian kasus tanah Negara | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Penyelesaian izin lokasi (Jumlah rekomendasi ijin lokasi/Permohonan rekomendasi) (unit) | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 |

*Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Karo, 2023*

## E. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuatitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan, hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintah. Capaian kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Karo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dapat disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.53**
**Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak Ada |
| 2. | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak Ada |
| 3. | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak Ada |
| 4. | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air | 100 | 80 | 80 | 52 | 50.00 |
| 5. | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU) | 96,08 | 99.83 | 87,88 | 88,14 | 88.78 |
| 6. | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | 70.72 | 56.17 | 49,308 | 51,60 | 51.60 |
| 7. | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHD yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota | 3,51 | 3,53 | 3,33 | 1,3 | 4,34 |
| 8 | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | Ada | Ada | Ada | Tidak ada | ada |
| 9 | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Timbulan sampah yang ditangani | 82.78 | 83.11 | 74,86 | 84% | 85% |
| 11 | Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R | Belum ada | Belum ada | Belum ada | Belum ada | 4 Ton |
| 12 | Persentase cakupan area pelayanan | 19,17% | 24,24% | 28,72% | 35,32% | 35% |
| 13 | Persentase jumlah sampah yang tertangani | 82.78 | 83.11 | 74,86 | 84 | 85 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karo, 2023*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa beberapa indikator yang berhubungan dengan ketersediaan dokumen pengelolaan lingkungan hidup belum tercapai/tersedia. Hal ini perlu mendapat perhatian karena

akan mengancam keberlanjutan lingkungan untuk masa yang akan datang. Jika dilihat dari data pada tahun 2022, hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara mengalami peningkatan dari 88,14 tahun 2021 menjadi 88,78 pada tahun 2022. Untuk Indeks Kualitas Air juga menunjukkan penurunan dari angka 52 tahun pada tahun 2021 menjadi 50 di tahun 2022, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 51,60 pada tahun 2022. Hasil pengukuran tersebut merupakan komponen untuk mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dinamika perubahan angka tersebut dipengaruhi juga oleh perkembangan perhitungan IKLH yang terus mengalami perubahan sesuai kebutuhan dan kemampuan dari pemangku kepentingan sehingga pada tahun 2019 terdapat perhitungan dua komponen yang disempurnakan yaitu parameter Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Selanjutnya, Pengelolaan sampah di Kabupaten Karo sampai tahun 2022 belum dapat dikatakan baik, mengingat volume sampah yang tertangani pada tahun 2022 masih 85% meskipun mengalami peningkatan dari 84% pada tahun 2021. Disamping itu, TPA saat ini masih berstatus sewa sehingga belum bisa dilakukannya pengolahan sampah secara *sanitary landfill*. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karo. Namun setiap tahun pelayanan terhadap pengangkutan sampah mengalami peningkatan meskipun belum maksimal. Dukungan sarana dan prasarana masih terus dibutuhkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan. Untuk itu, permasalahan persampahan menjadi tanggung jawab seluruh aspek, bukan hanya pemerintah saja melainkan seluruh lapisan masyarakat.

## F. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kesadaran penduduk dalam melengkapi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Karo secara umum dapat dikategorikan mengalami peningkatan. Rasio bayi berakte kelahiran di tahun 2021 adalah sebesar 96,00% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 98,00%. Selanjutnya rasio bayi berakte kelahiran tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2018-2022.

**Tabel 2.54**
**Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH ANAK USIA 0-18 TAHUN YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN | JUMLAH ANAK 0-18 TAHUN | RASIO BAYI BERAKTE KELAHIRAN |
|---|---|---|---|
| 2018 | 93.821 | 136.401 | 68,78 |
| 2019 | 90.556 | 129.362 | 70,00 |
| 2020 | 121.360 | 130.755 | 92,81 |
| 2021 | 123.728 | 128.884 | 96,00 |
| 2022 | 119.346 | 121.781 | 98,00 |

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2023*

Rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Karo pada tahun 2021 adalah sebesar 51,88% dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 57,03%. Rasio Pasangan berakte nikah pada periode tahun 2018-2022 tersebut mengalami fluktuasi. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.55**
**Rasio Pasangan Berakte Nikah Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH PASANGAN NIKAH BERAKTE NIKAH | JUMLAH KESELURUHAN PASANGAN NIKAH | RASIO PASANGAN BERAKTE NIKAH |
|---|---|---|---|
| 2018 | 39.159 | 250.535 | 15,64 |
| 2019 | 52.596 | 183.932 | 28,60 |
| 2020 | 76.681 | 183.932 | 41,69 |
| 2021 | 95.494 | 183.724 | 51,88 |
| 2022 | 105.467 | 184.918 | 57,03 |

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2023*

Untuk penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Karo tahun 2018-2022 sudah dilakukan setiap tahunnya. Cakupan penerbitan KTP setiap tahunnya sudah dapat dikategorikan tinggi, pada tahun 2021 mencapai 106,32% dan pada tahun 2022 mencapai 109,32%. Data selengkapnya terkait Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Karo tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.56**
**Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | PENERAPAN KTP NASIONAL BERBASIS NIK (SUDAH/BELUM) |
|---|---|
| 2018 | Sudah |
| 2019 | Sudah |
| 2020 | Sudah |
| 2021 | Sudah |
| 2022 | Sudah |

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2023*

**Tabel 2.57**
**Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH KTP BER-NIK YANG DITERBITKAN | JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP | CAKUPAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 289.219 | 298.956 | 96,74 |
| 2019 | 296.888 | 303.551 | 97,80 |
| 2020 | 294.652 | 307.351 | 95,87 |
| 2021 | 316.090 | 296.054 | 106,77 |
| 2022 | 324.662 | 296.971 | 109,32 |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2023*

Cakupan penerbitan akta kelahiran mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2021 mencapai 58,00% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 60,72%. Adapun cakupan penerbitan akta kelahiran tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.58**
**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH PENDUDUK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN | JUMLAH PENDUDUK | CAKUPAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN |
|---|---|---|---|
| 2018 | 113.445 | 405.162 | 28,00 |
| 2019 | 122.732 | 409.108 | 30,00 |
| 2020 | 204.407 | 408.814 | 50,00 |
| 2021 | 237.548 | 404.566 | 58,00 |
| 2022 | 249.216 | 410.465 | 60,72 |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2023*

## G. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian indikator pembangunan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Karo Tahun 2018–2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.59**
**Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%) | 50 | 70 | 70 | 100 | 85 |
| 2. | Jumlah PKK aktif | 287 | 287 | 277 | 277 | 277 |
| 3. | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%) | 40 | 30 | 5 | Dihapus | - |

*Sumber : -Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karo, 2023*
*-Badan Kesbangpol Kab. Karo, 2023*

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2018 sebanyak 50% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 85%. Sedangkan untuk

jumlah PKK aktif pada tahun 2018 ada sebanyak 287 PKK dan tahun 2022 menjadi 277 PKK.

## H. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator yang harus dicapai dalam mewujudkan keluarga berencana yang sehat dan sejahtera di Kabupaten Karo antara lain:

**Laju Pertumbuhan penduduk**

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu.

**Tabel 2.60**
**Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN KARO TAHUN 2018-2022 |
|---|---|
| 2018 | 2,00 |
| 2019 | 1,89 |
| 2020 | 1,40 |
| 2021 | 1,01 |
| 2022 | 1,31 |

*Sumber : BPS Kab. Karo, 2023*

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karo tahun 2018-2022 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,00%, tahun 2019 menurun menjadi 1,89%, tahun 2020 kembali menurun menjadi 1,40% dan menurun kembali di tahun 2021 menjadi 1,01%, pada tahun 2022 meningkat menjadi 1,31%.

**Jumlah Kerjasama Penyeleggaraan Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal**

Program yang dilakukan dalam pemerintah dalam mendukung program keluarga berencana yaitu salah satunya melalui kampung KB yang dilaksanakan mulai tahun 2016. Pelaksanaan program kampung KB bertujuan meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, peran pemerintah, lembaga nonpemerintah serta swasta dalam melaksanakan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

**Tabel 2.61**
**Jumlah Kerjasama Penyeleggaraan Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN (KERJASAMA) |
|---|---|
| 2018 | 20 |
| 2019 | 30 |
| 2020 | 34 |
| 2021 | 36 |
| 2022 | 50 |

*Sumber: DP3AP2KB Kab Karo, 2023*

Untuk menyukseskan pengendalian penduduk dilakukan kerjasama pendidikan kependudukan. Pada tahun 2018 sebanyak 20 (duapuluh) kerjasama, tahun 2019 meningkat menjadi 30 (tiga puluh) kerjasama tahun 2020 meningkat menjadi 34 (tiga puluh empat) kerjasama dan di tahun 2021 meningkat menjadi 36 kerjasama, tahun 2022 menurun menjadi 50 (lima puluh) kerjasama.

**Rasio Akseptor KB**

Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Akseptor KB menurut sasarannya terbagi menjadi 3 (tiga) fase yaitu fase menunda atau mencegah kehamilan, fase penjarangan kehamilan dan fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan.

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) (Kurniawati, 2014). PUS yang menjadi peserta KB adalah pasangan usia subur yang suami/istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi modern pada tahun pelaksanaan pendataan keluarga. (BKKBN, 2011).

**Tabel 2.62**
**Rasio Akseptor KB Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | PUS | JUMLAH AKSEPTOR KB | RASIO AKSEPTOR KB (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 73.320 | 54.080 | 73,75 |
| 2019 | 65.622 | 45.663 | 69,58 |
| 2020 | 67.053 | 47.173 | 70,35 |
| 2021 | 68.372 | 46.845 | 69,00 |
| 2022 | 73.936 | 42.236 | 58,48 |

*Sumber : DP3AP2KB Kab Karo, 2023*

Rasio akseptor KB merupakan gambaran untuk melihat usia pasangan subur menggunakan salah satu cara atau kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Di Kabupaten Karo rasio akseptor KB hampir setiap tahunnya meningkat, pada tahun 2018 adalah 73,75%, pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 69,58%, pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 70,35% dan menurun kembali pada tahun 2021 menjadi 69%, pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 58,48%.

**Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 tahun**

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin atau wanita yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja.

**Tabel 2.63**
**Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH PESERTA KB AKTIF (ORANG) | JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PASANGAN) | ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI/CPR BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 53.080 | 73.320 | 72,39 |
| 2019 | 45.663 | 65.622 | 64,67 |
| 2020 | 47.173 | 67.053 | 70,35 |
| 2021 | 44.040 | 68.372 | 64.41 |
| 2022 | 43.236 | 73.936 | 58.47 |

*Sumber : DP3AP2KB Kab Karo, 2023*

Untuk pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun, pada tahun 2018 mencapai 72,39% sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi 64,67%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 70,35% dan menurun pada tahun 2021 yaitu 64,41% dan pada tahun 2022 menurun menjadi 58,47%.

**Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet need*)**

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet need*) di Kabupaten Karo cukup tinggi berada di atas 10%. Hal ini menjadi permasalahan salah satunya karena rendahnya rasio petugas KB dibanding wilayah yang harus dibina. Data selengkapnya terkait Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet need*) Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.64**
**Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak Terpenuhi (*Unmet need*) Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH PUS YANG INGIN BER KB TIDAK TERPENUHI (*UNMEET NEED*) | JUMLAH PUS | CAKUPAN PUS YANG INGIN BER KB TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED) (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 11.000 | 73.320 | 15,00 |
| 2019 | 11.745 | 65.622 | 17,89 |

| TAHUN | JUMLAH PUS YANG INGIN BER KB TIDAK TERPENUHI (*UNMEET NEED*) | JUMLAH PUS | CAKUPAN PUS YANG INGIN BER KB TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED) (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11.092 | 67.053 | 16,54 |
| 2021 | 12.702 | 68.372 | 18.58 |
| 2022 | 18.881 | 73.936 | 25.53 |

*Sumber : DP3AP2KB Kab Karo, 2023*

Pada tahun 2018 cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi 15%, tahun 2019 meningkat menadi 17,89 pada tahun 2020 menurun menjadi 16,54% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 18,58%, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 25,53%.

**Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**

Alat Kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang, yang meliputi IUD (*Intra Uterine Device*), *Implant* (susuk KB) dan Kontap (Kontrasepsi mantap).

**Tabel 2.65**
**Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH AKSEPTOR KB YANG MENGGUNAKAN MKJP | JUMLAH AKSEPTOR KB | PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 12.003 | 53.080 | 22,61 |
| 2019 | 19.656 | 45.663 | 43,04 |
| 2020 | 11.092 | 67.053 | 16,54 |
| 2021 | 19.946 | 46.845 | 42.58 |
| 2022 | 20.138 | 43.236 | 46.57 |

*Sumber: DP3AP2KB Kab Karo, 2023*

Persentase penggunaan kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Karo juga masih rendah berada di bawah 50%. Pada Tahun 2018 persentase penggunaan kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah 22,61 % dan tahun 2019 meningkat mencapai 43,04%, tahun 2020 menurun menjadi 16,54% dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 42,58%, pada tahun 2022 meningkat menjadi 46,57%.

**Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**

Kelangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan lama pemakaian kontrasepsi yang berlangsung secara terus menerus. Tingkat kelangsungan pemakaian kontrasepsi digunakan untuk mengetahui kualitas pemakaian kontrasepsi yang dilihat dari lamanya pemakaian dan kontinuitas pemakaian (*Kariman, 2006*). Bagi pengelola program KB angka

kelangsungan pemakaian kontrasepsi sangat penting artinya untuk perencanaan program. Apabila ingin mempertahankan atau meningkatkan prevalensi pemakai kontrasepsi pada suatu tingkat tertentu, maka dengan mengetahui angka kelangsungan pemakaian proporsi pasangan usia subur yang harus menjadi akseptor baru dalam satu tahun bisa diperkirakan. Dengan kata lain, angka ini dipakai untuk menetapkan target jumlah akseptor baru yang harus bisa diperoleh dalam satu tahun. Jadi kalau angka kelangsungan pemakaian bisa ditingkatkan, untuk mencapai prevalensi yang sama maka jumlah akseptor baru yang harus diperoleh dalam satu tahun bisa dikurangi.

**Tabel 2.66**
**Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR YANG TIDAK LAGI MENGGUNAKAN KONTRASEPSI | JUMLAH AKSEPTOR KB | PERSENTASE TINGKAT KEBERLANGSUNGAN PEMAKAIAN KONTRASEPSI |
|---|---|---|---|
| 2018 | 19.240 | 38.080 | 36,25 |
| 2019 | 19.959 | 45.663 | 43,70 |
| 2020 | 19.880 | 47.173 | 42,14 |
| 2021 | 21.527 | 46.845 | 69,00 |
| 2022 | 30.700 | 43.236 | 71,00 |

*Sumber : DP3AP2KB Kab Karo, 2023*

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Karo menunjukkan angka yang masih rendah dan mengalami peningkatan dan penurunan. Tahun 2018 menurun menjadi 36,25%, tahun 2019 meningkat menjadi 43,70%, pada tahun 2020 menurun menadi 42,14% dan kembali meningkat pada tahun 2021 mejadi 69%, pada tahun 2022 meningkat menjadi 71,00%.

**Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB**

PKB/PLKB merupakan petugas yang melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

**Tabel 2.58**
**Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB**
**Kabupaten Karo 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH PKB DAN PLKB YANG DIDAYAGUNAKAN (ORANG) | JUMLAH PKB DAN PLKB (ORANG) | CAKUPAN PKB/PLKB YANG DIDAYAGUNAKAN PD KB BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 7 | 7 | 100 |
| 2019 | 9 | 9 | 100 |
| 2020 | 8 | 8 | 100 |
| 2021 | 8 | 8 | 100 |
| 2022 | 6 | 7 | 85,7 |

*Sumber : DP3AP2KB Kab Karo, 2023*

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk di Kabupaten Karo tahun 2018-2021 menunjukkan angka 100% setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 85,7 %. Permasalahan juga ada pada jumah PKB/PLKB yang sangat minim di Kabupaten Karo, tercatat jumlah PKB/PLKB pada tahun 2018 sebanyak 7 orang, tahun 2019 sebanyak 9 orang sedangkan tahun 2020-2022 adalah sebanyak 7 orang. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan wilayah kerja yang harus dilayani yakni sebanyak 259 desa dan 10 kelurahan, sehingga tugas PKB/PLKB dalam menjalankan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga tidak maksimal di Kabupaten Karo.

**Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa Kelurahan**

Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) merupakan kader atau penggerak KB yang berada di tingkat kelurahan dan desa.

**Tabel 2.67**
**Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa Kelurahan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KB DESA (PPKBD) | JUMLAH DESA/KELURAHAN | RASIO PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KB DESA (PPKBD) SETIA DESA KELURAHAN |
|---|---|---|---|
| 2018 | 269 | 269 | 100 |
| 2019 | 269 | 269 | 100 |
| 2020 | 269 | 269 | 100 |
| 2021 | 269 | 269 | 100 |
| 2022 | 271 | 269 | 100 |

*Sumber : D3AP2KB Kab Karo, 2023*

Di Kabupaten Karo petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa kelurahan disediakan di setiap desa dan kelurahan dengan jumlah 269 orang atau dengan rasio 100% setiap tahunnya.

**Perilaku Fertilitas**

Fertilitas adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam bidang demografi untuk menggambarkan jumlah anak yang benar-benar dilahirkan hidup (Pollard, 1989). Disamping istilah fertilitas ada juga istilah fekunditas (*fecundity*) sebagai petunjuk kepada kemampuan fisiologis dan biologis seorang perempuan untuk menghasilkan anak lahir hidup (*Mantra,*

*2006*). Fertilitas biasanya diukur sebagai frekuensi kelahiran yang terjadi di dalam sejumlah penduduk tertentu. Disatu pihak mungkin akan lebih wajar bila fertilitas dipandang sebagai jumlah kelahiran per orang atau per pasangan, selama masa kesuburan (*Barcla, 1984*).

Ukuran yang sering digunakan untuk melihat angka fertilitas yang umum digunakan adalah angka kelahiran total (*Total vertility Rate = TFR*) dan angka kelahiran menurut kelompok umur (*Age Specifik Fertility Rate = ASFR*). TFR didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 perempuan yang hidup hingga akhir masa reproduksinya (*BKKBN, 2006*).

Di Kabupaten Karo data yang tersedia yakni TFR tahun 2010 sebesar 3.02 dan tahun 2015 sebesar 2,73. Artinya pada tahun 2010 setiap wanita di Kabupaten Karo memiliki anak kurang lebih 3 (tiga) orang anak dan tahun 2015 memiliki 2-3 orang anak.

## I. Bidang Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 4 suburusan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Perkeretaapian, dan Penerbangan. Namun suburusan yang ditangani sesuai dengan karakteristik Kabupaten Karo hanya pada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Transportasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dan fasilitas yang digunakan untuk memindahkannya. Perpindahan/pergerakan manusia merupakan hal yang penting dipikirkan khususnya di daerah perkotan, sedangkan angkutan barang sangat penting untuk menunjang kehidupan perekonomian. Transportasi mempunyai karakteristik dan atribut yang menunjukkan arti dan fungsi spesifiknya. Fungsi utama adalah untuk menghubungkan manusia dengan tata guna lahan.

Sektor transportasi memiliki peran/fungsi sebagai motivator, penggerak terhadap sektor pembangunan perekonomian daerah dan sektor lainnya. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari subsistem transportasi darat mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi wilayah. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, perlu didukung ketersediaan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan yang layak dan baik. Untuk mewujudkan

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di atas, sangat perlu dan penting dilakukan terlebih dahulu perencanaan sistem transportasi secara terarah dan terukur. Bentuk perencanaan tersebut antara lain: Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Penumpang dalam Kabupaten, Rencana Kebutuhan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Penyusunan Rencana Induk Tata Ruang Perhubungan, Rencana Umum Jaringan Lintas Angkutan Barang Dalam Kabupaten, Rencana Kebutuhan Terminal Penumpang dan Angkutan Barang, Rencana Induk Perparkiran, Rencana Induk Perlengkapan Jalan, Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas dan Rencana Operasional Angkutan Penumpang.

Ketersediaan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Karo, harus diiringi dengan pembangunan sarana/perlengkapan jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar.

Perkembangan capaian kinerja urusan perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.68**
**Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah arus penumpang angkutan umum (jiwa) | 3.675.672 | 3.668.685 | 3.696.720 | 2.587.704 | 4.127.934 |
| 2. | Rasio ijin trayek | 0,000010 | 0,000010 | 0,0000087 | 0,000881 | 0,007690 |
| 3. | Jumlah uji kir angkutan umum dan barang (unit) | 5.284 | 5.450 | 2.024 | 1.162 | 466 |
| 4. | Jumlah Pelabuhan laut/Udara/Terminal Bis (unit) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5. | Persentase layanan angkutan darat (dalam kabupaten) (%) | 90,00 | 93,94 | 93,94 | 93.94 | 93,94 |
| 6. | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%) | 28,45 | 26,35 | 73,01 | 17,94 | 8,71 |
| 7. | Pemasangan rambu-rambu (%) | 45,34 | 51,06 | 70,33 | 70.40 | 2 |
| 8. | Rasio panjang jalan per jumlah kenderaan | 0,04100 | 0,04500 | 0,03780 | 0,0368 | 0,0379 |
| 9. | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (jiwa) | 3.675.672 | 3.668.685 | 3.696.720 | 2.587.704 | 4.127.934 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, 2023*

Pada tahun 2018, jumlah pengujian berkala kenderaan bermotor di Kabupaten Karo sebanyak 5.284 kendaraan, dan pada tahun 2022 jumlah

pengujian berkala kenderaan bermotor sebanyak 466 kendaraan. Penurunan jumlah pengujian ini disebabkan pengujian kenderaan bermotor belum dapat dilaksanakan di Kabupaten Karo karena Kabupaten Karo belum memiliki gedung uji/alat uji yang memenuhi standard, sehingga sejak tahun 2019 kenderaan bermotor di Kabupaten Karo melaksanakan pengujian kederaan bermotor ke Kabupaten Dairi.

Jumlah arus penumpang di wilayah Kabupaten Karo mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 sebanyak 3.675.672 orang dan pada tahun 2022 sebanyak 4.127.934 orang. Untuk jumlah pelabuhan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2018 hingga 2022 yakni hanya satu di Kecamatan Merek yang sudah selesai dibangun untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.

## J. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Capaian Indikator dari sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo adalah:

**Tabel 2.69**
**Capaian Indikator Sasaran dan Prioritas Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo 2018-2022**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks SPBE | N/A | N/A | 1,9 | 2,06 | 2,41 |
| 2 | Cakupan Layanan Telekomunikasi (%) | 86,62 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 |
| 3 | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%) | 20 | 40 | 50 | 60 | 60 |
| 4 | Proporsi rumah tangga dengan akses internet (%) | 20 | 40 | 50 | 44 | 44 |
| 5 | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (%) | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 |

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo, 2023*

Indaktor penting terkait komunikasi dan informatika adalah indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis

elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel di atas. Indeks SPBE Kabupaten Karo mengalami kenaikan dari 2,06 tahun 2021 menjadi 2,41 pada tahun 2022. Selain itu, indikator lain seperti cakupan Layanan Telekomunikasi tahun 2019 mencapai 85,50% dan tetap pada angka 85,50% hingga tahun 2022.

## K. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, penurunan kemiskinan, dan perluasan lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Indikator koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Karo mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas untuk mendukung berkembangnya ekonomi rakyat.

**Tabel 2.70**
**Jumlah Koperasi dan Koperasi Aktif Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah Koperasi | 258 | 252 | 252 | 265 | 266 |
| 2. | Jumlah Koperasi Aktif | 170 | 158 | 158 | 145 | 139 |
| 3. | Persentasi koperasi aktif (%) | 65,89 | 62,70 | 62,70 | 54,71 | 52,26 |

*Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Karo, 2023*

Jika dilihat dari tabel di atas, koperasi aktif mengalami penurunan mulai tahun 2019 menjadi sebesar 62,70 dan tahun 2020 tetap sebesar 62,70 pada tahun 2021 menurun menjadi 54,71 dan menurun kembali menjadi 52,26 pada tahun 2022. Penurunan tersebut merupakan dampak dari kebijakan pembubaran koperasi oleh pemerintah bagi koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai aturan. Ketentuan tersebut antara

lain, menghapus koperasi yang tidak melakukan Rapat Anggota selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan/atau tidak melaksanakan kegiatan usaha secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal Pengesahan Akta Pendirian Koperasi. Jika dilihat dari data tabel tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 47,74 persen koperasi yang tidak aktif sehingga masih perlu peningkatan lebih lanjut.

Demikian halnya dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. Indikator terkait UKM dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.71**
**Indikator Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | 98,11 | 98,20 | 99,13 | 99,16 | 99,19 |
| 2 | Jumlah Usaha Mikro | 4.057 | 4.286 | 9673 | 10.440 | 10.450 |
| 3 | Jumlah Usaha Kecil | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 |
| 4 | Jumlah Usaha Menengah | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

*Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Karo, 2023*

## L. Bidang Urusan Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan jumlah investor di Kabupaten Karo cenderung meningkat setiap tahunnya dari 64 investor pada Tahun 2018 bertambah menjadi 81 investor pada Tahun 2022. Apabila dilihat dari perkembangan jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Karo, jumlah investor mengalami peningkatan dari 40 investor pada Tahun 2017 bertambah menjadi 56 investor pada Tahun 2022. Selanjutnya, dilihat dari perkembangan jumlah investor Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Karo, jumlah investor mengalami juga mengalami kenaikan dari 24 investor pada Tahun 2017 menjadi 25 investor pada Tahun 2022. Perkembangan investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.72**
**Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2018–2022**

| TAHUN | URAIAN | PMDN | PMA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Jumlah Investor | 40 | 24 | 64 |
| 2019 | Jumlah Investor | 43 | 25 | 68 |
| 2020 | Jumlah Investor | 45 | 25 | 70 |
| 2021 | Jumlah Investor | 49 | 25 | 74 |
| 2022 | Jumlah Investor | 56 | 25 | 81 |

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karo, 2023*

Perkembangan nilai investasi di Kabupaten Karo cenderung meningkat setiap tahunnya baik nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Jika dilihat dari nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Karo, nilai investasi mengalami peningkatan dari Rp 605.179.583.936,- pada Tahun 2018 meningkat menjadi Rp 1.062.688.906.671,- pada Tahun 2022. Begitu juga, perkembangan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami peningkatan dari Rp 5.306.862.036.304,- pada Tahun 2018 meningkat menjadi Rp 5.377.708.216.674,- pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai investasi Kabupaten Karo cukup baik. Perkembangan jumlah nilai investasi PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2018–2022 dapat dilihat seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2.73**
**Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | URAIAN | PMDN (RP) | PMA (RP) |
|---|---|---|---|
| 2018 | Nilai Investasi | 605.179.583.936 | 5.306.862.036.304 |
| 2019 | Nilai Investasi | 706.085.787.235 | 5.312.851.739.304 |
| 2020 | Nilai Investasi | 714.835.787.235 | 5.312.851.739.304 |
| 2021 | Nilai Investasi | 892.485.178.066 | 5.320.894.302.022 |
| 2022 | Nilai Investasi | 1.062.688.906.671 | 5.377.708.216.674 |

*Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Utara, 2023*

Peningkatan jumlah investor dan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Karo juga memiliki pengaruh terhadap jumlah tenaga kerja dan rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Karo.

**Tabel 2.74**
**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN (orang) | 6.093 | 6.357 | 6.389 | 6.727 | 6.863 |
| 2 | Jumlah seluruh PMA/PMDN | 64 | 68 | 70 | 74 | 81 |
| 3 | Rasio daya serap tenaga kerja (1/2*100%) | 95,20 | 93,49 | 91,30 | 90,9 | 84.7 |

*Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Utara, 2023*

Jika dilihat dari perkembangan tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Karo, jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan dari 6.093 orang pada tahun 2018 menjadi 6.863 orang pada tahun 2022. Namun, jika dilihat dari rasio daya serap tenaga kerja mengalami penurunan dari 95,20% pada tahun 2018 menurun menjadi 84,7% pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Karo yang telah memanfaatkan teknologi sehingga berpengaruh terhadap pengurangan jumlah tenaga kerja. Perkembangan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Karo tahun 2018–2022 dapat dilihat seperti pada tabel di atas.

**M. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Pelaksanaan pembangunan pada urusan pemuda diarahkan pada upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup dikalangan pelajar dan pemuda.

upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman pemuda dan pelajar terhadap agama, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, serta peningkatan peran organisasi pemuda dalam pembangunan dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika, produktif serta dapat berperan aktif sebagai motor dalam pembangunan, maka dilakukan berbagai fasilitasi kegiatan kepemudaan.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan dan fasilitasi organisasi pemuda. Periode tahun 2018-2022 Persentase organisasi pemuda yang aktif setiap tahunnya mencapai 100%.

**Tabel 2.75**
**Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH ORGANISASI PEMUDA YANG AKTIF | JUMLAH SELURUH ORGANISASI PEMUDA | PERSENTASE PEMUDA YANG AKTIF |
|---|---|---|---|
| 2018 | 32 | 32 | 100 |
| 2019 | 27 | 27 | 100 |
| 2020 | 28 | 28 | 100 |
| 2021 | 28 | 28 | 100 |
| 2022 | 9 | 9 | 100 |

*Sumber : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo*

Sementara itu, pelaksanaan pembangunan urusan keolahragaan diarahkan pada upaya pengembangan sistem pembinaan, permasalahan dan peningkatan prestasi olahraga yang sistematis, berkelanjutan, terpadu dan terarah. Strategi yang dilakukan adalah melalui peningkatan penjaringan atlet berbakat usia dini, penyelenggaraan even olahraga bagi masyarakat, peningkatan jumlah atlet yang berprestasi, serta pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kehidupan keolahragaan masyarakat secara bermartabat, memiliki etika serta menjunjung nilai-nilai sportivitas.

Peningkatan minat serta kualitas olahraga melalui pembinaan olahraga terhadap cabang olahraga yang terdaftar dengan cakupan sebesar 100% setiap tahunnya. Namun di tahun 2022 menurun menjadi 18%. Hal ini disebabkan karena bertambahnya cabang olah raga yang terdaftar. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.76**
**Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH CABANG OLAHRAGA YANG DIBINA | JUMLAH SELURUH CABANG OLAHRAGA YANG ADA/TERDAFTAR | CAKUPAN PEMBINAAN OLAHRAGA (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 7 | 7 | 100 |
| 2019 | 7 | 7 | 100 |
| 2020 | 7 | 7 | 100 |
| 2021 | 5 | 27 | 18 |
| 2022 | 27 | 27 | 100 |

*Sumber : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo, 2023*

Data selengkapnya terkait jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Karo 2018-2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.77**
**Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Karo 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH ATLET YANG MEMENANGI KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL |
|---|---|
| 2018 | 253 |
| 2019 | 247 |
| 2020 | 374 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 117 |

*Sumber : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo,2023*

Dengan adanya pembinaan dan fasilitasi minat dan bakat atlet olahraga, Kabupaten Karo memperoleh penghargaan pada beberapa kejuaran baik tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2018 sebanyak 253 atlet dan tahun 2019 sebanyak 247 atlet. Sedangkan tahun 2020 jumlah atlet berprestasi sebanyak 374 atlet. Selanjutnya pada tahun 2021 hanya 5 atlet yang berprestasi mengingat banyak perlombaan yang ditiadakan akibat *Pandemic Covid*-19.

## N. Bidang Urusan Statistik

Penyelenggaraan data statistik merupakan salah satu pengamalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Dalam penyelenggaraan data statistik di Kabupaten Karo, dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan instansi pemerintah dan

masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah, namun sistem data dan statistik yang terintegrasi belum tersedia hingga 2022.

**Tabel 2.78**
**Sistem data dan Statistik yang Terintegrasi Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistem data dan statistik yang terintegrasi | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo, 2023*

Dalam publikasi data statistik di Kabupaten Karo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo secara rutin menerbitkan Buku Kabupaten Karo Dalam Angka, Buku Produk Domestik Bruto (PDRB), Buku Kecamatan dalam Angka dan berbagai informasi statistik Kabupaten Karo yang dapat diakses melalui laman resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo.

**Tabel 2.79**
**Buku Kabupaten Dalam Angka dan PDRB**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buku Kabupaten Karo Dalam Angka | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2. | Buku PDRB | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo, 2023*

Publikasi Kabupaten Karo Dalam Angka diterbitkan secara rutin setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo yang memuat berbagai informasi/indikator yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Karo.

Publikasi PDRB Kabupaten Karo diterbitkan secara rutin setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo yang memuat tinjauan mengenai perkembangan perekonomian Kabupaten Karo yang disajikan secara deskriptif melalui tabel PDRB atas dasar harga berlaku maupun konstan dalam bentuk nilai nominal dan persentase dan penjelasan PDRB menurut lapangan usaha.

## O. Bidang Urusan Persandian

Sebagai Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Karo, Pemerintah Kabupaten Karo melalukan upaya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah yang bertujuan menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan pengamanan informasi antara Pemerintah Pusat dan daerah, meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi, dan memberikan pedoman bagi pemerintah

daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah belum terlakasana karena belum adanya perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah yang meliputi meliputi pengamanan Informasi pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten, penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian di daerah diperlukan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Badan Siber dan Sandi Negara berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Sampai dengan tahun 2022, belum ada Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi.

**P. Bidang Urusan Kebudayaan**

Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain, yang kesemuanya ditunjukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Salah satu indikator pembangunan daerah untuk urusan kebudayaan adalah penyelenggaraan festival seni dan budaya. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya padatahun 2018-2022 tidak terlaksana. Penyelenggaraan festival seni dan budaya harus tetap ditingkatkan baik oleh pemerintah daerah maupun melibatkan oleh pihak.

**Tabel 2.80**
**Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO. | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |

*Sumber : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo, 2023*

**R. Bidang Urusan Perpustakaan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dinyatakan bahwa:

- Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi, karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara professional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, infromasi, dan rekreasi para pemustaka.
- Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam dalam berbagai bmedia yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
- Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

Jenis Perpustakaan yang dibina oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karo adalah perpustakaan umum kecamatan, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus (rumah ibadah, lembaga/ instisusi).

Secara umum perpustakaan berfungsi sebagai sumber informasi, sarana pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan rekreasi. Untuk itu peran dan fungsi perpustakaan menentukan berkembangnya ilmu pengetahuan masyarakat. Beberapa indikator perpustakaan antara lain rasio perpustakaan persatuan penduduk yang diperoleh dari jumlah perpustakaan/ jumlah penduduk x 1000 dan hasil rasio menunjukkan kapasitas perpustakaan untuk memfasilitasi kebutuhan membaca masyarakat.

Salah satu indikator untuk melihat tingkat perkembangan kinerja perpustakaan di daerah adalah rasio perpustakaan per satuan penduduk. Indikator ini menunjukkan kapasitas perpustakaan untuk memfasilitasi kebutuhan membaca masyarakat. Di Kabupaten Karo pada rentang waktu tahun 2017-2021 jumlah perpustakaan cenderung meningkat, pada tahun 2018 pertambahan jumlah perpustakaan sebanyak 484 perpustakaan hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur dari Kantor Kearsipan perpustakaan dan dokumentasi menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sehingga tugas pokok dan fungsi dinas bertambah. Data rasio perpustakaan persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.81**
**Tabel Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Karo 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH PERPUSTAKAAN | JUMLAH PENDUDUK (ORG) | RASIO PERPUSTAKAAN PERSATUAN PENDUDUK |
|---|---|---|---|
| 2018 | 484 | 405.162 | 1,194 |
| 2019 | 487 | 415.878 | 1,171 |
| 2020 | 496 | 409.108 | 1,121 |
| 2021 | 496 | 409.077 | 1.212 |
| 2022 | 495 | 333.221 | 0,140 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo, 2023*

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa jumlah perpustakaan 2018 sebanyak 484 unit, pada tahun 2019 kembali meningkat menadi 487 unit dan tahun 2020 meningkat menjadi 496 dan tahun 2021 Jumlah perpustakaan menurun menjadi 411 di karenakan bahwa Negara kita dilanda Virus Covid-19 sehinggaa ada beberapa perpustakaan Desa yang tutup dan tahun 2022 naik menjadi 495 Perpustakaan . Di tahun 2022 ini untuk jumlah penduduk diambil dari Angka Masyarakat Usia Baca di sekitaran Umur 5 s/d 59 Tahun sebanyak 333.221 Jiwa.

Untuk melihat minat masyarakat dalam berliteralisasi dapat dilihat dari jumlah kunjungan ke perpustakaan umum kabupaten. Data jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Karo selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.82**
**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Karo 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN (ORG) | JUMLAH POPULASI YANG HARUS DILAYANI (PENDUDUK) | PERSENTASE JUMLAH KUNJUNGAN TERHADAP POPULASI YANG HARUS DILAYANI (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 38.928 | 405.162 | 9,6 |
| 2019 | 34.258 | 415.878 | 8,2 |
| 2020 | 4.476 | 409.108 | 0,01 |
| 2021 | 1.451 | 409.077 | 0,003 |
| 2022 | 121.885 | 409.077 | 0,297 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo, 2023*

Jumlah kunjungan ke Perpustakaan Umum Kabupaten Karo dari tahun 2018 sebanyak 38.928 orang. Sedangkan pada tahun 2019-2020 pengunjung mengalami penurunan disebabkan karena berkurangnya dana operasional mobil perpustakaan keliling. Sehubungan dengan terjadinya Pandemi Covid-19, pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kunjungan sebanyak 29.782 orang dikarenakan penutupan semua jenis layanan perpustakaan. Jumlah pengunjung sebanyak 4.476 orang pada tahun 2020 di dapat dari kunjungan selama bulan januari s.d. maret 2020 saat

belum diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan pada tahun 2021 jumlah kunjungan ke Perpustakaan Umum Kabupaten Karo semakin berkurang hanya sebanyak 1.451 orang. Angka tersebut merupakan kunjungan selama bulan Oktober s.d. Desember 2021 dengan menerapkan system layanan tertutup dan Tahun 2022 bertambah secara signifikan sebesar 121.885 dikarenakan Kenaikan jumlah layanan yang diselenggarakan yaitu layanan Mobil Perpustakaan Keliling sebanyak 5 (lima) unit yang melayani perpustakaan keliling ke desa desa, serta dibukanya kembali unit layanan Taman Mejuah-juah (*Openstage*) Berastagi pada tahun 2021.

**Tabel 2.83**
**Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| Tahun | Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia (Judul) | Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia (Eksemplar) |
|---|---|---|
| 2018 | 3.199 | 17.497 |
| 2019 | 3.399 | 18.997 |
| 2020 | 3.399 | 18.997 |
| 2021 | 166.218 | 477.246 |
| 2022 | 29.176 | 85.586 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo, 2023*

Salah satu strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan adalah meningkatkan koleksi judul dan jumlah eksemplar buku. Strategi ini diterjemahkan menjadi Program Prioritas Urusan Perpustakaan. Pada tahun 2018 jumlah koleksi sebanyak 3.199 dan 17.497 eksemplar yang berasal dari hibah dan pembelian sebanyak 2.415 eksemplar yang terbagi ke dalam 315 judul. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah koleksi sebanyak 1500 eksemplar yang terbagi ke dalam 200 judul buku, berasal dari hibah dan pembelian. Pada tahun 2020 tidak ada penambahan koleksi buku dan pada tahun 2021 sebanyak 477.246 eksemplar yang terbagi dalam 166.218 judul dimana jumlah Koleksi Judul dan eksemplar di Tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Jumlah Perpustakaan keseluruhan yang ada di Kabupaten Karo . Pada Tahun 2022 sebanyak 85.586 eksemplar terbagi ke dalam 29.176 Judul dimana tahun ini mengalami Penurunan disebabkan karena perhitungan Jumlah Koleksi Perpustakaan pada Tahun 2022 buku paket atau pelajaran tidak dihitung sebagai koleksi buku.

**Tabel 2.84**
**Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Memiliki Sertifikat**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| Tahun | Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat (Org) | Jumlah Seluruh Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai (Org) |
|---|---|---|
| 2018 | 6 | 508 |
| 2019 | 6 | 517 |
| 2020 | 6 | 517 |
| 2021 | 310 | 530 |
| 2022 | 0 | 577 |

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2023*

Peningkatan pengelolaan perpustakaan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya pustakawan, tenaga teknis dan penilai. Sejak tahun 2018-2022 jumlah tenaga teknis meningkat setiap tahun. Pada tahun 2018 jumlahnya sebanyak 514 orang dan 6 Orang Yang memiliki Sertifikat dan tahun 2019 menjadi 519 orang yang memiliki sertifikat tidak mengalami perubahan .Tahun 2020 sebanyak 528 orangg meningkat tahun 2021 menjadi 530 orang yang memiliki sertifikat sebanyak 310 orang . Jumlah pustakawan/tenaga teknis/penilai yang memiliki sertifikat di tahun 2021 mengalami peningkatan dikarenakan menurut pendataan Perpustakaan Sekolah bahwa Jumlah Pustakawan/tenaga teknis/ Penilai yang memiliki Sertifikat sudah pernah mengikuti Diklat/Seminar Perpustakaan melalui Dinas Pendidikan. Untuk tahun 2022 Jumlah Pustakawan 577 orang dan yang memiliki sertifikat tidak ada dan ini sudah diusulkan ke Provinsi agar Kabupaten Karo di ikut sertakan dalam BIMTEK Pustakawan dimaksud.

## S. Bidang Urusan Kearsipan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Kearsipan adalah proses kegiatan pengaturan arsip mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan, denganmenggunakan sistem tertentu, dalam penyusunan, pemeliharaan arsip agar dapat di temukan kembali dengan cepat dan tepat serta mudah untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informosi dan komunikasi yang di buat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan

Perserorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karo**.** Pengelolan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen.

Perkembangan pengelolaan arsip secara baku sejak tahun tahun 2018 -2022 data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.85**
**Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip Secara Baku**
**Kabupaten Karo 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENERAPKAN ARSIP SECARA BAKU | JUMLAH PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| 2018 | 40 | 60 |
| 2019 | 48 | 60 |
| 2020 | 50 | 60 |
| 2021 | 60 | 60 |
| 2022 | 29 | 42 |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo, 2023*

Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku pada tahun 2018 sebanyak 40 perangkat daerah, tahun 2019 sebanyak 48 perangkat daerah, tahun 2020 sebanyak 50 perangkat daerah dan tahun 2021 sebanyak 60 perangkat daerah dan Tahun 2022 sebanyak 42 Perangkat Daerah .Penurunan Perangkat Daerah dikarenakan adanya Penggabungan Nomenklatur di OPD tersebut.

Sumber Daya Manusia kearsipan yang selanjutnya disingkat SDM kearsipan adalah pejabat struktural di bidang kearsipan, arsiparis dan fungsional umum di bidang kearsipan. Kegiatan pembinaan kearsipan adalah kegiatan memberikan pengarahan, penguatan, dan pemberdayaan kepada pencipta arsip, lembaga kearsipan, dan sumber daya manusia kearsipan serta pemangku kepentingan lainnya.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan senantiasa dilakukan hampir setiap tahunnya, karena belum semua OPD dan desa menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Dalam rangka pengelolaan arsip secara baku pemerintah daerah melakukan pembinaan secara intensif melalui sosialisasi, penyuluhan, dan monitoring kearsipan di lingkungan pemerintahan.

**Tabel 2.86**
**Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip Secara Baku**
**Kabupaten Karo 2018-2022**

| Tahun | Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (Orang) | Jumlah Kegiatan |
|---|---|---|
| 2018 | 290 | 1 |
| 2019 | 60 | 1 |
| 2020 | 215 | 1 |
| 2021 | 60 | 1 |
| 2022 | 42 | 1 |

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo, 2023*

Pada tahun 2018 dilaksanakan kegiatan sosialisasi kearsipan di lingkungan pemerintahan desa/kelurahan sejumlah 269 orang dan pengelola arsip pada 17 (tujuh belas) kecamatan sejumlah 21 (dua puluh satu) orang. Pada tahun 2019 dilaksanakan penyusunan Pedoman Jadwal Retensi Arsip terhadap 60 (enam puluh) Perangkat Daerah. Hasil dari kegiatan tersebut adalah adanya peningkatan pengelolaan arsip secara baku. Pada tahun 2020 dilaksanakan pembinaan penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 ke 43 OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. Pada tahun 2021 dilaksanakan kegiatan Pembinaan kearsipan terhadap 60 (enam puluh) unit kerasipan OPD dan Tahun 2022 sebanyak 42 OPD yang sudah dilaksanakan Pembinaan mengenai Kearsipan.

### 2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

#### 1. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Karo diharapkan akan terus meningkat, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya alam yang potensial untuk budidaya perikanan. Pemanfaatan tersebut antara lain didukung oleh ketersediaan irigasi yang memadai dan meningkatkan minat masyarakat. Capaian indikator urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 dapat dilihat di bawah ini.

**Tabel 2.87**
**Capaian Indikator Pembangunan Daerah**
**Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | INDIKATOR | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Produksi Perikanan (%) | 98,75 | 104,49 | 132,12 | 269,22 | 247,16 |
| 2 | Konsumsi Ikan (kg/kap/thn) | 18,06 | 18,09 | 18,27 | 19,73 | 25,73 |
| 3 | Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok) | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | Produksi perikanan kelompok nelayan (ton) | 81,54 | 63,49 | 66,9 | 80,09 | 76,13 |
| 5 | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (ton) | 81,54 | 63,49 | 66,9 | 80,09 | 76,13 |

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo, 2023*

Budidaya Perikanan dilaksanakan di Kolam dan Keramba Jaring Apung (KJA). Produksi perikanan pada Tahun 2022 menurun dari tahun sebelumnya karena penertiban Keramba Jaring Apung yang berada disekitar pinggiran Danau Toba menjadi 247,16 persen. Selanjutnya, Tingkat capaian konsumsi ikan di Kabupaten Karo setiap tahun mengalami kenaikan dan diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya tingkat capaian konsumsi ikan semakin tinggi. Produksi perikanan kelompok nelayan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 76,13 ton. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman adalah perbandingan antara jumlah total hasil tangkapan dalam satu tahun terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam tahun yang sama. Untuk Kabupaten Karo proporsi tangkapan ikan dengan produksi perikanan memiliki nilai yang sama.

**2. Bidang Urusan Pariwisata**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pembangunan pariwisata akan berdampak pada bidang ketenagakerjaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Pengembangan pariwisata tidak akan terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomi, sosial dan budaya. Namun, jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan permasalahan atau bahkan merugikan masyarakat. Untuk menjamin supaya pariwisata dapat berkembang secara baik dan berkelanjutan serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul maka pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara komprehensif.

Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah tujuan wisata unggulan di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi tidak kalah baik dengan daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia. Selain itu, Kabupaten Karo juga memiliki posisi yang strategis dalam pengembangan pariwisata daerah antara lain : memiliki letak geografis yang strategis, sebahagian wilayah Kabupaten Karo merupakan wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba, memiliki banyak potensi wisata terdiri dari wisata alam, wisata religi dan budaya, wisata kuliner dan wisata sejarah, memiliki potensi alam, udara yang bersih dan sejuk serta lingkungan yang masih terjaga kelestariannya.

**Tabel 2.88**
**Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pariwisata**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamu Domestik | 524.238 | 721.460 | 227.812 | 262.250 | 500.656 |
| 2 | Tamu Asing | 6.014 | 6.066 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 558.317 | 530.252 | 727.526 | 227.812 | 500.656 |
| Target Kunjungan | | 750.000 | 850.000 | 900.000 | 500.000 | 718.500 |
| Kunjungan Wisata (%) | | 74,44 | 62,28 | 85,59 | 45,56 | 64,31 |
| PAD Sektor pariwisata (%) | | 94,15 | 101,47 | 98,35 | 90,00 | 87 |

*Sumber : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo, 2023*

Seiring dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Karo yang tak lepas dari meningkatnya jumlah obyek wisata yang dipromosikan dan event wisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Karo maupun pihak swasta. Jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun asing ke Kabupaten Karo mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan capaian kunjungan wisatawan, jika dilihat dari target kunjungan wisatawan Kabupaten Karo tahun 2018-2022 masih belum tercapai dari target yang diharapkan yaitu sebesar 62,28% pada tahun 2018 dan jumlah kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2018

sebanyak 558.317 orang, menurun menjadi 227.812 orang pada tahun 2020, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 262.250. Begitu juga dengan jumlah kunjungan wisatawan asing cukup meningkat dari 6.014 orang tahun 2018 menjadi 6.066 orang tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 dengan jumlah kunjungan wisatawan asing tidak terdata dikarenakan diberlakukan PPKM sebagai langkah pengendalian *Covid19.*

Selain itu, ekonomi kreatif dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karo di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi saat ini. Hal ini didorong oleh perwujudan nilai tambah yang diciptakan oleh usaha/perusahaan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan daya saing produk dan daya saing usaha/perusahaan Kabupaten Karo. Cakupan ekonomi kreatif meliputi enam belas subsektor. Perkembangan enam belas subsektor ekonomi kreatif di Kabupaten Karo belum sepenuhnya menyebar di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Karo. Sebaran usaha ekonomi kreatif menurut kecamatan masih dominan berada di Kecamatan Kabanjahe dan Berastagi, dimana sebaran yang paling rendah berada di Kecamatan Juhar, Kutabuluh, Barusjahe dan Munte. Gambaran subsektor usaha/perusahaan ekonomi kreatif di Kabupaten Karo yang dominan terdapat pada 3 subsektor yaitu: kuliner, kriya dan musik. Untuk lebih meningkatkan sektor ekonomi kreatif maka perlu adanya sinergitas pengembangan ekonomi kreatif antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

**3. Bidang Urusan Pertanian**

Sektor Pertanian merupakan bagian terpenting dalam perekonomian Kabupaten Karo. Peranan sektor ini terhadap PDRB Karo pada tahun 2021 sekitar 53,98 persen untuk harga berlaku. Selain itu, daya serap tenaga kerja juga dominan pada sektor pertanian. Potensi wilayah pada sektor pertanian di Kabupaten Karo sudah lama terkenal sebagai daerah pertanian khususnya sebagai salah satu penghasil hortikultura utama di Provinsi Sumatera Utara. Sebagian produksi hasil pertanian dari Kabupaten Karo dipasarkan ke provinsi lainnya bahkan juga dipasarkan hingga keluar Negeri. Untuk melihat beberapa indikator terkait pertanian dapat disajikan melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 2.89**
**Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya**
**Per Hektar Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO. | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar(kw/Ha) x 100% | | | | | |
| 1. | Padi Sawah | 59.07 | 63,46 | 67,55 | 67,12 | 67,12 |
| 2. | Padi Gogo | 36,42 | 27,77 | 44,22 | 47,18 | 47,18 |
| 3. | Jagung | 59,99 | 70,46 | 66,76 | 69,21 | 69,21 |
| 4. | Ubi Jalar | 194,35 | 183,23 | 162,47 | 162,47 | 162,47 |

*Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2023*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa komoditi padi sawah mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020, akan tetapi padi gogo pada tahun 2021 produktivitasnya mengalami peningkatan menjadi 47,18%. Sementara Jagung juga mengalami peningkatan dari 66,76 % tahun 2020 menjadi 69,21% tahun 2021. Peningkatan produktivitas Jagung ini disebabkan karena cuaca pada tahun 2021 cukup baik.

Tanaman sayuran dan buah-buahan semusim merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Karo. Tanaman yang merupakan komoditas unggulan di Sumatera Utara pada tahun 2021 antara lain kubis, cabai, kentang, tomat, wortel, petsai/sawi, terung, dan kembang kol. Tanaman unggulan tersebut dominan berasal dari Kabupaten Karo dan sebagian dari daerah dataran tinggi provinsi Sumatera Utara lainnya.

**Tabel 2.90**
**Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim (Ton)**
**di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | KOMODITI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bawang Merah | 3.846,40 | 6.040,90 | 8.217,00 | 11.492 | 16.346 |
| 2 | Cabai Merah | 54.704,10 | 55.183,70 | 70.482,00 | 65.755 | 64.666 |
| 3 | Kentang | 57.412,50 | 72.308,00 | 70.368,00 | 96.691 | 97.385 |
| 4 | Kubis | 94.970,30 | 147.860,20 | 134.718,00 | 167.952 | 160.137 |
| 5 | Petsai | 41.872,90 | 58.440,10 | 54.956,00 | 54.947 | 53.988 |
| 6 | Tomat | 71.728,00 | 81.693,20 | 131.931,00 | 163.901 | 132.685 |
| 7 | Wortel | 51.209,00 | 91.992,00 | 93.247,00 | 133.825 | 142.079 |
| 8 | Kembang Kol | 38.517,00 | 50.327,00 | 52.983,00 | 52.185 | 51.573 |

*Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2023*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 untuk komoditi bawang merah, kentang, wortel mengalami peningkatan, sedangkan untuk komoditi cabai merah, Kubis, tomat, petsai dan kembang kol sedikit mengalami penurunan. Kabupaten Karo merupakan kontributor

sayuran dan buah-buahan semusim yang paling dominan di Sumatera Utara, kontribusi kubis sebesar 67,35 persen, cabai 27,15 persen, kentang 60,88 persen, tomat 68,89 persen, wortel 96 persen, petsai 74,23 persen, kembang kol 94,46 persen terhadap total produksi Sumatera Utara.

**Tabel 2.91**
**Produksi Tanaman Buah-Buahan Tahunan (Ton)**
**di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | KOMODITI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeruk | 212.374 | 143.611 | 122.206 | 244.890 | 203.786 |
| 2 | Salak | 1.590 | 4.850 | 4.715 | 5.546 | 15.914 |
| 3 | Nenas | 1.233 | 1.179 | 962 | 305 | 366 |
| 4 | Pisang | 8.952 | 8.151 | 10.627 | 12.553 | 23.452 |
| 5 | Durian | 2.643 | 6.531 | 3.036 | 3.019 | 2.765 |
| 6 | Mangga | 460 | 1.200 | 1.932 | 3.098 | 2.665 |
| 7 | Pepaya | 464 | 179 | 460 | 1.267 | 194 |
| 8 | Alpukat | 2.326 | 2.675 | 3.519 | 3.507 | 5.142 |
| 9 | Markisa | 6.091 | 782 | 311 | 190 | 0 |

*Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2023*

Produksi buah-buahan di Kabupaten Karo paling tinggi adalah Salak yang mencapai 15.914 ton pada tahun 2022, diikuti oleh pisang sebesar 23.452 ton dan Alpukat 5.142 ton. Dibandingkan tahun 2021 produksi jeruk, pisang dan salak mengalami peningkatan.

Selain itu, tanaman hias merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Karo yang juga merupakan daerah sentra tanaman hias di Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 2.92**
**Produksi Tanaman Hias (Tangkai) di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | KOMODITI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krisan | 10.146.369 | 7.769.941 | 4.389.300 | 3.787.500 | 7.144.500 |
| 2 | Sedap Malam | 491.500 | 459.900 | 312.600 | 1.427.000 | 1.316.000 |
| 3 | Mawar | 243.500 | 544.300 | 1.854.000 | 2.988.800 | 4.322.500 |
| 4 | Gladiol | 156.900 | 369.800 | 242.700 | 0 | 0 |
| 5 | Gerbera | 262.000 | 321.400 | 494.000 | 713.000 | 439.000 |
| 6 | Anyelir | 65.200 | 197.600 | 367.500 | 0 | 0 |

*Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2023*

Tanaman hias yang dengan produksi tertinggi setiap tahunnya adalah krisan. Kabupaten Karo merupakan kontributor tanaman hias yang paling dominan di Sumatera Utara, antara lain anyelir sebesar 96,41%, gerbera sebesar 98,43%, gladiol sebesar 99,21%, mawar sebesar 97,48%, sedap malam sebesar 79,92%, krisan sebesar 99,93% terhadap total produksi Sumatera Utara.

**Tabel 2.93**
**Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | KOMODITI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tembakau | 417,57 | 254,12 | 518 | 444 | 404,80 |
| 2 | Kakao | 3.193,92 | 3.199,37 | 3.394 | 3.205 | 3.432,65 |
| 3 | Kopi | 13.279,74 | 13.442,17 | 7.901 | 7.411 | 8.336,19 |
| 4 | Karet | 72,6 | 73,0 | 76 | 73 | 80,85 |
| 5 | Kelapa Sawit | 6.049,75 | 6.049,75 | 6.541 | 6.102 | 6.604,19 |
| 6 | Kelapa | 833,54 | 833,54 | 1.238 | 1.359 | 1.376,07 |

*Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2023*

Pada tahun 2022 hanya komoditi tembakau yang mengalami penurunan, sedangkan untuk tanaman perkebunan lainnya mengalami kenaikan produksi. Kabupaten Karo juga merupakan salah satu sentra penghasil kopi di Sumatera Utara, komoditi kopi juga telah diolah menjadi bahan minuman dan sudah dipasarkan di dalam dan luar negeri.

**Tabel 2.94**
**Jumlah Populasi Ternak (Ekor) di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | JENIS HEWAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sapi Potong | 11.249 | 11.474 | 11.876 | 13.763 | 14.088 |
| 2 | Sapi Perah | 772 | 995 | 3.337 | 3.451 | 3.655 |
| 3 | Kerbau | 1.398 | 1.423 | 2.008 | 2.130 | 2.122 |
| 4 | Kuda | 332 | 341 | 215 | 200 | 222 |
| 5 | Kambing/Domba | 13.187 | 15.632 | 14.117 | 15.840 | 17.694 |
| 6 | Babi | 36.793 | 28.132 | 23.126 | 22.382 | 24.915 |
| 7 | Kelinci | 1.649 | 1.853 | 7.307 | 7.942 | 7.503 |
| 8 | Ayam Kampung | 419.397 | 379.339 | 339.832 | 395.285 | 411.393 |
| 9 | Itik | 24.919 | 3.189 | 27.375 | 23.993 | 23.809 |

*Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2023*

Dari tabel di atas dapat dilihat jenis hewan dominan yang dipelihara oleh masyarakat Kabupaten Karo adalah ayam kampung, dimana pada tahun 2022 jumlah budidaya ayam kampung sebesar 411.393 ekor meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 395.285 ekor.

**Tabel 2.95**
**Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontribusi Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%) | 54,17 | 53,27 | 53,72 | 53,98 | 54,24 |
| 2 | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%) | 5,68 | 5,68 | 5,84 | N/A | N/A |
| 3 | Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok) | 11,35 | 11,54 | 5,84 | 6,93 | 10,38 |

*Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2023*

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Karo pada kurun waktu tahun 2018-2021 cenderung

menurun yaitu dari 54,17 persen menjadi 53,98 persen, sedangkan di tahun 2022 meningkat menjadi 54,94. Kontribusi sektor tersebut selalu menurun dikarenakan kontribusi sektor lain, khususnya industri pengolahan mengalami peningkatan. Namun demikian nilai produksi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tidak mencerminkan kurang berhasilnya pembangunan pada sektor pertanian, karena yang lebih penting adalah peningkatan nilai produksinya.

**4. Bidang Urusan Kehutanan**

Capaian indikator urusan Kehutanan Kabupaten Karo Tahun 2017-2021 dapat dilihat di bawah ini.

**Tabel 2.96**
**Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Kehutanan**
**Kabupaten Karo Tahun 2017-2021**

| NO | URAIAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luas Lahan Kritis (ha) | 12.272,39 | 12.272,39 | 12.272,39 | 12.272,39 | 12.272,39 |
| 2 | Luas Reboisasi (ha) | 50 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| 3 | Luas Kawasan Hutan | 103.282 | 103.282 | 103.282 | 126.782 | 126.782 |

*Sumber : UPT KPH Wilayah XV Kabanjahe, BPS 2022*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa luas lahan kritis, luas reboisasi dan luas kawasan hutan di Kabupaten karo untuk tahun 2021 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2020.

**5. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara pada tataran pemerintah daerah kabupaten/kota diambil alih oleh pemerintah daerah provinsi yang merupakan wakil pemerintah pusat.

**Tabel 2.97**
**Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karo Tahun 2017-2021**

| NO | URAIAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertambangan tanpa izin (%) | - | - | - | - | - |
| 2 | Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%) | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 |

Dari tabel dilihat bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB total relatif kecil yaitu sebesar 0,21 persen. Hal ini dikarenakan tidak adanya kewenangan kabupaten/kota dalam hal perizinan pertambangan mineral dan batubara. Dalam undang-undang tersebut kewenangan Kabupaten/kota sebatas penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota. Sementara peraturan pemerintah yang mengatur tentang penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota belum terbit sehingga belum dapat terlaksana terkait penerbitan izin tersebut.

**Tabel 2.98**
**Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik**
**Kabupaten Karo Tahun 2018–2022**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023*

Pada tahun 2022 persentase jumlah rumah tangga pengguna listrik sebanyak 82% artinya masih terdapat 18% rumah tangga belum dialiri oleh listrik, hal tersebut diakibatkan antara lain karena masih terdapat desa yang berada pada kawasan hutan.

**6. Bidang Urusan Perdagangan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dalam rangka usaha pengembangan urusan perdagangan, maka harus ada kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan daerah. Disamping menangani perdagangan antar wilayah regional maupun internasional, juga dituntut mampu menyediakan pasar tradisional yang mempunyai daya saing dan berkualitas.

Dalam rangka usaha pengembangan urusan perdagangan, maka harus ada kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan daerah.

Disamping menangani perdagangan antar wilayah regional maupun internasional, juga dituntut mampu menyediakan pasar tradisional yang mempunyai daya saing dan berkualitas.

Perdagangan di Kabupaten Karo diupayakan akan terus ditingkatkan untuk kesiapan dalam menghadapi persaingan perdagangan global. Perdagangan di Kabupaten Karo juga berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal serta mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi.

Capaian indikator urusan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.99**
**Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 (miliar Rp)**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekspor (ADHB) | 5.060,46 | 5.036,53 | 5.099,92 | 5.770,24 | 6 805,86 |
| 2 | Impor (ADHB) | 5.257,10 | 5.255,94 | 5.093,57 | 5.618,31 | 6 376,89 |
| 3 | Ekspor Bersih | -196,64 | -219,41 | 6,35 | 151,93 | 428,97 |

*Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2023*

Total nilai ekspor Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2018 sebesar 5.060,46 miliar. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 5.036,53 miliar rupiah. Pada tahun 2020 dan 2021 kembali mengalami peningkatan masing masing sebesar 5.099,92 miliar rupiah dan 5.770,24 miliar rupiah begitu juga halnya pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 6.805,86 miliar

Nilai ekspor bersih tahun 2018 sebesar -196,64 miliar dan pada tahun 2019 turun Kembali menjadi -219,41 miliar rupiah. pada tahun 2020 naik menjadi 6,35 miliar dan pada tahun 2021 naik menjadi 151,93 miliar rupiah serta tahun 2022 naik lagi menjadi 428,97 miliar rupiah. Untuk itu perlu perhatian dalam peningkatan pada sektor perdagangan sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

### 8. Bidang Urusan Perindustrian

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa industri merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Industri Kecil Menengah (IKM) yang berkembang di Kabupaten Karo sebagian besar merupakan industri rumah tangga. Adapun cabang industri atau sentra industri yang berkembang di Kabupaten Karo antara lain: kerajinan, bahan bangunan, pangan, dan logam. IKM di Kabupaten Karo perlu ditingkatkan sejalan dengan potensi Kabupaten Karo di bidang pertanian dan sebagai daerah tujuan wisata sehingga dalam rangka menunjang sektor pariwisata dan pertanian maka sektor industri perlu mendapat prioritas.

Cakupan bina kelompok pengrajin dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.100**
**Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Perindustrian**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%) | 11,54 | 13,21 | 12,75 | 14,55 | 17,86 |
| 2 | Kontribusi sektor Industri pengolah terhadap PDRB | 3,66 | 3,71 | 3,71 | 3,80 | 3,85 |

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo, 2023*

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2018 adalah sebesar 3,66 persen, pada tahun 2019 dan 2020 menjadi sebesar 3,71 persen dan meningkat Kembali menjadi 3,80 persen pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 naik lagi menjadi 3,85 persen. Kontribusi sektor industri pengolahan diharapkan semakin naik untuk pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk cakupan Bina Kelompok pengrajin pada tahun 2018 sebesar 11,54 persen, meningkat menjadi 13,21 persen pada tahun 2019 namun pada tahun 2020 turun menjadi menjadi 12,75 persen dan pada tahun 2021 dan 2022 naik Kembali menjadi 14,55 persen dan 17,86 persen. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian pemerintah terhadap kelompok pengrajin untuk mendapatkan bantuan binaan dari pemerintah daerah.

### 2.1.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

### A. Sekretariat Daerah

Salah satu unsur pemerintahan yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian peranan dan fungsi serta kinerja Sekretaris Daerah begitu penting dan sangat strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah.

**Tabel 2.101**
**Capaian Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | REALISASI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Kasus bantuan hukum yang tertangani | Kasus | 3 | 5 | 4 | 3 (Satu perkara masih belum selesai) | 5 (Empat perkara masih berjalan prosesnya) |
| 2 | Nilai Reformasi Birokrasi | Kategori | C | C | C | C | Nilai Belum Keluar |
| 3 | Nilai hasil evaluasi SAKIP | Kategori | C | C | C | C | Nilai Belum Keluar |
| 4 | Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Kategori | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Nilai Belum Keluar | Nilai Belum Keluar |
| 5 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Kategori | C | C | C | C | Nilai Belum Keluar |
| 6 | Jumlah unsur rupa bumi yang sudah dibakukan namanya | Unsur | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 7 | Jumlah media penyampaian informasi pembangunan daerah | | | | | | |
| | Media Massa | Media | 28 | 31 | 22 | 22 | 18 |
| | Media Elektronik | Media | 18 | 15 | 30 | 30 | 32 |

*Sumber: Sekretriat Daerah Kab. Karo, 2023*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus bantuan hukum yang tertangani di kabupaten Karo pada tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kasus, tahun 2018 sebanyak 5 (lima) kasus dan pada tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kasus. Nilai Reformasi Birokrasi, Nilai hasil evaluasi SAKIP serta Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Karo untuk tahun 2018 dan tahun 2021 masih rendah yaitu kategori C. Jumlah unsur rupa bumi yang sudah dibakukan namanya di Kabupaten Karo pada tahun 2021 dan 2022 adalah 2 (dua) unsur rupabumi. Jumlah media penyampaian informasi pembangunan daerah (media cetak) pada tahun 2018 sebanyak 28 media, dan tahun 2022 terdapat 18 media, sedangkan untuk media elektronik pada pada tahun 2018 sebanyak 18 media, dan tahun 2022 sebanyak 32 media.

## B. Sekretariat DPRD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan dapat diukur melalui indikator kinerja. Periode tahun 2018-2022 indikator kinerja penunjang urusan Sekretariat Dewan dilaksanakan setiap tahunnya oleh Sekretariat Dewan Kabupaten Karo.

**Tabel 2.102**
**Indikator Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Dewan**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | KETERANGAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2 | Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3 | Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

*Sumber Sekretariat DPRD Kab.Karo, 2023*

### 2.1.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

### A. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Perencanaan Pembangunan daerah dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan capaian indikator pembangunan daerah. Urusan Penunjang Perencanaan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.103**
**Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Penunjang Perencanaan**
**Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda | Tidak | Tidak | Ada | Ada | Ada |
| 2 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3 | Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 4 | Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%) | 86,67 | 86,80 | 86,00 | 100 | 100 |
| 5 | Konsistensi program RKPD ke dalam APBD (%) | 92,87 | 92,90 | 92,90 | 100 | 100 |

*Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Karo, 2023*

Dari tabel di atas terlihat bahwa dokumen perencanaan RPJPD belum ditetapkan melalui Perda sampai tahun 2019. Perda RPJPD ditetapkan pada tahun 2020, melalui Perda Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 22 Mei 2020. Untuk capaian indikator tersedianya dokumen RPJMD dan RKPD melalui Perda dan Perkada telah tercapai dengan baik melalui Tahun 2018-2022. Selanjutnya capaian indikator konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD sudah terlihat tren membaik dimana tahun 2018 sebesar 86,67%, menjadi 100% pada tahun 2022. Demikian juga terkait indikator konsistensi program RKPD ke dalam APBD terlihat tren membaik dari pada rentang tahun 2018–2022.

**B. Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keuangan daerah merupakan komponen yang paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 2.104**
**Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILPA | 350.172.679.545,49 | 239.680.537.856,64 | 239.150.872.081,00 | 102.027.785.583 | 165.879.127.706 |
| 2 | Persentase SILPA/total belanja | 25,05 | 15,66 | 15,50 | 6,10 | 3.81 |

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Perbandingan Belanja Langsung dengan belanja APBD | 39% | 37% | 26.77% | N/A | N/A |
| 4 | Perbandingan Belanja Tidak Langsung dengan belanja APBD | 61% | 63% | 57,43% | N/A | N/A |
| 5 | Persentase Belanja Pendidikan | 28% | 26% | 20.84% | 28% | 28% |
| 6 | Persentase Belanja Kesehatan | 13% | 13% | 14.02% | 26% | 26% |
| 7 | Penetapan APBD | Tidak Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| 8 | Opini BPK | WDP | WTP | WTP | WTP | N/A |
| 9 | Persentase Aset Tanah Yang Bersertifikat | 17,31% | 22,70% | 31.89% | 39.39% | 52.58% |
| 10 | Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah | 10,65 | 8,26 | 7.88 | 8.01 | 7.46 |
| 11 | Persentase pajak terhadap PAD | 28,21 | 37,74 | 41.02 | 38.41 | 52.98 |

*Sumber : BKAD Kabupaten Karo, 2023 (diolah)*

Keuangan daerah mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Berkaitan dengan pengelolaan belanja daerah, kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari persentase SILPA dari total belanja daerah setiap tahunnya. Persentase SILPA Kabupaten Karo secara umum mengalami penurunan. Pada tahun 2018 besar persentase SILPA Kabupaten Karo sebesar 25,05% yang disebabkan adanya dana transfer yang masuk pada akhir tahun anggaran sehingga tidak dapat direalisasikan dan persentase SILPA menurun menjadi sebesar 15,66% pada Tahun 2019 dan sebesar 15,50% pada Tahun 2020 dan terus menurun menjadi sebesar 6,10% pada tahun 2021 dan sebesar 3,81% pada tahun 2022.

Proporsi perbandingan Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah Kabupaten Karo tahun 2018-2022 berada pada kisaran 26,77%-39% dan perbandingan Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah Kabupaten Karo pada tahun 2018-2022 berada pada kisaran 57,43%-63% Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Karo lebih besar dari anggaran Belanja Langsung. Namun, apabila dilihat dari komponen anggaran pada Belanja Tidak Langsung di dalamnya juga terdapat Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sehingga alokasi anggaran pada Belanja Tidak Langsung menjadi lebih besar dari Belanja Langsung Kabupaten Karo.

Selain itu, dilihat dari persentase belanja pendidikan Kabupaten Karo tahun 2018-2022, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan pada kisaran 20.84%-28%. Hal ini telah sesuai dengan amanah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD. Demikian halnya dengan persentase belanja kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022, alokasi anggaran kesehatan berada pada kisaran 13%-26%. Hal ini, pemerintah telah memenuhi ketentuan anggaran sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kabupaten Karo memantapkan komitmennya untuk mencapai *Good Governance* dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2019-2021. Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Karo memperoleh opini WDP. Dengan pencapaian ini Pemerintah Kabupaten Karo berharap bisa menjadikan informasi yang ada dalam LKPD ini sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga dari LKPD yang ada saat ini dapat dinilai kinerja Pemerintah Kabupaten Karo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

Secara umum, Aset tetap Pemerintah Kabupaten Karo sudah teregristrasi melalui aplikasi SIMBADA (Barang Milik Daerah) yang tercatat pada Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Karo yang terdiri dari inventaris aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi dan aset tetap lainnya. Namun, masih terdapat kendala dalam penatausahaan barang milik daerah khususnya pada aset tetap tanah yang belum bersertifikat. Berdasarkan jumlah aset tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karo sebanyak 1.427 bidang tanah, baru sekitar 242 aset tanah yang sudah bersertifikat atau sebesar 17,31% pada

Tahun 2018 dan meningkat menjadi 562 aset tanah yang bersertifikat pada tahun 2022 atau sebesar 52,58%. Hal ini, dikarenakan perolehan kelengkapan dokumen dari pengguna barang belum dipenuhi untuk proses penerbitan sertifikat pada Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Karo.

## C. Kepegawaian

Indikator pencapaian kinerja urusan kepegawaian salah satunya dapat dilihat dari persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Tahun 2018-2022 total jabatan sebanyak 837 jabatan.

**Tabel 2.105**
**Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| TAHUN | JUMLAH ASN YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL | JUMLAH TOTAL JABATAN | PERSENTASE ASN YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 837 | 0 |
| 2019 | 205 | 837 | 21,49% |
| 2020 | 205 | 837 | 24,49% |
| 2021 | 212 | 837 | 25,33% |
| 2022 | 0 | 837 | 0 |

*Sumber: BKPSDM Kabupaten Karo, 2023*

## D. Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan Permendagri 17 tahun 2016, dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri perlu dilakukan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, serta berkesinambungan. Penelitian dan pengembangan atau kelitbangan terdiri dari kelitbangan utama yaitu penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan yang dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan, serta kelitbangan pendukung.

Penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Badan Litbang dan Pemerintahan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN), dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah, sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk produk kelitbangan selama ini dikerjakan pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang terpencar pada perangkat daerah, belum terpusat pada lembaga kelitbangan Kabupaten Karo yaitu Bappedalitbang Kabupaten

Karo. Pelaksanaan kelitbangan di Kabupaten Karo belum rutin dilakukan pemantauan dan evaluasi, sehingga belum dapat diketahui dengan pasti pemanfaatan hasil kelitbangan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Terkait penerapan dan kebijakan inovasi daerah yang diterapkan, Pemerintah Kabupaten Karo mulai ikut serta pada *Innovative Government Award* (IGA) Kemendagri sejak tahun 2018 dengan predikat "Kabupaten Kurang Inovatif". Namun pada tahun 2019 ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun, predikat Kabupaten Karo meningkat menjadi "Kabupaten Inovatif" pada tahun 2019 dan "Kabupaten Sangat Inovatif" pada tahun 2020. Pada tahun 2021 dan tahun 2022, Kabupaten Karo turun predikatnya menjadi "Kabupaten Inovatif", bukan karena skor Kabupaten Karo menurun tetapi metode penilaian berubah dari skor yang lebih memperhatikan jumlah inovasi menjadi indeks yang lebih menekankan tingkat kematangan atau kualitas inovasi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karo dalam mengusulkan inovasi harus mempertimbangkan kualitas dibandingkan dengan kuantitas inovasi atau mengusulkan inovasi yang berkualitas atau matang dari dokumen pendukung yang harus disediakan.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Karo sudah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah diharapkan kepatuhan Perangkat Daerah terkait penerapan Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun meningkat karena menjadi suatu kewajiban dan instansi yang tidak melaksanakan akan diberi sanksi.

**Tabel 2.106**
**Penerapan Inovasi Daerah dan Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | TAHUN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Penerapan SIDa** | | | | | |
| 1.1 | Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi | 6 | 60 | 60 | 59 | 46 |
| 1.2 | Jumlah total perangkat daerah | 60 | 60 | 60 | 59 | 46 |
| 2 | **Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)** | **10** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 2.1 | Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan | 6 | 62 | 33 | 34 | |
| 2.2 | Jumlah inovasi yang diusulkan | 6 | 62 | 92 | 44 | 42 |
| 3 | **Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)** | **100** | **100** | **100** | **77,27** | |

*Sumber: Bappedalitbang Kab. Karo, 2023*

Bappedalitbang Kabupaten Karo menyediakan ruang diskusi rutin inovasi *Learning Organization Innovation Based* sejak tahun 2021 sebagai media yang dapat dimanfaatkan oleh setiap instansi setiap jam dan hari kerja berdiskusi terkait kendala dan permasalahan pelaksanaan dan penerapan inovasi pada instansinya. Disamping itu, ada pertemuan-pertemuan rutin inovasi dan workshop untuk fasilitator inovasi instansi.

Jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah Kabupaten Karo lebih banyak daripada yang ditetapkan penerapannya dan diusulkan ke IGA Kemendagri karena banyak inovasi tidak dilaksanakan dengan komitmen tinggi dan kerja keras sehingga tingkat kematangan inovasi rendah dan tidak layak diusulkan ke IGA Kemendagri. Pada IGA Kemendagri tahun 2022, lebih 30 usulan inovasi yang sudah dientri ke Aplikasi IGA Kemendagri, tidak dapat dikirim karena tidak layak dari tingkat kematangan atau beresiko menurunkan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Karo. Ini menjadi pelajaran berharga bagis setiap instansi agar dalam melaksanakan inovasi wajib berkomitmen tinggi, kerja keras dan senantiasa mau belajar meningkatkan kemampuan berinovasi.

### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

#### 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

❖ **Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita**

Untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi salah satunya dapat dilihat dari perkembangan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat. Masyarakat yang dengan tingkat pendapatan lebih tinggi, secara umum akan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya lebih rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran atau konsumsi masyarakat juga mencerminkan tingkat kesejahteraan. Konsumsi Rumah tangga per Kapita di Kabupaten Karo disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.107**
**Pengeluaran RT per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2017–2021**

| NO. | URAIAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pengeluaran RT Per Kapita (Rp) | 1.064.042 | 1.276.518 | 1.322.725 | 1.364.192 | 1.384.784 |

*Sumber : BPS, Kab. Karo, 2022*

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, rata rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Karo tahun 2017-2021 terus

mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, pengeluaran per kapita Kabupaten Karo sebesar Rp1.064.042,- meningkat menjadi sebesar Rp Rp1.276.518,- pada tahun 2018 dan terus meningkat menjadi sebesar Rp1.322.725,- pada Tahun 2019 dan Rp1.364.192,- pada tahun 2020, serta Rp1.384.784,- pada tahun 2021. Peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk ini salah satunya juga dikarenakan adanya meningkatan upah gaji yang mereka terima, seperti adanya kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain lain. Hal lain yang juga mendorong peningkatan konsumsi adanya peningkatan inflasi atas barang dan jasa, pada akhirnya memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

**1. Panjang Jalan**

Kabupaten Karo memiliki luas wilayah 2.127,25 km$^2$ dan terbagi ke dalam 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan. Untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut telah tersedia jalan dengan total panjang 1.218,15 km (jalan kewenangan Kabupaten Karo). Dari jumlah tersebut sebagian besar jenis permukaannya aspal. Kondisi jalan di Kabupaten Karo pada tahun 2021 sebesar 61,37% dalam kondisi baik.

**2. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum**

Kabupaten Karo merupakan wilayah strategis dimana merupakan salah satu jalur transportasi yang menghubungkan beberapa kabupaten antara lain Kabupaten Simalungun, Dairi, Langkat, Deliserdang, Pakpak Barat serta juga merupakan jalur penghubung dari Ibukota Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Aceh Singkil dan Gayo Lues Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Terdapat 1 (satu) terminal di wilayah Kabupaten Karo yang melayani transportasi dalam kota, pedesaan, maupun antar kota. Jumlah arus penumpang angkutan umum melalui terminal yang ada di Kabupaten Karo menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2020 sebanyak 3.696.720 orang menurun menjadi 2.587.704 orang pada tahun 2021.

**3. Luas Wilayah Industri**

Sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Karo, pengembangan kawasan peruntukan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah berada tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Karo. Sementara itu, untuk

industri besar direncanakan untuk dikembangkan di Kecamatan Merek, Mardinding, Laubaleng, Tigabinanga, Berastagi.

**4. Luas Wilayah Kebanjiran**

Data mengenai luas wilayah yang mengalami kebanjiran belum tersedia secara lengkap namun dapat dilihat beberapa daerah yang sering terkena banjir ada di Kecamatan Mardinding dan Laubaleng, beberapa titik di daerah perkotaan Kecamatan Kabanjahe, Berastagi dan Tigapanah.

**5. Luas Wilayah Kekeringan**

Kabupaten Karo sangat jarang mengalami kekeringan yang panjang. Namun kekeringan jangka pendek beberapa kali terjadi di Kecamatan Munte, Tigabinanga, Juhar, Lau Baleng dan Mardinding dengan luasan yang belum terdata.

**6. Luas Wilayah Perkotaan**

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Karo disebutkan bahwa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan berada di Kecamatan Kabanjahe, Berastagi, Tigabinanga dan Kutabuluh dimana luasannya belum ditetapkan.

**7. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran/Rumah Makan**

Jenis, kelas dan jumlah restoran/rumah makan yang ada di Kabupaten Karo belum terdata secara baik, namun dapat dilihat penambahan cukup signifikan berupa cafe yang banyak bertambah khususnya di Kecamatan Kabanjahe dan Berastagi.

**8. Pelayanan Air Bersih**

Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Karo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2021 telah mencapai 87,83%. Namun demikian kontuinitas dari ketersediaan air minum dimaksud perlu ditingkatkan dimana sering terjadi kerusakan jaringan perpipaan yang mengakibatkan dalam waktu waktu tertentu ketersediaan air menjadi berkurang.

### 2.1.4.3. Fokus Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tercipta apabila didukung oleh iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi. Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam setiap proses penanaman modal, bahkan rekomendasi pemerintah merupakan syarat mutlak dalam penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak. Ada beberapa indikator yang mempengaruhi iklim investasi suatu daerah yaitu keamanan suatu daerah, regulasi yang mendukung iklim invetasi, potensi SDA dan ketersediaan SDM.

Keamanan suatu daerah dapat dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi setiap tahun. Selain angka kriminalitas, kejadian unjuk rasa juga sangat berpengaruh terhadap faktor keamanan. Kegiatan unjuk rasa di Kabupaten Karo pada tahun 2018 sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dan bertambah menjadi 17 (tujuh belas) kegiatan demonstrasi pada tahun 2018 dikarenakan suhu politik di Kabupaten Karo yang memanas. Selanjutnya, pada tahun 2018 kegiatan unjuk rasa menurun menjadi sebanyak 11 (sebelas) kegiatan demonstrasi dan kembali meningkat menjadi 13 (tiga belas) kegiatan demonstrasi pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 7 (tujuh) kegiatan demonstrasi. Faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan memiliki berbagai strategi dalam menjaga kestabilan dan keamanan serta perlunya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban Kabupaten Karo. Jumlah unjuk rasa di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.108**
**Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah unjuk rasa | 11 | 13 | 7 | - | - |

*Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Karo, 2023*

Selain angka kriminalitas dan unjuk rasa, iklim investasi yang baik dilihat dari salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah yaitu kemudahan dalam mengurus perijinan usaha dan regulasi yang mendukung iklim invetasi. Strategi

Pemerintah Kabupaten Karo dalam meningkatkan daya saing daerah dari segi investasi adalah dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, potensi dan peluang investasi serta promosi investasi. Pemerintah Kabupaten Karo telah menerapkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui sistem pelayanan perizinan secara online yaitu aplikasi perizinan SI-CANTIK (Sistem Informasi Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik), OSS RBA (*Online Single Submission-Risk Based Approach*) dan Aplikasi SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)

Terdapat beberapa jenis perizinan yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo melalui yaitu :

A. Aplikasi SI-CANTIK antara lain :
   1. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Izin Praktek Dokter, Izin Kerja Perawat, Izin Praktek Bidan, Izin Mendirikan Rumah Sakit, dll)
   2. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan (Izin PAUD, Izin SD, Izin SMP, Izin Pendidikan Formal dan Nonformal, dll)

B. OSS-RBA untuk perizinan berusaha sesuai KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) antara lain :
   - NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk usaha risiko rendah
   - NIB dan Sertifikat Standar untuk usaha risiko menengah rendah, dan menengah tinggi
   - NIB dan Izin untuk usaha risiko tinggi

C. SIMBG
   - PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)

**2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia**

**1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan mampu melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam sumber daya manusia, yang diliput bukan terbatas kepada tenaga ahli, tenaga berpendidikan atau pun tenaga yang berpengalaman saja, tetapi semua tenaga kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Mendapatkan SDM yang berkualitas tentunya merupakan impian dari suatu daerah, hal ini disebabkan karena SDM merupakan salah satu langkah awal yang sangat penting yang dapat digunakan untuk

membangun dan memajukan suatu daerah. Adapun persentase menurut ijazah Diploma I, II, III, IV dan S1 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.109**
**Menurut Ijazah Diploma I/II, III, IV dan S1 Keatas**
**Kabupaten Karo Tahun 2015-2019**

| TAHUN | DIPLOMA I/II | DIPLOMA III | DIV/S1 KEATAS |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0,52 | 0,93 | 5,07 |
| 2018 | 0,21 | 1,47 | 4,67 |
| 2017 | 0,69 | 2,34 | 4,84 |
| 2016 | 0,37 | 1,69 | 5,43 |
| 2015 | 0,85 | 2,01 | 3,93 |

*Sumber: BPS Kab.Karo, 2020*

## 2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Hasil analisis rasio ketergantungan terlihat bahwa rasio ketergantungan semakin menurun dimana tahun 2020 sebesar 57,17%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 57,34% (tahun 2019) seperti disajikan tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.110**
**Rasio Ketergantungan Kabupaten Karo Tahun 2016-2021**

| NO | URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio ketergantungan (%) | 57,88 | 57,66 | 57,49 | 57,34 | 57,17 |

*Sumber: BPS, 2021*

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan rencana pembangunan yang diaktualisasikan dalam kebijakan dan program kegiatan, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian program pembangunan yang direncanakan ke depan menjadi lebih efisien, efektif disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

# Tabel 2.111
# Kinerja Kegiatan dan Keuangan pada Perangkat Daerah

| No | Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi (2022) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2022) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | (10=6+7+8+9) | | (11=10/5*100%) | | (12=4+10) | | (13=12/3*100%) | |
| | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
| 1 | Dinas Pendidikan | 0 | 1,982,836,709,309 | 0 | 0 | 0 | 410,842,347,510 | 0 | 392,164,584,372 | 0 | 95.45% | 0 | 392,164,584,372 | 0 | 19.78 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 0 | 871,399,588,986 | 0 | 0 | 0 | 161,664,460,366 | 0 | 146,967,164,584 | 0 | 90.91% | 0 | 146,967,164,584 | 0 | 16.87 |
| 3 | Rumah Sakit Umum Daerah | 0 | 77,888,626,044 | 0 | 0 | 0 | 72,247,448,587 | 0 | 61,015,292,845 | 0 | 84.45% | 0 | 113,684,877,125 | 0 | 2.09 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 0 | 389,790,037,245 | 0 | 0 | 0 | 135,726,830,746 | 0 | 110,290,090,628 | 0 | 81,00% | 0 | 110,290,090,628 | 0 | 0.28 |
| 5 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertahanan | 0 | 13,588,632,233 | 0 | 0 | 0 | 24,807,365,021 | 1,859.98 | 43,771,936,545 | 0 | 76.45% | 1,859.98 | 63,618,734,980 | 0 | 1,116.06 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 64,774,522,720 | 0 | 0 | 0 | 18,189,890,669 | 0 | 17,437,927,077 | 0 | 95.87% | 0 | 17,437,927,077 | 0 | 0 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,494,066,944 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dinas Sosial | 0 | 22,982,128,300 | 0 | 0 | 0 | 7,039,176,597 | 0 | 6,416,579,711 | 0 | 91.16% | 0 | 10,788,390,128 | 0 | 0 |
| 9 | Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah | 0 | 23,103,603,548 | 0 | 0 | 0 | 5,051,133,421 | 0 | 4,764,591,149 | 26.29 | 94.33% | 0 | 4,704,677,369 | 15.05 | 30.03 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 84,164,064,349 | 0 | 0 | 0 | 18,143,398,789 | 0 | 8,302,585,086 | 0 | 45.76% | 0 | 7,136,437,636 | 0 | 135.95 |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 0 | 59,096,283,095 | 0 | 0 | 0 | 12,609,145,164 | 83 | 11,880,688,281 | 100 | 94.22% | 0 | 11,880,688,771 | 0 | 0 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 0 | 143,322,520,390 | 0 | 0 | 0 | 26,463,909,664 | 0 | 25,600,685,083 | 0 | 96.74% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 32,781,205,637 | 0 | 0 | 0 | 5,398,083,564 | 0 | 4,915,977,426 | 0 | 91.07% | 0 | 4,915,977,426 | 0 | 0 |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 0 | 52,991,859,877 | 0 | 0 | 0 | 15,902,032,596 | 83.99 | 14,053,945,978 | 0.84 | 88.38% | 83.99 | 6,004,018,070 | 0.59 | 0.33 |
| 15 | Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,509,261,069 | 857 | 11,078,683,554 | 97.64 | 54.02% | 0 | 11,078,683,554 | 0 | 0 |
| 16 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 41,259,575,570 | 0 | 0 | 0 | 8,885,710,158 | 0 | 8,490,587,344 | 0 | 95.55% | 0 | 8,490,587,344 | 0 | 0 |
| 17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 37,958,588,677 | 0 | 0 | 0 | 6,438,015,652 | 922 | 5,891,308,881 | 0 | 91.51% | 922 | 10,254,629,313 | 0 | 0 |
| 18 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,160,999,619 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 0 | 36,952,808,791 | 0 | 0 | 15,679.68 | 6,212,492,282 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | | 0 |
| 20 | Dinas Pertanian | 0 | 129,633,170,927 | 0 | 0 | 0 | 39,030,700,211 | 0 | 14,001,039,188 | 0 | 35.87% | 0 | 111,065,206,315 | 0 | 141.67 |
| 21 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 0 | 80,682,975,036 | 0 | 0 | 0 | 22,548,130,542 | 0 | 18,192,870,210 | 0 | 80.68% | 0 | 74,356,461,394 | 0 | 92.16 |
| 22 | Sekretariat Daerah | 0 | 27,661,260,094 | 0 | 0 | 0 | 34,753,100,128 | 0 | 13,677,288,065 | 0 | 39.36% | 0 | 13,677,288,065 | | |
| 23 | Sekretariat DPRD | 0 | 178,799,634,300 | 0 | 0 | 0 | 41,457,178,542 | 0 | 40,197,384,634 | 0 | 96.96% | 0 | 65,895,497,802 | 0 | 0 |
| 24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 100 | 38,967,485,345 | 0 | 0 | 100 | 8,971,014,501 | 61.77 | 7,610,663,477 | 61.77 | 84.84% | 61.77 | 12,724,638,222 | 12.35 | 32.65 |

| No | Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi (2022) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2022) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,884,219,227 | 3,997.91 | 286,415,258,531 | 0 | 98.46% | 3,997.91 | 286,415,258,531 | 0 | 0 |
| 26 | Badan Pendapatan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,015,412,702 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0 | 38,330,374,725 | 0 | 0 | 0 | 6,024,796,296 | 0 | 4,659,076,839 | 0 | 77.33% | 0 | 4,659,076,839 | 0 | 0 |
| 28 | Inspektorat Daerah | 0 | 43,271,270,243 | 0 | 0 | 0 | 9,818,049,414 | 0 | 8,903,746,394 | 0 | 90.69% | 0 | 8,903,746,394 | 0 | 0 |
| 29 | Kecamatan Barusjahe | 100 | 14,546,503,145 | 0 | 0 | 100 | 2,703,698,759 | 57.5 | 2,312,052,923 | 57.5 | 85.51% | 57.5 | 2,312,052,923 | 57.5 | 15.89 |
| 30 | Kecamatan Berastagi | 0 | 60,100,954,226 | 0 | 0 | 0 | 7,914,539,242 | 1,269.00 | 5,408,204,747 | 0 | 68.33% | 0 | 5,408,204,747 | 0 | 9 |
| 31 | Kecamatan Dolat Rakyat | 100 | 10,242,009,625 | 0 | 0 | 100 | 2,132,116,887 | 52.26 | 3,246,319,185 | 52.26 | 100.00% | 52.26 | 3,246,319,185 | 31.7 | 31.7 |
| 32 | Kecamatan Juhar | 0 | 19,087,580,195 | 0 | 0 | 0 | 3,088,978,608 | 455 | 2,839,306,633 | 0 | 91.92% | 0 | 2,839,306,633 | 0 | 14.88 |
| 33 | Kecamatan Kabanjahe | 411 | 73,797,835,863 | 0 | 0 | 0 | 10,010,360,588 | 2,143,505,820.55 | 13,530,206,892 | 2,582,537,133.19 | 100.00% | 2,582,537,133.19 | 13,530,206,892 | 628,354,533.62 | 18.33 |
| 34 | Kecamatan Kutabuluh | 0 | 17,024,701,440 | 0 | 0 | 0 | 3,129,321,339 | 1,183.54 | 4,781,940,410 | 0 | 100.00% | 0 | 4,781,940,410 | 0 | 28.09 |
| 35 | Kecamatan Lau Baleng | 100 | 12,511,770,125 | 0 | 0 | 100 | 2,376,468,163 | 98.54 | 2,161,869,419 | 98.54 | 90.97% | 31.24 | 2,161,869,419 | 31.24 | 90.97 |
| 36 | Kecamatan Mardinding | 100 | 11,994,122,601 | 0 | 0 | 100 | 2,409,715,144 | 158.22 | 2,274,311,158 | 94.38 | 94.38% | 158.22 | 2,274,311,158 | 18 | 18.96 |
| 37 | Kecamatan Merdeka | 100 | 15,870,273,059 | 0 | 0 | 100 | 2,255,089,928 | 5,202,066.72 | 1,567,339,164 | 52,020.67 | 69.50% | 52,020.67 | 1,567,339,164 | 520.21 | 9.88 |
| 38 | Kecamatan Merek | 0 | 15,051,550,075 | 0 | 0 | 0 | 2,950,778,072 | 0 | 2,919,131,780 | 0 | 98.93% | 0 | 2,919,131,780 | 0 | 19.39 |
| 39 | Kecamatan Munte | 0 | 12,890,414,281 | 0 | 0 | 0 | 2,345,623,465 | 167 | 3,389,011,759 | 0 | 100.00% | 0 | 3,389,011,759 | 0 | 26.29 |
| 40 | Kecamatan Namanteran | 95 | 17,927,437,993 | 0 | 0 | 83 | 2,355,663,848 | 100 | 2,186,926,611 | 1.2 | 92.84% | 100 | 2,186,926,611 | 1.05 | 0.12 |
| 41 | Kecamatan Payung | 100 | 10,337,221,175 | 0 | 0 | 100 | 2,045,016,751 | 188.24 | 1,671,982,937 | 188.24 | 81.76% | 17.89 | 342,476,261 | 17.89 | 3.31 |
| 42 | Kecamatan Simpang Empat | 0 | 23,320,791,686 | 0 | 0 | 0 | 2,912,996,404 | 297.88 | 2,773,569,648 | 265.53 | 95.21% | 265.53 | 19,433,871,235 | 876.19 | 0 |
| 43 | Kecamatan Tiga Binanga | 0 | 31,984,962,415 | 0 | 0 | 0 | 4,140,881,540 | 706 | 3,976,252,087 | 0 | 96.02% | 0 | 3,976,252,087 | 0 | 12.43 |
| 44 | Kecamatan Tiganderket | 100 | 14,928,347,955 | 18.08 | 0 | 100 | 2,793,487,930 | 67.7 | 1,891,212,088 | 67.7 | 67.70% | 67.7 | 1,891,212,088 | 67.7 | 12.67 |
| 45 | Kecamatan Tiga Panah | 0 | 18,310,326,555 | 0 | 0 | 0 | 3,558,885,267 | 164.5 | 3,444,693,419 | 0 | 96.79% | 164.5 | 3,444,693,419 | 0 | 18.81 |
| 46 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 53,306,345,930 | 0 | 0 | 0 | 8,762,206,723 | 0 | 4,863,099,062 | 0 | 55.50% | 0 | 10,804,128,329 | 0 | 20.27 |

**Tabel 2.112**
**Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah Tahun 2022**

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | REALISASI | |
| **1** | **Indeks Reformasi Birokrasi** | Indeks | CC | N/A | |
| | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini | WTP | WTP | BKAD |
| | Indeks Persepsi Pelayanan Publik | Indeks | 83 | N/A | SETDA |
| | Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Indeks | CC | N/A | SETDA |
| | Indeks Profesionalisme ASN | % | 55 | N/A | BKPSDM |
| | Skor LPPD | Poin | 2,88 | 2,78 | SETDA |
| **2** | **Indek Pembangunan Manusia (IPM)** | Indeks | 74,53 | 74,83 | |
| | Rata-rata lama sekolah | tahun | 10,43 | 10,00 | DIKNAS |
| | Harapan lama sekolah | tahun | 12,82 | 12,76 | DIKNAS |
| | Indeks Aktivitas Literasi Membaca Masyarakat (Alibaca) | indeks | 24,028 | 11,36 | DPA |
| | Angka Harapan Hidup | tahun | 71,90 | 71,58 | DINKES |
| | Indeks Pembangunan Gender | % | 96,35 | 81,53 | DP3AP2KB |
| | Persentase Penegakan PERDA | % | 74,38 | 74,72 | SATPOL PP |
| | Pengetahuan masyarakat, remaja dan anak sekolah atas bahaya narkoba | % | 100 | N/A | DINSOS |
| | Jumlah prestasi olahraga | cabor | 14 | 0 | DISBUDPORAPAR |
| | Persentase Kemiskinan | persen | 8,90 | 8,79 | - |
| **3** | **Pertumbuhan Ekonomi** | **%** | **4,70** | 2,25 | |
| | **Tingkat Pengangguran Terbuka** | **persen** | **1,75** | 1,95 | |
| | **Nilai Investasi** | **triliun** | **6,07** | **6,24** | |
| | Peningkatan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | Kw/Ha | 59,4759 | 55,70 | DKPP |
| | Peningkatan Produktivitas tanaman hotikultura | Kw/Ha | 258,25 | 211,67 | DISTAN |
| | Peningkatan Produktivitas tanaman perkebunan | kg/ha/thn | 1116,17 | 1075,00 | DISTAN |
| | Produksi sektor pertanian | Ton | 1936466,16 | 484116,5 | DISTAN |
| | Produksi Sektor Perkebunan | Ton | 17446,8 | 4361,7 | DISTAN |
| | Produksi daging | ton/tahun | 3481,45 | 829,00 | DISTAN |
| | Persentasi koperasi aktif (%) | persen | 63 | 54,71 | DKKUKM |
| | Jumlah produk UMKM/IKM yang inovatif | produk | 5 | 0 | DKKUKM |
| | Jumlah UMKM Naik kelas | persen | 0,39 | 0 | DKKUKM |
| | Jumlah pemasaran Produk UMKM secara digital | pelaku | 100 | 0 | DKKUKM |
| | Pertumbuhan Industri | persen | 0,19 | | DISPERINDAG |
| | Jumlah Kunjungan Wisatawan | orang | 600000 | 88910 | DISBUDPORAPAR |
| | Lama Kunjungan Wisatawan | hari | 1,1 | 1,1 | DISBUDPORAPAR |
| | Produksi Perikanan (%) | persen | 90 | 44,89 | DKPP |
| | Nilai ekspor | miliar | 5399,92 | | DISPERINDAG |
| | Jumlah pasar yang tertib ukur | pasar | 1 | | DISPERINDAG |
| | Jumlah pasar yang terkelola dengan baik | pasar | 1 | | DISPERINDAG |
| | BUMD/Perusda | BUMD | 0 | | SETDA |
| | Ketersediaan energi dan Protein (kkal/kap/hari) | kkal/kap/hari, gr/hari | Energi = 2400, Protein =63,77 | 0 | DKPP |
| | Skor Pola Pangan Harapan (%) | persen | 87,5 | 0 | DKPP |
| | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan pangan (%) | persen | 10 | 0 | DKPP |
| | Jumlah sertifikasi produk pangan (komoditi) | komoditi | 2 | 0 | DKPP |
| | Jumlah Wirausaha Baru | wirausaha | 50 | 0 | DKUMKM |
| | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | persen | 70 | 20 | DKUMKM |
| | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan | izin | 1200 | | DPMPTSP |
| **4.** | **Indeks Daya Saing Infrastruktur (IDSI)** | **indeks** | **3,2** | | |
| | **Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)** | **indeks** | **2,2** | | |
| | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** | **Predikat** | **Baik** | | |
| | **Indeks Risiko Bencana** | **indeks** | **110** | | |
| | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, | % | 63 | 61,37 | DPUTR |
| | Persentase rurnah tinggal bersanitasi layak | % | 74,08 | 73,97 | DPUTR |
| | Persentase penduduk berakses air minum layak | % | 68,702 | 69,23 | DPUTR |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | TAHUN 2022 | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | REALISASI | |
| | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | % | 50,11 | 50,98 | DPUTR |
| | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat: | % | 61 | 61,02 | DPUTR |
| | Gedung Pemerintahan yang layak dan baik | % | 62 | 70 | DPUTR |
| | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | % | 100 | | PERKIMTAN |
| | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/provinsi yang memperoleh fasilitasi penyedeiia rumah yang layak huni | % | 60 | | PERKIMTAN |
| | Persentasi luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani | % | 25,09 | | PERKIMTAN |
| | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU | % | 55 | 0% | PERKIMTAN |
| | Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | % | 45 | | PERKIMTAN |
| | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas air | nilai | 90 | 0 | DLH |
| | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas udara | nilai | 90 | 0 | DLH |
| | Hasil Pengukuran tutupan lahan | nilai | 50 | 0 | DLH |
| | Luasan RTH publik di wilayah kota/ kawasan perkotaan | % | 25 | 25 | DLH |
| | Ketaatan terhadap RTRW. | % | 75 | n/a | DPUTR |
| | Persentase jumlah sampah yang tertangani (di wilayah pelayanan) | % | 75 | 22,46 | DLH |
| | Rasio Konektivitas Kabupaten | % | 93,94 | n/a | DISHUB |
| | Kinerja Lalu Lintas Kabupaten | Rasio | 0,35 | n/a | DISHUB |
| | Indeks SPBE | Indeks | 2,2 | n/a | DISKOMINFO |
| | Indeks Risiko bencana | Indeks | 110 | n/a | BPBD |

**Tabel 2.113**
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2022**

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2022 | | Target 2024 | Penanggung Jawab/Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Capaian | | |
| **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan PDRB | % | 3,40-3,80 | 4,22 | 4,20-4,60 | BPS |
| 2 | PDRB per kapita | ADHB | 52.218.108 | 57.852.050 | 57.022.174 | BPS |
| | | ADHK | 34.815.805 | 36.670.980 | 36.577.484 | BPS |
| 3 | Indeks Gini | indeks | 0,270 | 0,236 | 0,266 | BPS |
| 4 | Persentase penduduk di atas garis kemiskinan | % | 91,10 | 91,83 | 91,20 | BPS |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | indeks | 74,53 | 75,36 | 74,73 | BPS |
| 6 | Angka rata-rata lama sekolah | tahun | 9,86 | 75,36 | 9,99 | DIKNAS |
| 7 | Angka usia harapan hidup | Angka | 71,65 | 72,03 | 71,90 | DINKES |
| 8 | Persentase balita gizi buruk | % | 2 | 10,02 | 2 | DINKES |
| 9 | Prevalensi balita gizi kurang | % | 3 | 72,03 | 2 | DINKES |
| 10 | Cakupan Desa Siaga Aktif | % | 35,3 | 1,8 | 50,2 | |
| 11 | Angka partisipasi angkatan kerja | % | 83,94 | 4,5 | 83,95 | DISNAKERKUKM |
| 12 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | % | 83,94 | 85,11 | 83,95 | DISNAKERKUKM |
| 13 | Tingkat pengangguran terbuka | % | 1,75 | 85,12 | 1,45 | DISNAKERKUKM |
| 14 | Rasio penduduk yang bekerja | % | 98,25 | 85,12 | 98,32 | DISNAKERKUKM |
| 15 | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja | % | 0,04 | 2,71 | 0,06 | DISNAKERKUKM |
| 16 | Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas | % | 83,94 | 97,25 | 83,95 | DISNAKERKUKM |
| 17 | Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja | % | 25 | 27,6 | 25.6 | DISNAKERKUKM |
| 18 | Indeks Kepuasan Masyarakat | indeks | 83 | 85,11 | 89 | |
| 19 | Persentase PAD terhadap pendapatan | % | 7,38 | 7,46 | 7,99 | |
| 20 | Opini BPK | opini | WTP | WTP | WTP | BKAD |
| 21 | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) | persen | 87,5 | 86,4 | 90,5 | DKPP |
| 22 | Penguatan Cadangan Pangan | ton | 100 | 18 | 100 | DKPP |
| 23 | Penanganan daerah rawan pangan | persen | 0,12 | 0,00 | 0,06 | DKPP |
| 24 | Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB | % | 51,94 | N/A | 51,00 | DISTAN |
| 25 | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB | % | 100 | N/A | 100 | DISTAN |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2022 | | Target 2024 | Penanggung Jawab/Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Capaian | | |
| 26 | Produksi sektor pertanian | Ton | 12.298.598 | 1.967.188 | 13.559.204 | DISTAN |
| 27 | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB | % | 5,78 | N/A | #REF! | DISTAN |
| 28 | Produksi sektor perkebunan | Ton | 1.383.930 | 23.811 | #REF! | DISTAN |
| 29 | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB | % | 100 | N/A | 100 | DISTAN |
| 30 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | Persen | 14,01 | | 15,45 | DKPOP |
| 31 | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | persen | #REF! | 12,60 | 11,18 | DISPERINDAG |
| 32 | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | persen | 3,75 | 3,80 | 3,82 | DISPERINDAG |
| 33 | Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri | persen | 34,75 | 3,80 | 35,61 | DISPERINDAG |
| 34 | Pertumbuhan Industri | persen | 3,64 | 0,18 | 3,92 | DISPERINDAG |
| **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | |
| 1 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita | ribu | 1.469.630 | | 1.680.507 | |
| 2 | Nilai tukar petani | N/A | N/A | N/A | N/A | DISTAN |
| 3 | Persentase pengeluaran konsumsi nonpangan perkapita | % | 38,4 | | 38,4 | |
| 4 | Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) | persen | 28,51 | 12,69 | 29,66 | DISPERINDAG |
| 5 | Rasio ketergantungan | rasio | 46,93 | | 47,57 | DISDUKCAPIL |
| 6 | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan | izin | 1200 | | 1200 | DPMPTSP |
| **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | |
| **Layanan Urusan Wajib Dasar** | | | | | | |
| **1** | **Pendidikan** | | | | | **DIKNAS** |
| 1.1. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | % | 17,7 | | 25 | DIKNAS |
| 1.2. | Angka Partisipasi Kasar | | | | | |
| 1.2.1. | Angka partisipasi kasar SD | % | 105,00 | | 104,00 | DIKNAS |
| 1.2.2. | Angka partisipasi kasar SMP | % | 93 | | 97 | DIKNAS |
| 1.3. | Angka pendidikan yang ditamatkan | | | | | |
| 1.3.1 | Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A | % | 16 | | 18 | DIKNAS |
| 1.3.2 | Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B | % | 17 | | 18 | DIKNAS |
| 1.4. | Angka Partisipasi Murni | | | | | DIKNAS |
| 1.4.1. | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | % | 99 | 99,5 | 100 | DIKNAS |
| 1.4.2. | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | % | 88,37 | 84,17 | 91,98 | DIKNAS |
| 1.5. | Angka partisipasi sekolah | % | | | | DIKNAS |
| 1.5.1. | Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A | % | 97,0 | 96,4 | 97,8 | DIKNAS |
| 1.5.2. | Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B | % | 92,5 | 77,6 | 93,5 | DIKNAS |
| 1.6. | Angka Putus Sekolah: | | | | | DIKNAS |
| 1.6.1. | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | % | 0,02 | 0,05 | 0,01 | DIKNAS |
| 1.6.2. | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | % | 0,02 | 0,12 | 0,01 | DIKNAS |
| 1.7. | Angka Kelulusan: | | | | | DIKNAS |
| 1.7.1. | Angka Kelulusan SD/MI/Paket A | % | 100 | 100 | 100 | DIKNAS |
| 1.7.2. | Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B | % | 100 | 100 | 100 | DIKNAS |
| 1.8. | Angka Melanjutkan (AM): | | | | | DIKNAS |
| 1.8.1. | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | % | 100 | | 100 | DIKNAS |
| 1.8.2. | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | % | 94,50 | | 95,50 | DIKNAS |
| 1.9. | Fasilitas Pendidikan: | | | | | DIKNAS |
| 1.9.1. | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | % | 96,00 | 47,00 | 98,00 | DIKNAS |
| 1.9.2. | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | % | 83,00 | 48,00 | 85,00 | DIKNAS |
| 1.10. | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar | % | 52,04 | 52,53 | 52,04 | DIKNAS |
| 1.11. | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar | % | 674 | | 675 | DIKNAS |
| 1.12. | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar | % | 16,00 | 6,66 | 17 | DIKNAS |
| 1.13. | Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar | % | 96 | 100 | 98 | DIKNAS |
| 1.14. | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki | % | 100 | | 100 | DIKNAS |
| 1.15. | Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | % | 99,65 | | 99,75 | DIKNAS |
| 1.16. | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | % | 94,74 | 91,3 | 100 | DIKNAS |
| **2** | **Kesehatan** | | | | | **DINKES** |
| 2.1. | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | Rasio | 6,74 | 4,7 | 6,50 | DINKES |
| 2.2. | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup | Rasio | 10 | 4,9 | 9 | DINKES |
| 2.3. | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup | Rasio | 5,00 | 3,60 | 5,00 | DINKES |
| 2.4. | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup | Rasio | 90 | 32,6 | 86 | DINKES |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2022 | | Target 2024 | Penanggung Jawab/Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Capaian | | |
| 2.5. | Rasio posyandu per 1000 balita | Rasio | 8,8 | 9,6 | 9,3 | DINKES |
| 2.6. | Rasio puskesmas per 1.000 penduduk | Rasio | 0,05 | 0,04 | 0,04 | DINKES |
| 2.7. | Rasio Poliklinik per 1.000 penduduk | Rasio | 0,11 | 0,18 | 0,11 | DINKES |
| 2.8. | Rasio Pustu per 1.000 Penduduk | Rasio | 0,5 | 0,5 | 0,5 | DINKES |
| 2.9. | Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk | Rasio | 0,01 | 0,01 | 0,01 | DINKES |
| 2.10. | Rasio Dokter Umum per 1000 penduduk | Rasio | 0,27 | 0,25 | 0,27 | DINKES |
| 2.11. | Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk | Rasio | 13,15 | 7,60 | 13,05 | DINKES |
| 2.12. | Rasio Dokter Gigi per 1.000 penduduk | Rasio | 0,08 | 0,07 | 0,08 | DINKES |
| 2.13. | Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk | Rasio | 0,49 | 0,40 | 0,50 | DINKES |
| 2.14. | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | % | 100 | 84 | 100 | DINKES |
| 2.15. | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | % | 100 | 73 | 100 | DINKES |
| 2.16. | Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) | % | 96,00 | 98,14 | 96,00 | DINKES |
| 2.17. | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | % | 100 | 100 | 100 | DINKES |
| 2.18. | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | % | 90,00 | 104,00 | 90,00 | DINKES |
| 2.19. | *Non Polio AFP rate* per 100.000 penduduk | rasio | 2,00 | Tidak ada kasus | 2,00 | DINKES |
| 2.20. | Cakupan balita pneumonia yang ditangani | % | 10 | Tidak ada kasus | 10 | DINKES |
| 2.21. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | % | 73 | 55 | 75 | DINKES |
| 2.22. | Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | rasio | 231 | 40 | 190 | DINKES |
| 2.23. | Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | rasio | 4,00 | 0,95 | 4,00 | DINKES |
| 2.24. | Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS | % | 75,00 | 63,50 | 75,00 | DINKES |
| 2.25. | Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS | % | 90,00 | 89,60 | 90,00 | DINKES |
| 2.26. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | % | 100 | 100 | 100 | DINKES |
| 2.27. | Cakupan penderita diare yang ditangani | % | 78,00 | 93,50 | 78,00 | DINKES |
| 2.28. | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi | % | 0,50 | 0,00 | 0,50 | DINKES |
| 2.29. | Cakupan kunjungan bayi | % | 100 | 86 | 100 | DINKES |
| 2.30. | Cakupan puskesmas | % | 111,76 | 111,80 | 117,65 | DINKES |
| 2.31. | Cakupan pembantu puskesmas | % | 79,60 | 78,40 | 80,30 | DINKES |
| 2.32. | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 | % | 100,00 | 68,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.33. | Cakupan pelayanan nifas | % | 100,00 | 70,20 | 100,00 | DINKES |
| 2.34. | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | % | 20,00 | 73,50 | 40,00 | DINKES |
| 2.35. | Cakupan pelayanan anak balita | % | 100,00 | 73,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.36. | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.37. | Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat | % | 100,00 | 91,90 | 100,00 | DINKES |
| 2.38. | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | % | 80,00 | 80,00 | 80,00 | DINKES |
| 2.39. | Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.40. | Persentase balita stunting | % | 28,00 | 16,26 | 25,00 | DINKES |
| 2.41. | Cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.42. | Cakupan pelayanan ibu bersalin sesuai standar | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.43. | Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.44. | Cakupan pelayanan kesehatan anak balita sesuai standar | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.45. | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.46. | Persentase Orang Usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 100,00 | 41,20 | 100,00 | DINKES |
| 2.47. | Persentase Warga Negara Usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.48. | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.49. | Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.50. | Persentase Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | % | 100,00 | 27,50 | 100,00 | DINKES |
| 2.51. | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100,00 | 71,30 | 100,00 | DINKES |
| 2.52. | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | % | 100,00 | 33,32 | 100,00 | DINKES |
| 2.53. | Cakupan Vaksinasi Covid-19 | % | 80,00 | 89,30 | 80,00 | DINKES |
| 2.54. | Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi | % | 86 | 110 | 90 | DINKES |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2022 | | Target 2024 | Penanggung Jawab/Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Capaian | | |
| 2.55. | Persentase Posyandu aktif | % | 100 | 100 | 100 | DINKES |
| 2.56. | Persentase sarana Puskesmas sesuai standar | % | 78,95 | 78,95 | 84,21 | DINKES |
| 2.57. | Persentase Puskesmas dengan kelengkapan alat kesehatan sesuai standar | % | 47,37 | 36,84 | 68,42 | DINKES |
| 2.58. | Persentase sarana puskesmas pembantu sesuai standar | % | 69,05 | 75,83 | 73,81 | DINKES |
| 2.59. | Cakupan masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | % | 75,05 | 85,27 | 76,25 | DINKES |
| 2.60. | Persentase Puskesmas terakreditasi | % | 100 | 100 | 100 | DINKES |
| 2.61. | Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional | % | 100 | 100 | 100 | DINKES |
| 2.62. | Persentase ketersediaan obat esensial di Puskesmas | % | 90 | 90 | 93 | DINKES |
| 2.63. | Persentase Puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai standar | % | 63,16 | 63,16 | 79,00 | DINKES |
| 2.64. | Persentase Sarana Rumah Sakit sesuai standar | % | 80 | 80 | 90 | RSU |
| 2.65. | Persentase Prasarana Rumah Sakit sesuai standar | % | 95 | 85 | 95 | RSU |
| **3** | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | **DPUTR** |
| **3.1.** | **Pekerjaan Umum:** | | | | | DPUTR |
| 3.1.1. | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | % | 63,00 | 61,54 | 66,00 | DPUTR |
| 3.1.2. | Persentase rumah tinggal bersanitasi layak | % | #REF! | 74,57 | #REF! | DPUTR |
| 3.1.3. | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | % | 61 | 59,5 | 63 | DPUTR |
| 3.1.4. | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | % | #REF! | 49,35 | #REF! | DPUTR |
| 3.1.5. | Persentase penduduk berakses air minum layak | % | 68,702 | 70,350 | 68,706 | DPUTR |
| 3.1.6. | Persentase penanganan sampah | % | 75 | | 77 | DPUTR |
| **3.2.** | **Penataan Ruang:** | | | | | **DPUTR** |
| 3.2.1. | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | % | 25 | 25 | 27 | DPUTR |
| 3.2.2. | Ketaatan terhadap RTRW | % | 75 | 72 | 77 | DPUTR |
| 3.2.3. | Meningkatnya SDM Tenaga terampil konstruksi | Orang | 50 | 0 | 50 | DPUTR |
| 3.2.4. | Gedung Pemerintahan yang layak dan baik | % | 62 | 61,5 | 66 | DPUTR |
| **4** | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** | | | | | **DPKPP** |
| 4.1. | Rasio rumah layak huni | % | 100,00 | 63,30 | 100,00 | DPKPP |
| 4.2. | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani | % | 25,09 | 25,09 | 64,52 | DPKPP |
| 4.3. | Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | % | 97,10 | 97,10 | 98,70 | DPKPP |
| 4.4. | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | % | 100,00 | 81,30 | 100,00 | DPKPP |
| 4.5. | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyedia rumah yang layak huni | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DPKPP |
| 4.6. | Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | lokasi | 2 | 0 | 2 | DPKPP |
| **5.1** | **Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | **SATPOL PP & BPBD** |
| 5.1. | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | % | 0,267 | 0,267 | 0,521 | SATPOL PP |
| 5.2. | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | % | 2,05 | 1,86 | 2,48 | SATPOL PP |
| 5.3. | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | % | 0,41 | 0,41 | 0,51 | SATPOL PP |
| 5.4. | Tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | % | 1,6 | 1,6 | 1,8 | SATPOL PP |
| 5.5. | Persentase Penegakan PERDA | % | 73,83 | 73,83 | 74,38 | SATPOL PP |
| **5.2.** | **Bencana** | | | | | **BPBD** |
| 5.2.1. | Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Orang | 12414 | 11261 | 13514 | BPBD |
| 5.2.2. | Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Orang | 5694 | 5062 | 9219 | BPBD |
| 5.2.3 | Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Orang | 19326 | 21455 | 19956 | BPBD |
| | Indeks Kapasitas Daerah | indeks | 0,52 | 0,47 | 0,54 | |
| **6** | **Sosial** | | | | | **DINSOS** |
| 6.1. | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | % | 50,00 | 50,00 | 58,00 | DINSOS |
| 6.2. | Persentase PMKS yang tertangani | % | 50,00 | 50,00 | 58,00 | DINSOS |
| 6.3. | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | % | 62,08 | 53,85 | 63,72 | DINSOS |
| 6.4. | Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | % | 13,00 | 9,41 | 24,00 | DINSOS |
| 6.5. | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINSOS |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2022 | | Target 2024 | Penanggung Jawab/Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Capaian | | |
| 6.6. | Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINSOS |
| 6.7. | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINSOS |
| 6.8. | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINSOS |
| 6.9. | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | % | 16,98 | 13,51 | 18,74 | DINSOS |
| 6.10. | Persentase keakuratan data program perlindungan jaminan sosial | % | 39,06 | 66,54 | 78,13 | DINSOS |
| **Layanan Urusan Wajib Non Dasar** | | | | | | |
| **1** | **Tenaga Kerja** | | | | | **DISNAKERKUKM** |
| 1.1. | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | % | 0 | 0 | 0 | DISNAKERKUKM |
| 1.2. | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | % | 0 | 0 | 0 | DISNAKERKUKM |
| 1.3. | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | % | 64 | 79,97 | 68 | DISNAKERKUKM |
| 1.4. | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | % | 93 | 93 | 94 | DISNAKERKUKM |
| 1.5. | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | % | 0 | 0 | 0 | DISNAKERKUKM |
| 1.6. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | % | 40 | 16 | 60 | DISNAKERKUKM |
| 1.7. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | % | 50 | 16 | 50 | DISNAKERKUKM |
| 1.8. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | % | 20 | 0 | 20 | DISNAKERKUKM |
| 1.9. | Rasio lulusan S1/S2/S3 | % | 15 | 1,21 | 15 | DISNAKERKUKM |
| **2** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | **DP3AP2KB** |
| 2.1. | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | % | 3,67 | 3,57 | 3,76 | DP3AP2KB |
| 2.2. | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | % | 28,57 | 28,57 | 30 | DP3AP2KB |
| 2.3. | Rasio KDRT | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | DP3AP2KB |
| 2.4. | Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur | % | 0 | 0 | 0 | DP3AP2KB |
| 2.5. | Partisipasi angkatan kerja perempuan | % | 98,65 | 98,65 | 98,67 | DP3AP2KB |
| 2.6. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | % | 100 | 100 | 100 | DP3AP2KB |
| 2.7. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | % | 100 | 100 | 100 | DP3AP2KB |
| 2.8. | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. | % | 75 | 100 | 75 | DP3AP2KB |
| 2.9. | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | % | 80 | 100 | 80 | DP3AP2KB |
| 2.10. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | % | 50 | 50 | 50 | DP3AP2KB |
| 2.11. | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | % | 100 | 100 | 100 | DP3AP2KB |
| 2.12. | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | % | 100 | 100 | 100 | DP3AP2KB |
| 2.13. | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | % | 70 | 70 | 70 | DP3AP2KB |
| **3** | **Pangan** | | | | | **DKPP** |
| 3.1. | Ketersediaan pangan utama | Persen | 43,09 | 45,86 | 44,04 | DKPP |
| 3.2. | Ketersediaan energi dan protein perkapita | Kkal/kap/hari | Energi = 2.400 | 4400 | Energi = 2.400 | DKPP |
| | | gr/hari | Protein =63 | 99,89 | Protein =63 | DKPP |
| 3.3. | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (PSAT) | % | 100 | 100 | 100 | DKPP |
| **4** | **Pertanahan** | | | | | **DPKPP** |
| 4.1. | Persentase luas lahan bersertifikat | Ha | 2,50 | 0,00 | 1,30 | DPKPP |
| 4.2. | Penyelesaian kasus tanah Negara | kasus | 1,00 | 0,00 | 1,00 | DPKPP |
| 4.3. | Penyelesaian izin lokasi | lokasi | 2,00 | 0,00 | 2,00 | **DLH** |
| **5** | **Lingkungan Hidup** | | | | | **DLH** |
| 5.1. | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota | ada | | ada | | DLH |
| 5.2. | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota | ada | | | ada | DLH |
| 5.3. | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi | ada | ada | ada | ada | DLH |
| 5.4. | Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air | indeks | 53,81 | 50 | 54,01 | DLH |
| 5.5. | Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara | indeks | 86,81 | 88,78 | 87,01 | DLH |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2022 | | Target 2024 | Penanggung Jawab/Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Capaian | | |
| 5.6. | Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan | indeks | 54,41 | 51,6 | 58,48 | DLH |
| 5.7. | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota | % | 100 | 100 | 100 | DLH |
| 5.8. | Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota | orang | 4 | 0 | 8 | DLH |
| 5.9. | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat | kali | 13 | 3 | 13 | DLH |
| 5.10. | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | ada | ada | ada | ada | DLH |
| 5.11. | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. | % | 100 | 100 | 100 | DLH |
| 5.12. | Timbulan sampah yang ditangani | % | 80 | 85,11 | 84 | DLH |
| 5.13. | Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R | ton | 30 | 4 | 70 | DLH |
| 5.14. | Persentase cakupan area pelayanan | % | 30 | 35 | 35 | DLH |
| 5.15. | Persentase jumlah sampah yang tertangani | % | 80 | 85 | 84 | DLH |
| 5.16. | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota | nilai | 0 | N/A | 75 | DLH |
| 5.17. | Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan | n/a | n/a | N/A | n/a | DLH |
| 5.18. | Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan | n/a | n/a | N/A | n/a | DLH |
| 5.19. | Jumlah rekomendasi izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 | jumlah izin | | 1 | 10 | DLH |
| **6** | **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | **DISDUKCAPIL** |
| 6.1. | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | % | 100 | 109,32 | 100 | DISDUKCAPIL |
| 6.2. | Rasio bayi berakte kelahiran | % | 97 | 98 | 100 | DISDUKCAPIL |
| 6.3. | Rasio pasangan berakte nikah | % | 60 | 57,03 | 100 | DISDUKCAPIL |
| 6.4. | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi | Ada/Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | DISDUKCAPIL |
| 6.5. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah/Belum | Sudah | Sudah | Sudah | DISDUKCAPIL |
| 6.6. | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | % | 100 | 109,32 | 100 | DISDUKCAPIL |
| 6.7. | Cakupan penerbitan akta kelahiran | % | 60 | 60,72 | 80 | DISDUKCAPIL |
| 6.8. | Kepemilikan Kartu Identitas Anak | % | 40 | 47,55 | 60 | DISDUKCAPIL |
| **7** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | **DPMD** |
| 7.1. | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik | % | 70,66 | 57,91 | 73,9 | DPMD |
| 7.2. | Rata-rata kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | kelompok | 0,10 | 0,10 | 0,15 | DPMD |
| 7.3. | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | % | 100 | 85 | 100 | DPMD |
| 7.4. | Persentase LPM Berprestasi | % | 0,10 | 0,10 | 0,20 | DPMD |
| 7.5. | Persentase PKK Aktif | % | 100 | 100 | 100 | DPMD |
| 7.6. | Persentase Posyandu Aktif | % | 100 | 100 | 100 | DPMD |
| 7.7. | Persentase LSM aktif | % | 80 | 0,8 | 80 | BAKESBANGPOL |
| **8** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | **DP3AP2KB** |
| 8.1. | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | | 1,10 | 1,10 | 1,05 | DP3AP2KB |
| 8.2. | Total Fertility Rate (TFR) | | 2,25 | | 2,21 | DP3AP2KB |
| 8.3. | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | % | 37,96 | 100 | 51,95 | DP3AP2KB |
| 8.4. | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | | 60 | 60 | 63 | DP3AP2KB |
| 8.5. | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan | Kelompok | 4 | 4 | 7 | DP3AP2KB |
| 8.6. | Rata-rata jumlah anak per keluarga | | 3 | 3 | 3 | DP3AP2KB |
| 8.7. | Ratio Akseptor KB | % | 65,54 | | 69,09 | DP3AP2KB |
| 8.8. | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 | % | 65,64 | 45 | 66,36 | DP3AP2KB |
| 8.9. | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | % | 17,78 | 25 | 17,23 | DP3AP2KB |
| 8.10. | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | % | 43 | 44 | 44,2 | DP3AP2KB |
| 8.11. | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | % | 46,28 | 45 | 46,67 | DP3AP2KB |
| 8.12. | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | orang | 581 | 283 | 800 | DP3AP2KB |
| 8.13. | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | orang | 500 | 177 | 700 | DP3AP2KB |
| 8.14. | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | orang | 499 | 158 | 552 | DP3AP2KB |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2022 | | Target 2024 | Penanggung Jawab/Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Capaian | | |
| 8.15. | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa | orang | 457 | 360 | 538 | DP3AP2KB |
| 8.16. | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | % | 100 | 100 | 100 | DP3AP2KB |
| 8.17. | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri | orang | 50 | 50 | 150 | DP3AP2KB |
| 8.18. | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | DP3AP2KB |
| 8.19. | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | DP3AP2KB |
| 8.20. | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | % | 70 | 700 | 80 | DP3AP2KB |
| 8.21. | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | orang | 2010 | 15,49 | 2098 | DP3AP2KB |
| 8.22. | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | orang | 800 | 700 | 950 | DP3AP2KB |
| **9** | **Perhubungan** | | | | | **DISHUB** |
| 9.1. | Jumlah arus penumpang angkutan umum | orang | 4.697.705 | 5.078.158 | 5.458.610 | DISHUB |
| 9.2. | Rasio ijin trayek | % | 0,088148 | 0,036946 | 0,036855 | DISHUB |
| 9.3. | Jumlah uji kir angkutan umum dan barang | unit | 2.673 | 5.346 | 5.346 | DISHUB |
| 9.4. | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | buah | 3 | 3 | 4 | DISHUB |
| 9.5. | Persentase layanan angkutan darat (dalam kabupaten) | % | 93,94 | 95,00 | 95,00 | DISHUB |
| 9.6. | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | % | 26,99 | 27,00 | 70,00 | DISHUB |
| 9.7. | Pemasangan Rambu-rambu | % | 2 | 2 | 4 | DISHUB |
| 9.8. | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | % | 0,0384 | 0,0375 | 0,0366 | DISHUB |
| 9.9. | Jumlah orang yang terangkut angkutan umum | orang | 4.697.705 | 5.078.158 | 5.458.610 | DISHUB |
| 9.10. | Rasio konektivitas kabupaten | % | 93,94 | 95 | 95 | DISHUB |
| 9.11. | Kinerja lalu lintas kabupaten | rasio | 0,77 | 0,77 | 0,77 | DISHUB |
| **10** | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | **DISKOMINFO** |
| 10.1. | Cakupan Layanan Telekomunikasi | % | 86,99 | 85,50 | 86,99 | DISKOMINFO |
| 10.2. | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | % | 62 | 60,44 | 78 | DISKOMINFO |
| 10.3. | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | % | 62 | 53,31 | 78 | DISKOMINFO |
| 10.4. | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi | % | 14 | 16,17 | 17 | DISKOMINFO |
| 10.5. | Indeks SPBE | indeks | 2,2 | 2,41 | 2,7 | DISKOMINFO |
| **11** | **Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah** | | | | | **DISNAKERKUKM** |
| 11.1. | Persentase koperasi aktif | % | 63,87 | 52,26 | 64,51 | DISNAKERKUKM |
| 11.2. | Persentase UKM non BPR/LKM aktif | % | 91 | 90 | 93 | DISNAKERKUKM |
| 11.3. | Persentase BPR/LKM aktif | n/a | n/a | 0 | n/a | DISNAKERKUKM |
| 11.4. | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | % | 99 | 99 | 99 | DISNAKERKUKM |
| **12** | **Penanaman Modal** | | | | | **DPMPTSP** |
| 12.1. | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | investor | 77 | 81 | 84 | DPMPTSP |
| 12.2. | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Rp. (dalam triliun) | 6,24 | 6,44 | 6,51 | DPMPTSP |
| 12.3. | Rasio daya serap tenaga kerja | persen | 83,75 | 84,7 | 78,2 | DPMPTSP |
| 12.4. | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | persen | 1,8 | | 2,19 | DPMPTSP |
| **13** | **Kepemudaan dan Olah Raga** | | | | | **DKPOP** |
| 13.1. | Persentase organisasi pemuda yang aktif | % | 40 | 1 | 47 | DKPOP |
| 13.2. | Persentase wirausaha muda | % | 13,5 | - | 15,5 | DKPOP |
| 13.3. | Cakupan pembinaan olahraga | % | 54 | 39 | 69 | DKPOP |
| 13.4. | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi | % | 35 | 35 | 55 | DKPOP |
| 13.5. | Cakupan pembinaan atlet muda | % | 7 | 7 | 13 | DKPOP |
| 13.6. | Jumlah atlet berprestasi | atlet | 378 | 117 | 450 | DKPOP |
| 13.7. | Jumlah prestasi olahraga | Cabor | 14 | 16 | 18 | DKPOP |
| **14** | **Statistik** | | | | | **DISKOMINFO** |
| 14.1. | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | ada/tidak | ada | tidak | ada | DISKOMINFO |
| 14.2. | Buku "Kabupaten Karo Dalam Angka" | ada/tidak | ada | ada | ada | DISKOMINFO |
| 14.3. | Buku "PDRB" | ada/tidak | ada | tidak | ada | DISKOMINFO |
| **15** | **Persandian** | | | | | **DISKOMINFO** |
| 15.1. | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah | % | 2 | 3,6 | 10 | DISKOMINFO |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2022 | | Target 2024 | Penanggung Jawab/Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Capaian | | |
| **16** | **Kebudayaan** | | | | | **DKPOP** |
| 16.1. | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Kali | 7 | 12 | 11 | DKPOP |
| 16.2. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Cagar Budaya | 10 | 10 | 20 | DKPOP |
| 16.3. | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | Karya Budaya | 18 | 67 | 26 | DKPOP |
| 16.4. | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | Cagar Budaya | - | 10 | - | DKPOP |
| **17** | **Perpustakaan** | | | | | **DPA** |
| 17.1. | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | % | 9,7 | 36,5 | 11 | DPA |
| 17.2. | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | rasio | 0,200 | 25,600 | 0,230 | DPA |
| 17.3. | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | rasio | 1,217 | 0,14 | 1,118 | DPA |
| 17.4. | Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun | orang | 40000 | 121,885 | 47000 | DPA |
| 17.5. | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | buku | 7000 | 7,234 | 9200 | DPA |
| 17.6. | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | % | 1,300 | 0,170 | 1,318 | DPA |
| **18** | **Kearsipan** | | | | | **DPA** |
| 18.1. | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | % | 75,00 | 69,05 | 83,30 | DPA |
| 18.2. | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | Kegiatan | 2 | - | 3 | DPA |
| **Layanan Urusan Pilihan** | | | | | | |
| **1** | **Pariwisata** | | | | | **DKPOP** |
| 1.1. | Kunjungan wisata | Orang | 728.500 | 600.656 | 1.101.000 | DKPOP |
| 1.2. | Lama kunjungan Wisata | Hari | 1.3 | 1,3 | 1.5 | DKPOP |
| 1.3. | PAD sektor pariwisata | Persentase | 50 | 87 | 50 | DKPOP |
| **2** | **Pertanian** | | | | | **DISTAN** |
| 2.1. | Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB (%) | % | 51,94 | N/A | 51,00 | DISTAN |
| 2.2. | Kontribusi sektor perkebunan Tahunan terhadap PDRB (%) | % | 5,78 | N/A | 5,72 | DISTAN |
| 2.3. | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB | % | 100 | N/A | 100 | DISTAN |
| 2.4. | Produktivitas padi per hektar | Kw/Ha | 55,83 | 60,32 | 56,39 | DISTAN |
| 2.5. | Produktivitas palawija per hektar | Kw/Ha | 71,37 | 69,21 | 72,08 | DISTAN |
| 2.6. | Cakupan bina kelompok petani | % | 6,44 | 10,86 | 7,10 | DISTAN |
| 2.7. | Produksi sektor pertanian | Ton | 12.298.598 | | 13.559.204 | DISTAN |
| 2.8. | Produksi sektor perkebunan | Ton | 1.383.930 | | 1.525.783 | DISTAN |
| **4** | **Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | | | **DISPERINDAG** |
| 4,4 | Jumlah pengusaha yang memiliki izin pemanfaatan langsung panas bumi | pengusaha | | N/A | 50 | DISPERINDAG |
| **5** | **Perdagangan** | | | | | **DISPERINDAG** |
| 5.1. | Ekspor Bersih Perdagangan | miliar | 65 | 277 | 80 | DISPERINDAG |
| 5.2. | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | | 50 | 0 | 75 | DISPERINDAG |
| **6** | **Perindustrian** | | | | | **DISPERINDAG** |
| 6.1. | Cakupan bina kelompok pengrajin | persen | 21,05 | 17,86 | 33,33 | DISPERINDAG |
| **8** | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | **DKPP** |
| 8.1. | Produksi perikanan | % | 95 | 247,16 | 85 | DKPP |
| 8.2. | Konsumsi ikan | % | 93,00 | 67,70 | 96,80 | DKPP |
| 8.3. | Cakupan bina kelompok nelayan | % | 100 | 100 | 100 | DKPP |
| 8.4. | Produksi perikanan kelompok nelayan | % | 68,23 | 76,13 | 72,23 | DKPP |
| 8.5. | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | % | 68,23 | 76,13 | 72,23 | DKPP |
| 8.6. | Cakupan bina kelompok Pembudidaya Ikan | % | 11 | 100 | 22 | DKPP |
| **Penunjang Urusan** | | | | | | |
| **1** | **Perencanaan Pembangunan** | | | | | **BAPPEDA LITBANG** |
| 1.1. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Dokumen | Ada | Ada | Ada | BAPPEDA LITBANG |
| 1.2. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Dokumen | Ada | Ada | Ada | BAPPEDA LITBANG |
| 1.3. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Dokumen | Ada | Ada | Ada | BAPPEDA LITBANG |
| 1.4. | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | % | 100 | 100 | 100 | BAPPEDA LITBANG |
| 1.5. | Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD | % | 100 | 100 | 100 | BAPPEDA LITBANG |
| **2** | **Keuangan** | | | | | **BKAD** |
| 2.1. | Opini BPK terhadap laporan keuangan | - | WTP | WTP | WTP | BKAD |
| 2.2. | Persentase SILPA | % | 13,26 | - | - | BKAD |
| 2.3. | Persentase SILPA terhadap APBD | % | 13,26 | - | - | BKAD |
| 2.4. | Persentase program yang tidak terlaksana | % | 0 | - | 0 | BKAD |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2022 | | Target 2024 | Penanggung Jawab/Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Capaian | | |
| 2.5. | Persentase kegiatan yang tidak terlaksana | % | 0 | - | 0 | BKAD |
| 2.6. | Persentase belanja pendidikan (20%) | % | 20 | 28 | 20 | BKAD |
| 2.7. | Persentase belanja kesehatan (10%) | % | 10 | 26 | 10 | BKAD |
| 2.9. | Proporsi Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah | % | 64,73 | 70,23 | 66,74 | BKAD |
| 2.10. | Proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah | % | 16,04 | 8,85 | 13,44 | BKAD |
| 2.11. | Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur terhadap total Belanja Daerah | % | 43,62 | 44,02 | 44,98 | BKAD |
| 2.12. | Proporsi Belanja Tidak Terduga terhadap total Belanja Daerah | % | 0,14 | 0,99 | 0,14 | BKAD |
| 2.13. | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | % | 0,36 | 0,62 | 0,37 | BKAD |
| 2.14. | Penetapan APBD | - | Tepat Waktu | - | Tepat Waktu | BKAD |
| **3** | **Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan** | | | | | **BKDSDM** |
| 3.1. | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 11 | 11 | 11 | BKDSDM |
| 3.2. | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | % | 2,23 | 0 | 8,36 | BKDSDM |
| 3.3. | Persentase keterisian jabatan | % | 100 | 89,91 | 100 | BKDSDM |
| 3.4. | Jumlah Aparatur yang melakukan Pelanggaran Disiplin Aparatur | ASN | 19 | 3 | 17 | BKDSDM |
| **4** | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | | **BAPPEDA LITBANG** |
| 4.1. | Persentase implementasi rencana kelitbangan | % | 100 | 100 | 100 | BAPPEDA LITBANG |
| 4.2. | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | % | 100 | N/A | 100 | BAPPEDA LITBANG |
| | ***Penerapan SIDa:*** | | | 100 | | |
| 4.3. | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | % | 100 | 100 | 100 | BAPPEDA LITBANG |
| 4.4. | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | % | 100 | 100 | 100 | BAPPEDA LITBANG |
| **5** | **Pengawasan** | | | | | **INSPEKTORAT** |
| 5.1. | Persentase tindak lanjut temuan | % | 85,00 | 83.16 | 90,00 | INSPEKTORAT |
| 5.2. | Persentase pelanggaran pegawai | % | 0 | 0 | 0 | INSPEKTORAT |
| **6** | **Sekretariat Dewan** | | | | | **SETWAN** |
| 6.1. | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota | ADA/TIDAK | ADA | ADA | ADA | SETWAN |
| 6.2. | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | ADA/TIDAK | ADA | ADA | ADA | SETWAN |
| 6.3. | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | ADA/TIDAK | ADA | ADA | ADA | SETWAN |

Berdasarkan hasil Evaluasi terhadap Hasil RKPD tahun 2022, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat Realisasi Anggaran RKPD sampai dengan akhir Tahun 2022 sebesar 87,04%.

Berdasarkan data Hasil RKPD Tahun 2022, maka direncana tingkat lanjut adalah sebagai berikut:

a. Perlu dilakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan, khususnya untuk Perangkat daerah yang tingkat realisasi keuangan dan capaian kinerjanya masih rendah.
b. Agar masing-masing Perangkat Daerah dalam merencanakan kegiatan berdasarkan analisis kinerja dan anggaran dan disesuaikan dengan kesiapan waktu pelaksanaannya dan SDM yang dimiliki sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap sesuai target.

## 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Faktor-faktor yang menjadi peluang maupun yang menjadi faktor penghambat perlu ditelaah dan dianalisis lebih dalam. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

### 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah merupakan suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

**Tabel 2.114**
**Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Daerah**

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1 | Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal | ) Belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2021 adalah 43,35 dengan kategori C (Agak kurang) Artinya perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar<br>) Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah<br>) Belum optimalnya penggunaan Teknologi informasi Komunikasi (TIK)<br>) Belum ada komitmen penuh dari perangkat daerah dan masyarakat dalam berinovasi dalam rangka meningkatkan kinerja peyelenggaraan pemerintah daerah dengan sasaran peningkatan pelayanan publik, peningkatan daya saing daerah dan | - Pelaksanaan reformasi birokrasi masih bersifat administratif, focus terhadap pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan<br>- Belum tersusunnya rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi sebagai acuan dalam membangun reformasi birokrasi sehingga reformasi birokrasi lebih terarah dan terukur<br>- Peta proses bisnis yag ada belum sepenuhnya disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi dan rencana strategis pemerintah daerah<br>- Belum optimalnya penguatan system manajemen sumber daya manusia antara lain mengenai tindak lanjut asesmen<br>- Peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) masih terbatas pada peran untuk mengevaluasi program dan kegiatan belum menyentuh peran mengevaluasi kinerja organsasi maupun peran untuk memprediksi resiko dan peluang<br>- Upaya pelayanan publik yang diberikan masih berada pada tahap pemenuhan standar minimal dan belum diarahkan pada pelayanan prima<br>- Kurangnya pemahaman aparatur terhadap ketentuan dan regulasi |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | pemberdayaan dan peranserta masyarakat. | perencanaan dan penganggaran, pengelolaan APBD;<br>- Masih diperlukan pengembangan dokumen pendukung penganggaran dan pelaksanaan APBD;<br>- Banyak aset daerah yang dokumen pendukung (alas hak) sehingga proses sertifikat terhambat<br>- Kurangnya Anggaran, keterbatasan SDM dalam mengelola keterbukaan informasi publik (konten kreator dan editor) dan kurangnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik.<br>- Belum ada reward dan punishment terhadap seorang inovator<br>- Kinerja dan prestasi belum menentukan jenjang karir seseorang |
| 2 | Kurang optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia | ) Masih rendahnya kualitas pendidikan, khususnya pada indikator Harapan Lama Sekolah 12,95 tahun berada di bawah angka provinsi Sumatera Utara (13,31) dan realisasi pemenuhan SPM jenjang PAUD, SD dan SMP belum mencapai 100%.<br>) Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan perbaikan gizi, hal ini ditandai dengan meningkatkanya angka kematian balita dan tingginya angka stunting pada balita, hasil 2018-2022 di Kabupaten Karo menunjukkan persentase balita tahun 2018 sebesar 2,58% sedangkan pada tahun 2022 menjadi 24,5% artinya selama periode 5 tahun belum terjadi penurunan yang signifikan.<br>) Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup masyarakat<br>) Belum optimalnya Perkembangan olahraga dan keberadaan klub olahraga tidak diiringi dengan pembangunan sarana olahraga | - Masih terdapatnya siswa yang tidak lulus SD, dan SMP, masih terdapatnya siswa yang tidak melanjutkan sekolah dari jenjang SD ke SMP, dan SMP ke SMA, serta masih adanya anak usia sekolah yang tidak mengikuti Pendidikan Dasar.<br>- Masih adanya bangunan dalam kondisi kurang baik pada jenjang sekolah SD, SMP.<br>- Belum terpenuhinya sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas (terutama penguasaan terhadap Teknologi Informasi dan Komputer dalam pembelajaran). Masih belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan di setiap sekolah pada Kabupaten Karo, masih rendahnya manajemen kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, mulai lunturnya loyalitas serta integritas dalam menjalankan profesinya sehingga mempengaruhi mutu kinerja dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, dan belum optimalnya mutu dan prestasi siswa, baik di bidang akademik maupun nonakademik.<br>- Kurangnya minat baca masyarakat akibat sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang memadai dan pengelolaan perpustakaan yang belum maksimal serta tidak terkelolanya arsip secara baku dan rendahnya sumber daya manusia.<br>- Kurangnya SDM Tenaga Kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak<br>- Belum maksimalnya konvergensi penurunan stunting mulai dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, Swasta dan pihak lainnya.<br>- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan penanggulangan stunting terkait pola asuh keluarga, penataan kesehatan dan gizi masyarakat.<br>- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan gizi keluarga, dengan ketersediaan |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | | keanekaragaman dan akses sayur, buah dan protein akan tetapi keluarga masih enggan untuk mengolah makanan yang bergizi untuk mencegah stunting.<br>- Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga<br>- Bantuan Sosial masih belum tepat sasaran sehingga masih dibutuhkan Verifali dan Validasi untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta data PMKS<br>- Masih ditemukannya beberapa kasus terkait dengan penyakit masyarakat (PEKAT).<br>- Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa dan masyarakat terkait dengan regulasi, mekanisme dan kebijakan yang masih rendah, hal ini menyebabkan panggalian potensi desa mejadi tidak maksimal, kurang berkembangnya lembaga ekonomi di desa (BUMDes, SPP, dll)<br>- Belum optimalnya pembinaan olahraga, kepramukaan dan kepemudaan;<br>- Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga;<br>- Belum optimalnya prestasi olahraga;<br>- Belum optimalnya pembinaan atlet;<br>- Terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan;<br>- Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga keolahragaan;<br>- Adanya perbedaan kepentingan dikalangan pemuda millenial yang lebih mementingkan kegiatan politik dibandingkan kegiatan kepemudaan seperti bakti sosial, karang taruna, dll |
| 3 | Belum optimalnya perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan yang berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing | ) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo terus berakselerasi pada tahun 2021 dan 2022. Akselerasi perlu terus didorong sehingga optimalisasi pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya local dan jasa produktif lainnya perlu terus ditingkatkan sehingga membentuk struktus ekonomi yang lebih berkualitas, inklusif dan berkelanjutan;<br>) Belum optimalnya pengelolaan pada sektor-sektor potensial pertanian, pariwisata, industri, KUKM dan sektor produktif lainnya dalam menggerakkan ekonomi rakyat dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi pengangguran; | - Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana, pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian/perikanan/ serta sektor-sektor unggulan lainnya berbasis potensi lokal<br>- Belum optimalnya minat/keterampilan petani dalam Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu dan penerapan GAP secara berkelanjutan serta meningkatkan minat generasi muda pertanian<br>- Sarana dan Prasarana Pasar yang kurang memadai<br>- Rendahnya pertumbuhan sektor Industri<br>- Masih rendahnya minat dan keyakinan masyarakat untuk menggeluti usaha di sektor industri<br>- belum optimalnya kualitas dan kuantitas produk IKM<br>- Masih rendahnya pemanfaatan mesin/peralatan berbasis teknologi<br>- Masih Rendahnya Minat Masyarakat Untuk Menciptakan Wirausaha Baru<br>- Masih banyaknya produk UMKM yang belum memiliki legalitas |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | ) Lahan Usaha Tani (LUT) relokasi Tahap III belum dapat diselesaikan karena adanya kendala lapangan dengan masyarakat sekitar yang mengklaim bahwa tanah tersebut milik mereka;<br>) Belum terselesaikannya LUT mengakibatkan adanya permintaan sewa rumah sewa lahan dari masyarakat yang direlokasi Tahap III di Siosar sampai mereka dapat menempati rumah dan mengelola lahan usaha tani;<br>) Perumahan dan Fasum-fasosnya terbengkalai karena masyarakat tidak bersedia menempati rumahnya sebelum LUT selesai dan diserahterimakan;<br>) Berlarutnya penyelesaian LUT menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kab. Karo dan memicu terjadi aksi masyarakat (demo) terus menerus;<br>) Kunjungan wisatawan Kabupaten Karo tahun 2018-2022 masih belum tercapai dari target yang diharapkan;<br>) Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Karo perlu mendapat perhatian karena jika dilihat dari jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk dari tahun 2018-2019 tidak mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,314. Sedangkan tahun 2020-2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,80, tahun 2022 meningkat sebesar 1,90. Peningkatan tersebut masih perlu dioptimalkan;<br>) Pembangunan urusan pangan perlu untuk terus ditingkatkan karena merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan | - Pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk UMKM belum optimal<br>- Masih terbatasnya sarana dan prasarana kelembagaan UKM.<br>- Masih banyaknya UKM Kab. Karo yeng belum mendapatkan pelayanan pendampingan usaha.<br>- Masih rendahnya pemanfaatan mesin/peralatan berbasis teknologi<br>- Kualitas SDM koperasi yang masih rendah<br>- Sistem pengelolaan koperasi yg belum professional<br>- Terbatasnya jumlah pelatihan kerja yang dilakukan.<br>- Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelatihan kerja.<br>- Masih minimnya Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi.<br>- Rendahnya penempatan pencari kerja pada pasar kerja.<br>- Belum optimalnya citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata;<br>- Belum optimalnya peningkatan SDM pariwisata yang berkualitas dan professional;<br>- *City Branding* Kabupaten Karo sebagai daerah pariwisata belum gencar dipromosikan secara internasional;<br>- Event-event pariwisata berskala internasional membutuhkan dana yang cukup besar sedangkan APBD Kabupaten Karo sangat terbatas;<br>- Kreativitas, Inovasi dan Kompetensi Daya Saing ODTW masih kurang;<br>- Kemampuan kelompok sadar wisata masyarakat belum optimal dan memerlukan dukungan untuk pengembangannya menuju taraf internasional;<br>- Kolaborasi dan Sinergitas stakeholder dalam pengembangan pariwisata belum optimal;<br>- Sarana dan Prasarana Objek Wisata kurang memadai;<br>- Pemasaran Pariwisata yang belum memadai;<br>- Belum optimalnya Pengembangan industri ekonomi kreatif;<br>- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi;<br>- Terbatasnya ruang publik untuk tempat berkreatifitas dan berekspresi;<br>- Rendahnya minat masyarakat untuk ikut serta dalam pelestarian nilai dan budaya Karo;<br>- Belum optimalnya pelestarian cagar budaya;<br>- Minimnya pemahaman dan kecintaan anak-anak dan kaum muda pada budaya lokal, terutama pada sejarah lokal;<br>- Belum optimalnya pembinaan pengelolaan kesenian<br>- Kurang memadainya infrastruktur kemandirian pangan |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | sumber daya manusia yang berkualitas | - Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya konsumsi pangan dengan prinsip B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)<br>- Kurangnya pengembangkan pemanfaatan pangan, melalui pola promosi, konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA)<br>- Kurangnya pengembangan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan sumber daya local |
| 4 | Belum terwujudnya iklim investasi yang kondusif | ) Belum optimalnya iklim investasi dan berusaha yang kondusif | - Belum tersedianya regulasi pendukung untuk kemudahan berusaha bagi investor;<br>- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penanaman modal dan perlunya koordinasi dengan stakeholder;<br>- Belum tersedianya data dan peta potensi investasi yang memiliki kajian studi;<br>- Belum optimalnya pemenuhan komitmen, pemahaman dan minat masyarakat/stakeholder terhadap perizinan;<br>- Belum optimalnya kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modalnya;<br>- Belum optimalnya Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal. |
| 5 | Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Daerah | ) Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Daerah<br>) | - Potensi Pendapatan Asli Daerah belum tergali secara optimal;<br>- Sarana dan Prasarana Pendukung Pemungutan Pendapatan Asli Daerah belum memadai termasuk petugas pajak;<br>- Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Daerah. |
| 6 | Ketersediaan dan kondisi infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi belum optimal. | ) Belum optimalnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan<br>) Persentasi jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik masih 61.54% dan cenderung stagnan serta ketersebarannya yang belum merata<br>) Akses air minum layak hanya 70,35% dan sanitasi layak hanya 74,57%<br>) Jaringan irigasi dalam kondisi baik baru 49,35%<br>) Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal<br>) Masih terdapat kawasan perumahan dan permukiman kumuh<br>) Masih ada korban bencana yang belum mendapat rumah dan LUT | - Meningkatnya jumlah timbunan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan dan ketersediaan TPA yang belum memadai di Kab. Karo;<br>- Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah belum mencukupi;<br>- Kualitas lingkungan hidup cenderung mengalami degradasi;<br>- Minimnya anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan;<br>- Masih banyak drainase jalan yang tidak tersedia atau belum berfungsi optimal;<br>- Tonase pengguna jalan yang belum sesuai;<br>- Minimnya anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air minum dan sanitasi;<br>- Lembaga pengelola dan regulasi yang ada untuk air minum dan sanitasi belum berfungsi dengan baik;<br>- Kesadaran masyarakat untuk memelihara dan melaksanakan sanitasi yang baik masih kurang;<br>- Minimnya anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;<br>- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara jaringan irigasi;<br>- Ketersediaan air yang berkurang; |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | ) Belum optimalnya upaya penanggulangan bencana yang Tangguh, komprehensif, multidimensi dan berkelanjutan.<br>) Ketersediaan fasiltas keselamatan dan kenyamanan jalan belum optimal | - Sulitnya menyediakan lahan untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi;<br>- Belum optimalnya penegakan peraturan perundangundangan yang berlaku;<br>- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan ruang;<br>- Minimnya anggaran untuk pembangunan rumah dan penyediaan LUT korban bencana;<br>- Penetapan daftar nama korban bencana yang masih sering beruabah-ubah;<br>- Sulitnya mendapat lahan untuk pembangunan rumah dan LUT korban bencana;<br>- Ketersediaan anggaran untuk penanganan bencana masih minim;<br>- Kurangnya pengetahuan untuk mitigasi bencana;<br>- Koordinasi antara instansi terkait belum optimal;<br>- Minimnya anggaran untuk penyediaan dan perawatan fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan;<br>- Kurangnya kesedaran masyarakat untuk memeliharan fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan. |

### 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

**A. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar**

**a. Urusan Pemerintahan Bidang pendidikan**

- Masih adanya bangunan dalam kondisi kurang baik pada jenjang sekolah SD, SMP. Hal ini disebabkan perawatan dan pemeliharaan yang kurang memadai serta sarana prasarana yang telah memiliki masa pakai lama.
- Belum terpenuhinya sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas

(terutama penguasaan terhadap Teknologi Informasi dan Komputer dalam pembelajaran).

- ❖ Masih belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan di setiap sekolah pada Kabupaten Karo, masih rendahnya manajemen kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, mulai lunturnya loyalitas serta integritas dalam menjalankan profesinya sehingga mempengaruhi mutu kinerja dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, dan belum optimalnya mutu dan prestasi siswa, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

**b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

- ❖ Kurangnya Dokter Spesialis (Spesialis Mata, Anestesi, dan Rehapmedik, Patologoklinik dan Radiologi)
- ❖ Belum tercapainya target Indikator Standar Pelayanan Minimum pada pelayanan RSU
- ❖ Masih kurangnya kelengkapan prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas sesuai standar
- ❖ Pelaksanaan program/kegiatan dan manajemen administrasi di Puskesmas belum optimal sehingga perlu pembinaan dan pendampingan.
- ❖ Rendahnya tingkat kunjungan ke Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM).
- ❖ Kurangnya pengetahuan dan keterampilan kader Posbindu di desa dalam melaksanakan penyuluhan pada masyarakat
- ❖ Masih terdapat sarana Puskesmas Pembantu dan rumah dinas tenaga kesehatan dalam keadaan rusak
- ❖ Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan perbaikan gizi, hal ini ditandai dengan tingginya angka stunting pada balita, Berdasarkan hasil Riskesdas pada periode tahun 2015-2019 di Kabupaten Karo menunjukkan persentase balita stunting mengalami peningkatantahun 2015 sebesar 29% sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 38,46%
- ❖ Belum optimalnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, hal ini ditandai dengan meningkatnya penyakit menular dan tidak menular

- ❖ Belum tercapainya target Indikator Standar Pelayanan Minimum pada pelayanan RSU;
- ❖ Belum optimalnya pelayanan KB yang menyebabkan sulitnya menekan peserta *Unmet Need*. Berdasarkan data pada tahun 2015 *Unmet Need* di Kabupaten Karo sebesar 10,42% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 17,89% walaupun ada peningkatan tetapi capaian tersebut masih rendah.
- ❖ Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan perbaikan gizi, hal ini ditandai dengan meningkatnya angka kematian balita.

**c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

- ❖ Persentasi jaringan jalan dalam kondisi baik dan jembatan dalam kondisi baik yang cenderung stagnan serta ketersebarannya yang belum merata;
- ❖ Akses air minum belum mencapai 100%;
- ❖ Akses sanitasi belum mencapai dari 100%;
- ❖ Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum masih kurang;
- ❖ Perlunya peningkatan luas wilayah irigasi yang dipelihara;
- ❖ Masih banyak saluran drainase tidak berfungsi secara optimal;
- ❖ Masih banyak gedung milik Pemerintah yang belum memadai;
- ❖ Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang masih kurang;
- ❖ Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal;
- ❖ Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau;

**d. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

- ❖ Masih terdapat kawasan perumahan dan permukiman kumuh;
- ❖ Masih adanya rumah tidak layak huni;

**e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

- ❖ Kesadaran masyarakat dan kurangnya kepedulian masyarakat akan bencana masih rendah;
- ❖ SDM Penanggulangan bencana masih kurang dan belum terlatih;

- Sarana prasarana layanan Pusdalops dan Pusdatin belum memadai;
- Ketersediaan rambu-rambu dan plank informasi rawan bencana dalam rangka mitigasi belum memadai;
- Gladi/simulasi lapangan kesiapsiagaan bencana belum merata dilaksanakan di 17 Kecamatan;
- Masa berlaku KRB sampai dengan 2022 dan RPB sampai dengan 2023;
- Dokumen regulasi penanggulangan bencana belum lengkap (RPKB dan Renkon bencana lain selain erupsi Gunung);
- Peralatan perlindungan dan Kesiapsiaagan serta sarana dan prasarana moblisiasi terkait evakuasi, pemulangan, tempat penyimpanan belum memadai;
- Kurang optimalnya koordinasi antar instansi dan penguatan kelembagaan bencana terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Sarana dan prasarana Satpol PP dan pemadam kebakaran belum sesuai standar;
- Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Karo yang masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap penegakan Perda masih rendah, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban di lingkungannya;
- Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Karo sangat rendah sekali dimana pada tahun 2019 persentasenya hanya 0,65% dan tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) hanya 0,46%, hal ini diakibatkan oleh kurangnya kenderaan operasional serta fasilitas sarana dan prasarana penunjang pemadam kebakaran serta belum adanya pos pemadam di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Karo;
- Terbatasnya pagu anggaran, sehingga untuk menangani kejadian bencana yang terjadi secara tiba-tiba tidak dapat ditangani maksimal.

**f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

- ❖ Dinas Sosial masih membutuhkan Pegawai, dikarenakan jumlah pegawai yang ada belum mencukupi untuk mendukung semua tupoksi Dinas Sosial Kab. Karo;
- ❖ Dibutuhkan penambahan anggaran guna pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kabanjahe;
- ❖ Dibutuhkan Kendaraan Operasional guna mendukung penanganan PMKS (ODGJ dan Orang terlantar);
- ❖ Belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas, lansia dan anak terlantar;
- ❖ Bantuan Sosial masih belum tepat sasaran sehingga masih dibutuhkan Verifali dan Validasi Data Data Kemiskinan;
- ❖ Kegiatan KUBE belum semua usulan terpenuhi di karenakan keterbatasan anggaran;
- ❖ Belum tersedianya Rumah Singgah untuk orang terlantar.

**B. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar**

**a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga kerja**

- ❖ Peluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
- ❖ Kualitas dan Daya Saing Calon Tenaga Kerja Belum Sesuai Kebutuhan Pasar;
- ❖ Sarana Prasarana Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Belum Sesuai dengan Perkembangan Kebutuhan Pasar Kerja;
- ❖ Sistem Informasi Ketenagakerjaan Belum Merata;

**b. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- ❖ Masih adanya perkawinan anak di bawah umur dan perundungan terhadap anak;
- ❖ Tingginya partisipasi angkatan kerja perempuan sedangkan lapangan kerja terbatas; dan
- ❖ Pemberdayaan perempuan masih menjadi perhatian karena meningkatnya rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

**c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

- ❖ Cadangan Pangan belum memenuhi Standar/Arahan Kementerian Pertanian sebesar 110 Ton;

- ❖ Dari hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Karo pada Tahun 2021 masih ada beberapa Kecamatan dan Desa yang Rentan Rawan Pangan;
- ❖ Belum adanya Intervensi untuk Daerah Rawan Pangan
- ❖ Masih banyak petani yang melakukan pemakaian pestisida yang berlebihan;
- ❖ Banyak petani belum mengetahui pentingnya registrasi pangan segar asal tumbuhan;
- ❖ Masih banyak masyarakat yang belum mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman dikomsumsi.

**d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**

- ❖ Sertifikasi tanah pemerintah daerah dan tanah hak milik masih rendah;
- ❖ Masih ada kasus tanah pemerintah daerah yang perlu diselesaikan.

**e. Bidang Lingkungan Hidup**

- ❖ Kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup (masih terdapat pelaku usaha yang tidak memiliki Ijin Lingkungan);
- ❖ Kurangnya sarana dan prasarana persampahan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik;
- ❖ Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan dan ketersediaan TPA yang belum memadai di Kabupaten Karo;
- ❖ Kualitas dan kuantitas petugas laboratorium masih kurang;
- ❖ Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang belum lengkap;
- ❖ Kualitas lingkungan yang cenderung mengalami degradasi;
- ❖ Pelayanan persampahan belum menjangkau pada semua masyarakat perkotaan dan belum tersedianya TPA;
- ❖ Penanganan air limbah rumah tangga/domestik belum dilakukan secara terpadu;
- ❖ Belum optimalnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan;

- ❖ Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang;
- ❖ Belum tersedianya data lahan yang memenuhi syarat untuk RTH;
- ❖ Belum optimalnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

**f. Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- ❖ Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Karo masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target nasional yang telah ditetapkan.
- ❖ Kurangnya ketersediaan peralatan perekaman dan pencetakan KTP-Elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA) dan blangko Kartu Identitas Anak (KIA).

**g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- ❖ Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa dan masyarakat terkait dengan regulasi, mekanisme dan kebijakan yang masih rendah, hal ini menyebabkan panggalian potensi desa mejadi tidak maksimal, kurang berkembangnya lembaga ekonomi di desa (BUMDes, SPP, dll)
- ❖ Rendahnya semangat perubahan Aparatur Pemerintah Desa dan masyarakat serta minimnya inovasi menuju desa mandiri (Desa masih tergantung terhadap DD dan ADD)

**h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- ❖ Kurangnya tenaga penyuluh KB lapangan (hanya 7 orang tenaga yang tersedia untuk cakupan 17 kecamatan/269 desa)
- ❖ Desa-desa yang menjadi daerah cakupan sasaran program kampung merupakan desa dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan masih memiliki infrastruktur jalan dan sarana prasarana umum yang sangat tidak memadai
- ❖ Adanya peningkatan cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet need*) setiap tahunnya, pada tahun 2017 sebesar 10,42%, tahun 2018 meningkat menjadi 15% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 17,89%.

**i. Bidang Perhubungan**

- ❖ Belum tersedianya Gedung Pengujian Kenderaan Bermotor dan Sarana prasarananya
- ❖ Belum tersedianya Terminal Type C
- ❖ Masih terdapat kemacetan di beberapa lokasi
- ❖ Belum terpenuhinya Perbaikan,Perawatan dan Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)
- ❖ Belum terlaksananya meterisasi LPJU

**j. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika**

- ❖ Belum optimalnya penggunaan Teknologi informasi Komunikasi (TIK), Kurangnya Sumber daya yang memadai untuk mendukung Penyelenggaraan SPBE, Kurangnya Pemerataan fasilitas akses informasi publik, belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kurangnya ruang informasi publik untuk akses informasi bagi masyarakat.

**k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**.

- ❖ Belum optimalnya kualitas SDM pengurus koperasi dalam pengelolaan organisasi dan usaha koperasi;
- ❖ Belum optimalnya akses pasar bagi produk-produk UKM;
- ❖ Belum optimalnya kemitraan pelaku Usaha Mikro dengan dunia usaha;
- ❖ Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar.
- ❖ Banyak produk yang belum memenuhi legalitas izin usaha;
- ❖ Koperasi yang ada masih bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam.

**l. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal**

- ❖ Belum tersedianya regulasi pendukung untuk kemudahan berusaha bagi investor;
- ❖ Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penanaman modal dan perlunya koordinasi dengan stakeholder;
- ❖ Belum tersedianya data dan peta potensi investasi yang memiliki kajian studi;
- ❖ Belum optimalnya pemenuhan komitmen, pemahaman dan minat masyarakat/stakeholder terhadap perizinan;

- ❖ Belum optimalnya kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modalnya;
- ❖ Belum optimalnya Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

**m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

- ❖ Belum optimalnya pembinaan olahraga, kepramukaan dan kepemudaan;
- ❖ Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga;
- ❖ Belum optimalnya prestasi olahraga;
- ❖ Belum optimalnya pembinaan atlet;
- ❖ Terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan;
- ❖ Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga keolahragaan;
- ❖ Adanya perbedaan kepentingan dikalangan pemuda millennial yang lebih mementingkan kegiatan politik dibandingkan kegiatan kepemudaan seperti bakti sosial, karang taruna, dll.

**n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

- ❖ Belum ada sistem integrasi data statistik sektoral daerah, belum optimalnya ketersediaan data statistik untuk perencanaan pembangunan daerah, kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik sektoral.

**o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

- ❖ Kurangnya sumber daya di bidang pengelolaan persandian daerah.

**p. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan**

- ❖ Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi;
- ❖ Terbatasnya ruang publik untuk tempat berkreatifitas dan berekspresi;
- ❖ Rendahnya minat masyarakat untuk ikut serta dalam pelestarian nilai dan budaya Karo;
- ❖ Belum optimalnya pelestarian cagar budaya;
- ❖ Minimnya pemahaman dan kecintaan anak-anak dan kaum muda pada budaya lokal, terutama pada sejarah lokal;
- ❖ Belum optimalnya pembinaan pengelolaan kesenian.

**q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

- ❖ Target Pustakawan yang dilatih belum tercapai, kondisi saat ini belum ada aparatur yang menjadi pustakawan sehingga pengelolaan dan pelayanan perpustakaan tidak maksimal;
- ❖ Gedung perpustakaan belum memenuhi standar perpustakaan nasional dan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- ❖ Menurunnya persentase jumlah kunjungan terhadap populasi yang harus dilayani yang bisa dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung minat baca masyarakat.
- ❖ Kurangnya minat baca masyarakat akibat sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang memadai dan pengelolaan perpustakaan yang belum maksimal serta tidak terkelolanya arsip secara baku dan rendahnya SDM.

**r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

- ❖ Tidak ada penambahan sarana dan prasarana tahun 2019, sehingga kondisi sarana dan prasarana arsip saat ini belum memenuhi standar.

**C. Urusan Pemerintahan Pilihan**

**a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

- ❖ Rendahnya produksi dan produktivitas ikan yang disebabkan oleh budidaya perikanan belum dimanfaatkan secara optimal;
- ❖ Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- ❖ Kurangnya SDM Tenaga Penyuluh Perikanan;
- ❖ Belum optimalnya sarana dan prasarana operasional BBI Lokal;
- ❖ Kurangnya pengetahuan dan keterampilan Pembudidaya Ikan dalam berbudidaya ikan;
- ❖ Kurangnya ketersediaan ikan di perairan daratan.

**b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

- ❖ Belum optimalnya citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata;
- ❖ Belum optimalnya peningkatan SDM pariwisata yang berkualitas dan professional;
- ❖ City Branding Kabupaten Karo sebagai daerah pariwisata belum gencar dipromosikan secara internasional;

- Event-event pariwisata berskala internasional membutuhkan dana yang cukup besar sedangkan APBD Kabupaten Karo sangat terbatas;
- Kreativitas, Inovasi dan Kompetensi Daya Saing ODTW masih kurang;
- Kemampuan kelompok sadar wisata masyarakat belum optimal dan memerlukan dukungan untuk pengembangannya menuju taraf internasional;
- Kolaborasi dan Sinergitas stakeholder dalam pengembangan pariwisata belum optimal;
- Sarana dan Prasarana Objek Wisata kurang memadai;
- Pemasaran Pariwisata yang belum memadai;
- Belum optimalnya Pengembangan industri ekonomi kreatif.

**c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

- Berkurangnya rata-rata luas kepemilikan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan;
- Rendahnya kualitas SDM dan teknologi petani dan penangkar;
- Kurangnya pengetahuan petani dalam pelaksanaan SOP pertanian dan belum optimalnya mekanisasi pertanian;
- Pertanian yang masih sangat dipengaruhi oleh musim;
- Belum optimalnya infrastruktur pertanian/ permasalahan jenis, jumlah, dan akses input pertanian;
- Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian;
- Masih rendahnya diseminasi teknologi pertanian dan penyuluhan pertanian;
- Masih rendahnya aksesbilitas petani terhadap informasi pasar dan kelembagaan pembiayaan pertanian;
- Keterbatasan SDM penyuluh baik kuantitatif maupun kualitatif dan sarana pendukung;
- Ketersediaan sarana dan prasarana peternakan belum optimal;
- Belum optimalnya pemanfaatan kawasan penggembalaan umum;
- Keterjangkauan petani terhadap pupuk anorganik;
- Kenaikan harga pupuk kimia yang mengakibatnya keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa;

- ❖ Lahan Usaha Tani (LUT) relokasi Tahap III belum dapat diselesaikan karena adanya kendala lapangan dengan masyarakat sekitar yang mengklaim bahwa tanah tersebut milik mereka;
- ❖ Belum terselesaikannya LUT mengakibatkan adanya permintaan sewa rumah sewa lahan dari masyarakat yang direlokasi Tahap III di Siosar sampai mereka dapat menempati rumah dan mengelola lahan usaha tani;
- ❖ Perumahan dan Fasum-fasosnya terbengkalai karena masyarakat tidak bersedia menempati rumahnya sebelum LUT selesai dan diserahterimakan;
- ❖ Berlarutnya penyelesaian LUT menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kab. Karo dan memicu terjadi aksi masyarakat (demo) terus menerus.

**d. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**

- ❖ Di beberapa daerah terpencil masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN;
- ❖ Potensi energi baru dan terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal.

**e. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

- ❖ Daya Saing Komoditi/Produk Pertanian di Pasar Nasional dan Global Masih Rendah;
- ❖ Kurangnya Promosi Komoditi/Produk Unggulan di tingkat Nasional dan Internasional;
- ❖ Perlindungan konsumen belum optimal
- ❖ Kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional kurang memadai;
- ❖ Belum adanya peraturan daerah tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
- ❖ Belum optimalnya pembinaan terhadap pedagang yang berada di lingkungan pasar.

**f. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

- ❖ Belum optimalnya fasilitas dan pengelolaan sentra IKM Kabupaten Karo;

- ❖ Belum optimalnya kualitas produk IKM yang kreatif dan inovatif;
- ❖ Masih rendahnya pertumbuhan industri di Kabupaten Karo.

**D. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan**

**a) Sekretariat Daerah**

- ❖ Reformasi Birokrasi Kabupaten Karo masih rendah dan nilai penerapan Standar Pelayanan Publik masih rendah.
- ❖ Nilai hasil evaluasi SAKIP masih rendah sehingga perlu diperbaiki secara menyeluruh (perencanaan, indikator kinerja, perjanjian kinerja, proses bisnis, cascading, dll)
- ❖ Program pembangunan yang dilaksanakan baik fisik maupun nonfisik belum termonitoring dengan baik.
- ❖ Rendahnya nilai evaluasi Lakip Kabupaten Karo.
- ❖ Masih belum lengkapnya data nama jalan di Kabupaten Karo.
- ❖ Belum semua desa/kelurahan/kecamatan yang memiliki batas baku dan masih banyak desa yang tidak memiliki dokumen terkait batas desanya.
- ❖ Minimnya keahlian dan pengetahuan yang dimiliki POKJA (Kelompok Kerja) Pengadaan Barang dan Jasa.
- ❖ Beberapa unsur rupa bumi di Kab. Karo belum memiliki nama yang jelas.

**b) Sekretariat DPRD**

- ❖ Pelayanan Administrasi Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD belum optimal.

**E. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan**

**a. Bidang Perencanaan**

- ❖ Belum optimalnya peran lembaga dalam menyusun kebijakan perencanaan untuk mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembangunan daerah;
- ❖ Belum optimalnya sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
- ❖ Adanya perbedaan persepsi dan kemampuan SDM antara PD dan Bappedalitbang pelaksanaan peran dan fungsi perencanaan antara Bappedalitbang dan Perangkat Daerah;

- ❖ Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- ❖ Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam merumuskan tindak lanjut atau perencanaan ke depan.

**b. Bidang Keuangan**

- ❖ Kurangnya pemahaman aparatur terhadap ketentuan dan regulasi perencanaan dan penganggaran, pengelolaan APBD;
- ❖ Masih diperlukan pengembangan dokumen pendukung penganggaran dan pelaksanaan APBD;
- ❖ Banyak aset daerah yang dokumen pendukung (alas hak) sehingga proses sertifikat terhambat;
- ❖ Potensi Pendapatan Asli Daerah belum tergali secara optimal;
- ❖ Sarana dan Prasarana Pendukung Pemungutan Pendapatan Asli Daerah belum memadai termasuk petugas pajak;
- ❖ Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Daerah.

**c. Bidang Urusan Kepegawaian**

- ❖ Belum tersedianya Rencana Induk Kepegawaian sehingga menyulitkan pemetaan kebutuhan ASN dari beberapa aspek seperti kebutuhan pengembangan karir, kebutuhan diklat, kebutuhan jumlah ASN dll;
- ❖ Masih kurangnya kompetensi PNS terkait Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sehingga diperlukan Penambahan Pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan dibidang tugas yang terkait dengan pekerjaan PNS sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional;
- ❖ Kebijakan dan Sistem Informasi Kepegawain dari pemerintah pusat masih sering berubah sehingga tidak sinkron dengan perencanaan Kepegawaian di daerah.

**d. Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan**

- ❖ Masih minimnya presentasi pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Tahun 2019 ASN yang mengikuti Diklat sebesar 24,49%, sedangkan tahun 2022 tidak ada yang mengikuti diklat struktural karena anggaran yang

terbatas dan Kabupaten Karo belum memenuhi standar dalam hal akreditasi sebagai lembaga penyelenggara Diklat;

- ❖ Pelaksanaan Diklat kepemimpinan dan Prajabatan masih tergantung terhadap pihak/lembaga lainnya seperti BPSDM Propinsi, Lembaga Administrasi Negara dll;
- ❖ Belum sepenuhnya syarat minimal diklat 20 jam/tahun terpenuhi oleh setiap Apratur Sipil.

**e. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan**

- ❖ Masih rendahnya dukungan PD dan Pengambil kebijakan dalam pengembangan penelitian dan pengembangan

## F. Unsur Pengawas

### a) Inspektorat Daerah

- ❖ Kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan di lapangan
- ❖ Ketersediaan SDM auditor belum proposianal baik dari jumlah personil maupun kualifikasi jenjang auditor
- ❖ Kapabilitas APIP masih Level 2

## G. Unsur Pemerintahan Umum

### a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ❖ Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan sehingga masih diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.
- ❖ SDM Pengurus Ormas, LSM dan OKP masih perlu untuk ditingkatkan.
- ❖ Masih ditemukannya beberapa kasus terkait dengan penyakit masyarakat (PEKAT).
- ❖ Kesadaran Politik masyarakat dan pemahaman pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya masih rendah.
- ❖ Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan sehingga masih diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.

- ❖ Masih rendahnya peran partai politik dalam peningkatan kualitas demokrasi di daerah.

## 2.4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Karo disusun berdasarkan prinsip *no one left behind* (tidak ada satu pun yang tertinggal). Muatan pemerataan pembangunan yang diimbangi dengan pengendalian lingkungan merupakan langkah integrasi yang menjadi dasar dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Karo. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Karo yang telah disusun sejalan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 yang membawa semangat keberlanjutan dalam setiap proses pembangunan yang diselenggarakan dan ditetapkan yang mengarah kepada perbaikan indikator-indikator TPB, dimana terdapat 4 (empat) pilar pembangunan dan 17 (Tujuh belas) tujuan yang saling berkaitan satu sama lain.

Pada Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 Pencapaian TPB/SDGs Kabupaten Karo yang sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Karo sebesar 71,4% tercapai dari 91 indikator yang terdiri dari 1) Pilar sosial sebanyak 21 Target, 34 Indikator dan 31 Indikator tercapai; 2) Pilar Pembangunan Ekonomi sebanyak 12 Target, 19 Indikator dan 12 Indikator tercapai; 3) Pilar Pembangunan Lingkungan sebanyak 17 Target, 24 Indikator dan 13 Indikator tercapai dan 4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola sebanyak 7 Target, 14 Indikator dan 9 Indikator tercapai.

Permasalahan/kendala dalam pencapaian TPB/SDGS tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan data yang bersifat disagregasi (data terpilah) serta belum tersedianya data untuk beberapa indikator global SDGs;
2. Kerjasama Aktif Multi Sektor dalam bentuk advokasi dan diseminasi; fasilitasi program; peningkatan kapasitas; serta dukungan pendanaan;
3. Dalam Pencapaian target dari seluruh Indikator TPB/SDGS dibutuhkan keterlibatan dari seluruh sektor tidak hanya dari Pemerintah melainkan dari OMS, Filantropi dan *Business*/Dunia Usaha Dunia Industri serta Perguruan Tinggi, untuk itu dibutuhkan komitmen dan regulasi yang langsung mengikat kepada Filantropi dan

Business/Dunia Usaha Dunia Industri untuk bersinergi dalam pencapaian target TPB/SDGs di Daerah;

4. Dibutuhkan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam rangka penyediaan data indikator;
5. Dibutuhkan optimalisasi dalam pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan RAD TPB/SDGs.

Pemerintah Kabupaten Karo telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs Tahun 2022, dimana dari 15 Tujuan dan 91 Indikator pada Dokumen RAD TPB/SDGS Kabupaten Karo yang sejalan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karo terdapat 71,4 Persen Target yang tercapai pada Tahun 2022.

## 2.5. Program Strategis Daerah (*Major Project*)

Terdapat 9 (Sembilan) program strategis daerah yang direncanakan agar terdapat perubahan Kabupaten Karo ke arah yang lebih maju. Program strategis tersebut adalah:

### 1. Penataan Wilayah

Dalam mendorong pemerataan pelayanan kepada masyarakat salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah penataan wilayah kecamatan. Penataan tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa yang ada di setiap kecamatan. Dengan penataan maka akan didapatkan kecamatan yang memiilki beban berat dan yang lebih ringan sehingga didapatkan strategi untuk memperkuat kecamatan-kecamatan yang memiliki beban lebih berat dan jika memungkinkan akan dilakukan pemekaran. Penataan wilayah ini tidak terbatas sampai kecamatan, tetapi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan maka desa-desa yang dianggap layak untuk dimekarkan juga akan menjadi perhatian.

### 2. Pembangunan Gedung Olahraga (*Sport Center*)

Kabupaten Karo memiliki potensi di bidang olahraga yang telah banyak melahirkan atlet-atlet berprestasi dari cabang olahraga seperti wushu, gulat, taekwondo, pencak silat, atletik, catur, judo, karate, sepak bola, bola volly dan lainnya namun belum didukung sarana dan prasarana yang memadai. Pengembangan infrastruktur dibidang olahraga seperti Gedung Olahraga (*Sport Center*) diharapkan dapat menciptakan bibit atlet berprestasi dan masyarakat khususnya pemuda dan pemudi Kabupaten

Karo dapat berolahraga di tempat yang berstandar nasional dan internasional, terlebih lagi pada tahun 2024, Provinsi Sumatera Utara dan Aceh tuan rumah bersama PON XXI.

Pembangunan Gedung Olahraga (*Sport Center*) telah dilaksanakan di Siosar dengan kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Karo dan Provinsi Sumatera Utara dikarenakan letak geografis Kabupaten Karo yang menguntungkan bagi para atlet, dimana lokasi dataran tinggi serta udara yang sejuk, sehingga dapat melatih peningkatan daya tahan stamina atlet selama berlatih. Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pembangunan gedung olahraga (sport center) di Siosar. Pembangunan Gedung olahraga (*Sport Center*) ini akan dijadikan tempat latihan atau *training center* bagi atlet-atlet Sumatera Utara yang akan bertanding dan berjuang pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2024. Diharapkan dengan adanya pembangunan Gedung Olahraga (*Sport Center*) di Siosar ini mampu menjadi wadah yang representatif bagi atlit, klub maupun penggemar olahraga dimana mereka dapat melakukan aktivitas-aktivitasnya seperti berlatih untuk meningkatkan kebugaran fisiknya dan sekaligus berekreasi serta dengan adanya pembangunan Gedung Olahraga (*Sport Center*) di Siosar nantinya bermanfaat bagi masyarakat dan menambah semangat baru dalam berolahraga untuk memajukan dunia olahraga di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Karo.

**3. Pembukaan Ruang Terbuka Hijau**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa di wilayah perkotaan Luas Ruang Terbuka Hijau minimal 30%. Hingga tahun 2022 capaian luas Ruang Terbuka Hijau di wilayah Perkotaan Kabanjahe dan Berastagi masih sekitar 25%. RTH dimaksud meliputi sempadan sungai, trotoar jalan, hutan kota, Tempat Pemakaman Umum maupun ruang publik lainnya. Target ketersediaan RTH pada tahun 2024 adalah 27%.

Pada tahun 2022 yang lalu salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menambah RTH di Kota berastagi adalah penataan Trotoar Jalan Veteran Berastagi melalui Dana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penataan dimaksud meliputi penggantian trotoar, penyediaan tempat duduk, tempat cuci tangan, tempat sampah, taman. Melalui Penataan

diharapkan kenyamanan publik untuk menggunakan trotoar tersebut dapat meningkat.

Kedepannya penataan penataan seperti trotoar Berastagi tersebut dapat dilaksanakan terutama di Kota kabanjahe dan Berastagi. Selain penataan, diharapkan pembukaan RTH masih dapat dilaksanakan dimasa yang akan datang. Salah satu kendala terkait penyediaan RTH tersebut adalah ketersediaan lahan. Oleh karena itu optimalsisasi RTH yang sudah ada merupakan alternatif untuk meningkatkan ketersediaan RTH di kabupaten Karo.

**4. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan penerimaan daerah maka salah satu upaya dilakukan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD yang dibentuk merupakan usaha yang memiliki keterkaitan dengan potensi sumber daya lokal yang potensial. BUMD diharapkan menjadi salah satu penggerak bagi perekonomian daerah.

**5. Penerapan Sistem Pola Pertanian Terpadu (*Integrated Framing*)**

Sesuai dengan perkembangan jaman berbagai permasalahan baru dalam bidang pertanian mulai muncul. Kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, ketersediaan lahan yang cenderung tetap, mahalnya input produksi, degradasi lahan akibat penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus, dan hasil produksi yang kurang sehat. Berbagai permasalahan tersebut dalam jangka panjang akan menyebabkan lemahnya ketahanan pangan daerah dan nasional sehingga harus diatasi dengan salah satunya penerapan teknologi yang komprehensif. Teknologi tersebut haruslah mempunyai kemampuan dalam meningkatkan produktivitas lahan, produktivitas hasil produksi, hemat air, hemat tenaga kerja, berwawasan lingkungan, hasil produksi yang sehat, serta mudah diterima dan ditetapkan oleh petani. Pola pertanian terpadu yang ramah lingkungan dan berkelanjutan adalah salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sistem pertanian terpadu memanfaatkan keterkaitan antara tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta ternak dan perikanan untuk mendapatkan agroekosistem yang mendukung produksi pertanian, produktivitas lahan, peningkatan ekonomi, dan pelestarian sumber daya

alam. Kabupaten Karo dengan potensi pertanian dan peternakannya diharapkan dapat mengembangkan pertanian terpadu secara optimal.

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pertanian serta pembinaan pada kelompok tani sebagai upaya Dinas Pertanian dalam meningkatkan penerapan pola pertanian terpadu di Kabupaten Karo. Adapun program kegiatan Dinas Pertanian yang mendukung pertanian terpadu antara lain:

- Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pertanian (benih/bibit tanaman dan ternak (*chopper*).
- Pembinaan pada kelompok tani dalam meningkatkan penerapan pola pertanian terpadu di Kabupaten Karo.

Pada tahun 2022, fokus pengembangan pola pertanian terpadu sektor pertanian (hortikultura dan perkebunan) serta peternakan terdapat di Desa Ujung Sampun, Kecamatan Dolat Rayat. Pada tahun 2023, terdapat rencana melaksanakan penelitian sistem pertanian terpadu kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Adapun lokasi yang diusulkan adalah Desa Beganding, Kec. Simpang Empat dan Desa Salit, Kec. Tiga Panah.

**6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Alam, Agrowisata, Ekowisata dan Budaya**

Kabupaten Karo merupakan salah satu destinasi unggulan di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki banyak destinasi yang memukau dan didukung oleh alamnya yang sejuk serta kekayaan budaya yang menarik. Potensi pariwisata Kabupaten Karo baik pada objek wisata alam, agrowisata, ekowisata dan budaya memiliki banyak peluang untuk dapat dikembangkan. Pengembangan Pariwisata Berbasis Alam, Agrowisata dan Ekowisata ini telah dilaksanakan pada beberapa objek wisata baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta maupun desa.

Pada Tahun 2022, Pengembangan Pariwisata Berbasis Alam, Agrowisata dan Ekowisata dilaksanakan di Desa Raya dan Desa Semangat Gunung dan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yang melibatkan perwakilan desa dan kelompok sadar wisata yaitu sosialisasi sadar wisata, pelatihan ekonomi kreatif, pengelolaan *homestay* dan pelatihan digitalisasi serta pelaksanaan event-event pariwisata. Selanjutnya, untuk kegiatan pengelolaan pariwisata berbasis alam, agrowisata dan ekowisata ini direncanakan akan terus dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia

(SDM) pariwisata, sertifikasi lahan untuk pengusulan DAK dan kewenangan pengelolaannya, perbaikan jalan menuju objek wisata yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Karo, penyediaan penerangan Lampu Jalan Penerangan Umum menuju objek wisata serta sinergi lintas perangkat daerah terkait, penetapan lokasi dan penyusunan *masterplan*/*grand design*, membuat keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Desa Wisata, melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Lintas Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait pengelolaan dan pengembangan wisata, penguatan kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melakukan *update* pendataan kunjungan wisatawan, penguatan pemasaran/promosi pariwisata dan aplikasi website pariwisata serta melakukan apresiasi terhadap desa wisata yang telah berhasil dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata dalam rangka penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia.

Pada Tahun 2022, Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dilaksanakan di Desa Lingga, Desa Dokan, Desa Pangambatan, dan Desa Barusjahe dan juga beberapa kegiatan pengembangan pariwisata berbasis budaya yang melibatkan perwakilan desa, budayawan dan sanggar seni yang meliputi pendaftaran cagar budaya, pengusulan Hak Kekayaan Intelektual terhadap warisan budaya karo dan warisan budaya tak benda, pelatihan kesenian tradisional, seminar kebudayaan serta pelaksanaan event-event budaya. Selanjutnya, untuk kegiatan pengelolaan pariwisata berbasis budaya ini direncanakan akan terus dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Kebudayaan yaitu pelatihan seni dan budaya di desa dan sekolah, pembentukan sanggar seni, membuat surat edaran/regulasi untuk pelastarian budaya, pemanfaatan gedung/panggung kesenian untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya, apresiasi pelaku seni dan budaya, kerjasama pelestarian budaya dengan pendidikan dan budayawan, penguatan Pokdarwis dan BUMDes, penguatan peran Budayawan dan Kepala Desa.

**7. Peningkatan Ketersediaan Benih yang Unggul dan Bersertifikat**

Dinas Pertanian terus berupaya dalam meningkatkan ketersediaan benih unggul bersertifikat di Kabupaten karo. Kegiatan pembinaan dan penumbuhan penangkar, penyediaan benih unggul pada beberapa komoditi unggulan dan pengadaan sarana dan prasarana pembibitan

merupakan kegiatan yang sudah dan terus dikerjakan dalam meningkatkan ketersediaan benih unggul bersertifikat. Sebagai hasilnya saat ini, Dinas Pertanian sudah membina sebanyak 19 penangkar yang terdiri dari 8 penangkar kentang, 2 penangkar bawang merah, 2 penangkar wortel, 1 penangkar jeruk di Kubu Colia, 2 penangkar padi gogo, dan 4 penangkar padi sawah, dan 1 penangkar cengkeh.

Selain dari pembinaan penangkar yang sudah ada saat ini, Dinas Pertanian terus berupaya mengembangkan dan menumbuhkan penangkar untuk komoditi unggulan lainnya setiap tahun yang bertujuan untuk:

a. Meningkatkan ketersediaan benih unggul bersertifikat secara 6 tepat (varietas, jumlah, mutu, waktu, lokasi, dan harga).
b. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi pertanian melalui penggunaan benih unggul bersertifikat.
c. Terwujudnya Kabupaten Karo menuju mandiri benih unggul bersertifikat.

Program Kegiatan Mendukung Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat

- Pembinaan dan penumbuhan penangkar benih Tahun 2022:
  a) Pembinaan dan penumbuhan penangkar tanaman pangan (pengadaan benih padi sawah benih pokok 500 Kg beserta pupuk organik cair.
  b) Pembinaan dan penumbuhan penangkar tanaman hortikultura (pengadaan stek mini kentang sebanyak 30.000 batang.
- Penyediaan benih unggul pada beberapa komoditi unggulan Tahun 2022:
  a) Pengadaan benih kentang G2, tomat, kubis, cabai, brokoli, bawang merah, sawi putih, alpukat dan durian.

**8. Peningkatan Insfrastruktur di Daerah Terpencil**

Peningkatan infrastruktur di daerah terpencil dimaksud untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pada saat ini masih banyak wilayah di Kabupaten Karo khususnya di daerah terpencil dan pinggiran yang infrastrukturnya masih sangat minim. Infrastruktur yang dimaksud bukan hanya infrastruktur jalan termasuk infrastruktur air minum, irigasi maupun sanitasi dan infrastruktur lainnya.

Kendala yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur di wilayah terpencil adalah ketersediaan anggaran. Masih banyak jalan, irigasi, dan sanitasi yang kondisinya rusak parah ke daerah Mardinding, Lau Baleng,

Kutabuluh dan Juhar. Anggaran untuk peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur tersebut sangat minim.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karo adalah mencari pendanaan alternatif baik melalui dana DAK, Dana Dekonsentrasi, CSR, APBD Provinsi maupun sumber pendanaan lainnya. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022 yang lalu antara lain:

a) Peningkatan jalan Liang Melas Datas (LMD) di wilayah Kecamatan Mardingding, Lau Baleng, Kutabuluh dan Tigabinanga melalui Dana Dokensentrasi (APBN) yang merupakan instruksi Presiden. Dari target 38 Km pada tahun 2022 yang sudah dilaksanakan baru 17,10 km, dan akan dilanjutkan pada tahun 2023 ini;
b) Peingkatan Jalan ke Sampe Raya (LMD), melalui dana APBD Kabupaten Karo;
c) Peningkatan Jalan Kutambelin-Juhar - Pernantin Kec. Juhar;
d) Pembangunan jalan batu bata ke Bukit Makmur/ Lau Mandin Kec. Mardinding;
e) Peningkatan Jalan Kutagugung-Batumamak Kec. Juhar;
f) Pembangunan Jalan Mardinding-Lau Mulgap Kec. Mardinding;
g) Peningkatan Jalan Kutamale - Amburidi Kec. Kutabuluh (Lanjutan);
h) Peningkatan jalan Mbalmbal Petarum - Perbulan Kec. Lau Baleng (DAK Penugasan *Food Estate* dan Sentra Produksi Pangan);
i) Peningkatan Jalan Kinangkong - Tanjung Bale Kec Lau Baleng;
j) Peningkatan Jalan Sp Buah raya - Buah Raya Kec Kutabuluh;
k) Pembangunan Bendung DI. Namo Lembu Kec. Juhar;
l) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bandar Purba Kec. Mardinding;
m) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Belinun Kec. Juhar;
n) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lau Pengulu Kec. Mardingding;
o) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sigendangen Kec. Juhar;
p) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Nageri Batumamak Kec. Juhar;
q) Rehabiliatasi Jaringan Irigasi DI. Sabah Dekkel Kec. Juhar;
r) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pola Tebu Kec. Kutabuluh;
s) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Laubuluh Kec. Kutabuluh (DAK Reguler); dan
t) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Male Kec. Kutabuluh.

**9. Peningkatan Akses Air Minum di Wilayah Kabupaten Karo**

Target akses air minum layak sesuai RPJMN adalah 100% termasuk akses aman 15%. Hingga tahun 2022 capaian akses air minum layak di Kabupaten Karo adalah 68,704%. Kendala dalam penyediaan akses air minum tersebut antara lain minimnya ketersediaan anggaran dan manajemen pengelolaan air minum yang masih belum optimal.

Setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Karo mengalokasikan anggaran untuk penyediaan air minum tersebut melalui berbagai pendanaan antara lain APBN, DAK, Pamsimas maupun APBD Kabupaten Karo. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022 yang lalu antara lain:

a. Pembangunan SPAM IKK Tigabinanga melalu pendanaan APBN. Hingga tahun 2022 kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah pembanguna intake, reservoir, pipa transmisi dan jaringan distribusi hingga Desa Pasar Baru Kecamatan Tigabinanga. Target pembangunan SPAM tersebut adalah melayani hingga Kelurahan Tigabinanga.
b. Pembangunan SPAM Desa Barung Kersap Kecamatan Munte. Pembangunan dimaksud dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.
c. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pola Tebu Kec. Kutabuluh (DAK Reguler)
d. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Laubuluh Kec. Kutabuluh (DAK Reguler)
e. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Male Kec. Kutabuluh (DAK Reguler)
f. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sukamaju Kec.Tigapanah (DAK Reguler)
g. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Dokan Kec. Merek (DAK Reguler)
h. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Ajinembah Kec. Merek (DAK Reguler)
i. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Persadanta Kec.Barusjahe (DAK Reguler)
j. Rehabilitasi SPAM Desa Tanjung Beringin Kec Munte
k. Rehabilitasi SPAM Desa Ujung Deleng Kec Kutabuluh

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Karo melalui PDAM Tirta Malem akan melaksanakan pembenahan penyediaan air minum untuk Kecamatan

Kabanjahe melalui sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Program KPBU tersebut sudah mendapat persetujuan kementerian Keuangan dan pada saat ini telah memasuki tahap Penyiapan Proyek. Melalui KPBU dimaksud diharapkan pada tahun 2025 yang akan datang penyediaan air minum di wilayah Kabanjahe sudah 100%.

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

## 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya. Perekonomian Kabupaten Karo yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia perkembangannya sangat dinamis menyesuaikan dengan apa yang terjadi baik di daerah, regional maupun nasional bahkan internasional.

Arahan atau kondisi perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera Utara di bidang ekonomi yang bersumber dari RKP (Nasional) dan RPJMN serta RKPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

### 3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024, pada tahun 2024 perekonomian Indonesia diarahkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan RPJMN dan tetap melanjutkan pelaksanaan tujuh Prioritas Nasional (PN). Tahun 2024 ada optimisme untuk tumbuh lebih baik dari tahun 2023, tetapi tantangan global dan domestik masih akan dihadapi oleh Indonesia, sehingga optimis tetapi harus realistis.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tetap tinggi yakni 5,31% (yoy) tahun 2022 pada TW I Tahun 2023 tumbuh 5,03 persen (yoy), seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada Triwulan I-2023 (yoy). Pertumbuhan ini didorong dari sisi produksi pada sektor Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93 persen. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi &

Pergudangan, Akomodasi & Makan Minum, serta Jasa Lainnya. Pertumbuhan tiga sektor ini ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, serta terselenggaranya beberapa acara nasional dan internasional. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,68 persen. Komponen Ekspor tumbuh kuat yang didorong peningkatan bahan bakar mineral; lemak dan minyak hewan/nabati; besi dan baja serta kenaikan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Sesuai dengan perkiraan menguatnya ekonomi nasional maka sasaran pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan tumbuh dengan target 5,3-5,7 persen. Adapun sektor yang didorong antara lain investasi dan ekspor menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi sisi permintaan dan peningkatan produktivitas UMKM, Pertanian, dan Industri Manufaktur sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi sisi Produksi.

Ekonomi Indonesia tahun 2024 berpeluang tumbuh lebih baik, target kondisi ekonomi yang diinginkan tersebut akan ditempuh melalui terjaganya iklim investasi yang kondusif, peningkatan produktivitas, daya beli masyarakat terjaga dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Tahun 2024 dioptimalkan untuk mencapai target pembangunan berdasarkan arahan Presiden dan RPJMN tahun 2022-2024.

Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dengan mengusung tema "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Lebih lanjut terdapat arah kebijakan prioritas yang direncanakan, yaitu pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, revitaliasi industry dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN), dan Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Melalui kebijakan tersebut ditetapkan fokus kegiatan dan lokasi prioritas (*Major Projects* Prioritas RKP 2024). Sasaran pembangunan makro RKP tahun 2024 yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,10-5,70 persen
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,00-5,70 persen

3. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,50-7,50 persen
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99-74,02 poin
5. Rasio gini sebesar 0,374-0,377

Indonesia berpeluang untuk tumbuh lebih baik pada akhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

### 3.1.2. Arah Kebijakan Bidang Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Perekonomian Sumatera Utara pada Tahun 2024 diproyeksikan tumbuh lebih tinggi seiring dengan aktivitas yang kembali normal. Kebijakan pemulihan ekonomi yang telah dijalankan untuk meningkatkan daya beli masyarakat antara lain melalui kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang mendorong peningkatan daya beli produk UMKM/IKM, stimulus ekonomi pada sektor-sektor perekonomian yaitu pariwisata, pertanian, investasi, perindustrian, perdagangan dan peningkatan infrastruktur pada kawasan strategis ekonomi serta penyaluran *social safety net* bagi masyarakat dalam rangka menurunkan tingkat Kemiskinan Ekstrem dan Stunting.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program prioritas nasional serta sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan tahun transisi .Untuk itu, pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 mengusung tema "**Sinergitas dan Peningkatan Kualitas Pembangunan dalam rangka mendukung percepatan Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan".**

Secara umum, perekonomian Sumatera Utara akan mengalami tekanan pada tahun 2023, seiring dengan tingginya ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh perekonomian global yang berdampak pada perekonomian regional antara lain:

a) Tekanan inflasi yang presisten tinggi dan tidak mampu turun dalam waktu cepat yang mengakibatkan Melambatnya konsumsi masyarakat seiring dengan tingginya inflasi
b) Melambatnya ekspor barang seiring dengan tingginya risiko resesi negara-negara maju dan melambatnya perekonomian China
c) Dampak lanjutan dari pengetatan keuangan dan peningkatan suku bunga global
d) Deglobalisasi akibat geopolitik

e) Risiko *scarring effect* akibat pandemi pada negara berkembang yang lebih tinggi dari negara maju

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan meningkat optimis sebesar 5,00-5,20 persen.

*Highlight* Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 antara lain:

1. Pemulihan sektor ekonomi lapangan usaha utama antara lain:
   a. Sektor pertanian melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (SITANTRI); bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi; Berlanjutnya kebijakan pengembangan Food Estate (FE) Humbang Hasundutan dan Program Gerakan 3 Kali Ekspor (Gratieks) Pertanian.
   b. Sektor industri dalam negeri melalui penguatan industri yang bernilai tambah; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan skill dan peningkatan SDM pelaku industri;
   c. Sektor Perdagangan melalui Perluasan implementasi pasar/perdagangan secara *online/virtual/delivery* (digitalisasi pemasaran UMKM dan IKM); penguatan mutu dan standarisasi produk UMKM dan IKM; penguatan ekspor produk UMKM dan IKM, serta penguatan sumber daya manusia pelaku UMKM dan IKM; Mendorong Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) melalui belanja pemerintah; serta Pemulihan pasar ekspor dan perdagangan dunia khususnya pada komoditas kelapa sawit.
   d. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui optimalisasi KSPN Danau toba dan berbagai destinasi-destinasi unggulan lainnya; penciptaan destinasi-destinasi dan desa-desa wisata baru; pelaksanaan event-event wisata dan budaya; penguatan sumber daya manusia pelaku pariwisata
   e. Sektor investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis;

f. Sektor Infrastruktur melalui Berlanjutnya proyek strategis nasional seperti ruas Tol Trans Sumatera dan pembangunan jalur kereta api, serta persiapan venue PON 2024; Pengembangan Wilayah Metropolitan Medan dan kota sedang Pematangsiantar dan Gunungsitoli, serta kota kecil Sibolga.

2. Penguatan daya beli dan penjangkaran inflasi yang dilaksanakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Adapun Tujuan dan Arah Pembangunan Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kesetaraan Gender
2) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui penurunan Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, peningkatan Produktifitas dan Kesejahteraan Petani serta Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
3) Meningkatkan Layanan Infrastruktur Berkelanjutan melalui peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan, Layanan Infrastruktur Permukiman, Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup serta Menurunkan Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah serta Ketangguhan Bencana
4) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas melalui Peningkatan Penilaian Kualitas Pembangunan dan Inovasi Daerah, Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peningkatan pelayanan publik yang prima.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara, dimana target Makro sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi: 5,00-5,20 persen
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi: 72,85–73,15
3. Persentase Kemiskinan menurun manjadi: 8.25–8,15 persen
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi: 5,80-5,50 persen
5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi: 0,324 poin
6. Laju Inflasi menurun menjadi: 3 ± 1 persen
7. Emisi GRK menurun menjadi: 40,04 juta Ton CO2eq.

### 3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Karo

Arah kebijakan ekonomi daerah mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana

Gambaran kondisi perekonomian daerah Kabupaten Karo pada tahun 2018-2022 mencakup:

❖ **Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Sejalan dengan pemulihan ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Utara, Perekonomian Kabupaten Karo juga secara keseluruhan tahun 2022 tercatat semakin membaik hal ini ditunjukkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi yang mengalami akselerasi, yakni tumbuh sebesar 4,22% (*yoy*). Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi penggerak ekonomi utama. Mulai membaiknya minat beli masyarakat menjadi faktor utama pendorong peningkatan pertumbuhan. Dibandingkan Sumatera Utara, laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Karo tumbuh sedikit di bawah Sumatera Utara yang tercatat sebesar 4,73% (*yoy*).

**Grafik 3.1**
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo dan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022 (Persen)**

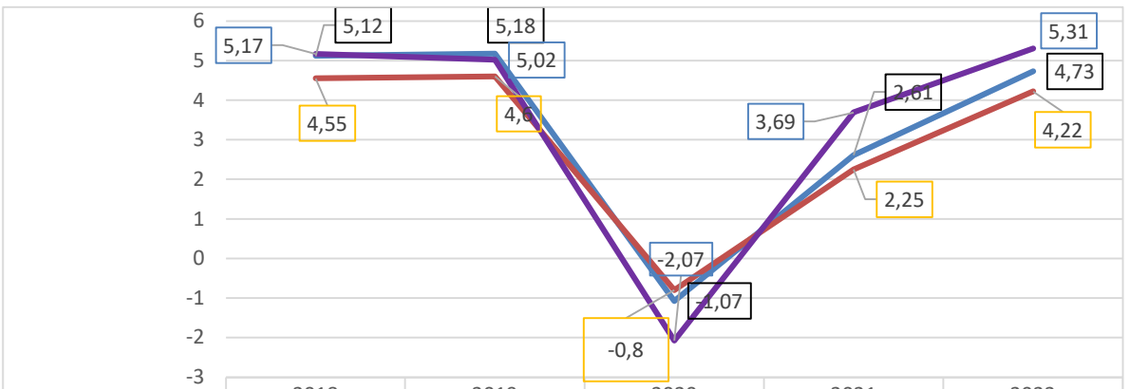


| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumut | 5,12 | 5,18 | -1,07 | 2,61 | 4,73 |
| Karo | 4,55 | 4,6 | -0,8 | 2,25 | 4,22 |
| Indonesia | 5,17 | 5,02 | -2,07 | 3,69 | 5,31 |

*Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2023*

Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan pada tahun 2022. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan

pergudangan sebesar 8,70 persen, sedangkan lapangan usaha dengan pertumbuhan terkecil adalah lapangan usaha Administrasi Pemerintah.

Perekonomian Kabupaten Karo Tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Karo sudah pulih pasca *pandemi Covid-19*, sehingga tahun 2023 dan 2024 diperkirakan akan terus mengalami akselerasi.

❖ **PDRB Per Kapita**

Selama kurun waktu 2018-2022, nilai PDRB per kapita Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan (lihat Gambar 3.2). PDRB per kapita Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 sebesar 46,59 juta rupiah dan meningkat menjadi 57,85 juta rupiah pada tahun 2022 atau tumbuh sebesar 24,17 persen dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, jika dilihat dari perhitungan atas dasar harga konstan 2010, maka selama periode 2018-2022 juga terjadi peningkatan. PDRB perkapita Kabupaten Karo atas dasar harga konstan pada tahun 2022 mencapai 36,67 juta rupiah dengan rata–rata tumbuh sebesar 10,08 persen dalam lima tahun terakhir, Dengan semakin baiknya perekonomian, maka kondisi perekonomian tahun 2023 juga diperkirakan akan semakin membaik.

**Grafik 3.2**
**PDRB Per Kapita Kabupaten Karo Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Ribuan Rupiah) Tahun 2018-2022**

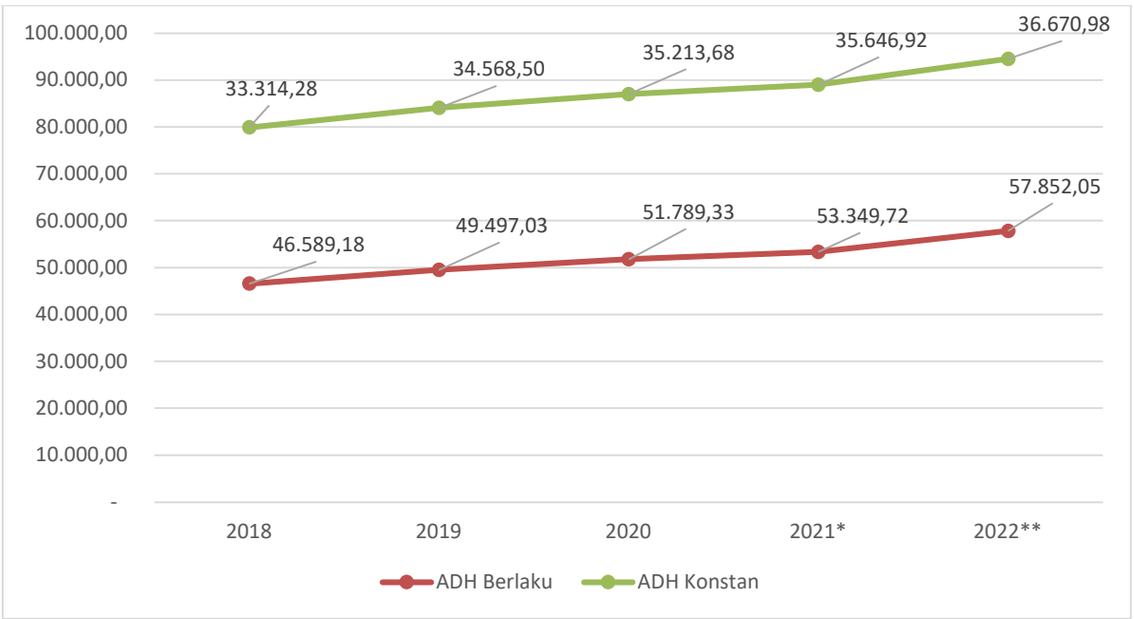


*Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2023*
** Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*

❖ **Ketenagakerjaan**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Karo periode 2018-2022 menunjukkan tren fluktuatif cenderung meningkat khususnya pada tahun 2021 dan 2022, peningkatan TPT ini diikuti dengan peningkatan jumlah Angkatan Kerja setiap tahunnya. Setelah mengalami penurunan hingga mencapai angka 1,09 persen pada tahun 2019, angka TPT Kabupaten Karo mengalami peningkatan menjadi 1,83 persen pada tahun 2020, pada tahun 2021 mencapai 1,95 persen dan pada tahun 2022 meningkat Kembali menjadi 2,71 persen, hal ini masih dipengaruhi oleh adanya tamatan SMA/SMK yang tidak melanjutkan Pendidikan dan tidak mendapatkan pekerjaan serta adanya pendatang yang masuk ke Kabupaten Karo yang masih mencari pekerjaan sehingga meningkatkan Angkatan kerja. TPT Kabupaten Karo selalu berada di bawah TPT Provinsi Sumatera Utara maupun TPT Nasional, hal ini didukung oleh potensi Kabupaten Karo yang dominan merupakan daerah pertanian sehingga tidak sulit untuk bekerja walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Sejalan dengan proyeksi terjadinya pemulihan ekonomi Kabupaten Karo, maka diperkirakan tingkat pengangguran terbuka akan mengalami penurunan. Untuk melihat perkembangan angka TPT dapat disajikan melalui grafik berikut.

**Grafik 3.3**
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

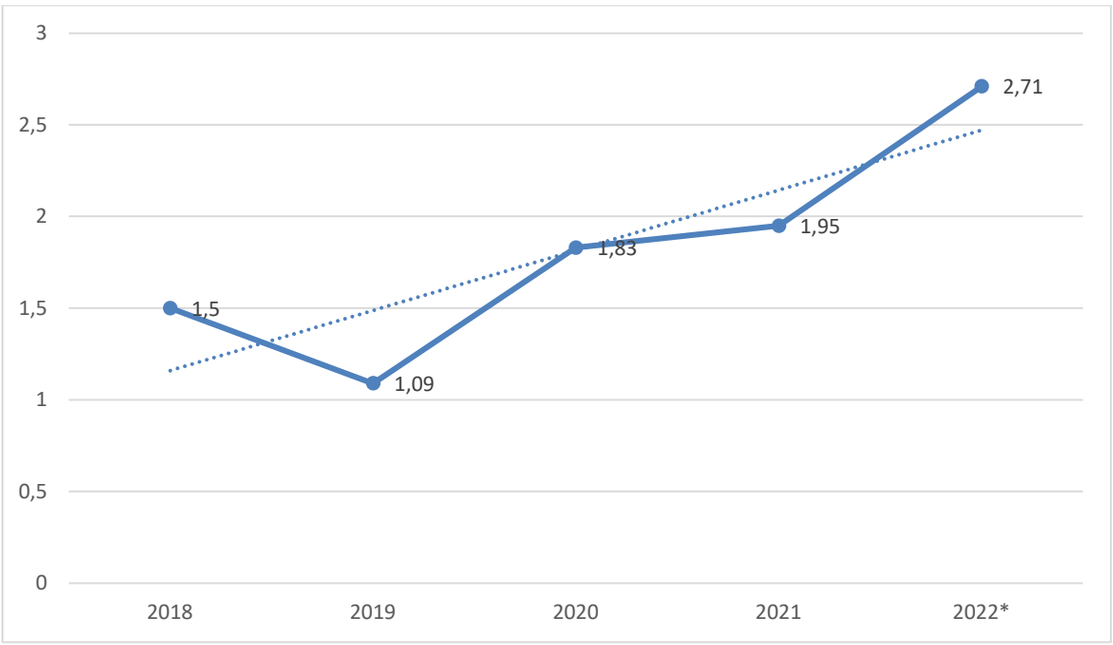


*Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2023*
**Angka sementara*

❖ **Kemiskinan**

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo membaik disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan. Perkembangan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Karo dari tahun 2018-2019 menunjukkan tren yang menurun. Namun persentase kemiskinan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 8.70 persen dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 8.79 persen. Peningkatan tersebut masih diakibatkan oleh dampak pandemi *covid-19*. Pada tahun 2022 menurun menjadi 8,17%, seiring dengan pemulihan ekonomi dan sosial, diperkirakan pendapatan perkapita penduduk akan terus meningkat, sehingga diperkirakan persentase penduduk miskin di Kabupaten Karo akan mengalami penurunan.

**Grafik 3.4**
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

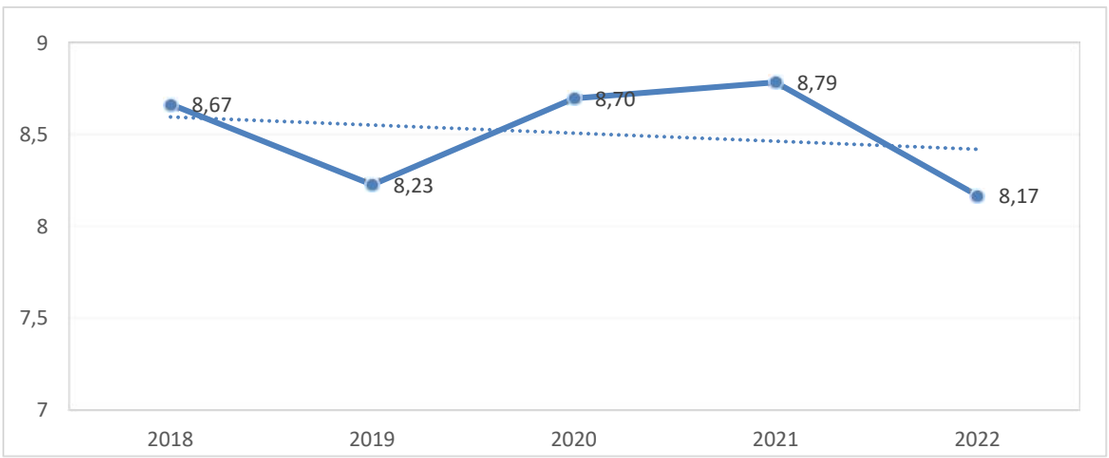


*Sumber: BPS Kab. Karo, 2023*

❖ **Indeks Gini**

Periode tahun 2018-2022, nilai Rasio Gini Kabupaten Karo dapat diartikan berada pada kategori rendah. Pada periode tersebut, Koefisien Gini Kabupaten Karo hanya mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,271 dan 2022 sebesar 0,236, peningkatan pada tahun 2020 dan 2022 tersebut akibat pengaruh dampak pandemi *Covid*-19. Pemerataan pembangunan perlu terus ditingkatkan dengan fokus pembangunan pada wilayah yang relatif tertinggal yang dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

**Grafik 3.5**
**Gini Rasio Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

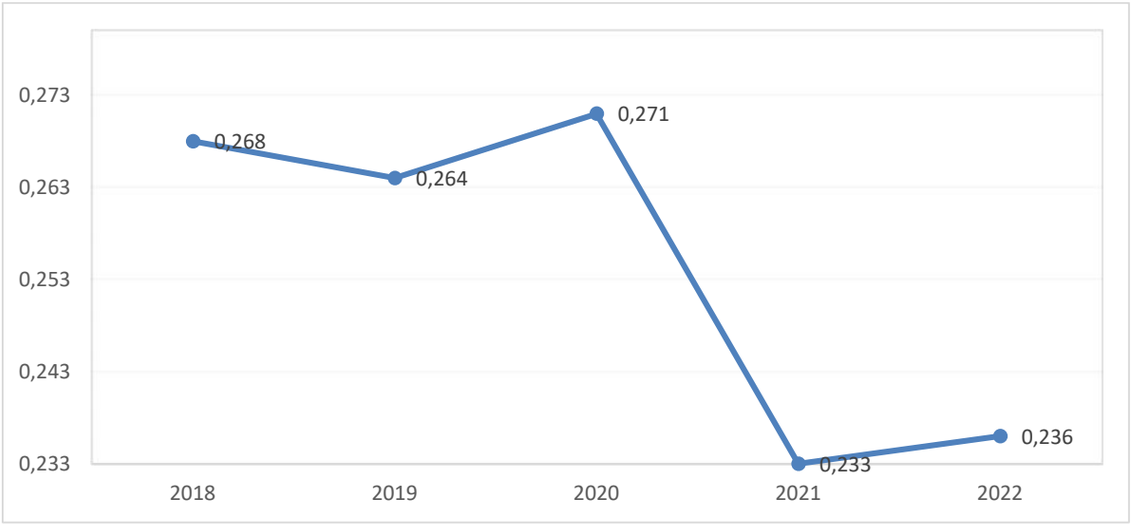


*Sumber: BPS Sumatera Utara Tahun 2023*

❖ **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Karo mengalami peningkatan baik dari pengetahuan, kesehatan maupun standar hidup layak.

Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Karo sebesar 75,36 berada diurutan ke-8 (delapan) terbaik diantara 33 (Tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Sumatera Utara. IPM Kabupaten Karo berada pada IPM dengan kategori sedang, untuk menuju IPM tinggi di atas 80% pemerintah perlu kerja keras dan membuat strategi dalam meningkatan kualitas 3 (tiga) dimensi dasar komponen IPM yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak.

**Grafik 3.6**
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karo Tahun 2018-2022**

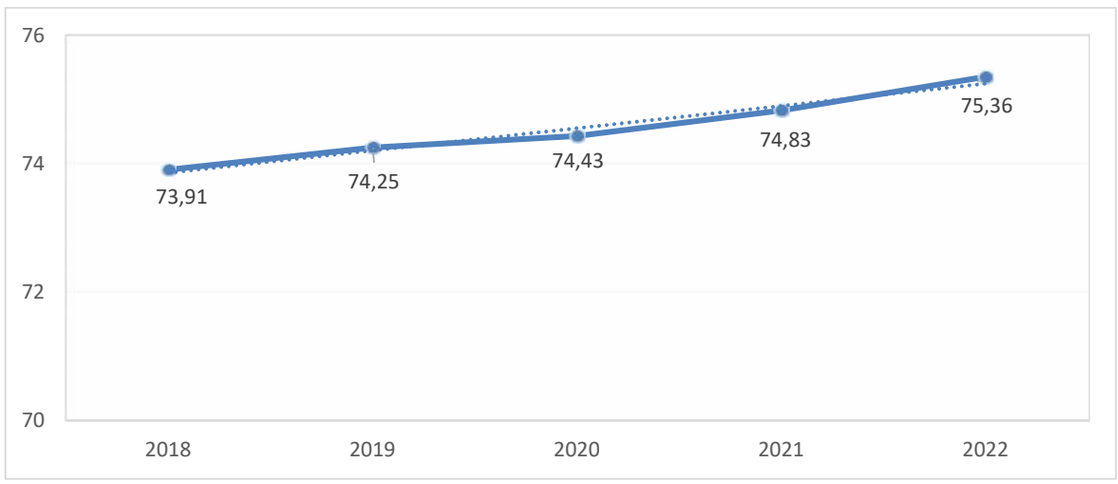


*Sumber: BPS Kab. Karo, 2022*

### 3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Sejalan dengan kondisi perekonomian Nasional dan Regional Sumatera Utara maka Kondisi perekonomian Kabupaten Karo tahun 2023 dan tahun 2024 diperkirakan juga akan terus mengalami perbaikan. Meskipun demikian Prospek perekonomian Tahun 2023 dan 2024 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global seperti peningkatan inflasi global dan isu ancaman resesi di negara-negara maju, perang Rusia-Ukraina yang mengganggu rantai pasok distribusi barang, serta tren peningkatan harga komoditas dunia yang berdampak pada komoditas domestik yang strategis.

Kualitas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karo akan terus ditingkatkan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan, maka pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan perekonomian meliputi peningkatan produksi, kualitas dan nilaitambah produk yang berbasis pada sektor unggulan baik pada sektorpertanian, industri, perdagangan, pariwisata maupun sektor lainnya yang memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sejalan dengan pemulihan kondisi penanganan Covid-19 yang terus berlanjut, berdampak pada kondisi perekonomian Kabupaten Karo yang semakin membaik. Hal ini dapat dilihat melalui kondisi perekonomian Kabupaten Karo tahun 2022 yang mengalami akselerasi menjadi 4,22 persen, seiring dengan dicabutnya status “darurat kesehatan global” pada pandemic covid-19 oleh WHO pada tanggal 5 Mei 2023, memberikan harapan akan keberlanjutan perbaikan kondisi perekonomian di tahun 2024. Sehingga diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi berakselerasi berada pada kisaran 4-20-4,60 persen, sesuai target RPJMD Kabupaten Karo, dan sesuai kesepakatan desk dengan Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,60 persen, perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut melalui asumsi dengan meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat.

Ekonomi yang diperkirakan tumbuh positif tersebut diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatkan PDRB perkapita di Kabupaten

Karo. Tahun 2024 angka kemiskinan diperkirakan pada kisaran angka 7,84 persen target tersebut dibawah target RPJMD mengingat bahwa capaian pada tahun 2022 telah melebihi target sehingga diperkirakan angka kemiskinan akan terus mengalami penurunan, selanjutnya diperkirakan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 2,30-2,00 persen, target tersebut lebih tinggi dari target RPJMD karena melihat kondisi capaian TPT pada tahun 2022 meningkat menjadi 2,71 persen dan target tersebut sesuai dengan hasil desk Musrenbang Provinsi Sumatera Utara. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari indeks/Rasio Gini sebesar 0,233 pada tahun 2024.

Target indikator makro ekonomi regional Kabupaten Karo yang ingin dicapai pada Tahun 2024 sangat membutuhkan dukungan stabilitas ekonomi internasional, nasional, regional dan internal Kabupaten Karo. Sesuai target pembangunan yang dimuat RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025, maka pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai target indikator sasaran pokok periode IV. Beberapa kebijakan bidang ekonomi yang tercantum dalam dokumen RPJPD akan terus dilakukan dengan melakukan penekanan pada sektor yang memberikan daya ungkit terhadap percepatan peningkatan ekonomi di Kabupaten Karo.

Selanjutnya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan periode 5 (lima) tahun keempat pada RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025. Sektor-sektor yang menjadi isu sesuai dokumen RPJMD antara lain: Reformasi Birokrasi, Pembangunan Manusia, Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran, Pembangunan berwawasan lingkungan, Pelestarian Budaya Karo, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Peningkatan Iklim Investasi, Penyediaan Infrastruktur, Penanganan Bencana, Pengembangan Wilayah.

Arah kebijakan terkait ekonomi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karo tahun 2021-2026 yang mempedomani visi dan misi Bupati terpilih untuk tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian/perikanan/ serta sektor-sektor unggulan lainnya berbasis potensi lokal;
2. Meningkatkan minat/keterampilan petani dalam Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu dan penerapan GAP secara berkelanjutan serta meningkatkan minat generasi muda pertanian;
3. Meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian dan industri potensial lainnya yang berbasis agro;
4. Meningkatkan kompetensi/kapasitas pelaku, standarisasi dan legalitas/sertifikasi produk, pemasaran produk dan pemanfaatan teknologi bagi IKM, UMKM serta pemberdayaan koperasi aktif;
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan, perlindungan konsumen dan peningkatan kerjasama perdagangan dengan daerah lain;
6. Pembentukan BUMD/Perusda berbasis potensi lokal;
7. Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif dan pemberiaan apresiasi bagi pelaku ekonomi kreatif;
8. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat akan diversifikasi pangan;
9. Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata dan pengembangan destinasi wisata potensial yang berkelanjutan, peningkatan kualitas dan kuantitas promosi/pemasaran, peningkatan sinergitas/kolaborasi antarsektor/stakeholder pembangunan pariwisata, peningkatan SDM Pariwisata;
10. Penetapan legalitas budaya daerah, peningkatan SDM sektor budaya, peningkatan sarana dan prasarana pelestarian seni budaya serta pemanfaatan potensi seni budaya untuk mendukung pariwisata;
11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian atas budaya benda dan tak benda;
12. Peningkatan keterampilan/kompetensi masyarakat pencari kerja yang kreatif, inovatif dan produktif serta penyediaan informasi pasar kerja;

13. Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha, pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha, peningkatan akses pasar/promosi dan penyediaan peta peluang investasi daerah;
14. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber PAD, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah, memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan PAD, mengoptimalkan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah terkait PAD;
15. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi;
16. Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman;
17. Meningkatkan fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan;
18. Meningkatkan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan;
19. Meningkatkan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi; dan
20. Menurunkan risiko bencana.

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karo tahun 2024 tetap memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian global dan nasional. Berdasarkan kondisi tersebut dan sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 maka kebijakan pembangunan Kabupaten Karo tahun 2024 diarahkan tetap mengoptimalkan pembangunan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 meliputi:

1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan yang berkelanjutan;
4. Peningkatan iklim investasi yang kondusif;
5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
6. Perwujudan ketersediaan infrastruktur yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas

lapangan pekerjaan, pembagian pendapatan masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier. Sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Karo tahun 2024 secara berkelanjutan diupayakan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesempatan kerja dan kualitas SDM; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah; meningkatkan nilai ekspor perdagangan; meningkatkan jumlah investasi dengan memberikan daya tarik investasi; mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, meningkatkan penanganan sektor kesehatan, Pendidikan /pelayanan dasar serta meningkatkan peran digitalisasi terhadap sektor ekonomi. Kebijakan tersebut direncanakan untuk mempercepat dan memperkuat pembangunan ekonomi sesuai dengan keunggulan dan potensi strategis yang dimiliki Kabupaten Karo..

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah serta didasarkan pada kondisi perekonomian daerah dan tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha-usaha yang dilakukan dalam pemantapan ekonomi antara lain:

1. Melanjutkan sinergisitas antara masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan dengan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan ekonomi lokal yang potensial yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan ketimpangan.;
2. Terus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan/ mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial dan strategis;
3. Menyediakan infrastruktur secara merata, memadai dan berkualitas untuk menunjang pemerataan pertumbuhan wilayah dan distribusi ekonomi daerah termasuk di wilayah yang strategis;
4. Mendorong investasi yang berbasis sumber daya lokal yang berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha;
6. Meningkatkan pertumbuhan nilai tambah yang bisa dilakukan dengan peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan bibit unggul, teknologi tepat guna, meningkatkan aktivitas pasca panen melalui upaya

mendorong dan pengembangan industri-industri mikro, kecil dan menengah serta UMKM pengolah hasil pertanian;

7. Mendorong peran lapangan usaha perdagangan, transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya dengan upaya mendorong peningkatan nilai tambah;
8. Melakukan inovasi dan pemanfaatan ilmu teknologi pada aktivitas perekonomian dan pelayanan publik; dan
9. Melanjutkan reformasi birokrasi pelayanan publik serta penguatan regulasi yang dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan perekonomian daerah.

Selain hal tersebut dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Toba dan sekitarnya dan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo, Sebagai salah satu kabupaten di Kawasan Danau Toba dan Mebidangro, diharapkan mengambil peran dalam pengembangan Kawasan tersebut hampir sama dengan daerah lainnya. Dukungan pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pembangunan Kabupaten Karo terus didorong dan diupayakan sehingga dapat mengoptimalkan nilai ekonomi dan dampak positif terhadap masyarakat, bisnis dan daerah.

Disamping itu, faktor nonekonomi salah satunya perkembangan politik juga harus menjadi perhatian di paruh kedua tahun 2023 sampai tahun 2024. Ketidakpastian kondisi politik akan berpengaruh terhadap kebijakan yang terkait dengan suasana dan kestabilan ekonomi. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan ekonomi diharapkan untuk terus dijaga di tahun 2024.

Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada perekonomian Kabupaten Karo, maka dengan mencermati capaian pada tahun 2022 dan sesuai dengan hasil pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya diperkirakan besaran indikator pembangunan ekonomi Kabupaten Karo tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**
**Tren Capaian dan Sasaran Pembangunan RKPD**
**Kabupaten Karo Tahun 2024**

| No | Indikator Makro | Satuan | Target | Capaian | Target RKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 3,70-4,70 | 4,22 | 4,20-4,60 |
| 2 | Indeks Pembangunan Manusia | Poin | 75,00 | 75,36 | 76,20 |
| 3 | Persentase Kemiskinan | Persen | 8,60 | 8,17 | 7,84 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | Persen | 1,75 | 2,71 | 2,30-2,00 |
| 5 | Indeks Gini | Poin | 0,233 | 0,236 | 0,233 |

*Sumber: Bappedalitang Karo, 2023*
*(Sesuai dengan hasil desk dengan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara)*

## 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diatur urusan yang menjadi kewenangan pemerintah dan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menjalankan urusan tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan keuangan untuk mendanai urusan yang dianggap menjadi prioritas pembangunan sesuai dengan visi misi yang tertuang dalam RPJMD.

### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang sah. Untuk memenuhi kebutuhan belanja, diperlukan arah kebijakan pendapatan yang tepat dan terukur sehingga tidak ada rencana belanja yang terhambat akibat tidak terpenuhinya pendapatan daerah.

Secara umum mengenai realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Karo Tahun 2021–2025 akan disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.2**
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan**
**Kabupaten Karo Tahun 2021 s.d tahun 2025**

| No | Uraian | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Tahun Berjalan 2023 | Proyeksi/Target pada Tahun 2024 | Proyeksi/Target pada Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **108.359.804.241,19** | **97.474.399.998,64** | **117.423.389.792,00** | **112.579.389.792,00** | **116.265.230.700,00** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 41.673.800.323,31 | 51.640.157.978,00 | 58.282.835.442,00 | 61.282.835.442,00 | 52.036.451.000,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 9.589.428.365,00 | 9.475.681.969,00 | 13.910.554.350,00 | 14.251.354.350,00 | 14.667.326.000,00 |

| No | Uraian | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Tahun Berjalan 2023 | Proyeksi/Target pada Tahun 2024 | Proyeksi/Target pada Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.337.315.998,00 | 2.808.927.287,00 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 54.759.259.554,88 | 33.549.632.764,64 | 42.230.000.000,00 | 34.045.200.000,00 | 46.561.453.700,00 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.182.790.080.704,00** | **1.134.570.816.041,00** | **1.241.215.371.632,00** | **1.241.215.371.632,00** | **1.280.180.741.237,57** |
| *4.2.01* | *Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat* | *1.122.059.132.885,00* | *1.048.294.789.706,00* | *1.209.046.738.000,00* | *1.209.046.738.000,00* | *1.248.012.107.605,57* |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 28.349.696.628,00 | 26.757.337.736,00 | 15.628.925.000,00 | 15.628.925.000,00 | 16.995.914.000,00 |
| 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 679.135.837.000,00 | 673.343.183.669,00 | 707.421.678.000,00 | 707.421.678.000,00 | 679.135.837.000,00 |
| 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 105.413.244.215,00 | 57.576.975.683,00 | 107.003.947.000,00 | 107.003.947.000,00 | 213.877.156.605,57 |
| 4.2.01.01.04 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 90.305.859.842,00 | 93.788.893.908,00 | 181.977.325.000,00 | 181.977.325.000,00 | 118.842.903.000,00 |
| 4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | 20.751.024.000,00 | 8.781.788.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.751.024.000,00 |
| 4.2.01.05 | Dana Desa | 198.103.471.200,00 | 188.046.610.710,00 | 197.014.863.000,00 | 197.014.863.000,00 | 198.409.273.000,00 |
| *4.2.02* | *Pendapatan Transfer Antar Daerah* | *60.730.947.819,00* | *86.276.026.335,00* | *32.168.633.632,00* | *32.168.633.632,00* | *32.168.633.632,00* |
| 4.2.02.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 60.730.947.819,00 | 83.292.686.335,00 | 32.168.633.632,00 | 32.168.633.632,00 | 32.168.633.632,00 |
| 4.2.02.02.02 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | 0,00 | 2.983.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **63.582.810.078,00** | **73.906.134.215,00** | **13.366.033.000,00** | **18.000.000.000,00** | **52.315.800.000,00** |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 1.420.899.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.03.01.01 | Pendapatan Hibah Dana BOS | 48.411.373.353,00 | 62.670.206.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.03.02.01 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 13.750.536.967,00 | 11.235.927.740,00 | 13.366.033.000,00 | 18.000.000.000,00 | 52.315.800.000,00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **1.354.732.695.023,19** | **1.305.951.350.254,64** | **1.372.004.794.424,00** | **1.371.794.761.424,00** | **1.448.761.771.937,57** |

*Sumber: BKAD Kabupaten Karo, 2023*

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam RKPD merupakan perkiraan terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum penerimaannya. Peningkatan pendapatan daerah khususnya peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 dengan arah kebijakan "Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber PAD, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah, memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan PAD, mengoptimalkan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah terkait PAD". Untuk mencapai pendapatan daerah sebagaimana yang diproyeksikan pada di atas, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada arah kebijakan secara keseluruhan dengan:

1) Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip

akuntabilitas dan transparansi melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dan penagihan pajak terutang.

2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam perolehan dana transfer pemerintah pusat dan provinsi.
3) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
4) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan regulasi dan sistem administrasi.
5) Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
6) Meningkatkan pemanfaatan teknologi Informasi, peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah pada perangkat daerah penghasil.
7) Meningkatkan pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah
8) Meningkatkan Inovasi Daerah khususnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jenis pendapatan asli daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu: PBB-P2; BPHTB; Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Makanan/Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian/Hiburan), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan, serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Sedangkan untuk Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah yang dapat dipungut adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam rangka dukungan ekstensifikasi PDRD, untuk tahun 2023 penyempurnaan regulasi terkait PDRD sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang dimaksud menjadi agenda yang penting.

### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus memperhatikan aspek kebutuhan, permasalahan pembangunan dan pendapatan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan. Selain itu, juga dialokasikan untuk membiayai Urusan Pemerintahan Penunjang. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Arah kebijakan belanja daerah pada RKPD Kabupaten Karo Tahun 2024 adalah:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Mendanai 6 (Enam) Prioritas Pembangunan Daerah khususnya pencapaian target "*Major Project*" yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;
3. Pendanaan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan usulan musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah melalui penelaahan, entri aplikasi dan perhitungan kapasitas rill keuangan daerah;
4. Pemenuhan kewajiban daerah untuk mendanai program dan kegiatan yang bersifat "mandatory" atau yang telah ditentukan dan diwajibkan oleh pemerintah pusat seperti pendanaan Pemilu, kewajiban atas belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

5. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Karo yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib nonpelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan penunjang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
6. Belanja daerah disinkronisasikan dan diharmonisasikan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional maupun Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah;
7. Belanja daerah juga diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur.
8. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaanya dianggarkan sesuai kententuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
10. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Belanja Pegawai dianggarkan dengan memperhatikan:
    a) Gaji dan Tunjangan berdasarkan rekonsiliasi perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN dengan memperhatikan rencana kenaikan gaji pokok, pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK), acress 2,5%, jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian,
    b) Tambahan Penghasilan ASN berdasrkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
    c) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN, Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, honorarium merupakan unsur

perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

12. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan dengan memperhatikan:
    a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;
    b) Belanja barang dan jasa meliputi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat,
    c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan;
13. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan belanja hibah pada tahun 2023 diberikan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, Partai Politik, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Vertikal Daerah yang sifatnya tidak mengikat dan terus menerus serta pengangarannya sudah melekat pada perangkat daerah sesuai urutan penyelenggaraan pemerintah daerah.
14. Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga atau kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan mengikat serta selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial yang telah direncanakan seperti pemberian beasiswa kepada masyarakat miskin, bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena bencana dan bantuan sosial lainnya dianggaran pada perangkat daerah sesuai dengan urusan

masing masing dan untuk yang tidak terencana dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga.

15. Belanja Modal dianggarkan dengan memperhatikan:
    a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.
    b) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
    c) Dalam rangka penataan dan optimalisasi kendaraan dinas jabatan/kendaraan dinas operasional, tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan kendaraan dinas jabatan/kendaraan dinas operasional kecuali berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaanya.
16. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
17. Belanja transfer dianggarkan dengan memperhatikan:
    a) Belanja Bagi Hasil ke Pemerintah Desa merupakan penganggaran bagi hasil atas pajak dan retribusi daerah sebesar 10% dari penganggaran PDRD.
    b) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa merupakan penganggaran ADD sebesar 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK dan Dana Desa dari APBN.

Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan penjabaran untuk tahun berkenaan dari RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025, maka diproyeksikan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024-2025 seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3**
**Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah**
**Kabupaten Karo Tahun 2021 s.d tahun 2025**

| No | Uraian | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Tahun Berjalan 2023 | Proyeksi/Target pada Tahun 2024 | Proyeksi/Target pada Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **925.618.228.805,00** | **925.618.228.805,00** | **932.683.541.457,00** | **927.708.086.367,00** | **948.514.455.125,00** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 585.907.963.559,00 | 585.907.963.559,00 | 615.873.273.925 | 676.211.735.783,00 | 639.228.076.631,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 317.297.275.036,00 | 317.297.275.036,00 | 291.367.735.656 | 250.537.427.708,00 | 253.772.005.618,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 21.462.990.210,00 | 21.462.990.210,00 | 25.442.531.876 | 958.922.876,00 | 53.774.722.876,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 950.000.000,00 | 950.000.000,00 | 0,00 | | 1.739.650.000,00 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **165.488.852.924,00** | **165.488.852.924,00** | **165.482.418.486,00** | **164.047.840.576,00** | **215.500.196.237,57** |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **10.970.155.806,00** | **10.970.155.806,00** | **3.299.572.202,00** | **3.299.572.202,00** | **2.000.000.000,00** |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **267.725.484.842,00** | **267.725.484.842,00** | **276.539.262.279,00** | **276.739.262.279,00** | **279.747.120.575,00** |
| 5.4.01.01.03 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 8.279.028.072,00 | 8.279.028.072,00 | 7.219.338.979 | 7.419.338.979,00 | 5.231.412.775,00 |
| 5.4.02.05.01 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 259.446.456.770,00 | 259.446.456.770,00 | 269.319.923.300 | 269.319.923.300,00 | 274.515.707.800,00 |
| | **JUMLAH BELANJA** | **1.369.802.722.377,00** | **1.369.802.722.377,00** | **1.378.004.794.424,00** | **1.371.794.761.424,00** | **1.445.761.771.937,57** |

*Sumber: BKAD Kabupaten Karo, 2023*
**Rincian belanja bersifat proyeksi, karena belanja pada dokumen RKPD ini belum berbasis rincian*

Hasil proyeksi belanja daerah pada Tahun 2024 sebesar **Rp1.371.794.761.424,00** dengan rincian belanja operasi sebesar **Rp927.708.086.367,00** belanja modal sebesar **Rp164.047.840.576.00** dan belanja tidak terduga sebesar **Rp3.299.572.202.00** serta belanja transfer sebesar **Rp276.739.262.279,00.**

### 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari SILPA tahun sebelumnya, hasil investasi (dana bergulir) atau pinjaman daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo. Pada RKPD Tahun 2024 ini tidak dilakukan proyeksi pembiayaan daerah melainkan dengan menggunakan adalah struktur anggaran berimbang yang artinya anggaran belanja daerah sama dengan anggaran pendapatan daerah sehingga kebijakan penerimaan pembiayaan adalah “Nihil”.

## Tabel 3.4
## Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
## Kabupaten Karo Tahun 2021 s.d tahun 2025

| No | Uraian | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Tahun Berjalan 2023 | Proyeksi/ Target pada Tahun 2024 | Proyeksi/ Target pada Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **175.042.236.012,09** | **165.879.127.706,32** | **6.000.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 175.036.611.012,09 | 165.879.127.706,32 | 6.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.03 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 5.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.06 | Penerimaan Piutang Daerah | | | | | |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **862.945.120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 862.945.120,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6.2.03 | Pembayaran pokok Hutang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.04 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO** | **174.179.290.892,09** | **165.879.127.706,32** | **6.000.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan rencana tahunan yang memberikan gambaran mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan. Indikator-indikator kinerja beserta target setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dituangkan dalam dokumen ini, sehingga pada akhir tahun pelaksanaan dapat diukur walaupun masih **bersifat *indikatif***. Penyusunan RKPD ini mengacu pada kondisi pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai tahun 2022 serta perkiraan pada tahun 2023 serta mencermati berbagai permasalahan yang ada, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Memenuhi ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

### 4.1.1. Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Visi kepala dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan daerah atau kondisi yang ingin dicapai pada masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi adalah tujuan, masa depan, cita-cita yang ingin diraih di masa depan. Terdapat tujuan yang dilengkapi dengan target-target yang akan dicapai. Dalam RPJMD Kabupaten Karo ini, visi pembangunan mengacu pada visi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Karo pada saat kampanye Pilkada. Perumusan visi ini juga dengan memperhatikan capaian

pembangunan 5 (lima) tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo (RPJPD) Tahun 2005-2025. Hal ini sangat penting untuk terciptanya pembangunan Kabupaten Karo yang berkelanjutan dan tepat pada pemecahan permasalahan yang ada.

Berpedoman kepada hal tersebut, maka visi pembangunan daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 adalah:

**"MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA"**

Visi pembangunan daerah di atas telah mempedomani visi RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 yaitu "*Terwujudnya Masyarakat Karo yang Maju dan Adil*", dimana periode RPJMD ini adalah periode terakhir sehingga perlu penajaman terhadap capaian-capaian sasaran pokok RPJPD yang belum tercapai.

Penjelasan atas muatan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun tersebut adalah :

- ✓ **Maju** berarti Kabupaten Karo memiliki masyarakat yang berkualitas, adanya peningkatan dan pemerataan ekonomi dan mampu mengikuti perkembangan teknologi, Maju juga dapat diartikan Kabupaten Karo menuju kemandirian yaitu Kabupaten Karo memiliki masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi ditandai dengan penurunan angka kemiskinan, menurunnya angka pengangguran terbuka serta dari sisi pemerintahan ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah untuk peningkatan pembangunan. Maju berarti juga Kabupaten Karo selalu berinovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah agar terwujud masyarakat yang sejahtera dengan pelayanan publik yang prima, daya saing daerah yang tinggi dan masyarakat yang diberdayakan.
- ✓ **Mandiri** berarti peran aktif pemerintah dalam konteks kewenangan pemerintah daerah dalam otonomi daerah, memberikan stimulus bagi masyarakat untuk bertumpu pada kemampuan dan kekuatan daerah melalui optimalisasi potensi sumber daya manusia dan alam khususnya pada sektor pertanian dan pariwisata.
- ✓ **Berdaya Saing** berarti Kabupaten Karo mampu untuk bersaing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dari semua sektor

khususnya di daerah se-kawasan Sumatera Utara. Berdaya saing berarti inovatif agar terwujud kepastian pengelolaan Sumber Daya Alam yang dilakukan secara efisien; terciptanya peluang dan menyerap tenaga kerja; terwujudnya keunggulan Sumber Daya Manusia, ketenagakerjaan; kondusivitas keamanan; dan ketersediaan infrastruktur sosial serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

### 4.1.2. Misi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut dengan memperhatikan capaian pembangunan periode sebelumnya peluang dan tantangan di masa mendatang, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) melalui Reformasi Birokrasi sampai ke Tingkat Desa, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pertanian, Perikanan, Peternakan, Agroindustri dan Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu;
4. Membangun Struktur Industri Pariwisata yang Berbasis Alam, Agrowisata, Ekowisata dan Adat serta Nilai-Nilai Budaya Karo;
5. Mewujudkan Generasi Muda yang Berkualitas dan Masyarakat Olahraga yang Berprestasi;
6. Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Kemudahan Pelayanan Perizinan;
7. Peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kreatif sehingga Mampu Menciptakan Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja Baru;
8. Pemberdayaan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah dan Desa, Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi. Membangun, Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal;
9. Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Antarawilayah dengan Tetap

Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Rasional, Efektif dan Efisien;

10. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan baik Pendidikan Dasar dan Menengah 9 (Sembilan) Tahun, Pendidikan Informal maupun Nonformal;
11. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Daya Dukung Pelayanan Kesehatan; dan
12. Penggalian dan Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Hal ini adalah dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam pencapaian visi dan misi harus dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai strategi dan arah kebijakan yang didukung oleh program pembangunan yang jelas dan terukur, sehingga setiap program yang dijalankan saling mendukung untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Dari 12 (dua belas) misi pembangunan daerah tersebut, dirumuskan ke dalam 6 (enam) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran yang terinci sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
   b. Meningkatnya daya saing birokrasi Kabupaten Karo melalui peningkatan teknologi informasi
2. Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya kualitas pendidikan
   b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
   c. Meningkatnya kualitas masyarakat

3. Tujuan 3: Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis pada Sektor Unggulan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:
    a. Meningkatnya aktivitas perekonomian berbasis sektor unggulan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
    b. Meningkatnya kualitas konsumsi, mutu dan keamanan pangan
    c. Meningkatnya jumlah dan lama kunjungan wisatawan
    d. Meningkatnya pengelolaan budaya daerah
    e. Meningkatnya kompetensi pencari kerja dan penciptaan wirausaha baru
4. Tujuan 4: Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dengan sasaran Meningkatnya Investasi
5. Tujuan 5: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
6. Tujuan 6: Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur yang baik untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan, dengan sasaran:
    a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi
    b. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman
    c. Meningkatnya fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan
    d. Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan
    e. Meningkatnya kapasitas daerah menghadapi bencana.

## 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

### 4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Tema RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Tema tersebut didukung dengan 7 (Tujuh) Prioritas Kerja Pemerintah Tahun 2024 yaitu:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sedangkan arah kebijakan RKP Tahun 2024 terdiri dari 8 (Delapan) dengan rincian:

1) Pengurangan kemiskinan dan penghapuasan kemiskinan ekstrem;
2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4) Penguatan daya saing usaha;
5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7) Percepatan pembagunan Ibu Kota Nusantara; dan
8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 tersebut dilaksanakan melalui 16 (Enam belas) *Major Project*, yakni:

1. Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
2. Destinasi Pariwisata Prioritas;
3. Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan);

4. Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi;
5. Pengelolaan Terpadu UMKM;
6. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
9. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
10. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0;
11. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*;
12. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu;
13. Transformasi Digital;
14. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah);
15. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga); dan
16. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Selain itu, sasaran pembangunan Tahun 2024 diarahkan paada pencapaian sasaran ekonomi makro, target sasaran dan indikator makro pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi 5,10–5,70 persen
2. Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 5,00-5,70 persen
3. Tingkat Kemiskinan 6,50-7,50 persen
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99-74,02 poin
5. Ratio Gini (Nilai) menjadi 0,374-0,377

### 4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Kebijakan pembangunan daerah Sumatera Utara tahun 2024 merupakan periode pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, dengan mempertimbangkan prioritas peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan, peninkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif, dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2024 serta berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022, isu strategis serta permasalahan di Provinsi Sumatera Utara, maka dirumuskan Tema Pembangunan

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah **"Sinergitas dan Peningkatan Kualitas Pembangunan dalam rangka mendukung percepatan Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan".**

Fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2024 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan;
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif;
3. Peningkatan Layanan Infrastruktur yang Berkelanjutan dalam Penguatan Konektivitas dan Daya Saing Produktivitas Wilayah; dan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana pembangunan Daerah (RPD 2024-2026) pemerintah Provinsi Sumatera Utara menuangkan ke dalam 4 (Empat) prioritas pembangunan dengan menargetkannya ke dalam bentuk 43 (Empat Puluh Tiga) Kegiatan Strategis Inovatif. Empat prioritas pembangunan dan Empat Puluh Tiga kegiatan strategis Inovatif tersebut dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Perangkat Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam kaitannya sebagai perwujudan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan tugas dan fungsi kinerja Perangkat Daerah.

Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 dalam bentuk Kegiatan Strategis Daerah, merupakan wujud dukungan terhadap Arah kebijakan pembangunan nasional yang diwujudkan dalam *Major Project (MP)*, antara lain:

1. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan** yang dilaksanakan melalui 15 (Lima Belas) kegiatan strategis Inovatif, yaitu:
   1) Rehabilitasi, Revitalisasi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah pada 33 Kabupaten/Kota dan Pengembangan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) pada Sekolah Menengah, Kejuruan dan Khusus pada 33 Kabupaten/Kota;
   2) Implementasi *Teaching Factory Link and Match* Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama;

3) Pemberian Beasiswa Pendidikan SMA, SMK, SLB, S1/S2/S3 Masyarakat Sumatera Utara dan Pengembangan Kampung Beasiswa;
4) Pengembangan Kelas Pemberdayaan PEREMPUAN TOP SUMUT
5) Pembangunan TITIK BACA E- Book Digital melalui Scan QR/ Barcode dan Pengembangan e-Library Sumut;
6) Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan serta pelayanan RS Haji Medan dan Peningkatan Layanan RSJ. Ildrem;
7) Penurunan Prevalensi Stunting dengan Intervensi gizi sensitif dan spesifik;
8) Dukungan capaian *Universal Health Coverage* pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi
9) Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
10) Optimalisasi Jangkauan Layanan Kesehatan melalui Mobil/Bus Medis Kesehatan bergerak dan Pelayanan Keliling Kesehatan Mental dan NAPZA (*Mobile dan Telemedicine*) – "Dr. M. Ildrem Menyapa";
11) Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
12) Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan di Provinsi Sumatera Utara dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental, Kesadaran Politik dan Nilai-nilai Demokrasi Kepada Masyarakat dan Pelajar;
13) Pengembangan Pencegahan Narkoba melalui Optimalisasi Kampung Bersinar (Bersih Narkoba);
14) Pengembangan Pencegahan Narkoba melalui Optimalisasi Kampung Bersinar (Bersih Narkoba); dan
15) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara melalui SUMUT TERJAMIN (Sumut Bersatu Tanggulangi Kemiskinan.

**2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dilaksanakan melalui 11 (Sebelas) kegiatan strategis Inovatif**, yaitu

a. Pembangunan North Sumatra Skill Development Center (NS-SDC)
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha & dunia

industri melalui pelatihan tematik tenaga kerja serta pemagangan 1000 tenaga kerja ke luar negeri;

c. Fasilitasi standarisasi dan Peningkatan pendapatan 1000 (seribu) UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran;
d. Pengembangan Kawasan Pertanian Terintegrasi Menuju swasembada beras & jagung serta peningkatan produksi cabe merah, bawang merah, daging sapi, kambing/domba, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
e. Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM);
f. Peningkatan Digitalisasi Promosi Pariwisata;
g. Pengembangan Pola Kunjungan Wisata Terintegrasi (Bukit Lawang-Tangkahan, Danau Toba, Kepualauan Nias, dan Tabagsel) dan Peningkatan Kualitas *Calender of Event*;
h. Pelaksanaan Event Internasional melalui Pesta Danau Toba, *Jungle Run, Triathlon, Traditional Music Festival*, Arung Jeram Festival dan Paralayang Festival serta Nias Pro; dan
i. Dukungan Event F1H2O dan event Internasional lainnya serta Event Kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif pada 33 Kab/Kota;
j. Dukungan Pengembangan *Unesco Global Geopark Caldera Toba* dan Desa Wisata Sumatera Utara; dan
k. Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif.

**3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur** dilaksanakan melalui 11 (Sebelas) kegiatan strategis Inovatif, yaitu

1) Terlaksananya penanganan ruas jalan dan jembatan Provinsi di Kawasan Susur Pantai Timur, Kawasan Pariwisata Prioritas, Kepulauan Nias, Kawasan Pantai Barat Dan Kawasan Perbatasan di Provinsi Sumatera Utara 90% sampai dengan tahun 2026;
2) Pembangunan Waduk/Embung Idano Mola di Kep. Nias;
3) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Kabupaten Deli Serdang–Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
4) Pembangunan SPAM Mebidang dan pembangunan SPAM Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi;
5) Pengurangan Luas Kawasan Kumuh;
6) Penataan sungai perkotaan yang bersih dan indah;

7) Pembangunan Infrastruktur Pengaman Sungai pada Sungai Batang Serangan, Batang Gadis, Idano Gawo, Aek Sirahar, Aek Siageaon, Batang Ayumi, Bah Bolon;
8) Pembangunan Satu Data Digital Daerah;
9) Penyediaan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu;
10) Pembangunan 3 Unit PLTS terpusat dalam rangka Meningkatnya produksi pertanian;
11) Peningkatan Jaringan Irigasi di 5 (Lima) Daerah irigasi dengan produktivitas tertinggi;

**4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif**

dilaksanakan melalui 6 (Enam) kegiatan strategis Inovatif, yaitu

a. Mempertahankan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara melalui Pojok Konsultasi Akuntabilitas Kinerja Keuangan (KAKK) di Provinsi Sumatera Utara;
b. Peningkatan Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara melalui Klinik RB;
c. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan SDM Aparatur Negara/ASN melalui pemberian beasiswa S3 ASN;
d. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM ASN melalui Pelatihan dan studi komparasi dalam dan luar negeri;
e. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah melalui *Planning and Innovation Corner (PIC*); dan
f. *Event North Sumatra Innovation and Achievement Week*.

Penetapan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2024, merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara dimana target Makro sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi 5,00-5,20 persen
2. Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 72,85-73,15
3. Persentase Kemiskinan menurun manjadi 8,25-8,15 persen
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun manjadi 5,80-5,50 persen
5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi 0,324 poin
6. Laju Inflasi menurun menjadi 3±1 persen
7. Emisi GRK menurun menjadi 40,04 juta Ton CO2eq

### 4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Karo

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Suatu pritoritas pembangunan tahun rencana pada dasarnya adalah gambaran prioritas tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah dengan tahun rencana serta dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan aktual secara global, nasional maupun provinsi.

Agar pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan yang tidak lain merupakan kesepakatan dari seluruh pelaku pembangunan, maka perlu ditentukan prioritas pembangunan secara cermat berdasarkan kebutuhan dan tingkat daya dukung kemampuan daerah. Prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu menjawab isu strategis dan dalam rangka mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Untuk maksud tersebut maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan agar dapat memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Karo. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, kebijakan pembangunan provinsi tahun 2024, amanat standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi Kabupaten Karo.

Agar pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka perlu ditetapkan prioritas pembangunan secara cermat berdasarkan kebutuhan dan tingkat daya dukung kemampuan daerah. Prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis dalam rangka mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan pemasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2022, perkiraan tahun 2023 dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi tahun 2024 dan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi maka Tema Pembangunan Kabupaten Karo pada RKPD Kabupaten Karo

Tahun 2024 adalah ***"PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DENGAN MEMPERBANYAK PROGRAM INOVATIF KHUSUSNYA SEKTOR PARIWISATA DAN PERTANIAN",*** dengan unsur-unsur pokok yang terkandung di dalamnya dan merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2024 yaitu:

1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan yang berkelanjutan;
4. Peningkatan iklim investasi yang kondusif;
5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
6. Perwujudan ketersediaan infrastruktur yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Agar pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka perlu ditetapkan prioritas pembangunan secara cermat berdasarkan kebutuhan dan tingkat daya dukung kemampuan daerah. Prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis dalam rangka mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan daerah.

Strategi yang dilakukan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2024 tersebut adalah:

1. **Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing** dilakukan dengan strategi:
   a. Optimalisasi sumber daya aparatur, sarana prasarana, dan regulasi dalam peningkatan pelayanan publik
   b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi seluruh program dan kegiatan
   c. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
   d. Peningkatan manajemen kepegawaian ASN
   e. Meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah
   f. Peningkatan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi
2. **Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia** dilakukan dengan strategi:
   a. Optimalisasi kualitas pelayanan pendidikan secara berkelanjutan
   b. Optimalisasi pelayanan dan pengembangan perpustakaan

c. Optimalisasi pelayanan kesehatan dengan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan
d. Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak
e. Mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak
f. Menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat
g. Menekan angka penyakit masyarakat
h. Meningkatkan pelayanan sosial terhadap PMKS
i. Optimalisasi pelaksanaan program penurunan kemiskinan ekstrem

3. **Peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan yang berkelanjutan** dilakukan dengan strategi:
   a. Peningkatan produksi, produktivitas, kualitas produk dan nilai tambah sektor unggulan berbasis inovasi;
   b. Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang dan perlindungan konsumen;
   c. Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal;
   d. Meningkatkan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;
   e. Meningkatkan pengembangan/daya tarik pariwisata;
   f. Meningkatkan inventarisasi, identifikasi dan pelestarian seni budaya daerah; dan
   g. Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai dan terampil
4. **Peningkatan iklim investasi yang kondusif** dilakukan dengan strategi optimalisasi kemudahan proses investasi yang inklusif dan berkualitas.
5. **Peningkatan Pendapatan Asli Daerah** dilakukan dengan strategi peningkatan pendapatan daerah.
6. **Perwujudan ketersediaan infrastruktur yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan** dilakukan dengan strategi:
   a. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi;
   b. Peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman;
   c. Peningkatan fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan;
   d. Peningkatan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan

e. Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.

Strategi pembangunan daerah tersebut didukung dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi pelayanan publik;
2. Memperjelas cascading kinerja mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban;
3. Melaksanakan penilaian kinerja dan pengembangan kompetensi yang terintegrasi;
4. Meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah dari setiap perangkat daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi
6. Peningkatan sarana dan prasana Pendidikan;
7. Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik;
8. Peningkatan dan pemenuhan akses pemerataan layanan pendidikan;
9. Perbaikan sistem pelayanan kesehatan baik secara manajerial maupun teknis profesional;
10. Meningkatkan pemahaman perangkat daerah dan masyarakat dalam pengarusutamaan gender;
11. Meningkatkan jejaring perlindungan anak pada setiap desa/kelurahan;
12. Meningkatkan aktivitas literasi membaca masyarakat;
13. Standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan secara merata;
14. Peningkatan rasio layanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk
15. Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS serta penguatan keluarga untuk penyandang penyakit sosial
16. Verifikasi dan validasi data P3KE untuk pensasaran program kemiskinan esktrem lebih tepat sasaran
17. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian/perikanan/serta sektor-sektor unggulan lainnya berbasis potensi lokal;
18. Meningkatkan minat/keterampilan petani dalam Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu dan penerapan GAP secara berkelanjutan serta meningkatkan minat generasi muda pertanian;
19. Meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian dan industri potensial lainnya yang berbasis agro;

20. Meningkatkan kompetensi /kapasitas pelaku, standarisasi dan legalitas/sertifikasi produk, pemasaran produk dan pemanfaatan teknologi bagi IKM, UMKM serta pemberdayaan koperasi aktif;
21. Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif dan pemberiaan apresiasi bagi pelaku ekonomi kreatif;
22. Pembentukan BUMD/Perusda berbasis potensi lokal;
23. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat akan diversifikasi pangan;
24. Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata dan pengembangan destinasi wisata potensial yang berkelanjutan, peningkatan kualitas dan kuantitas promosi/pemasaran, peningkatan Sinergitas/kolaborasi antarsektor/stakeholder pembangunan pariwisata, peningkatan SDM Pariwisata;
25. Penetapan legalitas budaya daerah, peningkatan SDM sektor budaya, peningkatan sarana dan prasarana pelestarian seni budaya serta pemanfaatan potensi seni budaya untuk mendukung pariwisata;
26. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian atas budaya benda dan tak benda;
27. Peningkatan keterampilan/kompetensi masyarakat pencari kerja yang kreatif, inovatif dan produktif serta penyediaan informasi pasar kerja;
28. Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha, pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha, peningkatan akses pasar/promosi dan penyediaan peta peluang investasi daerah;
29. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber PAD, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah, memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan PAD, mengoptimalkan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah terkait PAD;
30. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi;
31. Menyelaraskan infrastruktur jalan lingkungan, jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional untuk dapat meningkatkan keberfungsian jalan dalam melancarkan pengangkutan barang dan orang;

32. Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman;
33. Pengurangan kawasan kumuh untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang nyaman
34. Meningkatkan fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan;
35. Mengoptimalkan penggunaan satu data untuk penyediaan data yang terkini dan akuntabel;
36. Meningkatkan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
37. Meningkatkan kapasitas daerah menghadapi bencana.

Lebih lanjut, prioritas pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka menjawab isu strategis kabupaten Karo tahun 2024 dan supaya untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperbanyak program inovatif khususnya sektor pariwisata dan pertanian, mengoptimalkan potensi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan percepatan pemulihan kondisi ekonomi. Oleh karenanya prioritas pembangunan tersebut juga difokuskan pada peningkatan penanganan kesehatan, peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pada sentra-sentra penghasil komoditas dan ke daerah wisata, pembangunan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha akan pembangunan berwawasan lingkungan, peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Penetapan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karo, merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan dimana target makro sasaran pembangunan Kabupaten Karo pada RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi 4,20-4,60 persen
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,20
3. Persentase Kemiskinan menurun manjadi 7,84 persen
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun manjadi 2,30-2,00 persen
5. Indeks Gini (*Gini Ratio*) sebesar 0,233 poin

Untuk melihat keterkaitan antara Prioritas RKP Nasional tahun 2024, Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 dan Prioritas RKPD Kabupaten Karo Tahun 2024 dapat dilihat dalam matriks berikut ini:

**Tabel 4.1**
**Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo Tahun 2024**

| No | Agenda/Prioritas Nasioanal | Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 | Prioritas Kabupaten Karo Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | ) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | ) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif | ) Peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan yang berkelanjutan<br>) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah<br>) Peningkatan iklim investasi yang kondusif |
| 2 | ) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan | ) Peningkatan Layanan Infrastruktur yang Berkelanjutan dalam Penguatan Konektivitas dan Daya Saing Produktivitas Wilayah | ) Perwujudan ketersediaan infrastruktur yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan |
| 3 | ) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | ) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan | ) Peningkatan kualitas sumber daya manusia |
| 4 | ) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | ) Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif | ) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing |
| 5 | ) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | ) Peningkatan Layanan Infrastruktur yang Berkelanjutan dalam Penguatan Konektivitas dan Daya Saing Produktivitas Wilayah | ) Perwujudan ketersediaan infrastruktur yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan |
| 6 | ) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | ) Peningkatan Layanan Infrastruktur yang Berkelanjutan dalam Penguatan Konektivitas dan Daya Saing Produktivitas Wilayah | ) Perwujudan ketersediaan infrastruktur yang baik Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan |
| 7. | ) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | ) Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif | ) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing |

*Sumber: Bappedalitbang Kab. Karo, 2023 (diolah)*

Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo di atas sangat penting untuk keselarasan pembangunan sehingga pembangunan lebih fokus.

Lebih lanjut Prioritas Kabupaten Karo tahun 2024 yang telah disepakati harus didukung oleh Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang relevan dan mendukung target indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan pada setiap prioritas menggambarkan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 namun untuk target capaiannya mempertimbangkan capaian tahun terakhir dan kemampuan keuangan daerah.

Penentuan program, kegiatan dan subkegiatan harus dilakukan secara selektif sehingga setiap dana yang dikeluarkan memiliki kontribusi terhadap pencapaian target sasaran daerah. Program Prioritas dalam rangka mendukung target capaian Prioritas dan Sasaran RKPD Kabupaten Karo Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel 4.2 di bawah.

### 4.3. Pokok-pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 178 menyatakan bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.

Permasalahan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah mengacu ke Peraturan Bupati Karo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi, Parameter dan Kamus Usulan Pembangunan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026.

Dalam menentukan program, kegiatan dan subkegiatan berdasarkan kapasitas riil, terlebih dahulu dilakukan penelaahan terhadap seluruh aspirasi dan kepentingan masyarakat, salah satunya yang disampaikan melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

**Tabel 4.2**
**Program dan Target Capaian untuk Setiap Indikator dari Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah/ Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karo Tahun 2024**

| No | Prioritas | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing | Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (*Ombudsman*) | 70 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SEMUA PERANGKAT DAERAH |
| | | | Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 67 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KECAMATAN |
| | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN |
| | | | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KECAMATAN |
| | | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KECAMATAN |
| | | | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | DISDUKCAPIL |
| | | | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | DISDUKCAPIL |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DISDUKCAPIL |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | DISDUKCAPIL |
| | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | INSPEKTORAT |
| | | | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | INSPEKTORAT |
| | | | | | PROGRAM PEGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | BKAD |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | BKAD |
| | | | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | BAKESBANGPOL |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | DINSOS |
| | | | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | BAPPEDA LITBANG |

| No | Prioritas | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BAPPEDA LITBANG |
| | | | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BAPPEDA LITBANG |
| | | Meningkatnya daya saing birokrasi Kabupaten Karo melalui peningkatan teknologi informasi | Indeks Profesionalisme ASN<br><br>Skor LPPD<br><br>Indeks SPBE | 65<br><br>3,08<br><br>2,7 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | BKPSDM |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BKPSDM |
| | | | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | SETWAN |
| | | | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | SETDA |
| | | | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | SETDA |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | DISKOMINFO |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | DISKOMINFO |
| | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | DISKOMINFO |
| | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | DISKOMINFO |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatnya kualitas pendidikan | Rata-rata lama sekolah<br><br>Harapan Lama Sekolah<br><br>Indeks Aktivitas Literasi Membaca Masyarakat (Alibaca) | 10,43 tahun<br><br>12,88 tahun<br><br>24,028 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | DIKNAS |
| | | | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | DIKNAS |
| | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | DIKNAS |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | DIKNAS |
| | | | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | DPA |
| | | | | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | DPA |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | DPA |
| | | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | DPA |
| | | | | | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | DPA |
| | | Meningkatnya derajat | Angka Harapan Hidup | 71,90 tahun | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | DP3A2P2KB |

| No | Prioritas | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kesehatan masyarakat | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | DINKES |
| | | | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | DP3A2P2KB |
| | | | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | RSUD/DINKES |
| | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | DP3A2P2KB |
| | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | DINKES |
| | | | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | DINKES |
| | | Meningkatnya kualitas masyarakat | Indeks Pembangunan Gender | 96,45 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KECAMATAN |
| | | | Persentase PMKS yang tertangani | 57,69% | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SATPOL PP |
| | | | Persentase Penegakan PERDA | 74,38% | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | BAKESBANGPOL |
| | | | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | DP3AP2KB |
| | | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | BAKESBANGPOL |
| | | | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NONKEBAKARAN | SATPOL PP |
| | | | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | DP3AP2KB |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | DP3AP2KB |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | DKPOP |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | DKPOP |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | DKPOP |

| No | Prioritas | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | BAKESBANGPOL |
| | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | DP3AP2KB |
| | | | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | BAKESBANGPOL |
| | | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | DP3AP2KB |
| | | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | DP3AP2KB |
| | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | DINSOS |
| | | | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | DINSOS |
| | | | | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | DINSOS |
| | | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL | DINSOS |
| | | | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | DINSOS |
| 3 | Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis pada Sektor Unggulan yang Berkelanjutan | Meningkatnya aktivitas perekonomian berbasis sektor unggulan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan | Persentase Peningkatan PDRB (ADHB)<br><br>Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif<br><br>BUMD/Perusda | 5%<br><br>2000 pelaku<br><br>1 BUMD | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA | DPMD |
| | | | | | POGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | DPMD |
| | | | | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | DKPP |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | DKPP |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | DKPP |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | DISPERINDAG |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | DISPERINDAG |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | DKPOP |
| | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | DISTAN |

| No | Prioritas | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | DISPERINDAG |
| | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | DISTAN |
| | | | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | DISPERINDAG |
| | | | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | DKPP |
| | | | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | DISPERINDAG |
| | | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | DISTAN |
| | | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | DISTAN |
| | | | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | DISTAN |
| | | | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | DISPERINDAG |
| | | | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | DISPERINDAG |
| | | | | | PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | DISPERINDAG |
| | | | | | PROGRAM PERIJINAN USAHA PERTANIAN | DISTAN |
| | | | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | DISPERINDAG |
| | | | | | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | DISNAKERKUKM |
| | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | DISNAKERKUKM |
| | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) | DISNAKERKUKM |
| | | | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | DISNAKERKUKM |
| | | | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | DISNAKERKUKM |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | DISNAKERKUKM |
| | | | | 90,50% | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | DKPP |

| No | Prioritas | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya kualitas konsumsi, mutu dan keamanan pangan | Skor pola pangan harapan (%) | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | DKPP |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | DKPP |
| | | | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | DKPP |
| | | Meningkatnya jumlah dan lama kunjungan wisatawan | Jumlah kunjungan wisatawan | 1.101.000 org | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | DKPOP |
| | | | Lama Kunjungan Wisatawan | 1,5 hari | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | DKPOP |
| | | Meningkatnya pengelolaan budaya daerah | Jumlah benda dan situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 20 cagar budaya | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | DKPOP |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | DKPOP |
| | | | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 11 kali | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | DKPOP |
| | | Meningkatnya kompetensi pencari kerja dan penciptaan wirausaha baru | Jumlah wirausaha baru | 50 wirausaha | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | DISNAKERKUKM |
| | | | Persentase Pencari Kerja yang Dilatih | 20% | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | DISNAKERKUKM |
| 4 | Meningkatkan iklim investasi yang kondusif | Meningkatnya Investasi | Nilai Investasi | 6,51 triliun rupiah | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | DPMPTSP |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | DPMPTSP |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | DPMPTSP |
| | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | DPMPTSP |
| | | | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | DPMPTSP |
| 5 | Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Pendapatan Asli Daerah | 112.579.398.79 rupiah | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | BAPENDA |
| 6 | | | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | DPUTR |

| No | Prioritas | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur yang baik untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan | Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 66% | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | DPUTR |
| | | | Persentase rurnah tinggal bersanitasi layak | 75,08% | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | DPUTR |
| | | | Persentase penduduk berakses air minum layak | 68,706% | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | DPUTR |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | DPUTR |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | DPUTR |
| | | | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | 51,11% | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | DPUTR |
| | | | Persentase drainase dalam kondisi baik (pembuangan aliran air tidak tersumbat) | 63% | | |
| | | | Gedung pemerintahan yang layak dan baik | 66% | | |
| | | Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100% | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | DPKPP |
| | | | | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | DPKPP |
| | | | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | DPKPP |
| | | | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyedia rumah yang layak huni | 100% | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI | DPKPP |
| | | | | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | DPKPP |
| | | | | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | DPKPP |
| | | | Persentasi luas kawasan kumuh yang ditangani | 60% | | |
| | | | Persentase satuan | 98,70% | | |

| No | Prioritas | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)<br><br>Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | <br><br>2 lokasi | | |
| | | Meningkatnya fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan | Rasio konektivitas kabupaten<br><br>Kinerja lalu lintas kabupaten | 95<br><br>0,77 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | DISHUB |
| | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | DISHUB |
| | | Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air<br><br>Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara<br><br>Hasil pengukuran tutupan lahan<br><br>Luasan RTH publik di wilayah kota/kawasan perkotaan<br><br>Ketaatan terhadap RTRW<br><br>Persentase jumlah sampah | 54,01<br><br>87,01<br><br>58,48<br><br>27%<br><br>77%<br><br>77% | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | DLH |
| | | | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | DLH |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI | DLH |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | DLH |
| | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | DLH |
| | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | DLH |
| | | | | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | DLH |
| | | | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | DLH |

| No | Prioritas | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | yang tertangani (di wilayah pelayanan) | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | DLH |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | DISPERINDAG |
| | | | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | DPUTR |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | DPUTR |
| | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | DPUTR |
| | | Meningkatnya Kapasitas Daerah Menghadapi Bencana | Indeks Kapasitas Daerah (IKD) | 0,54 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | BPBD |

**Tabel 4.3**
**Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Karo Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024**

| No | Prioritas Nasional | Program | Indikator Kinerja | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Kemandirian Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Ketersediaan Pangan<br>Ketersediaan Pangan Utama | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Persentase Produksi Perikanan Budidaya | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Persentase Produksi Perikanan Budidaya | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan<br>Jumlah Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produktivitas komoditi pertanian | Dinas Pertanian |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Produktivitas Komoditi Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Jumlah HPR yang divaksin | Dinas Pertanian |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penaggulangan OPT | Dinas Pertanian |
| | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase alat ukur sarana perdagangan yang ditera dan tera ulang | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 2 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | - | Dinas Pendidikan |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | - | Dinas Pendidikan |

| No | Prioritas Nasional | Program | Indikator Kinerja | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan/persentase balita stunting/Persentase puskesmas menyelenggarakan UKP serta UKM esensial dan pengembangan<br>Rasio Puskesmas per 1.000 penduduk/Rasio pustu pewr 1.000 penduduk/Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase tenaga Kesehatan sesuai standar<br>Persentase tenaga Kesehatan sesuai standar | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase sarana dan produk farmasi dan makanana minuman memenuhi persyaratan<br>Persentase Sarana farmasi memenuhi persyaratan/persentase makanan yang memenuhi persyaratan | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Rasio posyandu per. 1.000 balita | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian Indikator SPM Rumah Sakit/ Persentase Prasarana Rumah Sakit sesuai standar/ Persentase Sarana Rumah Sakit Sesuai Standar | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)<br>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota<br>Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase keakuratan data program perlindungan kesejahteraan sosial | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Indeks Pembangunan Gender<br>Indeks Pembangunan Gender | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Rasio KDRT<br>Rasio KDRT | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Cakupan Penegakan Hukum dari TingkatPenyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |

| No | Prioritas Nasional | Program | Indikator Kinerja | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | | Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Jejaring Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (Paramater dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan/Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, yang melakukan pendidikan kependudukan/Ratio Akseptor KB | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)<br>Laju Pertumbuhan Pendudukan/Tahun | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga<br>Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | PERSENTASE DESA YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU / JUMLAH LEMBAGA EKONOMI DESA | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | PERSENTASE TERBENTUKNYA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah Prestasi Olahraga | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Cakupan Bina Kelompok Tani | Dinas Pertanian |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Badan Pendapatan Daerah |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Kabanjahe |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Barusjahe |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Kecamatan Tiga Panah |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Tiga Panah |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | Kecamatan Tiga Panah |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi | Kecamatan Tiga Panah |

| No | Prioritas Nasional | Program | Indikator Kinerja | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan kecamatan | Kecamatan Munte |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | Kecamatan Juhar |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Tiga Binanga |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Lau Baleng |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Mardinding |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penegakan Perda dan Perkada<br>Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Payung |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | Kecamatan Payung |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Perda dan Perkada<br>Jumlah Penegakan Perda Dan Perkada<br>Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Kutabuluh |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Penegakan Perda Dan Perkada | Kecamatan Dolat Rayat |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Kecamatan Merdeka |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Merdeka |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Merdeka |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | Kecamatan Merdeka |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi | Kecamatan Merdeka |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Namanteran |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Penegakan Perda Dan Perkada | Kecamatan Tiganderket |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Jumlah Pertemuan dan Sosialisasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Jumlah pertemuan Forkopimda dan Forkopimcam | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%) / Kepemilikan Kartu Identitas Anak | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Rasio bayi berakte kelahiran (%) / Rasio pasangan berakte nikah (%) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| No | Prioritas Nasional | Program | Indikator Kinerja | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Ketersediaan Database Nasional Skala Provinsi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase Organisasi Pemuda yang aktif | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah<br>Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Sekretariat Daerah |
| | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Jumlah Paket tender dengan Jumlah Permohonan Tender<br>Jumlah Paket tender dengan Jumlah Permohonan Tender / Laporan Tpid | Sekretariat Daerah |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaaran Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaaran Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Indeks Daya Saing Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase Keterisian Jabatan/Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ Jumlah Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin aparatur | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | - | Inspektorat Daerah |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | - | Inspektorat Daerah |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Kecamatan Kabanjahe |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Kabanjahe |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | Kecamatan Kabanjahe |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina dan Diawasi | Kecamatan Kabanjahe |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kelurahan Kampung Dalam |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kelurahan Gung Negeri |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kelurahan Padang Mas |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kelurahan Lau Cimba |

| No | Prioritas Nasional | Program | Indikator Kinerja | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kelurahan Gung Leto |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | Kecamatan Berastagi |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Berastagi |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Berastagi |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | Kecamatan Berastagi |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kelurahan Tambak Lau Mulgap II |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kelurahan Tambak Lau Mulgap I |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kelurahan Gundaling II |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kelurahan Gundaling I |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Kecamatan Barusjahe |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Barusjahe |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | Kecamatan Barusjahe |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang di Bina Dan Di awasi | Kecamatan Barusjahe |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Tiga Panah |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | Kecamatan Merek |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Merek |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | Kecamatan Merek |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indek Kepuasan Masyarakat | Kecamatan Munte |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Munte |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Munte |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina dan Diawasi | Kecamatan Munte |

| No | Prioritas Nasional | Program | Indikator Kinerja | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Kecamatan Juhar |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Kecamatan Tiga Binanga |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | Kecamatan Tiga Binanga |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi | Kecamatan Tiga Binanga |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | Kelurahan Tiga Binanga |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | Kecamatan Lau Baleng |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Lau Baleng |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | Kecamatan Lau Baleng |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | Kecamatan Mardinding |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan | Kecamatan Mardinding |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah pemerintah desa yang dibina dan diawasi | Kecamatan Mardinding |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Kecamatan Payung |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kecamatan Payung |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi | Kecamatan Payung |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Kecamatan Dolat Rayat |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Dolat Rayat |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | Kecamatan Dolat Rayat |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi | Kecamatan Dolat Rayat |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Kecamatan Namanteran |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Namanteran |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | Kecamatan Namanteran |

| No | Prioritas Nasional | Program | Indikator Kinerja | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang di Bina Dan Diawasi | Kecamatan Namanteran |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | Kecamatan Tiganderket |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Tiganderket |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | Kecamatan Tiganderket |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang di Bina Dan Di awasi | Kecamatan Tiganderket |
| | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 4 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik<br>Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase penduduk berakses air minum | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rurnah tinggal bersanitasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Gedung Pemerintah dalam kondisi baik | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Meningkatnya SDM tenaga terampil konstruksi | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Ketaatan terhadap RTRW | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Rasio Konektivitas Kabupaten / Kinerja Lalu Lintas Kabupaten | Dinas Perhubungan |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Rasio Konektivitas Kabupaten | Dinas Perhubungan |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Indeks SPBE<br>Indeks SPBE | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Indeks SPBE<br>Indeks SPBE | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Produktivitas Komoditi Pertanian | Dinas Pertanian |
| 5 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Menghadapi Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Peningkatan Pengelolaan RTH | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Prioritas Nasional | Program | Indikator Kinerja | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Terlaksananya pemberian penghargaan tentang lingkungan hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani | Dinas Lingkungan Hidup |
| 6 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota, Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Kecamatan Kutabuluh |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Kutabuluh |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | Kecamatan Kutabuluh |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi | Kecamatan Kutabuluh |

**Tabel 4.4**
**Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Karo Terhadap Prioritas Provinsi Tahun 2024**

| No | Prioritas Provinsi | Program | Indikator Kinerja | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | - | Dinas Pendidikan |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | - | Dinas Pendidikan |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan/persentase balita stunting/Persentase puskesmas menyelenggarakan UKP serta UKM esensial dan pengembangan<br>Rasio Puskesmas per 1.000 penduduk/Rasio pustu pewr 1.000 penduduk/Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase tenaga Kesehatan sesuai standar<br>Persentase tenaga Kesehatan sesuai standar | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase sarana dan produk farmasi dan makanana minuman memenuhi persyaratan<br>Persentase Sarana farmasi memenuhi persyaratan/persentase makanan yang memenuhi persyaratan | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Rasio posyandu per. 1.000 balita | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)<br>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota<br>Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase keakuratan data program perlindungan kesejahteraan sosial | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | - | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | PERSENTASE DESA YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU / JUMLAH LEMBAGA EKONOMI DESA | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| No | Prioritas Provinsi | Program | Indikator Kinerja | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | PERSENTASE TERBENTUKNYA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase Organisasi Pemuda yang aktif | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah Prestasi Olahraga | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Cakupan Bina Kelompok Tani | Dinas Pertanian |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Kabanjahe |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Barusjahe |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Lau Baleng |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Mardinding |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penegakan Perda dan Perkada<br>Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Payung |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Perda dan Perkada<br>Jumlah Penegakan Perda Dan Perkada<br>Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Kutabuluh |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Penegakan Perda Dan Perkada | Kecamatan Dolat Rayat |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Kecamatan Merdeka |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Merdeka |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Merdeka |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | Kecamatan Merdeka |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi | Kecamatan Merdeka |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Namanteran |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Pembinaan Partai Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| No | Prioritas Provinsi | Program | Indikator Kinerja | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Jumlah Pertemuan dan Sosialisasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Jumlah pertemuan Forkopimda dan Forkopimcam | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik<br>Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | - | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Menghadapi Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Rasio Konektivitas Kabupaten / Kinerja Lalu Lintas Kabupaten | Dinas Perhubungan |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Rasio Konektivitas Kabupaten | Dinas Perhubungan |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Produktivitas Komoditi Pertanian | Dinas Pertanian |
| 3 | Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Kemandirian Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Ketersediaan Pangan<br>Ketersediaan Pangan Utama | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (PSAT) | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Persentase Produksi Perikanan Budidaya | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Persentase Produksi Perikanan Budidaya | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |

| No | Prioritas Provinsi | Program | Indikator Kinerja | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan<br>Jumlah Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produktivitas komoditi pertanian | Dinas Pertanian |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Produktivitas Komoditi Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Jumlah HPR yang divaksin | Dinas Pertanian |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penaggulangan OPT | Dinas Pertanian |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Peningkatan nilai eksport | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase alat ukur sarana perdagangan yang ditera dan tera ulang | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | persentase pertumbuhan industri/ikm | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 4 | Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | - | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | koperasi aktif<br>koperasi aktif | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase peningkatan UMKM yang naik kelas<br>Persentase peningkatan UMKM yang naik kelas | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%) / Kepemilikan Kartu Identitas Anak | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Rasio bayi berakte kelahiran (%) / Rasio pasangan berakte nikah (%) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Ketersediaan Database Nasional Skala Provinsi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Produktivitas Komoditi Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase sarana perdagangan yang terkelola dengan baik | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| No | Prioritas Provinsi | Program | Indikator Kinerja | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaaran Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaaran Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Indeks Daya Saing Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase Keterisian Jabatan/Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ Jumlah Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin aparatur | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | - | Inspektorat Daerah |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | - | Inspektorat Daerah |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Kecamatan Kabanjahe |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Kabanjahe |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | Kecamatan Kabanjahe |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina dan Diawasi | Kecamatan Kabanjahe |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kelurahan Kampung Dalam |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kelurahan Gung Negeri |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kelurahan Padang Mas |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kelurahan Lau Cimba |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kelurahan Gung Leto |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | Kecamatan Berastagi |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Berastagi |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Berastagi |

| No | Prioritas Provinsi | Program | Indikator Kinerja | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | Kecamatan Berastagi |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kelurahan Tambak Lau Mulgap II |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kelurahan Tambak Lau Mulgap I |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kelurahan Gundaling II |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kelurahan Gundaling I |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Kecamatan Barusjahe |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang di Bina Dan Di awasi | Kecamatan Barusjahe |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Kecamatan Tiga Panah |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Tiga Panah |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Tiga Panah |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | Kecamatan Tiga Panah |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi | Kecamatan Tiga Panah |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | Kecamatan Merek |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Merek |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | Kecamatan Merek |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indek Kepuasan Masyarakat | Kecamatan Munte |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Munte |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Munte |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan kecamatan | Kecamatan Munte |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina dan Diawasi | Kecamatan Munte |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Kecamatan Tiga Binanga |

| No | Prioritas Provinsi | Program | Indikator Kinerja | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Tiga Binanga |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | Kecamatan Tiga Binanga |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi | Kecamatan Tiga Binanga |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | Kelurahan Tiga Binanga |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | Kecamatan Lau Baleng |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Lau Baleng |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | Kecamatan Lau Baleng |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | Kecamatan Mardinding |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Mardinding |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan | Kecamatan Mardinding |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah pemerintah desa yang dibina dan diawasi | Kecamatan Mardinding |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Kecamatan Payung |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kecamatan Payung |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | Kecamatan Payung |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi | Kecamatan Payung |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | Kecamatan Simpang Empat |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | Kecamatan Simpang Empat |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | - | Kecamatan Simpang Empat |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Kecamatan Kutabuluh |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Kutabuluh |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | Kecamatan Kutabuluh |

| No | Prioritas Provinsi | Program | Indikator Kinerja | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi | Kecamatan Kutabuluh |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Kecamatan Dolat Rayat |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Dolat Rayat |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | Kecamatan Dolat Rayat |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi | Kecamatan Dolat Rayat |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Kecamatan Merdeka |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Kecamatan Merdeka |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Kecamatan Namanteran |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kecamatan Namanteran |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | Kecamatan Namanteran |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang di Bina Dan Diawasi | Kecamatan Namanteran |
| | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

## 4.4. Inovasi Daerah Kabupaten Karo

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Karo Nomor 30 tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun bahwa Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun merupakan program Pemerintah Daerah menciptakan Perangkat Daerah dan UPT Perangkat Daerah yang inovatif. Gerakan satu Instansi Pemerintah Daerah satu Inovasi setiap tahun bertujuan untuk:

1. Mendorong pembangunan lnovasi Pelayanan Publik;
2. Mendorong pengembangan dan transfer lnovasi Pelayanan Publik;
3. Mempercepat peningkatan kualitas Pelayanan Publik; dan
4. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dalam mendukung gerakan satu Instansi Pemerintah Daerah satu lnovasi setiap tahun, Perangkat Daerah dan UPT Perangkat Daerah wajib mengusulkan paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah setiap tahun. Bupati memberikan sanksi kepada Perangkat Daerah atau UPT Perangkat Daerah yang tidak mengusulkan Inovasi Daerah. Sanksi berupa penetapan Perangkat Daerah atau UPT PD sebagai Perangkat Daerah atau UPT Perangkat Daerah tidak berinovasi dan diumumkan kepada publik.

Kementerian Dalam Negeri setiap tahun melaksanakan penilaian inovasi daerah dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Pemerintah Kabupaten Karo sudah berperan serta pada penilaian ini sejak tahun 2018. Innovative Government Award (IGA) Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2018 meraih predikat “Kabupaten Kurang Inovatif”, tahun 2019 meraih predikat “Kabupaten Inovatif”, Tahun 2020 meraih predikat “Kabupaten Sangat Inovatif” dan Tahun 2021/2022 kembali meraih predikat “Kabupaten Inovatif”.

Pemerintah Kabupaten Karo melalui instansi pemerintah dalam hal ini Perangkat Daerah dan Puskesmas, pada tahun 2024 merencanakan Inovasi Daerah Kabupaten Karo sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) rencana inovasi yang terdiri dari 33 (tiga puluh) rencana inovasi dari 30 (tiga puluh) Perangkat Daerah dan 4 (empat) inovasi dari 3 (tiga) Puskesmas seperti disajikan pada tabel di bawah dengan total pagu Rp2.331.019.357.

Rencana inovasi daerah tersebut akan dilaksanakan dengan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang sudah dimuat pada Program,

Kegiatan, dan Subkegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 lampiran II RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023. Rencana inovasi tersebut, direncanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Karo yang sudah dimuat pada Bab II RKPD Kabupaten Karo Tahun 2024. Pelaksanaan dan penerapan inovasi daerah pada tahun 2024 ini akan menentukan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Karo pada tahun 2024, diharapkan Kabupaten Karo dapat meningkatkan indeks inovasi daerahnya. Komitmen, kerja keras dan kemauan untuk selalu belajar dan menjadi lebih baik menjadi kunci berhasilnya pelaksanaan dan penerapan inovasi daerah pada tahun 2024.

Terkait Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2022 Penyelenggaraan Inovasi Daerah dengantarget 2/Perangkat Daerah menjadi Sangat Inovatif. Kabupaten Karo sudah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah dimana ada Gerakan Satu Inovasi Satu Perangkat Daerah/UPT PD Setiap Tahun. Permasalahan inovasi daerah yang perlu diatasi sekarang adalah belum ada komitmen dari setiap perangkat daerah/UPT PD untuk memenuhi amanat Perda tersebut.

Penilaian kinerja dan prestasi seperti inovasi perlu dipertimbangkan, begitu juga pemberian *reward dan punishment*, sehingga dapat merubah komitmen PD/UPT PD dalam berinovasi.

Untuk mencapai Indeks Inovasi Daerah yang sangat Inovatif dapat diwujudkan dengan komitmen penuh setiap PD/UPT PD, kerja keras dan mau belajar melalui amanat regulasi terkait "Gerakan Satu Inovasi Satu Perangkat Daerah/UPT PD Setiap Tahun".

IGA tahun 2022/2023 lebih memprioritaskan kualitas inovasi dibandingkan dengan jumlah inovasi. Jumlah inovasi juga dibutuhkan ketika kualitas inovasi terpenuhi. Untuk itu, komitmen, kerja keras dan mau belajar wajib bagi setiap ASN/PD/UPT PD untuk dapat meningkatkan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Karo menjadi Kabupaten Sangat Inovatif atau Kabupaten Terinovatif.

Anggaran untuk pelaksanaan *research* di daerah Kabupaten Karo sangat terbatas disamping SDM fungsional peneliti juga terbatas, sehingga jumlah penelitian yang dilaksanakan setiap tahun masih berjumlah 1-2 penelitian saja. Dengan begitu Kebijakan berbasis *research* belum dapat diwujudkan.

IPKD sangat erat hubungannya dengan tahapan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan jangka menengah, jangka pendek, KUA PPAS, ranperda dan Perda APBD, pelaksanaan kegiatan/penyerapan anggaran dan pengendalian keuangan. Yang perlu menjadi perhatian ketika melaksanakan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan kegiatan dan pengendalian keuangan adalah:

1. Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam RKPD ada kesesuaian;
2. Kesesuaian nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD dan ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam KUA-PPAS;
3. Kesesuaian nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam APBD;
4. Kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS;
5. Kesesuaian jumlah pagu per program KUA-PPAS dan APBD yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD;
6. Pengalokasian anggaran untuk proporsi anggaran yang diwajibkan oleh regulasi dipenuhi mulai tahap perencanaan;
7. Pelaksanaan setiap tahapan tepat waktu dan dapat diakses oleh publik untuk itu dipublish dan diunduh minimal 30 hari setelah ditetapkan;
8. Penyerapan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang sudah ditetapkan; dan
9. Pengendalian keuangan selama pelaksanaan anggaran.

Untuk itu, TAPD dan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karo benar-benar memperhatikan ke-9 poin tersebut diatas untuk setiap tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.

**Tabel 4.5**
**Rencana Inovasi Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024**

| NO | INSTANSI PEMERINTAH | JUDUL INOVASI | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | OLI MANIS PAKE DATA (OPERASI PATROLI HUMANIS PADA KEGIATAN DAERAH TUJUAN OBJEK WISATA) | PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN | 149,350,000.00 |
| 2 | DINAS SOSIAL | TAMASYA MAKAM PAHLAWAN | PEMELIHARAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA | 124,925,400.00 |
| 3 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | NOVEL RINDU (INOVASI PELAYANAN RINGKAS DAN TERPADU) | SOSIALISASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 126,365,000.00 |
| 4 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | ALOI (APLIKASI LAYANAN OPTIMAL DAN INTERAKTIF) | PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR | 4,000,000.00 |
| 5 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | OPTIMALISASI SP4N LAPOR | PENGELOLAAN GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER (GCIO) | 75,000,000.00 |
| 6 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SI GESIT EIKO (SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS POTENSI INVESTASI KARO) | PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA KABUPATEN KARO | 122,750,000.00 |
| 7 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | MAKARO (MEMBANTU MENATA ARSIP KARO) | PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS | 65,000,000.00 |
| 8 | DINAS PERTANIAN | TEGULAH PETANI (INTENSIFIKASI PENGGUNAAN LAHAN MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI FERTIGASI) | PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA | 60,000,000.00 |
| 9 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1. E-SURA<br>2. E-CAN | ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 59,720,000.00 |
| 10 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | WEBSITE BKPSDM | PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN | 124,000,000.00 |
| 11 | KECAMATAN BARUSJAHE | NDIKAR | PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN | 16,641,000.00 |
| 12 | KECAMATAN BERASTAGI | TANDUK (PENERTIBAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) | SINERGISITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA RI TNI, DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN | 26,163,330.00 |
| 13 | KECAMATAN DOLAT RAYAT | SAMPAH BERUANG (SULAP SAMPAH BERUBAH UANG) KEC. DOLATRAYAT | PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN | 15,000,000.00 |
| 14 | KECAMATAN JUHAR | ERSINA MIN ATETA | PENINGKATAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN | 10,000,000.00 |
| 15 | KECAMATAN KABANJAHE | MEHAMAT KABANJAHE | PENINGKATAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN | 1,433,381.00 |
| 16 | KECAMATAN KUTABULUH | SIMUDA (SIMOLE LUMBUNG DATA) | KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAAN DI WILAYAH KECAMATAN | 16,000,000.00 |
| 17 | KECAMATAN LAU BALENG | REH KAM REH SEHATNA (RAMUAN HERBAL UNTUK KESEHATAN) | PENINGKATAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN | 12,334,417.00 |
| 18 | KECAMATAN MARDINDING | BELAJAR BERSAMA KANTOR CAMAT MARDINGDING (RAS KAM) | PENINGKATAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN | 12,288,000.00 |

| NO | INSTANSI PEMERINTAH | JUDUL INOVASI | SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|---|---|---|---|
| 19 | KECAMATAN MERDEKA | GREEN OFFICE MERDEKA | | |
| 20 | KECAMATAN MEREK | MEREK BISA: MEREK BERKARYA, INOVATIF, SANTUN, SEMANGAT, ASRI, DAN INDAH | PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN | 16,300,000.00 |
| 21 | KECAMATAN MUNTE | INOVASI TASRI (TAMAN ASRI MUNTE) | PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN | 70,000,000.00 |
| 22 | KECAMATAN NAMANTERAN | PLASMA (PENGELOLAAN SOSIAL MEDIA) | PENINGKATAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN | 11,088,000.00 |
| 23 | KECAMATAN PAYUNG | ONE VILLAGE ONE VOLUNTEER (OVOV) | PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN | 10,000,000.00 |
| 24 | KECAMATAN SIMPANG EMPAT | CAMAT NGADES (CAMAT NGANTOR DI DESA) | | |
| 25 | KECAMATAN TIGA BINANGA | GPS (GERAKAN PUNGUT SAMPAH) | PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN | 20,500,000.00 |
| 26 | KECAMATAN TIGANDERKET | PR TIGANDERKET (PEDULI REMAJA TIGANDERKET) | SINERGISITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA RI TNI, DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN | 13,200,000.00 |
| | | METAMI AWARD (JUDUL) | FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA | 17,000,000.00 |
| 27 | KECAMATAN TIGA PANAH | TIGAPANAH BERGELORA (BERSAMA GERAKKAN OLAH RAGA) | SINERGISITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA RI TNI, DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN | 26,340,550.00 |
| 28 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | PASLIH (PARTISIPASI PEMILIH) | | |
| 29 | PUSKESMAS JUHAR | UKS LITERASI KESEHATAN DISEKOLAH | PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR | 20,000,000.00 |
| 30 | PUSKESMAS BARUSJAHE | SEPENGOLE (SISTEM PELAYANAN INFORMASI OBAT ONLINE) | | |
| 31 | PUSKESMAS DOLATRAYAT | 1. MAMA TB PAPA DM (MENCEGAH DAN MENGATASI TB PADA PASIEN DM)<br>2. SALING CETING (SANITASI LINGKUNGAN CEGAH STUNTING) | BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN | 25,400,000.00<br>44,600,000.00 |
| 32 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | SIBAYAK (SISTEM BAYAR ELEKTRONIK) | PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD | 100,000,000.00 |
| 33 | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA | JEMPUT DATA TIAP BULAN | RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI PERANGKAT DAERAH | 10,000,000.00 |
| **TOTAL** | | | | **2.331.019.357** |

## 4.5. Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Berdasarkan data Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 angka stunting di Kabupaten Karo sebesar 25,35% dan menurun pada tahun 2022 menjadi 24,9% artinya dari tahun 2021 ke tahun 2022 penurunan stunting di Kabupaten Karo mengalami penurunan sebesar 0,45%. Sedangkan target nasional pada tahun 2024 prevalensi stunting sebesar 14%. Dilihat dari posisi relatif prevalensi stunting di Kabupaten Karo yang lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Utara (21,1%) dan berada di posisi peringkat 17 paling tinggi pada 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, untuk itu Kabupaten Karo harus bekerja keras dalam menurunkan prevalensi stunting pada tahun 2023.

**Tabel 4.6**
**Angka Penurunan Stunting Tahun 2017-2022**

| No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penurunan Stunting (%) | 30,77 | 29,58 | 38,46 | 25,35 | 24,90 |

*Sumber: SSGI, 2023*

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting pada kelompok sasaran yang diintervensi yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0-59 bulan, sedangkan tujuan percepatan penurunan stunting:

1. Menurunkan prevalensi stunting;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. Memperbaiki pola asuh;
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
6. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Karo dilakukan dengan membuat inovasi penurunan stunting, inovasi yag telah dilakukan antara lain:

- Inovasi pembuatan aplikasi e-sipesikapstunting "*Sistem Terintegrasi Perencanaan, Konvergensi, Pelaksanaan, dan Pemantauan Penurunan*

*Stunting"*: yakni aplikasi integrasi data yang bertujuan untuk memperkaya sumber data penurunan stunting dan pensasaran penerima manfaat program penurunan stunting.

- Inovasi desa gizi "desa sadar gizi": yang bertujuan meningkatkan status gizi suatu desa melalui intervensi kolaborasi kegiatan terkait gizi.
- Inovasi Catin Cemas "Calon Pengantin Cerdas Melawan Stunting": kerja sama Dinas Kesehatan dengan Kementerian Agama dengan sasaran edukasi cegah stunting untuk Calon Pengantin.
- Inovasi Biokol Ceting "Bioflok dan Kolam Ikan Cegah Stunting": pemberdayaan budidaya ikan melalui budidaya ikan pada bioflok dan kolam untuk meningkatkan ketersediaan protein hewani dan mengolah hasil ikan menjadi abon ikan dan didistribusikan kepada balita stunting pada desa lokus stunting.
- Inovasi Sempabu "*Stunting diEntaskan Melalui Program Dana Desa* Berkarya Untuk *Maju": bertujuan membuat menu dana desa untuk cegah stunting*
- Inovasi Permakani Anak" *Pelopor dalam Mencegah Perkawinan Anak Usia Dini"*: mengikutsertakan forum anak dalam mencegah perkawinan dini dan edukasi cegah stunting pada teman sebaya.

### 4.6. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan esktrem yaitu kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Perkembangannya pada tahun 2021 sebesar 1,92% kemudian pada tahun 2022 menurun menjadi 1,58%. Program-program percepatan penurunan kemiskinan esktrem dilakukan melalui kebijakan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meminimalkan wilayah-wilayah kantong kemiskinan.

# BAB V
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan prioritas daerah merupakan beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Terkait dengan program, kegiatan dan subkegiatan tersebut dalam pengimplementasiannya adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengkondisikan suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi keberhasilan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Hal ini terkait dengan fungsi pemerintah yakni stabilisasi, distribusi dan alokasi. Dengan demikian akan sangat bergantung pada bagaimanaa pemerintah daerah mampu membuat dan menyusun program dan kegiatan berdasarkan perkiraan jumlah dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Dalam menentukan program, kegiatan dan subkegiatan berdasarkan kapasitas riil, terlebih dahulu dilakukan penelaahan terhadap seluruh aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dapat dilihat melalui hasil musrenbang RKPD maupun yang disampaikan melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Diharapkan di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Karo dapat lebih mampu menyusun rencana program dan kegiatan yang tidak semata-mata bergantung pada jumlah anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, akan tetapi pendanaan lebih banyak dibiayai oleh pihak ketiga maupun masyarakat sendiri.

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Karo terlampir di Lampiran II Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 ini.

## Tabel 5.1
## Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024

| Kode Rekening | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | **Dinas Pendidikan** | | | **348.673.197.031,00** | | **382.350.896.294,00** | **Dinas Pendidikan** |
| **1** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **348.673.197.031,00** | | **382.350.896.294,00** | **Dinas Pendidikan** |
| **1** | **01** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | **348.673.197.031,00** | | **382.350.896.294,00** | **Dinas Pendidikan** |
| 1 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat | 87 Indeks | 271.290.743.031,00 | - | 298.449.639.934,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase Pengelolaan Pendidikan | 62,28 % | 77.352.454.000,00 | - | 83.860.256.360,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | - | - | 20.000.000,00 | - | 30.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | - | - | 10.000.000,00 | - | 11.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | | | **Dinas Kesehatan** | | | **153.808.963.524,00** | | **170.272.862.334,00** | **Dinas Kesehatan** |
| **1** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **153.808.963.524,00** | | **170.272.862.334,00** | **Dinas Kesehatan** |
| **1** | **02** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | **153.808.963.524,00** | | **170.272.862.334,00** | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | 94.031.746.584,00 | - | 111.981.798.534,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan/persentase balita stunting/Persentase puskesmas menyelenggarakan UKP serta UKM esensial dan pengembangan<br>Rasio Puskesmas per 1.000 penduduk/Rasio pustu pewr 1.000 penduduk/Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk | 100/25/100 %<br>0.04/0.5/0.01 rasio | 59.033.066.440,00 | - | 57.050.177.800,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase tenaga Kesehatan sesuai standar<br>Persentase tenaga Kesehatan sesuai standar | 100 %<br>100 % | 210.800.000,00 | - | 700.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase sarana dan produk farmasi dan makanana minuman memenuhi persyaratan<br>Persentase Sarana farmasi memenuhi persyaratan/persentase makanan yang memenuhi persyaratan | 67 %<br>94/66 % | 369.436.000,00 | - | 369.436.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Rasio posyandu per. 1.000 balita | 9,3 rasio | 163.914.500,00 | - | 171.450.000,00 | Dinas Kesehatan |
| | | | **Rumah Sakit Umum Daerah** | | | **45.170.793.780,00** | | **45.046.853.780,00** | **Rumah Sakit Umum Daerah** |
| **1** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **45.170.793.780,00** | | **45.046.853.780,00** | **Rumah Sakit Umum Daerah** |
| **1** | **02** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | **45.170.793.780,00** | | **45.046.853.780,00** | **Rumah Sakit Umum Daerah** |
| 1 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 43.934.484.281,00 | - | 43.934.484.281,00 | Rumah Sakit Umum Daerah |

| Kode Rekening | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Target | Pagu Indikatif | |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian Indikator SPM Rumah Sakit/ Persentase Prasarana Rumah Sakit sesuai standar/ Persentase Sarana Rumah Sakit Sesuai Standar | 90/95/90 %/%/% | 1.236.309.499,00 | - | 1.112.369.499,00 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** | | | **149.316.659.878,00** | | **52.876.169.000,00** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** |
| **1** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **149.316.659.878,00** | | **52.876.169.000,00** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** |
| **1** | **03** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | **149.316.659.878,00** | | **52.876.169.000,00** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** |
| 1 | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 10.422.414.289,00 | - | 10.576.435.386,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik<br>Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | 51 %<br>51.11 % | 13.141.082.000,00 | - | 12.096.512.614,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase penduduk berakses air minum | 68.71 % | 7.805.371.000,00 | - | 700.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rurnah tinggal bersanitasi | 75.08 % | 6.352.938.000,00 | - | 2.600.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | 63 % | 7.350.000.000,00 | - | 4.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Gedung Pemerintah dalam kondisi baik | 63 % | 400.000.000,00 | - | 1.400.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan | 25 % | 1.638.800.000,00 | - | 100.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 66 % | 101.556.054.589,00 | - | 20.603.221.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Meningkatnya SDM tenaga terampil konstruksi | 100 Orang | 100.000.000,00 | - | 100.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Ketaatan terhadap RTRW | 77 % | 550.000.000,00 | - | 700.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan** | | | **5.710.615.298,00** | | **7.854.694.873,00** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan** |
| **1** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **5.560.615.298,00** | | **7.799.694.873,00** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan** |
| **1** | **04** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | **5.560.615.298,00** | | **7.799.694.873,00** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan** |
| 1 | 04 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi | 77,37 Indeks | 4.119.751.298,00 | - | 4.494.694.873,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| 1 | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100 % | 239.964.000,00 | - | 305.000.000,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |

| Kode Rekening | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Target | Pagu Indikatif | |
| 1 | 04 | 05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | 99 % | 1.200.900.000,00 | - | 3.000.000.000,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| **2** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **150.000.000,00** | | **55.000.000,00** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan** |
| **2** | **10** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | **150.000.000,00** | | **55.000.000,00** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan** |
| 2 | 10 | 04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1 Kasus | 125.000.000,00 | - | 27.500.000,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| 2 | 10 | 05 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | - | - | 25.000.000,00 | - | 27.500.000,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| | | | **Satuan Polisi Pamong Praja** | | | **13.037.575.027,00** | | **14.339.982.530,00** | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| **1** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **13.037.575.027,00** | | **14.339.982.530,00** | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| **1** | **05** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | **13.037.575.027,00** | | **14.339.982.530,00** | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| 1 | 05 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 12.127.879.877,00 | - | 13.339.317.865,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | 50 %<br>85 % | 799.695.150,00 | - | 879.664.665,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 51 %<br>80 % | 110.000.000,00 | - | 121.000.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | | | **5.123.363.629,00** | | **6.071.741.814,00** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| **1** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **5.123.363.629,00** | | **6.071.741.814,00** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| **1** | **05** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | **5.123.363.629,00** | | **6.071.741.814,00** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| 1 | 05 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 4.887.201.432,00 | - | 5.276.741.814,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Menghadapi Bencana | 0,53 Indeks | 236.162.197,00 | - | 795.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | **Dinas Sosial** | | | **3.609.534.820,00** | | **4.910.235.600,00** | **Dinas Sosial** |
| **1** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **3.609.534.820,00** | | **4.910.235.600,00** | **Dinas Sosial** |

| Kode Rekening | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Target | Pagu Indikatif | |
| **1** | **06** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | **3.609.534.820,00** | | **4.910.235.600,00** | **Dinas Sosial** |
| 1 | 06 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 3.075.249.612,00 | - | 3.238.045.000,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 58 % | 25.000.000,00 | - | 160.000.000,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 03 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 57,69 % | 8.195.300,00 | - | 12.444.000,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 57,69 % | 173.580.853,00 | - | 1.142.824.400,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase keakuratan data program perlindungan kesejahteraan sosial | 58,59 % | 106.456.000,00 | - | 150.000.000,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 100 % | 92.127.655,00 | - | 81.996.800,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 128.925.400,00 | - | 124.925.400,00 | Dinas Sosial |
| | | | **Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** | | | **4.723.834.352,00** | | **4.926.449.627,00** | **Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** |
| **2** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **4.723.834.352,00** | | **4.926.449.627,00** | **Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** |
| **2** | **07** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | **3.891.708.054,00** | | **4.355.079.627,00** | **Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** |
| 2 | 07 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 3.673.008.054,00 | - | 4.060.079.627,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 07 | 03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | - | - | 140.000.000,00 | - | 140.000.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 07 | 05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama | 55 % | 78.700.000,00 | - | 155.000.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **17** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | **832.126.298,00** | | **571.370.000,00** | **Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** |
| 2 | 17 | 03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | - | - | 15.550.000,00 | - | 0 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 17 | 05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | koperasi aktif<br>koperasi aktif | 65 %<br>64,51 % | 571.370.000,00 | - | 471.370.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 17 | 07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase peningkatan UMKM yang naik kelas<br>Persentase peningkatan UMKM yang naik kelas | 31,82 %<br>0,483 % | 245.206.298,00 | - | 100.000.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |

| Kode Rekening | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** | | | **14.417.522.822,00** | | **14.497.928.001,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| **2** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **14.417.522.822,00** | | **14.497.928.001,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| **2** | **08** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | **6.177.990.228,00** | | **6.302.962.647,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 08 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat(IKM)<br>Indeks Pelayanan Publik | 89 Indeks<br>89 Indeks | 5.177.720.248,00 | - | 5.360.692.667,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 08 | 02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Indeks Pembangunan Gender<br>Indeks Pembangunan Gender | 96,45 %<br>96,45 % | 112.569.980,00 | - | 114.569.980,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 08 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | 100 % | 208.194.183,00 | - | 148.194.183,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 08 | 04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Rasio KDRT<br>Rasio KDRT | 0,01 %<br>0,01 rasio | 156.350.000,00 | - | 156.350.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 08 | 06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Cakupan Penegakan Hukum dari TingkatPenyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak<br>Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 80 %<br>80 % | 366.275.017,00 | - | 366.275.017,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 08 | 07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Jejaring Perlindungan Anak | 43 PATBM/Desa | 156.880.800,00 | - | 156.880.800,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| **2** | **14** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | **8.239.532.594,00** | | **8.194.965.354,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |

| Kode Rekening | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Target | Pagu Indikatif | |
| 2 | 14 | 02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (Paramater dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan/Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, yang melakukan pendidikan kependudukan/Ratio Akseptor KB | 63/7/69,06 % | 194.448.594,00 | - | 178.681.354,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 14 | 03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)<br>Laju Pertumbuhan Pendudukan/Tahun | 13,24 %<br>1,35 % | 5.018.784.000,00 | - | 4.989.984.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 14 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga<br>Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | 34,84 %<br>34,84 % | 3.026.300.000,00 | - | 3.026.300.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** | | | **7.463.574.565,00** | | **274.068.684.936,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| **2** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **7.014.070.245,00** | | **273.097.352.936,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| **2** | **09** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | **7.014.070.245,00** | | **273.097.352.936,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| 2 | 09 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 6.553.480.862,00 | - | 7.620.130.436,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 2 | 09 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Kemandirian Pangan | 4 Unit | - | - | 153.972.500,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 2 | 09 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Ketersediaan Pangan<br>Ketersediaan Pangan Utama | 20 Persen<br>46,74 Persen | 358.989.383,00 | - | 265.223.250.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 2 | 09 | 05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (PSAT) | 99,32 Persen | 101.600.000,00 | - | 100.000.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| **3** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **449.504.320,00** | | **971.332.000,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| **3** | **25** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | **449.504.320,00** | | **971.332.000,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| 3 | 25 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Persentase Produksi Perikanan Budidaya | 72,13 Persen | 85.632.305,00 | - | 152.916.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 3 | 25 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Persentase Produksi Perikanan Budidaya | 85,6 Persen | 323.979.625,00 | - | 750.916.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 3 | 25 | 06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 143 Usaha | 39.892.390,00 | - | 67.500.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | | **Dinas Lingkungan Hidup** | | | **21.477.128.706,00** | | **14.636.068.053,31** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| **2** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **21.477.128.706,00** | | **14.636.068.053,31** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| **2** | **11** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | **21.477.128.706,00** | | **14.636.068.053,31** | **Dinas Lingkungan Hidup** |

| Kode Rekening | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Target | Pagu Indikatif | |
| 2 | 11 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 9.192.132.072,00 | - | 13.273.788.053,31 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | - | - | 7.000.000,00 | - | 25.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Peningkatan Pengelolaan RTH | 1 Lokasi | 18.700.000,00 | - | 19.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, | 100 % | 55.000.000,00 | - | 55.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Terlaksananya pemberian penghargaan tentang lingkungan hidup | ada ada | 237.000.000,00 | - | 240.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani | 84 Persen | 11.967.296.634,00 | - | 1.023.280.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | **4.649.803.975,00** | | **5.347.274.572,00** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| **2** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **4.649.803.975,00** | | **5.347.274.572,00** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| **2** | **12** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | **4.649.803.975,00** | | **5.347.274.572,00** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 2 | 12 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 3.740.122.560,00 | - | 4.301.140.945,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%) / Kepemilikan Kartu Identitas Anak | 100/60 % | 790.050.000,00 | - | 908.557.500,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Rasio bayi berakte kelahiran (%) / Rasio pasangan berakte nikah (%) | 100 / 100 % | 63.058.220,00 | - | 72.516.953,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK | Sudah Sudah/Belum | 16.507.195,00 | - | 18.983.274,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Ketersediaan Database Nasional Skala Provinsi | Ada Ada/Tidak Ada | 40.066.000,00 | - | 46.075.900,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | **8.606.806.810,00** | | **8.646.500.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |
| **2** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **8.606.806.810,00** | | **8.646.500.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |
| **2** | **13** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | **8.606.806.810,00** | | **8.646.500.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |
| 2 | 13 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakt (IKM) | 89 Indeks | 4.375.188.793,00 | - | 4.359.500.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13 | 04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | PERSENTASE DESA YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU / JUMLAH LEMBAGA EKONOMI DESA | 100/220 %/Lembaga | 3.777.148.400,00 | - | 3.790.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | PERSENTASE TERBENTUKNYA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA | 75 % | 454.469.617,00 | - | 497.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| Kode Rekening | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | **Dinas Perhubungan** | | | **20.327.334.729,00** | | **21.978.191.970,00** | **Dinas Perhubungan** |
| **2** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **20.327.334.729,00** | | **21.978.191.970,00** | **Dinas Perhubungan** |
| **2** | **15** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | **20.327.334.729,00** | | **21.978.191.970,00** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP) | 89 %<br>89 Indeks | 17.794.287.335,00 | - | 18.465.911.970,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Rasio Konektivitas Kabupaten / Kinerja Lalu Lintas Kabupaten | 95/0,28 Rasio/Indeks | 2.504.047.394,00 | - | 3.475.280.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Rasio Konektivitas Kabupaten | 0,28 Indeks | 29.000.000,00 | - | 37.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | | | **Dinas Komunikasi dan Informatika** | | | **7.455.272.737,00** | | **6.930.420.800,00** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| **2** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **7.455.272.737,00** | | **6.930.420.800,00** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| **2** | **16** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | **7.268.775.361,00** | | **6.038.923.424,00** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 2 | 16 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | 5.235.066.329,00 | - | 5.065.214.392,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Indeks SPBE<br>Indeks SPBE | 2.7 Indeks<br>2,7 Indeks | 907.903.717,00 | - | 345.903.717,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | - | - | 1.125.805.315,00 | - | 627.805.315,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **20** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | **115.000.000,00** | | **845.000.000,00** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 2 | 20 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Indeks SPBE<br>Indeks SPBE | 3 Indeks<br>2,7 Indeks | 115.000.000,00 | - | 845.000.000,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **21** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | **71.497.376,00** | | **46.497.376,00** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 2 | 21 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | - | - | 71.497.376,00 | - | 46.497.376,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | | | **6.011.245.462,00** | | **7.029.770.765,00** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| **2** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **6.011.245.462,00** | | **7.029.770.765,00** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| **2** | **18** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | **6.011.245.462,00** | | **7.029.770.765,00** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| 2 | 18 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 5.197.295.462,00 | - | 5.633.620.765,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| Kode Rekening | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Target | Pagu Indikatif | |
| 2 | 18 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN | 84 investor | 57.694.950,00 | - | 200.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN | 84 investor | 102.305.050,00 | - | 400.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan | 1400 izin | 173.950.000,00 | - | 316.150.000,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN | 84 investor | 480.000.000,00 | - | 480.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** | | | **18.755.199.189,00** | | **17.554.375.133,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| **2** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **981.898.350,00** | | **836.898.350,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| **2** | **19** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | **756.308.345,00** | | **611.308.345,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| 2 | 19 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase Organisasi Pemuda yang aktif | 47 % | 50.000.000,00 | - | 50.000.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| 2 | 19 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah Prestasi Olahraga | 18 cabang olahraga | 706.308.345,00 | - | 561.308.345,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| **2** | **22** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | **225.590.005,00** | | **225.590.005,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| 2 | 22 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi | 26 karya budaya | 62.539.215,00 | - | 62.539.215,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| 2 | 22 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya | 11 kali | 93.050.790,00 | - | 93.050.790,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| 2 | 22 | 05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan<br>Jumlah Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan | 20 Cagar Budaya<br>12 Cagar Budaya | 70.000.000,00 | - | 70.000.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| **3** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **17.773.300.839,00** | | **16.717.476.783,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| **3** | **26** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | **17.773.300.839,00** | | **16.717.476.783,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| 3 | 26 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 7.310.482.839,00 | - | 7.544.658.783,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| 3 | 26 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 1101000 orang | 7.531.761.000,00 | - | 7.531.761.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |

| Kode Rekening | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Target | Pagu Indikatif | |
| 3 | 26 | 03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 1101000 orang | 1.517.635.000,00 | - | 217.635.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| 3 | 26 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi | 160 orang | 1.413.422.000,00 | - | 1.423.422.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | | **Dinas Perpustakaan dan Arsip** | | | **5.099.039.868,00** | | **6.213.000.000,00** | **Dinas Perpustakaan dan Arsip** |
| **2** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **5.099.039.868,00** | | **6.213.000.000,00** | **Dinas Perpustakaan dan Arsip** |
| **2** | **23** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | **4.984.039.868,00** | | **5.923.000.000,00** | **Dinas Perpustakaan dan Arsip** |
| 2 | 23 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 4.697.573.784,00 | - | 5.193.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 2 | 23 | 02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan | 24.02 Indeks | 286.466.084,00 | - | 730.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| **2** | **24** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | **115.000.000,00** | | **290.000.000,00** | **Dinas Perpustakaan dan Arsip** |
| 2 | 24 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 85 % | 65.000.000,00 | - | 170.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 2 | 24 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 85 % | 50.000.000,00 | - | 120.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| | | | **Dinas Pertanian** | | | **26.248.394.440,00** | | **26.248.394.440,00** | **Dinas Pertanian** |
| **3** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **26.248.394.440,00** | | **26.248.394.440,00** | **Dinas Pertanian** |
| **3** | **27** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | **26.248.394.440,00** | | **26.248.394.440,00** | **Dinas Pertanian** |
| 3 | 27 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85 Indeks | 18.193.980.278,00 | - | 18.193.980.278,00 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produktivitas komoditi pertanian | 92,77 Persen | 531.315.400,00 | - | 531.315.400,00 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Produktivitas Komoditi Pertanian | 92,77 Kw/ha | 6.437.928.000,00 | - | 6.437.928.000,00 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Jumlah HPR yang divaksin | 70 Persen | 610.815.762,00 | - | 610.815.762,00 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penaggulangan OPT | 2,51 Persen | - | - | 0 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Cakupan Bina Kelompok Tani | 7,1 Persen | 474.355.000,00 | - | 474.355.000,00 | Dinas Pertanian |
| | | | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** | | | **14.662.947.129,00** | | **11.079.500.000,00** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** |
| **3** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **14.662.947.129,00** | | **11.079.500.000,00** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** |
| **3** | **29** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | | | **2.363.753.894,00** | | **2.257.000.000,00** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** |
| 3 | 29 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 indeks | 2.363.753.894,00 | - | 2.257.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| Kode Rekening | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Target | Pagu Indikatif | |
| **3** | **30** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | **6.298.592.569,00** | | **5.917.500.000,00** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** |
| 3 | 30 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 indeks | 5.258.874.145,00 | - | 5.355.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 30 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase sarana perdagangan yang terkelola dengan baik | 47,06 % | 700.000.000,00 | - | 185.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 30 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Peningkatan nilai eksport | 6199 miliar | 289.713.894,00 | - | 325.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 30 | 06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase alat ukur sarana perdagangan yang ditera dan tera ulang | 100 % | 50.004.530,00 | - | 52.500.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **31** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | **6.000.600.666,00** | | **2.905.000.000,00** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** |
| 3 | 31 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | persentase pertumbuhan industri/ikm | 3,93 % | 6.000.600.666,00 | - | 2.905.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | **Sekretariat Daerah** | | | **25.695.129.533,00** | | **26.145.772.833,00** | **Sekretariat Daerah** |
| **4** | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **25.695.129.533,00** | | **26.145.772.833,00** | **Sekretariat Daerah** |
| **4** | **01** | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | **25.695.129.533,00** | | **26.145.772.833,00** | **Sekretariat Daerah** |
| 4 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 23.324.241.203,00 | - | 23.806.742.203,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah<br>Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tinggi Kategori<br>Tinggi Kategori | 1.228.161.000,00 | - | 1.311.961.000,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Jumlah Paket tender dengan Jumlah Permohonan Tender<br>Jumlah Paket tender dengan Jumlah Permohonan Tender / Laporan Tpid | 220 Paket<br>220 / 6,75 Paket / Nilai | 1.142.727.330,00 | - | 1.027.069.630,00 | Sekretariat Daerah |
| | | | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** | | | **41.529.784.579,00** | | **41.251.639.559,00** | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| **4** | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **41.529.784.579,00** | | **41.251.639.559,00** | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| **4** | **02** | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | **41.529.784.579,00** | | **41.251.639.559,00** | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 4 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 24.645.973.669,00 | - | 25.195.900.649,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota, Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Ada Ada/ Tidak | 16.883.810.910,00 | - | 16.055.738.910,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |

| Kode Rekening | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** | | | **8.618.424.434,00** | | **8.535.155.225,00** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| **5** | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **8.618.424.434,00** | | **8.535.155.225,00** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| **5** | **01** | | **PERENCANAAN** | | | **8.081.557.948,00** | | **8.042.155.225,00** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| 5 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 5.449.327.078,00 | - | 5.433.770.860,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaaran Pembangunan Daerah | 100 % | 1.336.183.259,00 | - | 1.433.384.365,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaaran Pembangunan Daerah | 100 % | 1.296.047.611,00 | - | 1.175.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| **5** | **05** | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | **536.866.486,00** | | **493.000.000,00** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| 5 | 05 | 02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Indeks Daya Saing Daerah | 3,5 Indeks | 536.866.486,00 | 4Indeks | 493.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | | **Badan Keuangan dan Aset Daerah** | | | **288.423.215.797,00** | | **288.423.215.797,00** | **Badan Keuangan dan Aset Daerah** |
| **5** | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **288.423.215.797,00** | | **288.423.215.797,00** | **Badan Keuangan dan Aset Daerah** |
| **5** | **02** | | **KEUANGAN** | | | **288.423.215.797,00** | | **288.423.215.797,00** | **Badan Keuangan dan Aset Daerah** |
| 5 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 4.668.242.782,00 | - | 4.668.242.782,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | WTP Opini BPK | 283.033.329.384,00 | - | 283.033.329.384,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | WTP Opini BPK | 721.643.631,00 | - | 721.643.631,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | **Badan Pendapatan Daerah** | | | **10.074.899.201,00** | | **13.366.373.536,00** | **Badan Pendapatan Daerah** |
| **5** | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **10.074.899.201,00** | | **13.366.373.536,00** | **Badan Pendapatan Daerah** |
| **5** | **02** | | **KEUANGAN** | | | **10.074.899.201,00** | | **13.366.373.536,00** | **Badan Pendapatan Daerah** |

| Kode Rekening | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Target | Pagu Indikatif | |
| 5 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 83 Indeks | 7.483.990.539,00 | - | 7.530.373.536,00 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 59109743000 Rp | 2.590.908.662,00 | - | 5.836.000.000,00 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** | | | **6.569.944.936,00** | | **7.226.939.429,00** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| **5** | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **6.569.944.936,00** | | **7.226.939.429,00** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| **5** | **03** | | **KEPEGAWAIAN** | | | **5.384.694.296,00** | | **5.923.163.725,00** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| 5 | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 4.539.534.296,00 | - | 4.993.487.725,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase Keterisian Jabatan/Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ Jumlah Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin aparatur | 100/11/17 %/%/ASN | 845.160.000,00 | - | 929.676.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **04** | | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | **1.185.250.640,00** | | **1.303.775.704,00** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| 5 | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | 11/8,36 %/% | 1.185.250.640,00 | - | 1.303.775.704,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | **Inspektorat Daerah** | | | **8.473.896.432,00** | | **8.927.033.671,00** | **Inspektorat Daerah** |
| **6** | | | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **8.473.896.432,00** | | **8.927.033.671,00** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** |
| **6** | **01** | | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | **8.473.896.432,00** | | **8.927.033.671,00** | **INSPEKTORAT DAERAH** |
| 6 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | 6.059.515.447,00 | - | 6.538.902.686,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| 6 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | - | - | 1.959.810.805,00 | - | 1.933.560.805,00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN |
| 6 | 01 | 03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | - | - | 454.570.180,00 | - | 454.570.180,00 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |
| | | | **Kecamatan Kabanjahe** | | | **6.562.482.004,00** | | **7.546.898.301,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **6.562.482.004,00** | | **7.546.898.301,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |

| Kode Rekening | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Target | Pagu Indikatif | |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **6.562.482.004,00** | | **7.546.898.301,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 6.489.276.482,00 | - | 7.462.667.953,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 27.718.970,00 | - | 31.868.814,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19 Kegiatan | 19.350.000,00 | - | 22.525.500,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 2/2/2 Perda/Perkada/Kegiatan | 2.320.000,00 | - | 2.668.000,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | 2 Urusan | 21.816.552,00 | - | 25.018.034,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| 7 | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina dan Diawasi | 8 Pemerintahan Desa | 2.000.000,00 | - | 2.150.000,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| | | | **Kelurahan Kampung Dalam** | | | **900.000.000,00** | | **1.035.000.000,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **900.000.000,00** | | **1.035.000.000,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **900.000.000,00** | | **1.035.000.000,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19 Kegiatan | 900.000.000,00 | - | 1.035.000.000,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| | | | **Kelurahan Gung Negeri** | | | **900.000.000,00** | | **1.035.999.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **900.000.000,00** | | **1.035.999.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **900.000.000,00** | | **1.035.999.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19 Kegiatan | 900.000.000,00 | - | 1.035.999.999,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| | | | **Kelurahan Padang Mas** | | | **900.000.000,00** | | **1.034.999.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **900.000.000,00** | | **1.034.999.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **900.000.000,00** | | **1.034.999.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19 Kegiatan | 900.000.000,00 | - | 1.034.999.999,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| | | | **Kelurahan Lau Cimba** | | | **900.000.000,00** | | **1.030.990.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **900.000.000,00** | | **1.030.990.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **900.000.000,00** | | **1.030.990.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19 Kegiatan | 900.000.000,00 | - | 1.030.990.999,00 | Kecamatan Kabanjahe |

| Kode Rekening | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | **Kelurahan Gung Leto** | | | **900.000.000,00** | | **1.030.399.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **900.000.000,00** | | **1.030.399.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **900.000.000,00** | | **1.030.399.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19 Kegiatan | 900.000.000,00 | - | 1.030.399.999,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| | | | **Kecamatan Berastagi** | | | **5.387.710.586,00** | | **5.302.588.076,00** | **Kecamatan Berastagi** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **5.387.710.586,00** | | **5.302.588.076,00** | **Kecamatan Berastagi** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **5.387.710.586,00** | | **5.302.588.076,00** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks<br>95.23 Indeks | 5.181.931.893,00 | - | 4.902.588.076,00 | Kecamatan Berastagi |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 95.515.363,00 | - | 120.000.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19 Kegiatan | 11.600.000,00 | - | 200.000.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 2/2/2<br>Perda/Perkada/Kegiatan | 26.163.330,00 | - | 0 | Kecamatan Berastagi |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | 2 Urusan | 72.500.000,00 | - | 80.000.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| | | | **Kelurahan Tambak Lau Mulgap II** | | | **900.000.000,00** | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **900.000.000,00** | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **900.000.000,00** | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19 Kegiatan | 900.000.000,00 | - | 0 | Kecamatan Berastagi |
| | | | **Kelurahan Tambak Lau Mulgap I** | | | **900.000.000,00** | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **900.000.000,00** | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **900.000.000,00** | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19 Kegiatan | 900.000.000,00 | - | 0 | Kecamatan Berastagi |
| | | | **Kelurahan Gundaling II** | | | **900.000.000,00** | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **900.000.000,00** | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **900.000.000,00** | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |

| Kode Rekening | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Target | Pagu Indikatif | |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19 Kegiatan | 900.000.000,00 | - | 0 | Kecamatan Berastagi |
| | | | **Kelurahan Gundaling I** | | | **900.000.000,00** | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **900.000.000,00** | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **900.000.000,00** | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19 Kegiatan | 900.000.000,00 | - | 0 | Kecamatan Berastagi |
| | | | **Kecamatan Barusjahe** | | | **2.767.422.783,00** | | **2.763.652.479,00** | **Kecamatan Barusjahe** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.767.422.783,00** | | **2.763.652.479,00** | **Kecamatan Barusjahe** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **2.767.422.783,00** | | **2.763.652.479,00** | **Kecamatan Barusjahe** |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 87 Indeks | 2.622.038.503,00 | - | 2.626.152.182,00 | Kecamatan Barusjahe |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 87 Indeks | 70.212.600,00 | - | 57.401.548,00 | Kecamatan Barusjahe |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 6 kegiatan | 16.641.000,00 | - | 10.340.800,00 | Kecamatan Barusjahe |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 2/2/3 Perda/Perkada/Kegiatan | 5.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | Kecamatan Barusjahe |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | 1 Urusan | 36.492.280,00 | - | 30.717.838,00 | Kecamatan Barusjahe |
| 7 | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang di Bina Dan Di awasi | 19 Pemerintahan Desa | 17.038.400,00 | - | 29.040.111,00 | Kecamatan Barusjahe |
| | | | **Kecamatan Tiga Panah** | | | **2.914.356.555,00** | | **3.529.525.173,00** | **Kecamatan Tiga Panah** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.914.356.555,00** | | **3.529.525.173,00** | **Kecamatan Tiga Panah** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **2.914.356.555,00** | | **3.529.525.173,00** | **Kecamatan Tiga Panah** |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 2.709.336.705,00 | - | 3.269.459.250,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 102.788.000,00 | - | 110.240.400,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 11 kegiatan | 15.891.300,00 | - | 10.000.000,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 2/2/2 Perda/Perkada/Kegiatan | 26.340.550,00 | - | 50.901.200,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | 1 Urusan | 50.000.000,00 | - | 62.924.323,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| 7 | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi | 26 Pemerintahan Desa | 10.000.000,00 | - | 26.000.000,00 | Kecamatan Tiga Panah |

| Kode Rekening | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | **Kecamatan Merek** | | | **2.870.811.923,00** | | **2.888.260.015,00** | **Kecamatan Merek** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.870.811.923,00** | | **2.888.260.015,00** | **Kecamatan Merek** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **2.870.811.923,00** | | **2.888.260.015,00** | **Kecamatan Merek** |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 2.724.053.082,00 | - | 2.711.576.918,00 | Kecamatan Merek |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | - | 33.188.400,00 | - | 67.570.000,00 | Kecamatan Merek |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 6 kegiatan | 61.276.000,00 | - | 5.000.000,00 | Kecamatan Merek |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | 1 Urusan | 52.294.441,00 | - | 104.113.097,00 | Kecamatan Merek |
| | | | **Kecamatan Munte** | | | **2.394.076.754,00** | | **2.394.076.754,00** | **Kecamatan Munte** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.394.076.754,00** | | **2.394.076.754,00** | **Kecamatan Munte** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **2.394.076.754,00** | | **2.394.076.754,00** | **Kecamatan Munte** |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat<br>Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks<br>84,00 Indeks | 2.277.477.509,00 | - | 2.277.477.509,00 | Kecamatan Munte |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indek Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 56.668.000,00 | - | 56.668.000,00 | Kecamatan Munte |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 7 Kegiatan | 15.817.440,00 | - | 15.817.440,00 | Kecamatan Munte |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 2/2/2<br>Perda/Perkada/Kegiatan | 12.524.000,00 | - | 12.524.000,00 | Kecamatan Munte |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan kecamatan | 1 Urusan | 22.589.805,00 | - | 22.589.805,00 | Kecamatan Munte |
| 7 | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina dan Diawasi | 22 Pemerintahan Desa | 9.000.000,00 | - | 9.000.000,00 | Kecamatan Munte |
| | | | **Kecamatan Juhar** | | | **2.915.395.290,00** | | **5.824.099.454,00** | **Kecamatan Juhar** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.915.395.290,00** | | **5.824.099.454,00** | **Kecamatan Juhar** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **2.915.395.290,00** | | **5.824.099.454,00** | **Kecamatan Juhar** |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 2.785.109.575,00 | - | 5.409.933.739,00 | Kecamatan Juhar |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 87 Indeks | 96.292.000,00 | - | 273.567.513,00 | Kecamatan Juhar |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | 1 Urusan | 33.993.715,00 | - | 140.598.202,00 | Kecamatan Juhar |
| | | | **Kecamatan Tiga Binanga** | | | **2.632.816.633,00** | | **3.031.048.188,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |

| Kode Rekening | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Target | Pagu Indikatif | |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.632.816.633,00** | | **3.031.048.188,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **2.632.816.633,00** | | **3.031.048.188,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 2.499.709.552,00 | - | 2.868.130.399,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85 Indeks | 57.437.081,00 | - | 79.680.789,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 2/2/2 Perda/Perkada/Kegiatan | 12.000.000,00 | - | 13.200.000,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | 2 Urusan | 51.670.000,00 | - | 56.837.000,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| 7 | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi | 20 Pemerintah Desa | 12.000.000,00 | - | 13.200.000,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| | | | **Kelurahan Tiga Binanga** | | | **900.000.000,00** | | **912.020.000,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **900.000.000,00** | | **912.020.000,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **900.000.000,00** | | **912.020.000,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | - | 900.000.000,00 | - | 912.020.000,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| | | | **Kecamatan Lau Baleng** | | | **2.341.452.471,00** | | **2.341.472.471,00** | **Kecamatan Lau Baleng** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.341.452.471,00** | | **2.341.472.471,00** | **Kecamatan Lau Baleng** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **2.341.452.471,00** | | **2.341.472.471,00** | **Kecamatan Lau Baleng** |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 2.243.406.535,00 | - | 2.243.426.535,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 52.742.669,00 | - | 52.742.669,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 6 kegiatan | 12.334.417,00 | - | 12.334.417,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 2/2/3 Perda/Perkada/Kegiatan | 1.150.000,00 | - | 1.150.000,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | 1 Urusan | 31.818.850,00 | - | 31.818.850,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| | | | **Kecamatan Mardinding** | | | **2.240.250.764,00** | | **2.240.250.764,00** | **Kecamatan Mardinding** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.240.250.764,00** | | **2.240.250.764,00** | **Kecamatan Mardinding** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **2.240.250.764,00** | | **2.240.250.764,00** | **Kecamatan Mardinding** |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks<br>89 Indeks | 2.117.833.694,00 | - | 2.117.833.694,00 | Kecamatan Mardinding |

| Kode Rekening | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Target | Pagu Indikatif | |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 71.537.470,00 | - | 71.537.470,00 | Kecamatan Mardinding |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 2/2/3 Perda/Perkada/Kegiatan | 3.480.000,00 | - | 3.480.000,00 | Kecamatan Mardinding |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan | 1 Urusan | 35.431.600,00 | - | 35.431.600,00 | Kecamatan Mardinding |
| 7 | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah pemerintah desa yang dibina dan diawasi | 12 pemerintahan desa | 11.968.000,00 | - | 11.968.000,00 | Kecamatan Mardinding |
| | | | **Kecamatan Payung** | | | **2.094.521.409,00** | | **2.031.517.885,00** | **Kecamatan Payung** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.094.521.409,00** | | **2.031.517.885,00** | **Kecamatan Payung** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **2.094.521.409,00** | | **2.031.517.885,00** | **Kecamatan Payung** |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 1.978.272.065,00 | - | 1.906.864.170,00 | Kecamatan Payung |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 87 Indeks | 51.399.940,00 | - | 57.317.548,00 | Kecamatan Payung |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 Kegiatan | 23.987.100,00 | - | 23.987.100,00 | Kecamatan Payung |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penegakan Perda dan Perkada Penegakan Perda dan Perkada | 100 % 2/2/2 Perda/Perkada/Kegiatan | 11.980.000,00 | - | 11.980.000,00 | Kecamatan Payung |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | 1 Urusan | 20.882.304,00 | - | 26.879.967,00 | Kecamatan Payung |
| 7 | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi | 8 Pemerintahan Desa | 8.000.000,00 | - | 4.489.100,00 | Kecamatan Payung |
| | | | **Kecamatan Simpang Empat** | | | **2.949.635.300,00** | | **2.851.497.856,00** | **Kecamatan Simpang Empat** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.949.635.300,00** | | **2.851.497.856,00** | **Kecamatan Simpang Empat** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **2.949.635.300,00** | | **2.851.497.856,00** | **Kecamatan Simpang Empat** |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | 2.808.122.346,00 | - | 2.709.984.902,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | - | 76.368.000,00 | - | 76.368.000,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | - | 11.150.000,00 | - | 11.150.000,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | - | - | 53.994.954,00 | - | 53.994.954,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| | | | **Kecamatan Kutabuluh** | | | **2.464.188.157,00** | | **3.393.741.859,00** | **Kecamatan Kutabuluh** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.464.188.157,00** | | **3.393.741.859,00** | **Kecamatan Kutabuluh** |

| Kode Rekening | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Target | Pagu Indikatif | |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **2.464.188.157,00** | | **3.393.741.859,00** | **Kecamatan Kutabuluh** |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 2.325.293.157,00 | - | 3.194.741.859,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 83.220.000,00 | - | 114.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 2 Kegiatan | 4.800.000,00 | - | 5.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Perda dan Perkada<br>Jumlah Penegakan Perda Dan Perkada<br>Penegakan Perda dan Perkada | 2 Perda dan Perkada<br>2 Perda Dan Perkada<br>2/2/2<br>Perda/Perkada/Kegiatan | 6.200.000,00 | - | 20.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | 1 Urusan | 35.075.000,00 | - | 50.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| 7 | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi | 16 Pemerintah Desa | 9.600.000,00 | - | 10.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| | | | **Kecamatan Dolat Rayat** | | | **1.897.943.427,00** | | **2.016.522.642,00** | **Kecamatan Dolat Rayat** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **1.897.943.427,00** | | **2.016.522.642,00** | **Kecamatan Dolat Rayat** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **1.897.943.427,00** | | **2.016.522.642,00** | **Kecamatan Dolat Rayat** |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 1.816.191.720,00 | - | 1.934.859.077,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 40.976.000,00 | - | 35.184.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 5 kegiatan | 15.000.000,00 | - | 15.000.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Penegakan Perda Dan Perkada | 2 Perda Dan Perkada | 500.000,00 | - | 12.000.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | 1 Urusan | 24.275.707,00 | - | 9.479.565,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| 7 | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi | 7 Pemerintahan Desa | 1.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| | | | **Kecamatan Merdeka** | | | **2.395.006.885,00** | | **3.563.231.400,00** | **Kecamatan Merdeka** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.395.006.885,00** | | **3.563.231.400,00** | **Kecamatan Merdeka** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **2.395.006.885,00** | | **3.563.231.400,00** | **Kecamatan Merdeka** |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 93 Indeks | 2.222.748.623,00 | - | 3.328.525.512,00 | Kecamatan Merdeka |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 85.339.810,00 | - | 136.784.532,00 | Kecamatan Merdeka |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 6 kegiatan | 21.284.177,00 | - | 2.000.000,00 | Kecamatan Merdeka |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 2/2/6<br>Perda/Perkada/Kegiatan | 17.000.000,00 | - | 20.000.000,00 | Kecamatan Merdeka |

| Kode Rekening | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Target | Pagu Indikatif | |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | 1 Urusan | 28.834.275,00 | - | 55.921.356,00 | Kecamatan Merdeka |
| 7 | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi | 9 Pemerintahan Desa | 19.800.000,00 | - | 20.000.000,00 | Kecamatan Merdeka |
| | | | **Kecamatan Namanteran** | | | **2.490.253.266,00** | | **3.930.773.208,00** | **Kecamatan Namanteran** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.490.253.266,00** | | **3.930.773.208,00** | **Kecamatan Namanteran** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **2.490.253.266,00** | | **3.930.773.208,00** | **Kecamatan Namanteran** |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 2.323.441.590,00 | - | 3.604.682.240,00 | Kecamatan Namanteran |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 61.628.370,00 | - | 114.544.000,00 | Kecamatan Namanteran |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 5 Kegiatan | 13.845.500,00 | - | 20.000.000,00 | Kecamatan Namanteran |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 2/2/2 Perda/Perkada/Kegiatan | 18.369.275,00 | - | 39.783.475,00 | Kecamatan Namanteran |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | 1 Urusan | 60.968.531,00 | - | 139.763.493,00 | Kecamatan Namanteran |
| 7 | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang di Bina Dan Diawasi | 14 Pemerintahan Desa | 12.000.000,00 | - | 12.000.000,00 | Kecamatan Namanteran |
| | | | **Kecamatan Tiganderket** | | | **2.584.195.668,00** | | **2.755.989.591,00** | **Kecamatan Tiganderket** |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.584.195.668,00** | | **2.755.989.591,00** | **Kecamatan Tiganderket** |
| **7** | **01** | | **KECAMATAN** | | | **2.584.195.668,00** | | **2.755.989.591,00** | **Kecamatan Tiganderket** |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 2.462.107.408,00 | - | 2.545.989.591,00 | Kecamatan Tiganderket |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 29.552.000,00 | - | 53.000.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 2 Kegiatan | 26.000.000,00 | - | 45.000.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Penegakan Perda Dan Perkada | 2/2/2 Perda/Perkada/Kegiatan | 13.200.000,00 | - | 29.000.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | 3 Urusan | 36.336.260,00 | - | 73.000.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| 7 | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang di Bina Dan Di awasi | 17 Pemerintahan Desa | 17.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| | | | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | **39.158.138.866,00** | | **42.518.902.356,00** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| **8** | | | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | **39.158.138.866,00** | | **42.518.902.356,00** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| **8** | **01** | | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | **39.158.138.866,00** | | **42.518.902.356,00** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| 8 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 4.525.144.244,00 | - | 4.525.144.244,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| Kode Rekening | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Target | Pagu Indikatif | |
| 8 | 01 | 02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional | 11 Kegiatan | 1.158.858.330,00 | - | 1.158.858.330,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Pembinaan Partai Politik | 35 parpol | 30.900.946.892,00 | - | 34.261.710.382,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Jumlah Pertemuan dan Sosialisasi | 9 kegiatan | 2.096.539.400,00 | - | 2.096.539.400,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Jumlah pertemuan Forkopimda dan Forkopimcam | 4 kegiatan | 476.650.000,00 | - | 476.650.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | **1.371.794.761.424,00** | | **1.603.759.584.040,31** | |

## Tabel 5.2
## Dukungan Program dan Pagu Indikatif terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Indikator Kinerja | Pagu | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama | 78.700.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Koperasi aktif | 571.370.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | - | 15.550.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase peningkatan UMKM yang naik kelas<br>Persentase peningkatan UMKM yang naik kelas | 245.206.298,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | - | 140.000.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Ketersediaan Pangan<br>Ketersediaan Pangan Utama | 144.989.383,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (PSAT) | 101.600.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Persentase Produksi Perikanan Budidaya | 85.632.305,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Persentase Produksi Perikanan Budidaya | 323.979.625,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 39.892.390,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi | 62.539.215,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya | 93.050.790,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan<br>Jumlah Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan | 70.000.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 7.531.761.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 1.517.635.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi | 1.413.422.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produktivitas komoditi pertanian | 531.315.400,00 | Dinas Pertanian |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Produktivitas Komoditi Pertanian | 6.437.928.000,00 | Dinas Pertanian |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Jumlah HPR yang divaksin | 610.815.762,00 | Dinas Pertanian |
| | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Cakupan Bina Kelompok Tani | 474.355.000,00 | Dinas Pertanian |
| | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase sarana perdagangan yang terkelola dengan baik | 700.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Indikator Kinerja | Pagu | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Peningkatan nilai eksport | 289.713.894,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase alat ukur sarana perdagangan yang ditera dan tera ulang | 50.004.530,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | persentase pertumbuhan industri/ikm | 6.000.600.666,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 2 | Peningkatan Iklim Investasi Yang Kondusif | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN | 57.694.950,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN | 102.305.050,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan | 173.950.000,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN | 480.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase Pengelolaan Pendidikan | 77.352.454.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | - | 20.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | - | 10.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan/persentase balita stunting/Persentase puskesmas menyelenggarakan UKP serta UKM esensial dan pengembangan Rasio Puskesmas per 1.000 penduduk/Rasio pustu pewr 1.000 penduduk/Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk | 59.033.066.440,00 | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase tenaga Kesehatan sesuai standar<br>Persentase tenaga Kesehatan sesuai standar | 210.800.000,00 | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase sarana dan produk farmasi dan makanana minuman memenuhi persyaratan<br>Persentase Sarana farmasi memenuhi persyaratan/persentase makanan yang memenuhi persyaratan | 369.436.000,00 | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Rasio posyandu per. 1.000 balita | 163.914.500,00 | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian Indikator SPM Rumah Sakit/ Persentase Prasarana Rumah Sakit sesuai standar/ Persentase Sarana Rumah Sakit Sesuai Standar | 1.236.309.499,00 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)<br>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | 799.695.150,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota<br>Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 110.000.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 25.000.000,00 | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 8.195.300,00 | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 173.580.853,00 | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase keakuratan data program perlindungan kesejahteraan sosial | 106.456.000,00 | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 92.127.655,00 | Dinas Sosial |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Indikator Kinerja | Pagu | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Indeks Pembangunan Gender<br>Indeks Pembangunan Gender | 112.569.980,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | 208.194.183,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Rasio KDRT<br>Rasio KDRT | 156.350.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Cakupan Penegakan Hukum dari TingkatPenyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak<br>Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 366.275.017,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Jejaring Perlindungan Anak | 156.880.800,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (Paramater dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan/Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, yang melakukan pendidikan kependudukan/Ratio Akseptor KB | 164.448.594,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)<br>Laju Pertumbuhan Pendudukan/Tahun | 5.018.784.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga<br>Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | 3.026.300.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | PERSENTASE DESA YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU / JUMLAH LEMBAGA EKONOMI DESA | 3.777.148.400,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | PERSENTASE TERBENTUKNYA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA | 454.469.617,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase Organisasi Pemuda yang aktif | 50.000.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah Prestasi Olahraga | 706.308.345,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan | 286.466.084,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 65.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 50.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 2.320.000,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 5.000.000,00 | Kecamatan Barusjahe |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 62.788.000,00 | Kecamatan Tiga Panah |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Indikator Kinerja | Pagu | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 96.292.000,00 | Kecamatan Juhar |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | 33.993.715,00 | Kecamatan Juhar |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 12.000.000,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 1.150.000,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 1.480.000,00 | Kecamatan Mardinding |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penegakan Perda dan Perkada<br>Penegakan Perda dan Perkada | 11.980.000,00 | Kecamatan Payung |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Perda dan Perkada<br>Jumlah Penegakan Perda Dan Perkada<br>Penegakan Perda dan Perkada | 6.200.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Penegakan Perda Dan Perkada | 500.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 18.369.275,00 | Kecamatan Namanteran |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Penegakan Perda Dan Perkada | 13.200.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Pembinaan Partai Politik | 30.900.946.892,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Jumlah Pertemuan dan Sosialisasi | 2.096.539.400,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Jumlah pertemuan Forkopimda dan Forkopimcam | 476.650.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 4 | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 2.590.908.662,00 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik<br>Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | 13.141.082.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase penduduk berakses air minum | 7.805.371.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rurnah tinggal bersanitasi | 6.352.938.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | 7.350.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Gedung Pemerintah dalam kondisi baik | 400.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan | 1.638.800.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 101.556.054.589,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Indikator Kinerja | Pagu | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Meningkatnya SDM tenaga terampil konstruksi | 100.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Ketaatan terhadap RTRW | 550.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 239.964.000,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | 1.200.900.000,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 125.000.000,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | - | 25.000.000,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Menghadapi Bencana | 236.162.197,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Ketersediaan Pangan<br>Ketersediaan Pangan Utama | 214.000.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | - | 7.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Peningkatan Pengelolaan RTH | 18.700.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, | 55.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Terlaksananya pemberian penghargaan tentang lingkungan hidup | 237.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani | 11.967.296.634,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Rasio Konektivitas Kabupaten / Kinerja Lalu Lintas Kabupaten | 2.504.047.394,00 | Dinas Perhubungan |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Rasio Konektivitas Kabupaten | 29.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Indeks SPBE<br>Indeks SPBE | 907.903.717,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | - | 1.125.805.315,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Indeks SPBE<br>Indeks SPBE | 115.000.000,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | - | 71.497.376,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Jumlah Paket tender dengan Jumlah Permohonan Tender<br>Jumlah Paket tender dengan Jumlah Permohonan Tender / Laporan Tpid | 86.300.000,00 | Sekretariat Daerah |
| 6 | Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 128.925.400,00 | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%) / Kepemilikan Kartu Identitas Anak | 790.050.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Rasio bayi berakte kelahiran (%) / Rasio pasangan berakte nikah (%) | 63.058.220,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK | 16.507.195,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Indikator Kinerja | Pagu | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Ketersediaan Database Nasional Skala Provinsi | 40.066.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah<br>Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 1.228.161.000,00 | Sekretariat Daerah |
| | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Jumlah Paket tender dengan Jumlah Permohonan Tender<br>Jumlah Paket tender dengan Jumlah Permohonan Tender / Laporan Tpid | 1.056.427.330,00 | Sekretariat Daerah |
| | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota, Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | 16.883.810.910,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaaran Pembangunan Daerah | 1.336.183.259,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaaran Pembangunan Daerah | 1.296.047.611,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Indeks Daya Saing Daerah | 536.866.486,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | 283.033.329.384,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | 721.643.631,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase Keterisian Jabatan/Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ Jumlah Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin aparatur | 845.160.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | 1.185.250.640,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | - | 1.959.810.805,00 | Inspektorat Daerah |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | - | 454.570.180,00 | Inspektorat Daerah |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 27.718.970,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19.350.000,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | 21.816.552,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina dan Diawasi | 2.000.000,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 900.000.000,00 | Kelurahan Kampung Dalam |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 900.000.000,00 | Kelurahan Gung Negeri |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 900.000.000,00 | Kelurahan Padang Mas |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Indikator Kinerja | Pagu | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 900.000.000,00 | Kelurahan Lau Cimba |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 900.000.000,00 | Kelurahan Gung Leto |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | 95.515.363,00 | Kecamatan Berastagi |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 11.600.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 26.163.330,00 | Kecamatan Berastagi |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | 72.500.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 900.000.000,00 | Kelurahan Tambak Lau Mulgap II |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 900.000.000,00 | Kelurahan Tambak Lau Mulgap I |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 900.000.000,00 | Kelurahan Gundaling II |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 900.000.000,00 | Kelurahan Gundaling I |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 70.212.600,00 | Kecamatan Barusjahe |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 16.641.000,00 | Kecamatan Barusjahe |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | 36.492.280,00 | Kecamatan Barusjahe |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang di Bina Dan Di awasi | 17.038.400,00 | Kecamatan Barusjahe |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 40.000.000,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 15.891.300,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 26.340.550,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | 50.000.000,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi | 10.000.000,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | 33.188.400,00 | Kecamatan Merek |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 61.276.000,00 | Kecamatan Merek |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | 52.294.441,00 | Kecamatan Merek |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indek Kepuasan Masyarakat | 56.668.000,00 | Kecamatan Munte |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Indikator Kinerja | Pagu | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 15.817.440,00 | Kecamatan Munte |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 12.524.000,00 | Kecamatan Munte |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan kecamatan | 22.589.805,00 | Kecamatan Munte |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina dan Diawasi | 9.000.000,00 | Kecamatan Munte |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 57.437.081,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | 51.670.000,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi | 12.000.000,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | 900.000.000,00 | Kelurahan Tiga Binanga |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | 52.742.669,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 12.334.417,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | 31.818.850,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | 71.537.470,00 | Kecamatan Mardinding |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 2.000.000,00 | Kecamatan Mardinding |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan | 35.431.600,00 | Kecamatan Mardinding |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah pemerintah desa yang dibina dan diawasi | 11.968.000,00 | Kecamatan Mardinding |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 51.399.940,00 | Kecamatan Payung |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 23.987.100,00 | Kecamatan Payung |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | 20.882.304,00 | Kecamatan Payung |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi | 8.000.000,00 | Kecamatan Payung |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | 76.368.000,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | 11.150.000,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | - | 53.994.954,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 83.220.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Indikator Kinerja | Pagu | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 4.800.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | 35.075.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi | 9.600.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 40.976.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 15.000.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | 24.275.707,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi | 1.000.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85.339.810,00 | Kecamatan Merdeka |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 21.284.177,00 | Kecamatan Merdeka |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 17.000.000,00 | Kecamatan Merdeka |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | 28.834.275,00 | Kecamatan Merdeka |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi | 19.800.000,00 | Kecamatan Merdeka |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 61.628.370,00 | Kecamatan Namanteran |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 13.845.500,00 | Kecamatan Namanteran |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | 60.968.531,00 | Kecamatan Namanteran |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang di Bina Dan Diawasi | 12.000.000,00 | Kecamatan Namanteran |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | 29.552.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 26.000.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | 36.336.260,00 | Kecamatan Tiganderket |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang di Bina Dan Di awasi | 17.000.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional | 1.158.858.330,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

**Tabel 5.3**
**Dukungan Anggaran terhadap Tematik Penurunan Stunting**

| NO | STRATEGI | SUB KEGIATAN | JUMLAH (Rp) | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 2.291.742.795,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 830.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 1.175.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 360.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 712.460.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2 | Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 bulan | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 2.211.300.000,00 | DP3AP2KB |
| | | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | 375.000.000,00 | DP3AP2KB |
| | | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 440.000.000,00 | DP3AP2KB |
| | | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 538.000.000,00 | DP3AP2KB |
| 3 | Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | 1.059.000.000,00 | DP3AP2KB |
| | | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | 90.000.000,00 | DP3AP2KB |
| | | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 32.400.000,00 | DP3AP2KB |
| | | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 700.397.000,00 | DP3AP2KB |
| | | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 730.662.000,00 | DP3AP2KB |
| | | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 37.175.000,00 | DP3AP2KB |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 1.300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan | 930.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 25.481.320.139,00 | DINAS KESEHATAN |
| 4 | Komunikasi Perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 92.464.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 140.940.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 116.360.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | 151.118.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | STRATEGI | SUB KEGIATAN | JUMLAH (Rp) | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Pelaksanaan aksi Konvergensi untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas melalui penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 63.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | | Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil | 105.065.155,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 23.632.600,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM | 50.000.000,00 | DINAS PUTR |
| | | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 7.755.371.000,00 | DINAS PUTR |
| | | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 6.202.938.000,00 | DINAS PUTR |
| | | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 106.456.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 70.000.000,00 | BAPPEDALITBANG |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 70.000.000,00 | BAPPEDALITBANG |
| | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 74.986.175,00 | DPMD |
| | | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | 210.000.000,00 | BKPSDM |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 47.902.225,00 | DPMD |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 118.635.925,00 | DPMD |
| | | Pelayanan Informasi Publik | 50.000.000,00 | DINAS KOMINFO |
| | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 30.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam Satu Daerah Kabupaten Kota | 39.892.390,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 250.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

**Tabel 5.4**
**Dukungan Anggaran terhadap Tematik Substainable Development Goals/SDGs**

| NO | SUB KEGIATAN | JUMLAH (Rp) | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 2 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 3.171.360.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 3 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 30.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 4 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 10.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 5 | Evaluasi Pengadaan ASN dan PengadaanASN | 40.000.000,00 | BKPSDM |
| 6 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 750.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 7 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 39.578.295.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 8 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 9 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 66.600.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 10 | Evaluasi Pengadaan ASN dan PengadaanASN | 40.000.000,00 | BKPSDM |
| 11 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 12 | Penambahan Ruang Kelas Baru | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 13 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 950.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 750.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 15 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 16 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 70.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 50.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 18 | Evaluasi Pengadaan ASN dan PengadaanASN | 40.000.000,00 | BKPSDM |
| 19 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 235.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 20 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 346.250.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 21 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 22 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | 80.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 23 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 20.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 24 | Evaluasi Pengadaan ASN dan PengadaanASN | 40.000.000,00 | BKPSDM |

| NO | SUB KEGIATAN | JUMLAH (Rp) | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| 25 | Penyediaan Alat Bantu | 63.367.493,00 | DINAS SOSIAL |
| 26 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 106.456.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 27 | Penyediaan Makanan | 19.070.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 28 | Penyediaan Sandang | 73.057.655,00 | DINAS SOSIAL |
| 29 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 2.291.742.795,00 | DINAS KESEHATAN |
| 30 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 25.481.320.139,00 | DINAS KESEHATAN |
| 31 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 49.999.930,00 | DPMD |
| 32 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 84.360.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 33 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 471.370.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 34 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 39.892.390,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 35 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 45.100.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 36 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 63.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 37 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | 1.436.400.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| 38 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 1.174.778.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| 39 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 300.000.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| 40 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 10.000.000,00 | BPBD |
| 41 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 15.000.000,00 | BPBD |
| 42 | Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 50.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 43 | Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 189.964.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 44 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 7.755.371.000,00 | DINAS PUTR |
| 45 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 6.202.938.000,00 | DINAS PUTR |

| NO | SUB KEGIATAN | JUMLAH (Rp) | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| 46 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 1.300.000.000,00 | DINAS PUTR |
| 47 | Pembangunan Jalan | 31.900.986.556,00 | DINAS PUTR |
| 48 | Pembangunan Jembatan | 2.000.000.000,00 | DINAS PUTR |
| 49 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 50 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 350.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 51 | Pengembangan Rumah Sakit | 2.710.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 52 | Pengembangan Puskesmas | 486.110.683,00 | DINAS KESEHATAN |
| 53 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 54 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 2.550.847.818,00 | DINAS KESEHATAN |
| 55 | Pengadaan Obat, Vaksin | 3.716.603.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 56 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | 5.615.787.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 57 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 234.100.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 58 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 140.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 59 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 110.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 60 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 2.291.742.795,00 | DINAS KESEHATAN |
| 61 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 830.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 62 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 1.175.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 63 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 360.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 64 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 65 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 712.460.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 66 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 2.211.300.000,00 | DP3AP2KB |
| 67 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | 375.000.000,00 | DP3AP2KB |
| 68 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 440.000.000,00 | DP3AP2KB |

| NO | SUB KEGIATAN | JUMLAH (Rp) | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| 69 | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 538.000.000,00 | DP3AP2KB |
| 70 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | 1.059.000.000,00 | DP3AP2KB |
| 71 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | 90.000.000,00 | DP3AP2KB |
| 72 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 32.400.000,00 | DP3AP2KB |
| 73 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 700.397.000,00 | DP3AP2KB |
| 74 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 730.662.000,00 | DP3AP2KB |
| 75 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 37.175.000,00 | DP3AP2KB |
| 76 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 1.300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 77 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan | 930.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 78 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 25.481.320.139,00 | DINAS KESEHATAN |
| 79 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 92.464.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| 80 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 140.940.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 81 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 116.360.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 82 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | 151.118.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 83 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 63.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 84 | Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil | 105.065.155,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 85 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 23.632.600,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 86 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM | 50.000.000,00 | DINAS PUTR |
| 87 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 7.755.371.000,00 | DINAS PUTR |
| 88 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 6.202.938.000,00 | DINAS PUTR |

| NO | SUB KEGIATAN | JUMLAH (Rp) | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| 89 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 106.456.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 90 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 70.000.000,00 | BAPPEDALITBANG |
| 91 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 70.000.000,00 | BAPPEDALITBANG |
| 92 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 74.986.175,00 | DPMD |
| 93 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | 210.000.000,00 | BKPSDM |
| 94 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 47.902.225,00 | DPMD |
| 95 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 118.635.925,00 | DPMD |
| 96 | Pelayanan Informasi Publik | 50.000.000,00 | DINAS KOMINFO |
| 97 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 30.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 98 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam Satu Daerah Kabupaten Kota | 39.892.390,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 99 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 250.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 100 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 7.755.371.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TAT RUANG |
| 101 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TAT RUANG |
| 102 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TAT RUANG |
| 103 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 6.202.938.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TAT RUANG |
| 104 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TAT RUANG |
| 105 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TAT RUANG |

**Tabel 5.5**
**Dukungan Anggaran terhadap Tematik Kemiskinan Ekstrem**

| NO | SUB KEGIATAN | JUMLAH (Rp) | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (SD) | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 2 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (SMP) | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 3 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan | 75.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 4 | Penyediaan Alat Bantu | 63.367.493,00 | DINAS SOSIAL |
| 5 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 106.456.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 6 | Penyediaan Makanan | 19.070.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 7 | Penyediaan Sandang | 73.057.655,00 | DINAS SOSIAL |
| 8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 2.291.742.795,00 | DINAS KESEHATAN |
| 9 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 25.481.320.139,00 | DINAS KESEHATAN |
| 10 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 49.999.930,00 | DPMD |
| 11 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 84.360.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 12 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 471.370.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 13 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 39.892.390,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 14 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 45.100.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 15 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 63.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| 16 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | 1.436.400.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| 17 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 1.174.778.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| 18 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 300.000.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| 19 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 10.000.000,00 | BPBD |
| 20 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 15.000.000,00 | BPBD |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 50.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 22 | Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 189.964.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 23 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 7.755.371.000,00 | DINAS PUTR |
| 24 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 6.202.938.000,00 | DINAS PUTR |
| 25 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 1.300.000.000,00 | DINAS PUTR |
| 26 | Pembangunan Jalan | 31.900.986.556,00 | DINAS PUTR |
| 27 | Pembangunan Jembatan | 2.000.000.000,00 | DINAS PUTR |
| 28 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 29 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 350.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 30 | Pengembangan Rumah Sakit | 2.710.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 31 | Pengembangan Puskesmas | 486.110.683,00 | DINAS KESEHATAN |
| 32 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 33 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 2.550.847.818,00 | DINAS KESEHATAN |
| 34 | Pengadaan Obat, Vaksin | 3.716.603.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 35 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | 5.615.787.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 36 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 234.100.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 37 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 140.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 38 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 110.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |

# BAB VI
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci pada akhir tahun perencanaan.

Adapun indikator kinerja dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan disajikan pada tabel 6.1 dan 6.2 di bawah ini.

**Tabel 6.1**
**Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karo Tahun 2024**

| NO | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Tahun 2022 | | Target Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Capaian | |
| 1 | Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (*Ombudsman*) | Nilai | 57 | 67,15 | 70 |
| 2 | Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Nilai | C | C | 67 |
| 3 | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini | WTP | WTP | WTP |
| 4 | Indeks Profesionalisme ASN | poin | 55 | 42,5 | 65 |
| 5 | Skor LPPD | poin | 2,88 | 2,784 | 3,08 |
| 6 | Indeks SPBE | indeks | 2,2 | 2,06 | 2,7 |
| 7 | Rata-rata lama sekolah | tahun | 9,86 | 10,02 | 10,43 |
| 8 | Harapan Lama Sekolah | tahun | 12,82 | 12,76 | 12,88 |
| 9 | Indeks Aktivitas Literasi Membaca Masyarakat (Alibaca) | Indeks | 21,36 | 71,22 | 73,00 |
| 10 | Angka Harapan Hidup | tahun | 71,65 | 72,03 | 72,15 |
| 11 | Indeks Pembangunan Gender | % | 96,35 | 95,90 | 96,45 |
| 12 | Persentase Penegakan PERDA | % | 73,83 | 100 | 100 |
| 13 | Persentase PMKS yang tertangani | % | 50 | - | 57,69 |
| 14 | Persentase Peningkatan PDRB (ADHB) | persen | 3 | - | 5 |
| 15 | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif | pelaku | 1.000 | N/A | 1.200 |
| 16 | BUMD/Perusda | BUMD | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Skor pola pangan harapan (%) | persen | 87,50 | 86,50 | 90,5 |
| 18 | Jumlah kunjungan wisatawan | orang | 718.500 | 500.656 | 1.101.000 |
| 19 | Lama Kunjungan Wisatawan | hari | 1,3 | N/A | 1,50 |
| 20 | Jumlah benda dan situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | cagar budaya | 10 | N/A | 20 |
| 21 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | kali | 7 | N/A | 11 |
| 22 | Jumlah wirausaha baru | wirausaha | 50 | 86 | 50 |
| 23 | Persentase Pencari Kerja yang dilatih | persen | 20 | 79,97 | 80 |
| 24 | Nilai Investasi | triliun | 6,24 T | 6,40 T | 6,51 |
| 25 | Pendapatan Asli Daerah | Rupiah | 104.715.231.925,00 | 103.413.183.549,00 | 110.825.754.862,00 |

| NO | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Tahun 2022 | | Target Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Capaian | |
| 26 | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | % | 63,00 | 62,12 | 66 |
| 27 | Persentase rurnah tinggal bersanitasi layak | % | 74,08 | 74,01 | 75,08 |
| 28 | Persentase penduduk berakses air minum layak | % | 68,702 | 68,701 | 68,706 |
| 29 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | % | 50,11 | 51,98 | 51,11 |
| 30 | Persentase drainase dalam kondisi baik (pembuangan aliran air tidak tersumbat) | % | 61 | 61,82 | 63 |
| 31 | Gedung pemerintahan yang layak dan baik | % | 62 | 62 | 66 |
| 32 | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | % | 100 | 81,13 | 100 |
| 33 | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyedia rumah yang layak huni | % | 100 | 100 | 100 |
| 34 | Persentasi luas kawasan kumuh yang ditangani | % | 20 | 80 | 8060,00 |
| 35 | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) | % | 97,10 | 80 | 98,70 |
| 36 | Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | Lokasi | 2 | - | 2 |
| 37 | Rasio konektivitas kabupaten | % | 93,94 | 93,94 | 95 |
| 38 | Kinerja lalu lintas kabupaten | rasio | 0,77 | 0,35 | 0,28 |
| 39 | Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air | indeks | 53,81 | 50 | 54,01 |
| 40 | Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara | indeks | 54,41 | 51,60 | 87,01 |
| 41 | Hasil pengukuran tutupan lahan | indeks | 54,41 | 51,60 | 58,48 |
| 42 | Luasan RTH publik di wilayah kota/kawasan perkotaan | % | 25 | 25 | 27 |
| 43 | Ketaatan terhadap RTRW | % | 70 | 50 | 77 |
| 44 | Persentase jumlah sampah yang tertangani (di wilayah pelayanan) | % | 75,00 | 85,11 | 77 |
| 45 | Indeks Kapasitas Daerah (IKD) | indeks | 0,52 | - | 0,54 |

*Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Karo, 2023 (diolah)*

# Tabel 6.2
# Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2022 | | Target 2024 | Penanggung Jawab/Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Capaian | | |
| **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan PDRB | % | 3,40-3,80 | 4,22 | 4,20-4,60 | BPS |
| 2 | PDRB per kapita | ADHB | 52.218.108 | 57.852.050 | 57.022.174 | BPS |
| | | ADHK | 34.815.805 | 36.670.980 | 36.577.484 | BPS |
| 3 | Indeks Gini | indeks | 0,270 | 0,236 | 0,233 | BPS |
| 4 | Persentase penduduk di atas garis kemiskinan | % | 91,10 | 91,83 | 92,16 | BPS |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | indeks | 74,53 | 75,36 | 76,20 | BPS |
| 6 | Angka rata-rata lama sekolah | tahun | 9,86 | 75,36 | 9,99 | DIKNAS |
| 7 | Angka usia harapan hidup | Angka | 71,65 | 72,03 | 71,90 | DINKES |
| 8 | Persentase balita gizi buruk | % | 2 | 10,02 | 2 | DINKES |
| 9 | Prevalensi balita gizi kurang | % | 3 | 72,03 | 2 | DINKES |
| 10 | Cakupan Desa Siaga Aktif | % | 35,3 | 1,8 | 50,2 | |
| 11 | Angka partisipasi angkatan kerja | % | 83,94 | 4,5 | 83,95 | DISNAKERKUKM |
| 12 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | % | 83,94 | 85,11 | 83,95 | DISNAKERKUKM |
| 13 | Tingkat pengangguran terbuka | % | 1,75 | 85,12 | 1,45 | DISNAKERKUKM |
| 14 | Rasio penduduk yang bekerja | % | 98,25 | 85,12 | 98,32 | DISNAKERKUKM |
| 15 | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja | % | 0,04 | 2,71 | 0,06 | DISNAKERKUKM |
| 16 | Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas | % | 83,94 | 97,25 | 83,95 | DISNAKERKUKM |
| 17 | Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja | % | 25 | 27,6 | 25.6 | DISNAKERKUKM |
| 18 | Indeks Kepuasan Masyarakat | indeks | 83 | 85,11 | 89 | |
| 19 | Persentase PAD terhadap pendapatan | % | 7,38 | 7,46 | 7,99 | |
| 20 | Opini BPK | opini | WTP | WTP | WTP | BKAD |
| 21 | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) | persen | 87,5 | 86,4 | 90,5 | DKPP |
| 22 | Penguatan Cadangan Pangan | ton | 100 | 18 | 100 | DKPP |
| 23 | Penanganan daerah rawan pangan | persen | 0,12 | 0,00 | 0,06 | DKPP |
| 24 | Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB | % | 51,94 | N/A | 51,00 | DISTAN |
| 25 | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB | % | 100 | N/A | 100 | DISTAN |
| 26 | Produksi sektor pertanian | Ton | 12.298.598 | 1.967.188 | 13.559.204 | DISTAN |
| 27 | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB | % | 5,78 | N/A | 5,72 | DISTAN |
| 28 | Produksi sektor perkebunan | Ton | 1.383.930 | 23.811 | 1.525.783 | DISTAN |
| 29 | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB | % | 100 | N/A | 100 | DISTAN |
| 30 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | Persen | 14,01 | | 15,45 | DKPOP |
| 31 | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | persen | 10,58 | 12,60 | 11,18 | DISPERINDAG |
| 32 | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | persen | 3,75 | 3,80 | 3,82 | DISPERINDAG |
| 33 | Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri | persen | 34,75 | 3,80 | 35,61 | DISPERINDAG |
| 34 | Pertumbuhan Industri | persen | 3,64 | 0,18 | 3,92 | DISPERINDAG |
| **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | |
| 1 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita | ribu | 1.469.630 | | 1.680.507 | |
| 2 | Nilai tukar petani | N/A | N/A | N/A | N/A | DISTAN |
| 3 | Persentase pengeluaran konsumsi nonpangan perkapita | % | 38,4 | | 38,4 | |
| 4 | Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) | persen | 28,51 | 12,69 | 29,66 | DISPERINDAG |
| 5 | Rasio ketergantungan | rasio | 46,93 | | 47,57 | DISDUKCAPIL |
| 6 | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan | izin | 1200 | | 1200 | DPMPTSP |
| **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | |
| **Layanan Urusan Wajib Dasar** | | | | | | |
| **1** | **Pendidikan** | | | | | **DIKNAS** |
| 1.1. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | % | 17,7 | | 25 | DIKNAS |
| 1.2. | Angka Partisipasi Kasar | | | | | |
| 1.2.1. | Angka partisipasi kasar SD | % | 105,00 | | 104,00 | DIKNAS |
| 1.2.2. | Angka partisipasi kasar SMP | % | 93 | | 97 | DIKNAS |
| 1.3. | Angka pendidikan yang ditamatkan | | | | | |
| 1.3.1 | Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A | % | 16 | | 18 | DIKNAS |
| 1.3.2 | Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B | % | 17 | | 18 | DIKNAS |
| 1.4. | Angka Partisipasi Murni | | | | | DIKNAS |
| 1.4.1. | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | % | 99 | 99,5 | 100 | DIKNAS |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2022 | | Target 2024 | Penanggung Jawab/Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Capaian | | |
| 1.4.2. | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | % | 88,37 | 84,17 | 91,98 | DIKNAS |
| 1.5. | Angka partisipasi sekolah | % | | | | DIKNAS |
| 1.5.1. | Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A | % | 97,0 | 96,4 | 97,8 | DIKNAS |
| 1.5.2. | Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B | % | 92,5 | 77,6 | 93,5 | DIKNAS |
| 1.6. | Angka Putus Sekolah: | | | | | DIKNAS |
| 1.6.1. | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | % | 0,02 | 0,05 | 0,01 | DIKNAS |
| 1.6.2. | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | % | 0,02 | 0,12 | 0,01 | DIKNAS |
| 1.7. | Angka Kelulusan: | | | | | DIKNAS |
| 1.7.1. | Angka Kelulusan SD/MI/Paket A | % | 100 | 100 | 100 | DIKNAS |
| 1.7.2. | Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B | % | 100 | 100 | 100 | DIKNAS |
| 1.8. | Angka Melanjutkan (AM): | | | | | DIKNAS |
| 1.8.1. | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | % | 100 | | 100 | DIKNAS |
| 1.8.2. | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | % | 94,50 | | 95,50 | DIKNAS |
| 1.9. | Fasilitas Pendidikan: | | | | | DIKNAS |
| 1.9.1. | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | % | 96,00 | 47,00 | 98,00 | DIKNAS |
| 1.9.2. | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | % | 83,00 | 48,00 | 85,00 | DIKNAS |
| 1.10. | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar | % | 52,04 | 52,53 | 52,04 | DIKNAS |
| 1.11. | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar | % | 674 | | 675 | DIKNAS |
| 1.12. | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar | % | 16,00 | 6,66 | 17 | DIKNAS |
| 1.13. | Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar | % | 96 | 100 | 98 | DIKNAS |
| 1.14. | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki | % | 100 | | 100 | DIKNAS |
| 1.15. | Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | % | 99,65 | | 99,75 | DIKNAS |
| 1.16. | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | % | 94,74 | 91,3 | 100 | DIKNAS |
| **2** | **Kesehatan** | | | | | **DINKES** |
| 2.1. | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | Rasio | 6,74 | 4,7 | 6,50 | DINKES |
| 2.2. | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup | Rasio | 10 | 4,9 | 9 | DINKES |
| 2.3. | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup | Rasio | 5,00 | 3,60 | 5,00 | DINKES |
| 2.4. | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup | Rasio | 90 | 32,6 | 86 | DINKES |
| 2.5. | Rasio posyandu per 1000 balita | Rasio | 8,8 | 9,6 | 9,3 | DINKES |
| 2.6. | Rasio puskesmas per 1.000 penduduk | Rasio | 0,05 | 0,04 | 0,04 | DINKES |
| 2.7. | Rasio Poliklinik per 1.000 penduduk | Rasio | 0,11 | 0,18 | 0,11 | DINKES |
| 2.8. | Rasio Pustu per 1.000 Penduduk | Rasio | 0,5 | 0,5 | 0,5 | DINKES |
| 2.9. | Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk | Rasio | 0,01 | 0,01 | 0,01 | DINKES |
| 2.10. | Rasio Dokter Umum per 1000 penduduk | Rasio | 0,27 | 0,25 | 0,27 | DINKES |
| 2.11. | Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk | Rasio | 13,15 | 7,60 | 13,05 | DINKES |
| 2.12. | Rasio Dokter Gigi per 1.000 penduduk | Rasio | 0,08 | 0,07 | 0,08 | DINKES |
| 2.13. | Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk | Rasio | 0,49 | 0,40 | 0,50 | DINKES |
| 2.14. | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | % | 100 | 84 | 100 | DINKES |
| 2.15. | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | % | 100 | 73 | 100 | DINKES |
| 2.16. | Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) | % | 96,00 | 98,14 | 96,00 | DINKES |
| 2.17. | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | % | 100 | 100 | 100 | DINKES |
| 2.18. | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | % | 90,00 | 104,00 | 90,00 | DINKES |
| 2.19. | *NonPolio AFP rate* per 100.000 penduduk | rasio | 2,00 | Tidak ada kasus | 2,00 | DINKES |
| 2.20. | Cakupan balita pneumonia yang ditangani | % | 10 | Tidak ada kasus | 10 | DINKES |
| 2.21. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | % | 73 | 55 | 75 | DINKES |
| 2.22. | Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | rasio | 231 | 40 | 190 | DINKES |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2022 | | Target 2024 | Penanggung Jawab/Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Capaian | | |
| 2.23. | Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | rasio | 4,00 | 0,95 | 4,00 | DINKES |
| 2.24. | Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS | % | 75,00 | 63,50 | 75,00 | DINKES |
| 2.25. | Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS | % | 90,00 | 89,60 | 90,00 | DINKES |
| 2.26. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | % | 100 | 100 | 100 | DINKES |
| 2.27. | Cakupan penderita diare yang ditangani | % | 78,00 | 93,50 | 78,00 | DINKES |
| 2.28. | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi | % | 0,50 | 0,00 | 0,50 | DINKES |
| 2.29. | Cakupan kunjungan bayi | % | 100 | 86 | 100 | DINKES |
| 2.30. | Cakupan puskesmas | % | 111,76 | 111,80 | 117,65 | DINKES |
| 2.31. | Cakupan pembantu puskesmas | % | 79,60 | 78,40 | 80,30 | DINKES |
| 2.32. | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 | % | 100,00 | 68,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.33. | Cakupan pelayanan nifas | % | 100,00 | 70,20 | 100,00 | DINKES |
| 2.34. | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | % | 20,00 | 73,50 | 40,00 | DINKES |
| 2.35. | Cakupan pelayanan anak balita | % | 100,00 | 73,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.36. | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.37. | Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat | % | 100,00 | 91,90 | 100,00 | DINKES |
| 2.38. | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | % | 80,00 | 80,00 | 80,00 | DINKES |
| 2.39. | Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.40. | Persentase balita stunting | % | 28,00 | 16,26 | 25,00 | DINKES |
| 2.41. | Cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.42. | Cakupan pelayanan ibu bersalin sesuai standar | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.43. | Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.44. | Cakupan pelayanan kesehatan anak balita sesuai standar | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.45. | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.46. | Persentase Orang Usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 100,00 | 41,20 | 100,00 | DINKES |
| 2.47. | Persentase Warga Negara Usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.48. | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.49. | Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINKES |
| 2.50. | Persentase Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | % | 100,00 | 27,50 | 100,00 | DINKES |
| 2.51. | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100,00 | 71,30 | 100,00 | DINKES |
| 2.52. | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | % | 100,00 | 33,32 | 100,00 | DINKES |
| 2.53. | Cakupan Vaksinasi Covid-19 | % | 80,00 | 89,30 | 80,00 | DINKES |
| 2.54. | Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi | % | 86 | 110 | 90 | DINKES |
| 2.55. | Persentase Posyandu aktif | % | 100 | 100 | 100 | DINKES |
| 2.56. | Persentase sarana Puskesmas sesuai standar | % | 78,95 | 78,95 | 84,21 | DINKES |
| 2.57. | Persentase Puskesmas dengan kelengkapan alat kesehatan sesuai standar | % | 47,37 | 36,84 | 68,42 | DINKES |
| 2.58. | Persentase sarana puskesmas pembantu sesuai standar | % | 69,05 | 75,83 | 73,81 | DINKES |
| 2.59. | Cakupan masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | % | 75,05 | 85,27 | 76,25 | DINKES |
| 2.60. | Persentase Puskesmas terakreditasi | % | 100 | 100 | 100 | DINKES |
| 2.61. | Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional | % | 100 | 100 | 100 | DINKES |
| 2.62. | Persentase ketersediaan obat esensial di Puskesmas | % | 90 | 90 | 93 | DINKES |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2022 | | Target 2024 | Penanggung Jawab/Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Capaian | | |
| 2.63. | Persentase Puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai standar | % | 63,16 | 63,16 | 79,00 | DINKES |
| 2.64. | Persentase Sarana Rumah Sakit sesuai standar | % | 80 | 80 | 90 | RSU |
| 2.65. | Persentase Prasarana Rumah Sakit sesuai standar | % | 95 | 85 | 95 | RSU |
| **3** | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | **DPUTR** |
| **3.1.** | **Pekerjaan Umum:** | | | | | DPUTR |
| 3.1.1. | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | % | 63,00 | 61,54 | 66,00 | DPUTR |
| 3.1.2. | Persentase rumah tinggal bersanitasi layak | % | 74,08 | 74,57 | 74,68 | DPUTR |
| 3.1.3. | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | % | 61 | 59,5 | 63 | DPUTR |
| 3.1.4. | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | % | 50,11 | 49,35 | 51,11 | DPUTR |
| 3.1.5. | Persentase penduduk berakses air minum layak | % | 68,702 | 70,350 | 68,706 | DPUTR |
| 3.1.6. | Persentase penanganan sampah | % | 75 | | 77 | DPUTR |
| **3.2.** | **Penataan Ruang:** | | | | | **DPUTR** |
| 3.2.1. | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | % | 25 | 25 | 27 | DPUTR |
| 3.2.2. | Ketaatan terhadap RTRW | % | 75 | 72 | 77 | DPUTR |
| 3.2.3. | Meningkatnya SDM Tenaga terampil konstruksi | Orang | 50 | 0 | 50 | DPUTR |
| 3.2.4. | Gedung Pemerintahan yang layak dan baik | % | 62 | 61,5 | 66 | DPUTR |
| **4** | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** | | | | | **DPKPP** |
| 4.1. | Rasio rumah layak huni | % | 100,00 | 63,30 | 100,00 | DPKPP |
| 4.2. | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani | % | 25,09 | 25,09 | 64,52 | DPKPP |
| 4.3. | Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | % | 97,10 | 97,10 | 98,70 | DPKPP |
| 4.4. | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | % | 100,00 | 81,30 | 100,00 | DPKPP |
| 4.5. | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyedia rumah yang layak huni | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DPKPP |
| 4.6. | Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | lokasi | 2 | 0 | 2 | DPKPP |
| **5.1** | **Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | **SATPOL PP & BPBD** |
| 5.1. | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | % | 0,267 | 0,267 | 0,521 | SATPOL PP |
| 5.2. | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | % | 2,05 | 1,86 | 2,48 | SATPOL PP |
| 5.3. | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | % | 0,41 | 0,41 | 0,51 | SATPOL PP |
| 5.4. | Tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | % | 1,6 | 1,6 | 1,8 | SATPOL PP |
| 5.5. | Persentase Penegakan PERDA | % | 73,83 | 73,83 | 74,38 | SATPOL PP |
| **5.2.** | **Bencana** | | | | | **BPBD** |
| 5.2.1. | Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Orang | 12414 | 11261 | 13514 | BPBD |
| 5.2.2. | Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Orang | 5694 | 5062 | 9219 | BPBD |
| 5.2.3 | Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Orang | 19326 | 21455 | 19956 | BPBD |
| | Indeks Kapasitas Daerah | indeks | 0,52 | 0,47 | 0,54 | |
| **6** | **Sosial** | | | | | **DINSOS** |
| 6.1. | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | % | 50,00 | 50,00 | 58,00 | DINSOS |
| 6.2. | Persentase PMKS yang tertangani | % | 50,00 | 50,00 | 58,00 | DINSOS |
| 6.3. | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | % | 62,08 | 53,85 | 63,72 | DINSOS |
| 6.4. | Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan | % | 13,00 | 9,41 | 24,00 | DINSOS |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2022 | | Target 2024 | Penanggung Jawab/Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Capaian | | |
| | sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | | | | | |
| 6.5. | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINSOS |
| 6.6. | Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINSOS |
| 6.7. | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINSOS |
| 6.8. | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DINSOS |
| 6.9. | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | % | 16,98 | 13,51 | 18,74 | DINSOS |
| 6.10. | Persentase keakuratan data program perlindungan jaminan sosial | % | 39,06 | 66,54 | 78,13 | DINSOS |
| **Layanan Urusan Wajib Non Dasar** | | | | | | |
| **1** | **Tenaga Kerja** | | | | | **DISNAKERKUKM** |
| 1.1. | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | % | 0 | 0 | 0 | DISNAKERKUKM |
| 1.2. | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | % | 0 | 0 | 0 | DISNAKERKUKM |
| 1.3. | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | % | 64 | 79,97 | 68 | DISNAKERKUKM |
| 1.4. | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | % | 93 | 93 | 94 | DISNAKERKUKM |
| 1.5. | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | % | 0 | 0 | 0 | DISNAKERKUKM |
| 1.6. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | % | 40 | 16 | 60 | DISNAKERKUKM |
| 1.7. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | % | 50 | 16 | 50 | DISNAKERKUKM |
| 1.8. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | % | 20 | 0 | 20 | DISNAKERKUKM |
| 1.9. | Rasio lulusan S1/S2/S3 | % | 15 | 1,21 | 15 | DISNAKERKUKM |
| **2** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | **DP3AP2KB** |
| 2.1. | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | % | 3,67 | 3,57 | 3,76 | DP3AP2KB |
| 2.2. | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | % | 28,57 | 28,57 | 30 | DP3AP2KB |
| 2.3. | Rasio KDRT | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | DP3AP2KB |
| 2.4. | Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur | % | 0 | 0 | 0 | DP3AP2KB |
| 2.5. | Partisipasi angkatan kerja perempuan | % | 98,65 | 98,65 | 98,67 | DP3AP2KB |
| 2.6. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | % | 100 | 100 | 100 | DP3AP2KB |
| 2.7. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | % | 100 | 100 | 100 | DP3AP2KB |
| 2.8. | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. | % | 75 | 100 | 75 | DP3AP2KB |
| 2.9. | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | % | 80 | 100 | 80 | DP3AP2KB |
| 2.10. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | % | 50 | 50 | 50 | DP3AP2KB |
| 2.11. | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | % | 100 | 100 | 100 | DP3AP2KB |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2022 | | Target 2024 | Penanggung Jawab/Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Capaian | | |
| 2.12. | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | % | 100 | 100 | 100 | DP3AP2KB |
| 2.13. | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | % | 70 | 70 | 70 | DP3AP2KB |
| **3** | **Pangan** | | | | | **DKPP** |
| 3.1. | Ketersediaan pangan utama | Persen | 43,09 | 45,86 | 44,04 | DKPP |
| 3.2. | Ketersediaan energi dan protein perkapita | Kkal/kap/hari | Energi = 2.400 | 4400 | Energi = 2.400 | DKPP |
| | | gr/hari | Protein =63 | 99,89 | Protein =63 | DKPP |
| 3.3. | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (PSAT) | % | 100 | 100 | 100 | DKPP |
| **4** | **Pertanahan** | | | | | **DPKPP** |
| 4.1. | Persentase luas lahan bersertifikat | Ha | 2,50 | 0,00 | 1,30 | DPKPP |
| 4.2. | Penyelesaian kasus tanah Negara | kasus | 1,00 | 0,00 | 1,00 | DPKPP |
| 4.3. | Penyelesaian izin lokasi | lokasi | 2,00 | 0,00 | 2,00 | **DLH** |
| **5** | **Lingkungan Hidup** | | | | | **DLH** |
| 5.1. | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota | ada | | ada | | DLH |
| 5.2. | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota | ada | | | ada | DLH |
| 5.3. | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi | ada | ada | ada | ada | DLH |
| 5.4. | Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air | indeks | 53,81 | 50 | 54,01 | DLH |
| 5.5. | Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara | indeks | 86,81 | 88,78 | 87,01 | DLH |
| 5.6. | Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan | indeks | 54,41 | 51,6 | 58,48 | DLH |
| 5.7. | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota | % | 100 | 100 | 100 | DLH |
| 5.8. | Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota | orang | 4 | 0 | 8 | DLH |
| 5.9. | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat | kali | 13 | 3 | 13 | DLH |
| 5.10. | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | ada | ada | ada | ada | DLH |
| 5.11. | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. | % | 100 | 100 | 100 | DLH |
| 5.12. | Timbulan sampah yang ditangani | % | 80 | 85,11 | 84 | DLH |
| 5.13. | Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R | ton | 30 | 4 | 70 | DLH |
| 5.14. | Persentase cakupan area pelayanan | % | 30 | 35 | 35 | DLH |
| 5.15. | Persentase jumlah sampah yang tertangani | % | 80 | 85 | 84 | DLH |
| 5.16. | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota | nilai | 0 | N/A | 75 | DLH |
| 5.17. | Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan | n/a | n/a | N/A | n/a | DLH |
| 5.18. | Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan | n/a | n/a | N/A | n/a | DLH |
| 5.19. | Jumlah rekomendasi izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 | jumlah izin | | 1 | 10 | DLH |
| **6** | **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | **DISDUKCAPIL** |
| 6.1. | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | % | 100 | 109,32 | 100 | DISDUKCAPIL |
| 6.2. | Rasio bayi berakte kelahiran | % | 97 | 98 | 100 | DISDUKCAPIL |
| 6.3. | Rasio pasangan berakte nikah | % | 60 | 57,03 | 100 | DISDUKCAPIL |
| 6.4. | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi | Ada/Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | DISDUKCAPIL |
| 6.5. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah/Belum | Sudah | Sudah | Sudah | DISDUKCAPIL |
| 6.6. | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | % | 100 | 109,32 | 100 | DISDUKCAPIL |
| 6.7. | Cakupan penerbitan akta kelahiran | % | 60 | 60,72 | 80 | DISDUKCAPIL |
| 6.8. | Kepemilikan Kartu Identitas Anak | % | 40 | 47,55 | 60 | DISDUKCAPIL |
| **7** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | **DPMD** |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2022 | | Target 2024 | Penanggung Jawab/Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Capaian | | |
| 7.1. | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik | % | 70,66 | 57,91 | 73,9 | DPMD |
| 7.2. | Rata-rata kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | kelompok | 0,10 | 0,10 | 0,15 | DPMD |
| 7.3. | Rata-rata jumlah kelompok binaan pkk | % | 100 | 85 | 100 | DPMD |
| 7.4. | Persentase LPM Berprestasi | % | 0,10 | 0,10 | 0,20 | DPMD |
| 7.5. | Persentase PKK Aktif | % | 100 | 100 | 100 | DPMD |
| 7.6. | Persentase Posyandu Aktif | % | 100 | 100 | 100 | DPMD |
| 7.7. | Persentase LSM aktif | % | 80 | 0,8 | 80 | BAKESBANGPOL |
| **8** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | **DP3AP2KB** |
| 8.1. | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | | 1,10 | 1,10 | 1,05 | DP3AP2KB |
| 8.2. | Total Fertility Rate (TFR) | | 2,25 | | 2,21 | DP3AP2KB |
| 8.3. | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | % | 37,96 | 100 | 51,95 | DP3AP2KB |
| 8.4. | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | | 60 | 60 | 63 | DP3AP2KB |
| 8.5. | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan | Kelompok | 4 | 4 | 7 | DP3AP2KB |
| 8.6. | Rata-rata jumlah anak per keluarga | | 3 | 3 | 3 | DP3AP2KB |
| 8.7. | Ratio Akseptor KB | % | 65,54 | | 69,09 | DP3AP2KB |
| 8.8. | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 | % | 65,64 | 45 | 66,36 | DP3AP2KB |
| 8.9. | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | % | 17,78 | 25 | 17,23 | DP3AP2KB |
| 8.10. | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | % | 43 | 44 | 44,2 | DP3AP2KB |
| 8.11. | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | % | 46,28 | 45 | 46,67 | DP3AP2KB |
| 8.12. | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | orang | 581 | 283 | 800 | DP3AP2KB |
| 8.13. | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | orang | 500 | 177 | 700 | DP3AP2KB |
| 8.14. | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | orang | 499 | 158 | 552 | DP3AP2KB |
| 8.15. | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa | orang | 457 | 360 | 538 | DP3AP2KB |
| 8.16. | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | % | 100 | 100 | 100 | DP3AP2KB |
| 8.17. | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri | orang | 50 | 50 | 150 | DP3AP2KB |
| 8.18. | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | DP3AP2KB |
| 8.19. | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | DP3AP2KB |
| 8.20. | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | % | 70 | 700 | 80 | DP3AP2KB |
| 8.21. | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | orang | 2010 | 15,49 | 2098 | DP3AP2KB |
| 8.22. | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | orang | 800 | 700 | 950 | DP3AP2KB |
| **9** | **Perhubungan** | | | | | **DISHUB** |
| 9.1. | Jumlah arus penumpang angkutan umum | orang | 4.697.705 | 5.078.158 | 5.458.610 | DISHUB |
| 9.2. | Rasio ijin trayek | % | 0,088148 | 0,036946 | 0,036855 | DISHUB |
| 9.3. | Jumlah uji kir angkutan umum dan barang | unit | 2.673 | 5.346 | 5.346 | DISHUB |
| 9.4. | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | buah | 3 | 3 | 4 | DISHUB |
| 9.5. | Persentase layanan angkutan darat (dalam kabupaten) | % | 93,94 | 95,00 | 95,00 | DISHUB |
| 9.6. | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | % | 26,99 | 27,00 | 70,00 | DISHUB |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2022 | | Target 2024 | Penanggung Jawab/Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Capaian | | |
| 9.7. | Pemasangan Rambu-rambu | % | 2 | 2 | 4 | DISHUB |
| 9.8. | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | % | 0,0384 | 0,0375 | 0,0366 | DISHUB |
| 9.9. | Jumlah orang yang terangkut angkutan umum | orang | 4.697.705 | 5.078.158 | 5.458.610 | DISHUB |
| 9.10. | Rasio konektivitas kabupaten | % | 93,94 | 95 | 95 | DISHUB |
| 9.11. | Kinerja lalu lintas kabupaten | rasio | 0,77 | 0,77 | 0,77 | DISHUB |
| **10** | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | **DISKOMINFO** |
| 10.1. | Cakupan Layanan Telekomunikasi | % | 86,99 | 85,50 | 86,99 | DISKOMINFO |
| 10.2. | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | % | 62 | 60,44 | 78 | DISKOMINFO |
| 10.3. | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | % | 62 | 53,31 | 78 | DISKOMINFO |
| 10.4. | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi | % | 14 | 16,17 | 17 | DISKOMINFO |
| 10.5. | Indeks SPBE | indeks | 2,2 | 2,41 | 2,7 | DISKOMINFO |
| **11** | **Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah** | | | | | **DISNAKERKUKM** |
| 11.1. | Persentase koperasi aktif | % | 63,87 | 52,26 | 64,51 | DISNAKERKUKM |
| 11.2. | Persentase UKM non BPR/LKM aktif | % | 91 | 90 | 93 | DISNAKERKUKM |
| 11.3. | Persentase BPR/LKM aktif | n/a | n/a | 0 | n/a | DISNAKERKUKM |
| 11.4. | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | % | 99 | 99 | 99 | DISNAKERKUKM |
| **12** | **Penanaman Modal** | | | | | **DPMPTSP** |
| 12.1. | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | investor | 77 | 81 | 84 | DPMPTSP |
| 12.2. | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Rp. (dalam triliun) | 6,24 | 6,44 | 6,51 | DPMPTSP |
| 12.3. | Rasio daya serap tenaga kerja | persen | 83,75 | 84,7 | 78,2 | DPMPTSP |
| 12.4. | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | persen | 1,8 | | 2,19 | DPMPTSP |
| **13** | **Kepemudaan dan Olah Raga** | | | | | **DKPOP** |
| 13.1. | Persentase organisasi pemuda yang aktif | % | 40 | 1 | 47 | DKPOP |
| 13.2. | Persentase wirausaha muda | % | 13,5 | - | 15,5 | DKPOP |
| 13.3. | Cakupan pembinaan olahraga | % | 54 | 39 | 69 | DKPOP |
| 13.4. | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi | % | 35 | 35 | 55 | DKPOP |
| 13.5. | Cakupan pembinaan atlet muda | % | 7 | 7 | 13 | DKPOP |
| 13.6. | Jumlah atlet berprestasi | atlet | 378 | 117 | 450 | DKPOP |
| 13.7. | Jumlah prestasi olahraga | Cabor | 14 | 16 | 18 | DKPOP |
| **14** | **Statistik** | | | | | **DISKOMINFO** |
| 14.1. | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | ada/tidak | ada | tidak | ada | DISKOMINFO |
| 14.2. | Buku ”Kabupaten Karo Dalam Angka” | ada/tidak | ada | ada | ada | DISKOMINFO |
| 14.3. | Buku ”PDRB” | ada/tidak | ada | tidak | ada | DISKOMINFO |
| **15** | **Persandian** | | | | | **DISKOMINFO** |
| 15.1. | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah | % | 2 | 3,6 | 10 | DISKOMINFO |
| **16** | **Kebudayaan** | | | | | **DKPOP** |
| 16.1. | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Kali | 7 | 12 | 11 | DKPOP |
| 16.2. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Cagar Budaya | 10 | 10 | 20 | DKPOP |
| 16.3. | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | Karya Budaya | 18 | 67 | 26 | DKPOP |
| 16.4. | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | Cagar Budaya | - | 10 | - | DKPOP |
| **17** | **Perpustakaan** | | | | | **DPA** |
| 17.1. | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | % | 9,7 | 36,5 | 11 | DPA |
| 17.2. | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | rasio | 0,200 | 25,600 | 0,230 | DPA |
| 17.3. | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | rasio | 1,217 | 0,14 | 1,118 | DPA |
| 17.4. | Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun | orang | 40000 | 121,885 | 47000 | DPA |
| 17.5. | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | buku | 7000 | 7,234 | 9200 | DPA |
| 17.6. | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | % | 1,300 | 0,170 | 1,318 | DPA |
| **18** | **Kearsipan** | | | | | **DPA** |
| 18.1. | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | % | 75,00 | 69,05 | 83,30 | DPA |
| 18.2. | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | Kegiatan | 2 | - | 3 | DPA |
| **Layanan Urusan Pilihan** | | | | | | |
| **1** | **Pariwisata** | | | | | **DKPOP** |
| 1.1. | Kunjungan wisata | Orang | 728.500 | 600.656 | 1.101.000 | DKPOP |
| 1.2. | Lama kunjungan Wisata | Hari | 1.3 | 1,3 | 1.5 | DKPOP |
| 1.3. | PAD sektor pariwisata | Persentase | 50 | 87 | 50 | DKPOP |
| **2** | **Pertanian** | | | | | **DISTAN** |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2022 | | Target 2024 | Penanggung Jawab/Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Capaian | | |
| 2.1. | Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB (%) | % | 51,94 | N/A | 51,00 | DISTAN |
| 2.2. | Kontribusi sektor perkebunan Tahunan terhadap PDRB (%) | % | 5,78 | N/A | 5,72 | DISTAN |
| 2.3. | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB | % | 100 | N/A | 100 | DISTAN |
| 2.4. | Produktivitas padi per hektar | Kw/Ha | 55,83 | 60,32 | 56,39 | DISTAN |
| 2.5. | Produktivitas palawija per hektar | Kw/Ha | 71,37 | 69,21 | 72,08 | DISTAN |
| 2.6. | Cakupan bina kelompok petani | % | 6,44 | 10,86 | 7,10 | DISTAN |
| 2.7. | Produksi sektor pertanian | Ton | 12.298.598 | | 13.559.204 | DISTAN |
| 2.8. | Produksi sektor perkebunan | Ton | 1.383.930 | | 1.525.783 | DISTAN |
| **4** | **Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | | | **DISPERINDAG** |
| 4,4 | Jumlah pengusaha yang memiliki izin pemanfaatan langsung panas bumi | pengusaha | | N/A | 50 | DISPERINDAG |
| **5** | **Perdagangan** | | | | | **DISPERINDAG** |
| 5.1. | Ekspor Bersih Perdagangan | miliar | 65 | 277 | 80 | DISPERINDAG |
| 5.2. | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | | 50 | 0 | 75 | DISPERINDAG |
| **6** | **Perindustrian** | | | | | **DISPERINDAG** |
| 6.1. | Cakupan bina kelompok pengrajin | persen | 21,05 | 17,86 | 33,33 | DISPERINDAG |
| **8** | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | **DKPP** |
| 8.1. | Produksi perikanan | % | 95 | 247,16 | 85 | DKPP |
| 8.2. | Konsumsi ikan | % | 93,00 | 67,70 | 96,80 | DKPP |
| 8.3. | Cakupan bina kelompok nelayan | % | 100 | 100 | 100 | DKPP |
| 8.4. | Produksi perikanan kelompok nelayan | % | 68,23 | 76,13 | 72,23 | DKPP |
| 8.5. | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | % | 68,23 | 76,13 | 72,23 | DKPP |
| 8.6. | Cakupan bina kelompok Pembudidaya Ikan | % | 11 | 100 | 22 | DKPP |
| **Penunjang Urusan** | | | | | | |
| **1** | **Perencanaan Pembangunan** | | | | | **BAPPEDA LITBANG** |
| 1.1. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Dokumen | Ada | Ada | Ada | BAPPEDA LITBANG |
| 1.2. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Dokumen | Ada | Ada | Ada | BAPPEDA LITBANG |
| 1.3. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Dokumen | Ada | Ada | Ada | BAPPEDA LITBANG |
| 1.4. | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | % | 100 | 100 | 100 | BAPPEDA LITBANG |
| 1.5. | Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD | % | 100 | 100 | 100 | BAPPEDA LITBANG |
| **2** | **Keuangan** | | | | | **BKAD** |
| 2.1. | Opini BPK terhadap laporan keuangan | - | WTP | WTP | WTP | BKAD |
| 2.2. | Persentase SILPA | % | 13,26 | - | 10,741 | BKAD |
| 2.3. | Persentase SILPA terhadap APBD | % | 13,26 | - | 10,741 | BKAD |
| 2.4. | Persentase program yang tidak terlaksana | % | 0 | - | 0 | BKAD |
| 2.5. | Persentase kegiatan yang tidak terlaksana | % | 0 | - | 0 | BKAD |
| 2.6. | Persentase belanja pendidikan (20%) | % | 20 | 28 | 20 | BKAD |
| 2.7. | Persentase belanja kesehatan (10%) | % | 10 | 26 | 10 | BKAD |
| 2.9. | Proporsi Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah | % | 64,73 | 70,23 | 66,74 | BKAD |
| 2.10. | Proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah | % | 16,04 | 8,85 | 13,44 | BKAD |
| 2.11. | Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur terhadap total Belanja Daerah | % | 43,62 | 44,02 | 44,98 | BKAD |
| 2.12. | Proporsi Belanja Tidak Terduga terhadap total Belanja Daerah | % | 0,14 | 0,99 | 0,14 | BKAD |
| 2.13. | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | % | 0,36 | 0,62 | 0,37 | BKAD |
| 2.14. | Penetapan APBD | - | Tepat Waktu | - | Tepat Waktu | BKAD |
| **3** | **Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan** | | | | | **BKDSDM** |
| 3.1. | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 11 | 11 | 11 | BKDSDM |
| 3.2. | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | % | 2,23 | 0 | 8,36 | BKDSDM |
| 3.3. | Persentase keterisian jabatan | % | 100 | 89,91 | 100 | BKDSDM |
| 3.4. | Jumlah Aparatur yang melakukan Pelanggaran Disiplin Aparatur | ASN | 19 | 3 | 17 | BKDSDM |
| **4** | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | | **BAPPEDA LITBANG** |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | 2022 | | Target 2024 | Penanggung Jawab/Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Capaian | | |
| 4.1. | Persentase implementasi rencana kelitbangan | % | 100 | 100 | 100 | BAPPEDA LITBANG |
| 4.2. | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | % | 100 | N/A | 100 | BAPPEDA LITBANG |
| | ***Penerapan SIDa:*** | | | 100 | | |
| 4.3. | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | % | 100 | 100 | 100 | BAPPEDA LITBANG |
| 4.4. | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | % | 100 | 100 | 100 | BAPPEDA LITBANG |
| **5** | **Pengawasan** | | | | | **INSPEKTORAT** |
| 5.1. | Persentase tindak lanjut temuan | % | 85,00 | 83.16 | 90,00 | INSPEKTORAT |
| 5.2. | Persentase pelanggaran pegawai | % | 0 | 0 | 0 | INSPEKTORAT |
| **6** | **Sekretariat Dewan** | | | | | **SETWAN** |
| 6.1. | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota | ADA/TIDAK | ADA | ADA | ADA | SETWAN |
| 6.2. | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | ADA/TIDAK | ADA | ADA | ADA | SETWAN |
| 6.3. | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | ADA/TIDAK | ADA | ADA | ADA | SETWAN |

*Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Karo, 2023 (diolah)*

# BAB VII
# PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026. Sebagaimana telah disebutkan diawal dan dijabarkan di dalam dokumen bahwa tema RKPD Kabupaten Karo Tahun 2024 ini adalah ***"PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DENGAN MEMPERBANYAK PROGRAM INOVATIF KHUSUSNYA SEKTOR PARIWISATA DAN PERTANIAN".*** Dengan demikian berdasarkan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang holistik-tematik dan integratif diharapkan seluruh perangkat daerah untuk bahu membahu dalam melakukan optimalisasi potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan daya saing daerah.

Dengan ditetapkannya dokumen ini, kita telah menyelesaikan tahapan perencanaan yang merupakan salah satu siklus pengelolaan keuangan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam siklus pembangunan daerah. Sebagai kelanjutan proses tersebut kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini harus secara konsisten dijabarkan ke dalam rencana kerja perangkat daerah yang disertai dengan target-target capaian yang terukur.
2. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD. Dengan demikian dokumen RKPD ini harus konsisten dipertahankan sampai penetapan APBD 2024 yang akan dibahas bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Karo.
3. Dalam pelaksanaannya harus dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala sehingga setiap uang yang dibelanjakan fokus pada pencapaian target pembangunan daerah.
4. Penyusunan dokumen RKPD ini telah mempertimbangkan seluruh pendekatan mulai dari pendekatan teknokratik, partisipatif, politis termasuk pokok-pokok pikiran DPRD, atas bawah dan bawah atas termasuk hasil musrenbang sehingga evaluasi dan dokumentasi setiap

kegiatan yang disertai pencapaian target sangat diperlukan sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan penyusunan perencanaan berikutnya.

5. Untuk mencapai target kinerja setiap perangkat daerah agar dalam pelaksanaanya dilakukan pembagian tugas kepada seluruh unsur perangkat daerah sampai level terbawah sehingga tidak ada pegawai yang melaksanakan kegiatan diluar target yang telah ditetapkan.
6. Pencapaian RKPD memerlukan sinergi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2024 yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024.
7. Rencana kerja dan pendanaan pada dokumen RKPD Kabupaten Karo Tahun 2024 tertuang dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Dokumen Rencana Pembangunan ini adalah milik masyarakat, pemerintah Kabupaten Karo dan Pemerintah Atasan, sehingga kunci keberhasilan pembangunan adalah melalui sinergitas dan dukungan dari seluruh stakeholder terkait. Demikian penutup ini disusun dengan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen ini.

BUPATI KARO

CORY SRIWATY SEBAYANG

# LAMPIRAN I

# EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Periode Pelaksanaan: Triwulan IV Tahun 2022

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 12 | | 13=9+10+11+12 | | 14=13/8*100% | | 15=7+13 | | 16=15/6*100%) | | 17 |
| | | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |
| 1 | | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 1.982.836.709.309 | | | | 395.934.164.993 | | | 0,00 | 106.010.054.026 | 25,00 | 9,46 | 3,00 | 37.468.920.790 | 5,00 | 1,89 | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | 1.982.836.709.309 | | | | 395.934.164.993 | | | 0,00 | 106.010.054.026 | 0,00 | 26,77 | 0,00 | 106.010.054.026 | 0,00 | 5,35 | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | | | | DINAS PENDIDIKAN | | | | 1.982.836.709.309 | | | | 395.934.164.993 | 5.372 | 107.947.647.546 | 0,00 | 106.010.054.026 | 0,00 | 26,77 | 0,00 | 106.010.054.026 | 0,00 | 5,35 | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | indeks | 95 | 1.505.383.825.974 | | | | 301.148.148.326 | 577 | 88.650.573.971 | 0,00 | 106.010.054.026 | 0,00 | 35,20 | 0,00 | 106.010.054.026 | 0,00 | 7,04 | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,02 | | Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah | dokumen | 5 | 625.000.000 | | | | 125.000.000 | | 52.808.090 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,02 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 5 | 625.000.000 | | | 2 | 125.000.000 | | 52.808.090 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 976 | 1.476.817.853.375 | | | | 295.363.570.675 | 0 | 87.247.326.117 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | bulan | 60 | 1.473.884.453.375 | | | 12 | 294.776.890.675 | | 86.913.466.117 | 4,30 | 105.611.575.532 | 35,83 | 35,83 | 4,30 | 105.611.575.532 | 7,17 | 7,17 | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | orang/bula | 916 | 2.933.400.000 | | | 1 | 586.680.000 | | 333.860.000 | 0,18 | 102.980.000 | 1,46 | 17,55 | 0,18 | 102.980.000 | 0,29 | 3,51 | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 60 | 1.702.993.685 | | | | 324.598.737 | 243 | 366.388.580 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | setel | 124 | 345.000.000 | | | 120 | 69.000.000 | 238 | 136.884.000 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 tahun | 5 | 80.000.000 | | | 1 tahun | 0 | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | orang/kali | 1.104 | 1.127.993.685 | | | | 225.598.737 | | 199.511.700 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan PegawaiBerdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | orang/kali | 9 | 150.000.000 | | | 5 | 30.000.000 | 5 | 29.992.880 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | bulan | 60 | 2.452.978.914 | | | 12 | 437.978.914 | 331 | 300.112.429 | 1,44 | 52.474.817 | 11,98 | 11,98 | 1,44 | 52.474.817 | 2,40 | 2,14 | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | buah | 154 | 345.000.000 | | | 150 | 10.000.000 | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | buah | 254 | 525.000.000 | | | 40 | 105.000.000 | 23 | 59.841.810 | 9,79 | 25.694.415 | 81,57 | 24,47 | 9,79 | 25.694.415 | 16,31 | 4,89 | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | buah | 204 | 507.978.914 | | | 200 | 107.978.914 | 161 | 86.905.819 | 10,27 | 5.542.402 | 85,55 | 5,13 | 10,27 | 5.542.402 | 17,11 | 1,09 | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | jenis | 6 | 500.000.000 | | | 40 | 100.000.000 | 51 | 127.063.000 | 2,64 | 6.600.000 | 22,00 | 6,60 | 2,64 | 6.600.000 | 4,40 | 1,32 | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | buah | 204 | 25.000.000 | | | 6 | 5.000.000 | 4 | 3.120.000 | 0,00 | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | kotak | 204 | 50.000.000 | | | 200 | 10.000.000 | 72 | 3.613.000 | 29,18 | 1.459.000 | 243,17 | 14,59 | 29,18 | 1.459.000 | 48,63 | 2,92 | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | orang/kali | 29 | 500.000.000 | | | 100 | 100.000.000 | 20 | 19.568.800 | 13,18 | 13.179.000 | 109,83 | 13,18 | 13,18 | 13.179.000 | 21,97 | 2,64 | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | | 29 | 275.000.000 | | | | 215.000.000 | 0 | 438.782.000 | 0,00 | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | buah | 29 | 75.000.000 | | | 25 | 15.000.000 | | 198.782.000 | 0,00 | | | | | | | | DIKNAS |
| | | | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | | | | | | 120.000.000 | | | | | | | | |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | unit | 1 | 200.000.000 | | | 1 | 200.000.000 | | 120.000.000 | 0,00 | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | | 70 | 22.988.700.000 | | | | 4.597.740.000 | 0 | 0 | 0,00 | 239.123.882 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 239.123.882 | 0,00 | 1,04 | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | bulan | 16 | 309.000.000 | | | 12 | 61.800.000 | | | 4,46 | 22.953.882 | 37,14 | 37,14 | 4,46 | 22.953.882 | 7,43 | 7,43 | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | unit | 54 | 150.000.000 | | | 50 | 30.000.000 | | | 0,00 | 0 | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | orang/bula | 68.820 | 22.529.700.000 | | | 13.872 | 4.505.940.000 | | | 665,50 | 216.170.000 | 5.545,85 | 4,80 | 665,50 | 216.170.000 | 1.109,17 | 0,96 | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rasio puskesmas per 1.000 penduduk / Rasio Pustu per 1.000 Penduduk / Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk | | 224 | 521.300.000 | | | | 84.260.000 | 3 | 245.156.755 | 0,00 | 3.899.795 | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 3.899.795 | 0,00 | 0,75 | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Ken | Cakupan Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan / Persentase balita stunting / Persentase Puskemas menyelenggarakan UKP serta UKM esensial dan pengembangan | unit | 5 | 221.300.000 | | | 1 unit | 44.260.000 | 1 | 40.706.755 | 0,09 | 3.899.795 | 0,73 | 8,81 | 0,09 | 3.899.795 | 0,15 | 1,76 | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten | unit | 210 | 100.000.000 | | | 1 unit | 20.000.000 | 1 | 15.950.000 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | unit | 9 | 200.000.000 | | | 2 | 20.000.000 | 1 | 188.500.000 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun | | 74 | 468.957.283.335 | | | | 94.736.016.667 | 4.795 | 19.222.568.575 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | | 90,71 | 196.845.348.096 | | | | 39.235.881.428 | 2.288 | 5.240.738.039 | 0,00 | | | | | | | | DIKNAS |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun | unit | 5 | 600.000.000 | | | | 0 | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | ruang | 50 | 12.000.000.000 | | | 10 | 2.400.000.000 | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 03 | PembangunanRuangGuru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | ruang | 10 | 1.500.000.000 | | | 2 | 300.000.000 | 3 | 439.725.000 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | ruang | 10 | 1.000.000.000 | | | 2 | 200000000 | 1 | 99.490.000 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 05 | PembangunanPerpustakaan Sekolah | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | ruang | 10 | 3.800.000.000 | | | 2 | 760.000.000 | 1 | 376.870.000 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | ruang | 11 | 2.000.000.000 | | | 2 paket | 400.000.000 | 2 | 449.884.900 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | ruang | 20 | 2.200.000.000 | | | 4 | 440.000.000 | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 09 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah alat kesehatan Puskesmas yang dikalibrasi | ruang | 10 | 1.100.000.000 | | | 2 | 220.000.000 | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 11 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan | ruang | 5 | 2.500.000.000 | | | 1 tahun | 500.000.000 | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan | unit | 10 | 1.000.000.000 | | | 2 paket | 200.000.000 | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 13 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan | FALSE | 10 | 2.000.000.000 | | | 2 paket | 400.000.000 | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 14 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar | paket | 10 | 400.000.000 | | | 2 paket | 80.000.000 | 12 | 490.500.000 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | paket | 10 | 550.000.000 | | | 2 paket | 110.000.000 | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Persentase Fasilitas Pelayan Kesehatan menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten | orang/kali | 5.000 | 2.250.000.000 | | | 850 | 450.000.000 | 850 | 450.000.000 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 22 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | paket | 25 | 1.000.000.000 | | | 5 | 200.000.000 | 31 | 1.247.880.000 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 23 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | orang/kali | 40.000 | 1.023.514.761 | | | 8.000 | 223.514.761 | 342 | 9.548.116 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 24 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | orang/kali | 200 | 50.000.000 | | | 40 | 10.000.000 | 40 | 10.000.000 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | orang/kali | 1.975 | 2.000.000.000 | | | 350 | 400.000.000 | 250 | 285.719.270 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 26 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekola | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | orang | | 1.150.000.000 | | | 100 | 230.000.000 | 79 | 181.131.883 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidik | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | orang | 4.823 | 4.205.000.000 | | | 956 | 1.009.000.000 | 337 | 355.577.845 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 284 orang | 1.470 | 3.000.000.000 | | | 284 | 600.000.000 | 240 | 506.735.025 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | sekolah | 204 | 151.316.833.335 | | | 260 | 30.263.366.667 | 100 | 40.000.000 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 30 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | sekolah | 204 | 200.000.000 | | | 100 | 40.000.000 | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,01 | 31 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | ruang | | | | | 2 | 407.275.000 | 1 | 297.676.000 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | 92 | 245.823.200.000 | | | | 50.291.200.000 | 2.194 | 12.816.375.718 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | unit | 1 | 1.600.000.000 | | | 1 | 600.000.000 | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | ruang | 10 | 2.105.000.000 | | | 2 | 421.000.000 | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | ruang | 10 | 1.500.000.000 | | | 2 | 300.000.000 | 3 | 419.626.253 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | ruang | 10 | 1.000.000.000 | | | 2 | 200.000.000 | 9 | 881.983.383 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 05 | PembangunanPerpustakaan Sekolah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | ruang | 10 | 3.800.000.000 | | | 2 | 760.000.000 | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 06 | Pembangunan Laboratorium | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | ruang | 10 | 4.100.000.000 | | | 2 | 820.000.000 | 3 | 1.281.695.368 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | unit | 30 | 2.967.000.000 | | | 6 paket | 593.400.000 | 17 | 1.664.938.442 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | ruang | 100 | 11.030.000.000 | | | 5 | 2.206.000.000 | 2 | 860.158.389 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 15 | RehabilitasiSedang/Berat Ruang Guru Sekolah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | ruang | 10 | 1.100.000.000 | | | 2 | 220.000.000 | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 17 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | ruang | 15 | 2.500.000.000 | | | 3 | 500.000.000 | | | | | | | | | | | | DIKNAS |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 18 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | ruang | 10 | 1.000.000.000 | | | 2 | 200.000.000 | 1 | 96.419.800 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 21 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas KepalaSekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | ruang | 10 | 1.000.000.000 | | | 2 | 200.000.000 | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 24 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | unit | 20 | 1.000.000.000 | | | 4 ruang | 200.000.000 | 11 | 551.315.600 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 25 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | 66 Sekolal | 370 | 400.000.000 | | | 2 paket | 80.000.000 | 92 | 3.694.420.000 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 27 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | paket | 50 | 1.500.000.000 | | | 1 | 300.000.000 | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | orang/kali | 5.000 | 3.825.000.000 | | | 1.000 | 765.000.000 | 1.000 | 764.999.920 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 34 | Perlengkapan Belajar Peserta Didik | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | paket | 50 | 4.964.000.000 | | | 1 | 992.800.000 | 1 | 160.000.000 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 35 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | paket | 5 | 31.047.200.000 | | | 13 | 7.000.000.000 | 1 | 551.920.000 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 36 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | orang/kali | 67 | 350.000.000 | | | 65 | 70.000.000 | 63 | 68.359.855 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 37 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah P | Persentase Puskesmas menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi | orang/kali | 67 | 100.000.000 | | | 66 | 20.000.000 | 66 | 19.999.960 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | orang/kali | 2.000 | 1.800.000.000 | | | 400 | 360.000.000 | 315 | 283.461.188 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 39 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekola | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | orang | | 1.150.000.000 | | | 100 | 230.000.000 | 57 | 131.943.600 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidik | Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia | orang | 3.217 | 4.765.000.000 | | | 616 | 1.009.000.000 | 485 | 794.069.440 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen mempunyai izin | orang/kali | 3 | 2.650.000.000 | | | 2 sekolah | 530.000.000 | 2 | 571.146.730 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | sekolah | 67 | 158.470.000.000 | | | 66 | 31.694.000.000 | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,02 | 43 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | sekolah | 67 | 100.000.000 | | | 66 | 20.000.000 | 66 | 19.917.790 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,03 | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Persentase tenaga Kesehatan sesuai standar | | 53 | 21.288.735.239 | | | | 4.208.935.239 | 269 | 1.040.160.700 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,03 | 01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIK | ruang | 5 | 550.000.000 | | | 1 | 110.000.000 | 1 | 150.000.000 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,03 | 02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | paket | 5 | 550.000.000 | | | 1 | 110.000.000 | 3 | 324.576.000 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,03 | 03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Persentase Puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai standar | ruang | 5 | 375.000.000 | | | 1 | 75.000.000 | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,03 | 04 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | paket | 5 | 375.000.000 | | | 1 | 75.000.000 | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,03 | 05 | Pengadaan Mebel PAUD | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | paket | 5 | 150.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,03 | 10 | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | Persentase Tenaga Kesehatan mengikuti pendidikan dan pelatihan | paket | 5 | 52.250.000 | | | 1 | 10.450.000 | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,03 | 12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | paket | 5 | 100.000.000 | | | 1 | 20.000.000 | 9 | 181.399.225 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,03 | 13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Persentase sarana kefarmasi an memenuhi persyaratan / Persentasae makanan memenuhi persyaratan | orang/kali | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,03 | 15 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Persentase sarana kefarmasian yang diawasi | orang | 250 | 776.485.239 | | | 50 orang | 136.485.239 | 47 | 129.189.940 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,03 | 16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidik | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | orang | 5 | 360.000.000 | | | 30 | 72.000.000 | 58 | 138.913.200 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,03 | 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Persentase sarana Industri Rumah Tangga yang memproduksi makanan minuman yang diawasi | orang/kali | 5 | 100.000.000 | | | 15 | 20.000.000 | 50 | 67.326.085 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,03 | 18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | sekolah | 5 | 17.500.000.000 | | | 166 | 3.500.000.000 | 101 | 48.756.250 | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,03 | 19 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | Persentase makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diawasi | sekolah | 30 | 400.000.000 | | | 166 | 80.000.000 | | | | | | | | | | | DIKNAS |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,04 | | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | 62,5 | 5.000.000.000 | | | | 1.000.000.000 | 44 | 125.294.118 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,04 | 02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Persentase post market produk makanan minuman Industri Rumah Tangga yang diawasi | unit | 5 | 350.000.000 | | | 1 paket | 120.000.000 | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,04 | 04 | Rehabilitasi Sedang/BeratPembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | unit | 5 | 400.000.000 | | | 1 paket | 80.000.000 | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,04 | 05 | Pengandaan Mebel Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan | Rasio posyandu per 1.000 balita | paket | 5 | 150.000.000 | | | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,04 | 06 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal dan Kesetara | Cakupan Desa siaga aktif | paket | 5 | 100.000.000 | | | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,04 | 12 | Penyelenggaraan Proses BelajarNonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | tahun | 5 | 500.000.000 | | | 1 tahun | 100.000.000 | 1 | 53.326.713 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,04 | 15 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidik | Persentase Posyandu aktif | orang | 4.823 | 250.000.000 | | | 50 orang | 50.000.000 | 42 | 42.304.605 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,04 | 16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | orang/kali | 5 | 150.000.000 | | | 1 sekolah | 30.000.000 | 1 | 29.662.800 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,04 | 17 | Pengelolaan Dana BOP SekolahNonformal/Kesetaraan | SekolahNonformal/Kesetaraan Pengelola Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | sekolah | 5 | 3.000.000.000 | | | 4 sekolah | 600.000.000 | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 02 | 2,04 | 18 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Sekolah Nonformal/Kesetaraan mengikuti peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | sekolah | 5 | 100.000.000 | | | 4 sekolah | 20.000.000 | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase satuan pendidikan yg perangkat pembelajaran mulok yang baik (PAUD/SD/SMP) | % | 17 | 8.465.600.000 | | | | 20.000.000 | 0 | 64.505.000 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | | | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Surat Kep | 17 | 4.232.800.000 | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | | | | | | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Kurikulum | 17 | 250.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | | | | | | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | orang | 17 | 100.000.000 | | | | | | 15.600.000 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | | | | | | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Buku | 17 | 3.882.800.000 | | | | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | | | | | | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Tenaga Pendidik yang dilatih | orang | | | | | | | 48.905.000 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 04 | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Indeks Petetaan Guru | % | 0 | 20.000.000 | | | | 20.000.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 04 | 2,01 | | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan ba | Indeks Petetaan Guru | % | | 20.000.000 | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 04 | 2,01 | 01 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidik | Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan serta Kualitas Manajemen Pendidikan | sekolah | | 20.000.000 | | | 100 | 20.000.000 | 97 | 19.374.000 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | | | | | | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pend | Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | sekolah | | | | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal | % | | 10.000.000 | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 05 | 2,02 | | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | sekolah | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | | | | | | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan ole | Penilaian terhadap usul perizinan pendirian SD dan SMP | sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggara | SD dan SMP yang diselenggarakan masyarakat yang dilakukan pengendalian dan pengawasan | sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | | | | | | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Rekomendasi Penyelenggaraan PAUD Dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat | Lembaga | | 10.000.000 | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | | | | | | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Dise | Penilaian terhadap usul perizinan pendirian PAUD dan Pendidikan Non Formal | lembaga | | | | | | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yan | PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat yang dilakukan pengendalian dan pengawasan | lembaga | | | | | | | | | | | | | | | | | DIKNAS |
| 1 | | 1 | 01 | 05 | 2,02 | 03 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang mengikuti Pembinaan | lembaga | | 10.000.000 | | | 20 | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | | | | | | DIKNAS |
| 2 | | 1 | 02 | | | | DINAS KESEHATAN | | | | **871.399.588.986** | | | | **##########** | | **68.606.571.835** | | **##########** | | **90,9** | | **146.967.164.584** | | **16,9** | DINKES |
| 2 | Meningkatnya pelay | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | indeks | 95 | **502.678.629.425** | | | **83** | **95.661.812.455** | | **33.683.895.130** | 0 | **92.733.337.584** | - | **96,9** | - | **92.733.337.584** | **0** | **18,4** | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah | bulan | 60 | **280.000.000** | | | **12** | **84.031.000** | 12 | **81.338.800** | 12 | **81.338.800** | **100** | **96,8** | **12** | **81.338.800** | **20** | **29,04957** | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 280.000.000 | | | 2 | 84.031.000 | 2 | 81.338.800 | 2 | 81.338.800 | 100 | 96,8 | 2 | 81.338.800 | 20 | 29,04957 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | bulan | 12 | **479.112.734.060** | | | **12** | **92.856.925.233** | **12** | **31.996.025.472** | **12** | **90.004.122.025** | **100** | **96,9** | **12** | **90.004.122.025** | **100** | **18,8** | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/ bul | 5.388 | 475.810.934.060 | | | 1.079 | 92.178.205.233 | 1.063 | 31.387.505.472 | 1063 | 89.336.202.025 | 99 | 96,9 | 1.063 | 89.336.202.025 | 19,72903 | 18,8 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Kuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 85 | 3.301.800.000 | | | 5 | 678.720.000 | 5 | 608.520.000 | 5 | 667.920.000 | 100 | 98,4 | 5 | 667.920.000 | 5,882353 | 20,2 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bulan | 60 | **3.683.904.000** | | | **12** | **760.704.000** | **12** | **532.136.220** | **12** | **760.194.600** | **100** | **99,9** | **12** | **760.194.600** | **20** | **20,6** | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 5.482 | 3.683.904.000 | | | 1.132 | 760.704.000 | 1132 | 532.136.220 | 1132 | 760.194.600 | 100 | 99,9 | 1.132 | 760.194.600 | 20,6494 | 20,6 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bulan | 60 | **1.270.019.761** | | | **12** | **376.879.722** | **12** | **240.981.983** | **12** | **340.506.808** | **100** | **90,3** | **12** | **340.506.808** | **20** | **26,8** | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 22.385.639 | | | 1 | 7.385.639 | 1 | 7.377.908 | 1 | 7.377.908 | 100 | 99,9 | 1 | 7.377.908 | 33,33333 | 33,0 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 399.909.320 | | | 1 | 83.301.820 | 1 | 12.192.000 | 1 | 71.862.600 | 100 | 86,3 | 1 | 71.862.600 | 20 | 18,0 | DINKES |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 124.999.088 | | | 1 | 60.645.353 | 1 | 56.787.500 | 1 | 56.787.500 | 100 | 93,6 | 1 | 56.787.500 | 20 | 45,4 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 | 129.316.110 | | | 1 | 27.276.110 | 1 | 19.126.800 | 1 | 19.126.800 | 100 | 70,1 | 1 | 19.126.800 | 20 | 14,8 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 20 | 35.750.000 | | | 4 | 8.710.000 | 4 | 8.710.000 | 4 | 8.710.000 | 100 | 100,0 | 4 | 8.710.000 | 20 | 24,4 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 150 | 557.659.604 | | | 30 | 189.560.800 | 30 | 136.787.775 | 30 | 176.642.000 | 100 | 93,2 | 30 | 176.642.000 | 20 | 31,7 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit / bua | 152 | **12.737.334.104** | | | **105** | **309.829.500** | **12** | **224.297.000** | **12** | **296.667.000** | **11** | **95,8** | **12** | **296.667.000** | **7,89** | **2,3** | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 1 | 400.000.000 | | | - | - | 0 | | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | 0 | 0,0 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 120 | 52.000.000 | | | 83 | 145.000.000 | 83 | 142.175.000 | 83 | 142.175.000 | 100 | 98,1 | 83 | 142.175.000 | 69,2 | 273,4 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | Unit | 29 | 285.334.104 | | | 22 | 164.829.500 | 22 | 82.122.000 | 22 | 154.492.000 | 100 | 93,7 | 22 | 154.492.000 | 75,9 | 54,1 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | Unit | 2 | 12.000.000.000 | | | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | 60 | **4.997.800.000** | | | **12** | **1.014.605.500** | | **351.360.904** | **0** | **992.753.600** | **-** | **97,8** | **-** | **992.753.600** | **0** | **19,9** | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60 | 250.000.000 | | | 12 | 63.545.500 | 3 | 31.190.904 | 12 | 50.138.600 | 100 | 78,9 | 12 | 50.138.600 | 20 | 20,1 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 4.747.800.000 | | | 12 | 951.060.000 | 3 | 320.170.000 | 12 | 942.615.000 | 100 | 99,1 | 12 | 942.615.000 | 20 | 19,9 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Unit | 218 | **596.837.500** | | | **12** | **258.837.500** | | **257.754.751** | **0** | **257.754.751** | **-** | **99,6** | **-** | **257.754.751** | **0** | **43,2** | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kend | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 195 | 386.837.500 | | | 11 | 58.837.500 | 9 | 57.944.751 | 9 | 57.944.751 | 82 | 98,5 | 9 | 57.944.751 | 4,6 | 15,0 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | unit | 20 | 10.000.000 | | | - | - | 0 | | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor at | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 3 | 200.000.000 | | | 1 | 200.000.000 | 1 | 199.810.000 | 1 | 199.810.000 | 100 | 99,9 | 1 | 199.810.000 | 33,3 | 99,9 | DINKES |
| 2 | Meningkatnya statu | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA | Rasio puskesmas per 1.000 penduduk / Rasio Pustu per 1.000 Penduduk / Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk | Rasio | 0,04 / 0,5 / 0,01 | ################ | | **0,05 / 0,5 / 0,01** | **16.538.372.050** | | **14.259.811.281** | **0** | **15.366.075.841** | **-** | **92,9** | **-** | **15.366.075.841** | **0** | **7,9** | DINKES |
| 2 | | | | | | | | Cakupan Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan / Persentase balita stunting / Persentase Puskemas menyelenggarakan UKP serta UKM esensial dan pengembangan | % | 100 / 14 / 100 | **161.976.751.087,0** | | **100 / 28 / 100** | **47.231.631.336** | **4 / 100** | **19.849.037.314** | **#VALUE!** | **37.178.995.109** | **-** | **78,7** | **-** | **37.178.995.109** | **0** | **23,0** | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenan | Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten | % | 100 | **186.118.003.800** | | | **100** | **15.489.156.142** | | **13.700.730.281** | **0** | **14.465.948.741** | **-** | **93,4** | **-** | **14.465.948.741** | **0** | **7,8** | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Unit | 1 | 99.053.000.000 | | | - | - | - | | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Pembangunan Puskesmas | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun | Unit | 2 | 9.000.000.000 | | | 2 | 1.300.200.142 | 2 | 1.300.200.142 | 2 | 1.300.200.142 | 100 | 100,0 | 2 | 1.300.200.142 | 100 | 14,4 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | Unit | 11 | 4.250.000.000 | | | 1 | 350.000.000 | 1 | 233.554.260 | 1 | 336.659.800 | 100 | 96,2 | 1 | 336.659.800 | 9,090909 | 7,9 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 04 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun | Unit | 7 | 3.050.000.000 | | | 1 | 366.600.000 | 1 | 251.273.500 | 1 | 363.182.000 | 100 | 99,1 | 1 | 363.182.000 | 14,28571 | 11,9 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 06 | Pengembangan Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Unit | 5 | 7.200.000.000 | | | 2 | 1.867.500.000 | 1 | 1.009.767.980 | 1 | 1.453.211.400 | 50 | 77,8 | 1 | 1.453.211.400 | 20 | 20,2 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | Unit | 8 | 1.400.000.000 | | | - | - | | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | Unit | 45 | 4.744.000.000 | | | 15 | 1.357.515.000 | 15 | 1.304.947.500 | 15 | 1.316.491.500 | 100 | 97,0 | 15 | 1.316.491.500 | 33,33333 | 27,8 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 11 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | Unit | 6 | 570.000.000 | | | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | unit | 204 | 10.700.000.000 | | | 2 | 79.000.000 | 2 | 78.720.800 | 2 | 78.720.800 | 100 | 99,6 | 2 | 78.720.800 | 0,980392 | 0,7 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehat | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | unit | 750 | 11.474.000.000 | | | 134 | 1.829.934.000 | 134 | 1.671.670.734 | 134 | 1.671.670.734 | 100 | 91,4 | 134 | 1.671.670.734 | 17,86667 | 14,6 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah alat kesehatan Puskesmas yang dikalibrasi | unit | | | | | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan | Paket | 95 | 25.154.886.800 | | | 19 | 5.127.072.478 | 19 | 4.856.586.373 | 19 | 4.878.116.373 | 100 | 95,1 | 19 | 4.878.116.373 | 20 | 19,4 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan | Paket | 95 | 7.488.707.000 | | | 19 | 3.069.085.522 | 19 | 2.946.526.610 | 19 | 2.946.526.610 | 100 | 96,0 | 19 | 2.946.526.610 | 20 | 39,3 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 19 | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan | unit | 5 | 350.000.000 | | | - | - | | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilita | Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar | unit | 750 | 329.367.000 | | | | | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Pusk | Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Paket | 95 | 534.465.000 | | | 19 | 142.249.000 | 19 | 47.482.382 | 19 | 121.169.382 | 100 | 85,2 | 19 | 121.169.382 | 20 | 22,7 | DINKES |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah K | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | Keluarga | 19.000 | **161.976.751.087** | | | **100** | **47.231.631.336** | | **19.849.037.314** | **0** | **37.178.995.109** | **-** | **78,7** | **-** | **37.178.995.109** | **0** | **23,0** | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase Fasilitas Pelayan Kesehatan menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten | % | 100 | 4.749.212.106 | | | 7.106 | 559.180.000 | | 396.175.000 | 0 | 462.600.000 | - | 82,7 | - | 462.600.000 | 0 | 9,7 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | orang | 37.842 | 10.342.227.000 | | | 6.783 | 956.240.000 | | 303.850.000 | 0 | 396.900.000 | - | 41,5 | - | 396.900.000 | 0 | 3,8 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | orang | 36.121 | 395.750.000 | | | 6.450 | 756.450.000 | | 72.950.000 | 0 | 104.820.000 | - | 13,9 | - | 104.820.000 | 0 | 26,5 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | orang | 33.553 | 5.874.420.000 | | | 29.301 | 1.179.500.000 | | 575.150.000 | 0 | 1.017.800.000 | - | 86,3 | - | 1.017.800.000 | 0 | 17,3 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | orang | 161.522 | 3.371.640.000 | | | 40.873 | 1.338.500.000 | | 621.900.000 | 0 | 997.150.000 | - | 74,5 | - | 997.150.000 | 0 | 29,6 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | orang | 238.427 | 673.800.000 | | | ###### | 291.200.000 | ###### | 155.750.000 | 112.021 | 234.850.000 | 99 | 80,6 | 112.021 | 234.850.000 | 46,98335 | 34,9 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | orang | 689.693 | 2.424.550.000 | | | 31.925 | 45.350.000 | | 39.825.001 | 0 | 39.825.001 | - | 87,8 | - | 39.825.001 | 0 | 1,6 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | orang | 186.231 | 144.800.000 | | | 37.883 | 19.800.000 | 7.340 | 16.200.000 | 26.439 | 16.200.000 | 70 | 81,8 | 26.439 | 16.200.000 | 14,19688 | 11,2 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | orang | 183.815 | 144.800.000 | | | 5.090 | 19.800.000 | 1.065 | - | 4.839 | 16.200.000 | 95 | 81,8 | 4.839 | 16.200.000 | 2,632538 | 11,2 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | orang | 24.843 | 497.000.000 | | | 131 | 134.000.000 | | 84.755.200 | 0 | 110.786.590 | - | 82,7 | - | 110.786.590 | 0 | 22,3 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | orang | 655 | 1.494.960.000 | | | 6.467 | 639.360.000 | 2448 | 350.322.000 | 3967 | 495.170.000 | 61 | 77,4 | 3.967 | 495.170.000 | 605,6489 | 33,1 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | orang | 32.187 | 975.000.000 | | | 12.587 | 337.450.000 | 1.250 | 176.130.000 | 3999 | 279.760.000 | 32 | 82,9 | 3.999 | 279.760.000 | 12,42427 | 28,7 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada kondisi kejadian Luar B | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | orang | 62.180 | 900.000.000 | | | 20 | 940.974.870 | 20 | 495.820.100 | 20 | 495.820.100 | 100 | 52,7 | 20 | 495.820.100 | 0,032165 | 55,1 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Dokumen | 100 | 650.000.000 | | | 20 | 3.138.024.455 | | 2.594.872.500 | 0 | 2.594.872.500 | - | 82,7 | - | 2.594.872.500 | 0 | 399,2 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | Dokumen | 60 | 7.183.485.590 | | | 20 | 3.207.694.000 | 20 | 1.704.359.940 | 20 | 1.935.374.940 | 100 | 60,3 | 20 | 1.935.374.940 | 33,33333 | 26,9 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 100 | 60.000.000 | | | 20 | 489.930.000 | 19 | 246.280.000 | 19 | 338.230.000 | 95 | 69,0 | 19 | 338.230.000 | 19 | 563,7 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dokumen | 100 | 730.000.000 | | | 20 | 946.028.310 | 20 | 410.790.000 | 20 | 588.090.000 | 100 | 62,2 | 20 | 588.090.000 | 20 | 80,6 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 100 | 2.674.525.000 | | | 20 | 647.484.000 | 20 | 212.920.000 | 20 | 325.290.000 | 100 | 50,2 | 20 | 325.290.000 | 20 | 12,2 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Dokumen | 100 | 145.400.000 | | | 20 | 45.394.000 | 20 | 32.222.000 | 20 | 36.994.000 | 100 | 81,5 | 20 | 36.994.000 | 20 | 25,4 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Dokumen | 100 | 246.300.000 | | | 20 | 73.900.000 | 20 | 15.720.000 | 20 | 21.120.000 | 100 | 28,6 | 20 | 21.120.000 | 20 | 8,6 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 100 | 351.300.000 | | | 80 | 7.100.000 | | 7.100.000 | 0 | 7.100.000 | - | 100,0 | - | 7.100.000 | 0 | 2,0 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | orang | 425 | 5.681.100.439 | | | 20 | 1.661.540.145 | 20 | 1.061.159.825 | 20 | 1.257.209.825 | 100 | 75,7 | 20 | 1.257.209.825 | 4,705882 | 22,1 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen | 100 | 100.188.745.952 | | | 20 | 24.651.840.881 | 20 | 7.566.691.654 | 20 | 22.393.508.059 | 100 | 90,8 | 20 | 22.393.508.059 | 20 | 22,4 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 27 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Dokumen | 100 | 210.100.000 | | | 530 | 141.500.000 | | 97.150.000 | 0 | 97.150.000 | - | 68,7 | - | 97.150.000 | 0 | 46,2 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 30 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | orang | 2.830 | 2.050.000.000 | | | | 258.000.000 | | 255.828.210 | 0 | 255.828.210 | #DIV/0! | 99,2 | - | 255.828.210 | 0 | 12,5 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | unit | 11 | 5.717.550.000 | | | 19 | 3.049.669.675 | | 2.038.015.884 | 0 | 2.343.245.884 | - | 76,8 | - | 2.343.245.884 | 0 | 41,0 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 95 | 600.000.000 | | | 1 | 100.000.000 | | 47.600.000 | 0 | 47.600.000 | - | 47,6 | - | 47.600.000 | 0 | 7,9 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Dokumen | 5 | 1.240.585.000 | | | 19 | 386.060.000 | 19 | - | 19 | - | 100 | - | 19 | - | 380 | 0,0 | DINKES |
| 2 | | 2 | 02 | 02 | 2.02 | 38 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPG | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | unit | 19 | 2.259.500.000 | | | 0,5 | 413.639.000 | | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | DINKES |
| 2 | | 2 | 02 | 02 | 2.02 | 39 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | unit | 1 | 600.000.000 | | | | 796.022.000 | | 269.500.000 | 0 | 269.500.000 | - | 33,9 | - | 269.500.000 | 0 | 44,9 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Persentase Puskesmas menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi | % | 100 | **3.401.913.460** | | | - | **618.987.600** | | **520.471.000** | **0** | **532.141.000** | **-** | **86,0** | **-** | **532.141.000** | **0** | **15,6** | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Dokumen | 150 | 199.320.800 | | | 30 | 19.120.000 | 30 | 4.554.000 | 30 | 16.224.000 | 100 | 84,9 | 30 | 16.224.000 | 20 | 8,1 | DINKES |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Dokumen | 100 | 327.592.660 | | | 19 | 11.500.000 | 19 | 5.400.000 | 19 | 5.400.000 | 100 | 47,0 | 19 | 5.400.000 | 19 | 1,6 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 03 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia | Unit | 14 | 2.875.000.000 | | | 32 | 588.367.600 | 32 | 510.517.000 | 32 | 510.517.000 | 100 | 86,8 | 32 | 510.517.000 | 228,5714 | 17,8 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehat | Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen mempunyai izin | % | 100 | **4.129.800.000** | | | **100** | **430.228.308** | | **38.610.000** | **0** | **367.986.100** | - | **85,5** | - | **367.986.100** | **0** | **8,9** | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.04 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rur | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | Unit | 25 | 79.800.000 | | | 5 | 19.800.000 | 5 | 19.800.000 | 5 | 19.800.000 | 100 | 100,0 | 5 | 19.800.000 | 20 | 24,8 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 02 | 2.04 | 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | Unit | 95 | 4.050.000.000 | | | 19 | 410.428.308 | 19 | 18.810.000 | 19 | 348.186.100 | 100 | 84,8 | 19 | 348.186.100 | 20 | 8,6 | DINKES |
| 2 | Meningkatnya statu | 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHA | Persentase tenaga Kesehatan sesuai standar | % | 97 | **9.603.147.850** | | | **91,4** | **1.326.547.850** | | **636.527.910** | **0** | **1.292.371.850** | - | **97** | - | **1.292.371.850** | **0** | **13,45779** | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 03 | 2.01 | | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIK | % | 97 | **87.432.000** | | | **91,4** | **17.432.000** | | **13.800.000** | **0** | **13.800.000** | - | **79** | - | **13.800.000** | **0** | **15,78369** | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 03 | 2.01 | 01 | Pengendalian Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Dokumen | 1.000 | 87.432.000 | | | 200 | 17.432.000 | 200 | 13.800.000 | 200 | 13.800.000 | 100 | 79 | 200 | 13.800.000 | 20 | 15,78369 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 03 | 2.02 | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kese | Persentase Puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai standar | % | 100 | **8.336.050.000** | | | **42** | **1.179.450.000** | | **575.550.000** | 0 | **1.149.150.000** | - | 97 | - | **1.149.150.000** | 0 | 13,78531 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | orang | 285 | 7.660.800.000 | | | 38 | 1.094.400.000 | 38 | 532.800.000 | 38 | 1.080.000.000 | 100 | 99 | 38 | 1.080.000.000 | 13,33333 | 14,09774 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dokumen | 225 | 675.250.000 | | | 19 | 85.050.000 | 19 | 42.750.000 | 19 | 69.150.000 | 100 | 81 | 19 | 69.150.000 | 8,444444 | 10,24065 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 03 | 2.03 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya M | Persentase Tenaga Kesehatan mengikuti pendidikan dan pelatihan | % | 50 | **1.179.665.850** | | | **10** | **129.665.850** | | **47.177.910** | 0 | **129.421.850** | - | 100 | - | **129.421.850** | 0 | 10,97106 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 03 | 2.03 | 01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manu | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | orang | 475 | 1.179.665.850 | | | 158 | 129.665.850 | 158 | 47.177.910 | 158 | 129.421.850 | 100 | 100 | 158 | 129.421.850 | 33,26316 | 10,97106 | DINKES |
| 2 | Meningkatnya statu | 1 | 02 | 04 | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUM | Persentase sarana kefarmasi an memenuhi persyaratan / Persentasae makanan memenuhi persyaratan | % | 95 / 66 | **1.003.330.589** | | | **90 / 63** | **551.733.900** | | **93.230.200** | 0 | **213.574.200** | - | 39 | - | **213.574.200** | #VALUE! | 21,28652 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 04 | 2.01 | | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usah | Persentase sarana kefarmasian yang diawasi | % | 95 | **119.372.859** | | | **90** | **52.218.000** | | **6.624.000** | 0 | **48.319.000** | - | 93 | - | **48.319.000** | 0 | 40,47738 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 04 | 2.01 | 01 | Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Dokumen | 316 | 119.372.859 | | | 60 | 52.218.000 | 5 | 6.624.000 | 50 | 48.319.000 | 83 | 93 | 50 | 48.319.000 | 15,82278 | 40,47738 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 04 | 2.03 | | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor | Persentase sarana Industri Rumah Tangga yang memproduksi makanan minuman yang diawasi | % | 95 | **205.138.250** | | | **90** | **406.876.000** | | **58.440.900** | 0 | **83.991.900** | - | 21 | - | **83.991.900** | **0** | **40,94405** | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 04 | 2.03 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Prod | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Dokumen | 322 | 205.138.250 | | | 60 | 406.876.000 | | 58.440.900 | 30 | 83.991.900 | 50 | 21 | 30 | 83.991.900 | 9,31677 | 40,94405 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 04 | 2.05 | | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan J | Persentase makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diawasi | % | 66 | **481.727.480** | | | **63** | **92.639.900** | | **28.165.300** | 0 | **81.263.300** | - | 88 | - | **81.263.300** | 0 | 16,86914 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 04 | 2.05 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembina | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Dokumen | 100 | 481.727.480 | | | 20 | 92.639.900 | 20 | 28.165.300 | 20 | 81.263.300 | 100 | 88 | 20 | 81.263.300 | 20 | 16,86914 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 04 | 2.06 | | Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produ | Persentase post market produk makanan minuman Industri Rumah Tangga yang diawasi | % | 14 | **197.092.000** | | | | - | | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 04 | 2.06 | 01 | Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | Unit | 52 | 197.092.000 | | | - | - | 26 | | 26 | - | - | - | 26 | - | 50 | 0 | DINKES |
| 2 | Meningkatnya statu | 1 | 02 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Rasio posyandu per 1.000 balita | Rasio | 10 | **2.488.012.775,0** | | | **8,8** | **354.362.775** | | **84.070.000** | 0 | **182.810.000** | - | 52 | - | **182.810.000** | 0 | 7,3 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 05 | 2.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat | Cakupan Desa siaga aktif | % | 70 | **80.000.000,0** | | | **35,3** | - | 35,688 | - | 35,687732 | - | 101 | - | 36 | - | 50,98247 | 0,0 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdaya | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Dokumen | 4 | 80.000.000 | | | - | - | | | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 05 | 2.03 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masy | Persentase Posyandu aktif | % | 100 | **2.408.012.775** | | | **100** | **354.362.775** | 100 | **84.070.000** | 100 | **182.810.000** | 100 | 52 | 100 | **182.810.000** | 100 | 7,6 | DINKES |
| 2 | | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 01 | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kese | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dokumen | 100 | 2.408.012.775 | | | 19 | 354.362.775 | 19 | 84.070.000 | 19 | 182.810.000 | 100 | 52 | 19 | 182.810.000 | 19 | 7,6 | DINKES |
| 3 | | | | | | | Rumah Sakit Umum Daerah | | | | 77.888.626.044 | | 72.092.413.334 | | 52.069.403.336 | 19 | 84.070.000 | 19 | 182.810.000 | #DIV/0! | 0 | 19 | 72.275.223.334 | #DIV/0! | 92,8 | RSUD |
| 3 | | **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAER** | **Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)** | | | 54.375.924.097 | | 52.669.584.280 | 83 | 51.882.982.451 | | 26.934.587.720 | | 61.015.292.845 | 0,00 | 117,60 | | 113.684.877.125 | | 2,0907208 | RSUD |
| 3 | | **1** | **02** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Bulan | 12 | 26.374.724.633 | | 24.769.641.932 | 12 | 22.771.787.260 | **25** | 7.279.872.205 | 100 | 22.423.865.551 | 833,33 | 98,47 | | 47.193.507.483 | | 1,789346 | RSUD |
| 3 | | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang/bula | 12 | 26.034.374.633 | 12 | 24.429.661.932 | 12 | 22.459.302.260 | 3 | 7.092.342.205 | 12 | 22.093.755.551 | 100,00 | 98,37 | 24 | 46.523.417.483 | 200 | 1,7869996 | RSUD |
| 3 | | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keu | Jumlah Dokumen penatausahaaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD | Dokumen | 263 | 340.350.000 | 252 | 339.980.000 | 252 | 312.485.000 | 10 | 187.530.000 | 36 | 330.110.000 | 14,29 | 105,64 | 288 | 670.090.000 | 110 | ####### | RSUD |
| 3 | | **1** | **02** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Bulan | 12 | | | | 12 | 279.000.000 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | RSUD |
| 3 | | 1 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 372 | | | - | 372 | 279.000.000 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | RSUD |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1 02 01 2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | Bulan | 12 | | | | 300 | 50.014.050 | **100** | 49.999.150 | 100 | | 33,33 | 0,00 | | | | | RSUD |
| 3 | | 1 02 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket pelaralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 58 | | | - | 58 | 50.014.050 | 1 | 49.999.150 | 1 | | 1,72 | 0,00 | | | | | RSUD |
| 3 | | **1 02 01 2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera** | **Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Bulan | 12 | 3.659.700.000 | | 3.612.780.684 | 12 | 3.726.910.000 | **25** | 1.303.175.521 | 100 | 3.601.433.691 | 833,33 | 96,63 | | 7.214.214.375 | | 1,9712584 | RSUD |
| 3 | kuntabilitas penyelen | 1 02 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 381.600.000 | 12 | 364.356.234 | 12 | 381.600.000 | 30 | 110.140.521 | 120 | 360.363.691 | 1.000,00 | 94,43 | 132 | 724.719.925 | 1.100 | 1,8991612 | RSUD |
| 3 | | 1 02 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 240 | 3.278.100.000 | 314 | 3.248.424.450 | 240 | 3.345.310.000 | 12 | 1.193.035.000 | 48 | 3.241.070.000 | 20,00 | 96,88 | 362 | 6.489.494.450 | 151 | 1,9796512 | RSUD |
| 3 | | **1 02 01 2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe** | **Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Unit | 12 | 56.431.253 | | 55.784.000 | 12 | 55.271.141 | **50** | 27.684.000 | 78 | 29.654.000 | 650,00 | 53,65 | | 85.438.000 | | 1,5140192 | RSUD |
| 3 | | 1 02 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 12 | 40.694.753 | 12 | 40.084.000 | 12 | 55.271.141 | 7 | 27.684.000 | 10 | 29.654.000 | 83,33 | 53,65 | 22 | 69.738.000 | | 1,7136853 | RSUD |
| 3 | | 1 02 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 1 | 15.736.500 | 42 | 15.700.000 | | - | | - | | | | | #VALUE! | 15.700.000 | | 0,9976806 | RSUD |
| 3 | | **1 02 01 2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **Terlaksananya Pelayanan BLUD** | Bulan | 12 | 24.285.068.211 | | 24.231.377.664 | 12 | 25.000.000.000 | **43** | 18.273.856.844 | 83 | 34.910.340.453 | 691,67 | 139,64 | | 59.141.718.117 | | 2,435312 | RSUD |
| 3 | | 1 02 01 2.10 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang menediakan pelayan dan penunjang pelayanan | Unit/Kerja | 1 | 24.285.068.211 | 12 | 24.231.377.664 | 12 | 25.000.000.000 | 1 | 18.273.856.844 | 1 | 34.910.340.453 | 8,33 | 139,64 | 13 | 59.141.718.117 | 1.300 | 2,435312 | RSUD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RSUD |
| 3 | | **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG** | **Persentase kelengkapan Sarana Rumah Sakit sesuai standar** | | | | | | 0 | | | **2.191.349.500** | 89 | | | 0,00 | | | | | RSUD |
| | | | | **Persentase kelengkapan Prasarana Rumah Sakit sesuai standar** | | | 21.355.701.947 | | 17.664.257.546 | | 186.420.885 | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | RSUD |
| | | | | **Persentase Capaian Kepuasan Pasien atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum** | | | | | | 80% | | | **132.273.114** | 85 | 2.333.708.956 | 10.625,00 | | | 19.997.966.502 | | | RSUD |
| 3 | | **1 02 02 2.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM d** | **Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota** | | | 5.277.602.000 | | 4.993.597.784 | | | **88,89** | **2.191.349.500** | 89 | 2.191.349.500 | | | | 2.191.349.500 | | | RSUD |
| 3 | | 1 02 02 2.01 12 | Pengadaan Sarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kes | Jumlah Alat Non Medis yang sesuai standar | Unit | | 120.000.000 | 12 | 92.400.000 | | - | | | | | | | | | | | RSUD |
| 3 | | 1 02 02 2.01 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas | Jumlah alat medis yang sesuai standar | Unit | | 5.157.602.000 | 137 | 4.901.197.784 | | - | 8 | 2.191.349.500 | 8 | | | | | | | | RSUD |
| 3 | | **1 02 02 2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Ru** | **Terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | Persen | 100 | 16.078.099.947 | | 12.670.659.762 | 12 | 186.420.885 | **79** | **132.273.114** | 85 | 142.359.456 | 708,33 | 76,36 | | 5.043.557.240 | - | 0,3136911 | RSUD |
| 3 | ya Derajat Kesehatan | 1 02 02 2.02 14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdamp | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat Bencana dan/ atau berpotensi Bencana sesuai standar | Dokumen | 12 | 15.912.309.040 | 12 | 12.539.681.034 | 12 | 20.629.978 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | | | | | RSUD |
| 3 | | 1 02 02 2.02 23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Pelayanan Kepada Pasien Terlantar/ Tidak Mampu, Pelayanan Kepada Pasien Umum, Penguburan Mayat Tidak dikenal | Dokumen | 12 | 165.790.907 | 12 | 130.978.728 | 12 | 165.790.907 | 400 | 132.273.114 | 580 | 142.359.456 | 4.833,33 | 85,87 | | | | | RSUD |
| 3 | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA M** | | **Terlaksananya Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota** | | | 2.157.000.000 | | 1.758.571.508 | | - | | **471.607.201** | | 471.607.201 | | | | 2.230.178.709 | | 1,0339262 | RSUD |
| 3 | | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberday** | | **Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan** | | | 2.157.000.000 | | 1.758.571.508 | | - | **100** | **471.607.201** | 100 | 471.607.201 | | | | 2.230.178.709 | #DIV/0! | 1,0339262 | RSUD |
| 3 | | | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Insentif nakes non ASN | | | 2.157.000.000 | 12 | 1.758.571.508 | | - | 20 | 471.607.201 | 20 | | | | | 1.758.571.508 | #DIV/0! | 0,8152858 | RSUD |
| 4 | | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | 0 | 0 | | | 0 | 95.135.832.341 | | | 0,00 | 23.816.267.697 | 0,00 | 25,03 | 0 | 23.816.267.697 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | | | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | | | 0 | 0 | | | 0 | 95.135.832.341 | | | 0,00 | 23.816.267.697 | 0,00 | 25,03 | 0 | 23.816.267.697 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | | 1 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | 0 | 389.790.037.245 | | | 0 | 95.135.832.341 | | | 0,00 | 23.816.267.697 | 0,00 | 25,03 | 0 | 23.816.267.697 | 0,00 | 6,11 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 03 001 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 95 | 93.792.176.930 | | | 83 | 10.182.125.444 | | | 0,00 | 5.179.581.302 | 0,00 | 50,87 | 0 | 5.179.581.302 | 0,00 | 5,52 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 03 001 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 34.248.068.430 | | | 12 | 7.768.733.366 | | | 9,00 | 3.839.030.177 | 75,00 | 49,42 | 9 | 3.839.030.177 | 75,00 | 11,21 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 03 001 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan | Bulan | 12 | 31.639.293.430 | | | 12 | 7.235.653.366 | | | 9,00 | 3.558.110.177 | 75,00 | 49,17 | 9 | 3.558.110.177 | 75,00 | 11,25 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 03 001 2.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Honorarium Pengelola Keuangan | ang/bulan | 1480 | 2.608.775.000 | | | 296 | 533.080.000 | | | 9,00 | 280.920.000 | 3,04 | 52,70 | 9 | 280.920.000 | 0,01 | 10,77 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 03 001 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 250.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 03 001 2.05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pakaian Dinas Beserta Atribut | Stell | 375 | 250.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 03 001 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 6.917.508.500 | | | 12 | 750.653.138 | | | 9,00 | 327.399.624 | 75,00 | 43,62 | 9 | 327.399.624 | 75,00 | 4,73 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 03 001 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Adanya Jaringan Instalasi Listrik Lampu Penerangan jalan Umum dan Terpeliharanya Jaringan Instalasi Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum | Jenis | 3 | 2.616.500.000 | | | 3 | 3.298.830 | | | 3,00 | 3.261.000 | 1,00 | 0,99 | 3 | 3.261.000 | 1,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 03 001 2.06 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | 42 | 1.509.000.000 | | | 42 | 200.000.232 | | | 30,00 | 116.658.800 | 71,43 | 58,33 | 30 | 116.658.800 | 71,43 | 7,73 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 03 001 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan Rumah Tangga | Jenis | 27 | 100.000.000 | | | 27 | 19.994.576 | | | 14,00 | 7.701.200 | 51,85 | 0,39 | 14 | 7.701.200 | 51,85 | 7,70 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | an akuntabilitas per | 1 03 001 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis | 2 | 152.008.500 | | | 2 | 30.401.500 | | | 3,00 | 23.663.800 | 150,00 | 77,84 | 3 | 23.663.800 | 150,00 | 15,57 | kerjaan Umum dan Penataa |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 1 | 03 | 001 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Perjalanan Dinas | ang/bulan | 4255 | 2.540.000.000 | | | 805 | 496.958.000 | | | 650,00 | 176.114.824 | 80,75 | 35,44 | 650 | 176.114.824 | 15,28 | 6,93 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 001 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit | 37 | 3.020.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 001 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Unit | 4 | 350.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 01 | 2,1 | 03 | Pengadaan Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | Unit | 21 | 2.000.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 01 | 2,1 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 12 | 670.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 001 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | 12 | 46.106.600.000 | | | 12 | 1.042.742.740 | | | 9,00 | 612.032.369 | 75,00 | 58,69 | 9 | 612.032.369 | 75,00 | 1,33 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 001 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Telepon,Internet,air dan Listrik | Laporan | 12 | 41.500.000.000 | | | 12 | 74.040.000 | | | 9,00 | 41.434.369 | 75,00 | 55,96 | 9 | 41.434.369 | 75,00 | 0,10 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 001 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Laporan | 672 | 272.800.000 | | | 112 | 30.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 001 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honorarium Pegawai Tidak Tetap | Laporan | 12 | 4.333.800.000 | | | 12 | 938.702.740 | | | 36,00 | 570.598.000 | 300,00 | 60,79 | 36 | 570.598.000 | 300,00 | 13,17 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 001 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerat | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Unit | 36 | 3.250.000.000 | | | 100 | 619.996.200 | | | 12,00 | 401.119.132 | 12,00 | 64,70 | 12 | 401.119.132 | 33,33 | 12,34 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 001 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Ken | pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan | Unit | 15 | 250.000.000 | | | 15 | 70.000.000 | | | 5,00 | 25.652.632 | 33,33 | 36,65 | 5 | 25.652.632 | 33,33 | 10,26 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 001 | 2.09 | 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Unit | 21 | 3.000.000.000 | | | 19 | 549.996.200 | | | 9,00 | 375.466.500 | 47,37 | 68,27 | 9 | 375.466.500 | 42,86 | 12,52 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 002 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | % | 52,11 | 62.932.563.070 | | | 50,11 | 11.754.759.580 | | | 0,00 | 3.320.056.161 | 0,00 | 28,24 | 0 | 3.320.056.161 | 0,00 | 5,28 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (W | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | % | 52,11 | 800.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 06 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | Unit | 2 | 800.000.000 | | | 0 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 002 | 2.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada | Rehabilitasi Jaringan Irigasi | % | 52,11 | 62.132.563.070 | | | 100 | 11.754.759.580 | | | 0,00 | 3.320.056.161 | 0,00 | 28,24 | 0 | 3.320.056.161 | 0,00 | 5,34 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | ntitas infrastruktur d | 1 | 03 | 002 | 2.02 | 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi | Dokumen Rencanan Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Dokumen | 5 | 500.000.000 | | | 1 | 100.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 002 | 2.02 | 03 | Pembangunan Bendung Irigasi | Bendung Irigasi | Bendung | 6 | 2.090.512.614 | | | 2 | 900.000.000 | | | 1,00 | 247.100.581 | 0,50 | 0,27 | 1 | 247.100.581 | 0,17 | 0,12 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 08 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | KM | 442,59 | 1.200.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 09 | Peningkatan Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan | Bendung | 8 | 1.900.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 002 | 2.02 | 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Rehabilitasi Jaringan Irigasi | KM | 442,59 | 38.200.000.000 | | | 3,55 | 8.398.999.000 | | | 1,00 | 1.162.495.000 | 0,28 | 0,14 | 1 | 1.162.495.000 | 0,00 | 0,03 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 15 | Rehabilitasi Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi | Bendung | 4 | 2.062.050.456 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 002 | 2.02 | 21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Honorarium Non PNS Lainnya, Petugas Lapangan Bidang Pengairan,Pekerja Saluran (Peksal) | KM | 442,59 | 15.780.000.000 | | | 12 | 2.355.760.580 | | | 8,00 | 1.910.460.580 | 66,67 | 81,10 | 8 | 1.910.460.580 | 1,81 | 12,11 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 22 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | | Bendung | 4 | 400.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 003 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN A | Persentase penduduk berakses air minum | % | 68,709 | 14.800.000.000 | | | 68,702 | 3.431.810.000 | | | 0,00 | 567.136.595 | 0,00 | 0,17 | 0 | 567.136.595 | 0,00 | 0,04 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 003 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di | Tersedianya Sambungan Rumah | % | 68,709 | 14.800.000.000 | | | 68,702 | 3.431.810.000 | | | 0,00 | 567.136.595 | 0,00 | 0,17 | 0 | 567.136.595 | 0,00 | 0,04 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 003 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi danTeknis SPAM | Dokumen | 5 | 500.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 02 | Supervisi Pembangunan /Peningkatan /Perluasan/Perbaikan SPAM | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM | Dokumen | 4 | 300.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat | SR | 650 | 1.300.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | ntitas infrastruktur d | 1 | 03 | 003 | 2.01 | 05 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Optimalisasi SPAM | Liter/Detik | 7.500 | 2.050.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 06 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Optimalisasi SPAM | m | 10.833 | 1.300.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 003 | 2.01 | 07 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Tersedianya Sambungan Rumah | SR | 343 | 1.550.000.000 | | | 192 | 500.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 003 | 2.01 | 08 | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Rehabilitasi SPAM Kawasan Perdesaan | m' | 10.833 | 1.300.000.000 | | | 1524 | 2.931.810.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 17 | Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan | ah Tangga | 650 | 1.300.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 18 | Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan diKawasan Perdesaan | Optimalisasi SPAM Bukan Perpipaan | Unit | 8 | 1.300.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 19 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Tersedianya Sambungan Rumah | SR | 289 | 1.300.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 20 | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi | unit | 7 | 1.300.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 21 | Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi | unit | 7 | 1.300.000.000 | | | 0 | - | | | 3,00 | 567.136.595 | 0,00 | 0,00 | 3 | 567.136.595 | 0,43 | 0,44 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DANPENGELOLAAN PERSAMPAHA | Persentase Penanganan Sampah | % | 75,86 | 2.400.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 04 | 2.01 | | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupate | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 2.400.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Pers | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun | Dokumen | 1 | 200.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 02 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TP | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/ SPA Kewenangan Provinsi | Dokumen | 1 | 200.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 03 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | ah Tangga | 200 | 500.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 04 | Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi | Unit | 1 | 500.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 05 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | ah Tangga | 200 | 500.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 06 | Penyediaan Sarana Persampahan | Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan | Unit | 1 | 500.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 005 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tinggal bersanitasi | % | 76,58 | 12.850.000.000 | | | 74,08 | 2.599.999.715 | | | 0,00 | 724.924.715 | 0,00 | 27,88 | 0 | 724.924.715 | 0,00 | 5,64 | kerjaan Umum dan Penataa |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 1 | 03 | 005 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daera | Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | % | 76,58 | 12.850.000.000 | | | 74,08 | 2.599.999.715 | | | 0,00 | 724.924.715 | 0,00 | 27,88 | 0 | 724.924.715 | 0,00 | 5,64 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air L | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun | Dokumen | 3 | 100.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 05 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik T | Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman | h Tangga | 2.650 | 300.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 06 | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik | h Tangga | 2550 | 100.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 005 | 2.01 | 08 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelola | Peningkatan SDM terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kelompok | 69 | 500.000.000 | | | 4 | 99.999.715 | | | 4,00 | 99.999.715 | 100,00 | 100,00 | 4 | 99.999.715 | 5,80 | 20,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | ntitas infrastruktur d | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara | Unit | 49 | 50.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 11 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaa | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | Dokumen | 5 | 300.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 005 | 2.01 | 12 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Perm | Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | ah Tangga | 3450 | 11.200.000.000 | | | 385 | 2.500.000.000 | | | 150,00 | 624.925.000 | 0,39 | 0,25 | 150 | 624.925.000 | 0,04 | 0,06 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 13 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja | Unit | 4 | 150.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 15 | Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT | Tersedianya IPLT | Unit | 1 | 100.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 17 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasar | Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT | Dokumen | 1 | 50.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 006 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | % | 65 | 22.939.937.995 | | | 61 | 5.460.557.665 | | | 0,00 | 1.104.583.750 | 0,00 | 20,23 | 0 | 1.104.583.750 | 0,00 | 4,82 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 006 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsu | Persentase drainase dalamTersedianya Saluran Drainase yang Terpelihara | % | 65 | 22.939.937.995 | | | 61 | 5.460.557.665 | | | 0,00 | 1.104.583.750 | 0,00 | 20,23 | 0 | 1.104.583.750 | 0,00 | 4,82 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 006 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaa | Dokumen Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | Dokumen | 8 | 1.400.000.000 | | | 2 | 700.000.000 | | | 1,00 | 104.583.750 | 0,50 | 0,15 | 1 | 104.583.750 | 0,13 | 0,07 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 02 | Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan | Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang Disusun | Dokumen | 5 | 400.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 03 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | Dokumen | 4 | 300.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 006 | 2.01 | 005 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Terbangunnya Saluran Drainase/ Gorong-gorong Perkotaan | M | 5.512.756 | 5.000.000.000 | | | 1080 | 1.600.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | ntitas infrastruktur d | 1 | 03 | 006 | 2.01 | 006 | Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan | Tersedianya Saluran Drainase yang Optimal | M | 5.506.000 | 5.358.265.000 | | | 400 | 1.200.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 006 | 2.01 | 007 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | Tersedianya Saluran Drainase yang baik | M | 5.506.000 | 2.931.672.995 | | | 500 | 510.557.665 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 006 | 2.01 | 09 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Tersedianya Saluran Drainase yang Terpelihara | M | 5.506.000 | 3.500.000.000 | | | 8000 | 1.000.000.000 | | | 6.000,00 | 1.000.000.000 | 0,75 | 100,00 | 6.000 | 1.000.000.000 | 0,00 | 28,57 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 10 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan | Dokumen | 5.506.000 | 100.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 12 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | M | 1758 | 1.300.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 13 | Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan | M | 1758 | 1.300.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 006 | 2.01 | 14 | Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan | Saluran Drainase Lingkungan | M | 1758 | 1.300.000.000 | | | 0 | 450.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 16 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkun | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun | Dokumen | 1 | 50.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 008 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Gedung Pemerintah dalam kondisi baik | % | 65 | 8.575.105.449 | | | 61 | 2.787.396.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 008 | 2.01 | | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, P | Tersedianya Bangunan Gedung Kantor | % | 65 | 8.575.105.449 | | | 61 | 2.787.396.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 008 | 2.01 | 02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedu | Tersedianya Bangunan Gedung Kantor | /Dokumen | 16 | 5.941.709.449 | | | 9 | 1.804.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | ntitas infrastruktur d | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 03 | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun | Dokumen | 2 | 200.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 008 | 2.01 | 12 | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Stra | Tersedianya Bangunan Gedung yang Optimal | Unit | 10 | 1.883.396.000 | | | 3 | 983.396.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 13 | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan | Unit | 4 | 550.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 009 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan | % | 25 | 3.300.000.000 | | | 25 | 500.000.000 | | | 0,00 | 433.100.000 | 0,00 | 86,62 | 0 | 433.100.000 | 0,00 | 0,13 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | gan dan pelestarian | 1 | 03 | 009 | 2.01 | | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabu | Pemeliharaan Taman Kawasan Perkotaan | % | 25 | 3.300.000.000 | | | 25 | 500.000.000 | | | 0,00 | 433.100.000 | 0,00 | 86,62 | 0 | 433.100.000 | 0,00 | 0,13 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 009 | 2.01 | 03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Penataan Taman Kawasan Perkotaan | Kawasan | 5 | 800.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 009 | 2.01 | 04 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | Pemeliharaan Taman Kawasan Perkotaan | Kawasan | 2 | 2.500.000.000 | | | 2 | 500.000.000 | | | 2,00 | 433.100.000 | 100,00 | 86,62 | 2 | 433.100.000 | 100,00 | 17,32 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 010 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | % | 70 | 163.200.253.801 | | | 63 | 57.299.184.502 | | | 0,00 | 12.311.221.353 | 0,00 | 21,49 | 0 | 12.311.221.353 | 0,00 | 7,54 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 010 | 2.01 | | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Jalan dilebarkan | % | 70 | 163.200.253.801 | | | 63 | 57.299.184.502 | | | 0,00 | 12.311.221.353 | 0,00 | 21,49 | 0 | 12.311.221.353 | 0,00 | 7,54 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 010 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan S | Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Dokumen | 10 | 500.000.000 | | | 1 | 150.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 010 | 2.01 | 02 | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan | Tersedianya Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan | M² | 240 | 2.800.000.000 | | | 40 | 1.000.000.000 | | | 13,00 | 250.000.000 | 32,50 | 25,00 | 13 | 250.000.000 | 5,42 | 8,93 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 010 | 2.01 | 03 | Pengelolaan Leger Jalan | Pengelolaan Leger Jalan | Dokumen | 2 | 286.792.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 010 | 2.01 | 04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Dokumen | 6 | 1.000.000.000 | | | 1 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 010 | 2.01 | 05 | Pembangunan Jalan | Jalan dibangun / ditingkatkan | KM | 1.013 | 31.718.818.678 | | | 9,2 | 43.046.594.169 | | | 251,00 | 7.240.837.470 | 2.728,26 | 16,82 | 251 | 7.240.837.470 | 0,25 | 22,83 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 010 | 2.01 | 06 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Jalan dilebarkan | KM | 369 | 68.156.212.274 | | | 12 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | ntitas infrastruktur d | 1 | 03 | 010 | 2.01 | 08 | Rekonstruksi Jalan | Rekonstruksi Jalan | KM | 11,39 | 11.080.360.080 | | | 0,8 | 4.452.590.333 | | | 10,00 | 489.723.266 | 12,50 | 0,11 | 10 | 489.723.266 | 0,88 | 0,04 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 010 | 2.01 | 09 | Rehabilitasi Jalan | Turap/Talud/Bronjong dan Drainase Jalan | KM | 1.002,93 | 12.808.070.769 | | | 2,09 | 1.400.000.000 | | | 10,00 | 97.125.000 | 4,78 | 0,07 | 10 | 97.125.000 | 0,01 | 0,01 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 010 | 2.01 | 10 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Pemeliharaan Berkala Jalan | KM | 1.013 | 3.400.000.000 | | | 1,1 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 010 | 2.01 | 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Pemeliharaan Rutin Jalan | KM | 1.013 | 20.000.000.000 | | | 50 | 3.000.000.000 | | | 40,00 | 3.000.000.000 | 80,00 | 100,00 | 40 | 3.000.000.000 | 3,95 | 15,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 010 | 2.01 | 12 | Pembangunan Jembatan | Jembatan | M | 1499,5 | 3.850.000.000 | | | 6 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 1 | 03 | 010 | 2.01 | 16 | Penggantian Jembatan | Penggantian Jembatan | M | 1477,5 | 2.300.000.000 | | | 0 | 3.900.000.000 | | | 30,00 | 1.159.105.639 | 0,00 | 0,30 | 30 | 1.159.105.639 | 0,02 | 0,50 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 010 | 2.01 | 18 | Rehabilitasi Jembatan | Rehabilitasi Jembatan | M | 1483,5 | 2.250.000.000 | | | 6 | 250.000.000 | | | 30,00 | 74.429.978 | 5,00 | 0,30 | 30 | 74.429.978 | 0,02 | 0,03 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 010 | ### | 19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Pemeliharaan Rutin Jembatan | M | 1703,5 | 1.250.000.000 | | | 20 | 100.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 010 | 2.01 | 21 | Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat | Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat | KM | 2,4 | 1.200.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Dokumen | 3 | 300.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 010 | 2.01 | 23 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Dokumen | 3 | 300.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | Meningkatnya kualit | 1 | 03 | 011 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Meningkatnya SDM Tenaga terampil konstruksi | Orang | 100 | 650.000.000 | | | 50 | 99.999.740 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 011 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Orang | 100 | 650.000.000 | | | 50 | 99.999.740 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 011 | 2.01 | 004 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Orang | 450 | 250.000.000 | | | 50 | 99.999.740 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 011 | 2.01 | 006 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Orang | 260 | 200.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 011 | 2.01 | 007 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Orang | 240 | 200.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | Meningkatnya peng | 1 | 03 | 012 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Ketaatan terhadap RTRW | % | 79 | 4.350.000.000 | | | 75 | 1.019.999.695 | | | 0,00 | 175.663.821 | 0,00 | 17,22 | 0 | 175.663.821 | 0,00 | 4,04 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 012 | 2.01 | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata R | Sosiali Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang | Dokumen | 9 | 1.250.000.000 | | | 1 | 69.999.795 | | | 0,00 | 45.041.600 | 0,00 | 0,64 | 0 | 45.041.600 | 0,00 | 0,04 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetap | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | Dokumen | 4 | 1.000.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 012 | 2.01 | 004 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ru | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang | Dokumen | 5 | 250.000.000 | | | 1 | 69.999.795 | | | 1,00 | 45.041.600 | 1,00 | 0,64 | 1 | 45.041.600 | 0,20 | 0,18 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 012 | 2.02 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/K | RRTR Kabupaten/Kota | Dokumen | 3 | 2.000.000.000 | | | 1 | 600.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 012 | 2.02 | 002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | RRTR Kabupaten/Kota | Dokumen | 3 | 2.000.000.000 | | | 1 | 600.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 12 | 2 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 3 | 150.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 12 | 2 | 02 | Sistem Informasi Penataan Ruang | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang | Dokumen | 3 | 150.000.000 | | | 0 | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 012 | 2.04 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Ka | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Bulan | 12 | 950.000.000 | | | 12 | 349.999.900 | | | 9,00 | 130.622.221 | 75,00 | 0,00 | 9 | 130.622.221 | 75,00 | 13,75 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 4 | | 1 | 03 | 012 | 2.04 | 004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Ruang | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Bulan | 12 | 950.000.000 | | | 12 | 349.999.900 | | | 9,00 | 130.622.221 | 75,00 | 37,32 | 9 | 130.622.221 | 75,00 | 13,75 | kerjaan Umum dan Penataa |
| 5 | | | | | | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertahanan | | | | 13.588.632.233 | | 19.846.798.435 | | 13.620.138.985 | 514 | 38.100.614.281 | 1.860 | 43.771.936.545 | 0,00 | 88,78 | 1.860 | 63.618.734.980 | 0,00 | 1.116,06 | DPKPP |
| 5 | Meningkatnya Pelay | 1 | 04 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | | 3.656.782.274 | | 3.623.167.752 | | 3.740.094.926 | 48 | 19.633.502.012 | 203,98 | 23.866.069.676 | 0,00 | 96,21 | 203,98 | 27.489.237.428 | 0,00 | 751,73 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Prangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 3.023.829.274 | | 3.025.040.553 | | 3.148.579.327 | | 707.628.869 | 200,00 | 3.220.456.274 | 0,00 | 90,95 | 200,00 | 6.245.496.827 | 0,00 | 206,54 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 01 | 2.02 | 01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | orang/Bula | 12 | 2.723.829.274 | 1 | 2.523.975.053 | 4 | 2.603.225.777 | 1 | 597.047.648 | 3,00 | 2.758.085.053 | 300,00 | 92,51 | 4,00 | 5.282.060.106 | 33,33 | 193,92 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | dokumen | 50 | 300.000.000 | 12 | 501.065.500 | 48 | 545.353.550 | 12 | 110.581.221 | 36,00 | 462.371.221 | 300,00 | 82,62 | 48,00 | 963.436.721 | 96,00 | 321,15 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Prangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 49.728.000 | | 49.728.000 | | 49.728.000 | 0 | 0 | 74,00 | 49.728.000 | 0,00 | 100,00 | 74,00 | 99.456.000 | 0,00 | 200,00 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dians Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | paket | 45 | 49.728.000 | 45 | 49.728.000 | 45 | 49.728.000 | 0 | 0 | 74,00 | 49.728.000 | 164,44 | 100,00 | 74,00 | 99.456.000 | 164,44 | 200,00 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 380.000.000 | | 368.752.278 | | 316.224.731 | 60 | 145.934.121 | 104,17 | 300.560.830 | 0,00 | 85,25 | 164,59 | 669.313.108 | 0,00 | 176,14 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Istalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | paket | 8 | 20.000.000 | 1 | 293.008 | 6 | 4.644.952 | 3 | 0 | 9,00 | 4.644.952 | 150,00 | 100,00 | 12,00 | 4.937.960 | 150,00 | 24,69 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | paket | 5 | 50.000.000 | 12 | 199.272.709 | 35 | 78.349.450 | 24 | 50.750.100 | 72,00 | 95.749.750 | 205,71 | 98,97 | 96,00 | 295.022.459 | 1.920,00 | 590,04 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersediannya Peralatan Rumah Tangga | paket | 22 | 40.000.000 | 37 | 2.493.625 | 12 | 19.508.368 | 15 | 2.258.264 | 45,00 | 13.092.152 | 375,00 | 99,87 | 60,00 | 15.585.777 | 272,73 | 38,96 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersediannya Barang Cetakan Dan Penggandaan | paket | 6 | 30.000.000 | | | 6 | 29.667.961 | 6 | 4.471.200 | 12,00 | 34.139.100 | 200,00 | 100,00 | 18,00 | 34.139.100 | 300,00 | 113,80 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersediannya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan | dokumen | 60 | 40.000.000 | 4 | 33.196.000 | 36 | 4.320.000 | 200 | 2.160.000 | 200,00 | 4.320.000 | 555,56 | 100,00 | 400,00 | 37.516.000 | 666,67 | 93,79 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 700 | 200.000.000 | 5 | 133.496.936 | 1.241 | 179.734.000 | 250 | 86.294.557 | 705,00 | 148.614.876 | 56,81 | 74,46 | 955,00 | 282.111.812 | 136,43 | 141,06 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 0 | | 0 | | 25.447.868 | 12 | 28.740.000 | 0,00 | 50.418.000 | 0,00 | 91,36 | 12,00 | 50.418.000 | 0,00 | 0,00 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | unit | 10 | 0 | | | 5 | 25.447.868 | 12 | 28.740.000 | 0,00 | 50.418.000 | 0,00 | 91,36 | 12,00 | 50.418.000 | 120,00 | 0,00 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 53.225.000 | | 18.744.971 | | 38.225.000 | 82 | 10.154.500 | 246,67 | 39.256.100 | 0,00 | 88,61 | 328,89 | 58.001.071 | 0,00 | 108,97 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | laporan | 12 | 18.225.000 | 20 | 13.754.971 | 12 | 18.225.000 | 12 | 4.809.800 | 36,00 | 24.171.400 | 300,00 | 99,47 | 48,00 | 37.926.371 | 400,00 | 208,10 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | laporan | 15 | 20.000.000 | 36 | 4.990.000 | 15 | 20.000.000 | 7 | 5.344.700 | 21,00 | 15.084.700 | 140,00 | 75,42 | 28,00 | 20.074.700 | 186,67 | 100,37 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | laporan | 12 | 15.000.000 | | | 12 | 0 | | 0 | 36,00 | 0 | 300,00 | 0,00 | 36,00 | 0 | 300,00 | 0,00 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 150.000.000 | | 160.901.950 | | 161.890.000 | 36 | 273.932.253 | 107,14 | 299.783.603 | 0,00 | 91,15 | 142,86 | 460.685.553 | 0,00 | 307,12 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kend | Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | unit | 5 | 50.000.000 | 5 | 11.301.950 | 7 | 48.590.000 | 5 | 41.032.253 | 15,00 | 66.883.603 | 214,29 | 69,97 | 20,00 | 78.185.553 | 400,00 | 156,37 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | unit | 1 | 100.000.000 | 1 | 149.600.000 | 1 | 113.300.000 | 1 | 232.900.000 | 0,00 | 232.900.000 | 0,00 | 99,83 | 1,00 | 382.500.000 | 100,00 | 382,50 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 04 | | | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani | | | 940.000.000 | | 982.493.760 | | 1.561.323.000 | 180 | 21.477.640 | 720,00 | 977.477.640 | 0,00 | 79,38 | 720,00 | 1.959.971.400 | 0,00 | 208,51 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 04 | 2.01 | | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah K | Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani | | | 940.000.000 | | 982.493.760 | | 1.561.323.000 | 180 | 21.477.640 | 540,00 | 977.477.640 | 0,00 | 79,38 | 720,00 | 1.959.971.400 | 0,00 | 208,51 | DPKPP |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 1 | 04 | 04 | 2.01 | 01 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan B | Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | unit rumah | 60 | 940.000.000 | 47 | 982.493.760 | 30 | 1.561.323.000 | 19 | 21.477.640 | 127,00 | 977.477.640 | 423,33 | 79,38 | 146,00 | 1.959.971.400 | 243,33 | 208,51 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 05 | | | Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) | | | 8.966.849.959 | | 15.241.136.923 | | 7.639.806.799 | 86 | 17.705.805.629 | 136,00 | 18.145.472.229 | 0,00 | 99,56 | 136,00 | 33.386.609.152 | 0,00 | 372,33 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 05 | 2.01 | | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) | | | 8.966.849.959 | | 15.241.136.923 | | 7.639.806.799 | 86 | 17.705.805.629 | 50,00 | 18.145.472.229 | 0,00 | 99,56 | 136,00 | 33.386.609.152 | 0,00 | 372,33 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 05 | 2.01 | 02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunj | Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | lokasi | 30 | 8.234.849.959 | 12 | 14.222.870.073 | 30 | 7.639.806.799 | 86 | 17.705.805.629 | 30,00 | 18.145.472.229 | 100,00 | 99,56 | 116,00 | 32.368.342.302 | 386,67 | 393,07 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 05 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Singkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana , Utilitas Umum Perumahan | laporan | 4 | 732.000.000 | 2 | 1.018.266.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1.018.266.850 | 75,00 | 139,11 | DPKPP |
| 5 | | 2 | 10 | 05 | | | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembani | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | | | 25.000.000 | | 0 | | 678.914.260 | 200 | 739.829.000 | 800,00 | 782.917.000 | 0,00 | 79,98 | 800,00 | 782.917.000 | 0,00 | 3.131,67 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 02 | 2.01 | | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembani | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | | | 25.000.000 | | 0 | | 678.914.260 | 200 | 739.829.000 | 600,00 | 782.917.000 | 0,00 | 79,98 | 800,00 | 782.917.000 | 0,00 | 3.131,67 | DPKPP |
| 5 | | 1 | 04 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santun | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Satunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | dokumen | 2 | 25.000.000 | 12 | | 1 | 678.914.260 | | 739.829.000 | 6,00 | 782.917.000 | 600,00 | 79,98 | 6,00 | 782.917.000 | 300,00 | 3.131,67 | DPKPP |
| 6 | | 01 | 05 | | | | Satuan Polisi Pamong Praja | | | | 64.774.522.720 | | | | 12.458.084.311 | | 9.595.639.691 | | 17.437.927.077 | | | | 17.437.927.077 | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 01 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | | 11.635 | 63.934.572.720 | | | 263 | 11.909.645.231 | | 7.017.975.587 | | 14.521.416.593 | 0,0 | 96,2 | | 14.521.416.593 | - | 22,6 | SATPOL-PP |
| 6 | | 01 | 05 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan perangkat Daerah | | | | 23.433.523.488 | | | | 4.021.767.681 | | 1.595.912.857 | | 3.649.090.148 | | | | 3.649.090.148 | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 01 | 05 | 01 | 2.02 | 01 | Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | bulan | 70 | 23.017.964.488 | | | 14 | 3.971.767.681 | 2 | 1.466.042.857 | 14 | 3.488.500.148 | 100 | 94 | 14 | 3.488.500.148 | 20 | 15,155554 | SATPOL-PP |
| 6 | | 01 | 05 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya Jasa administrasi Keuangan | orang | 165 | 308.375.000 | | | 3 | 50.000.000 | 8 | 129.870.000 | 11 | 160.590.000 | 100 | 74,512806 | 11 | 160.590.000 | 0,0666667 | 0,5207621 | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Meningkatnya Jasa Jaminan/ Asuransi Kecelakaan Kerja | OB | 1675 | 107.184.000 | | | | | | | - | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 01 | 05 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 302.550.000 | | | | 11.000.000 | | 450.246.000 | 0 | 450.246.000 | | | | 450.246.000 | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 01 | 2.04 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Adtribut Perlengkapannya | TersedianyaPakaian Dinas Beserta Adtribut Perlengkapannya | stell | 105 | 67.500.000 | | | 13 | 11.000.000 | 811 | 450.246.000 | 811 | 450.246.000 | 100 | 98,755613 | 811 | 450.246.000 | 7,7238095 | 6,6703111 | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan | stell | 1675 | 219.050.000 | | | | | | | - | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Adanya Pakaian Batik | stell | 175 | 16.000.000 | | | | | | | - | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Adanya Training dan Sepatu Olahraga | buah | 1005 | - | | | | | | | - | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 01 | 2.04 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kali | 30 | - | | | | | | | - | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 01 | 2.06 | | Administrasi umum Perangkat Daerah | | | | 564.399.232 | | | | 141.365.671 | | 375.339.404 | | 512.786.719 | | | | 512.786.719 | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | buah | 300 | 77.650.000 | | | 8 | 15.000.000 | 7 | 44.981.602 | 10 | 59.969.631 | 100 | 99,949385 | 10 | 59.969.631 | 0,0333333 | 0,7723069 | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | jenis | 300 | 164.939.232 | | | | | | | | - | | | 0 | - | 0 | 0 | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor | buah | 88 | 9.000.000 | | | 60 | 40.120.044 | 26 | 44.821.045 | 51 | 84.941.089 | 100 | 99,930693 | 51 | 84.941.089 | 0,5795455 | 9,4378988 | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | jenis | 88 | 4.000.000 | | | 16 | 3.881.327 | 38 | 45.619.201 | 42 | 49.481.743 | 100 | 99,963117 | 42 | 49.481.743 | 0,4772727 | 12,370436 | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | jenis | 25 | 15.000.000 | | | 5 | 5.084.300 | 6 | 34.915.420 | 7 | 39.999.720 | 100 | 99,9993 | 7 | 39.999.720 | 0,28 | 2,666648 | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | buah | 40 | 3.000.000 | | | | | | | - | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | OH | 1350 | 290.810.000 | | | 23 | 77.280.000 | 408 | 205.002.136 | 636 | 278.394.536 | 100 | 99,42662 | 636 | 278.394.536 | 0,4711111 | 0,9573073 | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 1.175.000.000 | | | | 10.000.000 | | 1.132.657.626 | | 1.132.657.626 | | | | 1.132.657.626 | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Unit | 5 | 500.000.000 | | | | | 2 | 1019300600 | 2 | 1.019.300.600 | 100 | 92,663691 | 2 | 1.019.300.600 | 0,4 | 2,0386012 | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Adanya Kendaraan Dinas/Operasional Pemadam Kebakaran | unit | 8 | 630.000.000 | | | | | | | | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebeleur | Adanya Mebeleur | unit | 29 | 45.000.000 | | | 2 | 10.000.000 | 2 | 104.257.026 | 2 | 104.257.026 | 100 | 99,73084 | 2 | 104.257.026 | 0,0689655 | 2,3168228 | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Mesin/ Kartu Absensi | unit | 1 | - | | | | | 1 | 9100000 | 1 | 9.100.000 | 100 | 91 | 1 | 9.100.000 | 1 | 0,91 | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | unit | 9 | - | | | | | | | | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 35.784.100.000 | | | | 7.160.520.000 | | 2.734.391.350 | | 7.621.026.000 | | | | 7.621.026.000 | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | buah | 2250 | 24.000.000 | | | | | | | | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | bulan | 60 | 80.000.000 | | | 12 | 19.500.000 | 1 | 13.576.350 | 12 | 24.674.000 | 100 | 98,696 | 12 | 24.674.000 | 0,2 | 0,308425 | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | unit | 90 | 15.000.000 | | | 18 | 10.000.000 | 18 | 27980000 | 18 | 27.980.000 | 100 | 99,928571 | 18 | 27.980.000 | 0,2 | 1,8653333 | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran | unit | 15 | 10.000.000 | | | | | | | | - | | | 0 | - | 0 | 0 | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor/Jasa Kebersihan Kantor | orang | 5 | - | | | | | | | | | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Tersedianya Jasa Pendukung Teknis Administrasi Perkantoran | orang | 1675 | 35.655.100.000 | | | 10 | 7.131.020.000 | 1 | 2.692.835.000 | 10 | 7.568.372.000 | 100 | 97,5954 | 10 | 7.568.372.000 | 0,0059701 | 0,2122662 | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Tersedianya Jasa Jaga Malam Kantor | orang | 5 | - | | | | | | | | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 2.675.000.000 | | | | 564.991.879 | | 729.428.350 | | 1.155.610.100 | | | | 1.155.610.100 | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kend | Tersedianya Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | unit | 210 | 50.000.000 | | | | | | | | - | | | 0 | - | 0 | 0 | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Alat Keamanan | unit | 15 | 90.000.000 | | | | | | | | - | | | 0 | - | 0 | 0 | SATPOL-PP |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | | | | | | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional | unit | 110 | 2.500.000.000 | | | 67 | 561.991.879 | 32 | 412.753.350 | 65 | 838.935.100 | 100 | 99,992145 | 65 | 838.935.100 | 0,5909091 | 0,335574 | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Gedung Kantor | unit | 5 | - | | | 12 | 3.000.000 | 2 | 316675000 | 2 | 316.675.000 | 100 | 98,960938 | 2 | 316.675.000 | 0,4 | 0,9896094 | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | unit | 4 | - | | | | | | | | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat kendaraan Dinas/ Operasional | unit | 8 | 20.000.000 | | | | | | | | - | | | 0 | - | 0 | 0 | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Terpeliharanya Sumur Bor Pos Jaga dan Groun Tank | unit | 40 | 15.000.000 | | | | | | | | - | | | 0 | - | 0 | 0 | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | 59532 | 807.750.000 | | | 510 | 545.439.080 | | 2.026.719.505 | | 2.365.565.885 | 0,0 | 93,9 | | 2.365.565.885 | - | 130,9 | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 02 | 2.01 | | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah | Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah | | | 665.750.000 | | | | 433.439.080 | | 1.856.924.475 | | 2.183.772.205 | | | | 2.183.772.205 | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 01 | Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini d | Pengendalian Keamanan Lingkungan | kali | 50 | 25.000.000 | | | 10 | 11.997.240 | | 61.800.000 | - | 73.050.000 | | 100 | 0 | 73.050.000 | 0 | 2,922 | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Penertiban Pedagang Kaki Lima | kali/Ok | 10 | 78.700.000 | | | 22 | 52.288.715 | | 281.325.000 | - | 332.475.000 | | 100 | 0 | 332.475.000 | 0 | 4,224587 | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Peningkatan kerjasama dengan aparat dalam teknik pencegahan kejahatan | keg | 10 | - | | | | | | | | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Pengingkatan Kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah | oh | 58800 | 2.000.000 | | | | | | | | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Kerjasama Pengendalian Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Instansi Terkait | kali | 50 | 25.000.000 | | | | - | | 1.146.035.695 | 0 | 1.155.035.695 | | 89,268447 | 0 | 1.155.035.695 | 0 | 46,201428 | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Pengamanan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Tamu Pemerintahan Kabupaten Karo | Bulan | 60 | 392.800.000 | | | 12 | 306.336.285 | | 81.075.000 | 0 | 323.397.730 | | 100 | 0 | 323.397.730 | 0 | 0,823314 | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Operasi Kasih Sayang | kali | 22 | 41.250.000 | | | 5 | 13.924.370 | | 39375000 | 0 | 52.500.000 | | 100 | 0 | 52.500.000 | 0 | 1,2727273 | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindung | Penyegaran Anggota Satpol PP dan Damkar | keg | 5 | - | | | 1 | 28.000.000 | 1 | 199538780 | 1 | 199.538.780 | 100 | 99,76939 | 1 | 199.538.780 | 0,2 | 0,1995388 | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | HUT Satpol PP | keg | 5 | - | | | | | | | | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Study Banding Keluar Daerah | kali | 12 | - | | | | | | | | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Diklat PPNS | orang | 9 | 56.000.000 | | | | | | | | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Diklat Kompetensi Polisi Pamong Praja | orang | 8 | - | | | | | | | | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Latihan Bela Diri | keg | 5 | - | | | | | | | | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 07 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Pena | Kerjasama Pengembangan Kemampuan, Aparatur Polisi Pamong Praja Dengan TNI / Polri Dan Kejaksaan | kali | 150 | - | | | 450 | 11.250.000 | 23 | 47775000 | 23 | 47.775.000 | 100 | 80,94028 | 23 | 47.775.000 | 0,1533333 | | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Penertiban tempat Hiburan Malam dan Kemaksiatan | kali/Ok | 60 | 45.000.000 | | | 4 | 9.642.470 | | - | | - | | - | 0 | - | 0 | 0 | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | MOU Antara Satpol PP Dengan Kejaksaan, Pengadilan Dan Polri | buah | 3 | - | | | | | | | | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 08 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | Adanya Peralatan dan Perlengkapan Operasional Lapangan | unit | 9 | - | | | | | | | | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 02 | 2.02 | | Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | TerlaksananyaPenegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | | | 142.000.000 | | | | 112.000.000 | | 169.795.030 | | 181.793.680 | | | | 181.793.680 | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 01 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Waikota | Sosialisasi Peraturan Daerah | keg | 6 | - | | | 1 | 100.000.000 | 12 | 81799280 | 12 | 81.799.280 | 100 | 96,234447 | 12 | 81.799.280 | 2 | | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Penyuluhan Kepada Masyarakat | kali | 60 | - | | | | | | | | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Terbinanya Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) | kali | 90 | - | | | | | | | | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Penyusunan Bahan Kebijakan Produk Hukum Satpol PP | Ranperda | 3 | 100.000.000 | | | | - | | - | 0 | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 02 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Per | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Kali | 30 | 2.000.000 | | | | | | | | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Penertiban Bangunan Dan Kegiatan yang menyalahi Peraturan Daerah | kali | 25 | 25.000.000 | | | 5 | 12.000.000 | 120 | 87.995.750 | 132 | 99.994.400 | 100 | 99,9944 | 132 | 99.994.400 | 5,28 | 3,999776 | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Pengawasan Asset Daerah | kali | 50 | 15.000.000 | | | | | | | | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 04 | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | MENINGKATNYA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | 437 | 32.200.000 | | | 2 | 3.000.000 | | 550.944.599 | | 550.944.599 | 0,0 | 95,6 | | 550.944.599 | - | 1711,0 | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 04 | 2 | | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah/Kota | Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah/Kota | | | 32.200.000 | | | | 3.000.000 | | 550.944.599 | | 550.944.599 | | | | | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 04 | 2 | 01 | Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pelatihan Anggota Barisan Pencegah Pemadam Kebakaran (BP2K) | OH | 368 | 5.200.000 | | | | | | | | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Sosialisasi Pencegahan Kebakaran | Kali | 13 | 5.000.000 | | | | | | | | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 04 | 2 | 06 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran d | Sarana Prasarana serta pakaian khusus pemadam kebakaran | Unit | 21 | 10.000.000 | | | 2 | 3.000.000 | 106 | 550944599 | 106 | 550.944.599 | 100 | 95,550096 | 106 | 550.944.599 | 5,047619 | 55,09446 | SATPOL-PP |
| 6 | | | | | | | | Sarana dan Prasarana non Kebakaran | orang | 30 | 12.000.000 | | | | | | | | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 6 | | 1 | 05 | 04 | 2 | 08 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (S | Aplikasi integrasi pelaporan kebakaran secara online serta sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat | Unit/Kali | 5 | - | | | 0 | | | | | - | | | | - | | | SATPOL-PP |
| 7 | | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 1 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | 23.851.450.000 | | 3.837.841.002 | | 5.322.921.292 | | 1.799.628.739 | | 4.834.945.992 | 80,95 | 90,83 | | 8.672.786.994 | 58,76 | 36,36 | BPBD |
| 7 | Meningkatnya Pelay | 1 | 05 | 001 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 95 | 23.784.550.000 | 81,25 | 3.834.941.002 | 83 | 5.302.351.292 | 81,25 | 1.791.005.739 | 81,25 | 4.826.322.992 | 97,89 | 91,02 | 81,25 | 8.661.263.994 | 85,53 | 36,42 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.02 | | Perencanaan,Penganggaran, danEvaluasi KinerjaPerangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % | 100 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 6 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 15.583.900.020 | 100 | 3.403.416.117 | 100 | 3.617.229.360 | 25 | 1.167.217.614 | 100 | 3.413.723.246 | 100,00 | 94,37 | 40 | 6.817.139.363 | 40,00 | 43,74 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bula | 150 | 15.000.580.020 | 27 | 2.786.177.741 | 31 | 3.449.929.360 | 31 | 1.050.047.614 | 31 | 3.254.493.246 | 100,00 | 94,34 | 58 | 6.040.670.987 | 38,67 | 40,27 | BPBD |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.02 | 003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 583.320.000 | 12 | 617.238.376 | 12 | 167.300.000 | 3 | 117.170.000 | 12 | 159.230.000 | 100,00 | 95,18 | 24 | 776.468.376 | 40,00 | 133,11 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 275.120.000 | 46,92 | 38.582.500 | 100 | 41.664.000 | 0 | - | 100 | 41.664.000 | 100,00 | 100,00 | 19,38 | 80.246.500 | 19,38 | 29,17 | |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 335 | 225.120.000 | 61 | 38.582.500 | 62 | 41.664.000 | 0 | - | 62 | 41.664.000 | 100,00 | 100,00 | 123 | 80.246.500 | 36,72 | 35,65 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.05 | 009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 5 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 2.695.280.000 | 100 | 263.867.099 | 100 | 621.907.936 | 25 | 272.692.629 | 97,43 | 425.458.779 | 97,43 | 68,41 | 39,49 | 689.325.878 | 39,49 | 25,58 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 20 | 20.000.000 | 4 | 2.530.329 | 4 | 5.847.800 | 4 | 4.143.000 | 4 | 5.606.300 | 100,00 | 95,87 | 8 | 8.136.629 | 40,00 | 40,68 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 205 | 244.250.000 | 41 | 55.104.005 | 41 | 57.942.600 | 41 | 45.448.000 | 41 | 57.611.950 | 100,00 | 99,43 | 82 | 112.715.955 | 40,00 | 46,15 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.06 | 003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 70 | 38.030.000 | 0 | 0 | 19 | 10.149.536 | 18 | 7.968.600 | 18 | 9.659.600 | 98,68 | 95,17 | 18 | 9.659.600 | 25,71 | 25,40 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 30 | 225.000.000 | 5 | 32.787.630 | 6 | 52.000.000 | 5 | 35.936.900 | 5 | 47.247.600 | 83,33 | 90,86 | 10 | 80.035.230 | 33,33 | 35,57 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 4.500 | 27.000.000 | 720 | 4.800.000 | 900 | 5.400.000 | 225 | 2.550.000 | 900 | 5.400.000 | 100,00 | 100,00 | 1620 | 10.200.000 | 36,00 | 37,78 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.06 | 008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 483.200.000 | 0 | 0 | 12 | 131.640.000 | 3 | 54.238.000 | 12 | 100.862.000 | 100,00 | 76,62 | 12 | 100.862.000 | 20,00 | 20,87 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 1.657.800.000 | 12 | 168.645.135 | 12 | 358.928.000 | 3 | 122.408.129 | 12 | 199.071.329 | 100,00 | 55,46 | 24 | 367.716.464 | 40,00 | 22,18 | |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 100 | 560.849.980 | 0 | - | 100 | 122.169.996 | 30,77 | 6.000.000 | 100 | 110.783.000 | 100,00 | 90,68 | 20,00 | 110.783.000 | 20,00 | 19,75 | |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.07 | 002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 1 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.07 | 005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 1 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.07 | 006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 45 | 510.849.980 | 0 | 0 | 13 | 122.169.996 | 4 | 6.000.000 | 13 | 110.783.000 | 100,00 | 90,68 | 13 | 110.783.000 | 28,89 | 21,69 | |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.07 | 007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.07 | 009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.07 | 011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 2.933.900.000 | 100 | 38.860.086 | 100 | 496.890.000 | 25 | 125.225.818 | 100 | 491.126.322 | 100,00 | 98,84 | 40,00 | 529.986.408 | 40,00 | 18,06 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60 | 144.800.000 | 12 | 16.503.625 | 12 | 21.900.000 | 3 | 5.075.146 | 12 | 18.245.106 | 100,00 | 83,31 | 24 | 34.748.731 | 40,00 | 24,00 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 2.789.100.000 | 12 | 22.356.461 | 12 | 474.990.000 | 3 | 120.150.672 | 12 | 472.881.216 | 100,00 | 99,56 | 24 | 495.237.677 | 40,00 | 17,76 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daeral | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 1.726.500.000 | 59,46 | 90.215.200 | 100 | 402.490.000 | 45,67 | 219.869.678 | 85,44 | 343.567.645 | 85,44 | 85,36 | 28,98 | 433.782.845 | 28,98 | 25,12 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Ken | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 65 | 1.159.600.000 | 12 | 67.425.200 | 13 | 231.920.000 | 13 | 61.561.678 | 13 | 185.259.645 | 92,31 | 79,88 | 25 | 252.684.845 | 38,46 | 21,79 | BPBD |
| 7 | Meningkatnya Kapa | 1 | 05 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 100 | 66.900.000 | 16 | 2.900.000 | 25 | 20.570.000 | 3 | 8.623.000 | 16 | 8.623.000 | 64,00 | 41,92 | 32 | 11.523.000 | 32,00 | 17,22 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 001 | 2.09 | 011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor at | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Unit | 5 | 500.000.000 | 1 | 19.890.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 149.685.000 | 1 | 149.685.000 | 100,00 | 99,79 | 2 | 169.575.000 | 40,00 | 33,92 | BPBD |
| 7 | | 1 | 05 | 003 | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Meningkatkan kapasitas daerah menghadapi bencana | Indeks | 0,60 | 7.747.778.000 | 0,37 | 26.426.646.265 | 0,52 | 16.191.715.652 | 0,47 | 8.689.212.607 | 0,47 | 14.878.343.093 | 90,38 | 91,89 | 0,47 | 41.304.989.358 | 78,33 | 533,12 | |
| 7 | | 1 | 05 | 003 | 2.01 | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota | % | 100 | 1.010.000.000 | 46,20 | 121.346.258 | 100 | 75.000.000 | 0 | - | 100 | 71.637.700 | 100,00 | 95,52 | 29,24 | 192.983.958 | 29,24 | 19,11 | BPBD |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.01 | 001 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi | Dokumen | 1 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | BPBD |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.01 | 002 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupate | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | Orang | 4.600 | 810.000.000 | 462 | 121.346.258 | 500 | 75.000.000 | | - | 935 | 71.637.700 | 100,00 | 95,52 | 1397 | 192.983.958 | 30,37 | 23,83 | |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.02 | 002 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Orang | 1.200 | 1.200.000.000 | 75 | 216.624.306 | 110 | 260.387.464 | 97 | 149.349.130 | 132 | 239.397.930 | 100,00 | 91,94 | 207 | 456.022.236 | 17,25 | 38,00 | BPBD |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.02 | 003 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhad | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | 4 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.02 | 004 | Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas | Unit | 22 | 450.000.000 | 3 | 138.500.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138.500.000 | 13,64 | 30,78 | |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 05 | 003 | 2.02 | 005 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana | Dokumen | 1 | 540.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.02 | 006 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Kawasan | 5 | 250.000.000 | 1 | 10.272.000 | 1 | 50.000.000 | 0 | 1.650.000 | 1 | 1.650.000 | 100,00 | 3,30 | 2 | 11.922.000 | 40,00 | 4,77 | BPBD |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.02 | 007 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah penanganan pasca bencana | Jenis | 6 | 580.000.000 | 2 | 20.622.288.501 | 2 | 15.581.328.188 | 1 | 8.440.894.027 | 2 | 14.397.380.213 | 83,33 | 92,40 | 4 | 35.019.668.714 | 66,67 | 6.037,87 | BPBD |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.02 | 008 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | Orang | 75 | 150.402.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.02 | 009 | Penyusunan Rencana Kontijensi | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi | Dokumen | 3 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.02 | 010 | Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | Orang | 4.400 | 1.091.560.000 | 0 | 0 | 400 | 100.000.000 | 211 | 25.000.000 | 611 | 95.957.800 | 100,00 | 95,96 | 611 | 95.957.800 | 13,89 | 8,79 | BPBD |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.02 | 011 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi | Dokumen | 1 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.02 | 012 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Keluarga | 30 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.03 | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatanPelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | % | 100 | 935.000.000 | 13,89 | 5.317.615.200 | 100 | 50.000.000 | 100 | 47.900.000 | 100 | 47.900.000 | 100,00 | 95,80 | 22,78 | 5.365.515.200 | 22,78 | 573,85 | BPBD |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.03 | 001 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | Laporan | 2 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.03 | 002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | Dokumen | 4 | 40.000.000 | 1 | 5.317.615.200 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.317.615.200 | 25,00 | 13.294,04 | |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.03 | 003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | Orang | 180 | 675.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.03 | 004 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/K | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Orang | 1.200 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.03 | 005 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Laporan | 2 | 100.000.000 | 0 | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 47.900.000 | 1 | 47.900.000 | 100,00 | 95,80 | 1 | 47.900.000 | 50,00 | 47,90 | BPBD |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.03 | 006 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu | Dokumen | 3 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.04 | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kegiatan | % | 100 | 670.816.000 | 0 | - | 100 | 75.000.000 | 100 | 24.419.450 | 100 | 24.419.450 | 100,00 | 32,56 | 20,00 | 24.419.450 | 20,00 | 3,64 | BPBD |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.03 | 001 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan BencanaKabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | Dokumen | 3 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.03 | 002 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah | Dokumen | 17 | 170.816.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.03 | 003 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kat | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Dokumen | 18 | 150.000.000 | 0 | 0 | 1 | 75.000.000 | 1 | 24.419.450 | 1 | 24.419.450 | 100,00 | 32,56 | 1 | 24.419.450 | 5,56 | 16,28 | |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.03 | 004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan | Dokumen | 48 | 160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.03 | 005 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Laporan | 4 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1 | 05 | 003 | 2.03 | 006 | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) | Dokumen | 3 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 6 | 01 | | | DINAS SOSIAL | | | | 22.982.128.300 | | 4.371.810.417 | | 7.039.176.597 | | 3.518.751.919 | 0,00 | 6.416.579.711 | | | 0,00 | 10.788.390.128 | | | DINSOS |
| 8 | | 1 | 6 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | indeks | 95 | 17.520.520.000 | | 2.979.569.602 | 83 | 3.761.987.186 | | 1.480.043.508 | 0,00 | 3.166.023.273 | 0,00 | 84,16 | 0,00 | 6.145.592.875 | 0,00 | 35,08 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 6 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | bulan | 12 | 13.632.893.009 | | 2.736.648.231 | 12 | 2.644.599.279 | 3 | 1.134.000.399 | 3,00 | 2.569.479.738 | 25,00 | 97,16 | 3,00 | 5.306.127.969 | 25,00 | 38,92 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 6 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0rg/bln | 80 | 12.944.643.009 | 16 | 2.459.828.231 | 16 | 2.503.509.279 | 16 | 1.046.970.399 | 16,00 | 2.431.569.738 | 100,00 | 97,13 | 32,00 | 4.891.397.969 | 40,00 | 37,79 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 6 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | dokumen | 60 | 688.250.000 | 60 | 276.820.000 | 12 | 141.090.000 | 7 | 87.030.000 | 12,00 | 137.910.000 | 100,00 | 97,75 | 72,00 | 414.730.000 | 120,00 | 60,26 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 6 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Bulan | 12 | 117.600.000 | | 0 | 3 | 47.040.000 | 70 | 23.520.000 | 105,00 | 47.039.976 | 3.500,00 | 100,00 | 105,00 | 47.039.976 | 875,00 | 40,00 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 6 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | paket | 175 | 117.600.000 | 0 | 0 | 70 | 47.040.000 | 70 | 23.520.000 | 105,00 | 47.039.976 | 150,00 | 100,00 | 105,00 | 47.039.976 | 60,00 | 40,00 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 6 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Bulan | 12 | 1.064.299.791 | | 105.057.222 | 3 | 210.992.285 | | 125.022.550 | 3,00 | 210.208.213 | 100,00 | 99,63 | 3,00 | 315.265.435 | 25,00 | 29,62 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 6 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | paket | 20 | 22.500.000 | 0 | 0 | 4 | 4.500.000 | 2 | 2.167.098 | 4,00 | 4.334.739 | 100,00 | 96,33 | 4,00 | 4.334.739 | 20,00 | 19,27 | DINSOS |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 1 | 6 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | paket | 20 | 127.541.291 | 4 | 20.061.995 | 4 | 35.508.235 | 2 | 22.357.545 | 4,00 | 35.108.605 | 100,00 | 98,87 | 8,00 | 55.170.600 | 40,00 | 43,26 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 6 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | paket | 20 | 37.959.000 | 4 | 4.010.013 | 4 | 5.191.800 | 2 | 2.582.277 | 4,00 | 5.167.189 | 100,00 | 99,53 | 8,00 | 9.177.202 | 40,00 | 24,18 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 6 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | paket | 20 | 104.965.500 | 4 | 9.215.554 | 4 | 18.412.250 | 2 | 9.157.000 | 4,00 | 18.355.650 | 100,00 | 99,69 | 8,00 | 27.571.204 | 40,00 | 26,27 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 6 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | dokumen | 2.250 | 13.500.000 | 450 | 2.092.000 | 450 | 2.700.000 | 386 | 2.316.000 | 450,00 | 2.700.000 | 100,00 | 100,00 | 900,00 | 4.792.000 | 40,00 | 35,50 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 6 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | laporan | 20 | 60.800.000 | | 0 | 4 | 16.000.000 | 2 | 8.640.000 | 4,00 | 15.930.000 | 100,00 | 99,56 | 4,00 | 15.930.000 | 20,00 | 26,20 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 6 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 520 | 697.034.000 | | 69.677.660 | 115 | 128.680.000 | 80 | 77.802.630 | 179,00 | 128.612.030 | 155,65 | 99,95 | 179,00 | 198.289.690 | 34,42 | 28,45 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 6 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Unit | 1 | 1.082.550.000 | | 36.642.592 | 1 | 493.608.600 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 6 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | 0 | | | 1 | 473.360.000 | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | DINSOS |
| | | 1 | 6 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | 0 | | | 4 | 20.248.600 | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | | 1 | 6 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Bulan | 12 | 1.082.550.000 | | 36.642.592 | 12 | 216.510.000 | | 85.437.809 | 3,00 | 195.494.131 | 25,00 | 90,29 | 3,00 | 232.136.723 | 25,00 | 21,44 | DINSOS |
| 8 | 1049648 | 1 | 6 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 60 | 133.800.000 | 12 | 16.672.592 | 12 | 26.760.000 | 3 | 7.097.809 | 3,00 | 16.304.131 | 25,00 | 60,93 | 15,00 | 32.976.723 | 25,00 | 24,65 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 6 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | laporan | 5 | 40.950.000 | 1 | 5.390.000 | 1 | 8.190.000 | | 7.750.000 | 0,00 | 7.750.000 | 0,00 | 94,63 | 1,00 | 13.140.000 | 20,00 | 32,09 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 6 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | laporan | 60 | 907.800.000 | 12 | 14.580.000 | 12 | 181.560.000 | 5 | 70.590.000 | 3,00 | 171.440.000 | 25,00 | 94,43 | 15,00 | 186.020.000 | 25,00 | 20,49 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 6 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit | 19 | 540.627.200 | | 64.578.965 | 5 | 149.237.022 | 7 | 112.062.750 | 0,00 | 143.801.215 | 0,00 | 96,36 | 0,00 | 208.380.180 | 0,00 | 38,54 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 6 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 20 | 455.627.200 | | 64.578.965 | 4 | 132.237.022 | 7 | 95.124.350 | 4,00 | 126.862.815 | 100,00 | 95,94 | 0,00 | 191.441.780 | 0,00 | 42,02 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 6 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 85.000.000 | | 0 | 1 | 17.000.000 | | 16.938.400 | 0,00 | 16.938.400 | 0,00 | 99,64 | 0,00 | 16.938.400 | 0,00 | 19,93 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 06 | 02 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | **Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial** | % | 65,38% | 600.000.000 | | | 50 | 140.000.001 | | 90.628.675 | 0,00 | 128.759.717 | 0,00 | 91,97 | 0,00 | 128.759.717 | 0,00 | 21,46 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 06 | 02 | 2.03 | | Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah K | Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota | % | 100 | 600.000.000 | | | 100 | 140.000.001 | | 90.628.675 | 0,00 | 128.759.717 | 0,00 | 91,97 | 0,00 | 128.759.717 | 0,00 | 21,46 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 04 | Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | lembaga | 1 | 600.000.000 | | 0 | 1 | 140.000.001 | 1 | 90.628.675 | 1,00 | 128.759.717 | 100,00 | 91,97 | 1,00 | 128.759.717 | 100,00 | 21,46 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 06 | 03 | | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KE | **Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial** | % | 65,38% | 63.620.400 | | | 50 | 21.044.400 | 10 | 20.982.250 | 0,00 | 20.982.250 | 0,00 | 99,70 | 0,00 | 20.982.250 | 0,00 | 32,98 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 06 | 03 | 2.01 | | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Det | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal** | % | 100 | 63.620.400 | | 0 | 100 | 21.044.400 | 10 | 20.982.250 | 0,00 | 20.982.250 | 0,00 | 99,70 | 0,00 | 20.982.250 | 0,00 | 32,98 | DINSOS |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 1 | 06 | 03 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak<br>Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi<br>di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke<br>Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 90 | 63.620.400 | | 0 | 20 | 21.044.400 | 10 | 20.982.250 | 0,00 | 20.982.250 | 0,00 | 99,70 | 0,00 | 20.982.250 | 0,00 | 32,98 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | **Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial** | % | 65,38% | 2.988.376.900 | 46 | 216.728.807 | 50 | 218.759.100 | | 33.038.720 | 0,00 | 217.320.405 | 0,00 | 99,34 | 46,00 | 434.049.212 | 0,00 | 14,52 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 06 | 04 | 2.01 | | Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Ana | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | % | 100 | 960.597.000 | 100 | 17.020.000 | 100 | 140.979.400 | - | 22.904.400 | 0,00 | 139.830.385 | 0,00 | 99,18 | 100,00 | 156.850.385 | 100,00 | 16,33 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 03 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan<br>Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar<br>Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 515 | 848.075.000 | 0 | 0 | 85 | 118.075.000 | - | - | 85,00 | 116.925.985 | 100,00 | 99,03 | 85,00 | 116.925.985 | 16,50 | 13,79 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 12 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan<br>Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1<br>Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 100 | 112.522.000 | 20 | 17.020.000 | 20 | 22.904.400 | 20 | 22.904.400 | 20,00 | 22.904.400 | 100,00 | 100,00 | 40,00 | 39.924.400 | 40,00 | 35,48 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 04 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu<br>dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan<br>Kewenangan Kabupaten/Kota | % | 100 | 2.027.779.900 | 12 | 199.708.807 | 100 | 77.779.700 | - | 10.134.320 | 0,00 | 77.490.020 | 0,00 | 99,63 | 12,00 | 277.198.827 | 12,00 | 13,67 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 14 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosia | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan<br>Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 60 | 2.027.779.900 | 12 | 199.708.807 | 1 | 77.779.700 | - | 10.134.320 | 0,00 | 77.490.020 | 0,00 | 99,63 | 12,00 | 277.198.827 | 20,00 | 13,67 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 06 | 05 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL | Persentase keakuratan data program perlindungan kesejahteraan sosial | % | 100 | 775.000.000 | | 0 | 39 | 150.000.000 | | 39.397.600 | 0,00 | 148.257.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.257.900 | 0,00 | 0,00 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 06 | 05 | 2.02 | | Kegiatan :Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | % | | 775.000.000 | | 0 | 100 | 150.000.000 | - | 39.397.600 | 590 | 148.257.900 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 148.257.900 | 0,00 | 0,00 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | Orang | 2.950 | 775.000.000 | | 0 | 590 | 150.000.000 | - | 39.397.600 | 590,00 | 148.257.900 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 148.257.900 | 0,00 | 0,00 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 06 | 06 | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | % | 100 | 409.984.000 | 100 | 1.050.919.298 | 100 | 2.222.460.511 | 100 | 1.430.137.418 | 0,00 | 2.217.112.418 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 06 | 06 | 2.01 | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | % | 100 | 409.984.000 | 100 | 1.050.919.298 | 100 | 2.222.460.511 | 100 | 1.430.137.418 | 0,00 | 2.217.112.418 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 01 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan<br>3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | orang | 900 | 95.560.000 | 2.153 | 991.484.649 | 3.255 | 2.159.575.711 | 2.402 | 1.371.136.323 | 0,00 | 2.158.111.323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 02 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan<br>Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa<br>Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca<br>Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | orang | 900 | 314.424.000 | 180 | 59.434.649 | 180 | 62.884.800 | 180 | 59.001.095 | 0,00 | 59.001.095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 06 | 07 | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | indeks | 95 | 624.627.000 | 83 | 124.592.710 | 83 | 524.925.399 | 4 | 424.523.748 | 4,00 | 518.123.748 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 06 | 07 | 2.01 | | Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kot | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | % | 100 | 624.627.000 | 4 | 124.592.710 | 100 | 524.925.399 | 4 | 424.523.748 | 4,00 | 518.123.748 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DINSOS |
| 8 | | 1 | 06 | 07 | 2.01 | 02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya<br>pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | Makam | 20 | 624.627.000 | 4 | 124.592.710 | 4 | 524.925.399 | 4 | 424.523.748 | 4,00 | 518.123.748 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DINSOS |
| 9 | | | | | | | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH | | | | ***23.103.603.548*** | | - | | ***5.857.067.416*** | | ***2.702.912.893*** | | ***4.764.591.149*** | ***26,29*** | ***16,46*** | | ***4.704.677.369*** | ***15,05*** | ***30,03*** | |
| 9 | ***Meningkatnya Pel*** | ***2*** | ***07*** | ***01*** | | | ***Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota*** | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | ***17.941.238.206*** | | - | | ***3.362.536.074*** | | ***1.700.693.734*** | | ***3.347.265.245*** | ***84,33*** | ***68,98*** | | ***3.308.845.245*** | ***17,05*** | ***15,11*** | DISNAKERKUKM |
| 9 | | ***2*** | ***07*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Berjalan dengan Baik | | | ***14.084.238.606*** | | - | | ***2.638.447.766*** | | ***1.091.650.759*** | | ***2.514.422.932*** | ***100,00*** | ***95,64*** | | ***2.514.422.932*** | ***20,00*** | ***17,55*** | DISNAKERKUKM |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 2 07 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan | Bulan | 70 | 13.204.163.606 | 0 | - | 14 | 2.480.832.766 | 3 | 987.690.759 | 14 | 2.363.062.932 | 100,00 | 95,25 | 14 | 2.363.062.932 | 20,00 | 17,90 | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 07 01 2.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Honorarium Pengelola Keuangan | Bulan | 780 | 880.075.000 | 0 | - | 156 | 157.615.000 | 70 | 103.960.000 | 156 | 151.360.000 | 100,00 | 96,03 | 156 | 151.360.000 | 20,00 | 17,20 | DISNAKERKUKM |
| 9 | | ***2 07 01 2.05*** | ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | ***211.680.000*** | | - | | ***23.520.000*** | | ***22.500.000*** | | ***22.500.000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***22.500.000*** | ***9,52*** | ***10,63*** | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 07 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pakaian Dinas Beserta Atribut | Stel | 315 | 211.680.000 | 0 | - | 35 | 23.520.000 | 30 | 22.500.000 | 30 | 22.500.000 | 0,00 | 0,00 | 30 | 22.500.000 | 9,52 | 10,63 | DISNAKERKUKM |
| 9 | | ***2 07 01 2.06*** | ***Administrasi Umum Perangkat daerah*** | Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum | | | ***1.849.519.600*** | | - | | ***333.000.000*** | | ***278.297.954*** | | ***357.891.871*** | ***66,67*** | ***65,56*** | | ***357.891.871*** | ***16,71*** | ***16,76*** | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 07 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Buah | 200 | 23.000.000 | 0 | - | 50 | 3.000.000 | 35 | 3.612.210 | 50 | 4.607.800 | 100,00 | 153,59 | 50 | 4.607.800 | 25,00 | 20,03 | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 07 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Buah | 15 | 114.000.000 | 0 | - | 3 | 30.000.000 | 0 | 15.898.600 | 0 | 15.898.600 | 0,00 | 53,00 | - | 15.898.600 | - | 13,95 | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 07 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan Rumah Tangga | Jenis | 120 | 41.500.000 | 0 | - | 18 | 5.500.000 | 9 | 2.465.396 | 18 | 4.300.000 | 100,00 | 78,18 | 18 | 4.300.000 | 15,00 | 10,36 | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 07 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Bahan Logistik Kantor | Jenis | 225 | 215.000.000 | 0 | - | 35 | 35.000.000 | 35 | 27.584.018 | 70 | 38.003.443 | 200,00 | 108,58 | 70 | 38.003.443 | 31,11 | 17,68 | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 07 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | Barang Cetakan Dan Penggandaan | Jenis | 35 | 63.500.000 | 0 | - | 6 | 9.500.000 | 3 | 7.827.930 | 6 | 11.531.910 | 0,00 | 0,00 | 6 | 11.531.910 | 17,14 | 18,16 | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 07 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan | ang Hari K | 750 | 1.392.519.600 | 0 | - | 90 | 250.000.000 | 50 | 220.909.800 | 90 | 283.550.118 | 0,00 | 0,00 | 90 | 283.550.118 | 12,00 | 20,36 | DISNAKERKUKM |
| 9 | | ***2 07 01 2.07*** | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daer*** | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelayanan Administrasi Umum | | | - | | - | | - | | ***104.385.300*** | | ***104.385.300*** | ***#DIV/0!*** | ***#DIV/0!*** | | ***104.385.300*** | ***#DIV/0!*** | ***#DIV/0!*** | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 07 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | - | 0 | - | 17 | 28.609.500 | 17 | 28.609.500 | #DIV/0! | #DIV/0! | 17 | 28.609.500 | #DIV/0! | #DIV/0! | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 07 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | - | 0 | - | 7 | 75.775.800 | 7 | 75.775.800 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | 75.775.800 | #DIV/0! | #DIV/0! | DISNAKERKUKM |
| 9 | | ***2 07 01 2.08*** | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | Tersedianya Jasa Penunjang Pelayanan Administrasi Umum | | | ***1.008.800.000*** | | - | | ***204.960.000*** | | ***69.989.721*** | | ***200.015.142*** | ***100,00*** | ***86,47*** | | ***200.015.142*** | ***20,00*** | ***18,44*** | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 07 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Telepon, Internet, Air dan Listrik | Bulan | 60 | 101.000.000 | 0 | - | 12 | 23.400.000 | 3 | 7.828.021 | 12 | 16.863.442 | 100,00 | 72,07 | 12 | 16.863.442 | 20,00 | 16,70 | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 07 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honorarium Pegawai Tidak Tetap | Orang Bula | 720 | 907.800.000 | 0 | - | 144 | 181.560.000 | 36 | 62.161.700 | 144 | 183.151.700 | 100,00 | 100,88 | 144 | 183.151.700 | 20,00 | 20,18 | DISNAKERKUKM |
| 9 | | ***2 07 01 2.09*** | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah*** | Telaksananya Pemeliharaan Barang Mili Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | ***787.000.000*** | | - | | ***162.608.308*** | | ***133.870.000*** | | ***148.050.000*** | ***155,00*** | ***97,22*** | | ***109.630.000*** | ***19,00*** | ***12,16*** | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 07 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraa | Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | 5 | 165000000 | 0 | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 32.900.000 | 2 | 38.420.000 | 200,00 | 153,68 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 07 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan | Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Unit | 25 | 255.000.000 | 0 | - | 5 | 70.608.308 | 5 | 42.450.000 | 6 | 48.270.000 | 120,00 | 68,36 | 6 | 48.270.000 | 24,00 | 18,93 | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 07 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Unit | 50 | 117.000.000 | 0 | - | 8 | 17.000.000 | 12 | 8.520.000 | 16 | 11.360.000 | 200,00 | 66,82 | 16 | 11.360.000 | 32,00 | 9,71 | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 07 01 2.09 09 | Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Gedung Kantor | Unit | 5 | 250.000.000 | 0 | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | 50.000.000 | 20,00 | 20,00 | DISNAKERKUKM |
| 9 | ***Meningkatnya Kor*** | ***2 07 03*** | ***Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja*** | Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih | | | ***77.000.000*** | | - | | ***120.000.000*** | | ***50.763.689*** | | ***50.763.689*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***50.763.689*** | ***5,56*** | ***65,93*** | DISNAKERKUKM |
| 9 | | ***2 07 03 2.01*** | ***Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi*** | Jumlah Pencari Kerja Yang Dilatih | | | ***77.000.000*** | | - | | ***120.000.000*** | | ***50.763.689*** | | ***50.763.689*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***50.763.689*** | ***5,56*** | ***65,93*** | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 07 03 2.01 01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari | Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih Berdasarkan Klaster Kompetensi | Orang | 288 | 77.000.000 | 0 | - | 32 | 120.000.000 | 16 | 50.763.689 | 16 | 50.763.689 | 0,00 | 0,00 | 16 | 50.763.689 | 5,56 | 65,93 | DISNAKERKUKM |
| 9 | | ***2 07 05*** | ***Program Hubungan Industrial*** | Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama | | | ***500.000.000*** | | - | | ***100.000.000*** | | ***61.494.180*** | | ***61.494.180*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***40.000.400*** | ***1,02*** | ***6,67*** | DISNAKERKUKM |
| 9 | | ***2 07 05 2.01*** | ***Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja*** | Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama | | | ***150.000.000*** | | - | | ***30.000.000*** | | ***10.977.245*** | | ***10.977.245*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***20.000.200*** | ***2,04*** | ***13,33*** | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 07 05 2.01 03 | *Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial* | Jumlah Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama | erusahaa | 49 | 150.000.000 | 0 | - | 1 | 30.000.000 | 1 | 10.977.245 | 1 | 10.977.245 | 0,00 | 0,00 | 1 | 20.000.200 | 2,04 | 13,33 | DISNAKERKUKM |
| 9 | | ***2 07 05 2.02*** | ***Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mog*** | Persentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan dan Buruh | | | ***350.000.000*** | | - | | ***70.000.000*** | | ***50.516.935*** | | ***50.516.935*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***20.000.200*** | ***20,00*** | ***5,71*** | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 07 05 2.02 01 | *Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutu* | Penentuan UMK Kabupaten Karo | Dokumen | 5 | 350.000.000 | 0 | - | 1 | 70.000.000 | 1 | 50.516.935 | 1 | 50.516.935 | 0,00 | 0,00 | 1 | 20.000.200 | 20,00 | 5,71 | DISNAKERKUKM |
| 9 | ***Meningkatnya day*** | ***2 17 02*** | ***Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam*** | Persentase Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Yang Legal | | | ***180.000.000*** | | - | | ***60.000.000*** | | - | | - | ***0,00*** | ***0,00*** | | - | ***0,00*** | ***0,00*** | DISNAKERKUKM |
| 9 | | ***2 17 02 2.01*** | ***Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah*** | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang Memiliki Izin Pembukaan Kantor Cabang | | | ***180.000.000*** | | - | | ***60.000.000*** | | - | | - | ***0,00*** | ***0,00*** | | - | ***0,00*** | ***0,00*** | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 17 02 2.01 01 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang | 1. Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam KSP/USP<br>2. Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi | ekomenda | 52 | 180.000.000 | 0 | - | 1 | 60.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | DISNAKERKUKM |
| 9 | | ***2 17 03*** | ***Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi*** | Jumlah Koperasi Patuh | | | ***750.000.000*** | | - | | ***100.000.000*** | | ***30.619.826*** | | ***62.693.826*** | ***126,00*** | ***62,69*** | | ***62.693.826*** | ***63,00*** | ***8,36*** | DISNAKERKUKM |
| 9 | | ***2 17 03 2.01*** | ***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Un*** | Jumlah Koperasi Yang Diawasi Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan Akuntabilitasnya | | | ***750.000.000*** | | - | | ***100.000.000*** | | ***30.619.826*** | | ***62.693.826*** | ***126,00*** | ***62,69*** | | ***62.693.826*** | ***63,00*** | ***8,36*** | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 17 03 2.01 02 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang - Unda | 1. Jumlah Koperasi Yang Diperiksa Tingkat Kepatuhannya<br>2. Jumlah KSP/USP Yang Dinilai Tingkat Kesehatannya | Koperasi | 100 | 750.000.000 | 0 | - | 50 | 100.000.000 | 30 | 30.619.826 | 63 | 62.693.826 | 126,00 | 62,69 | 63 | 62.693.826 | 63,00 | 8,36 | DISNAKERKUKM |
| 9 | | ***2 17 05*** | ***Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian*** | Persentase Koperasi Aktif | | | ***870.802.000*** | | - | | ***140.000.000*** | | ***361.740.426*** | | ***563.283.806*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***563.283.806*** | ***15,38*** | ***64,69*** | DISNAKERKUKM |
| 9 | | ***2 17 05 2.01*** | ***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah K*** | Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | ***870.802.000*** | | - | | ***140.000.000*** | | ***361.740.426*** | | ***563.283.806*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***563.283.806*** | ***15,38*** | ***64,69*** | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 17 05 2.01 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasita | Jumlah SDM Koperasi yang Dilatih | Orang | 390 | 870.802.000 | 0 | - | 640 | 140.000.000 | 0 | 361.740.426 | 60 | 563.283.806 | 0,00 | 0,00 | 60 | 563.283.806 | 15,38 | 64,69 | DISNAKERKUKM |
| 9 | | ***2 17 06*** | ***Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi*** | Persentase Koperasi Yang Meningkat pendapatannya | | | ***250.000.000*** | | - | | ***100.000.000*** | | ***114.998.368*** | | ***114.998.368*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***114.998.368*** | ***0,00*** | ***46,00*** | DISNAKERKUKM |
| 9 | | ***2 17 06 2.01*** | ***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dal*** | Jumlah Koperasi Yang Meningkat Pendapatannya | | | ***250.000.000*** | | - | | ***100.000.000*** | | ***114.998.368*** | | ***114.998.368*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***114.998.368*** | ***0,00*** | ***46,00*** | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 17 06 2.01 01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Ak | Jumlah Koperasi Yang Diberdayakan | Koperasi | 70 | 250.000.000 | 0 | - | 50 | 100.000.000 | 0 | 114.998.368 | 0 | 114.998.368 | 0,00 | 0,00 | 0 | 114.998.368 | 0,00 | 46,00 | DISNAKERKUKM |
| 9 | | ***2 17 07*** | ***Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha M*** | Persentase UMKM Yang Bermitra | | | ***530.000.000*** | | - | | ***1.300.000.000*** | | ***74.749.650*** | | ***120.261.755*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***120.261.755*** | ***10,87*** | ***11,35*** | DISNAKERKUKM |
| 9 | | ***2 17 07 2.01*** | ***Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kem*** | Usaha Mikro yang Berdaya Saing | | | ***530.000.000*** | | - | | ***1.300.000.000*** | ***0*** | ***74.749.650*** | ***0*** | ***120.261.755*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***120.261.755*** | ***10,87*** | ***11,35*** | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 17 07 2.01 02 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pemberdayaan Melalui Kemitraan | saha Mikr | 230 | 530.000.000 | 0 | - | 48 | 100.000.000 | 0 | 74.749.650 | 50 | 120.261.755 | 0,00 | 0,00 | 50 | 120.261.755 | 21,74 | 22,69 | DISNAKERKUKM |
| 9 | | 2 17 07 2.01 04 | Pemberdayaan Kelembagaan, Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Terlaksananya Pembangunan PLUT | - | - | - | 0 | - | 0 | 1.200.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | DISNAKERKUKM |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | *2* | *17* | *08* | | | *Program Pengembangan UMKM* | Persentase UMKM Naik Kelas | | *2.004.563.342* | | *-* | | *574.531.342* | | *307.853.020* | | *443.830.280* | | *0,00* | *0,00* | | *443.830.280* | *7,55* | *22,14* | DISNAKERKUKM |
| | | *2* | *17* | *08* | *2.01* | | *Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usa* | Jumlah UMKM Yang Naik Kelas | | *2.004.563.342* | | *-* | | *574.531.342* | | *307.853.020* | | *443.830.280* | | *0,00* | *0,00* | | *443.830.280* | *7,55* | *22,14* | |
| | | 2 | 17 | 08 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produ | Jumlah Produk Usaha Mikro Yang Difasilitasi | Produk | 265 | 2.004.563.342 | 0 | - | 195 | 574.531.342 | 0 | 307.853.020 | 20 | 443.830.280 | 0,00 | 0,00 | 20 | 443.830.280 | 7,55 | 22,14 | |
| 10 | | 20 | 08 | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | 84.164.064.349 | | 0 | | 14.725.009.406 | | 2.559.453.988 | | 8.302.585.086 | | 398 | | 7.136.437.636 | | 136 | DP3AP2KB |
| 10 | | 14 | 08 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | 56.663.068.713 | | | | 9.066.621.450 | | 2.558.103.988 | | 6.729.736.636 | | 347 | | 6.549.110.636 | | 136 | DP3AP2KB |
| 10 | | **2** | **08** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 83 | indeks | 42.599.170.639 | | | 83 | 6.443.935.840 | | 2125954288 | | 5.617.185.936 | 0,0 | 87,2 | 0 | 5.617.185.936 | 0,0 | 13,2 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan administarsi keuangan perangkat daerah | 100 | % | 39.251.589.935 | | | 12 | 5.355.173.919 | | 1811330963 | 45 | 4.879.977.434 | 375,0 | 91,1 | 45 | 4.879.977.434 | 45,0 | 12,4 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 39 | org/bln | 36.985.028.735 | | | 39 | 5.095.587.999 | 39 | 1706120963 | 156 | 4.704.213.434 | 400,0 | 92,3 | 156 | 4.704.213.434 | 400,0 | 12,7 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keu | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 | dokumen | 2.266.561.200 | | | 12 | 259.585.920 | 3 | 105210000 | 12 | 175.764.000 | 0,0 | 67,7 | 12 | 175.764.000 | 100,0 | 7,8 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan administarsi kepegawaian perangkat daerah | 100 | % | 217.450.064 | | | 1 | 68.168.000 | 1 | 21825000 | 2 | 56.275.000 | 0,0 | 82,6 | 1 | 56.275.000 | 0,0 | 25,9 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapan | 1 | Paket | 217.450.064 | | | 1 | 68.168.000 | 1 | 21825000 | 2 | 56.275.000 | 0,0 | 82,6 | 1 | 56.275.000 | 100,0 | 25,9 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan administarsi Umum Perangkat Daerah | 100 | **%** | 1.721.618.654 | | | 100 | 352.824.305 | 40 | 130987486 | 100 | 312.979.740 | 0,0 | 88,7 | 100 | 312.979.740 | 100,0 | 18,2 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 1 | Paket | 12.216.819 | | | 1 | 2.175.770 | | | 1 | 2.115.000 | 0,0 | 97,2 | 1 | 2.115.000 | 100,0 | 17,3 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan | 4 | Paket | 412.017.132 | | | 4 | 71.535.035 | 1 | 16889000 | 4 | 70.434.000 | 0,0 | 98,5 | 4 | 70.434.000 | 100,0 | 17,1 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan yang disediakan | 1 | Paket | 93.622.320 | | | 1 | 16.879.500 | 0 | 4634200 | 1 | 15.458.150 | 0,0 | 91,6 | 1 | 15.458.150 | 100,0 | 16,5 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Unda | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | 1 | Dokumen | 14.190.120 | | | 1 | 2.520.000 | | 780000 | 1 | 1.500.000 | 0,0 | 59,5 | 1 | 1.500.000 | 100,0 | 10,6 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 120 | Laporan | 1.189.572.263 | | | 120 | 259.714.000 | 40 | 108684286 | 100 | 223.472.590 | 0,0 | 86,0 | 100 | 223.472.590 | 83,3 | 18,8 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemer | rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | **%** | 41.460.231 | | | 1 | 41.460.231 | 1 | 36000000 | 1 | 36.000.000 | 0,0 | 86,8 | 1 | 36.000.000 | 100,0 | 86,8 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnuya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 | | 41.460.231 | | | 1 | 41.460.231 | 1 | 36000000 | | 36.000.000 | 0,0 | 86,8 | 0 | 36.000.000 | 0,0 | 86,8 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 | % | 1.037.594.026 | | | | 296.851.656 | | 83446280 | 0 | 266.421.645 | 0,0 | 89,7 | 0 | 266.421.645 | 0,0 | 25,7 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang disediakan | 100 | **Laporan** | 142.821.192 | | | 12 | 24.420.000 | 3 | 6997280 | 9 | 17.636.645 | 0,0 | 72,2 | 9 | 17.636.645 | 75,0 | 12,3 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 12 | Laporan | 894.772.834 | | | 12 | 272.431.656 | 3 | 76449000 | 9 | 248.785.000 | 0,0 | 91,3 | 9 | 248.785.000 | 75,0 | 27,8 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Per | rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 | % | 329.457.729 | | | | 329.457.729 | 0 | 42364559 | 5 | 65.532.117 | 0,0 | | 5 | 65.532.117 | | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan ,Pajak | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 100 | **Unit** | 271.265.240 | | | | 271.265.240 | | 42364559 | 4 | 65.532.117 | | | 4 | 65.532.117 | | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan l | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 | Unit | 58.192.489 | | | | 58.192.489 | | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | | DP3AP2KB |
| 10 | | **2** | **08** | **02** | | | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERI** | **Indeks Pembangunan Gender** | **96,35** | **%** | 220.000.000 | | | | 281.133.333 | 10 | 240736000 | | 240.736.000 | 0,0 | 85,6 | 10 | 240.736.000 | 10,4 | 109,4 | DP3AP2KB |
| 10 | | **2** | **08** | **02** | **2.01** | | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lemb** | **rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota** | 100 | % | 220.000.000 | | | | 281.133.333 | 10 | 240736000 | | 240.736.000 | 0,0 | 85,6 | 10 | 240.736.000 | 0,0 | 109,4 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 02 | 2.01 | 04 | sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Pengaruutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender ( PPRG) Kewenangan Kabupaten Kota | 10 | gkat Daerah | 220.000.000 | | | 10 | 281.133.333 | 10 | 240736000 | | 240.736.000 | 0,0 | 85,6 | 10 | 240.736.000 | 100,0 | 109,4 | DP3AP2KB |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | **2** | **08** | **03** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu** | 100 | **%** | 1.140.425.000 | | | | 606.043.317 | | | | | | | 0 | | | DP3AP2KB |
| 10 | | **2** | **08** | **03** | **2.01** | | **Pencegahan Kekerasn terhadap Perempuan Lingkup Dae** | **rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pencegahan Kekerasn terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | 100 | **%** | 128.920.000 | | | 100 | 43.838.281 | 100 | 34194000 | 100 | 34.194.000 | 0,0 | 78,0 | 0 | 34.194.000 | 0,0 | 26,5 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Progra | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota | 1 | Dokumen | 128.920.000 | | | 1 | 43.838.281 | 1 | 34194000 | 1 | 34.194.000 | 100,0 | 78,0 | 0 | 34.194.000 | 0,0 | 26,5 | DP3AP2KB |
| 10 | | **2** | **08** | **03** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan** | **rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** | 100 | **%** | 831.505.000 | | | 100 | 462.205.036 | 100 | 242212633 | 100 | 242.212.633 | 0,0 | 52,4 | 0 | 242.212.633 | 0,0 | 29,1 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 03 | 2.02 | 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempu | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan tingkat Kewenangan Kabupaten Kota yang mendapatkan Layanan Pengaduan | 50 | orang | 518.300.000 | | | 50 | 229.000.000 | 50 | 63394583 | 50 | 63.394.583 | 100,0 | 27,7 | 0 | 63.394.583 | 0,0 | 12,2 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 03 | 2.02 | 02 | koordinasi dan sikronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layana | Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 | Layanan | 313.205.000 | | | 50 | 233.205.036 | 50 | 178818050 | 50 | 178.818.050 | 100,0 | 76,7 | 5 | 178.818.050 | 10,0 | 57,1 | DP3AP2KB |
| 10 | | **2** | **08** | **03** | **2.03** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layan** | **rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | 100 | **%** | 180.000.000 | | | 100 | 100.000.000 | 100 | 70465000 | 100 | 140.930.000 | 0,0 | 140,9 | 0 | 140.930.000 | 0,0 | 78,3 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 03 | 2.03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia La | Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas | 70 | Orang | 180.000.000 | | | 70 | 100.000.000 | 70 | 70465000 | 70 | 140.930.000 | 100,0 | 140,9 | 70 | 140.930.000 | 100,0 | 78,3 | DP3AP2KB |
| 10 | | **2** | **08** | **04** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | **Rasio KDRT** | **0,01** | **%** | | | | | 150.000.000 | | 207753150 | | 207753150 | | | | 207.753.150 | | | DP3AP2KB |
| 10 | | **2** | **08** | **04** | **2.01** | | **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kese** | **rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Kabupaten/Kota** | **100** | % | 500.000.000 | | | | 75.000.000 | | 65974500 | | 65.974.500 | 0,0 | 88,0 | 0 | 65.974.500 | 0,0 | 13,2 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 04 | 2.01 | 03 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Ki | Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 | laporan | 500.000.000 | | | 80 | 75.000.000 | 80 | 65974500 | 80 | 65.974.500 | 100,0 | 88,0 | 0 | 65.974.500 | 0,0 | 13,2 | DP3AP2KB |
| 10 | | **2** | **08** | **04** | **2.02** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layan** | **rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Meujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **100** | % | 145.000.000 | | | | 75.000.000 | 100 | 141778650 | | 141.778.650 | 0,0 | 189,0 | | 141.778.650 | 0,0 | 97,8 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 04 | 2.02 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Len | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 80 | Orang | | | | | 150.000.000 | 1 | 85316650 | | 85.316.650 | #DIV/0! | 56,9 | 0 | 85.316.650 | #DIV/0! | #DIV/0! | DP3AP2KB |
| | | 2 | 08 | 04 | 2.02 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia La | Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 145.000.000 | | | | 75.000.000 | 1 | 56462000 | | 56.462.000 | #DIV/0! | 75,3 | 0 | 56.462.000 | 0,0 | 38,9 | |
| 10 | | **2** | **08** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN A** | **Ketersediaan Data Gender** | **1** | **dokumen** | 274.000.000 | | | | 80.000.000 | | | | | | | | | | | DP3AP2KB |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | **2** | **08** | **05** | **2.01** | | **Pengumpulan,Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data G** | **rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pengumpulan,Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **100** | **%** | 274.000.000 | | | | 80.000.000 | | | 0 | 69.230.000 | | | | 69.230.000 | | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 05 | 2.01 | 01 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupa | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 | Dokumen | 274000000 | | | 1 | 80.000.000 | | 0 | 1 | 69.230.000 | 100,0 | 86,5 | 0 | 69.230.000 | 0,0 | 25,3 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 06 | | | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 80 | % | 252.917.369 | | | | 231.953.255 | | 86202000 | 0 | 180.626.000 | 0,0 | 77,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 06 | 2.01 | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerint | rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah, dan Duania Kewenangan Kabupaten /Kota | 100 | % | 150.000.000 | | | 100 | 129.035.886 | | | 100 | 94.424.000 | 100 | 73,176543 | 0 | 94.424.000 | 0 | 62,949333 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 06 | 2.01 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak An | Jumlah Organisasi Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Organisasi Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha | 6 | Organisasi | 150.000.000 | | | 1 | 129.035.886 | | 0 | 1 | 94.424.000 | 100 | 73,176543 | 0 | 94.424.000 | 0 | 62,949333 | DP3AP2KB |
| 10 | | **2** | **08** | **06** | **2.02** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layan** | **rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota** | **100** | **%** | 102.917.369 | | | 100 | 102.917.369 | 100 | 86202000 | 100 | 86.202.000 | 100 | 83,758457 | 0 | 86.202.000 | 0 | 83,758457 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 06 | 2.02 | 03 | Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Edukasi Pemenu | Jumlah Dokumen Komunikasi,Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 | Dokumen | 102.917.369 | | | 140 | 102.917.369 | 140 | 86202000 | 140 | 86.202.000 | 100 | 83,758457 | 0 | 86.202.000 | 0 | 83,758457 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 07 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Jejaring perlindungan anak | **29** | **ATBM/desa** | 788.867.205 | | | | 218.867.205 | | 105211700 | 0 | 105.211.700 | #DIV/0! | 48,071021 | 0 | 105211700 | 0 | 13,337061 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 07 | 2.01 | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Pa | rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | **100** | **%** | 770.000.000 | | | | 200.000.000 | | 105211700 | 0 | 287.579.200 | #DIV/0! | 143,7896 | 0 | 287579200 | 0 | 37,347948 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 07 | 2.01 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebija | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 | gkat Daerah | 465.000.000 | | | 70 | 100.000.000 | | 0 | 70 | 82.439.000 | 100 | 82,439 | 0 | 82439000 | 0 | 17,728817 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 07 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhad | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 | Dokumen | 305.000.000 | | | 3 | 100.000.000 | | 105211700 | 3 | 205.140.200 | 100 | 205,1402 | 0 | 205140200 | 0 | 67,259082 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 07 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindu | rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | **100** | **%** | 18.867.205 | | | 100 | 18.867.205 | 100 | 12350000 | 100 | 12350000 | 100 | 65,457496 | 0 | 12350000 | 0 | 65,457496 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 08 | 07 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan An | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkrinisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 40 | Layanan | 18.867.205 | | | 50 | 18.867.205 | 50 | 0 | 50 | 12.350.000 | 100 | 65,457496 | 0 | 12350000 | 0 | 65,457496 | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DP3AP2KB |
| 10 | | 6 | 14 | | | | URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | 27.500.995.636 | | - | | 5.658.387.956 | | 1.350.000 | | 1.572.848.450 | | 51 | | 587.327.000 | | - | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 02 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa | 60/5/68.54 | 6/kerjaasama/% | 11.387.688.500 | | | | 1.204.688.500 | | | 0 | 585.977.000 | #DIV/0! | 48,6 | 0 | 585.977.000 | #VALUE! | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 02 | 2.01 | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah | rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemeritah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk | 100 | % | 2.725.903.280 | | | | 514.903.280 | | | 0 | 251.614.500 | #DIV/0! | 48,9 | 0 | 251.614.500 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 05 | Penguatan Kerjasama Pelaksanaan PendidikanKependuduk | Jumlah dokumen penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal | 1 | dokumen | 74.903.280 | | | 60 | 14.903.280 | | - | 50 | 10.685.000 | 83,3 | 71,7 | 0 | 10.685.000 | 0,0 | | DP3AP2KB |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 07 | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependu | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokasi Kabupaten/Kota | 1 | Dokumen | 63.000.000 | | | 100 | 9.000.000 | | - | 0 | - | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 09 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi PelaksanaanPendidikan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/Mi dan SLTP/Mts, Jalur Formal dan Informal | 1 | Pendidikan | 200.000.000 | | | 100 | 30.000.000 | 70 | 27.784.500 | 70 | 27.784.500 | 70,0 | 92,6 | 0 | 27.784.500 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 10 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal | 1 | Laporan | 300.000.000 | | | 60 | 50.000.000 | 25 | 27.033.000 | 25 | 27.033.000 | 41,7 | 54,1 | 0 | 27.033.000 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 11 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan | 1 | dokumen | 190.000.000 | | | 100 | 28.000.000 | 90 | 26.486.000 | 90 | 26.486.000 | 90,0 | 94,6 | 0 | 26.486.000 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 14 | Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | 4 | Laporan | 98.000.000 | | | 125 | 23.000.000 | | - | | - | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 15 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 60 | Laporan | 1.800.000.000 | | | 17 | 360.000.000 | 17 | 159.626.000 | 17 | 159.626.000 | 100,0 | 44,3 | 0 | 159.626.000 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 02 | 2.02 | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Dae | rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | 100 | % | 8.661.785.220 | | | 100 | 689.785.220 | 100 | | 100 | 334.362.500 | 100,0 | 48,5 | 0 | 334.362.500 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengelolaan Data Kependudukan | 1 | dokumen | 2.740.000.000 | | | 1 | 230.000.000 | 1 | 61.110.000 | 1 | 61.110.000 | 100,0 | 26,6 | 0 | 61.110.000 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 03 | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | 1 | Dokumen | 238.993.960 | | | 1 | 33.993.960 | 0 | - | | - | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 08 | Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB U | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana ( Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk | 23 | unit | 1.405.000.000 | | | 29 | 200.000.000 | 29 | 174.725.000 | 29 | 174.725.000 | 100,0 | 87,4 | 0 | 174.725.000 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 09 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Infor | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 12 | Laporan | 3.250.000.000 | | | 17 | 100.000.000 | | - | 17 | 71.421.000 | 100,0 | 71,4 | 0 | 71.421.000 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 11 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedianya | 1 | dokumen | 385.000.000 | | | 804 | 50.000.000 | | - | | - | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 13 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan da | Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 12 | dokumen | 353.791.260 | | | 17 | 25.791.260 | 17 | 19.200.000 | 17 | 19.200.000 | 100,0 | 74,4 | 0 | 19.200.000 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 14 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Pro | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan | 1 | Laporan | 289.000.000 | | | 60 | 50.000.000 | 0 | - | 10 | 7.906.500 | 16,7 | 15,8 | 0 | 7.906.500 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 03 | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan | **1,4** | **%** | 15.756.307.136 | | | | 4.382.299.456 | | | | 985.521.450 | | | | | | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi | rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Loka | **100** | **%** | 931.715.000 | | | 100 | 931.715.000 | | | 50 | 479.805.250 | 50,0 | 51,5 | 0 | 479.805.250 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 01 | Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra K | Terlaksanaya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk | 1 | mesmedia | 4.375.000 | | | 0 | 4.375.000 | 0 | - | 0 | - | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 02 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK s | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 12 | Laporan | 25.000.000 | | | 1 | 25.000.000 | 1 | 24.890.000 | 1 | 24.890.000 | 100,0 | 99,6 | 0 | 24.890.000 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 02 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cet | Tersedianya KIE Media Cetak | **100** | **%** | 70.640.000 | | | 17 | 70.640.000 | 17 | 39.534.250 | 17 | 39.534.250 | 100,0 | 56,0 | 0 | 39.534.250 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 06 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koo | Rapat Koordinasi Kecamatan | 100 | Unit | 265.200.000 | | | 17 | 265.200.000 | 17 | 186.320.000 | 17 | 186.320.000 | 100,0 | 70,3 | 0 | 186.320.000 | 0,0 | | DP3AP2KB |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 07 | Pengelolaan operasional dan sarana di Balai penyuluhan KB | Peningkatan Peserta KB Baru dan/ atau ganti cara MKJP, Penambahan peserta KB Aktif, Peningkatan Jumlah Keluarga yang terpapar program BANGGA KENCANA, Peningkatan Keluarga yang terpapar program penurunan stunting, peningkatan partisipasi ibu hamil yang memeriksakan kesehatannya difasilitas kesehatan dan partisipasi ibu dan anak usi 0-24 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan dan gizi di POSYANDU | 1452 | orang | 526.500.000 | | | 13 | 526.500.000 | 13 | 152.661.000 | 13 | 197.251.000 | 100,0 | 37,5 | 0 | 197.251.000 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 08 | Pengendalian Pogram KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Opersional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana | **100** | % | 40.000.000 | | | 2 | 40.000.000 | 2 | 31.810.000 | 2 | 31.810.000 | 100,0 | 79,5 | 0 | 31.810.000 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.02 | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB | rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 40 | Laporan | 11.420.700.000 | | | | 1.341.200.000 | | | | 50.000.000 | 0,0 | 3,7 | 0 | 50.000.000 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.02 | 02 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang tersedia | 50 | orang | 4.938.300.000 | | | 1 | 50.000.000 | | | 1 | 50.000.000 | 100,0 | 100,0 | 0 | 50.000.000 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.02 | 04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 600 | orang | 6.482.400.000 | | | 1452 | 1.291.200.000 | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.03 | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat | rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota | 1 | Laporan | 3.403.892.136 | | | | 1.609.134.456 | | | | 455.716.200 | 0,0 | 28,3 | 0 | 455.716.200 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi da | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringannya | 1 | Dokumen | 234.750.000 | | | 49 | 20.700.000 | | - | | - | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 02 | Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Ala | Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompentensi Pengelola dan Petugas Logisti Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penujang Pelayanan KB | 20 | Unit | 33.300.000 | | | 36 | 6.660.000 | | - | | - | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Ja | Jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Pengguanaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 52 | Orang | 696.000.000 | | | 4420 | 1.139.429.760 | 250 | 440.210.200 | 250 | 440.210.200 | 5,7 | 38,6 | 0 | 440.210.200 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 04 | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kega | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman, Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | 40 | Laporan | 150.000.000 | | | 1 | 30.000.000 | | - | | - | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 05 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasep | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 3 | orang | 40.800.000 | | | 16 | 8.160.000 | | 3.443.000 | 10 | 3.443.000 | 62,5 | 42,2 | 0 | 3.443.000 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 07 | Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | 17 | Laporan | 526.406.586 | | | 52 | 104.006.586 | 2 | 1.113.000 | 2 | 1.113.000 | 3,8 | 1,1 | 0 | 1.113.000 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 08 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringannya | 689 | orang | 305.745.000 | | | 17 | 16.800.000 | 17 | 5.400.000 | 17 | 5.400.000 | 100,0 | 32,1 | 0 | 5.400.000 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 10 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Beren | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berecana dan Kesehata Reproduksi | **100** | % | 1.000.000.000 | | | 17 | 200.000.000 | 17 | 4.200.000 | 17 | 4.200.000 | 100,0 | 2,1 | 0 | 4.200.000 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 11 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Jumlah Laporang Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 1 | Laporan | 59.890.550 | | | 17 | 11.978.110 | 0 | - | 0 | - | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 12 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Kegu | Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran | **15,49** | % | 357.000.000 | | | 17 | 71.400.000 | 17 | 1.350.000 | 17 | 1.350.000 | 100,0 | 1,9 | 0 | 1.350.000 | 0,0 | | DP3AP2KB |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.04 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Ke | rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | **100** | **%** | | | | 100 | 500.250.000 | | | | - | | | | | | | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 03 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung | KB | 40 | Kelompok | | | | 100 | 500.250.000 | | 0 | | - | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARG | Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 55 | unit | 15.588.855.045 | | | | 4.145.236.500 | | | | | | | | | | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 04 | 2.01 | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan K | rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 6 | Laporan | 8.224.455.045 | | | | 3.531.536.500 | | 1.280.700.207 | | | | | | | | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 01 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Kel | Rapat Pembentukan Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS | 1.000 | orang | 759.359.394 | | | 40 | 53.359.800 | 0 | - | 40 | 25.976.100 | 100,0 | 48,7 | 0 | 25.976.100 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 02 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kese | Jumlah Unit Saran Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) | 15 | Laporan | 1.400.000.000 | | | 58 | 987.400.000 | 55 | 898.275.000 | 58 | 898.275.000 | 100,0 | 91,0 | 58 | 898.275.000 | 386,7 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 03 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan K | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) | **100** | **%** | 828.553.401 | | | 6 | 36.282.600 | 6 | 19.817.000 | 6 | 19.817.000 | 100,0 | 54,6 | 0 | 19.817.000 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 04 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan da | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) | 20 | organisasi | 2.091.998.625 | | | 1000 | 79.795.500 | 1000 | 57.033.000 | 600 | 57.033.000 | 60,0 | 71,5 | 0 | 57.033.000 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| 10 | | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 05 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) | 10 | Laporan | 2.091.998.625 | | | 1000 | 2.239.640.000 | 1000 | 188.809.907 | 200 | 188.809.907 | 20,0 | 8,4 | 0 | 188.809.907 | 0,0 | | DP3AP2KB |
| | | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 08 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | | | 1.052.545.000 | | | 15 | 135.058.600 | 15 | 116.765.300 | 15 | 116.765.300 | 100,0 | 86,5 | 0 | 116.765.300 | #DIV/0! | | |
| | | 2 | 14 | 04 | 2.02 | | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kema | rata rata capain kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | 7.364.400.000 | | | | 613.700.000 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| | | 2 | 14 | 04 | 2.02 | 04 | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahte | Jumlah Laporan Hasil dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | | | 7.364.400.000 | | | 0 | 613.700.000 | | - | 0 | - | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| 11 | | 2 | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | | | | 59.096.283.095 | | 116.393.061 | | 16.768.538.783 | 95 | 8.029.390.314 | 83 | 11.880.688.281 | 100,0 | 187,1 | | 11.880.688.771 | | | DKPP |
| 11 | | **2** | **09** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** | **indeks** | **95** | **37.162.550.990** | | | **83** | **############** | **95** | **3.602.532.642** | **83** | **############** | **100,0** | **130,1** | | **185.838.245** | **0,0** | **0,5** | DKPP |
| 11 | | | | | | | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Tersusun Perencanaan, Pengaanggaran dan Evaluasi Kinerja PD** | **bulan** | **60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **141248650** | **1** | **141.248.650** | **100,0** | **#DIV/0!** | **100** | **141.248.650** | **100,0** | **0,6** | DKPP |
| 11 | | | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | okumer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205.961.340 | 1 | 141248650 | 1 | 141.248.650 | 100,0 | 68,6 | 100 | 141.248.650 | **100,0** | 0,6 | DKPP |
| 11 | | **2** | **09** | **01** | **3.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **bulan** | **60** | **32.147.407.074** | **60** | **############** | **12** | **############** | **12** | **2.845.968.295** | **12** | **############** | **100,0** | **104,8** | **12** | **33.697.565.119** | **20,0** | **104,8** | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | Bulan | 60 | 31.029.546.189 | 60 | ########## | 12 | 5.491.884.004 | 3 | 2.655.807.385 | 12 | 5.749.411.325 | 100,0 | 104,7 | 12 | 33.014.706.789 | **20,0** | 106,4 | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Honorarium Pengelola Keuangan | bulan | 60 | 1.117.860.885 | 439 | 492.319.510 | 12 | 176.998.139 | 12 | 190160910 | 12 | 190.538.820 | 100,0 | 107,7 | 12 | 682.858.330 | **20,0** | 61,1 | DKPP |
| 11 | | **2** | **09** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Darah** | **Unit** | **2** | **35.000.000** | | | **2** | **35.000.000** | **2** | **33105400** | **2** | **33.105.400** | **100,0** | **94,6** | **12** | **33.105.400** | **600,0** | **94,6** | DKPP |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | 2 | 09 | 01 | 2.05 | 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Barang Millik Daerah | unit | 2 | 35.000.000 | | | 2 | 35.000.000 | 2 | 33105400 | 2 | 33.105.400 | 100,0 | 94,6 | 12 | 33.105.400 | **600,0** | 94,6 | DKPP |
| 11 | | **2** | **09** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Bulan** | **60** | **386.706.250** | **60** | **##########** | **12** | **71.670.000** | | | **12** | **68.934.545** | **100,0** | **96,2** | **0** | **265.075.246** | **0,0** | **68,5** | DKPP |
| 11 | | **2** | **09** | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pakaian Dinas Beserta Atribut | stel | 0 | 220.416.250 | 135 | 155.562.000 | 51 | 38.250.000 | | | 51 | 37.500.000 | 100,0 | 98,0 | 0 | 193.062.000 | **0,0** | 87,6 | DKPP |
| 11 | | **2** | **09** | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat | orang | 25 | 166.290.000 | 6 | 40.578.701 | 5 | 33.420.000 | | | 5 | 31.434.545 | 100,0 | 94,1 | 0 | 72.013.246 | **0,0** | 43,3 | DKPP |
| 11 | | **2** | **09** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat daerah** | **Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Bulan** | **60** | **2.423.433.061** | **60** | **##########** | **12** | **315.107.186** | | **361951810** | 12 | 476.364.560 | **100,0** | **151,2** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor | Jenis | 18 | 14.275.000 | | 8438000 | 3 | 2.000.000 | 0 | 0 | 3 | 1.735.500 | 100,0 | 86,8 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | 225 | 608.522.023 | 239 | 221.819.865 | 45 | 66.449.800 | 10 | 148459462 | 45 | 184.540.312 | 100,0 | 277,7 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga | Jenis | 74 | 179.521.710 | 54 | 85.880.782 | 14 | 33.854.342 | 4 | 6882500 | 6 | 27.960.600 | 42,9 | 82,6 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang cetakan dan penggandaan | jenis | 30 | 81.692.680 | 38 | 47.127.840 | 6 | 14.791.396 | 1 | 5340000 | 3 | 16.709.700 | 50,0 | 113,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | buah | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Perjalanan Dinas | bulan | 60 bulan | 1.539.421.648 | 1249 | 668.872.424 | 12 | 198.011.648 | 3 | 201269848 | 0 | 245.418.448 | 0,0 | 123,9 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | **2** | **09** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Unit** | | **208.376.905** | | **##########** | **0** | **0** | | | 0 | 0 | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional | unit | 2 | 50.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebeuler | Jumlah Meubeleur | unit | | 148.376.905 | | 100.100.000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan mesin lainnya | Unit | | 10.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | unit | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | DKPP |
| 11 | | **2** | **09** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Bulan** | **60** | **1.250.627.700** | **60** | **##########** | **12** | **132.872.710** | | **144.069.130** | 12 | 284.455.302 | **100,0** | **214,1** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Telepon,Internet,air dan Listrik/Tagihan Listrik | bulan | 60 | 134.735.700 | 55 | 73.246.951 | 12 | 24.400.000 | 3 | 35532580 | 12 | 48.325.852 | 100,0 | 198,1 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan kantor | unit | 7 | 107.400.000 | 53 | 31.970.000 | 7 | 58.560.000 | 3 | 13750000 | 7 | 26.370.000 | 100,0 | 45,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Honorarim Tidak Tetap | bulan | 60 | 1.008.492.000 | 606 | 671.230.850 | 12 | 196.180.000 | 3 | 94.786.550 | 6 | 209.759.450 | 50,0 | 106,9 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | **2** | **09** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara** | **Unit** | **60** | **711.000.000** | **8** | **##########** | **3** | **127.127.290** | | **76.189.357** | 1 | 80.929.357 | **33,3** | **63,7** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemeliharaan dan Pajak kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan | Unit | 1 | 225.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11 | | 2 | 09 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan dan Pajak kendaraan dinas/operasional lapangan | unit | 6 | 486.000.000 | 8 | 264.352.482 | 6 | 120.000.000 | 1 | 76.189.357 | 1 | 80.929.357 | 16,7 | 67,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11 | | **2** | **09** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN** | **Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk mendukung kemandirian pangan** | **%** | **100** | **7.166.921.825** | | **0** | **20** | **##########** | | **4.334.764.264** | 0 | 0 | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | DKPP |
| 11 | | **2** | **09** | **02** | **2.01** | | **Penyediaan Insfrastruktur dan seluruh pendukung kemandiarian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota** | **Jumlah infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan** | **%** | **100** | **5.103.023.850** | | | **20** | **##########** | | **3.617.950.000** | 0 | 0 | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 02 | 2.01 | 01 | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Jumlah Lumbung Pangan | unit | 5 | 182.435.195 | | | 1 | 3.797.380.000 | 5 | 3.617.950.000 | 5 | 3.930.950.000 | 500,0 | 103,5 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 02 | 2.01 | 02 | Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur | Jumlah lantai jemur | unit | 5 | 214.750.000 | | | 1 | 420.810.750 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 02 | 2.01 | 03 | Penyediaan Infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya | Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur kemandirian pangan | unit | 5 | 715.838.655 | | | 1 | 75.000.000 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan insfrastruktur logistik | Jumlah pemantauan dan evaluasi penyediaan infrastruktur logistik | Dokumen | 5 | 3.990.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 02 | 2.01 | 05 | Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | Pembuatan desain peta jalan dan infrastruktur pendukung | % | 100 | 1.045.954.575 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11 | | **2** | **09** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **Persentase ketersediaan pangan** | **%** | **100** | **5.355.153.520** | | **92.084.424** | **20** | **##########** | | **39466200** | 0 | 0 | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | DKPP |
| 11 | | **2** | **09** | **03** | **2.01** | | **Penyedian dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan** | **Jumlah ketersediaan pangan** | **%** | **100** | **1.010.000.000** | | **50.033.060** | **20** | **107.361.648** | | **39466200** | 0 | 0 | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan | Dokumen | 15 | 110.000.000 | 2 | 44.283.060 | 2 | 42.361.648 | 1 | 39466200 | 1 | 45.607.370 | 50,0 | 107,7 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Pangan berbasis sumber daya lokal | Dokumen | 15 | 900.000.000 | | | 1 | 65.000.000 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 03 | koordinasi ,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan pangan Lainnya | Jumlah Koordinasi,Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan pangan Lainnya | % | 100 | 3.004.903.520 | 2 | 5.750.000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 0 | **5,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 04 | Pemantauan Stok,Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah survey pemantauan stok pasokan dan harga pangan ke kecamatan | Dokumen | 15 | 1.582.524.495 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 05 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Jumlah lembaga jaringan distribusi pangan | kali | 15 | 130.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 06 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | Jumlah lembaga usaha pangan | kali | 5 | 542.379.025 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | **2 09 03 2.02** | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | **Jumlah cadangan pangan masyarakat** | **Dokume** | **15** | **250.000.000** | | **27.110.068** | **0** | **0** | | | 0 | 0 | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | DKPP |
| 11 | | 2 09 03 2.02 01 | koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten /Kota | jumlah koordinasi dan sinkronisasi | kali | 5 | 250.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 09 03 2.02 02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | Jumlah rencana kebutuhan pangan lokal | kali | 5 | 250.000.000 | 17 | 27.110.068 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 09 03 2.02 03 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah cadangan pangan | % | 100 | 1.340.250.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 09 03 2.02 04 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah pemeliharaan cadangan pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | DKPP |
| 11 | | **2 09 03 2.03** | **Penentu Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi** | **Koordinasi lintas sektoral** | | | | | | | | | | | | | | | | | | DKPP |
| 11 | | 2 09 03 2.03 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penentu Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | Jumlah koordinasi lintas sektoral | | | | | | | | | | | | | | | | | | DKPP |
| 11 | | **2 09 03 2.04** | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi** | **persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi** | | | | | 14941296 | | | | **126032464** | | | | | | | | | DKPP |
| 11 | | 2 09 03 2.04 01 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | Jumlah survey data | lokume | 15 | 335.822.450 | | | 1 | 70.000.000 | 1 | 64116140 | 1 | 64.116.140 | 100,0 | 91,6 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 09 03 2.04 02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Pameran B2SA kecamatan | kali | 60 | 504.427.550 | 2 | 14941296 | 17 | 70.000.000 | 17 | 61916324 | 17 | 61.916.324 | 100,0 | 88,5 | 3 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 09 03 2.04 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | Jumlah pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita | Dokume | 15 | 250.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | **2 09 04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **Persentase Penanganan daerah rentan Pangan** | **%** | **100** | **3.937.998.760** | | **24308637** | **20** | **300.000.000** | | **0** | 0 | 0 | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | DKPP |
| 11 | | **2 09 04 2.01** | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan** | **Dokumen kerentanan dan ketahanan pangan** | **Dokume** | **4** | **3.937.998.760** | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 09 04 2.01 01 | Penyusunan, Pemutahiran dan Analisisi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | indeks | 17,5 | 3.937.998.760 | | | 3 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | **2 09 04 2.02** | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewengan Kabupaten/Kota** | **Jumlah Kerawanan Pangan Kewengan Kabupaten/Kota** | **ebijaka** | **21** | **682.681.400** | | | **1** | **300.000.000** | | | 0 | 0 | **0,0** | **0,0** | **1** | **0** | **0,0** | **0,0** | DKPP |
| 11 | | 2 09 04 2.02 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan PanganKabupaten/Kota | Jumlah Grand Desain Ketahanan Pangan Kabupaten Karo | Dokume | 4 | 111.536.280 | 12 | 24308637 | 1 | 300.000.000 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 09 04 2.02 02 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengolahan, dan Penyaluran Cadanga Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana pendukung cadangan pangan masyarakat | Dokume | 4 | 111.536.280 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | **2 09 05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan** | **Persen** | **100** | **785.000.000** | | **0** | **20** | **65.000.000** | | **52.627.208** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | **2 09 05 2.01** | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/Kota** | **sampel** | | **785.000.000** | | | | | | **52.627.208** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 09 05 2.01 01 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | apoktar | 15 | 50.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 09 05 2.01 02 | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Sertifikasi Pangan segar asal tumbuhan | sampel | 270 | 485.000.000 | | | 20 | 65.000.000 | 10 | 52.627.208 | 20 | 94.089.858 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 09 05 2.01 03 | Registrasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Registrasi Keamanan Pangan | elompo | 10 | 50.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 09 05 2.01 04 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah | elompo | 20 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 2 09 05 2.01 05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan | paket | 5 | 200.000.000 | | | 25 | 24.479.185 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | **3 25** | **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | ########### | | | 0 | 59.940.000 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | **3 25 02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **Persentase Produksi Perikanan Tangkap** | **%** | **362,51** | **575.416.000** | | **0** | **362,5** | **575.416.000** | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | **3 25 02 2.01** | **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **Ketersediaan Sumber Daya Ikan di PUD** | **Ekor** | **430000** | **475.416.000** | | | **4E+05** | **475.416.000** | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 3 25 02 2.01 01 | Penyedia Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Data dan Jumlah Produksi hasil tangkap | Laporan | 60 | 12.500.000 | | | 60 | 12.500.000 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 3 25 02 2.01 02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Pos Pendaratan Ikan | Unit | 1 | 75.000.000 | | | 1 | 75.000.000 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 3 25 02 2.01 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Bibit Ikan dan alat tangkap | or dan Ur | dan 3 Unit | 387.916.000 | | 125.000 Ekor dan 3 Unit | | 387.916.000 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | **3 25 02 2.02** | **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Produksi Perikanan Tangkap** | **Ton** | **195** | **100.000.000** | | | **195** | **100.000.000** | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 3 25 02 2.02 01 | Pengembangan kapasitas Nelayan kecil | Jumlah Sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap | Unit | 7 | 75.000.000 | | | 7 | 75.000.000 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 3 25 02 2.02 02 | Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha | Jumlah Sosialisasi Kemitraan Usaha | Kali | 4 | 25.000.000 | | | 4 | 25.000.000 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | **3 25 04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **Persentase Produksi Perikanan Budidaya** | **%** | **448,18** | **3.372.492.000** | | | **448,2** | ########### | | | 274000 | 59.940.000 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | **3** | **25** | **04** | **2.01** | | **Penerbitan ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota** | **Jumlah Surat Rekomendasi** | **komend** | **0** | **26.047.500** | | **0** | **0** | **26.047.500** | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 3 | 25 | 04 | 2.01 | 02 | Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Surat Rekomendasi | komend | 48 | 26.047.500 | | | 48 | 26.047.500 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | **3** | **25** | **04** | **2.02** | | **Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil** | **Jumlah Produksi Ikan Konsumsi** | **Ton** | **2004,21** | **1.686.444.500** | | **##########** | **2004** | **##########** | **5** | **484325350** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 3 | 25 | 04 | 2.02 | 01 | Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil | Jumlah Sarana dan Prasarana usaha perikanan budidaya | Unit | 49 | 1.470.389.500 | 99 | 968.040.200 | 49 | 1.470.389.500 | 5 | 484325350 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 3 | 25 | 04 | 2.02 | 02 | Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidya ikan kecil. | Jumlah sosialisasi Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil | Kali | 20 | 53.139.000 | | | 20 | 53.139.000 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 3 | 25 | 04 | 2.02 | 03 | Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. | Jumlah pembudidaya ikan yang dilatih | Orang | 160 | 162.916.000 | 260 | 155.990.335 | 160 | 162.916.000 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | **3** | **25** | **04** | **2.04** | | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **Jumlah Produksi bibit ikan** | **ekor** | **4212500** | **1.660.000.000** | | **##########** | **4E+06** | **##########** | **#####** | **184.567.760** | **274000** | **59.940.000** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | DKPP |
| 11 | | 3 | 25 | 03 | 2.04 | 01 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data dan informasi perikanan budidaya | Laporan | 48 | 27.500.000 | | | 48 | 27.500.000 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 3 | 25 | 03 | 2.04 | 02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan | unit | 1 | 27.500.000 | 2 | 215.056.000 | 1 | 27.500.000 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 3 | 25 | 03 | 2.04 | 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Sarana Pembudidayaan Ikan | Ekor | 4212500 | 1.350.000.000 | 2E+06 | 811.317.100 | 4E+06 | 1.350.000.000 | 56000 | 184.567.760 | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 3 | 25 | 03 | 2.04 | 04 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dallam satu Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Alat Pemeriksaan Kesehatan Ikan | Unit | 4 | 180.000.000 | 1 | 125.479.950 | 4 | 180.000.000 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 3 | 25 | 03 | 2.04 | 05 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Pembudidaya Ikan | Kali | 20 | 75.000.000 | | | 20 | 75.000.000 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | **3** | **25** | **05** | | | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Perikanan** | **Dokumen** | | **82.500.000** | | | | **82.500.000** | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **#DIV/0!** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | **3** | **25** | **05** | **2.01** | | **Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota** | **Laporan Pengawasan** | **Laporan** | **48** | **82.500.000** | | | **48** | **82.500.000** | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 3 | 25 | 05 | 2.01 | 01 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Data dan Informasi Pengawasan Perikanan Tangkap | Data | 60 | 41.250.000 | | | 60 | 41.250.000 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 3 | 25 | 05 | 2.01 | 02 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Data dan Informasi Pengawasan Perikanan Budidaya | data | 60 | | | | 60 | | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | ####### | DKPP |
| 11 | | **3** | **25** | **06** | | | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **Persentase Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan** | **%** | **100** | **658.250.000** | | | **100** | **658.250.000** | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | **3** | **25** | **06** | **2.01** | | **Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil** | **Surat Rekomendasi** | **komend** | **48** | **35.000.000** | | | **48** | **35.000.000** | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 3 | 25 | 06 | 2.01 | 01 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Data ikan konsumsi yang masuk dan keluar dari Kab. Karo | Laporan | 60 | 35.000.000 | | | 60 | 35.000.000 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | **3** | **25** | **06** | **2.02** | | **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil** | **Jumlah Sosialisasi dan Pertemuan** | **Kali** | **48** | **45.000.000** | | | **48** | **45.000.000** | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 3 | 25 | 06 | 2.02 | 01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah pelaku usaha yang menerima bimbingan | Orang | 48 | 45.000.000 | | | 48 | 45.000.000 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | **3** | **25** | **06** | **2.03** | | **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **Jumlah Penyaluran Bahan Baku dan Sosialisasi** | **Unit** | **18** | **578.250.000** | | | **18** | **578.250.000** | | **134.694.905** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 3 | 25 | 06 | 2.03 | 01 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sosialisasi gemar makan ikan | Kali | 12 | 393.027.000 | | | 12 | 393.027.000 | 1 | 69.697.930 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 11 | | 3 | 25 | 06 | 2.03 | 02 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Alat pengolah ikan | Unit | 6 | 185.223.000 | | | 6 | 185.223.000 | 2 | 64.996.975 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | **0,0** | 0,0 | DKPP |
| 12 | | 2 | 11 | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | 143.322.520.390 | | 24.710.018.345 | | 26.463.909.664 | | 11.448.331.251 | | 25.600.685.083 | | 0,97 | | | | | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | 65.000.645.762 | | 10.644.622.710 | | 12.908.984.064 | | 6.365.384.250 | | 12.304.937.429 | | 0,95 | | | | | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 01 | 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan | | | 22.870.160.375 | | 4.395.850.321 | | 4.239.456.459 | | 1.767.880.770 | | 3.933.962.106 | | 0,93 | | | | | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan | bulan | 60 | 21.697.028.075 | 12 | 3.881.775.321 | 12 | 3.950.392.409 | 6 | 1.656.220.770 | 12,00 | 3.700.622.106 | 1,00 | 0,94 | 24,00 | 7.582.397.427 | 0,40 | 0,35 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 01 | 2 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | orang bula | 840 | 1.173.132.300 | 12 | 514.075.000 | 12 | 289.064.050 | 3 | 111.660.000 | 12,00 | 233.340.000 | 1,00 | 0,81 | 24,00 | 747.415.000 | 0,40 | 0,64 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 01 | 2,1 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Sarana dan Prasarana | | | 150.750.000 | | 35.510.000 | 51 | 75.000.000 | 51 | 70.030.000 | 51,00 | 70.030.000 | 1,00 | 0,93 | 51,00 | 105.540.000 | 0,00 | 0,70 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pakaian Dinas Beserta Atribut | stel | 225 | 150.750.000 | 53 | 35.510.000 | 51 | 75.000.000 | 51 | 70.030.000 | 51,00 | 70.030.000 | 1,00 | 0,93 | 104,00 | 105.540.000 | 0,00 | 0,70 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Sarana dan Prasarana | | | 1.523.307.743 | | 323.954.525 | | 384.812.769 | | 216.065.243 | 0,00 | 364.312.693 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688.267.218 | 0,00 | 0,45 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 1 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Sarana dan Prasarana | jenis | 225 | 194.849.094 | 43 | 59.319.600 | 45 | 40.474.354 | 22 | 18.896.000 | 45,00 | 40.413.500 | 1,00 | 1,00 | 88,00 | 99.733.100 | 0,39 | 0,51 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Sarana dan Prasarana | jenis | 100 | 24.883.699 | 20 | 2.566.500 | 20 | 4.394.515 | 8 | 1.683.000 | 20,00 | 4.386.000 | | 1,00 | 40,00 | 6.952.500 | 0,00 | 0,28 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Sarana dan Prasarana | jenis | 115 | 578.205.950 | 9 | 71.370.400 | 9 | 89.322.900 | 4 | 35.046.500 | 8,00 | 75.596.500 | 0,89 | 0,85 | 17,00 | 146.966.900 | 0,15 | 0,25 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Sarana dan Prasarana | orang kali | 1.360 | 725.369.000 | 264 | 190.698.025 | 12 | 250.621.000 | 8 | 160.439.743 | 12,00 | 243.916.693 | 1,00 | 0,97 | 276,00 | 434.614.718 | 0,20 | 0,60 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Sarana dan Prasarana | | | 149.500.000 | | 38.358.100 | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.358.100 | 0,00 | 0,26 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 01 | 2.07 | 03 | Pengadaan Mebel | Sarana dan Prasarana | buah | 20 | 57.000.000 | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Sarana dan Prasarana | buah | 9 | 92.500.000 | 5 | 38.358.100 | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 38.358.100 | 0,56 | 0,41 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Sarana dan Prasarana | | | 2.361.363.927 | | 151.242.775 | | 420.649.367 | | 112.367.013 | 0,00 | 409.049.787 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 560.292.562 | 0,00 | 0,24 | DLH |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Sarana dan Prasarana | bulan | 60 | 311.850.000 | 12 | 45.562.775 | 12 | 55.987.500 | 2 | 9.182.013 | 12,00 | 44.909.787 | 1,00 | 0,80 | 24,00 | 90.472.562 | 0,00 | 0,29 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Sarana dan Prasarana | unit | 134 | 76.713.867 | 20 | 15.800.000 | 12 | 16.713.867 | 12 | 16.200.000 | 12,00 | 16.200.000 | 1,00 | 0,97 | 32,00 | 32.000.000 | 0,24 | 0,42 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Sarana dan Prasarana | orang/bula | 1.500 | 1.972.800.060 | 24 | 89.880.000 | 12 | 347.948.000 | 3 | 86.985.000 | 12,00 | 347.940.000 | 1,00 | 1,00 | 36,00 | 437.820.000 | 0,02 | 0,22 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera | Sarana dan Prasarana | | | 37.945.563.717 | | 5.699.706.989 | | 7.789.065.469 | | 4.199.041.224 | 0,00 | 7.527.582.843 | | 0,97 | 0,00 | 13.227.289.832 | 0,00 | 0,35 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kend | Sarana dan Prasarana | unit | 855 | 37.545.563.717 | 72 | 5.599.943.989 | 171 | 7.789.065.469 | 92 | 4.199.041.224 | 165,00 | 7.527.582.843 | 0,96 | 0,97 | 237,00 | 13.127.526.832 | 0,00 | 0,35 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor at | Sarana dan Prasarana | unit | 2 | 400.000.000 | 1 | 99.763.000 | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 99.763.000 | 0,50 | 0,25 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | dokumen RPPLH dan KLHS | | | 940.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 02 | 2.01 | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabu | dokumen | | | 190.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | dokumen | dokumen | 1 | 70.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 02 | 2.01 | 02 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | sosialisasi | kali | 8 | 120.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/K | dokumen | | | 750.000.000 | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 02 | 2.02 | 03 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan d | dokumen | dokumen | 3 | 750.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 03 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LING | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | | 1.272.850.000 | | 82.134.250 | | 82.850.000 | | 82.362.000 | 0,00 | 82.362.000 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 164.496.250 | 0,00 | 0,13 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 03 | 2.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupat | Jumlah pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota | | | 810.000.000 | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkunga | Penanaman Pohon(Penghijauan) | kali | 12 | 480.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kac | sosialisasi | kali | 16 | 80.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | alat-alat laboratorium | unit | 10 | 250.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 03 | 2.02 | | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab | Dokumen IKLH dan IKPLHD | | | 462.850.000 | | 82.134.250 | | 82.850.000 | | 82.362.000 | 0,00 | 82.362.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.496.250 | 0,00 | 0,36 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 03 | 2.02 | 01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemarandan/atau Kerusakan Lingkungan H | Pemantauan kualitas lingkungan dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) | dokumen | 8 | 462.850.000 | 1 | 82.134.250 | 2 | 82.850.000 | 2 | 82.362.000 | 2,00 | 82.362.000 | 1,00 | 0,99 | 3,00 | 164.496.250 | 0,38 | 0,36 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMANHAYATI (KEHATI | Jumlah Jenis Keanekaragaman Hayati di RTH | | | 196.753.570 | | 17.982.000 | | 25.547.840 | | 16.921.540 | 0,00 | 23.246.540 | | 0,91 | 0,00 | 41.228.540 | 0,00 | 0,21 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 04 | 2 | | Pengelolaan Keanekaragaman HayatiKabupaten/Kota | Jumlah Jenis Keanekaragaman Hayati di RTH | | | 196.753.570 | | 17.982.000 | | 25.547.840 | | 16.921.540 | 0,00 | 23.246.540 | | 0,91 | 0,00 | 41.228.540 | 0,00 | 0,21 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana PengelolaanKeanekaragaman Hayati | dokumen | dokumen | 2 | 100.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 04 | 2 | 04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | pemeliharaan RTH | RTH | 1 | 96.753.570 | 1 | 17.982.000 | 1 | 25.547.840 | 1 | 16.921.540 | 1,00 | 23.246.540 | 1,00 | 0,91 | 2,00 | 41.228.540 | 0,00 | 0,43 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYADAN BERACUN (B3) DAN | Jumlah rekomendasi izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 | | | 275.000.000 | | 1.850.623.700 | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.623.700 | 0,00 | 6,73 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 05 | 2 | | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 | | | 275.000.000 | | 0 | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 05 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen IzinPenyimpanan Sementara Limbah B3Dilaks | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | kali | 4 | 160.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 05 | 2.01 | 02 | Verifikasi Lapangan untuk MemastikanPemenuhan Persyaratan Administrasi da | monitoring | kali | 200 | 115.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 05 | 2.02 | | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 1.850.623.700 | | | | | | | | | | | | | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 05 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provins | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | | | | 26 | 1.850.623.700 | | | | | | | | | | | | | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANTERHADAP IZIN LINGKUNGAN | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, | | | 367.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 06 | 2 | | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usahadan/atau Kegiatan yang Izin L | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, | | | 367.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan KewajibanIzin Lingkungan dan/atau Izin PP | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | kegiatan | 4 | 148.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 02 | Pengembangan Kapasitas Pejabat PengawasLingkungan Hidup | Pelatihan PPLHD dan PPNS | orang | 4 | 60.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang IzinLingkungan Hidup, Izin PPLH y | monitoring | orang | 300 | 80.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan danPenerapan Sanksi Upaya dan Rer | monitoring dan evaluasi | kali | 40 | 79.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 08 | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,PELATIHAN DAN PENYULUHAN L | Jumlah Peningkatan Pendidikan,Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | | | 50.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 08 | 2 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, danPenyuluhan Lingkungan Hidu | Jumlah Peningkatan Pendidikan,Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | | | 50.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 08 | 2 | 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Gerakan Peduli Lingkungan | kali | 8 | 50.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 09 | | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUPUNTUK MASYARAKAT | pemberian penghargaan lingkungan hidup, | | | 1.037.000.000 | | | | 33.537.000 | | 26.640.000 | 0,00 | 26.640.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.640.000 | 0,00 | 0,03 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 09 | 2 | | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Ko | pemberian penghargaan lingkungan hidup, | | | 1.037.000.000 | | | | 33.537.000 | | 26.640.000 | 0,00 | 26.640.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.640.000 | 0,00 | 0,03 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 09 | 2 | 01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/LembagaMasyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidik | jumlah sekolah yang dibina | sekolah | 250 | 1.037.000.000 | | | 50 | 33.537.000 | 40 | 26.640.000 | 40,00 | 26.640.000 | 0,80 | 0,79 | 40,00 | 26.640.000 | 0,16 | 0,03 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 10 | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUANLINGKUNGAN HIDUP | persentase kasus pengaduan lingkungan hidup | | | 122.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 10 | 2 | | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di BidangPerlindungan dan Pengelol | persentase kasus pengaduan lingkungan hidup | | | 122.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadapPPLH Kabupaten/Kota | persentase kasus pengaduan lingkungan hidup | persen | 100 | 40.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 10 | 2 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SanksiAdministrasi, Penyelesaian Sengk | Monitoring dan evaluasi | kali | 40 | 82.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 11 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase Penanganan Sampah | | | 74.061.271.058 | | 12.114.655.685 | | 13.412.990.760 | | 4.957.023.461 | 0,00 | 13.163.499.114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.278.154.799 | 0,00 | 0,34 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 11 | 2 | | Pengelolaan Sampah | persentase timbulan sampah yang ditangani | | | 74.061.271.058 | | 12.114.655.685 | | 13.412.990.760 | | 4.957.023.461 | 0,00 | 13.163.499.114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.278.154.799 | 0,00 | 0,34 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | Penyusunan Kebijakan dan Strategi DaerahPengelolaan Sampah Kabupaten/Ko | perda | perda | 2 | 450.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 11 | 2 | 02 | Pengurangan Sampah dengan melakukanPembatasan, Pendauran Ulang dan P | jumlah bank sampah dan Pusat Daur Ulang | unit | 15 | 2.300.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 11 | 2 | 03 | Penanganan Sampah dengan melakukanPemilahan, Pengumpulan, Pengangku | Honorarium tukang sapu, supir truk, supir viar,mandor, pencatat TPA | persen | 90 | 67.107.384.905 | 80 | 10.216.406.985 | 252.809 | 11.862.993.607 | 79.854 | 3.747.146.904 | 252.107,65 | 11.830.102.557 | 1,00 | 1,00 | 252.187,65 | 22.046.509.542 | 2.802,08 | 0,33 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 11 | 2 | 04 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalamPengelolaan Persampahan | Pembinaan dan Pembentukan bank sampah, rumah kompos, pusat daur ulang | lokasi | 19 | 899.997.153 | 2 | 47.625.000 | 5 | 39.997.153 | 4 | 32.985.000 | 4,50 | 36.505.000 | 0,90 | 0,91 | 6,50 | 84.130.000 | 0,34 | 0,09 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 11 | 2 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi PenyediaanPrasarana dan Sarana Pengelolaan Per | Sarana dan Prasarana | kali | 40 | 220.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 11 | 2 | 06 | Penyusunan Kebijakan Kerjasama PengelolaanPersampahan | dokumen | dokumen | 8 | 230.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DLH |
| 12 | | 2 | 11 | 11 | 2 | 07 | Penyediaan Sarana dan Prasarana PengelolaanPersampahan di TPA/TPST/SP | jumlah sarana dan prasarana | unit | 124 | 2.853.889.000 | 831 | 1.850.623.700 | 3 | 1.510.000.000 | 2 | 1.176.891.557 | 2,58 | 1.296.891.557 | 0,86 | 0,86 | 833,58 | 3.147.515.257 | 0,00 | 1,10 | DLH |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | 2 | 12 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | 32.781.205.637 | | | | 5.484.049.750 | | | | 4.915.977.426 | | 89,64% | | 4.915.977.426 | | | | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | 32.781.205.637 | | | | 5.484.049.750 | | | | 4.915.977.426 | | 89,64% | | 4.915.977.426 | | | | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 95 | 29.754.517.637 | | | 12 | 5.434.050.665 | | 1.854.153.436 | 0 | 4.881.051.326 | 0,00% | 89,82% | 0 | 4.881.051.326 | 0,00% | 16,40% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Bulan | 60 | 239.123.024 | | | 12 | 15.439.941 | 12 | 15.351.200 | 0 | 15.351.200 | 0,00% | 99,43% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 01 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kine | Data Kependudukan dan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | Dokumen | 70 | 98.040.638 | | | 14 | 15.439.941 | 14 | 15.351.200 | 0 | 15.351.200 | 0,00% | 99,43% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 03 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Pelayanan Administrasi Kependudukan, Tim Lintas Sektor, Dukcapil Go Digital, Zona Integritas | Kegiatan | 20 | 141.082.332 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Bulan | 60 | 17.747.619.004 | | | 12 | 3.356.439.096 | 3 | 1.231.560.773 | 9 | 2.904.572.132 | 75,00% | 86,54% | 9 | 2.904.572.132 | 15,00% | 16,37% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | Bulan | 60 | 17.073.719.004 | | | 12 | 3.292.776.936 | 3 | 1.110.900.773 | 9 | 2.764.352.132 | 75,00% | 83,95% | 3 | 2.764.352.132 | 5,00% | 16,19% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan | Honorarium Pengelola Keuangan | Orang/Bula | 85 | 673.900.000 | | | 17 | 63.662.160 | 9 | 120.660.000 | 4 | 140.220.000 | 23,53% | 220,26% | 4 | 140.220.000 | 4,71% | 20,81% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bulan | 60 | 1.170.410.096 | | | 12 | 146.750.000 | 12 | 36.816.600 | 0 | 67.991.600 | 0,00% | 46,33% | 0 | 67.991.600 | 0,00% | 5,81% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pakaian Dinas Beserta Atribut | Stel | 215 | 161.250.000 | | | 43 | 34.500.000 | 40 | 29.000.000 | 43 | 60.175.000 | 100,00% | 174,42% | 42 | 43 | 19,53% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Bentuk Sosialisasi Yang Dilaksanakan | Jenis | 20 | 10.009.160.096 | | | 4 | 112.250.000 | 4 | 7816600 | 0 | 7.816.600 | 0,00% | 6,96% | 0 | 7.816.600 | 0,00% | 0,08% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bulan | 60 | 5.553.782.657 | | | 12 | 1.207.140.676 | 4 | 335.996.502 | 0 | 1.229.530.720 | 0,00% | 101,85% | 0 | 1.229.530.720 | 0,00% | 22,14% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik | Buah | 500 | 14.720.800 | | | 100 | 3.508.800 | 100 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0,00% | 99,75% | 0 | 3.500.000 | 0,00% | 23,78% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Penerbitan Dokumen Kependudukan | Unit/Kegiata | 225 | 4.802.247.273 | | | 34 | 1.038.958.165 | 25 | 195.467.200 | 5 | 1.040.206.800 | 14,71% | 100,12% | 5 | 1.040.206.800 | 2,22% | 21,66% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan Rumah Tangga | Buah | 85 | 21.000.747 | | | 17 | 6.496.674 | 17 | 5.214.000 | 0 | 5.214.000 | 0,00% | 80,26% | 0 | 5.214.000 | 0,00% | 24,83% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis | 25 | 100.765.036 | | | 5 | 53.104.841 | 5 | 60.567.000 | 0 | 60.567.000 | 0,00% | 114,05% | 0 | 60.567.000 | 0,00% | 60,11% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Buah | 5 | 10.800.000 | | | 1 | 2.160.000 | 1 | 600.000 | 0 | 1.620.000 | 0,00% | 75,00% | 0 | 1.620.000 | 0,00% | 15,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Perjalanan Dinas/Rapat Kerjasama Pemanfaatan Data | Orang/Kali | 225 | 604.248.801 | | | 45 | 102.912.196 | | 70.648.302 | 30 | 118.422.920 | 66,67% | 115,07% | 30 | 118.422.920 | 13,33% | 19,60% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit | 17 | 1.342.761.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Unit | 4 | 1.265.871.000 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Mebeleur | Buah | 4 | 20.000.000 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan dan Mesin | Buah | 5 | 52.890.000 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan L | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | Buah | 4 | 4.000.000 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | 60 | 3.265.191.856 | | | 12 | 625.290.952 | 12 | 189.363.011 | 0 | 585.575.582 | 0,00% | 93,65% | 0 | 585.575.582 | 0,00% | 17,93% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Telepon, Air, dan Listrik | Bulan | 60 | 60.000.000 | | | 12 | 17.760.000 | 2 | 3.334.011 | 9 | 12.111.582 | 75,00% | 68,20% | 9 | 12.111.582 | 15,00% | 20,19% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Unit | 40 | 6.020.000 | | | 8 | 4.300.000 | 8 | 4.145.000 | 0 | 4.145.000 | 0,00% | 96,40% | 0 | 4.145.000 | 0,00% | 68,85% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Pelayanan Administrasi Kependudukan | /Bulan/Ke | 1510 | 3.199.171.856 | | | 304 | 603.230.952 | 100 | 181.884.000 | 52 | 569.319.000 | 17,11% | 94,38% | 52 | 569.319.000 | 3,44% | 17,80% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Unit | 37 | 435.630.000 | | | 5 | 82.990.000 | 5 | 45.065.350 | 0 | 78.030.092 | 0,00% | 94,02% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per | Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Unit | 25 | 425.150.000 | | | 5 | 82.990.000 | 5 | 45.065.350 | 0 | 78.030.092 | 0,00% | 94,02% | | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Unit | 8 | 5.680.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor a | Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 4 | 4.800.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 02 | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)/ Kepemilikan Kartu Identitas Anak | % | 100/80 | 1.369.105.960 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | #VALUE! | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 02 | 2.01 | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Bulan | 60 | 1.369.105.960 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 02 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Pendud | Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk | Jenis | 16 | 684.552.980 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 04 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Kegiatan | 8 | 684.552.980 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 03 | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Rasio bayi berakte kelahiran (%)/Rasio pasangan berakte nikah (%) | % | 100/100 | 210.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | #VALUE! | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 03 | 2.01 | | Pelayanan Pencatatan Sipil | Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil | Bulan | 8 | 210.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 03 | 2.01 | 01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa | Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil | Jenis | 9 | 50.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 03 | 2.01 | 02 | Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Pelayanan Pencatatan Sipil | Kegiatan | 8 | 160.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK | Sudah | Sudah | 1.130.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | #VALUE! | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 04 | 2.01 | | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Databa | Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Bulan | 48 | 90.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 04 | 2.01 | 01 | Pengolahan Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan | Laporan Data Kependudukan | Dokumen | 48 | 90.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 04 | 2.03 | | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Bulan | 60 | 1.040.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 03 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Peningkatan dan Pemeliharaan Informasi Administrasi Kependudukan | Unit | 5 | 350.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 04 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Penerapan Pemanfaatan Data Kependudukan | Kegiatan | 18 | 250.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 05 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Sosialisasi Kebijakan Kependudukan | Jenis | 20 | 440.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Ketersediaan Database Nasional Skala Provinsi | Ada | Ada | 317.582.040 | | | 0 | 49.999.085 | | 34.926.100 | 0 | 34.926.100 | #DIV/0! | 6985,35% | 0 | 0 | #VALUE! | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 05 | 2.01 | | Penyusunan Profil Kependudukan | Tersusunnya Profil Kependudukan | Bulan | 60 | 317.582.040 | | | 1 | 49.999.085 | 12 | 34.926.100 | 0 | 34.926.100 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 13 | | 2 | 12 | 05 | 2.01 | 02 | Penyusunan Profil Data perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebu | Profil Perkembangan Kependudukan | Dokumen | 5 | 317.582.040 | | | 1 | 49.999.085 | 1 | 34.926.100 | 0 | 34.926.100 | 0,00% | 69,85% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Disdukcapil |
| 14 | | 2 | 13 | | | | URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | 52.991.859.877 | | | | 15.674.250.299 | 0,00 | 9.248.127.305 | 83,99 | 14.053.945.978 | 0,84 | 344,88% | 83,99 | 6.004.018.070 | 58,97% | 33,03% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | 52.991.859.877 | | | | 15.674.250.299 | 0,00 | 9.248.127.305 | 83,99 | 14.053.945.978 | 0,84 | 344,88% | 83,99 | 6.004.018.070 | 58,97% | 33,03% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN | Indeks Kepuasan Masyarakt (IKM) | Indeks | 95 | 22.876.220.803 | | | 83 | 4.158.250.225 | | 1.513.903.995 | 0,0 | 4.223.235.731 | 0,0 | 101,56% | 0,0 | 3.944.548.031 | 0,00% | 17,24% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 20.192.898.850 | | | 100 | 3.525.555.896 | | 1.040.185.695 | 53,00 | 3.435.994.231 | 0,53 | 97,46% | 53,00 | 3.435.994.231 | 53,00% | 17,02% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan | Orang/ Bula | 131 | 18.982.148.850 | | | 23 | 3.300.555.896 | | 983.935.695 | 23 | 3.213.034.231 | 1 | 97,35% | 23 | 3.213.034.231 | 17,56% | 16,93% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 275 | 1.210.750.000 | | | 50 | 225.000.000 | | 56.250.000 | 40 | 222.960.000 | 1 | 99,09% | 40 | 222.960.000 | 14,55% | 18,42% | DPMD |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | 2 | 13 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 244.080.000 | | | 100 | 53.520.000 | | 26.880.000 | 50,00 | 50.400.000 | 0,50 | 94,17% | 50,00 | 50.400.000 | 50,00% | 20,65% | |
| 14 | | 2 | 13 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 4 | 94.080.000 | | | 1 | 23.520.000 | | 26.880.000 | 1 | 50.400.000 | 1 | 214,29% | 1 | 50.400.000 | 25,00% | 53,57% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 30 | 150.000.000 | | | 6 | 30.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 806.719.353 | | | 100 | 234.345.633 | | 243.339.650 | 20,83 | 331.164.700 | 0,21 | 141,31% | 20,83 | 202.967.800 | 20,83% | 25,16% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 10.750.000 | | | 1 | 2.829.174 | | 2.590.600 | 0 | 2.590.600 | 0 | 91,57% | 0 | 2.590.600 | 0,00% | 24,10% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Paket | 5 | 188.969.353 | | | 1 | 55.400.876 | | 170.637.600 | 0 | 200.377.200 | 0 | 361,69% | 0 | 200.377.200 | 0,00% | 106,04% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | Paket | 5 | 65.000.000 | | | 1 | 30.604.223 | | 19.649.500 | 0 | 37.871.600 | 0 | 123,75% | 0 | 37.871.600 | 0,00% | 58,26% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 | 37.000.000 | | | 1 | 9.001.360 | 1 | 7.249.950 | 1 | 12.797.700 | 1 | 142,18% | 1 | 12.797.700 | 20,00% | 34,59% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dokumen | 60 | 52.000.000 | | | 12 | 12.000.000 | 6 | 7.050.000 | 10 | 10.795.000 | 1 | 89,96% | 10 | 10.795.000 | 16,67% | 20,76% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 250 | 453.000.000 | | | 50 | 124.510.000 | 15 | 36.162.000 | 15 | 66.732.600 | 0 | 53,60% | 15 | 66.732.600 | 6,00% | 14,73% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 100 | 25.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00 | 31.069.200 | 0,00% | 124,28% | |
| 14 | | 2 | 13 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 1 | 25.000.000 | | | 0 | | | | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 1.098.002.600 | | | 100 | 214.150.800 | 9 | 83.199.200 | 19,30 | 212.629.200 | 0,19 | 99,29% | 19,30 | 31.069.200 | 19,30% | 2,83% | |
| 14 | | 2 | 13 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60 | 96.900.000 | | | 12 | 19.380.000 | 3,00 | 4.139.200 | 9,00 | 12.529.200 | 0,75 | 64,65% | 9,00 | 12.529.200 | 15,00% | 12,93% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 10 | 57.000.000 | | | 2 | 12.900.000 | 2,00 | 18.540.000 | 2,00 | 18.540.000 | 1,00 | 143,72% | 2,00 | 18.540.000 | 20,00% | 32,53% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 944.102.600 | | | 12 | 181.870.800 | 4,00 | 60.520.000 | 10,00 | 181.560.000 | 0,83 | 99,83% | 10,00 | 181.560.000 | 16,67% | 19,23% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 509.520.000 | | | 100 | 130.677.896 | | 120.299.450 | 50,00 | 193.047.600 | 0,50 | 147,73% | 50,00 | 193.047.600 | 50,00% | 37,89% | |
| 14 | | 2 | 13 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kend | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya | Unit | 20 | 466.000.000 | | | 4 | 130.677.896 | | 120.299.450 | 2 | 193.047.600 | 1 | 147,73% | 2 | 193.047.600 | 10,00% | 41,43% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor at | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 43.520.000 | | | 0 | | | | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 04 | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA | PERSENTASE DESA YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU | % | 100 | 27.830.639.074 | | | 100 | 10.885.350.074 | | 6.926.267.872 | 100 | 8.806.413.048 | 1 | 80,90% | 100 | 1.850.605.104 | 100,00% | 6,65% | |
| 14 | | | | | | | | JUMLAH LEMBAGA EKONOMI DESA | LEMBAGA | 259 | | | | 180 | | | | 163 | | 1 | | 163 | | 62,93% | | |
| 14 | | 2 | 13 | 04 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan | Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | % | 100 | 27.830.639.074 | | | 100 | 10.885.350.074 | 429 | 6.926.267.872 | 451,27 | 8.806.413.048 | 4,51 | 80,90% | 451,27 | 1.850.605.104 | 451,27% | 6,65% | |
| 14 | | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Dokumen | 60 | 17.000.000.000 | | | 12 | 3.400.000.000 | 2 | 465.391.408 | 6 | 1.850.605.104 | 1 | 54,43% | 6 | 1.850.605.104 | 10,00% | 10,89% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Dokumen | 1554 | 184.000.000 | | | 270 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa | Dokumen | 1299 | 1.641.944.500 | | | 259 | 176.600.000 | 259 | 107.558.920 | 259 | 196.295.700 | 1 | 111,15% | 259 | 196.295.700 | 19,94% | 11,96% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas | Orang | 259 | 219.000.000 | | | 11 | 15.000.000 | 5 | 2.400.000 | 5 | 2.400.000 | 0 | 16,00% | 5 | 2.400.000 | 1,93% | 1,10% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Des | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa | Dokumen | 183 | 1.636.944.500 | | | 25 | 150.000.000 | 12 | 163.821.200 | 12 | 239.791.250 | 0 | 0,00% | 12 | 0 | 6,56% | 0,00% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 09 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Laporan | 248 | 6.444.750.074 | | | 231 | 7.133.750.074 | 151 | 6.187.096.344 | 151 | 6.517.320.994 | 1 | 91,36% | 151 | 6.517.320.994 | 60,89% | 101,13% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Dokumen Profil Desa | Dokumen | 1299 | 125.000.000 | | | 259 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 12 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | Dokumen | 259 | 149.000.000 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa | Dokumen | 1299 | 160.000.000 | | | 259 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 14 | Pembinaan Peningkatan kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan kapasitas | Orang | 274 | 100.000.000 | | | 15 | 10.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Dokumen | 57 | 170.000.000 | | | 8 | | | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 05 | | | POGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA AD | PERSENTASE TERBENTUKNYA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA | % | 100 | 2.285.000.000 | | | 50 | 630.650.000 | | 807.955.438 | 72,94 | 1.024.297.199 | 1,46 | 162,42% | 72,94 | 208.864.935 | 72,94% | 9,14% | |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | 2 | 13 | 05 | 2.01 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pembe | Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota | % | 100 | 2.285.000.000 | | | 100 | 630.650.000 | | 807.955.438 | 2,50 | 1.024.297.199 | 0,03 | 162,42% | 2,50 | 208.864.935 | 2,50% | 9,14% | |
| 14 | | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurah | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Lembaga | 45 | 270.000.000 | | | 5 | 100.000.000 | | 178.825.885 | 0 | 178.825.885 | 0 | 178,83% | 0,00 | 178.825.885 | 0,00% | 66,23% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dal | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Dokumen | 45 | 240.000.000 | | | 5 | 50.000.000 | 1 | 2.250.000 | 1 | 30.039.050 | 0 | 60,08% | 1,00 | 30.039.050 | 2,22% | 12,52% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Laporan | 95 | 485.000.000 | | | 19 | 40.650.000 | 19 | 32.637.560 | 19 | 32.637.560 | 1 | 80,29% | 19,00 | 32.637.560 | 20,00% | 6,73% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 07 | Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat | Laporan | 85 | 275.000.000 | | | 17 | 50.000.000 | | - | 0 | 31.028.700 | 0 | 62,06% | 0,00 | 31.028.700 | 0,00% | 11,28% | DPMD |
| 14 | | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Dokumen | 68 | 1.015.000.000 | | | 8 | 390.000.000 | 6 | 594.241.993 | 7 | 751.766.004 | 1 | 192,76% | 7,00 | 751.766.004 | 10,29% | 74,07% | DPMD |
| 15 | | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DISHUB |
| 15 | | | | | | | Dinas Perhubungan | | | | | | | | 16.037.467.921 | | | 857 | 11.078.683.554,00 | 97,63557422 | 69,080004 | | 11.078.683.554,00 | | | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | 43.676.656.177 | | | | 16.037.467.921 | | | 857 | 11.078.683.554,00 | 97,63557422 | 69,080004 | | 11.078.683.554,00 | | 0,25 | DISHUB |
| 15 | Meningkatnya Pelay | 2 | 15 | | | | DINAS PERHUBUNGAN | | | | 43.676.656.177 | | | | 16.037.467.921 | | | 857 | 11.078.683.554 | 97,64 | 69,08 | 857,00 | 11.078.683.554 | | 25,37 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN | Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | indeks | A | 37.557.897.802 | | | | 14.568.013.622 | 186 | 5.461.827.993 | | 16.540.511.547 | | 113,54 | 0,00 | 16.540.511.547 | | 44,04 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.01 | | Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % | 100 | 73.174.470 | | | | 15.174.470 | 1 | 9.120.000 | | 13.995.000 | | 92,23 | 0,00 | 13.995.000 | 0,00 | 19,13 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 10 | 39.174.470 | | | 2 | 9.174.470 | 1 | 9.120.000 | 3,00 | 13.995.000 | 150,00 | 152,54 | 3,00 | 13.995.000 | 30,00 | 35,72 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinsi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerj | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | dokumen | 10 | 22.000.000 | | | 2 | 2.000.000 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat | Laporan | 10 | 12.000.000 | | | 2 | 4.000.000 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 32.276.622.444 | | | | 5.919.603.048 | 76 | 1.770.857.162 | | 5.331.868.510 | | 90,07 | | 5.331.868.510 | 4,28 | 16,52 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | OB | 3.710 | 31.319.762.594 | | | 742 | 5.726.291.078 | 4 | 1.690.257.162 | 481,00 | 5.138.428.510 | 64,82 | 89,73 | 481,00 | 5.138.428.510 | 12,96 | 16,41 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verivikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | dokumen | 960 | 946.559.850 | | | 12 | 189.311.970 | 72 | 80.600.000 | 81,00 | 193.440.000 | 675,00 | 102,18 | 81,00 | 193.440.000 | 8,44 | 20,44 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5 | 5.000.000 | | | 1 | 1.000.000 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 30 | 4.500.000 | | | 6 | 3.000.000 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis | dokumen | 2 | 800.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.04 | | Administrasi pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Administrasi pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | % | 100 | 2.800.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.04 | 07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | dokumen | 60 | 2.800.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 160.500.000 | | | | | 32 | 153.377.500 | | 153.377.500 | | | 0,00 | 153.377.500 | 0,00 | 95,56 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 276 | 148.500.000 | | | | | 32 | 153.377.500 | | 153.377.500 | | | 0,00 | 153.377.500 | 0,00 | 103,28 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 6 | 12.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 1.242.309.128 | | | | 278.525.128 | 82 | 159.835.877 | | 267.597.477 | | 96,08 | 0,00 | 267.597.477 | 0,00 | 21,54 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 14.546.350 | | | 1 | 3.546.350 | 1 | 1.906.987 | | 1.906.987 | 0,00 | 53,77 | 0,00 | 1.906.987 | 0,00 | 13,11 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 15 | 157.947.248 | | | 3 | 29.947.248 | 3 | 29.116.850 | | 29.116.850 | 0,00 | 97,23 | 0,00 | 29.116.850 | 0,00 | 18,43 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 15 | 67.000.000 | | | 3 | 15.000.000 | 3 | 13.289.975 | | 13.289.975 | 0,00 | 88,60 | 0,00 | 13.289.975 | 0,00 | 19,84 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 | 246.000.000 | | | 1 | 30.000.000 | 1 | 47.215.500 | | 47.215.500 | 0,00 | 157,39 | 0,00 | 47.215.500 | 0,00 | 19,19 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | dokumen | 60 | 10.284.000 | | | 12 | 3.500.000 | 6 | 900.000 | 13,00 | 1.800.000 | 108,33 | 51,43 | 13,00 | 1.800.000 | 21,67 | 17,50 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 1.060 | 746.531.530 | | | 205 | 196.531.530 | 68 | 67.406.565 | 173,00 | 174.268.165 | 84,39 | 88,67 | 173,00 | 174.268.165 | 16,32 | 23,34 | DISHUB |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 100 | 323.000.000 | | | | 30.000.000 | 7 | 138.537.000 | | 138.537.000 | | 461,79 | 0,00 | 138.537.000 | 0,00 | 42,89 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | unit | 1 | 208.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | unit | 5 | 40.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.07 | 06 | Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | unit | 12 | 75.000.000 | | | | 30.000.000 | 7 | 138.537.000 | | 138.537.000 | 461,79 | 461,79 | 0,00 | 138.537.000 | 0,00 | 184,72 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 2.852.491.760 | | | | 8.254.710.976 | 10 | 2.970.404.919 | | 10.351.595.725 | | 125,40 | 0,00 | 10.351.595.725 | 0,00 | 362,90 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 60 | 194.772.000 | | | 12 | 7.535.000.000 | 3 | 2.658.883.499 | 12,00 | 9.741.260.745 | 100,00 | 129,28 | 12,00 | 9.741.260.745 | 20,00 | 5.001,37 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | laporan | 5 | 50.000.000 | | | 1 | 20.000.000 | 1 | 14.811.420 | 1,00 | 14.811.420 | 100,00 | 74,06 | 1,00 | 14.811.420 | 20,00 | 29,62 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 2.607.719.760 | | | 12 | 699.710.976 | 6 | 296.710.000 | 12,00 | 595.523.560 | 100,00 | 85,11 | 12,00 | 595.523.560 | 20,00 | 22,84 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah | % | 100 | 627.000.000 | | | | 70.000.000 | 10 | 259.695.535 | | 283.540.335 | | 405,06 | 0,00 | 283.540.335 | 0,00 | 45,22 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | unit | 4 | 65.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Ken | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 75 | 520.000.000 | | | 5 | 60.000.000 | 9 | 91.864.185 | 14,00 | 115.708.985 | 280,00 | 192,85 | 14,00 | 115.708.985 | 18,67 | 22,25 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 3 | 35.000.000 | | | 1 | 10.000.000 | 1 | 9.976.350 | 1,00 | 9.976.350 | 100,00 | 99,76 | 1,00 | 9.976.350 | 33,33 | 28,50 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor at | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 6 | 7.000.000 | | | | | 1 | 157.855.000 | | | | | | | | | DISHUB |
| 15 | Meningkatnya fasilit | 2 | 15 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ( | Rasio Konektivitas Kabupaten | Rasio | 97 | 6.078.349.893 | | | | 1.469.454.299 | 67 | 2.420.582.092 | | 2.420.582.092 | | | 0,00 | 2.420.582.092 | 0,00 | 39,82 | DISHUB |
| 15 | | | | | | | | Kinerja Lalu Lintas Kabupaten | Indeks | 0 | - | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.01 | | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | % | 100 | 115.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | dokumen | 1 | 100.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.01 | 02 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ | Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | dokumen | 1 | 15.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | % | 100 | 234.954.889 | | | | 627.431.530 | 50 | 859.665.042 | | 859.665.042 | | 137,01 | 0,00 | 859.665.042 | 0,00 | 365,89 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 01 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | unit | 6 | 144.954.889 | | | 26 | 627.431.530 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | unit | 4 | 60.000.000 | | | | | 50 | 435.532.955 | 50,00 | 435.532.955 | | | 50,00 | 435.532.955 | 1.250,00 | 725,89 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 03 | Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan | Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan | unit | 4 | 10.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | unit | 3 | 20.000.000 | | | | | 130 | 424.132.087 | | 424.132.087 | | | 0,00 | 424.132.087 | 0,00 | 2.120,66 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal | % | 100 | 243.721.988 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.03 | 01 | Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | dokumen | 1 | 50.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2 | 02 | Pembangunan Gedung Terminal | Gedung Terminal | unit | 1 | 10.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.03 | 03 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Sarana dan Prasarana Terminal | jenis | 2 | 73.721.988 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.03 | 04 | Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal | Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal | unit | 2 | 100.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.03 | 05 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C | SDM Pengelola Terminal Tipe C | org | 5 | 10.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.04 | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | % | 100 | 545.697.546 | | | | 107.466.769 | 3 | 81.677.045 | | 81.677.045 | | | 0,00 | 81.677.045 | 0,00 | 14,97 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.04 | 01 | Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pemba | Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | dokumen | 2 | 40.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.04 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan da | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | 13 | 505.697.546 | | | 1 | 107.466.769 | 3 | 81.677.045 | 3,00 | 81.677.045 | 300,00 | 76,00 | 3,00 | 81.677.045 | 23,08 | 16,15 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.05 | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | % | 100 | 1.103.162.000 | | | | 123.162.000 | 1 | 15.007.310 | | 15.007.310 | | 12,19 | 0,00 | 15.007.310 | 0,00 | 1,36 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | unit | 3 | 800.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Be | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | orang | 23 | 152.308.000 | | | 13 | 92.308.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | dokumen | 1 | 20.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 05 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermot | Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | laporan | | 10.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 06 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Laporan | 4 | 20.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | unit | 0 | - | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | | | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2,1 | 08 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Laporan | 5 | 70.854.000 | | | 1 | 30.854.000 | 1 | 15.007.310 | 1,00 | 15.007.310 | 100,00 | 48,64 | 1,00 | 15.007.310 | 20,00 | 21,18 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 09 | Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Laporan | 1 | 10.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 10 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermo | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Laporan | 8 | 20.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.06 | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan K | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | % | 100 | 2.965.813.470 | | | | 443.394.000 | 10 | 1.345.165.370 | | 1.345.165.370 | | 303,38 | 0,00 | 1.345.165.370 | 0,00 | 45,36 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Laporan | 5 | 62.830.470 | | | 1 | 40.000.000 | 1 | 249.997.110 | 1,00 | 249.997.110 | 100,00 | 624,99 | 1,00 | 249.997.110 | 20,00 | 397,89 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 02 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan da | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | unit | 16 | 2.473.889.000 | | | 3 | 300.000.000 | 3 | 331.674.340 | 3,00 | 331.674.340 | 100,00 | 110,56 | 3,00 | 331.674.340 | 18,75 | 13,41 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 04 | Pengawasan dan Pengendalian EfektivitasPelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan K | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | laporan | 30 | 365.700.000 | | | 6 | 80.000.000 | 6 | 759.671.280 | 6,00 | 759.671.280 | 100,00 | 949,59 | 6,00 | 759.671.280 | 20,00 | 207,73 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | laporan | 16 | 63.394.000 | | | 3 | 23.394.000 | 0 | 3.822.640 | 0,00 | 3.822.640 | 0,00 | 16,34 | 0,00 | 3.822.640 | 0,00 | 6,03 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.07 | | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kat | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | % | 100 | 15.000.000 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.07 | 01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan | dokumen | 4 | 15.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 03 | 2.08 | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | % | 100 | 467.000.000 | | | | 20.000.000 | 1 | 7.200.000 | | 7.200.000 | | 36,00 | 0,00 | 7.200.000 | 0,00 | 1,54 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.08 | 02 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kend | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Laporan | 8 | 40.000.000 | | | | | 1 | 7.200.000 | | 7.200.000 | | | 0,00 | 7.200.000 | 0,00 | 18,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.08 | 03 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Laporan | 15 | 72.000.000 | | | 3 | 20.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.08 | 04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyele | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Laporan | 4 | 250.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.08 | 05 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | laporan | 18 | 105.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.09 | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 118.000.000 | | | | 78.000.000 | 1 | 67.894.750 | | 67.894.750 | | 87,04 | 0,00 | 67.894.750 | 0,00 | 57,54 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.09 | 01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang anta | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | unit | 3 | 20.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.09 | 02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angk | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan | 3 | 98.000.000 | | | 1 | 78.000.000 | 1 | 67.894.750 | 1,00 | 67.894.750 | 100,00 | 87,04 | 1,00 | 67.894.750 | 33,33 | 69,28 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.11 | | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daer | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 70.000.000 | | | | 20.000.000 | 0 | 0 | | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.11 | 01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | dokumen | 3 | 40.000.000 | | | 1 | 20.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.11 | 02 | Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaa | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | dokumen | 3 | 30.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.12 | | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daera | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | % | 100 | 100.000.000 | | | | 50.000.000 | 1 | 43.972.575 | | 43.972.575 | 0,00 | 87,95 | 0,00 | 43.972.575 | 0,00 | 43,97 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.12 | 01 | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | dokumen | 3 | 70.000.000 | | | 1 | 50.000.000 | 1 | 43.972.575 | 1,00 | 43.972.575 | 100,00 | 87,95 | 1,00 | 43.972.575 | 33,33 | 62,82 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.12 | 02 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Tray | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | dokumen | 3 | 30.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.13 | | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 50.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.13 | 01 | Perumusan kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Me | Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | dokumen | 3 | 20.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.13 | 02 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi An | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | dokumen | 3 | 30.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.14 | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Da | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 16.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.14 | 01 | Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan IzinPenyelenggaraan Angkutan Or | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Laporan | 5 | 8.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.14 | 02 | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan An | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | 5 | 8.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.15 | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasiny | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 6.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.15 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Au | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | 1 | 6.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.16 | | Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal | % | 100 | 28.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.16 | 01 | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Per | Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | dokumen | 2 | 10.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.16 | 02 | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angku | Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | dokumen | 2 | 6.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 02 | 2.16 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angk | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Laporan | 4 | 12.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Rasio Konektivitas Kabupaten | | 0 | 40.408.482 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 03 | 2.04 | | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Mela | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 10.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 03 | 2.04 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | dokumen | 3 | 10.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 03 | 2.08 | | Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal | % | 100 | 13.408.482 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 03 | 2.08 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan P | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | dokumen | 3 | 13.408.482 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 15 | | 2 | 15 | 03 | 2.09 | | Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan | Rata-rata Capaian Kinerja Sub.Kegiatan pada Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 17.000.000 | | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | 2 | 15 | 03 | 2.09 | 02 | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kel | Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/KotaJumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan<br>Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | dokumen | 3 | 17.000.000 | | | | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISHUB |
| 16 | | 2 | 16 | | | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 41.259.575.570 | | | | 7.459.748.314 | | | | 8.490.587.344 | | | | 8.490.587.344 | | | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 40.763.025.570 | | | | 7.350.638.314 | | | | 8.334.806.744 | | | | 8.334.806.744 | | | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | indeks | 95 | 26.617.735.000 | | | 95 | 5.343.547.000 | 758 | 2.203.235.643 | 1.652 | 5.131.964.211 | 1738,9 | 96,0 | 1.652 | 5.131.964.211 | 1738,9 | 19,3 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Bulan | 60 | 15.931.546.860 | | | 12 | 3.226.709.372 | 71 | 1.194.579.198 | 264 | 2.784.461.613 | 2200,0 | 86,3 | 264 | 2.784.461.613 | 440,0 | 17,5 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang bula | 1260 | 15.445.527.955 | | | 252 | 3.109.105.591 | 63 | 1.079.539.198 | 252 | 2.630.617.313 | 100,0 | 84,6 | 252 | 2.630.617.313 | 20,0 | 17,0 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | dokumen | 60 | 486.018.905 | | | 12 | 117.603.781 | 8 | 115.040.000 | 12 | 153.844.300 | 100,0 | 130,8 | 12 | 153.844.300 | 20,0 | 31,7 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bulan | 60 | 102.000.000 | | | | 0 | 44 | 33.000.000 | 44 | 33.000.000 | 0,0 | 0,0 | 44 | 33.000.000 | 73,3 | 32,4 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | paket | 174 | 102.000.000 | | | | | 44 | 33.000.000 | 44 | 33.000.000 | 0,0 | 0,0 | 44 | 33.000.000 | 25,3 | 32,4 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksnanya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bulan | 60 | 828.257.805 | | | 12 | 165.651.561 | 634 | 293.452.241 | 1319 | 380.203.135 | 10991,7 | 229,5 | 1319 | 380.203.135 | 2198,3 | 45,9 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | paket | 145 | 103.427.805 | | | 29 | 20.685.561 | | 22.200.000 | 29 | 42.867.650 | 100,0 | 207,2 | 29 | 42.867.650 | 20,0 | 41,4 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | paket | 15 | 208.650.000 | | | 3 | 41.730.000 | 1 | 39.555.000 | 3 | 41.730.000 | 100,0 | 100,0 | 3 | 41.730.000 | 20,0 | 20,0 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | dokumen | 5400 | 27.000.000 | | | 1080 | 5.400.000 | 540 | 2.700.000 | 1080 | 5.400.000 | 100,0 | 100,0 | 1080 | 5.400.000 | 20,0 | 20,0 | Dinas Kominfo |
| 16 | | | | | | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | laporan | 35 | 100.000.000 | | | 7 | 20.000.000 | 3 | 15.246.000 | 7 | 19.836.000 | 100,0 | 99,2 | 7 | 19.836.000 | 20,0 | 19,8 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 1000 | 389.180.000 | | | 200 | 77.836.000 | 90 | 213.751.241 | 200 | 270.369.485 | 100,0 | 347,4 | 200 | 270.369.485 | 20,0 | 69,5 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit | 1 | 40.000.000 | | | 1 | 40.000.000 | 1 | 35.900.000 | 1 | 35.900.000 | 100,0 | 89,8 | 1 | 35.900.000 | 100,0 | 89,8 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 1 | 40.000.000 | | | 1 | 40.000.000 | 1 | 35.900.000 | 1 | 35.900.000 | 100,0 | 89,8 | 1 | 35.900.000 | 100,0 | 89,8 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | 60 | 9.577.930.335 | | | 12 | 1.911.186.067 | 8 | 616.071.704 | 24 | 1.868.166.963 | 200,0 | 97,7 | 24 | 1.868.166.963 | 40,0 | 19,5 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 60 | 7.962.030.335 | | | 12 | 1.592.406.067 | 4 | 495.111.704 | 12 | 1.505.162.663 | 100,0 | 94,5 | 12 | 1.505.162.663 | 20,0 | 18,9 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | laporan | 40 | 22.000.000 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0,0 | 0,0 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | laporan | 60 | 1.593.900.000 | | | 12 | 318.780.000 | 4 | 120.960.000 | 12 | 363.004.300 | 100,0 | 113,9 | 12 | 363.004.300 | 20,0 | 22,8 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Unit | 1 | 138.000.000 | | | 0 | 0 | | 30.232.500 | 0 | 30.232.500 | | | 0 | 30.232.500 | 0,0 | 21,9 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 1 | 138.000.000 | | | | | 1 | 30.232.500 | 1 | 30.232.500 | | | 1 | 30.232.500 | 100,0 | 21,9 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 02 | | | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Indeks SPBE | indeks | 3 | 3.039.229.912 | | | 2,2 | 661.398.670 | | | 2,06 | 940.599.225 | 93,6 | 142,2 | 2,06 | 940.599.225 | 68,7 | 30,9 | |
| 16 | | 2 | 16 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | bulan | 60 | 3.039.229.912 | | | 12 | 661.398.670 | 261 | 818.671.225 | 3 | 940.599.225 | 25,0 | 142,2 | 3 | 940.599.225 | 5,0 | 30,9 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | dokumen | 830 | 817.304.688 | | | 150 | 419.228.000 | 150 | 449.119.000 | 150 | 449.119.000 | 100,0 | 107,1 | 150 | 449.119.000 | 18,1 | 55,0 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 06 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | dokumen | 1318 | 1.086.240.000 | | | 250 | 209.400.000 | 110 | 328.465.375 | 250 | 436.671.375 | 100,0 | 208,5 | 250 | 436.671.375 | 19,0 | 40,2 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 07 | Layanan Hubungan Media | Jumlah Layanan Hubungan Media | layanan | 135 | 131.625.000 | | | | - | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya | orang | 14 | 46.288.650 | | | 14 | 15.429.550 | | 24.418.650 | 14 | 38.140.650 | 100,0 | 247,2 | 14 | 38.140.650 | 100,0 | 82,4 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | dokumen | 3 | 134.682.240 | | | 1 | 17.341.120 | 1 | 16.668.200 | 1 | 16.668.200 | 100,0 | 96,1 | 1 | 16.668.200 | 33,3 | 12,4 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 12 | Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | dokumen | 31550 | 823.089.334 | | | | - | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 03 | | | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Indeks SPBE | indeks | 3 | 11.106.060.658 | | | 2,2 | 1.345.692.644 | 5 | 1.666.690.908 | 2,06 | 2.262.243.308 | 93,6 | 168,1 | 2,06 | 2.262.243.308 | 68,7 | 20,4 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | bulan | 60 | 2.591.089.051 | | | 12 | 436.038.500 | 0 | 0 | | 91.750.000 | 0,0 | 21,0 | 0 | 91.750.000 | 0,0 | 3,5 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 03 | 2.01 | 01 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | domain | 1 | 242.000 | | | | | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 03 | 2.01 | 02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | dokumen | 1 | 22.000.000 | | | | | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 03 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | unit | 53 | 2.568.847.051 | | | 10 | 436.038.500 | | | 5 | 91.750.000 | 50,0 | 21,0 | 5 | 91.750.000 | 9,4 | 3,6 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 03 | 2.02 | | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | bulan | 60 | 8.514.971.607 | | | 12 | 909.654.144 | 5 | 1.666.690.908 | 9 | 2.170.493.308 | 75,0 | 238,6 | 9 | 2.170.493.308 | 15,0 | 25,5 | Dinas Kominfo |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 01 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan danPengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | dokumen | 25 | 723.490.144 | | | | | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 02 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Dokumen | 1 | 279.920.000 | | | | | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | Unit | 2 | 498.666.519 | | | | | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 04 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | dokumen | 1 | 50.000.000 | | | | | 5 | 601.415.500 | 5 | 601.415.500 | 0,0 | 0,0 | 5 | 601.415.500 | 500,0 | 1202,8 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | dokumen | 4 | 605.160.000 | | | | | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | unit | 3 | 1.002.032.000 | | | 1 | 100.000.000 | | 32.000.000 | 1 | 100.000.000 | 100,0 | 100,0 | 1 | 100.000.000 | 33,3 | 10,0 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 08 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | layanan | 7 | 411.000.000 | | | | | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City | dokumen | 2 | 2.914.468.019 | | | 2 | 484.468.019 | | 730.508.000 | 2 | 1.128.368.000 | 100,0 | 232,9 | 2 | 1.128.368.000 | 100,0 | 38,7 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 3 | 2.02 | 10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | dokumen | 1 | 800.000.000 | | | | | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | dokumen | 1 | 1.150.234.925 | | | 1 | 325.186.125 | | 302.767.408 | 1 | 340.709.808 | 100,0 | 104,8 | 1 | 340.709.808 | 100,0 | 29,6 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 12 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE | Dokumen | 1 | 80.000.000 | | | | | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 20 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | 3 | 261.550.000 | | | 2,2 | 69.110.000 | 0 | 43.380.000 | 1 | 95.192.600 | 45,5 | 137,7 | 1 | 95.192.600 | 33,3 | 36,4 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 20 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Indeks SPBE | indeks | 3 | 261.550.000 | | | 2,2 | 69.110.000 | 0 | 43.380.000 | 1 | 95.192.600 | 45,5 | 137,7 | 1 | 95.192.600 | 33,3 | 36,4 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 20 | 2 | 2 | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | bulan | 60 | 261.550.000 | | | 12 | 69.110.000 | 0 | 43.380.000 | 1 | 95.192.600 | 8,3 | 137,7 | 1 | 95.192.600 | 1,7 | 36,4 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 20 | 2 | 2 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | dokumen | 1 | 69.110.000 | | | 1 | 69.110.000 | | 43.380.000 | 1 | 95.192.600 | 100,0 | 137,7 | 1 | 95.192.600 | 100,0 | 137,7 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 20 | 2 | 2 | 02 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi | Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | orang | 64 | 36.220.000 | | | | | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 20 | 2 | 2 | 03 | Membangun metadata statistik sektoral | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | dokumen | 1 | 57.110.000 | | | | | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 20 | 2 | 2 | 05 | Pengembangan Infrastruktur | Jumlah Infrastruktur Statistik | unit | 2 | 99.110.000 | | | | | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 21 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | 235.000.000 | | | | 40.000.000 | - | 60.588.000 | | 60588000 | 0,0 | 151,5 | 0 | 60588000 | | | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 21 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INF | Indeks SPBE | indeks | 3 | 235.000.000 | | | 2,2 | 40.000.000 | - | 60.588.000 | | 60.588.000 | - | 151 | - | 60.588.000 | | | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 21 | 2 | 2 | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Da | Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | bulan | 60 | 235.000.000 | | | 12 | 40.000.000 | - | 60.588.000 | | 60.588.000 | - | 151 | - | 60.588.000 | | | Dinas Kominfo |
| 16 | | 2 | 21 | 2 | 2 | 01 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota Berba | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | laporan | 5 | 235.000.000 | | | 1 | 40.000.000 | | 60.588.000 | | 60.588.000 | - | 151 | - | 60.588.000 | | | Dinas Kominfo |
| 17 | enanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 37.958.588.677 | | 4.363.320.432 | | 6.671.633.777 | | | | 5.891.308.881 | | | - | 10.254.629.313 | 0 | 27% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | | | | BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL | | | | 37.958.588.677 | | 4.363.320.432 | | 6.671.633.777 | | | | 5.891.308.881 | | | - | 10.254.629.313 | 0% | 27% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | 37.958.588.677 | | 4.363.320.432 | | 6.671.633.777 | 409 | 2.604.598.432 | 922 | 5.891.308.881 | 0% | 88% | 922 | 10.254.629.313 | 0% | 0% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 95 | indeks | 31.327.242.677 | | 4.009.789.662 | 86,20 | 5.072.011.777 | 149 | 1.961.779.154 | 659 | 4.844.882.145 | 0 | 96% | 86,87 | 8.854.671.807 | 91% | 28% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.01 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | % | 21.175.508.206 | | 3.121.709.839 | | 3.529.682.887 | 49 | 1.472.263.218 | 120 | 3.437.236.837 | 0% | 97% | 120 | 6.558.946.676 | | 31% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | 181 | orang/Bulan | 20.561.098.206 | 12 | 3.000.999.839 | 12 | 3.348.482.887 | 3 | 1.415.163.218 | 12 | 3.306.146.837 | 100% | 99% | 24 | 6.307.146.676 | 13% | 31% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD | Honorarium Pengelola Keuangan | 60 | dokumen | 614.410.000 | 103 | 120.710.000 | 144 | 181.200.000 | 46 | 57.100.000 | 108 | 131.090.000 | 75% | 72% | 211 | 251.800.000 | 352% | 41% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | % | 842.568.000 | | | | 88.320.000 | 33 | 22.176.000 | 127 | 80.352.000 | 0% | 91% | 127 | 80.352.000 | 127% | 10% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 | unit | 20.000.000 | | | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pakaian Dinas Beserta Atribut | 550 | paket | 451.288.000 | | | 140 | 88.320.000 | 33 | 22.176.000 | 127 | 80.352.000 | 91% | 91% | 127 | 80.352.000 | 23% | 18% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pegawai yang mengikuti diklat | 40 | orang | 371.280.000 | | | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | % | 2.399.298.971 | | 247.601.709 | | 515.898.099 | 47 | 189.323.436 | 47 | 434.606.436 | 0% | 84% | 47 | 682.208.145 | 47% | 28% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 500 | paket | 15.262.500 | | | 2 | 3.677.205 | 30 | 2.055.750 | 32 | 3.976.500 | 52% | 108% | 32 | 3.976.500 | 6% | 26% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 246 | paket | 429.137.414 | 48 | 48.624.750 | 50 | 68.309.226 | 12 | 16.336.300 | 49 | 64.543.150 | 98% | 94% | 97 | 113.167.900 | 39% | 26% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan Rumah Tangga | 110 | paket | 101.725.137 | 70 | 12.895.950 | 23 | 20.942.788 | | | 23 | 20.880.150 | 100% | 100% | 93 | 33.776.100 | 85% | 33% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetakan dan Pengggandaan | 30 | paket | 442.405.920 | 9 | 72.687.350 | 6 | 127.918.880 | 2 | 10.210.900 | 8 | 69.662.650 | 25% | 54% | 17 | 142.350.000 | 57% | 32% | DPMPTSP |
| 17 | an akuntabilitas per | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 12 | dokumen | 89.748.000 | | - | | | | | - | - | 0% | 0% | 0 | - | 0% | 0% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Perjalanan Dinas | 60 | laporan | 1.321.020.000 | 331 | 113.393.659 | 500 | 295.050.000 | 3 | 160.720.486 | 219 | 275.543.986 | 44% | 93% | 550 | 388.937.645 | 917% | 29% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | % | 2.420.000.000 | | 33.889.000 | | 275.110.791 | 7 | 80.318.250 | 126 | 308.951.750 | 0% | 112% | 126 | 342.840.750 | 126% | 14% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3 | unit | 1.450.000.000 | | | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Mebeleur | 139 | unit | 400.000.000 | 2 | 12.854.000 | 32 | 157.550.291 | | | 108 | 127.027.500 | 338% | 81% | 110 | 139.881.500 | 79% | 35% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan dan Mesin | 21 | unit | 570.000.000 | 4 | 21.035.000 | 2 | 117.560.500 | 7 | 80.318.250 | 18 | 181.924.250 | 900% | 155% | 22 | 202.959.250 | 105% | 36% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianyan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | % | 3.805.310.500 | | 578.373.714 | 12 | 624.580.000 | 13 | 178.831.000 | 238 | 545.403.750 | 1983% | 87% | 238 | 1.123.777.464 | 238% | 30% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Telepon, Internet, Air dan Listrik | 60 | laporan | 152.627.500 | 12 | 16.613.714 | 12 | 25.200.000 | 4 | 5.661.000 | 12 | 22.578.750 | 100% | 90% | 24 | 39.192.464 | 40% | 26% | DPMPTSP |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan Kantor | Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor | 91 | laporan | 80.102.000 | 10 | 7.060.000 | 10 | 14.200.000 | 5 | 7.100.000 | 10 | 14.200.000 | 100% | 100% | 20 | 21.260.000 | 22% | 27% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honorarium Pegawai Tidak Tetap | 60 | laporan | 3.572.581.000 | 344 | 554.700.000 | 360 | 585.180.000 | 4 | 166.070.000 | 216 | 508.625.000 | 60% | 87% | 560 | 1.063.325.000 | 933% | 30% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | % | 684.557.000 | | 28.215.400 | | 38.420.000 | - | 18.867.250 | 1 | 38.331.372 | 0% | 100% | 1 | 66.546.772 | 1% | 10% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan | 5 | unit | 234.557.000 | 1 | 28.215.400 | 1 | 38.420.000 | | 18.867.250 | 1 | 38.331.372 | 34% | 100% | 2 | 66.546.772 | 40% | 28% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4 | unit | 450.000.000 | | | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | DPMPTSP |
| 17 | ngkatnya jumlah inv | 2 | 18 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Jumlah Investor Berslaka Nasional PMA/PMDN | 91 | Investor | 2.107.852.000 | | | 77 | 400.000.000 | - | 221.964.700 | - | 229.328.100 | 0% | 57% | - | 229.328.100 | 0% | 11% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 02 | 2.01 | | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | 100 | % | 700.000.000 | | | 1 | 200.000.000 | - | 49.105.950 | 1 | 56.469.350 | 2% | 28% | 1 | 56.469.350 | 1% | 8% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 02 | 2.01 | 01 | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 4 | dokumen | 500.000.000 | | | 1 | 200.000.000 | | 49.105.950 | - | 56.469.350 | 0% | 28% | - | 56.469.350 | 0% | 11% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 02 | 2.01 | 02 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Laporan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 6 | kegiatan usaha | 200.000.000 | | | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 02 | 2.02 | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang Disusun | 100 | % | 1.407.852.000 | | | 1 | 200.000.000 | - | 172.858.750 | - | 172.858.750 | 0% | 86% | - | 172.858.750 | 0% | 12% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 02 | 2.02 | 01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 2 | dokumen | 500.000.000 | | | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | |
| 17 | | 2 | 18 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | 4 | dokumen | 907.852.000 | | | 1 | 200.000.000 | | 172.858.750 | - | 172.858.750 | 0% | 86% | - | 172.858.750 | 0% | 19% | DPMPTSP |
| 17 | ngkatnya jumlah inv | 2 | 18 | 03 | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Jumlah Investor Berslaka Nasional PMA/PMDN | 91 | investor | 1.153.500.000 | | | 77 | 300.000.000 | - | 3.256.000 | 2 | 158.348.908 | 3% | 53% | 2 | 158.348.908 | 2% | 14% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 03 | 2.01 | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan | 100 | % | 1.153.500.000 | | | | 300.000.000 | - | 3.256.000 | 2 | 158.348.908 | 0% | 53% | 2 | 158.348.908 | 2% | 14% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal | 3 | dokumen | 253.500.000 | | | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 03 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupetan/Kota | 10 | dokumen | 900.000.000 | | | 2 | 300.000.000 | | 3.256.000 | 2 | 158.348.908 | 100% | 53% | 2 | 158.348.908 | 20% | 18% | DPMPTSP |
| 17 | erizinan yang cepat | 2 | 18 | 04 | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan | 1600 | izin | 1.183.500.000 | | 101.887.400 | 1.200 | 200.000.000 | 260 | 37.679.450 | 261 | 107.879.450 | 22% | 54% | 261 | 209.766.850 | 16% | 18% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 04 | 2.01 | | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 100 | % | 1.183.500.000 | | 101.887.400 | | 200.000.000 | 260 | 37.679.450 | 261 | 107.879.450 | 0% | 54% | 261 | 209.766.850 | 261% | 18% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 2700 | pelaku usaha | 226.500.000 | 1 | 79.787.400 | | | | | - | - | 0% | 0% | 1 | 79.787.400 | 0% | 35% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | 3600 | kegiatan usaha | 400.000.000 | 1 | 22.100.000 | | 150.000.000 | 252 | 31.800.000 | 253 | 102.000.000 | 13% | 68% | 254 | 124.100.000 | 7% | 31% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan | Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | 120 | orang | 307.000.000 | | | | 50.000.000 | 8 | 5.879.450 | 8 | 5.879.450 | 0% | 12% | 8 | 5.879.450 | 7% | 2% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | 50 | kegiatan usaha | 250.000.000 | | | | | | | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | DPMPTSP |
| 17 | ngkatnya jumlah inv | 2 | 18 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Jumlah Investor Berslaka Nasional PMA/PMDN | 91 | investor | 1.456.622.000 | | 251.643.370 | 77 | 579.622.000 | | 259.919.128 | - | 430.870.278 | 0% | 74% | - | 682.513.648 | 0% | 47% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 05 | 2.01 | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 100 | % | 1.456.622.000 | | 251.643.370 | | 579.622.000 | | 259.919.128 | - | 430.870.278 | 0% | 74% | - | 682.513.648 | 0% | 47% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 250 | kegiatan usaha | 405.300.000 | 1 | 45.083.370 | 1 | 118.300.000 | | | - | - | 0% | 0% | 1 | 45.083.370 | 0% | 11% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 632 | pelaku usaha | 604.722.000 | 7 | 113.660.200 | 8 | 264.722.000 | 140 | 176.840.000 | 144 | 283.535.000 | 1800% | 107% | 151 | 397.195.200 | 24% | 66% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 175 | kegiatan usaha | 446.600.000 | 1 | 92.899.800 | 1 | 196.600.000 | 22 | 83.079.128 | 23 | 147.335.278 | 9% | 75% | 24 | 240.235.078 | 14% | 54% | DPMPTSP |
| 17 | erizinan yang cepat | 2 | 18 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan | 1600 | izin | 729.872.000 | | | 1200 | 120.000.000 | | 120.000.000 | - | 120.000.000 | 0% | 100% | - | 120.000.000 | 0% | 16% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 06 | 2.01 | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dikelola | 100 | % | 729.872.000 | | | 1 | 120.000.000 | | 120.000.000 | - | 120.000.000 | 0% | 100% | - | 120.000.000 | 0% | 16% | DPMPTSP |
| 17 | | 2 | 18 | 06 | 2.01 | 01 | Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 | dokumen | 729.872.000 | | | | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 0% | 100% | 1 | 120.000.000 | 100% | 16% | DPMPTSP |
| 18 | | | | | | | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | 2 | 22 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Jumlah Regulasi Tentang Pelestarian Budaya Karo | | | 3.794.435.000 | | 504.688.240 | | 220.490.360 | | | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 2 | 22 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.794.435.000 | | 504.688.240 | | 220.490.360 | 0 | - | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 2 | 22 | 02 | 2.01 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Terlaksananya Penampilan Kesenian Karo | Jenis | 5 | 1.275.000.000 | 3 | 444.688.240 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 444.688.240 | 0,60 | 0,35 | DPKOP |
| 18 | | | | | | | | Adanya VCD Karo | Keping | 500 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | DPKOP |
| 18 | | | | | | | | Terselenggaranya Dialog Kebudayaan | Pertemuan | 3 | 184.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | DPKOP |
| 18 | | | | | | | | Terlaksananya Penguatan Litbang Kebudayaan | System | 6 | 752.435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | DPKOP |
| 18 | Meningkatnya ekon | | | | | | | Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah | Kali | 21 | 1.250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | DPKOP |
| 18 | | 2 | 22 | 02 | 2.01 | 02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Terlaksananya Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah | Orang | 80 | 182.500.000 | 50 | 60.000.000 | 150 | 220.490.360 | 0 | - | 80 | 148.863.282,00 | 0 | 0 | 130 | 208.863.282 | 1,63 | 1,14 | DKPOP |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | | 2 | 22 | 02 | 2.02 | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daera | Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 255.000.000 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 2 | 22 | 02 | 2.02 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Terlaksananya Penampilan Karo | Kali | 5 | 209.546.768 | 1 | 19.382.360 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DKPOP |
| 18 | | | | | | | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Lua | Adanya dukungan, penghargaan dan kerjasama di Bidang Budaya | Orang | 36 | 255.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 22 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Meningkatnya Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 4.497.450.000 | | 1.097.883.864 | 90 | 256.933.872 | | 93.529.584 | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 2 | 22 | 03 | 2.01 | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupate | Meningkatnya Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 4.497.450.000 | | 1.097.883.864 | 90 | 256.933.872 | 70 | 93.529.584 | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 2 | 22 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisi | Terlaksananya Penampilan Kesenian Karo | Orang | 160 | 864.000.000 | 115 | 198.932.280 | 90 | 256.933.872 | 70 | 93.529.584 | 150 | 269.025.919,00 | 0 | 1,0470629 | 265 | 467.958.199 | 1,66 | 0,54 | DKPOP |
| 18 | | | | | | | | Terlaksananya Penampilan Kesenian Karo | Kali | 95 | 3.633.450.000 | 41 | 898.951.584 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 41 | 898.951.584 | 0,43 | 0,25 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 22 | 05 | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan | | | | | | | 201.344.820 | 5 | 175.437.870 | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 2 | 22 | 05 | 2.01 | | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 201.344.820 | 5 | 175.437.870 | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 2 | 22 | 05 | 2.01 | 01 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | Terlaksananya Registrasi Cagar Budaya | 0 | 0 | 0 | 2 | 157.448.000 | 10 | 201.344.820 | 5 | 175.437.870 | 5 | 175.437.870,00 | 0,5 | 0,8713304 | 7 | 332.885.870 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 22 | 04 | | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Meningkatnya Pembinaan Sejarah | | | 1.600.000.000 | | 0 | | | | | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 2 | 22 | 04 | 2.01 | | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.600.000.000 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 2 | 22 | 04 | 2.01 | 02 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | Terkelolanya Pengembangan Nilai Sejarah dan Geografi | Orang | 25 | 1.125.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | | | | | | | Terkelolanya Pengembangan Nilai Sejarah dan Geografi | Jenis | 4 | 170.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 22 | 04 | 2.01 | 03 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah | Tersusunnya Dokumen Sejarah dan Purbakala | dokumen | 6 | 305.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 22 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Meningkatnya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | | | 200.000.000 | | 28.756.595.750 | | | | | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 2 | 22 | 06 | 2.01 | | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | | | | 200.000.000 | | 28.756.595.750 | | 0 | | | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 2 | 22 | 06 | 2.01 | 02 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permu | Adanya Dukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya | Unit | 4 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | Tersedianya Tertib Ad | 3 | 26 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terkelolanya Administrasi Keuangan | | | 36.239.782.447 | | 28.756.595.750 | | | | 3.100.667.498 | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan | | | 23.907.171.765 | | 24.794.911.696 | | 7.035.279.034 | | 1.724.955.797 | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Orang | 36 | 23.065.241.765 | 174 | 21.224.365.196 | 48 | 6.760.209.034 | 12 | 1.428.915.797 | 84 | 8.031.344.415,00 | 1,75 | 1,19 | 258 | 29.255.709.611 | 7,17 | 1,27 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verfikasi Keuangan SKPD | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan | Orang | 49 | 841.930.000 | 119 | 3.570.546.500 | 17 | 275.070.000 | 12 | 296.040.000 | 12 | 296.040.000,00 | 0,705882353 | 1,0762351 | 131 | 3.866.586.500 | 2,67 | 4,59 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | 3.292.273.949 | | 2.519.570.501 | | 1.095.807.171 | | 629.989.697 | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | 8 | 113.000.000 | 130 | 982.793.712 | 48 | 543.988.676 | 8 | 428.909.130 | 8 | 611.259.241,00 | 0,166666667 | 1,1236617 | 138 | 1.594.052.953 | 17,25 | 14,11 | DKPOP |
| 18 | | | | | | | | Adanya Peralatan dan Perlengkapan Operasional Lapangan | Unit | 9 | 104.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Unit | 144 | 37.869.000 | 170 | 53.938.180 | 22 | 5.503.814 | 20 | 33.174.603 | 40 | 38.440.390,00 | 1,818181818 | 6,9843185 | 210 | 92.378.570 | 1,46 | 2,44 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan | Jenis | 42 | 1.235.119.500 | 48 | 321.625.251 | 7 | 61.500.000 | 2 | 43.524.800 | 4 | 61.084.800,00 | 0,571428571 | 0,9932488 | 52 | 382.710.051 | 1,24 | 0,31 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | Jenis | 27 | 33.300.000 | 27 | 11.600.000 | 2 | 16.800.000 | 1 | 10.080.000 | 1 | 10.080.000,00 | 0,5 | 0,6 | 28 | 21.680.000 | 1,04 | 0,65 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Orang | 252 | 1.768.985.449 | 281 | 1.149.613.358 | 77 | 468.014.681 | 12 | 114.301.164 | 36 | 588.876.344,00 | 0,467532468 | 1,2582433 | 317 | 1.738.489.702 | 1,26 | 0,98 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 396.850.000 | | 432.100.000 | | 56250000 | | 55.122.225 | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Adanya Mesin/Kartu Absensi | Unit | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 15.000.000 | 1,00 | 1,00 | DKPOP |
| 18 | | | | | | | | Adanya Pakaian Kerja Lapangan dan Pakaian Khusus Hari Tertentu | Stell | 179 | 149.500.000 | 179 | 149.500.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 179 | 149.500.000 | 1,00 | 1,00 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Stell | 297 | 232.350.000 | 344 | 267.600.000 | 75 | 56.250.000 | 0 | 55.122.225 | 75 | 111.372.225,00 | 0 | 0 | 419 | 378.972.225 | 1,41 | 1,63 | DKPOP |
| 18 | Tersedianya Tertib Ad | 3 | 26 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Untuk Peningkatan Pelayanan | | | 1.152.123.600 | | 391.623.572 | | 1.164.380.000 | | 365.472.839 | 137 | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | Lembar | 3.800 | 22.650.000 | 1.300 | 3.450.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1300 | 3.450.000 | 0,34 | 0,15 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 96 | 1.099.933.600 | 69 | 356.297.572 | 12 | 108.000.000 | 3 | 17.212.839 | 24 | 97.786.518,00 | 2 | 0,9054307 | 93 | 454.084.090 | 0,97 | 0,41 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Unit | 64 | 29.540.000 | 50 | 31.876.000 | 10 | 22.880.000 | 16 | 11.440.000 | 16 | 22.880.000,00 | 1,6 | 1 | 66 | 54.756.000 | 1,03 | 1,85 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honorarium Pegawai Tidak Tetap | Orang | 45 | 5.212.168.074 | 0 | 0 | 33 | 1.033.500.000 | 58 | 336.820.000 | 174 | 1.370.350.000,00 | 5,272727273 | 1,3259313 | 174 | 1.370.350.000 | 3,87 | 0,26 | DKPOP |
| 18 | Tersedianya Tertib Ad | 3 | 26 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera | Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | 2.926.363.133 | | 207.849.256 | | 372.000.000 | | 325.126.940 | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Ken | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional | Unit | 30 | 378.880.000 | 28 | 207.849.256 | 8 | 172.000.000 | 6 | 128.656.940 | 6 | 172.081.590,00 | 0,75 | 1,0004744 | 34 | 379.930.846 | 1,13 | 1,00 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangun | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | Unit | 25 | 2.547.483.133 | 0 | 0 | 1 | 200.000.000 | 0 | 196.470.000 | 0 | 196.470.000,00 | 0 | 0 | 0 | 196470000 | 0,00 | 0,08 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 4.565.000.000 | | 410.540.725 | | 6581628 | | | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Adanya Kendaraan Dinas Operasional | Unit | 3 | 650.000.000 | 1 | 388.440.925 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 388.440.925 | 0,33 | 0,60 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebeleur | Adanya Mebeleur | Unit | 13 | 360.000.000 | 3 | 22.099.800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 22.099.800 | 0,23 | 0,06 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Adanya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 1 | 1.250.000.000 | 0 | 0 | 2 | 6.581.628 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Adanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | Unit | 80 | 2.305.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Jumlah Prasarana Objek Wisata Yang Ditata | | | 90.337.017.069 | | 32.282.422.404 | - | 9.065.388.311 | | 3.796.379.958 | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 90.337.017.069 | | 32.282.422.404 | | 9.065.388.311 | | 3.796.379.958 | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 04 | | Terlaksananya Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan | Objek | 47 | 72.706.582.069 | 21 | 22.345.298.939 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 21 | 22.345.298.939 | 0,45 | 0,31 | DKPOP |
| 18 | | | | | | | | Tersedianya Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan | Orang | 1 | 95.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | | | | | | | Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana | unit | 66 | 9.730.435.000 | 26 | 8.200.424.534 | 4 | 8.986.552.557 | 9 | 3.729.444.204 | 9 | 4.246.784.455,00 | 0 | 0 | 35 | 12.447.208.989 | 0,53 | 1,28 | DKPOP |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Meningkatnya ekono | | | | | | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaa | Terlaksananya Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan | jenis | 2 | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | | | | | | | Adanya Rencana Aksi Dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata | Kali | 2 | 165.000.000 | 1 | 99.880.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 99.880.000 | 0,50 | 0,61 | DKPOP |
| 18 | | | | | | | | Tersusunnya Model Pengelolaan Wisata | dokumen | 6 | 1.400.000.000 | 3 | 350.355.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 350.355.000 | 0,50 | 0,25 | DKPOP |
| 18 | | | | | | | | Terlaksananya Pengembangan Objek Wisata Alam | paket | 2 | 3.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | | | | | | | Tempat Parkir | meter | 500 | 600.000.000 | 500 | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 500 | 600.000.000 | 1,00 | 1,00 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 05 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata | Laporan | 15 | 40.000.000 | 15 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 15 | 15.000.000 | 1,00 | 0,38 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata dalam Kab | Terlaksananya Sosialisasi Sadar Wisata | Orang | 650 | 2.100.000.000 | 300 | 671.463.931 | 5 | 78.835.754 | 160 | 66.935.754 | 160 | 66.935.754,00 | 32 | 0,8490533 | 460 | 738.399.685 | 0,71 | 0,35 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 03 | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Jumlah Event Pertahun Yang Diselenggarakan | | | 27.360.146.000 | | 10.368.519.087 | - | 1.689.966.422 | | 617.927.215 | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 03 | 2.01 | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Ka | Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | | | 27.360.146.000 | | 10.368.519.087 | | 1.689.966.422 | | 617.927.215 | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 01 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Da | Tersedianya Media Promosi Pariwisata Kabupaten Karo | dokumen | 17 | 3.020.000.000 | 7 | 773.800.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 773.800.000 | 0,41 | 0,26 | DKPOP |
| 18 | | | | | | | | | Jenis | 17 | 1.365.000.000 | 2 | 374.567.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 374.567.000 | 0,12 | 0,27 | DKPOP |
| 18 | | | | | | | | | paket | 2 | 55.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupate | Terlaksananya Pemasaran Pariwisata | Event | 46 | 22.293.646.000 | 13 | 8.945.964.512 | 8 | 1.689.966.422 | 2 | 617.927.215 | 5 | 1.611.256.323,00 | 0 | 0 | 18 | 10.557.220.835 | 0,39 | 0,47 | DKPOP |
| 18 | | | | | | | | Tersedianya Jasa Sewa Gedung dan Kendaraan | Unit | 6 | 382.500.000 | 4 | 274.187.575 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 274.187.575 | 0,67 | 0,72 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 04 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Terlaksananya Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata | Jaringan | 3 | 199.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | | | | | | | Terlaksananya Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata | Kali | 18 | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 05 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI | Jumlah Kerjasama Dengan Pelaku Wisata | | | 15.911.527.500 | | 3.466.096.564 | - | 945.760.765 | | 781.993.000 | 200 | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 05 | 2.01 | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan | Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | | 15.911.527.500 | | 3.466.096.564 | | 945.760.765 | | 781.993.000 | 200 | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasa | Terlaksananya Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata | Orang | 600 | 12.398.390.000 | 901 | 3.112.708.885 | 500 | 899.777.000 | 3 | 781.993.000 | 203 | 1.178.639.700,00 | 0,406 | 1,3099242 | 1104 | 4.291.348.585 | 1,84 | 0,35 | DKPOP |
| 18 | | | | | | | | Terlaksananya Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya | dokumen | 20 | 2.160.000.000 | 1 | 16.240.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 16.240.000 | 0,05 | 0,01 | DKPOP |
| 18 | | | | | | | | Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata | Kali | 9 | 232.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 02 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisa | Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata | Rakor | 69 | 1.120.637.500 | 67 | 337.147.679 | 3 | 45.983.765 | 0 | - | 0 | 46.220.000,00 | 0 | 1,0051374 | 67 | 383.367.679 | 0,97 | 0,34 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 02 | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | | | | | | | | | | 348.116.329 | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 02 | 2.01 | | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 251.655.036 | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Sa | Tersedianya Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda | org | 400 | 323.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Sa | Tersedianya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda | 17 kec | 4 | 709.187.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 04 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akse | Tersedianya Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-kebijakan Pembangunan Pemuda | dokumen | 4 | 709.187.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Ke | Tersedianya Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan | dokumen | 4 | 1.208.125.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 06 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Pras | Tersedianya Pendataan Potensi Kepemudaan | dokumen | 4 | 684.087.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | | | | | 06 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Pras | Tersedianya Kabupaten/Kota Layak Pemuda | KL | 6 | 754.162.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 07 | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi pemuda yang berjasa dan ata | Tersedianya Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah dikalangan Pemuda | org | 1385 | 936.914.063 | 13 | 86.100.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 13 | 86100000 | 0,01 | 0,09 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 08 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda | Terpilihnya Anggota Paskibraka Tk Nasional/Propinsi dan Kab.Karo | ORG | 360 | 3.942.565.903 | 65 | 124.158.500 | 72 | 150.000.000 | 72 | 251.655.036 | 144 | 397.879.036,00 | 2 | 2,6525269 | 209 | 522037536 | 0,58 | 0,13 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 02 | 2.02 | | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 96.461.293 | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 02 | 2.02 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organis | Tersedianya Rancangan Pola Kemitraan antar Pemuda dan Masyarakat | bh | 5 | 841.455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 02 | 2.02 | 02 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Tersedianya Profil Kepemudaan dan Olahraga | dokumen | 12 | 273.250.000 | 0 | 0 | 20 | 90.000.000 | 1 | 96.461.293 | 1 | 96.461.293,00 | 0,05 | 1,0717921 | 1 | 96461293 | 0,08 | 0,35 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | | | | | | | 1.856.326.301 | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 03 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 493.853.000 | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan P | Tersedianya Perencanaan Olahraga Terpadu | org | 200 | 450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 03 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana O | Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga | unit | 4 | 5.602.465.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | | | | | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana O | Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga Tingkat Kecamatan | unit | 80 | 5.901.955.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 493.853.000 | 3 | 493.853.000,00 | 0 | 0 | 3 | 493853000 | 0,04 | 0,08 | DKPOP |
| 18 | | | | | | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana O | Tersedianya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga | org/kl | 68 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | | | | | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana O | Tersedianya Revitalisasi Stadion Olahraga Samura Kab. Karo | unit | 5 | 2.300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | | | | | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana O | Tersedianya Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga | unit | 5 | 2.177.489.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | | | | | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana O | Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga | unit | 5 | 2.970.246.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | | | | | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana O | Tersedianya Alat Olahraga | bh | 89 | 802.615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | | | | | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana O | Tersedianya Gedung Gelanggang Olahraga | unit | 5 | 2.292.553.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 03 | 2.02 | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 03 | 2.02 | 02 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Adanya Kompetisi Olahraga | org | 9800 | 3.471.537.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 03 | 2.03 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | | | | 1.362.473.301 | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 02 | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sp | Tersedianya Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga | jenis | 4 | 1.400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 03 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | Tersedianya Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat | org | 218,00% | 1.372.078.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 03 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | Tersedianya Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan event-event olahraga didalam dan diluar daerah Kab/Prop/Nasional/Internasional | org | 680 | 2.097.541.075 | 0 | 0 | 380 | 772.922.740 | 395 | 1.362.473.301 | 395 | 1.362.473.301,00 | 1,039473684 | 1,7627548 | 395 | 1362473301 | 0,58 | 0,65 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 03 | 2.04 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 03 | 2.04 | 01 | Standarisasi Organisasi Keolahragaan | Tersedianya pelatih, peneliti, praktisi dan tehnisi olahraga yang berkualitas | org | 400 | 900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | | | | | 01 | Standarisasi Organisasi Keolahragaan | Adanya manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah | org | 940 | 1.217.128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | | | | | 01 | Standarisasi Organisasi Keolahragaan | Terlaksananya Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan | org | 50000% | 2.053.773.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | | | | | 01 | Standarisasi Organisasi Keolahragaan | Tersedianya Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga | jenis | 400 | 474.193.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 03 | 2.04 | 02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Tersedianya Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah (yang berkembang dimasyarakat exp Atletik, Catur, Beladiri, Wushu, Gulat, Karateka, Taekwondo, Pencak Silat) | Jenis | 17 | 1.840.657.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | | | | | 02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Tersedianya Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat | org | 400 | 2.413.713.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 03 | 2.04 | 04 | Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi | Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi | org | 1385 | 3.017.741.000 | | | | | | | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | | | | | 04 | Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi | Terlaksananya Jaminan Kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan tehnisi olahraga | org | 140 | 2.232.550.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 03 | 2.05 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 03 | 2.05 | 01 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekre | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi (Olahraga yang berkembang di masyarakat :senam, volly, futsal,hockey,basket, Enggrang, Motocross) | org | 29000 | 1.392.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | | | | | 01 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekre | Terselenggaranya senam Massal di Kab. Karo | org | 4000 | 2.473.476.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 03 | 2.05 | 02 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | Adanya Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat | cabor | 12 | 1.287.130.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 03 | 2.05 | 05 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | Tersedianya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga | kali | 68 | 450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 04 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan | | | | | | | | | | 99.929.900 | | | | | | | | | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 02 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Tersedianya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda | orang | 475 | 1.634.585.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 99.929.900 | 340 | 99.929.900,00 | 0 | 0 | 340 | 99929900 | 0,72 | 0,06 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 03 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | Adanya Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan Kepemudaan | org/kl | 400 | 709.187.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 04 | Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupate | Tersedianya Pedoman Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi tentang Kepemimpinan Pemuda | dokumen | 4 | 596.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 05 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | Adanya Aksi Bakti Sosial Kepemudaan | org | 11510 | 688.307.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | | | | | 05 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | Tersedianya Pentas Seni Pemuda | kl | 6 | 870.187.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 06 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Tersedianya Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda | org | 2100 | 922.863.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | | | | | 06 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Terlaksananya penyuluhan bahaya Narkoba bagi pemuda di 17 kecamatan di Kab. Karo | rg/kl/17 ke | 2500 | 1.153.056.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 18 | | | | | | 06 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Tersedianya Buletin Olahraga | bh | 400 | 443.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | DKPOP |
| 19 | | | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | | | | 36.952.808.791 | 0 | 0 | 15.680 | 16.613.683.811 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | PROGRAM PENUNJAG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | indeks | 95 | 32.222.419.791 | | | 154 | 15.543.683.791 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Administrasi Keuangan | Terlaksananya Administrasi Keuangan | Bulan | 60 | 14.478.019.791 | | 2.382.543.215 | 12 | 2.663.283.791 | | 1.227.392.037 | 0,00 | 1.227.392.037 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 3.609.935.252 | 0,00 | 0,25 | DPA |
| 19 | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | rang/Bula | 60 | 14.088.019.791 | 12 bulan | 2.295.171.900 | 12 | 2.585.283.791 | 3 | 1.119.352.037 | 12,00 | 3.467.759.916 | 1,00 | 1,34 | | 5.762.931.816 | 0,00 | 0,41 | DPA |
| 19 | | | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 360 | 390.000.000 | rang bulan | 87.371.315 | 144 | 78.000.000 | 12 | 108.040.000 | 12,00 | 108.040.000 | 0,08 | 1,39 | | 195.411.315 | 0,00 | 0,50 | DPA |
| 19 | | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bulan | 60 | 77.000.000 | | 22.576.000 | 12 | 25.000.000 | | 33.600.000 | | 33.600.000 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 56.176.000 | 0,00 | 0,73 | DPA |
| 19 | | | | | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai | unit | 190 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 300 | 41.000.000 | 39 stel | 22.576.000 | 58 | 25.000.000 | 53 | 33.600.000 | 53,00 | 33.600.000 | 0,91 | 1,34 | | 56.176.000 | 0,00 | 1,37 | DPA |
| 19 | | | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-udangan | orang | 200 | 12.000.000 | 0 | 0 | 120 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perunang undangan | orang | 200 | 8.000.000 | | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bulan | 60 | 936.400.000 | | 59.111.135 | 12 | 204.400.000 | | 138.925.874 | 0,00 | 138.925.874 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 198.037.009 | 0,00 | 0,21 | DPA |
| 19 | | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 80 | 4.000.000 | 12 | | 12 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0 | 0,15 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Paket | 250 | 205.000.000 | 50 jenis | 18.672.535 | 50 | 25.000.000 | 25 | 18.500.000 | 50,00 | 33.849.315 | 1,00 | 1,35 | | 52.521.850 | 0,00 | 0,26 | DPA |
| 19 | | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 80 | 70.000.000 | 0 | 0 | 10 | 50.000.000 | | 47.500.000 | 0,00 | 47.500.000 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 47.500.000 | 0,00 | 0,68 | DPA |
| 19 | | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | Paket | 20 | 17.000.000 | 6 jenis | 5.133.600 | 5 | 5.000.000 | | 4.996.996 | 0,00 | 4.996.996 | 0,00 | 1,00 | | 10.130.596 | 0,00 | 0,60 | DPA |
| 19 | | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan | Dokumen | 1.500 | 20.400.000 | 8250 buah | 4.488.000 | 650 | 4.400.000 | 325 | 2.199.000 | 650,00 | 4.398.000 | 1,00 | 1,00 | | 8.886.000 | 0,00 | 0,44 | DPA |
| 19 | | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Dokumen | 1.250 | 620.000.000 | orang kali | 30.817.000 | 250 | 120.000.000 | 125 | 65.729.878 | 250,00 | 131.934.413 | 1,00 | 1,10 | | 162.751.413 | 0,00 | 0,26 | DPA |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintah Daerah | unit | 150 | 11.264.000.000 | 0 | 0 | 39 | 11.100.000.000 | | 521.668.200 | 0,00 | 521.668.200 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 521.668.200 | 0,00 | 0,05 | DPA |
| 19 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah yunit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | unit | 40 | 80.000.000 | | | 8 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang diadakan | unit | 80 | 90.000.000 | | | 10 | 50.000.000 | | | 10,00 | 63.642.000 | 1,00 | 1,27 | 10,00 | 63.642.000 | 0,13 | 0,71 | DPA |
| 19 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | unit | 130 | 90.000.000 | | | 10 | 50.000.000 | 8 | 431.688.200 | 18,00 | 548.272.910 | 1,80 | 10,97 | 18,00 | 548.272.910 | 0,14 | 6,09 | DPA |
| 19 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainya yang Disediakan | unit | 5 | 10.004.000.000 | | | 1 | 10.000.000.000 | 1 | 89.980.000 | 1,00 | 89.980.000 | 1,00 | 0,01 | 1,00 | 89.980.000 | 0,20 | 0,01 | DPA |
| 19 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | unit | 50 | 1.000.000.000 | | | 10 | 1.000.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 1.989.000.000 | 100 | 363.173.812 | 100 | 401.000.000 | 90 | 176.170.527 | 90,00 | 176.170.527 | | 0,44 | | 539.344.339 | 0,00 | 0,27 | DPA |
| 19 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 250 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang disediakan | Laporan | 60 | 294.000.000 | 12 bulan | 45.123.812 | 12 | 54.000.000 | 3 | 15.155.527 | 12,00 | 43.468.995 | 1,00 | 0,80 | | 88.592.807 | 0,00 | 0,30 | DPA |
| 19 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 145 | 16.000.000 | 16 unit | 5.720.000 | 30 | 12.000.000 | 30 | 12.050.000 | 30,00 | 12.050.000 | 1,00 | 1,00 | | 17.770.000 | 0,00 | 1,11 | DPA |
| 19 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Laporan | 1.140 | 1.675.000.000 | rang bulan | 312.330.000 | 228 | 335.000.000 | 57 | 148.965.000 | 228,00 | 590.400.000 | 1,00 | 1,76 | | 902.730.000 | 0,00 | 0,54 | DPA |
| 19 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Unit | 9 | 3.478.000.000 | | 111.431.131 | 9 | 1.150.000.000 | | 121.587.750 | 0,00 | 121.587.750 | | 0,11 | | 233.018.881 | 0,00 | 0,07 | DPA |
| 19 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan | Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak, dan Perizinanya | unit | 40 | 2.474.000.000 | 8 unit | 111.431.131 | 8 | 150.000.000 | 6 | 121.587.750 | 8,00 | 148.974.750 | 1,00 | 0,99 | | 260.405.881 | 0,00 | 0,11 | DPA |
| 19 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara | unit | 5 | 1.004.000.000 | | | 1 | 1.000.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Jumlah Pengunjung Perpustakaan | orang | 41.999 | 4.144.889.000 | | 0 | 3.999 | 750.000.000 | | | 0,00 | 0 | | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 3.534.889.000 | | 0 | 83 | 300.000.000 | | 399.698.092 | | 399.698.092 | | 1,33 | 0,00 | 399.698.092 | 0,00 | 0,11 | DPA |
| 19 | | | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah layanan Perpusatakaan Elektronik yang dikembangkan dengan manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technologi Service Management) | Layanan | 10 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standart Nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai Kewenanganya | erpustakaa | 5 | 58.000.000 | 0 | 0 | 1 | 50.000.000 | | | 2,00 | 681.820.872 | 2,00 | 13,64 | 2,00 | 681.820.872 | 0,40 | 11,76 | DPA |
| 19 | | | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | Eksemplar | 10 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasioanal Perpustakaan | erpustakaa | 10 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | erpustakaa | 200 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan Kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota | orang | 250 | 130.000.000 | 0 | 0 | 40 | 50.000.000 | | | 40,00 | 27.365.025 | 1,00 | 0,55 | 40,00 | 27.365.025 | 0,16 | 0,21 | DPA |
| 19 | | | Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakaan | Eksemplar | 15.000 | 3.173.889.000 | 2500 buah | 303.289.800 | 42.000 | 200.000.000 | 41.000 | 399.698.092 | 41.000,00 | 399.698.092 | 0,98 | 2,00 | | 702.987.892 | 0,00 | 0,22 | DPA |
| 19 | | | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan | Eksemplar | 8.000 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan Kabupaten/Kota | dokumen | 5 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 610.000.000 | 0 | 0 | 100 | 450.000.000 | | 228.446.590 | | 228.446.590 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 228.446.590 | 0,00 | 0,37 | DPA |
| 19 | | | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan | Lokus | 1.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perpustakaanyang dibangun di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota | erpustakaa | 10 | 424.000.000 | 0 | 0 | 1 | 400.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | orang | 30 | 62.000.000 | 0 | 0 | 20 | 50.000.000 | 8 | 59.537.990 | 128,00 | 154.191.680 | 6,40 | 3,08 | 128,00 | 154.191.680 | 4,27 | 2,49 | DPA |
| 19 | | | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial diwilayah kabupaten/kota yang dikembangkan | erpustakaa | 15 | 84.000.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 168.908.600 | 3,00 | 168.908.600 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 168.908.600 | 0,20 | 2,01 | DPA |
| 19 | | | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah duta baca tingkat daerah kabupaten/kota yang dipilih dan didukung kegiatanya | orang | 15 | 20.000.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan | % | 12.500 | 68.000.000 | 0 | | 7.000 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | Orang | 5 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | | | | | | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan | Eksemplar | 5 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 40.000.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah koleksi budaya etnis nusantara hasil seleksi dan pengadaan | Eksemplar | 5 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dilakukan pengolaan dan penyiangan | Eksemplar | 5 | 20.000.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | 300 | 517.500.000 | 0 | 0 | | 320.000.020 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | | | | 517.500.000 | 0 | 0 | | 320.000.020 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | % | 87 | 260.000.000 | 0 | 0 | 83,33 | 200.000.000 | | | | 0 | | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | | | | 0 | 0 | 65 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 132.000.000 | 0 | 0 | 100 | 100.000.000 | | | 0,00 | 0 | | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan | Berkas | 10.000 | 62.000.000 | 0 | 0 | 3.000 | 50.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan | Berkas | 1.000 | 58.000.000 | 0 | 0 | 200 | 50.000.000 | | | 1,00 | 35.453.545 | 0,01 | 0,71 | 1,00 | 35.453.545 | 0,00 | 0,61 | DPA |
| 19 | | | | | | | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumalh laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota | Laporan | 10 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | % | 100 | 128.000.000 | 0 | 0 | 100 | 100.000.000 | | 112.724.375 | 0,00 | 112.724.375 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 112.724.375 | 0,00 | 0,88 | DPA |
| 19 | | | | | | | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN | Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN | Pengguna | 10 | 62.000.000 | 0 | 0 | 1 | 50.000.000 | | 112.724.375 | 0,00 | 112.724.375 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 112.724.375 | 0,00 | 1,82 | DPA |
| 19 | | | | | | | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Laporan | 10 | 66.000.000 | 0 | 0 | 1 | 50.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | % | 87 | 240.000.000 | 0 | 0 | 4.360 | 120.000.020 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | | | | | | 65 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | % | 100 | 148.000.000 | 0 | 0 | 2.000 | 120.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | arsip | 5.000 | 66.000.000 | 0 | 0 | 1.000 | 50.000.000 | | | 0,00 | 42.873.075 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 42.873.075 | 0,00 | 0,65 | DPA |
| 19 | | | | | | | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | Jumlah arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan | Berkas | 5.000 | 82.000.000 | 0 | 0 | 1.000 | 70.000.000 | | | 0,00 | 12.086.230 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 12.086.230 | 0,00 | 0,15 | DPA |
| 19 | | | | | | | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | Terlaksananya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | % | 100 | 16.000.000 | 0 | | 100 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | Jumlah arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana | arsip | 250 | 8.000.000 | 0 | 0 | 50 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | Jumlah arsip yang dilakukan pemulihan dan penyimpanan akibat bencana | arsip | 250 | 8.000.000 | 0 | 0 | 50 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | % | 100 | 32.000.000 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Daftar arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta peyerahaan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Daftar | 6.100 | 8.000.000 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahaan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran perangkat Daerah Kabupaten/Kota | arsip | 6.100 | 8.000.000 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan | Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pendampingan penyelamatan Arsip bagi pemekaran Daerah Kecamatan | arsip | 10 | 8.000.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan | Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pendampingan penyelamatan Arsip bagi pemekaran Desa/Kelurahan | arsip | 10 | 8.000.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | % | 100 | 16.000.000 | 0 | | 20 | 20 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar autentisitas Arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan | arsip | 330 | 8.000.000 | 0 | 0 | 50 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih mediasesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip | arsip | 330 | 8.000.000 | 0 | 0 | 50 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | Terlaksananya Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | % | 100 | 28.000.000 | 0 | | 36 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip statis yang dinyatakan hilang yang dinilai dan ditetapkan | arsip | 60 | 8.000.000 | 0 | 0 | 12 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | | | | | | Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang | Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan hasil alih media yang diyatakan hilang | arsip | 60 | 8.000.000 | 0 | 0 | 12 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | Jumlah daftar pencarian Arsip (DPA) yang dilakukan penetapan dan pengumuman | arsip | 60 | 12.000.000 | 0 | 0 | 12 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | | 100 | 17.500.000 | 0 | 0 | 83 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | % | 100 | 17.500.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Jumlah SOP penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan | SOP | 10 | 7.500.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 19 | | | | | | | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | arsip | 10 | 10.000.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DPA |
| 20 | | 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | 129.633.170.927 | | | | 28.845.999.271 | | 8 | | 14.001.039.188 | | 150,67 | | 111.065.206.315 | | 141,67 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | | | | DINAS PERTANIAN | | | | 129.633.170.927 | | | | 28.845.999.271 | | 20.595.346.125 | | 14.001.039.188 | | 150,67 | | 111.065.206.315 | | 141,67 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN | Indeks kepuasan masyarakat | 87 | Indeks | 97.064.167.127 | | 97.064.167.127 | 83 | 18.128.818.572 | | 0 | 0,00 | 12.242.241.118 | 0,00 | 67,53 | 0,00 | 109.306.408.245 | 0,0 | 112,6 | DITAN |
| 20 | | 3 | 27 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | % | 91.862.860.367 | 100 | - | 12 | 17.100.477.220 | 4 | 6.306.116.430 | 9,00 | 11.653.216.818 | 75,00 | 68,15 | 109,00 | 11.653.216.818 | 109,00 | 12,69 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 990 | Bulan | 81.866.910.367 | | | 12 | 15.101.287.220 | 3 | 5.877.101.430 | 9,00 | 10.513.071.818 | 75,00 | 69,62 | 9,00 | 10.513.071.818 | 0,91 | 12,84 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5 | Dokumen | 9.995.950.000 | | | 1 | 1.999.190.000 | 1 | 429.015.000 | 0,00 | 1.140.145.000 | 0,00 | 57,03 | 0,00 | 1.140.145.000 | 0,00 | 11,41 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | % | 420.130.000 | % | - | 0 | 0 | 199 | 148.946.127 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Penilaian Dupak | 17 | Unit | 40.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 868 | Paket | 380.130.000 | | | 0 | 0 | 199 | 148.946.127 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 60 | nis, Orang, Kali | 2.155.252.960 | 100 | - | 96 dan 12 | 479.130.592 | 27 | 434.987.512 | 0,00 | 250.492.243 | 0,00 | 52,28 | 100,00 | 250.492.243 | 166,67 | 11,62 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 40 | Paket | 163.423.900 | | | 8 | 32.684.780 | 6 | 54.320.100 | 0,00 | 16.195.196 | 0,00 | 49,55 | 0,00 | 16.195.196 | 0,00 | 9,91 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 140 | Paket | 316.582.825 | | | 41 | 63.316.565 | 5 | 10.924.000 | 0,00 | 51.397.575 | 0,00 | 81,18 | 0,00 | 51.397.575 | 0,00 | 16,24 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 140 | Paket | 51.911.235 | | | 17 | 10.382.247 | 0 | | 0,00 | 10.367.250 | 0,00 | 99,86 | 0,00 | 10.367.250 | 0,00 | 19,97 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan | 140 | Paket | 225.535.000 | | | 15 | 45.107.000 | 15 | 22.749.350 | 0,00 | 18.893.840 | 0,00 | 41,89 | 0,00 | 18.893.840 | 0,00 | 8,38 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 10 | Laporan | 1.397.800.000 | | | 2 | 327.640.000 | 1 | 346.994.062 | 0,00 | 153.638.382 | 0,00 | 46,89 | 0,00 | 153.638.382 | 0,00 | 10,99 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | % | 350.000.000 | 100 | - | 4 | 98.000.000 | 2 | 46.400.000 | 0,00 | 63.281.200 | 0,00 | 64,57 | 100,00 | 63.281.200 | 100,00 | 18,08 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan L | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 | Unit | 350.000.000 | | | 4 | 98.000.000 | 2 | 46.400.000 | 0,00 | 63.281.200 | 0,00 | 64,57 | 0,00 | 63.281.200 | 0,00 | 18,08 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 1.653.260.000 | 100 | - | 12 dan 19 | 352.020.000 | | 21.106.841 | 6,00 | 253.322.957 | 0,00 | 71,96 | 106,00 | 253.322.957 | 0,0 | 15,32 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1440 | Laporan | 268.160.000 | | | 12 | 75.000.000 | 114 | 21.106.841 | 6,00 | 49.202.957 | 50,00 | 65,60 | 6,00 | 49.202.957 | 0,42 | 18,35 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 60 | Laporan | 1.385.100.000 | | | 19 | 277.020.000 | | | 0,00 | 204.120.000 | 0,00 | 73,68 | 0,00 | 204.120.000 | 0,00 | 14,74 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | % | 495.953.800 | 100 | - | 125 | 99.190.760 | | 138.424.792 | 0,00 | 21.927.900 | 0,00 | 22,11 | 100,00 | 21.927.900 | 100,00 | 4,42 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kend | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 300 | Unit | 470.953.800 | | | 99 | 94.190.760 | 39 | 32.524.792 | 0,00 | 17.097.900 | 0,00 | 18,15 | 0,00 | 17.097.900 | 0,00 | 3,63 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 130 | Unit | 25.000.000 | | | 26 | 5.000.000 | | | 0,00 | 4.830.000 | 0,00 | 96,60 | 0,00 | 4.830.000 | 0,00 | 19,32 | DISTAN |
| | | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | 1 | 105.900.000 | | | | | | | | | |
| 20 | | 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produktivitas Komoditi Pertanian | 91,59 | Kuintal/ha | 12.577.699.880 | | | 89,77665 | 3.597.459.861 | 6 | 4.673.669.504 | 8 | 4.725.720.093 | 8,9 | 131,4 | 8 | 4.725.720.093 | 8,7 | 37,6 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 02 | 2.01 | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 17 | Kecamatan | 2.525.999.960 | | | 17 | 1.672.846.576 | | 1.739.257.732 | 0 | 1.757.744.442 | 0,0 | 105,1 | 0 | 1.757.744.442 | 0,0 | 69,6 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi | 17 dan 1 | n Kelompok tani | 630.000.000 | | | 17 dan 3 | 165.000.000 | | 134.459.650 | 0 | 143.653.060 | 0,0 | 87,1 | 0 | 143.653.060 | 0,0 | 22,8 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 18 | Kelompok tani | 1.895.999.960 | | | 18 | 1.507.846.576 | | 1.604.798.082 | 0 | 1.614.091.382 | 0,0 | 107,0 | 0 | 1.614.091.382 | 0,0 | 85,1 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan Bibit Tanaman Pertanian | 60,67437 | Jenis | 7.047.453.989 | | | 3 | 1.024.613.285 | | 2.934.411.764 | 0 | 2.967.975.639 | 0,0 | 289,7 | 0 | 2.967.975.639 | 0,0 | 42,1 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 02 | 2.02 | 02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Komoditi, Kelompok Tani Penangkar, Produsen Benih dan Ternak yang Menerima IB | dan 3000 | hih dan Akseptor | 4.568.035.069 | | 3, 2, 1 dan 3000 | | 324.613.285 | | 187.359.194 | 0 | 215.775.194 | 0,0 | 66,5 | 0 | 215.775.194 | 0,0 | 4,7 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 02 | 2.02 | 03 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Komoditi dan Kelompok Tani Penerima Benih/Bibit Unggul Tanaman Perkebunan dan Hortikultura | 12 | n kelompok tani | 2.479.418.920 | | | 12 | 700.000.000 | | 2.747.052.570 | 0 | 2.752.200.445 | 0,0 | 393,2 | 0 | 2.752.200.445 | 0,0 | 111,0 | DISTAN |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | 3 | 27 | 02 | 2.03 | | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sample Bahan Pakan | 60 | el bahan pakan | 100.000.000 | | | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0,0 | 0,0 | 4 | 6 | 6,7 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 02 | 2.03 | 01 | Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil | Jumlah Sample Bahan Pakan | 60 | pel bahan pakan | 100.000.000 | | | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0,0 | 0,0 | 4 | 6 | 6,7 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 02 | 2.06 | | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Diadakan | 150 | Ekor | 2.904.245.931 | | | 120 | 900.000.000 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3,3 | 0,0 | 4 | 6 | 2,7 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Produktivitas Komoditi Pertanian | 91,59 | Kuintal/ha | 12.006.299.840 | | | 89,77665 | 5.451.220.878 | 42 | 8.022.553.405 | 42 | 9.036.083.855 | 46,8 | 165,8 | 42 | 9.036.083.855 | 45,9 | 75,3 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.01 | | Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah Prasarana pendukung Pertanian | 15 | Kegiatan | 274.999.840 | | | 3 | 275.000.000 | 0 | 205.182.000 | 0 | 264.302.950 | 0,0 | 96,1 | 0 | 264.302.950 | 0,0 | 96,1 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Pameran Hasil Pertanian | 15 | Kegiatan | 274.999.840 | | | 2 | 275.000.000 | | 205.182.000 | 0 | 264.302.950 | 0,0 | 96,1 | 0 | 264.302.950 | 0,0 | 96,1 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.02 | | Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun | 32 | Unit | 11.631.300.000 | | | 8 | 5.176.220.878 | 42 | 7.817.371.405 | 42 | 8.771.780.905 | 525,0 | 169,5 | 42 | 8.771.780.905 | 131,3 | 75,4 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 01 | Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jaringan Irigasi Usaha Tani | 10 | Unit | 3.900.000.000 | | | 12 | 2.420.000.000 | 17 | 3.114.994.910 | 17 | 3.547.244.910 | 141,7 | 146,6 | 17 | 3.547.244.910 | 170,0 | 91,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Embung Pertanian | - | Unit | 240.000.000 | | | - | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 03 | Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani | 10 | Unit | 3.500.000.000 | | | 10 | 1.701.920.878 | 22 | 4.384.671.895 | 22 | 4.384.671.895 | 220,0 | 257,6 | 22 | 4.384.671.895 | 220,0 | 125,3 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 04 | Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | DAM Parit | - | Unit | 0 | | | - | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 05 | Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage | Long Storage | - | Unit | 0 | | | - | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 07 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | Rumah Potong Hewan | 6 | Unit | 1.568.300.000 | | | 2 | 153.400.000 | 2 | 110.740.000 | 2 | 152.900.000 | 100,0 | 99,7 | 2 | 152.900.000 | 33,3 | 9,7 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Prasarana Pertanian Lainnya | 5 | Unit | 2.423.000.000 | | | 2 | 900.900.000 | 1 | 206.964.600 | 1 | 686.964.100 | 50,0 | 76,3 | 1 | 686.964.100 | 20,0 | 28,4 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.04 | | Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum | Luas lahan penggembalaan umum | 10 dan 8 | Ha dan kegiatan | 100.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.04 | 02 | Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum | Luas lahan penggembalaan umum | 10 | Ha | 50.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.04 | 03 | Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum | Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum | 8 | Pertemuan | 50.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 02 | 2.06 | 01 | Pengadaan Benih Bibit/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Diadakan | 150 | Ekor | 2.904.245.931 | | | 120 | 900.000.000 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3,3 | 0,0 | 4 | 6 | 2,7 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Produktivitas Komoditi Pertanian | 91,59 | Kuintal/ha | 12.006.299.840 | | | 89,77665 | 5.451.220.878 | 0 | - | 0 | 1.013.530.450 | 0,0 | 18,6 | 0 | 1.013.530.450 | 0,0 | 8,4 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.01 | | Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah Prasarana pendukung Pertanian | 15 | Kegiatan | 274.999.840 | | | 3 | 275.000.000 | 0 | - | 0 | 59.120.950 | 0,0 | 21,5 | 0 | 59.120.950 | 0,0 | 21,5 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Pameran Hasil Pertanian | 15 | Kegiatan | 274.999.840 | | | 2 | 275.000.000 | | | 0 | 59.120.950 | 0,0 | 21,5 | 0 | 59.120.950 | 0,0 | 21,5 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.02 | | Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun | 32 | Unit | 11.631.300.000 | | | 8 | 5.176.220.878 | 0 | - | 0 | 954.409.500 | 0,0 | 18,4 | 0 | 954.409.500 | 0,0 | 8,2 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 01 | Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jaringan Irigasi Usaha Tani | 10 | Unit | 3.900.000.000 | | | 12 | 2.420.000.000 | | | 0 | 432.250.000 | 0,0 | 17,9 | 0 | 432.250.000 | 0,0 | 11,1 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Embung Pertanian | - | Unit | 240.000.000 | | | - | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 03 | Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani | 10 | Unit | 3.500.000.000 | | | 10 | 1.701.920.878 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 04 | Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | DAM Parit | - | Unit | 0 | | | - | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 05 | Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage | Long Storage | - | Unit | 0 | | | - | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 07 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | Rumah Potong Hewan | 6 | Unit | 1.568.300.000 | | | 2 | 153.400.000 | | | 0 | 42.160.000 | 0,0 | 27,5 | 0 | 42.160.000 | 0,0 | 2,7 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Prasarana Pertanian Lainnya | 5 | Unit | 2.423.000.000 | | | 2 | 900.900.000 | | | 0 | 479.999.500 | 0,0 | 53,3 | 0 | 479.999.500 | 0,0 | 19,8 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.04 | | Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum | Luas lahan penggembalaan umum | 10 dan 8 | Ha dan kegiatan | 100.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.04 | 02 | Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum | Luas lahan penggembalaan umum | 10 | Ha | 50.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 03 | 2.04 | 03 | Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum | Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum | 8 | Pertemuan | 50.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 04 | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase jumlah HPR yang di vaksin | 70 | % | 3.838.999.960 | | | 70 | 847.799.960 | 0 | 303.794.841 | 0 | 816.182.234 | 0,0 | 96,3 | 0 | 816.182.234 | 0,0 | 21,3 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 04 | 2.01 | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jenis hewan yang divaksin dan diobati | 5 | Jenis | 3.213.999.760 | | | 5 | 772.799.920 | 0 | 268.693.841 | 0 | 744.207.834 | 0,0 | 96,3 | 0 | 744.207.834 | 0,0 | 23,2 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 04 | 2.01 | 01 | Pengendalian dan Penaggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah Hewan yang Divaksin dan Diobati | 15000 | Ekor | 3.213.999.760 | | | 15000 | 772.799.920 | | 268.693.841 | 0 | 744.207.834 | 0,0 | 96,3 | 0 | 744.207.834 | 0,0 | 23,2 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 04 | 2.03 | | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah kabupaten/ Kota | Jumlah Bahan dan Alat Laboratorium yang Diadakan | 6 | Unit | 150.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 04 | 2.03 | 01 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium | 3 | Unit | 75.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 04 | 2.03 | 02 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 3 | Unit | 75.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 04 | 2.04 | | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan | 115 | Unit | 375.000.200 | | | 115 | 75.000.040 | 0 | 35.101.000 | 0 | 71.974.400 | 0,0 | 96,0 | 0 | 71.974.400 | 0,0 | 19,2 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 04 | 2.04 | 02 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan | 115 | Unit | 375.000.200 | | | 115 | 75.000.040 | | 35.101.000 | 0 | 71.974.400 | 0,0 | 96,0 | 0 | 71.974.400 | 0,0 | 19,2 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 04 | 2.05 | | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | Jumlah Pakan Ternak dan Tempat Minum Ternak yang Diadakan | 1 | Unit | 100.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 04 | 2.05 | 01 | Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | Jumlah Pakan Ternak dan Tempat Minum Ternak yang Diadakan | 1 | Unit | 100.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan OPT | 100 | Persentase | 1.210.554.120 | | | 23 | 200.000.000 | 0 | 174.518.640 | 0 | 179.850.360 | 0,0 | 89,9 | 0 | 179.850.360 | 0,0 | 14,9 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 05 | 2.01 | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Luas Pertanaman yang dikendalikan OPT nya | 875 | Ha | 1.210.554.120 | | | 200 | 200.000.000 | 0 | 174.518.640 | 0 | 179.850.360 | 0,0 | 89,9 | 0 | 179.850.360 | 0,0 | 14,9 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 05 | 2.01 | 01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Jumlah Komoditi yang Dikendalikan OPT nya | 2 | Komoditi | 1.210.554.120 | | | 2 | 200.000.000 | | 174.518.640 | 0 | 179.850.360 | 0,0 | 89,9 | 0 | 179.850.360 | 0,0 | 14,9 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 06 | | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Jumlah Rekomendasi Pertanian yang Dikeluarkan | 320 | Rekomendasi | 200.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 06 | 2.01 | | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Rekomendasi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan yang Dikeluarkan | 240 | Rekomendasi | 120.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 06 | 2.01 | 02 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Jumlah Rekomendasi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikeluarkan | 240 | Rekomendasi | 120.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 06 | 2.02 | | Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Jumlah Rekomendasi yang Dikeluarkan | 8 | Rekomendasi | 40.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 06 | 2.02 | 01 | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Jumlah Rekomendasi Usaha Peternakan yang Dikeluarkan | 8 | Rekomendasi | 40.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 06 | 2.03 | | Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan | Persentase jumlah unit usaha yang diawasi | 100 | % | 40.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 06 | 2.03 | 02 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | Jumlah Unit Usaha yang diawasi | 12 | Usaha | 40.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 07 | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Cakupan Bina Kelompok Tani | 7,45 | Persentase | 2.735.450.000 | | | 6,13 | 620.700.000 | 0 | 324.828.033 | 0 | 500.325.943 | 0,0 | 0,0 | 0 | 500.325.943 | 0,0 | 18,3 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 07 | 2.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Jumlah Penyuluh dan Kelompok Tani yang mengikuti Pelatihan | 1 dan 25 | ang dan Poktan | 2.735.450.000 | | | 131 dan 20 | 620.700.000 | 0 | 324.828.033 | 0 | 500.325.943 | 0,0 | 80,6 | 0 | 500.325.943 | 0,0 | 18,3 | DISTAN |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Pelatihan | 131 | Orang | 1.735.450.000 | | | 133 | 420.700.000 | | 321.209.933 | 0 | 345.298.448 | 0,0 | 82,1 | 0 | 345.298.448 | 0,0 | 19,9 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pelatihan | 20 | Poktan | 880.000.000 | | | 225 | 200.000.000 | | 3.618.100 | 0 | 155.027.495 | 0,0 | 77,5 | 0 | 155.027.495 | 0,0 | 17,6 | DISTAN |
| 20 | | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 05 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota | Jumlah Sekolah Lapang | 5 | Poktan | 120.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | DISTAN |
| | | | | | | | UNSUR PILIHAN | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DISPERINDAG |
| 21 | | | | | | | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | 80.682.975.036 | | 56.163.591.184 | | 20.150.126.944 | | 12.543.734.806 | | 18.192.870.210 | | 90,29 | | 74.356.461.394 | | 92,16 | DISPERINDAG |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DISPERINDAG |
| 21 | | | | | | | ESDM | | | | 699.112.804 | | - | | 274.112.804 | | - | | - | | - | | - | | - | DISPERINDAG |
| 21 | Meningkatnya jumla | 3 | 29 | 5 | | | Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan | Jumlah pengusaha yang memiliki izin pemanfaatan langsung panas bumi | persen | 20 | 699.112.804 | 20 | - | 20 | 274.112.804 | 0 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 29 | 5 | 2.01 | | Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kat | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | persen | 100 | 699.112.804 | 100 | - | 100 | 274.112.804 | 0 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 29 | 5 | 2.01 | 01 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan IzinPemanfaatan Langsung Panas Bumi d | Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | | 100 | 200.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 29 | 5 | 2.01 | 02 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan danInformasi Izin Pemanfaatan Langsung | Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 100 | 75.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 29 | 5 | 2.01 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan PelaksanaanPerizinan Pemanfaatan Langsung | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 100 | 424.112.804 | 100 | - | 100 | 274.112.804 | 0 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | | | | | | SEKRETARIAT | | | | 64.257.734.315 | | 30.260.729.125 | | 8.163.328.467 | 0 | 3.463.506.158 | | 7.697.385.341 | | 94,29 | | 37.958.114.466 | | 59,07 | DISPERINDAG |
| 21 | Meningkatnya pelay | 5 | 01 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat | indeks | 95 | 64.257.734.315 | 83 | 30.260.729.125 | 83 | 8.163.328.467 | 0 | 3.463.506.158 | 83 | 7.697.385.341 | 83 | 94,29 | 83 | 37.958.114.466 | 83 | 59,07 | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah | persen | 100 | 51.025.549.111 | 100 | 23.875.489.871 | 100 | 5.807.974.144 | 0 | 2.055.475.488 | 100 | 5.146.621.685 | 100 | 88,61 | 100 | 29.022.111.556 | 100 | 56,88 | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bula | 100 | 47.181.871.928 | 100 | 23.428.891.221 | 100 | 5.579.734.144 | 100 | 1.823.395.808 | 100 | 4.914.542.005 | 100 | 88,08 | 100 | 28.343.433.226 | 100 | 60,07 | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 100 | 3.843.677.183 | 100 | 446.598.650 | 100 | 228.240.000 | 100 | 232.079.680 | 100 | 232.079.680 | 100 | 101,68 | 100 | 678.678.330 | 100 | 17,66 | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persen | 100 | 92.820.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.05 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 100 | 46.410.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.05 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 100 | 46.410.000 | 100 | - | 100 | - | 0 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persen | 100 | 545.649.418 | 100 | 160.574.000 | 100 | 89.376.000 | 0 | 96.096.000 | 100 | 96.096.000 | 100 | 107,52 | 100 | 256.670.000 | 100 | 47,04 | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 100 | 545.649.418 | 100 | 160.574.000 | 100 | 89.376.000 | 0 | 96.096.000 | 100 | 96.096.000 | 100 | 107,52 | 100 | 256.670.000 | 100 | 47,04 | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | persen | 100 | 3.240.273.341 | 100 | 1.765.678.237 | 100 | 669.852.705 | 0 | 614.703.094 | 100 | 850.223.211 | 100 | 126,93 | 100 | 2.615.901.448 | 100 | 80,73 | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 100 | 333.018.744 | 100 | 4.000.260 | 100 | - | 0 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 4.000.260 | 100 | 1,20 | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan' Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 100 | 477.049.449 | 100 | 351.575.331 | 100 | 75.719.105 | 100 | 89.549.370 | 100 | 89.549.370 | 100 | 118,27 | 100 | 441.124.701 | 100 | 92,47 | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 100 | 477.049.449 | 100 | 3.103.096 | 100 | - | 0 | 17.569.596 | 100 | 17.569.596 | 100 | - | 100 | 20.672.692 | 100 | 4,33 | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 100 | 477.049.449 | 100 | 374.830.106 | 100 | 117.875.600 | 0 | 79.705.600 | 100 | 79.705.600 | 100 | 67,62 | 100 | 454.535.706 | 100 | 95,28 | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 100 | 333.018.749 | 100 | 4.188.000 | 100 | - | 0 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 4.188.000 | 100 | 1,26 | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 100 | 333.018.749 | 100 | - | 100 | - | 0 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 100 | 333.018.751 | 100 | - | 100 | - | 0 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 100 | 477.050.001 | 100 | 1.027.981.444 | 100 | 476.258.000 | 0 | 427.878.528 | 100 | 663.398.645 | 100 | 139,29 | 100 | 1.691.380.089 | 100 | 354,55 | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 641.760.795 | 100 | 374.830.106 | 100 | 80.125.618 | 0 | 188.060.458 | 100 | 188.060.458 | 100 | 234,71 | 100 | 562.890.564 | 100 | 87,71 | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 100 | 70.195.125 | 100 | - | 100 | - | 0 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 100 | 70.195.125 | 100 | - | 100 | - | 0 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 04 | Pengadaan Alat Angkutan Darat tak Bermotor | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | Unit | 100 | 70.195.125 | 100 | - | 100 | - | 0 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 100 | 150.394.920 | 100 | 374.830.106 | 100 | 80.125.618 | 0 | 188.060.458 | 100 | 188.060.458 | 100 | 234,71 | 100 | 562.890.564 | 100 | 374,27 | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | 100 | 70.195.125 | 100 | - | 100 | - | 0 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 07 | Pengadaan Aset Tetap lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | 100 | 70.195.125 | 100 | - | 100 | - | 0 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 100 | 70.195.125 | 100 | - | 100 | - | 0 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | DISPERINDAG |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 100 | 70.195.125 | 100 | - | 100 | - | 0 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 8.173.091.650 | 100 | 3.864.863.512 | 100 | 1.426.860.000 | 0 | 449.190.893 | 100 | 1.356.403.762 | 100 | 95,06 | 100 | 5.221.267.274 | 100 | 63,88 | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 100 | 2.724.364.084 | 100 | 53.240.574 | 100 | 24.000.000 | 0 | 5.444.363 | 100 | 16.962.503 | 100 | 70,68 | 100 | 70.203.077 | 100 | 2,58 | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 100 | 2.724.363.683 | 100 | 3.790.517.938 | 100 | 1.395.960.000 | 0 | 436.846.530 | 100 | 1.332.541.259 | 100 | 95,46 | 100 | 5.123.059.197 | 100 | 188,05 | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 06 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 100 | 2.724.363.883 | 100 | 21.105.000 | 100 | 6.900.000 | 0 | 6.900.000 | 100 | 6.900.000 | 100 | 100,00 | 100 | 28.005.000 | 100 | 1,03 | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 538.590.000 | 100 | 219.293.399 | 100 | 89.140.000 | 0 | 59.980.225 | 100 | 59.980.225 | 100 | 67,29 | 100 | 279.273.624 | 100 | 51,85 | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Ken | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 100 | 151.841.000 | 100 | 53.293.399 | 100 | 89.140.000 | 0 | 59.980.225 | 100 | 59.980.225 | 100 | 67,29 | 100 | 113.273.624 | 100 | 74,60 | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Diperbaiki | Unit | 100 | 77.349.800 | 100 | - | 100 | - | 0 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kerja yang Diservice | Unit | 100 | 77.349.800 | 100 | - | 100 | - | 0 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara | Unit | 100 | 77.349.800 | 100 | - | 100 | - | 0 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara | Unit | 100 | 77.349.800 | 100 | - | 100 | - | 0 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 100 | 77.349.800 | 100 | 166.000.000 | 100 | - | 0 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 166.000.000 | 100 | 214,61 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | | | | URUSAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | 7.198.829.197 | | 15.909.481.131 | | 4.449.832.820 | 0 | 4.126.123.740 | | 4.753.120.871 | | 106,82 | | 20.662.602.002 | | 287,03 | DISPERINDAG |
| 21 | Meningkatnya Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 3 | 30 | 02 | | | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Jumlah SIUP yang diterbitkan | siup | 1250 | 144.601.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 02 | 2.01 | | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Us | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | Persen | 100 | 26.191.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 02 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perb | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen | 100 | 26.191.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 02 | 2.02 | | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang | persen | 100 | 47.410.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 02 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Penerbitan Tanda daftar Gudang | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang | Dokumen | 100 | 47.410.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 02 | 2.07 | | Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi daerah Kabupaten/Kota yang Tela | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) | Persen | 100 | 71.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 02 | 2.07 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal | Dokumen | 100 | 71.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 03 | | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Sarana Perdagangan yang Terkelola dengan Baik | persen | 58,82 | 3.474.974.400 | 29,41 | 14.477.357.154 | 29,41 | 4.051.893.880 | 0 | 3.804.964.869 | 29,41 | 4.338.038.440 | 29,41 | 107,06 | 29,41 | 18.815.395.594 | 29,41 | 541,45 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 03 | 2.01 | | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persen | 100 | 3.089.974.400 | 100 | 14.381.869.314 | 100 | 3.876.893.880 | 0 | 3.804.964.869 | 100 | 4.167.038.440 | 100 | 107,48 | 100 | 18.548.907.754 | 100 | 600,29 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 03 | 2.01 | 01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | Unit | 100 | 2.889.974.400 | 100 | 13.369.263.314 | 100 | 340.000.000 | 0 | 189.790.000 | 100 | 189.790.000 | 100 | 55,82 | 100 | 13.559.053.314 | 100 | 469,18 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 03 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Unit | 100 | 200.000.000 | 100 | 1.012.606.000 | 100 | 3.536.893.880 | 0 | 3.615.174.869 | 100 | 3.977.248.440 | 100 | 112,45 | 100 | 4.989.854.440 | 100 | 2.494,93 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 03 | 2.02 | | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyaraka | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Persen | 100 | 385.000.000 | 100 | 95.487.840 | 100 | 175.000.000 | 0 | - | 100 | 171.000.000 | 100 | 97,71 | 100 | 266.487.840 | 100 | 69,22 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 03 | 2.02 | 01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Dokumen | 100 | 385.000.000 | 100 | 95.487.840 | 100 | 175.000.000 | 0 | - | 100 | 171.000.000 | 100 | 97,71 | 100 | 266.487.840 | 100 | 69,22 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 05 | | | Program Pengembangan Ekspor | Peningkatan Nilai Ekspor | persen | 7499 | 1.853.000.000 | 5202,43 | 1.384.378.977 | 5202,43 | 235.075.000 | 0 | 184.973.091 | 5202,43 | 278.896.651 | 5202,43 | 118,64 | 5202,43 | 1.663.275.628 | 5202,43 | 89,76 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Daga | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persen | 100 | 1.853.000.000 | 100 | 1.384.378.977 | 100 | 235.075.000 | 0 | 184.973.091 | 100 | 278.896.651 | 100 | 118,64 | 100 | 1.663.275.628 | 100 | 89,76 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Ko | Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina | elaku Usah | 100 | 603.000.000 | 100 | 77.387.640 | 100 | 55.075.000 | 0 | 51.618.755 | 100 | 51.618.755 | 100 | 93,72 | 100 | 129.006.395 | 100 | 21,39 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 05 | 2.01 | 02 | Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | elaku Usal | 100 | 592.000.000 | 100 | 314.560.100 | 100 | 90.000.000 | 0 | 108.888.296 | 100 | 172.985.296 | 100 | 192,21 | 100 | 487.545.396 | 100 | 82,36 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 05 | 2.01 | 03 | Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | elaku Usah | 100 | 339.000.000 | 100 | 820.267.417 | 100 | 90.000.000 | 0 | 24.466.040 | 100 | 54.292.600 | 100 | 60,33 | 100 | 874.560.017 | 100 | 257,98 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 05 | 2.01 | 04 | Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | elaku Usah | 100 | 319.000.000 | 100 | 172.163.820 | 100 | - | 0 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 172.163.820 | 100 | 53,97 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 06 | | | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | Persentase alat ukur sarana perdagangan yang di tera dan tera ulang | persen | 100 | 742.167.000 | 66,89 | - | 66,89 | 162.863.940 | 0 | 136.185.780 | 66,89 | 136.185.780 | 66,89 | 83,62 | 66,89 | 136.185.780 | 66,89 | 18,35 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 06 | 2.01 | | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan | Persen | 100 | 742.167.000 | 100 | - | 100 | 162.863.940 | 0 | 136.185.780 | 100 | 136.185.780 | 100 | 83,62 | 100 | 136.185.780 | 100 | 18,35 | DISPERINDAG |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | 3 | 30 | 06 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | Unit | 100 | 314.810.000 | 100 | 162.860.717 | 100 | 92.863.940 | 0 | 74.245.780 | 100 | 74.245.780 | 100 | 79,95 | 100 | 237.106.497 | 100 | 75,32 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 06 | 2.01 | 02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | Orang | 100 | 427.357.000 | 100 | - | 100 | 70.000.000 | 0 | 61.940.000 | 100 | 61.940.000 | 100 | 88,49 | 100 | 61.940.000 | 100 | 14,49 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 07 | | | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Jumlah Produk Pengawasan Barang Beredar | produk | 9 | 984.086.797 | 0 | 47.745.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 47.745.000 | 0 | 4,85 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 07 | 2.01 | | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk D | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Persen | 100 | 984.086.797 | 0 | 47.745.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 47.745.000 | 0 | 4,85 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 30 | 07 | 2.01 | 03 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Dokumen | 100 | 984.086.797 | 0 | 47.745.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 47.745.000 | 0 | 4,85 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 31 | | | | PERINDUSTRIAN | | | | 8.527.298.720 | | 9.993.380.928 | | 7.262.852.853 | 0 | 4.954.104.908 | | 5.742.363.998 | | 79,06 | | 15.735.744.926 | | 184,53 | DISPERINDAG |
| 21 | Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB | 3 | 31 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase Pertumbuhan Industri/IKM | persen | 4,12 | 7.422.298.720 | 3,64 | 9.993.380.928 | 3,64 | 7.262.852.853 | 0 | 4.954.104.908 | 3,64 | 5.742.363.998 | 3,64 | 79,06 | 3,64 | 15.735.744.926 | 3,64 | 212,01 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kot | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Persen | 100 | 7.422.298.720 | 100 | 9.993.380.928 | 100 | 7.262.852.853 | 0 | 4.954.104.908 | 100 | 5.742.363.998 | 100 | 79,06 | 100 | 15.735.744.926 | 100 | 212,01 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | Dokumen | 100 | 3.582.298.720 | 100 | 0 | 100 | 150.000.000 | 0 | 149.433.750 | 100 | 149.433.750 | 100 | 99,62 | 100 | 149.433.750 | 100 | 4,17 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industr | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Dokumen | 100 | 0 | 100 | 44.400.000 | 100 | 449.054.853 | 0 | 310.141.874 | 100 | 456.848.136 | 100 | 101,74 | 100 | 501.248.136 | 100 | #DIV/0! | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasaran | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Dokumen | 100 | 790.000.000 | 100 | 1.665.647.665 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 100 | - | 100 | 1.665.647.665 | 100 | 210,84 | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran S | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Dokumen | 100 | 3.050.000.000 | 100 | 8.283.333.263 | 100 | 6.663.798.000 | 0 | 4.494.529.284 | 100 | 5.136.082.112 | 100 | 77,07 | 100 | 13.419.415.375 | 100 | 439,98 | DISPERINDAG |
| 21 | Meningkatnya Kontribusi sektor kontribusian | 3 | 31 | 03 | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | Persentase Industri/ IKM yang berizin | persen | 9,21 | 85.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 31 | 03 | 2.01 | | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izi | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | Persen | 100 | 85.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 31 | 03 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenanga | Jumlah IKM/Industri yang termasuk di SIINAS | Dokumen | 100 | 85.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | DISPERINDAG |
| 21 | Meningkatnya aktivitas perekonomian berbasis sektor unggulan daerah yang berdaya saing dan | 3 | 31 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase IKM yang masuk kedalam Sistem Informasi Industri Nasional | persen | 100 | 1.020.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 31 | 04 | 2.01 | | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUK | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatanPenyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Persen | 100 | 1.020.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 31 | 04 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan I | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Dokumen | 100 | 510.000.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | DISPERINDAG |
| 21 | | 3 | 31 | 04 | 2.01 | 02 | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota m | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | Dokumen | 100 | 510.000.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | DISPERINDAG |
| 22 | | 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | 27.661.260.094 | | | | | | | 0,00 | 13.677.288.065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.677.288.065 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | Meningkatnya Pelay | 4 | 01 | 001 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 83 | 24.420.050.469 | | | | | | 15.761.489.306 | 0,00 | 28.735.031.071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.735.031.071 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 13.543.312.965 | | | | | | 4.021.438.459 | 0,00 | 11.826.203.519 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.826.203.519 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan | Bulan | 12 | 13.109.702.965 | | | | | | 3.778.109.574 | 3,00 | 11.409.354.634 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 11.409.354.634 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.02 | 003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Honorarium Pengelola Keuangan | Orang Bul | 1 | 433.610.000 | | | | | | 243.328.885 | 0,00 | 416.848.885 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.848.885 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 120.200.000 | | | | | | 89.820.000 | 0,00 | 179.133.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.133.000 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pakaian Dinas Beserta Atribut | stell | 131 | 90.200.000 | | | | | | 89.820.000 | 0,00 | 179.133.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.133.000 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.05 | 009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat | Orang Kali | 8 | 30.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 3.066.760.959 | | | | | | 2.806.435.563 | 0,00 | 4.374.820.927 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.374.820.927 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Intalasi Listrik | Jenis | 1.200 | 150.000.000 | | | | | 900 | 119.996.550 | 900,00 | 154.566.168 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 154.566.168 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis | 24 | 630.193.109 | | | | | 16 | 564.990.425 | 16,00 | 652.385.590 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 652.385.590 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.06 | 003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan Rumah Tangga | Jenis | 20 | 181.200.000 | | | | | 12 | 210.765.500 | 12,00 | 333.395.000 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 333.395.000 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetakan dan Pengggandaan | Jenis | 3 | 174.704.050 | | | | | 3 | 200.457.100 | 3,00 | 285.829.300 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 285.829.300 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.06 | 008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Makan Minum | Orang Kali | 12 | 520.000.000 | | | | | 9 | 718.799.000 | 9,00 | 1.087.692.000 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 1.087.692.000 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Perjalanan Dinas | Orang Kali | 146 | 1.410.663.800 | | | | | 84 | 991.426.988 | 84,00 | 1.860.952.869 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 1.860.952.869 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit Buah | 12 | 803.000.000 | | | | | | 3.898.927.750 | 0,00 | 4.341.404.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.341.404.006 | #REF! | #REF! | SETDA |
| | | | | | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | 5 | 2.404.800.000 | | | | | | | | | |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.07 | 005 | Pengadaan Mebel | Mebel | Buah | 10 | 250.000.000 | | | | | 7 | 594.475.000 | 7,00 | 743.637.500 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 743.637.500 | #REF! | #REF! | SETDA |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.07 | 006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan dan Mesin | Buah | 5 | 300.000.000 | | | | | 3 | 342.504.750 | 3,00 | 461.388.506 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 461.388.506 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarana danPrasarana Pendukung Gedung Kantor | Uni | 10 | 253.000.000 | | | | | 8 | 557.148.000 | 8,00 | 731.578.000 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 731.578.000 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | 12 | 2.551.239.529 | | | | | | 957.503.635 | 0,00 | 2.473.897.711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.473.897.711 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Jasa Surat Menyurat | Bulan | 12 | 50.000.000 | | | | | | 22.730.000 | 0,00 | 22.730.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.730.000 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Telepon, Internet, Air dan Listrik | Bulan | 12 | 1.064.500.000 | | | | | 4 | 319.031.995 | 4,00 | 1.022.981.571 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1.022.981.571 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor | Unit | 20 | 159.039.529 | | | | | 9 | 153.711.640 | 9,00 | 209.126.140 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 209.126.140 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honorarium Pegawai Tidak Tetap | Orang Bul | 20 | 1.277.700.000 | | | | | 12 | 462.030.000 | 12,00 | 1.219.060.000 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 1.219.060.000 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Unit | 12 | 1.759.370.000 | | | | | 47 | 2.332.612.612 | 47,00 | 3.037.529.270 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 3.037.529.270 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per | Pemeliharaan dan Pajak Dinas Kendaraan Jabatan | Unit | 4 | 192.600.000 | | | | | 3 | 294.035.930 | 3,00 | 416.490.030 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 416.490.030 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Ken | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | Unit | 12 | 590.270.000 | | | | | 9 | 790.760.792 | 9,00 | 949.046.556 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 949.046.556 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Unit | 20 | 91.500.000 | | | | | 20 | 153.179.870 | 20,00 | 153.179.870 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 153.179.870 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.09 | 011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor at | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 20 | 885.000.000 | | | | | 15 | 1.094.636.020 | 15,00 | 1.518.812.814 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 1.518.812.814 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala D | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 776.381.290 | | | | | 15 | 276.581.284 | 15,00 | 697.584.190 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 697.584.190 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.11 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Gaji dan Tunjangan | Bulan | 12 | 672.381.290 | | | | | 3 | 172.727.284 | 3,00 | 593.730.190 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 593.730.190 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.11 | 002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil K | Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah | stell | 12 | 104.000.000 | | | | | 12 | 103.854.000 | 12,00 | 103.854.000 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 103.854.000 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.12 | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Wakil Daerah dan Sekretaris Daerah | Bulan | 12 | 1.000.000.000 | | | | | | 957.118.579 | 0,00 | 1.310.478.744 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.478.744 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.12 | 001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Bulan | 12 | 350.000.000 | | | | | 7 | 350.414.580 | 7,00 | 483.634.810 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 483.634.810 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.12 | 002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Bulan | 12 | 350.000.000 | | | | | 7 | 285.148.000 | 7,00 | 389.687.935 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 389.687.935 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.12 | 003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Bulan | 12 | 300.000.000 | | | | | 7 | 321.555.999 | 7,00 | 437.155.999 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 437.155.999 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.13 | | Penataan Organisasi | Terlaksananya Penataan Organisasi | Bulan | 12 | 501.785.726 | | | | | 7 | 226.385.524 | 7,00 | 285.313.804 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 285.313.804 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.13 | 001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Dokumen dan Laporan | Laporan | 4 | 135.000.000 | | | | | 3 | 65.805.694 | 3,00 | 80.083.244 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 80.083.244 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.13 | 003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Laporan | Laporan | 1 | 125.000.000 | | | | | 3 | 66.635.950 | 3,00 | 73.594.950 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 73.594.950 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.13 | 004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laks | Laporan dan Fasilitasi | Laporan | 1 | 163.785.726 | | | | | 1 | 93.943.880 | 1,00 | 93.943.880 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 93.943.880 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.13 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Dokumen dan Laporan | Laporan | 1 | 78.000.000 | | | | | | | 0,00 | 37.691.730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.691.730 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.14 | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Bulan | 12 | 298.000.000 | | | | | 1.007 | 194.665.900 | 1.007,00 | 208.665.900 | 0,00 | 0,00 | 1.007,00 | 208.665.900 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.14 | 001 | Fasilitasi Keprotokolan | Fasilitasi Keprotokolan | Kali | 50 | 50.000.000 | | | | | 11 | 139.745.900 | 11,00 | 153.745.900 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 153.745.900 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.14 | 002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Konfrensi Pers/Baliho/Spanduk | Kali | 800 | 208.000.000 | | | | | 800 | 16.000.000 | 800,00 | 16.000.000 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 16.000.000 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 001 | 2.14 | 003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Dokumentasi Tugas Pimpinan | Kali | 200 | 40.000.000 | | | | | 196 | 38.920.000 | 196,00 | 38.920.000 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 38.920.000 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | Meningkatnya daya | 4 | 01 | 002 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tinggi Kategori | | 2.501.066.285 | | | | | | 674.988.671 | 0,00 | 850.628.971 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.628.971 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 002 | 2.01 | | Administrasi Tata Pemerintahan | Terlaksananya Penyelengaraan Administrasi Tata Pemerintahan | Bulan | 12 | 1.849.044.285 | | | | | 43 | 268.512.635 | 43,00 | 444.152.935 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 444.152.935 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 002 | 2.01 | 001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Aplikasi E-Office | Aplikasi | 1 | 130.000.000 | | | | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Penetapan dan Penegasan Batas Pemekaran Desa Batas Desa | Perbub | 3 | 1.038.122.470 | | | | | 3 | 45.295.385 | 3,00 | 45.295.385 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 45.295.385 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 002 | 2.01 | 003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Desk Pilkada Upacara Hari Otonomi Daerah LPPD Kerjasama Dalam Daerah | Laporan | 60 | 680.921.815 | | | | | 40 | 223.217.250 | 40,00 | 398.857.550 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 398.857.550 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 002 | 2.02 | | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Terlaksananya Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Bulan | 12 | 300.000.000 | | | | | 36 | 238.519.521 | 36,00 | 238.519.521 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 238.519.521 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 002 | 2.02 | 001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Monitoring dan Koordinasi dalam Penyusunan Kebijakan Bidang Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Laporan | 12 | 100.000.000 | | | | | 12 | 92.195.186 | 12,00 | 92.195.186 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 92.195.186 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 002 | 2.02 | 002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan So | Monitoring dan Koordinasi dalam Penyusunan Kebijakan Bidang Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Laporan | 12 | 100.000.000 | | | | | 12 | 81.354.935 | 12,00 | 81.354.935 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 81.354.935 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 002 | 2.02 | 003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Ma | Monitoring dan Koordinasi dalam Penyusunan Kebijakan Bidang Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Laporan | 12 | 100.000.000 | | | | | 12 | 64.969.400 | 12,00 | 64.969.400 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 64.969.400 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 002 | 2.03 | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Bulan | 12 | 352.022.000 | | | | | 661 | 167.956.515 | 661,00 | 167.956.515 | 0,00 | 0,00 | 661,00 | 167.956.515 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 002 | 2.03 | 001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Keputusan Propemperda | Laporan | 603 | 152.022.000 | | | | | 604 | 82.625.000 | 604,00 | 82.625.000 | 0,00 | 0,00 | 604,00 | 82.625.000 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 002 | 2.03 | 002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Perkara | Perkara | 5 | 175.000.000 | | | | | 7 | 60.332.990 | 7,00 | 60.332.990 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 60.332.990 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 002 | 2.03 | 003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Dokumentasi Produk Hukum | peraturan | 50 | 25.000.000 | | | | | 50 | 24.998.525 | 50,00 | 24.998.525 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 24.998.525 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | Meningkatnya daya | 4 | 01 | 003 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Jumlah Paket Tender dengan Jumlah Permohonan Tender | paket | 220 | 740.143.340 | | | | | 160 | 690.422.951 | 160,00 | 1.218.528.951 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 1.218.528.951 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 003 | 2.01 | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Terlaksananya Kebijakan Perekonomian | Bulan | 12 | 280.899.705 | | | | | 4 | 187.955.400 | 4,00 | 203.681.400 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 203.681.400 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 003 | 2.01 | 001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD | Monitoring dan Pengawasan BUMD dan BLUD Kab. Karo | Laporan | 1 | 30.000.000 | | | | | 1 | 17.620.000 | 1,00 | 33.346.000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 33.346.000 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 003 | 2.01 | 002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Pengendalian Inflasi dan Inklusi Keuangan Daerah Kab. Karo terlaksana | Laporan | 1 | 30.000.000 | | | | | 1 | 117.308.500 | 1,00 | 117.308.500 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 117.308.500 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 003 | 2.01 | 003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Laporan | 1 | 10.000.000 | | | | | 1 | 8.487.000 | 1,00 | 8.487.000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8.487.000 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 003 | 2.01 | 005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Terbentuknya BUMD Kab. Karo | Perda | 1 | 210.899.705 | | | | | 1 | 44.539.900 | 1,00 | 44.539.900 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 44.539.900 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 003 | 2.02 | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Terlaksananya Administrasi Pembangunan | Bulan | 12 | 83.930.000 | | | | | 3 | 129.934.250 | 3,00 | 129.934.250 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 129.934.250 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 003 | 2.02 | 001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Program Pembangunan | Laporan | 1 | 30.000.000 | | | | | 1 | 14.388.800 | 1,00 | 14.388.800 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 14.388.800 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 003 | 2.02 | 002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Evaluasi Program Pembangunan | Laporan | 1 | 30.000.000 | | | | | 1 | 34.315.690 | 1,00 | 34.315.690 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 34.315.690 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 003 | 2.02 | 003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Monitoring Pelaksanaan Pembangunan | Laporan | 1 | 23.930.000 | | | | | 1 | 81.229.760 | 1,00 | 81.229.760 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 81.229.760 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 003 | 2.03 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Bulan | 12 | 345.313.635 | | | | | 150 | 345.187.301 | 150,00 | 857.567.301 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 857.567.301 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 003 | 2.03 | 001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Paket Pengadaan | Kegiatan | 120 | 145.313.635 | | | | | 30 | 270.410.000 | 30,00 | 782.790.000 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 782.790.000 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 003 | 2.03 | 002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Paket Pengadaan Secara Elektronik | Kegiatan | 60 | 100.000.000 | | | | | 60 | 57.967.411 | 60,00 | 57.967.411 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 57.967.411 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 003 | 2.03 | 003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Kegiatan | 60 | 100.000.000 | | | | | 60 | 16.809.890 | 60,00 | 16.809.890 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 16.809.890 | #REF! | #REF! | SETDA |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | 4 | 01 | 003 | 2.04 | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Bulan | 12 | 30.000.000 | | | | | 3 | 27.346.000 | 3,00 | 27.346.000 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 27.346.000 | ADA | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 003 | 2.04 | 001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelauta | Monitoring dan Pengawasan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kab.Karo | Laporan | 1 | 10.000.000 | | | | | 1 | 9.095.000 | 1,00 | 9.095.000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9.095.000 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 003 | 2.04 | 002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungar | Monitoring dan Pengawasan hasil Pertambangan dan lingkungan Hidup | Laporan | 1 | 10.000.000 | | | | | 1 | 8.945.000 | 1,00 | 8.945.000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8.945.000 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 22 | | 4 | 01 | 003 | 2.04 | 003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Monitoring dan Pengawasan Hasil Energi dan Air | Laporan | 1 | 10.000.000 | | | | | 1 | 9.306.000 | 1,00 | 9.306.000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9.306.000 | #REF! | #REF! | SETDA |
| 23 | | 4 | 02 | | | | SEKRETARIAT DPRD | | | | 178.799.634.300 | | | | 37.347.989.128 | | 13.615.363.845 | | 40.197.384.634 | | | | 65.895.497.802 | | | SETWAN |
| 23 | kuntabilitas penyele | 4 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | indeks | 95 | 130.938.636.073 | | | 83 | 23.392.507.428 | | 10.465.216.866 | 69 | 26.418.960.183 | 83,13 | 112,94 | 69 | 26.418.960.183 | 72,63 | 20,18 | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % | 100 | 199.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 8 | 11.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD | Dokumen | 4 | 32.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD | Dokumen | 4 | 32.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD | Dokumen | 4 | 32.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD | Dokumen | 4 | 32.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 4 | 40.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 20.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 16.575.319.465 | | | 12 | 2.988.525.444 | 6 | 834.616.082 | 18 | 2.837.900.001 | 150,00 | 94,96 | 18 | 2.837.900.001 | 18,00 | 17,12 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bula | 60 | 15.000.719.465 | | | 12 | 2.765.455.444 | 3 | 788.296.082 | 12 | 2.645.060.001 | 100,00 | 95,65 | 12 | 2.645.060.001 | 20,00 | 17,63 | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 40 | 120.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 1.318.600.000 | | | 16 | 223.070.000 | 3 | 46.320.000 | 12 | 192.840.000 | 75,00 | 86,45 | 12 | 192.840.000 | 20,00 | 14,62 | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 4 | 32.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 4 | 38.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 4 | 8.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Laporan | 4 | 38.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 4 | 20.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | % | 100 | 127.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 4 | 6.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 20.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | 1 | 1.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 4 | 6.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 48 | 20.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 48 | 64.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 10 | 10.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 2.373.348.000 | | | 12 | 351.586.000 | | 171.390.000 | - | 171.390.000 | - | 48,75 | - | 171.390.000 | - | 7,22 | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 1 | 23.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 5 | 308.448.000 | | | 84 | 60.000.000 | 84 | 48.750.000 | 84 | 48.750.000 | 100,00 | 81,25 | 84 | 48.750.000 | 1.680,00 | 15,80 | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | 1.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 48 | 8.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | | | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 96 | 8.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan | Orang | 4 | 12.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Laporan | 4 | 20.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Pemindahan Tugas ASN | Jumlah ASN yang dipindahtugaskan | orang | 4 | 4.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 48 | 474.780.000 | | | 3 | 291.586.000 | 48 | 122.640.000 | 48 | 122.640.000 | 1.600,00 | 42,06 | 48 | 122.640.000 | 100,00 | 25,83 | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan | Orang | 15 | 75.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 96 | 1.439.120.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 8.373.962.960 | | | 12 | 1.710.828.124 | 722 | 3.404.327.693 | 745 | 4.369.823.923 | 6.208,33 | 255,42 | 745 | 4.369.823.923 | 745,00 | 52,18 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan/ Kantor yang disediakan | Paket | 5 | 138.057.350 | | | 710 | 20.657.850 | 710 | 20.180.548 | 710 | 20.180.548 | 100,00 | 97,69 | 710 | 20.180.548 | 14.200,00 | 14,62 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Paket | 4 | 979.437.581 | | | 9 | 242.822.014 | 6 | 1.041.604.140 | 12 | 1.110.465.640 | 133,33 | 457,32 | 12 | 1.110.465.640 | 300,00 | 113,38 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | Paket | 5 | 636.394.300 | | | 26 | 286.652.900 | | 1.144.328.099 | - | 1.144.328.099 | - | 399,20 | - | 1.144.328.099 | - | 179,81 | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Paket | 4 | 1.125.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | Paket | 5 | 239.493.040 | | | 13 | 63.378.360 | 6 | 22.926.360 | 12 | 25.858.860 | 92,31 | 40,80 | 12 | 25.858.860 | 240,00 | 10,80 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | Dokumen | 50 | 204.000.000 | | | 10 | 38.700.000 | | 7.686.000 | 9 | 21.924.000 | 90,00 | 56,65 | 9 | 21.924.000 | 18,00 | 10,75 | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan | Paket | 20 | 8.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 60 | 953.136.000 | | | 6.748 | 310.183.000 | | 66.794.000 | - | 198.256.000 | - | 63,92 | - | 198.256.000 | - | 20,80 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 60 | 4.052.444.689 | | | 19 | 748.434.000 | | 1.100.808.546 | 19 | 1.848.810.776 | 100,00 | 247,02 | 19 | 1.848.810.776 | 31,67 | 45,62 | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 200 | 8.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1 | 30.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 100 | 5.357.089.318 | | | 20 | 151.091.490 | | 371.070.100 | - | 416.070.100 | - | 275,38 | - | 416.070.100 | - | 7,77 | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | Unit | 2 | 1.013.709.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | Unit | 10 | 480.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang disediakan | Unit | 1 | 1.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | Unit | 30 | 300.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | Unit | 6 | 6.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan | Unit | 2 | 2.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 2.100.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | Unit | 9 | 870.000.000 | | | | | 19 | 371.070.100 | 19 | 416.070.100 | - | - | 19 | 416.070.100 | 211,11 | 47,82 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | Unit | 59 | 584.380.318 | | | 19 | 151.091.490 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 5.162.800.000 | | | 12 | 1.243.470.000 | 39 | 388.790.346 | 54 | 1.228.095.926 | 450,00 | 98,76 | 54 | 1.228.095.926 | 54,00 | 23,79 | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 48 | 8.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | Laporan | 60 | 786.000.000 | | | 12 | 157.200.000 | 3 | 39.982.346 | 12 | 117.117.926 | 100,00 | 74,50 | 12 | 117.117.926 | 20,00 | 14,90 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Laporan | 60 | 262.600.000 | | | 36 | 52.520.000 | 36 | 67.468.000 | 36 | 67.468.000 | 100,00 | 128,46 | 36 | 67.468.000 | 60,00 | 25,69 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Laporan | 60 | 4.106.200.000 | | | 64 | 1.033.750.000 | | 281.340.000 | 9 | 1.043.510.000 | 14,06 | 100,94 | 9 | 1.043.510.000 | 15,00 | 25,41 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 3.955.522.200 | | | 26 | 1.260.458.420 | 2 | 1.016.335.738 | 8 | 1.199.793.736 | 30,77 | 95,19 | 8 | 1.199.793.736 | 8,00 | 30,33 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 55 | 1.427.250.000 | | | 11 | 285.450.000 | | 130.556.143 | 6 | 267.633.330 | 54,55 | 93,76 | 6 | 267.633.330 | 10,91 | 18,75 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 5 | 167.350.000 | | | 1 | 33.470.000 | 1 | 3.900.275 | 1 | 30.439.026 | 100,00 | 90,94 | 1 | 30.439.026 | 20,00 | 18,19 | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Unit | 1 | 500.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel Yang dipelihara | Unit | 144 | 210.080.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 144 | 210.080.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Unit | 108 | 157.560.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Unit | 4 | 52.520.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Unit | 1 | 10.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Unit | 18 | 1.720.182.200 | | | 14 | 941.538.420 | 1 | 881.879.320 | 1 | 901.721.380 | 7,14 | 95,77 | 1 | 901.721.380 | 5,56 | 52,42 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.15 | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | % | 100 | 87.859.352.250 | | | 12 | 15.027.070.450 | | 4.030.038.477 | 6 | 15.477.759.067 | 50,00 | 103,00 | 6 | 15.477.759.067 | 6,00 | 17,62 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | Orang/Bula | 2.100 | 84.806.352.250 | | | 420 | 14.417.270.450 | 105 | 3.512.131.677 | 420 | 14.959.852.267 | 100,00 | 103,76 | 420 | 14.959.852.267 | 20,00 | 17,64 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | Paket | 5 | 2.003.000.000 | | | 210 | 399.800.000 | | 398.601.000 | - | 398.601.000 | - | 99,70 | - | 398.601.000 | - | 19,90 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | Orang | 175 | 1.050.000.000 | | | 35 | 210.000.000 | | 119.305.800 | - | 119.305.800 | - | 56,81 | - | 119.305.800 | - | 11,36 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.16 | | Layanan Administrasi DPRD | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Layanan Administrasi DPRD | % | 100 | 955.241.880 | | | 12 | 659.477.500 | | 248.648.430 | 6 | 718.127.430 | 50,00 | 108,89 | 6 | 718.127.430 | 6,00 | 75,18 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.16 | 01 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Dokumen | 10 | 141.241.880 | | | 2 | 29.477.500 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | Laporan | 32 | 140.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Laporan | 32 | 4.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 01 | 2.16 | 04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | Paket | 5 | 670.000.000 | | | 3 | 630.000.000 | 3 | 248.648.430 | 12 | 718.127.430 | 400,00 | 113,99 | 12 | 718.127.430 | 240,00 | 107,18 | SETWAN |
| 23 | | | | | | | | Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 83,13 | 112,94 | | | 72,63 | 20,18 | |
| 23 | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | Rendah | | | | Sangat Rendah | | |
| 23 | Meningkatnya daya saing Birokrasi Kabupaten Karo | 4 | 02 | 02 | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 1.Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota 2.Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) 3. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | ADA/TIDAK | ADA | 47.860.998.227 | | | ADA | 13.955.481.700 | | 3.150.146.979 | - | 13.778.424.451 | - | 98,73 | - | 13.778.424.451 | ADA | 28,79 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.01 | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | % | 100 | 10.486.686.597 | | | 8 | 2.843.169.000 | | 856.478.338 | - | 3.428.808.849 | - | 120,60 | - | 3.428.808.849 | - | 32,70 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Dokumen | 5 | 494.960.971 | | | 1 | 24.030.000 | | | 2 | 8.680.000 | 200,00 | 36,12 | 2 | 8.680.000 | 40,00 | 1,75 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Pembahasan Rancangan Perda | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Dokumen | 40 | 8.303.680.821 | | | 8 | 2.669.783.000 | 2 | 856.478.338 | 6 | 3.420.128.849 | 75,00 | 128,11 | 6 | 3.420.128.849 | 15,00 | 41,19 | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan | Dokumen | 40 | 830.130.838 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau naskah Akademik yang difasilitasi | Dokumen | 10 | 784.718.858 | | | 2 | 138.400.000 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 05 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata tertib DPRD yang disusun | Dokumen | 5 | 73.195.109 | | | 1 | 10.956.000 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.02 | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran | % | 100 | 5.713.094.742 | | | 10 | 227.160.000 | | 160.877.000 | - | 206.564.000 | - | 90,93 | - | 206.564.000 | - | 3,62 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | Dokumen | 5 | 1.290.110.843 | | | 1 | 36.276.000 | 1 | 14.804.000 | 3 | 48.948.000 | 300,00 | 134,93 | 3 | 48.948.000 | 60,00 | 3,79 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 02 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Dokumen | 5 | 172.439.034 | | | 1 | 24.184.000 | 1 | 22.583.000 | 1 | 22.583.000 | 100,00 | 93,38 | 1 | 22.583.000 | 20,00 | 13,10 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | Dokumen | 5 | 1.392.150.011 | | | 1 | 51.900.000 | 1 | 45.130.000 | 1 | 45.130.000 | 100,00 | 86,96 | 1 | 45.130.000 | 20,00 | 3,24 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 04 | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD | Dokumen | 5 | 1.392.150.011 | | | 1 | 51.900.000 | 1 | 50.955.000 | 1 | 50.955.000 | 100,00 | 98,18 | 1 | 50.955.000 | 20,00 | 3,66 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | Dokumen | 10 | 68.802.344 | | | 2 | 10.300.000 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Dokumen | 5 | 1.397.442.499 | | | 1 | 52.600.000 | 1 | 27.405.000 | 2 | 38.948.000 | 200,00 | 74,05 | 2 | 38.948.000 | 40,00 | 2,79 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.03 | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | % | 100 | 5.753.018.831 | | | 12 | 233.026.000 | | | - | 30.743.000 | - | 13,19 | - | 30.743.000 | - | 0,53 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Laporan | 60 | 1.595.397.556 | | | 12 | 40.568.000 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Laporan | 60 | 1.588.500.297 | | | 12 | 23.390.000 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 03 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 60 | 259.331.912 | | | 12 | 39.100.000 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Laporan | 60 | 1.640.895.928 | | | 12 | 31.280.000 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 05 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Laporan | 60 | 207.465.530 | | | 12 | 31.280.000 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 06 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Dokumen | 5 | 148.957.075 | | | 1 | 20.896.000 | | | 1 | 7.865.000 | 100,00 | 37,64 | 1 | 7.865.000 | 20,00 | 5,28 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 07 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | Dokumen | 180 | 124.057.961 | | | 36 | 18.392.000 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 08 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Dokumen | 5 | 188.412.573 | | | 1 | 28.120.000 | | | 1 | 22.878.000 | 100,00 | 81,36 | 1 | 22.878.000 | 20,00 | 12,14 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.04 | | Peningkatan Kapasitas DPRD | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | % | 100 | 5.449.948.000 | | | 10 | 1.535.282.000 | | 409.039.400 | 5 | 1.165.164.224 | 50,00 | 75,89 | 5 | 1.165.164.224 | 5,00 | 21,38 | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Orientasi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD | Dokumen | 35 | 932.676.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 02 | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | Dokumen | 175 | 993.716.000 | | | 35 | 939.262.000 | | 281.039.400 | 8 | 717.164.224 | 22,86 | 76,35 | 8 | 717.164.224 | 4,57 | 72,17 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Dokumen | 60 | 255.580.000 | | | 12 | 15.250.000 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 04 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Orang | 15 | 133.648.000 | | | 3 | 180.070.000 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | Orang | 40 | 2.983.000.000 | | | 8 | 384.070.000 | | 128.000.000 | 16 | 448.000.000 | 200,00 | 116,65 | 16 | 448.000.000 | 40,00 | 15,02 | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Dokumen | 5 | 61.040.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 07 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | Dokumen | 5 | 90.288.000 | | | 1 | 16.630.000 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.05 | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | % | 100 | 6.422.463.000 | | | 20 | 1.365.896.250 | | 72.339.000 | 10 | 257.885.000 | 50,00 | 18,88 | 10 | 257.885.000 | 10,00 | 4,02 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | Laporan | 60 | 1.363.375.000 | | | 12 | 272.675.000 | | 8.375.000 | 9 | 33.725.000 | 75,00 | 12,37 | 9 | 33.725.000 | 15,00 | 2,47 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 02 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok - Pokok Pikiran DPRD yang disusun | Dokumen | 175 | 87.588.000 | | | 35 | 15.860.000 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 03 | Pelaksanaan Reses | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | Dokumen | 15 | 4.971.500.000 | | | 3 | 1.077.361.250 | | 63.964.000 | 1 | 224.160.000 | 33,33 | 20,81 | 1 | 224.160.000 | 6,67 | 4,51 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.06 | | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | % | 100 | 211.631.090 | | | 10 | 18.920.000 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.06 | 01 | Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | Dokumen | 3 | 53.083.090 | | | 1 | 9.460.000 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.06 | 02 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | Laporan | 10 | 158.548.000 | | | 2 | 9.460.000 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Pembahasan Kerja Sama Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan ksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah | % | 100 | 81.040.000 | | | | - | | | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Dokumen | 1 | 20.000.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun | Dokumen | 48 | 61.040.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.08 | | Fasilitasi Tugas DPRD | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD | % | 100 | 13.743.115.967 | | | 20 | 7.732.028.450 | | 1.651.413.241 | 10 | 8.689.259.378 | 50,00 | 112,38 | 10 | 8.689.259.378 | 10,00 | 63,23 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Dokumen | 500 | 11.614.855.167 | | | 100 | 7.657.980.800 | | 1.639.199.241 | 80 | 8.665.265.378 | 80,00 | 113,15 | 80 | 8.665.265.378 | 16,00 | 74,61 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 02 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | Laporan | 5 | 678.276.000 | | | 1 | 12.660.000 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Dokumen | 60 | 746.412.800 | | | 12 | 48.587.650 | | 12.214.000 | 2 | 23.994.000 | 16,67 | 49,38 | 2 | 23.994.000 | 3,33 | 3,21 | SETWAN |
| 23 | | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 04 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Dokumen | 60 | 481.880.000 | | | 12 | 12.800.000 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 23 | | | | | | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | Dokumen | 1 | 221.692.000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | SETWAN |
| 24 | | 5 | 01 | | | | PERENCANAAN | | | | | | | | | | 3.428.625.701 | 61,77 | 7.610.663.477 | 61,77 | 100,83 | 61,77 | 12.724.638.238 | 12,35 | 32,65 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | 100 | 38.967.485.345 | | | 100 | 7.547.797.069 | | 3.428.625.701 | 61,77 | 7.610.663.477 | 61,77 | 100,83 | 61,77 | 12.724.638.238 | 12,35 | 32,65 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | indeks | 95 | 26.445.410.000 | | | 83 | 4.996.368.135 | | 1.849.235.416 | 67,51 | 5.238.629.075 | 81,33 | 104,85 | 67,51 | 5.238.629.075 | 14,21 | 19,81 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | bulan | 12 | 21.435.057.820 | | | 12 | 4.087.811.564 | 17 | 1.410.839.925 | 57,72 | 4.240.553.601 | 40,66 | 103,74 | 57,72 | 4.240.553.601 | 11,54 | 19,78 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bula | 60 | 20.505.866.595 | | | 12 | 3.901.973.319 | 3 | 1.248.419.925 | 12,00 | 4.066.282.216 | 100,00 | 104,21 | 12,00 | 4.066.282.216 | 0,20 | 19,83 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 75 | 929.191.225 | | | 15 | 185.838.245 | 14,06 | 162.420.000 | 15,01 | 174.271.385 | 100,04 | 93,78 | 15,01 | 174.271.385 | 0,20 | 18,76 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 500.000.000 | | | 2 | 26.880.000 | | 13.600.000 | 100,00 | 39.600.000 | 100,00 | 147,32 | 100,00 | 39.600.000 | 20,00 | 7,92 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 195 | 200.000.000 | | | 39 | 26.880.000 | | 13.600.000 | 39,00 | 39.600.000 | 100,00 | 147,32 | 39,00 | 39.600.000 | 0,20 | 19,80 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 3.060.352.180 | | | 12 | 608.955.958 | 60 | 297.598.051 | 111,20 | 654.717.087 | 51,15 | 107,51 | 111,20 | 654.717.087 | 22,24 | 21,39 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 20 | 5.000.000 | | | 4 | 998.592 | | - | 4,00 | 948.212 | 100,00 | 94,95 | 4,00 | 948.212 | 0,20 | 18,96 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 300 | 250.000.000 | | | 60 | 49.981.611 | 32,67 | 43.499.125 | 60,00 | 66.137.712 | 100,00 | 132,32 | 60,00 | 66.137.712 | 0,20 | 26,46 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 130 | 132.500.000 | | | 26 | 26.340.055 | 10,22 | 6.739.294 | 26,00 | 22.837.688 | 99,98 | 86,70 | 26,00 | 22.837.688 | 0,20 | 17,24 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 25 | 135.000.000 | | | 5 | 30.495.700 | 3,06 | 5.241.550 | 5,00 | 17.143.650 | 100,00 | 56,22 | 5,00 | 17.143.650 | 0,20 | 12,70 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 30 | 150.000.000 | | | 6 | 7.920.000 | | - | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | BAPPEDALITBANG |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 185 | 2.237.852.180 | | | 37 | 493.220.000 | 14,1 | 242.118.082 | 37,00 | 547.649.825 | 100,00 | 111,04 | 37,00 | 547.649.825 | 0,20 | 24,47 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit | 45 | 150.000.000 | | | 9 | 44.877.108 | | 69.614.000 | 100,00 | 113.214.000 | 100,00 | 252,28 | 100,00 | 113.214.000 | 20,00 | 75,48 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 30 | 70.000.000 | | | 6 | 9.809.866 | | 32.800.000 | 6,00 | 42.400.000 | 100,00 | 432,22 | 6,00 | 42.400.000 | 0,20 | 60,57 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 15 | 80.000.000 | | | 3 | 35.067.242 | | 36.814.000 | 3,00 | 70.814.000 | 100,00 | 201,94 | 3,00 | 70.814.000 | 0,20 | 88,52 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | 12 | 664.363.550 | | | 12 | 138.771.780 | | 26.581.600 | 63,23 | 115.515.404 | 63,23 | 83,24 | 63,23 | 115.515.404 | 12,65 | 17,39 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Telepon, Internet, Air dan Listrik | bulan | 60 | 81.000.000 | | | 12 | 16.200.000 | 6,31 | 3.961.600 | 12,00 | 11.679.224 | 99,98 | 72,09 | 12,00 | 11.679.224 | 0,20 | 14,42 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor | unit | 150 | 110.000.000 | | | 30 | 16.470.000 | 6,6 | | 30,00 | 12.914.400 | 100,00 | 78,41 | 30,00 | 12.914.400 | 0,20 | 11,74 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honorarium Pegawai Tidak Tetap | Orang Bul | 420 | 473.363.550 | | | 84 | 106.101.780 | 29,99 | 22.620.000 | 84,00 | 90.921.780 | 100,00 | 85,69 | 84,00 | 90.921.780 | 0,20 | 19,21 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Unit | 19 | 635.636.450 | | | 3 | 89.071.725 | | 31.001.840 | 50,00 | 75.028.983 | 100,00 | 84,23 | 50,00 | 75.028.983 | 10,00 | 11,80 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan | unit | 15 | 435.636.450 | | | 3 | 89.071.725 | 1,5 | 31.001.840 | 3,00 | 75.028.983 | 100,00 | 84,23 | 3,00 | 75.028.983 | 0,20 | 17,22 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah | % | 100 | 7.166.921.825 | | | 20 | 1.196.123.565 | | 618.094.799 | 68,75 | 921.022.199 | 68,75 | 77,00 | 68,75 | 921.022.199 | 13,75 | 12,85 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Dokumen Perencanaan dan Pendanaan | % | 100 | 5.103.023.850 | | | 20 | 833.343.970 | | 374.283.450 | 98,75 | 612.874.945 | 100,00 | 73,54 | 98,75 | 612.874.945 | 19,75 | 12,01 | BAPPEDALITBANG |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah orang kali | orang | 1000 | 182.435.195 | | | 200 | 36.487.039 | | - | 200,00 | 17.021.420 | 100,00 | 46,65 | 200,00 | 17.021.420 | 0,20 | 9,33 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Jumlah orang kali | orang | 1000 | 214.750.000 | | | 200 | 42.950.000 | | - | 200,00 | 26.308.900 | 100,00 | 61,25 | 200,00 | 26.308.900 | 0,20 | 12,25 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah orang kali | orang | 1250 | 715.838.655 | | | 250 | 143.167.731 | | - | 250,00 | 109.243.875 | 100,00 | 76,30 | 250,00 | 109.243.875 | 0,20 | 15,26 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan | dokumen | 5 | 3.990.000.000 | | | 1 | 610.739.200 | 0,05 | 374.283.450 | 1,00 | 460.300.750 | 100,00 | 75,37 | 1,00 | 460.300.750 | 0,20 | 11,54 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 02 | 2.02 | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | % | 100 | 1.045.954.575 | | | 20 | 209.190.915 | | 132.154.900 | 75,00 | 194.141.805 | 75,00 | 92,81 | 75,00 | 194.141.805 | 15,00 | 18,56 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah aplikasi/sistem SIPD | aplikasi/sis | 5 | 1.045.954.575 | | | 1 | 209.190.915 | 0,25 | 132.154.900 | 1,00 | 194.141.805 | 100,00 | 92,81 | 1,00 | 194.141.805 | 0,20 | 18,56 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 02 | 2.03 | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah | Tersusunnya Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah | % | 100 | 1.017.943.400 | | | 20 | 153.588.680 | | 111.656.449 | 32,50 | 114.005.449 | 32,50 | 74,23 | 32,50 | 114.005.449 | 6,50 | 11,20 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan | dokumen | 20 | 1.017.943.400 | | | 4 | 153.588.680 | 2,7 | 111.656.449 | 4,00 | 114.005.449 | 100,00 | 74,23 | 4,00 | 114.005.449 | 0,20 | 11,20 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 03 | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah | % | 100 | 5.355.153.520 | | | 20 | 1.355.305.369 | 17 | 961.295.486 | 65,77 | 1.451.012.203 | 328,86 | 107,06 | 65,77 | 1.451.012.203 | 13,15 | 27,10 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | % | 100 | 1.010.000.000 | | | 20 | 282.000.000 | 2 | 300.313.340 | 76,50 | 445.311.051 | 75,00 | 157,91 | 76,50 | 445.311.051 | 15,30 | 44,09 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | Draf RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan | dokumen | 15 | 110.000.000 | | | 3 | 62.000.000 | 0,75 | 50.119.400 | 3,00 | 79.206.582 | 100,00 | 127,75 | 3,00 | 79.206.582 | 0,20 | 72,01 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen Perencanaan | dokumen | 15 | 900.000.000 | | | 3 | 220.000.000 | 0,75 | 250.193.940 | 3,00 | 366.104.469 | 100,00 | 166,41 | 3,00 | 366.104.469 | 0,20 | 40,68 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 03 | 2.02 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | % | 100 | 3.004.903.520 | | | 20 | 655.255.369 | 5 | 436.377.596 | 59,15 | 626.462.151 | 53,67 | 95,61 | 59,15 | 626.462.151 | 11,83 | 20,85 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Draf RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Perekonomian | Dokumen | 15 | 1.582.524.495 | | | 3 | 316.504.899 | 1,05 | 258.955.502 | 3,00 | 310.252.207 | 100,00 | 98,02 | 3,00 | 310.252.207 | 0,20 | 19,60 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | kali | 15 | 130.000.000 | | | 3 | 26.000.000 | 1,95 | 5.112.785 | 3,00 | 12.212.785 | 100,00 | 46,97 | 3,00 | 12.212.785 | 0,20 | 9,39 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | kali | 5 | 542.379.025 | | | 1 | 108.475.805 | 0,2 | 28.212.416 | 1,00 | 116.618.936 | 100,00 | 107,51 | 1,00 | 116.618.936 | 0,20 | 21,50 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Draf RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang SDA | Dokumen | 15 | 250.000.000 | | | 3 | 50.000.000 | 1,05 | 24.083.880 | 3,00 | 43.652.210 | 100,00 | 87,30 | 3,00 | 43.652.210 | 0,20 | 17,46 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | kali | 5 | 250.000.000 | | | 1 | 57.184.665 | 0,65 | 3.374.200 | 1,00 | 16.874.200 | 100,00 | 29,51 | 1,00 | 16.874.200 | 0,20 | 6,75 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | kali | 5 | 250.000.000 | | | 1 | 97.090.000 | 0,58 | 116.638.813 | 1,00 | 126.851.813 | 100,00 | 130,65 | 1,00 | 126.851.813 | 0,20 | 50,74 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 03 | 2.03 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | % | 100 | 1.340.250.000 | | | 20 | 418.050.000 | 10 | 224.604.550 | 77,25 | 379.239.001 | 67,50 | 90,72 | 77,25 | 379.239.001 | 15,45 | 28,30 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | dokumen | 15 | 335.822.450 | | | 3 | 117.164.490 | 0,9 | 97.960.967 | 3,00 | 142.401.150 | 100,00 | 121,54 | 3,00 | 142.401.150 | 0,20 | 42,40 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 05 | 2.03 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | kali | 60 | 504.427.550 | | | 12 | 100.885.510 | 3,6 | 55.075.500 | 12,00 | 94.133.438 | 100,00 | 93,31 | 12,00 | 94.133.438 | 0,20 | 18,66 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 05 | 2.03 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 15 | 250.000.000 | | | 3 | 100.000.000 | 1,05 | 55.531.083 | 3,00 | 67.815.983 | 100,00 | 67,82 | 3,00 | 67.815.983 | 0,20 | 27,13 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 01 | 05 | 2.03 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Bulan | 60 | 250.000.000 | | | 12 | 100.000.000 | 4,2 | 16.037.000 | 12,00 | 74.888.430 | 100,00 | 74,89 | 12,00 | 74.888.430 | 0,20 | 29,96 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 05 | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | 460.386.014 | 50,94 | 556.008.634 | 50,94 | 70,60 | 50,94 | 556.008.634 | 10,19 | 14,12 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Indeks Daya Saing Daerah | indeks | 17,5 | 3.937.998.760 | | | 3 | 787.599.752 | - | 460.386.014 | 50,94 | 556.008.634 | 50,94 | 70,60 | 50,94 | 556.008.634 | 10,19 | 14,12 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 05 | 02 | 2.01 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Regulasi | Kebijakan | 21 | 682.681.400 | | | 4 | 102.773.325 | | 33.596.235 | 75,00 | 58.509.330 | 75,00 | 56,93 | 75,00 | 58.509.330 | 15,00 | 8,57 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 05 | 02 | 2.01 | 12 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Dokumen | 5 | 248.072.560 | | | 1 | 102.773.325 | 25 | 33.596.235 | 25,75 | 58.509.330 | 2575,00 | 56,93 | 25,75 | 58.509.330 | 5,15 | 23,59 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 05 | 02 | 2.02 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Jumlah Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Kebijakan | 13 | 375.000.000 | | | 2 | 75.000.000 | | 85.688.360 | 60,00 | 106.159.180 | 60,00 | 141,55 | 60,00 | 106.159.180 | 12,00 | 28,31 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 05 | 02 | 2.02 | 05 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Dokumen | 5 | 175.000.000 | | | 1 | 75.000.000 | 0,4 | 85.688.360 | 1,00 | 106.159.180 | 100,00 | 141,55 | 1,00 | 106.159.180 | 0,20 | 60,66 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 05 | 02 | 2.03 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah Kebijakan | Kebijakan | 21 | 1.250.000.000 | | | 4 | 222.852.367 | | 122.808.980 | 50,00 | 132.073.155 | 50,00 | 59,26 | 50,00 | 132.073.155 | 10,00 | 10,57 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 05 | 02 | 2.03 | 13 | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Dokumen | 5 | 450.000.000 | | | 1 | 222.852.367 | 0,5 | 122.808.980 | 1,00 | 132.073.155 | 100,00 | 59,26 | 1,00 | 132.073.155 | 0,20 | 29,35 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 05 | 02 | 2.04 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | IGA Kabupaten Karo | Skor | 4300 | 1.630.317.360 | | | 860 | 386.974.060 | | 218.292.439 | 18,75 | 259.266.969 | 18,75 | 67,00 | 18,75 | 259.266.969 | 3,75 | 15,90 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 05 | 02 | 2.04 | 01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Dokumen | 5 | 1.405.317.360 | | | 1 | 315.244.060 | 0,25 | 218.292.439 | 1,00 | 259.266.969 | 100,00 | 82,24 | 1,00 | 259.266.969 | 0,20 | 18,45 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 05 | 02 | 2.04 | 03 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Penyelenggaraan Diseminasi Hasil Kelitbangan Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | orang kali | 750 | 75.000.000 | | | 150 | 23.910.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 05 | 02 | 2.04 | 04 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan | orang kali | 750 | 75.000.000 | | | 150 | 23.910.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | BAPPEDALITBANG |
| 24 | | 5 | 05 | 02 | 2.04 | 05 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah HAKI yang difasilitasi | HAKI | 50 | 75.000.000 | | | 10 | 23.910.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | BAPPEDALITBANG |
| 25 | | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BKAD |
| 25 | | | | | | | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | | | | | 285.838.436.361 | | 84.859.542.787 | 3.998 | 286.415.258.531 | 0,00 | 399,90 | 3.997,91 | 286.415.258.531 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | | | 3.384.855.207 | | 2.183.109.074 | 72 | 4.876.045.721,00 | 0,00 | 144,05 | 72,50 | 4.876.045.721,00 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Terlaksananya Evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | | | | 25.738.000 | | 3.348.000 | - | 10.368.000 | 0,00 | 40,28 | 0,00 | 10.368.000 | 0,00 | 0,00 | BKAD |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | | 6 | 02 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | pertemuan | 20 | 128.690.000 | 137 | 13.438.000 | 4 | 25.738.000 | 2 | 3.348.000 | 3 | 10.368.000 | 75,00 | 40,28 | 140,00 | 23.806.000 | 700,00 | 18,50 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | 2.869.626.612 | 132 | 1.546.280.281 | 157 | 3.908.630.599 | 0,00 | 136,21 | 157,00 | 3.908.630.599,00 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | gaji dan tunjangan ASN | Bulan | 60 | 25.531.654.453 | 41 | 5.105.572.561 | 14 | 2.749.376.612 | 4 | 1.159.320.281 | 14 | 3.521.670.599 | 100,00 | 128,09 | 55,00 | 8.627.243.160 | 91,67 | 33,79 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Pengelola Keuangan yang Dibayar | 13 orang | 59 | 1.434.550.000 | 168 | 328.980.000 | 84 | 120.250.000 | 128 | 386.960.000 | 128 | 386.960.000 | 152,38 | 321,80 | 296,00 | 715.940.000 | 501,69 | 49,91 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | 15.000.000 | 82 | 49.528.000 | 82 | 49.528.000 | 0,00 | 330,19 | 82,00 | 49.528.000 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Mesin Absensi yang Ada | Unit | 1 | 18.000.000 | 0 | 0 | | 0 | | | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas beserta Atributnya | Stel | 340 | 271.000.000 | 73 | 54.750.000 | 20 | 15.000.000 | 82 | 49.528.000 | 82 | 49.528.000 | 410,00 | 330,19 | 155,00 | 104.278.000 | 45,59 | 38,48 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum dan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum | | | | | | | 169.150.595 | 158 | 374.861.994 | 194 | 504.868.511 | 0,00 | 298,47 | 194,38 | 504.868.511,00 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Unit | 17 | 1.020.321.914 | 13 | 204.754.181 | 62 | 36.628.595 | 6 | 221.780.586 | 76 | 258.103.081 | 122,58 | 704,65 | 89,00 | 462.857.262 | 523,53 | 45,36 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan | jenis | 40 | 406.775.059 | 9 | 46.829.875 | 4 | 30.350.000 | 3 | 19.823.908 | 7 | 39.333.658 | 175,00 | 129,60 | 16,00 | 86.163.533 | 40,00 | 21,18 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Perjalanan Dinas | oh | 1.070 | 1.710.860.000 | 187 | 158.474.897 | 74 | 102.172.000 | 149 | 133.257.500 | 245 | 207.431.772 | 331,08 | 203,02 | 432,00 | 365.906.669 | 40,37 | 21,39 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 0 | | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Unit | 5 | 175.000.000 | 0 | 0 | | 0 | | | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah | | | | | | | | 249.670.000 | 62 | 119.459.188 | 73 | 298.198.659 | 0,00 | 119,44 | 73,11 | 298.198.659,00 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Biaya Jasa Komunikasi yang Dibayarkan | bulan | 60 | 81.000.000 | 12 | 14.259.572 | 12 | 9.000.000 | 6 | 5.163.088 | 12 | 11.862.559 | 100,00 | 131,81 | 24,00 | 26.122.131 | 40,00 | 32,25 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diperbaiki | unit | 16 | 119.880.000 | 6 | 2.706.978 | 4 | 2.840.000 | 6 | 2.776.100 | 6 | 2.776.100 | 150,00 | 97,75 | 12,00 | 5.483.078 | 75,00 | 4,57 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor | Jumlah Pegawai Tidak Tetap | orang | 162 | 2.889.350.000 | 406 | 604.870.000 | 120 | 237.830.000 | 50 | 111.520.000 | 168 | 283.560.000 | 140,00 | 119,23 | 574,00 | 888.430.000 | 354,32 | 30,75 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 55.670.000 | 4 | 89.631.611 | 4 | 104.451.952 | 0,00 | 187,63 | 4,00 | 104.451.952 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendar | Jumlah Unit Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Pejabat yang Dipelihara | unit | 10 | 412.230.000 | 8 | 29.635.932 | 2 | 55.670.000 | 4 | 89.631.611 | 5 | 104.451.952 | 250,00 | 187,63 | 13,00 | 134.087.884 | 130,00 | 32,53 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | | | | | | | 281.903.752.559 | | 81.867.429.173 | 3.921 | 280.679.925.800 | 0,00 | 99,57 | 3.921,42 | 280.679.925.800,00 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Derah | | | | | | | 2.053.504.874 | 14 | 1.265.210.056 | 14 | 1.379.913.746 | 0,00 | 67,20 | 14,00 | 1.379.913.746,00 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | Dokumen | 10 | 1.002.242.870 | 2 | 105.676.869 | 2 | 200.448.574 | 2 | 126.625.100 | 2 | 141.039.990 | 100,00 | 70,36 | 4,00 | 246.716.859 | 40,00 | 24,62 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | Dokumen | 10 | 984.492.750 | 2 | 112.084.870 | 2 | 196.898.550 | 2 | 128.004.790 | 2 | 128.004.790 | 100,00 | 65,01 | 4,00 | 240.089.660 | 40,00 | 24,39 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 10 | 849.460.000 | 2 | 71.500.000 | 2 | 169.892.000 | 2 | 48.860.000 | 2 | 48.860.000 | 100,00 | 28,76 | 4,00 | 120.360.000 | 40,00 | 14,17 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 10 | 849.460.000 | 2 | 167.700.000 | 2 | 169.892.000 | 2 | 130.400.000 | 2 | 130.400.000 | 100,00 | 76,75 | 4,00 | 298.100.000 | 40,00 | 35,09 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 07 | Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kep | Jumalah Dokumen Peraturan Kepala Daerah tetang Penjabaran APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | peraturan | 5 | 2.472.005.000 | 1 | 344.398.398 | 1 | 494.401.000 | 1 | 318.527.994 | 1 | 418.816.794 | 100,00 | 84,71 | 2,00 | 763.215.192 | 40,00 | 30,87 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan pe | Jumalah Dokumen Peraturan Kepala Daerah tetang Penjabaran Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | peraturan | 5 | 3.662.263.750 | 1 | 350.613.400 | 1 | 797.972.750 | 1 | 499.767.422 | 1 | 499.767.422 | 100,00 | 62,63 | 2,00 | 850.380.822 | 40,00 | 23,22 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | peraturan | 20 | 203.055.720 | 2 | 80.328.525 | 4 | 24.000.000 | 4 | 13.024.750 | 4 | 13.024.750 | 100,00 | 54,27 | 6,00 | 93.353.275 | 30,00 | 45,97 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 13 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran DaerahPemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Pembinaan | OPD | 240 | 327.600.000 | 0 | 0 | | 0 | - | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | | | | | 226.185.890 | 3.393 | 229.857.735 | 3.393 | 285.349.085 | 0,00 | 126,16 | 3.393,00 | 285.349.085,00 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Kas Daerah yang Dikelola | Dokumen | 40.000 | 835.999.600 | 24 | 168.387.955 | 8.000 | 159.999.600 | 3.389 | 140.976.620 | 5.409 | 191.173.570 | 67,61 | 119,48 | 5.433,00 | 359.561.525 | 13,58 | 43,01 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, monitoring dan Evaluasi | Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | laporan | 60 | 330.931.450 | 12 | 49.691.975 | 12 | 66.186.290 | 4 | 88.881.115 | 12 | 94.175.515 | 100,00 | 142,29 | 24,00 | 143.867.490 | 40,00 | 43,47 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pe | Jumlah Laporan Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait | Laporan | 92 | 352.000.000 | 0 | 0 | | 0 | | | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Pembinaan | Kegiatan/S | 4 | 848.000.000 | 0 | 0 | | 0 | | | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | | | | | 330.521.955 | 1 | 260.785.110 | 1 | 319.022.321 | 0,00 | 96,52 | 1,00 | 319.022.321,00 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pemb | Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan -LO dan Beban | Dokumen | 4 | 570.000.000 | 0 | 0 | | 0 | | | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 03 | Koordonasi Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bula | Jumlah Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang Dikoordinasikan | Laporan | 4 | 570.000.000 | 0 | 0 | | 0 | | | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerinta | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Dikonsolidasikan | Laporan | 10 | 1.290.694.155 | 2 | 213.780.680 | 2 | 175.694.155 | 1 | 168.450.000 | 2 | 202.763.360 | 100,00 | 115,41 | 4,00 | 416.544.040 | 40,00 | 32,27 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung | Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawban Pelaksanaan APBD Kabupaten yang Disusun | Peraturan | 10 | 1.394.827.800 | 2 | 158.059.147 | 2 | 154.827.800 | | 92.335.110 | 2 | 116.258.961 | 100,00 | 75,09 | 4,00 | 274.318.108 | 40,00 | 19,67 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerin | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Disusun | Dokumen | 4 | 775.000.000 | 0 | 0 | | 0 | | | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabup | Jumlah Peserta Pembinaan | Orang | 4 | 1.010.000.000 | 0 | 0 | | 0 | | | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.04 | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | | 279.293.539.840 | 513 | 80.111.576.272 | 513 | 278.695.640.648 | 0,00 | 99,79 | 513,42 | 278.695.640.648,00 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah bantuan Keuagan yang Disalurkan | Desa | 259 | 1.353.847.539.000 | 1 | 269.965.364.016 | 1.036 | 259.654.482.000 | 254 | 75.972.062.236 | 1.296 | 259.446.456.770 | 125,10 | 99,92 | 1.297,00 | 529.411.820.786 | 500,77 | 39,10 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Dana Darurat dan mendesak yang Dikelola | Kegiatan | 4 | 13.000.000.000 | 1 | 340.310.000 | 4 | 11.360.029.768 | | | 1 | 10.970.155.806 | 25,00 | 96,57 | 2,00 | 11.310.465.806 | 50,00 | 87,00 | BKAD |
| 25 | | | | | | | - Belanja Tidak Terduga | | | | | | | | | | | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Dana Bagi Hasil Kabupaten yang Dikelola | Desa | 259 | 32.858.615.100 | 1 | 5.231.412.775 | 518 | 8.279.028.072 | 259 | 4.139.514.036 | 518 | 8.279.028.072 | 100,00 | 100,00 | 519,00 | 13.510.440.847 | 200,39 | 41,12 | BKAD |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | | 5 | 02 | 03 | | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | | | | | | | 549.828.595 | | 809.004.540 | 4 | 859.287.010 | 0,00 | 156,28 | 4,00 | 859.287.010,00 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | 549.828.595 | 4 | 809.004.540 | 4 | 859.287.010 | 150,00 | 659,01 | 264,00 | 1.617.634.585 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Jumlah Standar Harga yang Tersusun | dokumen | 4 | 103.819.650 | 0 | 0 | 4 | 20.763.930 | 2 | 70.886.750 | 2 | 72.777.465 | 50,00 | 350,50 | 2,00 | 72.777.465 | 50,00 | 70,10 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang bersertifikat | sertifikat | 700 | 1.355.621.615 | 248 | 578.437.175 | 200 | 392.073.035 | | 548.605.340 | - | 559.305.340 | 0,00 | 142,65 | 248,00 | 1.137.742.515 | 35,43 | 83,93 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang terinventarisir | Laporan | 1 | 750.000 | | | | 0 | | | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun | laporan | 10 | 684.958.150 | 12 | 179.910.400 | 2 | 136.991.630 | 2 | 189.512.450 | 2 | 227.204.205 | 100,00 | 165,85 | 14,00 | 407.114.605 | 140,00 | 59,44 | BKAD |
| 25 | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Pembinaan | Orang | 60 | 300.000.000 | 0 | 0 | | 0 | | | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | BKAD |
| 26 | | | | | | | Badan Pendapatan Daerah | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | - | | | |
| 26 | | 5 | | | | | Unsur Penunjang Urusan Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | 5 | 02 | | | | Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | 5 | 02 | | | | BAPENDA | | | | 30.887.431.681 | | 1.343.022.599 | | 5.502.661.882 | | 3.784.557.270 | | 5.636.402.397 | 0 | 102,43 | - | 6.979.424.996 | 0 | 22,60 | BAPENDA |
| 26 | ya Aparatur Dan Sara | 5 | 02 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indek | 83 | 21.365.067.492 | - | - | 83 | 3.363.616.624 | | 1.937.010.259 | - | 3.482.731.433 | - | 103,54 | - | 3.482.731.433 | - | 16,30 | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah | Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Bulan | 60 | 102.952.000 | - | - | | - | | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Pertemuan | 16 | 102.952.000 | - | - | - | - | | | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Bulan | 60 | 14.710.788.055 | - | - | 12 | 2.665.962.929 | 14 | 967.793.334 | 23 | 2.172.052.718 | 191,67 | 81,47 | 23,00 | 2.172.052.718 | 38,33 | 14,77 | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | gaji dan tunjangan ASN | Bulan | 60 | 13.508.163.055 | - | - | 12 | 2.577.637.929 | 5 | 817.363.334 | 14 | 1.990.902.718 | 116,67 | 77,24 | 14,00 | 1.990.902.718 | 23,33 | 14,74 | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | PelaksanaanPenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Honorarium Pengelola Keuangan | Orang | 58 | 1.202.625.000 | - | - | 8 | 88.325.000 | 9 | 150.430.000 | 12 | 181.150.000 | 150,00 | 205,09 | 12,00 | 181.150.000 | 20,69 | 15,06 | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bulan | 60 | 351.700.000 | - | - | 12 | 23.700.000 | 64 | 53.050.000 | 67 | 53.050.000 | 558,33 | 223,84 | 67,00 | 53.050.000 | 111,67 | 15,08 | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai | Jumlah mesin absensi yang ada | Unit | 2 | 28.000.000 | - | - | 1 | 10.000.000 | 1 | 5.800.000 | 1 | 5.800.000 | 100,00 | 58,00 | 1,00 | 5.800.000 | 50,00 | 20,71 | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas beserta Atributnya | Stel | 432 | 323.700.000 | - | - | 18 | 13.700.000 | 63 | 47.250.000 | 63 | 47.250.000 | 350,00 | 344,89 | 63,00 | 47.250.000 | 14,58 | 14,60 | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bulan | 60 | 2.470.660.683 | - | - | 12 | 180.013.695 | 171 | 614.936.900 | 225 | 715.271.485 | 1.875,00 | 397,34 | 225,00 | 715.271.485 | 375,00 | 28,95 | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | peralatan dan perlengkapan kantor | Jenis | 15 | 745.047.183 | - | - | 7 | 36.628.595 | 10 | 460.471.100 | 17 | 493.686.335 | 242,86 | 1.347,82 | 17,00 | 493.686.335 | 113,33 | 66,26 | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | barang cetakan dan penggandaan | Jenis | 45 | 216.925.500 | - | - | 9 | 43.385.100 | 5 | 50.412.600 | 13 | 92.789.150 | 144,44 | 213,87 | 13,00 | 92.789.150 | 28,89 | 42,77 | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Perjalanan dinas | Ok | 601 | 1.508.688.000 | - | - | 77 | 100.000.000 | 156 | 104.053.200 | 192 | 128.796.000 | 249,35 | 128,80 | 192,00 | 128.796.000 | 31,95 | 8,54 | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 01 | 2,1 | | Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 3 | 325.778.160 | - | - | - | - | - | 120.138.000 | - | 120.138.000 | 0 | 0 | - | 120.138.000 | - | 36,88 | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 01 | 2,1 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Unit | 3 | 325.778.160 | - | - | - | - | | | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | BAPENDA |
| | | | | | | | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | 13 | 120.138.000 | | | | | | | | | |
| 26 | | 5 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Bulan | 60 | 3.013.158.594 | - | - | 12 | 460.470.000 | 27 | 140.458.000 | 40 | 372.188.455 | 333,33 | 80,83 | 40,00 | 372.188.455 | 66,67 | 12,35 | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Telepon, Internet, air dan listrik | Bulan | 60 | 81.000.000 | - | - | 6 | 9.000.000 | 6 | 4.798.000 | 10 | 8.928.455 | 166,67 | 99,21 | 10,00 | 8.928.455 | 16,67 | 11,02 | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | jasa service peralatan dan perlengkapan kerja | Unit | 15 | 143.460.000 | - | - | 3 | 26.420.000 | 2 | 4.300.000 | 2 | 4.300.000 | 66,67 | 16,28 | 2,00 | 4.300.000 | 13,33 | 3,00 | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honorarium pegawai tidak tetap | Orang | 180 | 2.788.698.594 | - | - | 28 | 425.050.000 | 19 | 131.360.000 | 28 | 358.960.000 | 100,89 | 84,45 | 28,25 | 358.960.000 | 15,69 | 12,87 | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | arang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara | Bulan | 60 | 390.030.000 | - | - | 12 | 33.470.000 | 3 | 40.634.025 | 3 | 50.030.775 | 25,00 | 149,48 | 3,00 | 50.030.775 | 5,00 | 12,83 | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Unit | 9 | 390.030.000 | - | - | 1 | 33.470.000 | 3 | 40.634.025 | 3 | 50.030.775 | 300,00 | 149,48 | 3,00 | 50.030.775 | 33,33 | 12,83 | BAPENDA |
| 26 | katan Pendapatan D | 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATANDAERAH | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp. | ########## | 9.522.364.189 | 150.375 | 1.343.022.599 | ####### | 2.139.045.258 | ###### | 1.847.547.011 | ######### | 2.153.670.964 | 156,98 | 100,68 | ########## | 3.496.693.563 | 31,40 | 36,72 | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 04 | 2.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Pajak Daerah yang Dikelola | Rp. | ########## | 9.522.364.189 | 150.375 | 1.343.022.599 | ####### | 2.139.045.258 | ###### | 1.847.547.011 | ######### | 2.153.670.964 | 156,98 | 100,68 | ########## | 3.496.693.563 | 31,40 | 36,72 | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 01 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | Laporan | 60 | 345.936.910 | 12 | 33.487.140 | 12 | 32.936.910 | 3 | 149.342.400 | 12 | 303.296.774 | 100,00 | 920,84 | 24,00 | 336.783.914 | 40,00 | 97,35 | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Objek Pajak Daeah yang Didata dan Terdaftar | WP | 1.500 | 98.557.240 | 250 | 53.182.130 | 300 | 18.859.080 | | 102.911.685 | 250 | 106.142.655 | 83,33 | 562,82 | 500,00 | 159.324.785 | 33,33 | 161,66 | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 06 | Pengeolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan basis data Pajak Daerah | Jumlah SPPT PBB pedesaan dan perkotaan | WP | 740.000 | 2.321.683.495 | 150.000 | 283.854.334 | ###### | 447.296.699 | | 208.974.470 | 150.000 | 357.913.079 | 10,00 | 80,02 | 300.000,00 | 641.767.413 | 40,54 | 27,64 | BAPENDA |
| 26 | | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Penerimaan Pajak Daerah yang Diawasi dan Diperiksa | Rp. | ########## | 6.756.186.544 | 113 | 972.498.995 | ###### | 1.639.952.569 | ##### | 1.386.318.456 | ######## | 1.386.318.456 | 156,99 | 84,53 | ########## | 2.358.817.451 | 31,40 | 34,91 | BAPENDA |
| 27 | | 5 | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | 38.330.374.725 | | | | 5.630.016.725 | | 3.301.040.043 | | 4.659.076.839 | | | | 4.659.076.839 | | | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | | | | KEPEGAWAIAN | | | | 25.835.931.725 | | | | 4.805.016.725 | | 2.496.260.043 | | 4.659.076.839 | | | | 4.659.076.839 | | | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 95 | 18.962.065.025 | | | 83 | 3.515.548.025 | 178 | 1.641.836.280 | 178 | 3.727.943.076 | 214,5 | 106,0 | 178 | 3.727.943.076 | 187,4 | 19,7 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 16.496.680.774 | | | 12 | 3.055.241.305 | 72 | 1.307.935.341 | 130 | 3.258.128.628 | 1083,3 | 106,6 | 130 | 3.258.128.628 | 130,0 | 19,8 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bula | 181 | 15.891.680.774 | | | 12 | 2.930.241.305 | 3 | 1.239.640.641 | 12 | 3.098.603.928 | 100,0 | 105,7 | 12 | 3.098.603.928 | 6,6 | 19,5 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 600 | 605.000.000 | | | 120 | 125.000.000 | 69 | 68.294.700 | 118 | 159.524.700 | 98,3 | 127,6 | 118 | 159.524.700 | 19,7 | 26,4 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 199.709.531 | 0 | 0 | 32 | 20.832.000 | | - | 32 | 20.770.000 | 100,0 | 99,7 | 32 | 20.770.000 | 32,0 | 10,4 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 173 | 114.832.000 | | | 32 | 20.832.000 | | | 32 | 20.770.000 | 100,0 | 99,7 | 32 | 20.770.000 | 18,5 | 18,1 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 480 | 66.118.354 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 240 | 18.759.177 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 1.441.444.720 | | | 201 | 273.444.720 | 106 | 233.662.407 | 177 | 311.725.116 | 88,1 | 114,0 | 177 | 311.725.116 | 177,0 | 21,6 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | paket | 259 | 354.444.720 | | | 53 | 77.444.720 | 15 | 87.762.455 | 53 | 101.684.855 | 100,0 | 131,3 | 53 | 101.684.855 | 20,5 | 28,7 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengggandaan yang Disediakan | paket | 15 | 98.000.000 | | | 3 | 18.000.000 | 1 | 10.277.750 | 3 | 16.467.550 | 100,0 | 91,5 | 3 | 16.467.550 | 20,0 | 16,8 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 96 | 8.000.000 | | | 3 | 0 | | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 717 | 981.000.000 | | | 142 | 178.000.000 | 90 | 135.622.202 | 121 | 193.572.711 | 85,2 | 108,7 | 121 | 193.572.711 | 16,9 | 19,7 | BKPSDM |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | | 5 | 03 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | unit | 1 | 134.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | | 53.600.000 | 0 | 53.600.000 | 0,0 | 178,7 | 0 | 53.600.000 | 0,0 | 40,0 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | unit | 1 | 30.000.000 | | | 1 | 30.000.000 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | unit | 12 | 74.000.000 | | | 0 | 0 | 16 | 53.600.000 | 16 | 53.600.000 | 0,0 | 0,0 | 16 | 53.600.000 | 133,3 | 72,4 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya | unit | 1 | 30.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 452.600.000 | | | 60 | 91.200.000 | 18 | 16.004.582 | 44 | 53.085.382 | 73,3 | 58,2 | 44 | 53.085.382 | 44,0 | 11,7 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | laporan | 60 | 99.600.000 | | | 12 | 19.200.000 | 4 | 5.106.000 | 12 | 12.226.800 | 100,0 | 63,7 | 12 | 12.226.800 | 20,0 | 12,3 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | laporan | 228 | 353.000.000 | | | 48 | 72.000.000 | 14 | 10.898.582 | 32 | 40.858.582 | 66,7 | 56,7 | 32 | 40.858.582 | 14,0 | 11,6 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 237.630.000 | | | 9 | 44.830.000 | | 30.633.950 | 0 | 30.633.950 | 0,0 | 68,3 | 0 | 30.633.950 | 0,0 | 12,9 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | unit | 5 | 204.420.000 | | | 1 | 38.420.000 | 1 | 25.153.950 | 1 | 25.153.950 | 100,0 | 65,5 | 1 | 25.153.950 | 20,0 | 12,3 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | unit | 39 | 33.210.000 | | | 8 | 6.410.000 | 8 | 5.480.000 | 8 | 5.480.000 | 100,0 | 85,5 | 8 | 5.480.000 | 20,5 | 16,5 | BKPSDM |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 224,12 | 104,26 | 63,83 | 621.323.846 | 63,83 | 19,40 | BKPSDM |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 02 | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase Keterisian Jabatan | % | 100 | 6.873.866.700 | | | 100 | 1.289.468.700 | | 854.423.763 | 0 | 931.133.763 | 0,0 | 72,2 | 0 | 931.133.763 | 0,0 | 13,5 | BKPSDM |
| 27 | | | | | | | | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 17 | | | | 11 | | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | BKPSDM |
| 27 | | | | | | | | Jumlah Aparatur yang melakukan Pelanggaran Disiplin Aparatur | % | 15 | | | | 19 | | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 02 | 2.01 | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi<br>Kepegawaian ASN | % | 100 | 2.721.616.700 | | | 100 | 646.408.700 | 2 | 247.210.164 | 5 | 323.920.164 | 5,0 | 25,1 | 5 | 323.920.164 | 5,0 | 11,9 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 04 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN | laporan | 5 | 1.910.000.000 | | | 1 | 444.792.000 | 1 | 198.188.426 | 2 | 206.898.426 | 200,0 | 46,5 | 2 | 206.898.426 | 40,0 | 10,8 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | dokumen | 65 | 95.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | dokumen | 5 | 716.616.700 | | | 1 | 201.616.700 | 1 | 49.021.738 | 3 | 117.021.738 | 300,0 | 58,0 | 3 | 117.021.738 | 60,0 | 16,3 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 02 | 2.02 | | Mutasi dan Promosi ASN | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Mutasi dan Promosi ASN | dokumen | 5.555 | 1.577.000.000 | | | 1.150 | 220.000.000 | 1.041 | 210.617.060 | 1041 | 210.617.060 | 90,5 | 95,7 | 1041 | 21.061.706.000 | 18,7 | 1335,6 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah | dokumen | 775 | 700.000.000 | | | 150 | 200.000.000 | 120 | 195.802.560 | 120 | 195.802.560 | 80,0 | 97,9 | 120 | 195.802.560 | 15,5 | 28,0 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | dokumen | 4780 | 262.000.000 | | | 1000 | 20.000.000 | 921 | 14.814.500 | 921 | 14.814.500 | 92,1 | 74,1 | 921 | 14.814.500 | 19,3 | 5,7 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | dokumen | 70 | 615.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 02 | 2.03 | | Pengembangan Kompetensi ASN | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN | % | 100 | 1.240.000.000 | | | 100 | 231.010.000 | 81 | 221.528.610 | 81 | 221.528.610 | 81,0 | 95,9 | 81 | 221.528.610 | 81,0 | 17,9 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 01 | Peningkatn Kapasitas Kinerja ASN | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | orang | 40 | 35.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan | orang | 220 | 125.000.000 | | | 60 | 46.010.000 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 05 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat | dokumen | 5 | 875.000.000 | | | 1 | 145.000.000 | 1 | 188.740.460 | 1 | 188.740.460 | 100,0 | 130,2 | 1 | 188.740.460 | 20,0 | 21,6 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 13 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | Jumlah ASN Fungsional yang dibina | orang | 450 | 205.000.000 | | | 80 | 40.000.000 | 80 | 32.788.150 | 80 | 32.788.150 | 100,0 | 82,0 | 80 | 32.788.150 | 17,8 | 16,0 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 02 | 2.04 | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | % | 100 | 1.335.250.000 | 0 | | 100 | 192.050.000 | 421 | 175.067.929 | 421 | 175.067.929 | 421,0 | 91,2 | 421 | 175.067.929 | 421,0 | 13,1 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 03 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur<br>Aparatur | dokumen | 5 | 298.100.000 | | | 1 | 80.000.000 | 1 | 47.565.830 | 1 | 47.565.830 | 100,0 | 59,5 | 1 | 47.565.830 | 20,0 | 16,0 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 03 | 2.04 | 04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | Jumlah ASN yang diberikan penghargaan | orang | 282 | 342.100.000 | | | 47 | 67.050.000 | 40 | 83.680.000 | 40 | 83.680.000 | 85,1 | 124,8 | 40 | 83.680.000 | 14,2 | 24,5 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 03 | 2.04 | 07 | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan | orang | 2000 | 100.000.000 | | | 500 | 25.000.000 | 376 | 26.942.850 | 376 | 26.942.850 | 75,2 | 107,8 | 376 | 26.942.850 | 18,8 | 26,9 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 03 | 2.04 | 08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN | laporan | 91 | 325.050.000 | | | 6 | 20.000.000 | 4 | 16.879.249 | 4 | 16.879.249 | 66,7 | 84,4 | 4 | 16.879.249 | 4,4 | 5,2 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 03 | 2.04 | 09 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani | dokumen | 20 | 160.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 03 | 03 | 2.04 | 10 | Evaluasi Disiplin ASN | Jumlah laporan hasil Evaluasi Disiplin ASN | laporan | 85 | 110.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | BKPSDM |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BKPSDM |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 149,4 | 77,0 | 387,0 | 5.445.555.676 | 131,4 | 344,6 | BKPSDM |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 04 | | | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | 12.494.443.000 | | | | 825.000.000 | 153 | 804.780.000 | | | | | | | | | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 04 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 17 | 12.494.443.000 | | | 11 | 825.000.000 | | 804.780.000 | 0 | 804.780.000 | 0,0 | 97,5 | 0 | 804.780.000 | 0,0 | 6,4 | BKPSDM |
| 27 | | | | | | | | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | % | 16,72 | | | | 2,23 | | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 04 | 02 | 2.01 | | Pengembangan Kompetensi Teknis | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pengembangan kompetensi teknis | % | 100 | 205.000.000 | 0 | 0 | 10 | 25.000.000 | | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | BKPSDM |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | | 5 | 04 | 2 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi | orang | 70 | 205.000.000 | | | 10 | 25.000.000 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 04 | 02 | 2.02 | | Sertifikasi, Kelembagaan, PengembanganKompetensi Manajerial dan Fung | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | % | 100 | 12.289.443.000 | 0 | 0 | 52 | 800.000.000 | 153 | 804.780.000 | 153 | 804.780.000 | 294,2 | 100,6 | 153 | 804.780.000 | 153,0 | 6,5 | BKPSDM |
| 27 | | 5 | 04 | 02 | 2.02 | 07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan | Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan | laporan | 524 | 12.289.443.000 | | | 52 | 800.000.000 | 153 | 804.780.000 | 153 | 804.780.000 | 294,2 | 100,6 | 153 | 804.780.000 | 29,2 | 6,5 | BKPSDM |
| | | | | | | | INSPEKTORAT DAERAH | | | | 43.271.270.243 | - | - | | 11.267.974.172 | 2.783 | 4.242.147.341 | | 8.903.746.394 | | | | 8.903.746.394 | | | |
| 28 | | 6 | 1 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN | Meningkatnya Administrasi Perkantoran | 8.164 | | 33.577.721.903 | - | - | 3.759 | 8.109.752.816 | 2.547 | 2.885.756.025 | 2.704 | 6.962.710.078 | 71,9 | 85,9 | 2.704 | 6.962.710.078 | 33,1 | 20,7 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 06 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksanya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 120 | | 28.722.285.084 | | | 50 | 5.413.873.197 | - | 1.718.746.106 | 32 | 5.298.971.273 | 64,1 | 97,9 | 32 | 5.298.971.273 | 26,7 | 18,4 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 06 | 01 | 01 | 2 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 120 | Orang | 28.722.285.084 | | | 42 | 5.290.633.197 | | 1.623.566.106 | 28 | 5.140.021.273 | 66,5 | 97,2 | 28 | 5.140.021.273 | 23,3 | 17,9 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 06 | 01 | 01 | 2 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan | | Orang | | | | 8 | 123.240.000 | | 95.180.000 | 4 | 158.950.000 | - | 129,0 | 4 | 158.950.000 | - | - | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 449 | - | 777.461.000 | - | - | 77 | 739.344.725 | 6 | 213.197.000 | 16 | 399.538.840 | 20,7 | 54,0 | 16 | 399.538.840 | 3,6 | 51,4 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 351 | JUMLAH | 150.675.000 | | | 77 | 739.344.725 | | - | 7 | 66.740.000 | 9,0 | 9,0 | 7 | 66.740.000 | 2,0 | 44,3 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 98 | Kegiatan | 626.786.000 | | | | | 6 | 213.197.000 | | 332.798.840 | | | | 332.798.840 | | 53,1 | |
| 28 | | 6 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7.046 | | 1.201.333.480 | - | - | 3.412 | 1.213.446.094 | 2.472 | 357.198.300 | 2.540 | 531.458.337 | 74,4 | 43,8 | 2.540 | 531.458.337 | 36,0 | 44,2 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 6.148 | JENIS | 432.121.680 | | | 125 | 591.294.283 | 65 | 200.201.000 | 70 | 224.811.000 | 56,2 | 38,0 | 70 | 224.811.000 | 1,1 | 52,0 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 46 | JENIS | 22.120.400 | | | 1.354 | 132.988.261 | 670 | 62.370.000 | 670 | 62.370.000 | 49,5 | 46,9 | 670 | 62.370.000 | 1.456,5 | 282,0 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 10 | JENIS | 45.460.800 | | | 11 | 27.065.950 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 116 | JENIS | 36.630.600 | | | 11 | 14.320.000 | 2 | 750.000 | 4 | 1.800.000 | 32,5 | 12,6 | 4 | 1.800.000 | 3,1 | 4,9 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material | | | | | | 32 | - | | | - | - | - | #DIV/0! | - | - | - | - | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya Makan dan Minum | 540 | kotak | 54.000.000 | | | 1.716 | 51.502.000 | 1.700 | 49.105.000 | 1.700 | 49.105.000 | 99,1 | 95,3 | 1.700 | 49.105.000 | 314,8 | 90,9 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 186 | ORANG | 611.000.000 | | | 163 | 396.275.600 | 35 | 44.772.300 | 96 | 193.372.337 | 59,0 | 48,8 | 96 | 193.372.337 | 51,7 | 31,6 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | - | - | - | 2 | 195.000.000 | 1 | 495.508.031 | 1 | 495.508.031 | - | 254,1 | 1 | 495.508.031 | - | - | INSPEKTORAT |
| | | | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | 1 | 434.900.000 | | | | | | | | | |
| 28 | | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebel | | | | | | 2 | 195.000.000 | 1 | 60.608.031 | 1 | 60.608.031 | - | 31,1 | 1 | 60.608.031 | - | - | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 429 | | 773.574.871 | - | - | 172 | 448.328.800 | 26 | 61.302.963 | 52 | 151.749.972 | 30,2 | 33,8 | 52 | 151.749.972 | 12,1 | 19,6 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komukasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komukasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 166 | JENIS | 87.169.150 | | | 96 | 223.500.000 | 5 | 14.746.959 | 11 | 26.598.067 | 11,1 | 11,9 | 11 | 26.598.067 | 6,4 | 30,5 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 173 | UNIT | 45.180.800 | | | 36 | 70.000.000 | 15 | 23.670.000 | 15 | 23.670.000 | 41,7 | 33,8 | 15 | 23.670.000 | 8,7 | 52,4 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan, Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor, Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran | 90 | ORANG | 641.224.921 | | | 40 | 154.828.800 | 6 | 22.886.004 | 26 | 101.481.905 | 65,8 | 65,5 | 26 | 101.481.905 | 29,2 | 15,8 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 120 | | 2.103.067.468 | - | - | 46 | 99.760.000 | 42 | 39.803.625 | 63 | 85.483.625 | 137,1 | 85,7 | 63 | 85.483.625 | 52,6 | 4,1 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pe | Meningkatnya Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional, Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor, Adanya Perlengkapan Gedung Kantor | 120 | UNIT | 2.103.067.468 | | | 46 | 99.760.000 | 42 | 39.803.625 | 63 | 85.483.625 | 137,1 | 85,7 | 63 | 85.483.625 | 52,6 | 4,1 | INSPEKTORAT |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 4,8 | | | 0,2 | 1,3 | |
| 28 | | 6 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan | 279 | | 6.442.132.193 | - | - | 280 | 2.525.658.011 | 97 | 1.137.833.175 | 139 | 1.722.478.175 | 49,7 | 68,2 | 139 | 1.722.478.175 | 49,9 | 26,7 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Terlaksananya Pengawasan Internal | 265 | | 5.389.808.893 | - | - | 266 | 2.267.198.161 | 91 | 1.040.379.050 | 129 | 1.541.674.050 | 48,4 | 68,0 | 129 | 1.541.674.050 | 48,5 | 28,6 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Meningkatnya Pemeriksaan Reguler Terhadap Seluruh SKPD | 220 | LAPORAN | 4.169.273.893 | | | 110 | 542.494.510 | 55 | 209.261.000 | 59 | 229.141.000 | 53,7 | 42,2 | 59 | 229.141.000 | 26,8 | 5,5 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | 44 | 240.140.000 | 10 | 45.930.000 | 36 | 186.570.000 | - | 77,7 | 36 | 186.570.000 | - | - | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Reviu Laporan Kinerja | terlaksananya Reviu RKA SKPD, terlaksananya Reviu RKPD, terlaksananya Reviu LAKIP | 15 | LAPORAN | 487.500.000 | | | 81 | 439.986.600 | 5 | 42.180.000 | 5 | 42.180.000 | - | 9,6 | 5 | 42.180.000 | 33,3 | 8,7 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Reviu Laporan Keuangan | Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan | 5 | LAPORAN | 162.500.000 | | | 6 | 7.420.000 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Pengawasan Desa | Terlaksanya Pengawasan Desa | 20 | KEGIATAN | 153.025.000 | | | 6 | 478.624.451 | 5 | 345.080.750 | 8 | 566.080.750 | 129,5 | 118,3 | 8 | 566.080.750 | 38,9 | 369,9 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 06 | Kerjasama Pengawasan Internal | Terlaksanya Kerjasama Pengawas Internal | | | | | | 8 | 262.437.600 | 7 | 256.052.300 | 7 | 256.052.300 | 87,5 | 97,6 | 7 | 256.052.300 | - | - | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak L | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 5 | LAPORAN | 417.510.000 | | | 11 | 296.095.000 | 9 | 141.875.000 | 14 | 261.650.000 | 127,9 | 88,4 | 14 | 261.650.000 | 281,4 | 62,7 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 14 | | 1.052.323.300 | - | - | 14 | 258.459.850 | 6 | 97.454.125 | 11 | 180.804.125 | 75,0 | 70,0 | 11 | 180.804.125 | 75,0 | 17,2 | INSPEKTORAT |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Meningkatnya Tindak lanjut hasil temuan pengawasan | 10 | laporan | 944.393.300 | | | 8 | 136.739.850 | 3 | 34.688.125 | 6 | 77.538.125 | 68,8 | 56,7 | 6 | 77.538.125 | 55,1 | 8,2 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Meningkatnya Forkomonev | 4 | KEGIATAN | 107.930.000 | | | 6 | 121.720.000 | 3 | 62.766.000 | 5 | 103.266.000 | 83,3 | 84,8 | 5 | 103.266.000 | 124,9 | 95,7 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 03 | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 1.024 | | 3.251.416.147 | - | - | 245 | 632.563.345 | 139 | 218.558.141 | 139 | 218.558.141 | 56,7 | 34,6 | 139 | 218.558.141 | 13,6 | 6,7 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 03 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengaw | Terlaksananya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan | 408 | | 1.834.001.878 | - | - | 6 | 98.241.245 | 5 | 58.736.250 | 5 | 58.736.250 | 83,3 | 59,8 | 5 | 58.736.250 | 1,2 | 3,2 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | terlaksananyaPeningkatan SPIP Kab. Karo, meningkatnya Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, Meningkatnya Operasionalisasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit | 306 | TAN, pak, orang | 1.133.474.900 | | | 4 | 53.355.625 | 5 | 58.736.250 | 5 | 58.736.250 | 125,0 | 110,1 | 5 | 58.736.250 | 1,6 | 5,2 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan | tersedianya Aplikasi Pengaduan Masyarakat, tersedianya Operasionalisasi Aplikasi Pengaduan Masyarakat, Meningkatnya Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah | 102 | aplikasi, laporan | 700.526.978 | | | 2 | 44.885.620 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 03 | 2.02 | | Pendampingan dan Asistensi | Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi | 616 | | 1.417.414.269 | - | - | 239 | 534.322.100 | 134 | 159.821.891 | 134 | 159.821.891 | 56,1 | 29,9 | 134 | 159.821.891 | 21,8 | 11,3 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif | 110 | KEGIATAN | 656.765.000 | | | 191 | 179.902.100 | 125 | 110.785.891 | 125 | 110.785.891 | 65,4 | 61,6 | 125 | 110.785.891 | 113,6 | 16,9 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokerasi | Meningkatnya TP4D(Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) | 4 | KEGIATAN | 98.300.000 | | | 24 | 148.500.000 | 8 | 17.772.000 | 8 | 17.772.000 | 33,3 | 12,0 | 8 | 17.772.000 | 200,0 | 18,1 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahab dan Pemberan | Meningkatnya Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan | 5 | LAPORAN | 149.574.950 | | | 2 | 194.420.000 | 1 | 31.264.000 | 1 | 31.264.000 | 50,0 | 16,1 | 1 | 31.264.000 | 20,0 | 20,9 | INSPEKTORAT |
| 28 | | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Meningkatnya Saber Pungli, tersedianya SOP dan Kode Etik Pemeriksaan | 497 | orang | 512.774.319 | | | 22 | 11.500.000 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | INSPEKTORAT |
| 29 | | 7 | 01 | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | | | | KECAMATAN BARUSJAHE | | | 100 | 14.546.503.145 | | | 100,0 | 2.799.661.989 | | | 55,53 | 2.312.052.923 | 55,53 | 82,58 | 55,53 | 2.312.052.923 | 55,53 | 15,89 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) | Indeks | 95 | 13.472.297.660 | | | 83 | 2.625.804.553 | 59 | 799.345.306 | 117,37 | 2.291.922.923 | 141,41 | 87,28 | 117,37 | 2.281.751.223 | 123,55 | 16,94 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 12.306.686.175 | | | 100 | 2.414.338.415 | 59 | 743.006.431 | 129,83 | 2.192.656.148 | 129,83 | 90,82 | 129,83 | 2.192.656.148 | 25,97 | 17,82 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bula | 105 | 11.884.613.675 | | | 21 | 2.281.514.095 | 3 | 680.691.431 | 66,00 | 2.096.436.148 | 314,29 | 91,89 | 66,00 | 2.096.436.148 | 62,86 | 17,64 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 422.072.500 | | | 12 | 132.824.320 | 56 | 40.810.000 | 64,00 | 96.220.000 | 533,33 | 72,44 | 64,00 | 96.220.000 | 106,67 | 22,80 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| | | | | | | | Tersedianya jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran | | | | | | | | | 17 | 21.505.000 | | 45.540.000 | | | | | | | | |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 121.746.800 | | | 100 | 20.250.000 | | | 92,59 | 18.750.000 | 92,59 | 92,59 | 92,59 | 18.750.000 | 92,59 | 15,40 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 1 | 20.496.800 | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 135 | 101.250.000 | | | 27 | 20.250.000 | | | 25,00 | 18.750.000 | 92,59 | 92,59 | 25,00 | 18.750.000 | 18,52 | 18,52 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 415.326.355 | | | 100 | 119.152.518 | 0,00 | 21.507.600,00 | 0,00 | 32.262.600 | 0,00 | 27,08 | 0,00 | 22.090.900 | 0,00 | 5,32 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 100 | 11.625.051 | | | 13 | 1.950.113 | | | 13,00 | 1.174.000 | 100,00 | 60,20 | 13,00 | 1.174.000 | 13,00 | 10,10 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| | | | | | | | Tersedianya alat tulis kantor | | | | | | | | | | 2.896.300 | | 10.171.700 | | | | | | | | |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 3077 | 107.494.089 | | | 593 | 61.233.535 | | 3.600.000 | 532,00 | 3.600.000 | 89,71 | 5,88 | 532,00 | 3.600.000 | 17,29 | 3,35 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 420 | 13.438.715 | | | 341 | 10.348.650 | | 1.891.300 | 0,00 | 3.003.300 | 0,00 | 29,02 | 0,00 | 3.003.300 | 0,00 | 22,35 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 6415 | 12.414.500 | | | 1078 | 2.532.220 | | | 1.078,00 | 1.193.600 | 100,00 | 47,14 | 1.078,00 | 1.193.600 | 16,80 | 9,61 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 10.200.000 | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 360 | 260.154.000 | | | 80 | 43.088.000 | | 13.120.000 | 0,00 | 13.120.000 | 0,00 | 30,45 | 0,00 | 13.120.000 | 0,00 | 5,04 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 100 | 111.423.655 | | | 100 | 13.929.320 | | 15.150.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 26 | 59.223.655 | | | 4 | 13.929.320 | | 15.150.000 | 0,00 | 15.150.000 | 0,00 | 108,76 | 0,00 | 15.150.000 | 0,00 | 25,58 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 6 | 52.200.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 261.551.500 | | | 100 | 34.094.300 | 0 | 13.443.400 | 48,07 | 31.439.700 | 48,07 | 92,21 | 48,07 | 31.439.700 | 48,07 | 12,02 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60 | 82.500.000 | | | 12 | 16.500.000 | | 7.368.400 | 8,00 | 15.644.700 | 66,67 | 94,82 | 8,00 | 15.644.700 | 13,33 | 18,96 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 10 | 14.200.000 | | | 2 | 2.840.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 164.851.500 | | | 12 | 14.754.300 | | 6.075.000 | 8,00 | 15.795.000 | 66,67 | 107,05 | 8,00 | 15.795.000 | 13,33 | 9,58 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 255.563.175 | | | 100 | 24.040.000 | 0 | 6.237.875 | 75,00 | 16.814.475 | 75,00 | 69,94 | 75,00 | 16.814.475 | 75,00 | 6,58 | KECAMATAN BARUSJAHE |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 5 | 134.828.815 | | | 1 | 24.040.000 | | 847.375 | 1,00 | 16.814.475 | 75,00 | 69,94 | 1,00 | 16.814.475 | 20,00 | 12,47 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| | | | | | | | Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional | | | | | | | | | | 5.390.500 | | | | | | | | | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 | 120.734.360 | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 95 | 438.007.740 | | | 83 | 74.390.575 | | | 28,37 | 20.130.000 | 34,18 | 27,06 | 28,37 | 20.130.000 | 29,86 | 4,60 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | 100 | 189.107.740 | | | 100 | 50.210.575 | | | 50,00 | 6.150.000 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 6.150.000 | 50,00 | 3,25 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 5 | 66.602.000 | | | 1 | 20.590.000 | | | 1,00 | 6.150.000 | 100,00 | 29,87 | 1,00 | 6.150.000 | 20,00 | 9,23 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5 | 122.505.740 | | | 1 | 29.620.575 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | % | 100 | 120.900.000 | | | 100 | 24.180.000 | | | 50,00 | 13.980.000 | 50,00 | 57,82 | 0,00 | 13.980.000 | 0,00 | 11,56 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 60 | 120.900.000 | | | 12 | 24.180.000 | | | 6,00 | 13.980.000 | 50,00 | 57,82 | 6,00 | 13.980.000 | 10,00 | 11,56 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | % | 100 | 68.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Dokumen | 20 | 40.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta | Unit | 4 | 28.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | % | 100 | 60.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Dokumen | 40 | 20.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 4 | 20.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 4 | 20.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kegiatan | 29 | 151.704.000 | | | 5 | 18.694.500 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dikoordinasikan | Kegiatan | 29 | 121.704.000 | | | 5 | 18.694.500 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | a Kemasya | 20 | 45.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 10 | 76.704.000 | | | 2 | 18.694.500 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 03 | 2.05 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Dokumen | 36 | 30.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 03 | 2.05 | 01 | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Dokumen | 36 | 30.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Perda, Perkada, dan Kegiatan | rkada, dan | 8/8/13 | 141.704.000 | | | 0/0/1 | 17.683.350 | | 39.200.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Kegiatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Kegiatan | 13 | 121.704.000 | | | 1 | 17.683.350 | | 39.200.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 4 | 40.000.000 | | | 0 | 0 | | 32.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Laporan | 5 | 81.704.000 | | | 1 | 17.683.350 | | 7.200.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Perda dan Perkada yang dikoordinasikan Penerapan dan Penegakannya | a dan Per | 8 | 20.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan | 4 | 20.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | Urusan | 5 | 162.589.190 | | | 1 | 32.948.900 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan | urusan | 5 | 162.589.190 | | | 1 | 32.948.900 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 750 | 162.589.190 | | | 150 | 32.948.900 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi | erintahan | 95 | 180.200.555 | | | 19 | 30.140.111 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Pengawasaannya | erintahan | 95 | 180.200.555 | | | 19 | 30.140.111 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Dokumen | 190 | 71.450.555 | | | 38 | 15.890.111 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 12 | 24.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 29 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 190 | 84.750.000 | | | 38 | 14.250.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 30 | | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | | | | KECAMATAN BERASTAGI | | | | 60.100.954.226 | | | | 8.191.603.180 | 981 | 2.325.983.940 | 1.269,00 | 5.408.204.747 | 0,00 | 66,02 | 0,00 | 5.408.204.747 | 0,00 | 9,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | indeks | 95 | 39.823.785.461 | | | 83 | 5.269.308.287 | 972 | 2.182.715.440 | 1155,00 | 4.910.466.905 | 13,92 | 0,93 | 1.155 | 4.910.466.905 | 1.215,79 | 12,33 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | bulan | 12 | 38.494.267.239 | | | 12 | 5.172.848.210 | 39 | 1.815.843.210 | 160,00 | 4.446.816.685 | 1.333,33 | 85,96 | 0,00 | 4.446.816.685 | 0,00 | 11,55 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bul | 36 | 33.511.818.375 | | | 180 | 4.503.308.210 | 36 | 1.449.483.210 | 144,00 | 3.628.466.685 | 80,00 | 80,57 | 3,00 | 3.628.466.685 | 8,33 | 10,83 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 4.982.448.864 | | | 12 | 669.540.000 | 3 | 366.360.000 | 16,00 | 818.350.000 | 133,33 | 122,23 | 3,00 | 818.350.000 | 5,00 | 16,42 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 127.300.000 | | | | 0 | 46 | 34.500.000 | 46,00 | 34.500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34500000 | 0,00 | 27,10 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | unit | 5 | 18.000.000 | | | | | | - | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | paket | 225 | 109.300.000 | | | | | 46 | 34.500.000 | 46,00 | 34.500.000 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 34500000 | 20,44 | 31,56 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 513.421.887 | | | 12 | 53.187.452 | 855 | 72.889.032 | 897,00 | 150.407.313 | 7.475,00 | 282,79 | 0,00 | 150.407.313 | 0,00 | 29,30 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | paket | 5 | 11.783.335 | | | 1 | 1.180.302 | 5 | 1.871.984 | 6,00 | 3.052.155 | 600,00 | 258,59 | 6,00 | 3.052.155 | 120,00 | 25,90 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan | paket | 25 | 238.706.683 | | | 5 | 26.702.145 | 41 | 10.181.709 | 51,00 | 65.892.464 | 1.020,00 | 246,77 | 51,00 | 65.892.464 | 204,00 | 27,60 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | paket | 15 | 39.287.069 | | | 3 | 5.145.005 | 22 | 3.462.119 | 25,00 | 10.759.474 | 833,33 | 209,12 | 25,00 | 10.759.474 | 166,67 | 27,39 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengggandaan yang disediakan | paket | 5 | 22.324.800 | | | 1 | 3.000.000 | 2 | 4.145.500 | 4,00 | 7.145.500 | 400,00 | 238,18 | 4,00 | 7.145.500 | 80,00 | 32,01 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | Dokumen | 1500 | 15.120.000 | | | 300 | 2.160.000 | 365 | 1.080.000 | 366,00 | 2.160.000 | 122,00 | 100,00 | 366,00 | 2160000 | 24,40 | 14,29 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | laporan | 60 | | | | 12 | | 12 | 3.250.000 | 12,00 | 3.250.000 | 100,00 | 0,00 | 12,00 | 3250000 | 20,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 250 | 186.200.000 | | | 50 | 15.000.000 | 408 | 48.897.720 | 433,00 | 58.147.720 | 866,00 | 387,65 | 433,00 | 58.147.720 | 173,20 | 31,23 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit | 45 | 131.644.935 | | | 9 | 9.627.625 | 6 | 87.924.526 | 6,00 | 87.924.526 | 66,67 | 913,25 | 2,00 | 87924526 | 4,44 | 66,79 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | paket | 25 | 126.644.935 | | | 5 | 9.627.625 | 3 | 57.452.126 | 3,00 | 57.452.126 | 60,00 | 596,74 | 3,00 | 57452126 | 12,00 | 45,36 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan | unit | 35 | 5.000.000 | | | | | 3 | 30.472.400 | 3,00 | 30.472.400 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 30472400 | 8,57 | 609,45 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | 12 | 217.451.400 | | | 12 | 31.145.000 | 13 | 16.838.672 | 33,00 | 36.098.381 | 275,00 | 115,90 | 0,00 | 36.098.381 | 0,00 | 16,60 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan | laporan | 180 | 101.487.000 | | | 36 | 13.015.000 | 5 | 6.257.672 | 14,00 | 14.192.381 | 38,89 | 109,05 | 14,00 | 14.192.381 | 7,78 | 13,98 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | laporan | 25 | 40.064.400 | | | 5 | 3.550.000 | 3 | 4.506.000 | 6,00 | 7.326.000 | 120,00 | 206,37 | 6,00 | 7326000 | 24,00 | 18,29 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | laporan | 60 | 75.900.000 | | | 12 | 14.580.000 | 5 | 6.075.000 | 13,00 | 14.580.000 | 108,33 | 100,00 | 13,00 | 14.580.000 | 21,67 | 19,21 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Unit | 15 | 339.700.000 | | | 3 | 2.500.000 | 13 | 154.720.000 | 13,00 | 154.720.000 | 433,33 | 6.188,80 | 0,00 | 154720000 | 0,00 | 45,55 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | unit | 15 | 184.700.000 | | | 3 | 2.500.000 | 12 | 74.720.000 | 12,00 | 74.720.000 | 400,00 | 2.988,80 | 12,00 | 74720000 | 80,00 | 40,45 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | Unit | 15 | 135.000.000 | | | | | 1 | 80.000.000 | 1,00 | 80.000.000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 80000000 | 6,67 | 59,26 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi | Unit | 5 | 20.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | indeks | 445 | 679.726.717 | | | 20 | 89.682.012 | 9 | 73.323.800 | 19,00 | 116.332.000 | 95,00 | 129,72 | 5,00 | 116.332.000 | 1,12 | 17,11 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan | kegiatan | 10 | 355.874.717 | | | 2 | 54.582.012 | 2 | 38.509.800 | 9,00 | 61.772.000 | 450,00 | 113,17 | 5,00 | 61.772.000 | 50,00 | 17,36 | KECAMATAN BERASTAGI |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | laporan | 60 | 208.038.765 | | | 12 | 31.907.786 | 1 | 22.240.000 | 3,00 | 35.412.200 | 25,00 | 110,98 | 3,00 | 35.412.200 | 5,00 | 17,02 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | dokumen | 60 | 147.835.952 | | | 12 | 22.674.226 | 1 | 16.269.800 | 6,00 | 26.359.800 | 50,00 | 116,25 | 6,00 | 26359800 | 10,00 | 17,83 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | urusan | 10 | 228.852.000 | | | 2 | 35.100.000 | 7 | 34.814.000 | 1,00 | 54.560.000 | 50,00 | 155,44 | 5,00 | 54.560.000 | 50,00 | 23,84 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | laporan | 60 | 228.852.000 | | | 12 | 35.100.000 | 7 | 34.814.000 | 1,00 | 54.560.000 | 8,33 | 155,44 | 1,00 | 54.560.000 | 1,67 | 23,84 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang di Koordinasikan pemeliharaannya | unit | 10 | 35.000.000 | | | | | | - | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum | dokumen | 25 | 35.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Layanan perizinan, non perizinan dan kewenangan lainnya | dokumen | 100 | 60.000.000 | | | | | | - | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan N | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan | dokumen | 100 | 20.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | laporan | 10 | 20.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan | laporan | 10 | 20.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan | indeks | 95 | 19.210.925.735 | | | 95 | 2.800.000.000 | | - | 0,00 | 311.461.142 | 0,00 | 11,12 | 0,00 | 577.361.625 | 0,00 | 3,01 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang di koordinasikan | % | 100 | 80.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pe | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | lembaga k | 30 | 20.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecama | Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | laporan | 60 | 60.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | % | 100 | 19.130.925.735 | | | 20 | 2.800.000.000 | 10 | 2.505.427.070 | 5,00 | 2.816.888.212 | 0,00 | 100,60 | 5,00 | 2.816.888.212 | 5,00 | 14,72 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | unit | 75 | 15.505.063.854 | | | 3 | 2.312.643.000 | 8 | 2.456.596.870 | 0,00 | 2.504.783.412 | 0,00 | 108,31 | 0,00 | 2.504.783.412 | 0,00 | 16,15 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | pokmas/or | 120 | 3.625.861.881 | | | 3 | 487.357.000 | 2 | 48.830.200 | 0,00 | 312.104.800 | 0,00 | 64,04 | 0,00 | 312.104.800 | 0,00 | 8,61 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 03 | 2.05 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | % | 100 | 0 | | | | | | | 5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 03 | 2.05 | 01 | Pencegahan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | dokumen | 60 | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 03 | 2.05 | 04 | Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dar | Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | dokumen | 60 | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 03 | 2.06 | | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | % | 100 | 0 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 5 | 01 | 03 | 2.06 | 08 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | keluarga | 500 | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | perda/per | 10/10/10 | 98.000.000 | | | 0 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Kegiatan dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | kegiatan | 20 | 48.000.000 | | | 0 | | | | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indo | Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisia Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | laporan | 5 | 40.000.000 | | | 0 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | laporan | 5 | 8.000.000 | | | 0 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Perda dan Perkada yang dikoordinasikan Penerapan dan Penegakannya | perda/per | 10/10 | 50.000.000 | | | 0 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik | Jumlah Koordinasi Penegakan Perda dan Perkada dengan Perangkat Daerah dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | laporan | 5 | 50.000.000 | | | 0 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | urusan | 10 | 259.418.312 | | | 0 | 32.612.881 | 0 | 69.944.700 | 0,00 | 69.944.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69944700 | 0,00 | 26,96 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan | urusan | 1 | 259.418.312 | | | 0 | 32.612.881 | 0 | 69.944.700 | 0,00 | 69.944.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69944700 | 0,00 | 26,96 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mem | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | orang | 750 | 259.418.312 | | | 0 | 32.612.881 | | 69.944.700 | 0,00 | 69.944.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69944700 | 0,00 | 26,96 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina dan Diawasi | Pemerinta | 30 | 29.098.000 | | | 0 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Pemerintahan Desa yang di fasilitasi yang diberi Rekomendasi dan dikoordinasi Pembinaan dan Pengawasannya | Pemerinta | 6 | 29.098.000 | | | 0 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Dokumen | 60 | 17.098.000 | | | 0 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 30 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang difasilitasi | Dokumen | 60 | 12.000.000 | | | 0 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN BERASTAGI |
| 31 | | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | | | | KECAMATAN DOLAT RAKYAT | | | 100,00 | 10.242.009.625 | | | 100 | 1.973.297.246 | - | 862.709.916 | 56,46 | 3.087.499.544 | 56,46 | 30,15 | 56,46 | 3.087.499.544 | 30,15 | 30,15 | ECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ | Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) | | 89 | 9.873.795.385 | | | 85 | 1.898.713.246 | 0 | 854.109.916 | 17,67 | 1.950.352.214 | 20,79 | 102,72 | 17,67 | 1.950.352.214 | 19,85 | 19,75 | ECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 8.755.069.005 | | | 100 | 1.686.001.122 | 0 | 645.941.808 | 14,19 | 1.649.304.695 | 14,19 | 97,82 | 14,19 | 1.649.304.695 | 14,19 | 18,84 | ECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | Bulan | 60 | 8.408.869.005 | | | 12 | 1.613.769.122 | | 599.011.808 | 9,00 | 1.571.184.695 | 75,00 | 97,36 | 9,00 | 1.571.184.695 | 15,00 | 18,68 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Honorarium Pengelola Keuangan | Orang Bul | 480 | 346.200.000 | | | 96 | 72.232.000 | | 46.930.000 | 6,00 | 78.120.000 | 6,25 | 108,15 | 6,00 | 78.120.000 | 1,25 | 22,56 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 149.500.000 | | | 100 | 29.900.000 | | | 50,00 | 14.740.000 | 50,00 | 49,30 | 50,00 | 14.740.000 | 50,00 | 9,86 | ECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 5 | 74.750.000 | | | 1 | 14.950.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut | Stel | 135 | 74.750.000 | | | 27 | 14.950.000 | | | 27,00 | 14.740.000 | 100,00 | 98,60 | 27,00 | 14.740.000 | 20,00 | 19,72 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 259.076.380 | | | 100 | 54.612.124 | 0 | 34.089.850 | 33,33 | 49.006.150 | 33,33 | 89,73 | 33,33 | 49.006.150 | 33,33 | 18,92 | ECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis | 20 | 5.000.000 | | | 4 | 1.000.000 | | | 4,00 | 920.000 | 100,00 | 92,00 | 4,00 | 920.000 | 20,00 | 18,40 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Buah | 25 | 39.436.875 | | | 5 | 31.999.475 | | | 5,00 | 7.460.300 | 100,00 | 23,31 | 5,00 | 7.460.300 | 20,00 | 18,92 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga | Jenis | 70 | 9.999.505 | | | 14 | 1.999.901 | | 1.612.000 | 14,00 | 3.562.000 | 100,00 | 178,11 | 14,00 | 3.562.000 | 20,00 | 35,62 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Pengggandaan | Jenis | 15 | 8.500.000 | | | 3 | 4.612.748 | | | 3,00 | 4.586.000 | 100,00 | 99,42 | 3,00 | 4.586.000 | 20,00 | 53,95 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Kunjungan Tamu | Orang Kal | 120 | 4.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Orang Har | 1080 | 192.140.000 | | | 216 | 15.000.000 | | 32.477.850 | 0,00 | 32.477.850 | 0,00 | 216,52 | 0,00 | 32.477.850 | 0,00 | 16,90 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 100 | 45.000.000 | | | 100 | 9.000.000 | | 96.690.000 | 0,00 | 96.690.000 | 0,00 | 1.074,33 | 0,00 | 96.690.000 | 0,00 | 214,87 | ECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel | Unit | 20 | 45.000.000 | | | 4 | 9.000.000 | | 11.790.000 | 0,00 | 11.790.000 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 11.790.000 | 0,00 | 26,20 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| | | | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | | | | | | | | | | 84.900.000 | | 84.900.000 | | | | | | | |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 571.400.000 | | | 100 | 99.400.000 | 0 | 42.423.258 | 8,50 | 95.746.369 | 8,50 | 96,32 | 8,50 | 95.746.369 | 8,50 | 16,76 | ECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 60 | 99.000.000 | | | 12 | 20.100.000 | | 7.518.258 | 9,00 | 16.916.369 | 75,00 | 84,16 | 9,00 | 16.916.369 | 15,00 | 17,09 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | unit | 20 | 20.000.000 | | | 4 | 4.000.000 | | 3.530.000 | 0,00 | 3.530.000 | 0,00 | 88,25 | 0,00 | 3.530.000 | 0,00 | 17,65 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa Pelayanan Umum Kantor | Orang Bul | 60 | 452.400.000 | | | 60 | 75.300.000 | | 31.375.000 | 35,00 | 75.300.000 | 58,33 | 100,00 | 35,00 | 75.300.000 | 58,33 | 16,64 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 93.750.000 | | | 100 | 19.800.000 | 0 | 34.965.000 | 0,00 | 44.865.000 | 0,00 | 226,59 | 0,00 | 44.865.000 | 0,00 | 47,86 | ECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kend | Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan | unit | 5 | 73.750.000 | | | 1 | 19.800.000 | | 34.965.000 | 1,00 | 44.865.000 | 100,00 | 226,59 | 1,00 | 44.865.000 | 20,00 | 60,83 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Unit | 4 | 20.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBL | Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) | Indeks | 89 | 139.920.000 | | | | 27.984.000 | | | ########## | 8.600.000 | 0,00 | 30,73 | | 8.600.000 | 0,00 | 6,15 | ECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | % | 100 | 94.920.000 | | | 100 | 18.984.000 | 0 | 20.320.000 | 0,23 | 28.920.000 | 0,23 | 152,34 | 0,23 | 28.920.000 | 0,23 | 30,47 | ECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan deng | Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Orang Kal | 1000 | 45.000.000 | | | 200 | 9.000.000 | | | 90,00 | 8.600.000 | 45,00 | 95,56 | 90,00 | 8.600.000 | 9,00 | 19,11 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Di Tingkat Kecamatan | Kegiatan | 5 | 49.920.000 | | | 1 | 9.984.000 | | 20.320.000 | 0,00 | 20.320.000 | 0,00 | 203,53 | 0,00 | 20.320.000 | 0,00 | 40,71 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidakDilaksanakan oleh Unit | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | % | 100 | 25.000.000 | | | 100 | 16.100.000 | 0 | 8.600.000 | 0,00 | 8.600.000 | 0,00 | 53,42 | 0,00 | 8.600.000 | 0,00 | 34,40 | ECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah | Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kali | 60 | 25.000.000 | | | 12 | 16.100.000 | | 8.600.000 | 0,00 | 8.600.000 | 0,00 | 53,42 | 0,00 | 8.600.000 | 0,00 | 34,40 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | % | 100 | 8.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang ter | Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kali | 4 | 4.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Met | Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Unit | 4 | 4.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | % | 100 | 12.000.000 | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan N | Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Perizinan | 4 | 4.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Urusan | 4 | 4.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang | Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Urusan | 4 | 4.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kegiatan | 105 | 45.000.000 | | | 105 | 9.000.000 | | 8.600.000 | 0,00 | 8.600.000 | 0,00 | 95,56 | 0,00 | 8.600.000 | 0,00 | 19,11 | ECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | % | 100 | 45.000.000 | | | 100 | 9.000.000 | | 8.600.000 | 0,00 | 8.600.000 | 0,00 | 95,56 | 0,00 | 8.600.000 | 0,00 | 19,11 | ECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pe | Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Orang Kali | 80 | 16.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecama | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kegiatan | 25 | 29.000.000 | | | 5 | 9.000.000 | | 8.600.000 | 0,00 | 8.600.000 | 0,00 | 95,56 | 0,00 | 8.600.000 | 0,00 | 29,66 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Indeks Penegakan Perda dan Perkada | Perda dar | 14 | 72.602.175 | | | 2 | 14.520.435 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | % | 100 | 68.602.175 | | | 100 | 14.520.435 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indo | Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kegiatan | 5 | 43.602.175 | | | 1 | 9.520.435 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kegiatan | 5 | 25.000.000 | | | 1 | 5.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Ke | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | % | 100 | 4.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bid | Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kali | 4 | 4.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | Urusan | 5 | 47.397.825 | | | 1 | 9.479.565 | | | 1,00 | 9.360.000 | 100,00 | 98,74 | 1,00 | 9.360.000 | 20,00 | 19,75 | ECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala D | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | % | 100 | 47.397.825 | | | 100 | 9.479.565 | | | 100,00 | 9.360.000 | 100,00 | 98,74 | 100,00 | 9.360.000 | 100,00 | 19,75 | ECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mem | Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kali | 5 | 47.397.825 | | | 1 | 9.479.565 | | | 1,00 | 9.360.000 | 100,00 | 98,74 | 1,00 | 9.360.000 | 20,00 | 19,75 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi | Pemerinta | 35 | 63.294.240 | | | 7 | 13.600.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Peme | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | % | 100 | 63.294.240 | | | 100 | 13.600.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN DOLAT RAYA |
| 31 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Yang Di Fasilitasi | Perdes da | 35 | 25.000.000 | | | 7 | 8.600.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang difasilitasi | Pemerinta | 35 | 34.294.240 | | | 7 | 5.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 31 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang difasilitasi | Pemerinta | 28 | 4.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 32 | | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | | | | KECAMATAN JUHAR | | | | 19.087.580.195 | | | | 3.386.766.813 | - | 1.173.365.851 | 455,00 | 2.839.306.633 | 0,00 | 83,84 | 0,00 | 2.839.306.633 | 0,00 | 14,88 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | Meningkatnya pelay | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) | Indeks | 91 | 16.849.579.455 | 84 | | 83 | 3.107.737.580 | - | 1.097.188.563 | 288 | 2.696.641.275 | 347 | 87 | 430,99 | 2.696.641.275 | 473,61 | 16,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | bulan | 60 | 14.738.233.900 | 12 | 2.481.083.701 | 12 | 2.889.963.516 | - | 913.870.768 | 55,00 | 2.420.614.775 | 458,33 | 83,76 | 67,00 | 4.901.698.476 | 111,67 | 33,26 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 01 | 2 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bul | 60 | 13.564.693.580 | 12 | 2.331.623.701 | 12 | 2.732.263.516 | | 849.955.768 | 9,00 | 2.267.674.775 | 75,00 | 83,00 | 21,00 | 4.599.298.476 | 35,00 | 33,91 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 01 | 2 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 755 | 1.173.540.320 | 72 | 149.460.000 | 151 | 157.700.000 | | 63.915.000 | 46,00 | 152.940.000 | 30,46 | 96,98 | 118,00 | 302.400.000 | 15,63 | 25,77 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bulan | 73 | 121.440.000 | 25 | 16.800.000 | 25 | 17.500.000 | | 18.750.000 | 0,00 | 18.750.000 | 0,00 | 107,14 | 25,00 | 35.550.000 | 34,25 | 29,27 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | unit | 1 | 10.000.000 | | | | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 125 | 111.440.000 | 25 | 16.800.000 | 25 | 17.500.000 | | 18.750.000 | 0,00 | 18.750.000 | 0,00 | 107,14 | 25,00 | 35.550.000 | 20,00 | 31,90 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bulan | 60 | 1.016.651.635 | 12 | 85.186.515 | 12 | 136.574.064 | - | 141.677.760 | 215,00 | 203.676.946 | 1.791,67 | 149,13 | 227,00 | 288.863.461 | 378,33 | 28,41 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 30 | 11.484.480 | 2 | 984.483 | 10 | 1.500.000 | | 1.492.800 | 0,00 | 1.492.800 | 0,00 | 99,52 | 2,00 | 2.477.283 | 6,67 | 21,57 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 9179 | 234.589.475 | 34 | 37.691.775 | 1.835 | 31.524.064 | | 51.863.000 | 34,00 | 70.225.800 | 1,85 | 222,77 | 68,00 | 107.917.575 | 0,74 | 46,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 75 | 35.049.936 | 25 | 2.896.697 | 15 | 4.710.000 | | 29.651.960 | 10,00 | 32.708.496 | 66,67 | 694,45 | 35,00 | 35.605.193 | 46,67 | 101,58 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 14 | 49.709.888 | 2 | 3.053.560 | 2 | 6.680.000 | | | 4,00 | 6.679.850 | 200,00 | 100,00 | 6,00 | 9.733.410 | 42,86 | 19,58 | KECAMATAN JUHAR |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 1800 | 16.073.856 | | | 360 | 2.160.000 | | 2.160.000 | 0,00 | 2.160.000 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 2160000 | 0,00 | 13,44 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 2180 | 669.744.000 | 161 | 40.560.000 | 436 | 90.000.000 | | 56.510.000 | 167,00 | 90.410.000 | 38,30 | 100,46 | 328,00 | 130.970.000 | 15,05 | 19,56 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit | 18 | 214.720.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | 18 | 214.720.000 | | | - | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | 60 | 257.211.840 | 7 | 4.064.105 | 12 | 32.400.000 | - | 7.065.259 | 16,00 | 22.568.378 | 133,33 | 69,66 | 23,00 | 26.632.483 | 38,33 | 10,35 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60 | 133.948.800 | 7 | 4.064.105 | 12 | 18.000.000 | | 1.960.259 | 9,00 | 6.528.378 | 75,00 | 36,27 | 16,00 | 10.592.483 | 26,67 | 7,91 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 30 | 16.104.000 | | | - | - | | 1.460.000 | 0,00 | 1.460.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1460000 | 0,00 | 9,07 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 107.159.040 | | | 12 | 14.400.000 | | 3.645.000 | 7,00 | 14.580.000 | 58,33 | 101,25 | 7,00 | 14.580.000 | 11,67 | 13,61 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara | unit | 9 | 501.322.080 | 1 | 31.538.418 | 1 | 31.300.000 | - | 15.824.776 | 2,00 | 31.031.176 | 200,00 | 99,14 | 3,00 | 62.569.594 | 33,33 | 12,48 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Ken | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 5 | 232.922.080 | 1 | 31.538.418 | 1 | 31.300.000 | | 15.824.776 | 2,00 | 31.031.176 | 200,00 | 99,14 | 3,00 | 62.569.594 | 60,00 | 26,86 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 4 | 268.400.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBI | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 91 | 1.308.945.429 | 4 | 9.000.000 | 83 | 160.314.533 | | 66.353.288 | 166,00 | 100.920.958 | 200,00 | 62,95 | 83,00 | 109.920.958 | 91,21 | 8,40 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamata | Jumlah kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di tingkat kecamatan | Kegiatan | 18 | 551.233.045 | 4 | 9.000.000 | 2 | 74.074.533 | | 29.333.288 | 4,00 | 46.050.958 | 2,00 | 62,17 | 8,00 | 55.050.958 | 44,44 | 9,99 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | 'Meningkatnya pelaya | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan den | Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 204 | 286.531.366 | 1 | 5.400.000 | 200 | 38.504.000 | | | 1,00 | 11.117.670 | 0,50 | 28,87 | 2,00 | 16.517.670 | 0,98 | 5,76 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Dokumen | 15 | 264.701.678 | 3 | 3.600.000 | 3 | 35.570.533 | | 29.333.288 | 3,00 | 34.933.288 | 100,00 | 98,21 | 6,00 | 38.533.288 | 40,00 | 14,56 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit | Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Urusan | 132 | 659.088.384 | | | 36 | 84.240.000 | | 37.020.000 | 12,00 | 54.870.000 | 33,33 | 65,14 | 12,00 | 54.870.000 | 9,09 | 8,33 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Dokumen | 200 | 16.104.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecam | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 4 | 16.104.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 132 | 626.880.384 | | | 36 | 84.240.000 | | 37.020.000 | 12,00 | 54.870.000 | 33,33 | 65,14 | 12,00 | 54.870.000 | 9,09 | 8,75 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang di Koordinasikan pemeliharaannya | Unit | | 66.416.000 | | | - | 2.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang ter | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 5 | 12.736.000 | | | 1 | 2.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas Pelayanan Umum yang Meli | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 4 | 53.680.000 | | | - | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelakasanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Layanan Perizinan , Non Perizinan dan Kewenangan Lainnya | Urusan | 680 | 32.208.000 | | | | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan N | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Dokumen | 50 | 4.147.200 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 100 | 4.147.200 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 20 | 4.147.200 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | Meningkatnya pelay | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kegiatan | 32 | 236.192.000 | | | - | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan | kegiatan | 32 | 171.776.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pe | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga | 200 | 10.736.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecama | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 8 | 10.736.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 03 | 2.05 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyara | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Dokumen | 8 | 53.680.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 03 | 2.05 | 01 | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Dokumen | 8 | 161.040.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | Meningkatnya Kuali | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Penegakan Perda dan Perkada | perda dar | 17 | 285.995.760 | 2 | 84.617.300 | 1 | 37.350.000 | | 6.993.000 | 0,00 | 6.993.000 | 0,00 | 18,72 | 2,00 | 91.610.300 | 11,76 | 32,03 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah kegiatan dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Kegiatan | 9 | 277.943.760 | 2 | 84.617.300 | 1 | 37.350.000 | | 6.993.000 | 0,00 | 6.993.000 | 0,00 | 18,72 | 2,00 | 91.610.300 | 22,22 | 32,96 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI TNI, dan Instansi Vertikal Di Wilayah Ke | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 9 | 277.943.760 | 2 | 84.617.300 | 1 | 37.350.000 | | 6.993.000 | 0,00 | 6.993.000 | 0,00 | 18,72 | 2,00 | 91.610.300 | 22,22 | 32,96 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan PeraturanDaerah dan Peraturan Ker | Jumlah perda dan perkada yang dikoordinasikan penerapan dan penegakannya | Perda dar | 8 | 8.052.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bid | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan | 8 | 8.052.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | Meningkatnya pelay | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | Urusan | 8 | 390.763.552 | - | - | 1 | 81.364.700 | | 2.831.000 | 1,00 | 34.751.400 | 100,00 | 42,71 | 1,00 | 34751400 | 12,50 | 8,89 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala D | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan | Urusan | 5 | 390.763.552 | - | - | 1 | 81.364.700 | | 2.831.000 | 1,00 | 34.751.400 | 100,00 | 42,71 | 1,00 | 34751400 | 20,00 | 8,89 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Mer | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | orang | 5 | 390.763.552 | | | 1 | 81.364.700 | | 2.831.000 | 1,00 | 34.751.400 | 100,00 | 42,71 | 1,00 | 34751400 | 20,00 | 8,89 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | Meningkatnya pelay | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi | Pemerinta | 100 | 16.104.000 | | | | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 06 | 2 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pem | Jumlah Pemerintahan Desa yang difasilitasi, yang diberi Rekomendasi dan dikoordinasikan Pembinaan dan Pengawasannya | Pemerint | 100 | 16.104.000 | | | | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 06 | 2 | 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan | Dokumen | 200 | 10.736.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 32 | | 7 | 01 | 06 | 2 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecama | Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan | Laporan | 200 | 5.368.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN JUHAR |
| 33 | | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | | | | KECAMATAN KABANJAHE | | | 411 | 73.797.835.863 | | | | 7.793.497.069 | | | ########## | 13.530.206.892 | 2.582.537.133,19 | 173,61 | ############## | 13.530.206.892 | ########## | 18,33 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) | Indeks | 87 | 47.422.147.929 | | | 83 | 5.057.454.710 | 276 | 2.272.760.099 | ########## | 15.217.863.991 | ############### | 300,90 | 3,00 | 687.308.803 | 3,45 | 1,45 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | bulan | 60 | 45.016.163.542 | | | 12 | 4.287.011.564 | | 1.948.396.689 | ########## | 14.809.431.381 | ############### | 345,45 | 3,00 | 687.308.803 | 5,00 | 1,53 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | bulan | 60 | 38.954.561.782 | | | 12 | 5.234.702.454 | 3 | 1.404.916.689 | 12,00 | 4.645.897.101 | 100,00 | 88,75 | 3,00 | 567.068.803 | 5,00 | 1,46 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Honorarium Pengelola Keuangan | orang bula | 3.530 | 6.061.601.760 | | | 706 | 814.556.246 | 206 | 543.480.000 | 706,00 | 1.071.960.000 | 100,00 | 131,60 | 171,00 | 120.240.000 | 4,84 | 1,98 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Peragkat Daerah | Bulan | 60 | 223.248.000 | | | 12 | 100.000.000 | | 38.250.000 | 0,00 | 38.250.000 | 0,00 | 38,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut | stel | 229 | 223.248.000 | | | 40 | 30.000.000 | 40 | 38.250.000 | 40,00 | 38.250.000 | 100,00 | 127,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | bulan | 60 | 883.865.198 | | | 12 | 60.000.000 | 272 | 180.045.450 | 321,35 | 234.326.850 | 2.677,90 | 390,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jenis | 21 | 24.187.388 | | | 3 | 3.250.294 | | 0 | 3,00 | 3.169.950 | 100,00 | 97,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | buah | 14.774 | 386.285.486 | | | 2.944 | 51.908.929 | 4 | 110.931.550 | 2944,00 | 162.043.000 | 100,00 | 312,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga | jenis | 79 | 54.590.982 | | | 15 | 7.335.920 | 15 | 7.325.900 | 15,00 | 7.325.900 | 100,00 | 99,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Pengggandaan | jenis | 25 | 62.318.935 | | | 4 | 8.374.400 | 3 | 6.700.000 | 4,00 | 7.966.000 | 100,00 | 95,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | perjalanan dinas | orang/kali | 1.635 | 356.482.406 | | | 320 | 47.904.000 | 250 | 55.088.000 | 320,00 | 58.588.000 | 100,00 | 122,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit | 52 | 270.613.181 | | | 8 | 30.000.000 | | 27.570.000 | 0,00 | 27.570.000 | 0,00 | 91,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebeleur | unit | 52 | 270.613.181 | | | 8 | 36.364.919 | 8 | 27.570.000 | 8,00 | 27.570.000 | 100,00 | 75,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | bulan | 60 | 183.264.328 | | | 12 | 447.570.436 | | 24.788.800 | 29,63 | 34.536.600 | 246,91 | 7,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa telepon, internet, air dan listrik | bulan | 57 | 66.974.400 | | | 9 | 9.000.000 | | 11.228.800 | 4,00 | 16.116.600 | 44,44 | 179,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor | unit | 31 | 26.268.848 | | | 5 | 3.530.000 | | 3.840.000 | 0,00 | 8.727.800 | 0,00 | 247,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honorarium Pegawai Tidak Tetap | orang bula | 57 | 90.021.080 | | | 9 | 12.097.006 | | 9.720.000 | 4,00 | 14.580.000 | 44,44 | 120,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Di Pelihara | Unit | 30 | 844.993.680 | | | 6 | 132.872.710 | 4 | 53.709.160 | 37,33 | 73.749.160 | 622,22 | 55,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Ken | Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan | Unit | 30 | 844.993.680 | | | 6 | 113.550.000 | 4 | 53.709.160 | 6,00 | 73.749.160 | 100,00 | 64,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUB | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 87 | 10.736.000 | | | 83 | 106.503.893 | 0 | 21.883.000 | 2,00 | 75.719.000 | 2,41 | 71,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang Diselenggarakan di tingkat Kecamatan | Unit | 8 | 10.736.000 | | | 2 | 106.503.893 | 0 | 21.883.000 | 2,00 | 75.719.000 | 100,00 | 71,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan den | jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait | kali | 4 | 5.368.000 | | | 1 | 18.550.000 | | 0 | 1,00 | 11.700.000 | 100,00 | 63,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan | Unit | 4 | 5.368.000 | | | 1 | 87.953.893 | | 21.883.000 | 1,00 | 64.019.000 | 100,00 | 72,79 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kegiatan | 95 | 26.045.600.000 | | | 30 | 3.500.000.000 | 0 | 2.939.706.629 | 116,00 | 3.438.786.629 | 386,67 | 98,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan | Kegiatan | 173 | 26.045.600.000 | | | 30 | 3.500.000.000 | 0 | 2.939.706.629 | 116,00 | 3.438.786.629 | 386,67 | 98,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | unit | 126 | 18.981.354.234 | | | 15 | 2.550.708.750 | | 2.396.889.640 | 6,00 | 2.682.987.640 | 40,00 | 105,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | orang kali | 34.740 | 7.064.245.766 | | | 530 | 949.291.250 | | 542.816.989 | 110,00 | 755.798.989 | 20,75 | 79,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Tingkat Penegakan Perda dan Perkada | % | 100 | 73.597.424 | | | 20 | 9.890.000 | 0 | 5.175.000 | 0,00 | 5.175.000 | 0,00 | 52,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah kegiatan dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Kegiatan | 5 | 73.597.424 | | | 1 | 9.890.000 | 0 | 5.175.000 | 0,00 | 5.175.000 | 0,00 | 52,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI TNI, dan Instansi Vertikal Di Wilayah Ke | Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kegiatan | 5 | 73.597.424 | | | 1 | 9.890.000 | | 5.175.000 | 0,00 | 5.175.000 | 0,00 | 52,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan | Urusan | 10 | 240.386.511 | | | 2 | 32.303.068 | 0 | 64.374.000 | 1,00 | 96.561.000 | 50,00 | 298,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | | 7 | 01 | 05 | 2 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala D | Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah yang diselenggarakan | Urusan | 5 | 240.386.511 | | | 1 | 32.303.068 | 0 | 64.374.000 | 1,00 | 96.561.000 | | 298,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Mer | Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | kali | 5 | 240.386.511 | | | 1 | 32.303.068 | | 64.374.000 | 1,00 | 96.561.000 | 100,00 | 298,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah pemerintahan desa yang dibina dan diawasi | Pemerinta | 32 | 5.368.000 | | | 10 | 5.300.000 | 0 | 5.252.000 | 0,00 | 5.252.000 | 0,00 | 99,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 06 | 2 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pem | Jumlah Pemerintahan Desa yang difasilitasi, yang diberi rekomendasi dan yang dikoordinasikan pembinaan dan pengawasan | Pemerinta | 32 | 5.368.000 | | | 10 | 5.300.000 | 0 | 5.252.000 | 0,00 | 5.252.000 | 0,00 | 99,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 33 | | 7 | 01 | 06 | 2 | 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | kali | 32 | 5.368.000 | | | 10 | 5.300.000 | | 5.252.000 | 0,00 | 5.252.000 | 0,00 | 99,09 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KABANJAHE |
| 34 | | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | | | | KECAMATAN KUTABULUH | | | | 17.024.701.440 | | | | 2.970.664.888 | 838 | 2.974.638.811 | 1.183,54 | 4.781.940.410 | 0,00 | 160,97 | 0,00 | 4.781.940.410 | 0,00 | 28,09 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | Terwujudnya pelaya | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN | Indeks Kepuasan Masyarakat | indeks | 86 | 15.914.110.719 | | | 86 | 2.826.074.167 | 836 | 2.882.865.811 | 1.166,71 | 4.634.112.410 | 1.356,64 | 163,98 | 1.166,71 | 4.634.112.410 | 1.356,64 | 29,12 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 01 | 2,02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 14.531.024.565 | | | 100 | 2.602.489.608 | 355 | 2.516.091.243 | 398,94 | 4.095.403.784 | 398,94 | 157,36 | 398,94 | 4.095.403.784 | 398,94 | 28,18 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/ bul | 135 | 14.091.994.565 | | | 12 | 2.522.019.608 | 343 | 2.436.761.243 | 350,35 | 3.981.023.784 | 2.919,56 | 157,85 | 350,35 | 3.981.023.784 | 259,52 | 28,25 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 01 | 2,03 | 07 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 300 | 439.030.000 | | | 84 | 80.470.000 | 12 | 79.330.000 | 48,59 | 114.380.000 | 57,84 | 142,14 | 48,59 | 114.380.000 | 16,20 | 26,05 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 116.865.087 | | | 100 | 26.472.000 | 1 | 47.920.500 | 27,00 | 65.392.500 | 27,00 | 247,03 | 27,00 | 65.392.500 | 27,00 | 55,96 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 01 | 2,05 | 11 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 2 | 18.000.000 | | | | 9.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1,00 | 9.000.000 | 0,00 | 100,00 | 1,00 | 9.000.000 | 50,00 | 50,00 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 01 | 2,05 | 12 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 5 | 98.865.087 | | | 26 | 17.472.000 | | 38.920.500 | 26,00 | 56.392.500 | 100,00 | 322,76 | 26,00 | 56.392.500 | 520,00 | 57,04 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 442.696.323 | | | 100 | 87.867.903 | 418 | 139.839.700 | 641,87 | 212.229.000 | 641,87 | 241,53 | 641,87 | 212.229.000 | 641,87 | 47,94 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 10.046.593 | | | 15 | 1.046.593 | 4 | 2.562.700 | 19,00 | 3.602.700 | 126,67 | 344,23 | 19,00 | 3.602.700 | 380,00 | 35,86 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 81.028.730 | | | 50 | 44.200.310 | 42 | 72.188.100 | 91,62 | 116.056.900 | 183,25 | 262,57 | 91,62 | 116.056.900 | 1.832,50 | 143,23 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 21.372.000 | | | 15 | 3.372.000 | 19 | 5.339.900 | 28,31 | 7.433.400 | 188,75 | 220,44 | 28,31 | 7.433.400 | 566,25 | 34,78 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 01 | 2,06 | 04 | penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 10 | 18.769.000 | | | 300 | 2.769.000 | 3 | 4.269.000 | 50,35 | 4.706.000 | 16,78 | 169,95 | 50,35 | 4.706.000 | 503,46 | 25,07 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1400 | 311.480.000 | | | 150 | 36.480.000 | 350 | 55.480.000 | 452,59 | 80.430.000 | 301,73 | 220,48 | 452,59 | 80.430.000 | 32,33 | 25,82 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 1 | 1 | 2,1 | | Pengadaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintah Daearah | Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintah Daearah | % | 100 | 281.148.148 | | | 100 | 46.080.948 | 31 | 108.630.000 | 45,00 | 154.400.000 | 45,00 | 335,06 | 45,00 | 154.400.000 | 45,00 | 54,92 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 07 | 01 | 01 | 02,07 | 01 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | 35 | 83.580.948 | | | 10 | 13.580.948 | 1 | 34.120.000 | 11,00 | 47.690.000 | 110,00 | 351,15 | 11,00 | 47.690.000 | 31,43 | 57,06 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 07 | 01 | 01 | 01,07 | 05 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 23 | 107.260.000 | | | 4 | 32.500.000 | 29 | 42.310.000 | 33,00 | 74.510.000 | 825,00 | 229,26 | 33,00 | 74.510.000 | 143,48 | 69,47 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 07 | 01 | 01 | 01,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 22 | 90.307.200 | | | | | 1 | 32.200.000 | 1,00 | 32.200.000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 32.200.000 | 4,55 | 35,66 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 07 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 286.482.000 | | | 100 | 43.322.000 | 29 | 43.641.650 | 51,00 | 71.022.990 | 51,00 | 163,94 | 51,00 | 71.022.990 | 51,00 | 24,79 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60 | 69.600.000 | | | 12 | 12.000.000 | 11 | 10.321.650 | 19,00 | 16.302.990 | 158,33 | 135,86 | 19,00 | 16.302.990 | 31,67 | 23,42 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 01 | 2,08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 50 | 5.562.000 | | | 6 | 1.562.000 | 6 | 3.560.000 | 12,00 | 5.120.000 | 200,00 | 327,78 | 12,00 | 5.120.000 | 24,00 | 92,05 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 168 | 211.320.000 | | | 12 | 29.760.000 | 12 | 29.760.000 | 20,00 | 49.600.000 | 166,67 | 166,67 | 20,00 | 49.600.000 | 11,90 | 23,47 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 07 | 01 | 01 | 2.08 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera | Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 255.894.596 | | | 100 | 19.841.708 | 2 | 26.742.718 | 2,90 | 35.664.136 | 2,90 | 179,74 | 2,90 | 35.664.136 | 2,90 | 13,94 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 2,09 | 2,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kend | Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 10 | 127.841.708 | | | 2 | 19.841.708 | 2 | 26.742.718 | 2,90 | 35.664.136 | 144,96 | 179,74 | 2,90 | 35.664.136 | 28,99 | 27,90 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 2,09 | 6,00 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 11 | 20.000.000 | | | - | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 2,09 | 9,00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 108.052.888 | | | - | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBL | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 86 | 349.724.500 | | | 86 | 43.724.500 | - | 40.632.000 | 13,83 | 62.545.000 | 16,08 | 143,04 | 13,83 | 62.545.000 | 16,08 | 17,88 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 02 | 2,01 | | Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | 100 | 183.064.000 | | | 100 | 25.064.000 | - | 19.732.000 | 1,33 | 29.997.000 | 1,33 | 119,68 | 1,33 | 29.997.000 | 1,33 | 16,39 | KECAMATAN KUTABULUH |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Meningkatnya peran | 7 | 01 | 02 | 2,01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan deng | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 10 | 34.450.000 | | | 1 | 6.450.000 | | 4.140.000 | 1,00 | 8.280.000 | 100,00 | 128,37 | 1,00 | 8.280.000 | 10,00 | 24,03 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas | Dokumen | 5 | 148.614.000 | | | 1 | 18.614.000 | | 15.592.000 | 0,33 | 21.717.000 | 32,95 | 116,67 | 0,33 | 21.717.000 | 6,59 | 14,61 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 07 | 01 | 02 | 2 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit | Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | % | 100 | 124.900.000 | | | 100 | 16.900.000 | - | 20.900.000 | 12,50 | 32.548.000 | 12,50 | 192,59 | 12,50 | 32.548.000 | 12,50 | 26,06 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | Terwujudnya koordina | 07 | 01 | 02 | 2 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah | Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Laporan | 90 | 124.900.000 | | | 18 | 16.900.000 | | 20.900.000 | 12,50 | 32.548.000 | 69,44 | 192,59 | 12,50 | 32.548.000 | 13,89 | 26,06 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 07 | 01 | 02 | 2 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | % | 100 | 21.760.500 | | | 100 | 1.760.500 | | - | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | Terwujudnya koordina | 07 | 01 | 02 | 2 | 03 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Me | Pelayanan Umum yang dikoordinasikan pemeliharaannya | Unit | 5 | 21.760.500 | | | 1 | 1760500,00 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 07 | 01 | 02 | 2 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | % | 100 | 20.000.000 | | | - | - | | - | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | Terwujudnya koordina | 07 | 01 | 02 | 2 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan N | Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Dokumen | 14 | 20.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | Terwujudnya koordi | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Jumlah K | 86 | 220.000.000 | | | 0 | - | | 10.000.000 | 0,00 | 10.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000 | 0,00 | 4,55 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 02 | 2,01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | % | 100 | 20.000.000 | | | - | - | | 10.000.000 | 0,00 | 10.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000 | 0,00 | 50,00 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7,00 | 1,00 | 3,00 | 2,01 | 3,00 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecama | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kegiatan | 64 | 20.000.000 | | | - | - | | 10.000.000 | 0,00 | 10.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000 | 0,00 | 50,00 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 07 | 01 | 03 | 2.05 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyara | Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | % | 100 | 200.000.000 | | | - | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 07 | 01 | 03 | 2.05 | 01 | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Dokumen | 20 | 80.000.000 | | | - | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 07 | 01 | 03 | 2.05 | 04 | Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dai | Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Dokumen | 40 | 120.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | index Penegakan Perda/ Perkada | Perda, P | 0/0/1 | 139.511.221 | | | 0/0/1 | 59.511.221 | 2 | 1.999.000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999.000 | 0,00 | 1,43 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 04 | 2,01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | % | 100 | 139.511.221 | | | 100 | 59.511.221 | 2 | 1.999.000 | 2,00 | 1.999.000 | 2,00 | 3,36 | 2,00 | 1.999.000 | 2,00 | 1,43 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 04 | 2,01 | 01 | Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Repoblik Indonesia, Tentara Nas | Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Laporan | 8 | 61.799.800 | | | 1 | 21.799.800 | 1 | 1.000.000 | 1,00 | 1.000.000 | 100,00 | 4,59 | 1,00 | 1.000.000 | 12,50 | 1,62 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 04 | 2,01 | 02 | Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat | Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat | Laporan | 60 | 77.711.421 | | | 1 | 37.711.421 | 1 | 999.000 | 1,00 | 999.000 | 100,00 | 2,65 | 1,00 | 999.000 | 1,67 | 1,29 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan pemerintahan Umum yang diselenggarakan kecamatan | Urusan | 5 | 354.175.000 | | | 1 | 34.175.000 | - | 34.142.000 | 0,00 | 68.284.000 | 0,00 | 199,81 | 0,00 | 68.284.000 | 0,00 | 19,28 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 05 | 2,01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala D | Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | % | 100 | 354.175.000 | | | 1 | 34.175.000 | - | 34.142.000 | 1,00 | 68.284.000 | 100,00 | 199,81 | 1,00 | 68.284.000 | 1,00 | 19,28 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | Meningkatnya peran | 7 | 01 | 05 | 2,01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mem | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 1250 | 354.175.000 | | | 1 | 34.175.000 | | 34.142.000 | 1,00 | 68.284.000 | 100,00 | 199,81 | 1,00 | 68.284.000 | 0,08 | 19,28 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | jumlah pemerintahan Desa yang di Bina dan Di awasi | Pemerinta | 16 | 47.180.000 | | | 16 | 7.180.000 | - | 5.000.000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000 | 0,00 | 10,60 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | | 7 | 01 | 06 | 2,01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pem | Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | % | 100 | 47.180.000 | | | 1 | 7.180.000 | - | 5.000.000 | 0,00 | 5.000.000 | 0,00 | 69,64 | 0,00 | 5.000.000 | 0,00 | 10,60 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 34 | Meningkatnya peran | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecama | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 10 | 47.180.000 | | | 1 | 7.180.000 | | 5.000.000 | 0,00 | 5.000.000 | 0,00 | 69,64 | 0,00 | 5.000.000 | 0,00 | 10,60 | KECAMATAN KUTABULUH |
| 35 | | 7 | 01 | | | | Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 5 | 01 | | | | KECAMATAN LAU BALENG | | | 100 | 12.511.770.125 | | | 100 | 2.376.468.163 | 40,00 | 1.064.157.914,00 | 98,54 | 2.161.869.419 | 98,54 | 90,97 | 31,24 | 2.161.869.419 | 31,24 | 90,97 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyrakat | Indeks | 95 | 11.647.098.425 | | | 83 | 2.267.496.397 | 40,00 | 969.664.914,00 | 93,54 | 2.161.869.419 | 112,69 | 95,34 | 93,54 | 2.161.869.419 | 98,46 | 18,56 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 10.500.178.345 | | | 100 | 1.887.729.484 | 20,00 | 730.297.637,00 | 77,33 | 1.812.599.753 | 77,33 | 96,02 | 77,33 | 1.812.599.753 | 77,33 | 17,26 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bula | 80 | 10.188.378.345 | | | 16 | 1.807.089.484 | 16 | 691.817.637 | 16,00 | 1.731.959.753 | 50,00 | 95,84 | 16,00 | 1.731.959.753 | 20,00 | 17,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 311.800.000 | | | 88 | 80.640.000 | 4 | 38.480.000 | 12,00 | 80.640.000 | 13,64 | 100,00 | 12,00 | 80.640.000 | 100,00 | 25,86 | KECAMATAN LAU BALENG |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 65.000.000 | | | 100 | 27.000.000 | 20 | 15.000.000 | 40,00 | 27.000.000 | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 27.000.000 | 40,00 | 41,54 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana | Unit | 5 | 6.000.000 | | | 1 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 100 | 59.000.000 | | | 20 | 27.000.000 | 20 | 15.000.000 | 36,00 | 27.000.000 | 180,00 | 100,00 | 36,00 | 27.000.000 | 36,00 | 45,76 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 396.220.080 | | | 100 | 89.153.967 | | 42.735.150 | 50,77 | 87.994.715 | 50,77 | 98,70 | 50,77 | 87.994.715 | 50,77 | 22,21 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 115 | 13.513.870 | | | 5 | 2.505.461 | | | 5,00 | 2.200.000 | 100,00 | 87,81 | 5,00 | 2.200.000 | 4,35 | 16,28 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 4.400 | 107.706.210 | | | 830 | 21.568.506 | 20 | 6.914.150 | 855,00 | 21.467.715 | 99,53 | 99,53 | 855,00 | 21.467.715 | 19,43 | 19,93 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 620 | 20.000.000 | | | 115 | 10.180.000 | 30 | 6.121.000 | 145,00 | 9.585.000 | 94,16 | 94,16 | 145,00 | 9.585.000 | 23,39 | 47,93 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 15.455 | 21.000.000 | | | 3.091 | 4.200.000 | | | 3.091,00 | 4.042.000 | 96,24 | 96,24 | 3.091,00 | 4.042.000 | 20,00 | 19,25 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 780 | 234.000.000 | | | 148 | 50.700.000 | 198 | 29.700.000 | 268,00 | 50.700.000 | 100,00 | 100,00 | 268,00 | 50.700.000 | 34,36 | 21,67 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 100 | 92.500.000 | | | 100 | 22.467.000 | | 21.700.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 20 | 42.500.000 | | | 4 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 1 | 1 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 5 | 50.000.000 | | | 1 | 22.467.000 | 1 | 21.700.000 | | 21.700.000 | | 96,59 | | 21.700.000 | | 43,40 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 375.100.000 | | | 100 | 81.938.706 | | 18.150.317 | 87,00 | 76.272.561 | 87,00 | 93,08 | 87,00 | 76.272.561 | 87,00 | 20,33 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60 | 51.500.000 | | | 12 | 18.248.706 | 1 | 3.465.317 | 17,00 | 13.962.561 | 141,67 | 76,51 | 17,00 | 13.962.561 | 28,33 | 27,11 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 25 | 20.000.000 | | | 5 | 3.570.000 | | | 5,00 | 3.570.000 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 3.570.000 | 20,00 | 17,85 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 240 | 303.600.000 | | | 48 | 60.120.000 | 3 | 14.685.000 | 65,00 | 58.740.000 | 135,42 | 97,70 | 65,00 | 58.740.000 | 27,08 | 19,35 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 218.100.000 | | | 100 | 159.207.240 | | 141.781.810 | 10,19 | 158.002.390 | 10,19 | 99,24 | 10,19 | 158.002.390 | 10,19 | 72,44 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 5 | 198.100.000 | | | 1 | 39.207.240 | 1 | 22.771.810 | 1,00 | 38.992.390 | 58,30 | 99,45 | 1,00 | 38.992.390 | 20,00 | 19,68 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | | | 1 | 120.000.000 | 1 | 119.010.000 | 1,00 | 119.010.000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 119.010.000 | 100,00 | 595,05 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyrakat | Indeks | 95 | 120.000.000 | | | 83 | 48.961.096 | | 35.730.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | 100 | 42.000.000 | | | 100 | 16.427.096 | | 9.925.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 5 | 40.000.000 | | | 1 | 5.982.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 2 | 2.000.000 | | | 1 | 10.445.096 | | 9.925.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | % | 100 | 10.000.000 | | | 100 | 32.534.000 | | 25.805.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 60 | 10.000.000 | | | 12 | 32.534.000 | | 25.805.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | % | 100 | 38.000.000 | | | 100 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Dokumen | 60 | 18.000.000 | | | 12 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta | Unit | 5 | 20.000.000 | | | 1 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | % | 100 | 30.000.000 | | | 100 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Dokumen | 10 | 10.000.000 | | | 2 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 25 | 10.000.000 | | | 5 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 5 | 10.000.000 | | | 1 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kegiatan | 29 | 130.000.000 | | | 10 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | % | 100 | 90.000.000 | | | 100 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | a Kemasya | 50 | 90.000.000 | | | 10 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 03 | 2.05 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | % | 100 | 40.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 03 | 2.05 | 01 | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Dokumen | 48 | 40.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Perda, Perkada, dan Kegiatan | kada, dar | 8/8/3 | 355.171.700 | | | 0/0/1 | 25.261.150 | | 24.300.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | % | 100 | 323.171.700 | | | 100 | 25.261.150 | | 24.300.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 323.171.700 | | | 1 | 25.261.150 | | 24.300.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | % | 100 | 32.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan | 8 | 32.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | Urusan | 5 | 59.500.000 | | | 1 | 31.459.520 | | 31.173.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | % | 100 | 59.500.000 | | | 100 | 31.459.520 | | 31.173.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 500 | 59.500.000 | | | 100 | 31.459.520 | | 31.173.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi | erintahan | 75 | 200.000.000 | | | 15 | 3.290.000 | | 3.290.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | % | 100 | 200.000.000 | | | 100 | 3.290.000 | | 3.290.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Dokumen | 150 | 75.000.000 | | | 30 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 75 | 50.000.000 | | | 15 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 35 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 75 | 75.000.000 | | | 15 | 3.290.000 | | 3.290.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| 36 | | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 11.994.122.601 | | | | | | | | | | | | | | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | | | | KECAMATAN MARDINDING | | | 100 | 11.994.122.601 | | | 100 | 2.323.983.981 | 104 | 967.772.042 | 160,22 | 2.274.311.158 | 97,86 | 97,86 | 160 | 2.274.311.158 | 18,00 | 18,96 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | Meningkatnya Pelay | 7 | 01 | 001 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 95 | 11.352.190.057 | | | 95 | 2.221.205.461 | 83 | 849.763.332 | 448 | 2.142.747.283 | 4,72 | 96,47 | 448 | 2.142.747.283 | | 18,88 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 001 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 10.579.824.835 | | | 100 | 2.020.364.427 | 69 | 762.636.949 | 156,00 | 1.911.162.325 | 156,00 | 94,59 | 156 | 1.911.162.325 | 156,00 | 18,06 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang Bul | 90 | 10.239.924.835 | | | 18 | 1.952.384.427 | 54 | 728.436.949 | 18,00 | 1.842.762.325 | 18,95 | 94,39 | 18,00 | 1.842.762.325 | 20,00 | 18,00 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 001 | 2.02 | 003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 240 | 339.900.000 | | | 48 | 67.980.000 | 15 | 34.200.000 | 48,00 | 68.400.000 | 75,00 | 100,62 | 48,00 | 68.400.000 | 20,00 | 20,12 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 001 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 55.900.000 | | | 100 | 15.000.000 | | 1.039.640 | 21,00 | 15.669.640 | 100,00 | 104,46 | 21 | 15.669.640 | 21,00 | 28,03 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 001 | 2.05 | 001 | Peningkatan Sarana dan prasarana disiplin pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 2 | 4.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MARDINDING |

| No | Sasaran | Kode | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 7 | 01 | 001 | 2.05 | | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 72 | 51.900.000 | | | 18 | 15.000.000 | 1 | 1.039.640 | 22,00 | 15.669.640 | 100,00 | 100,00 | 22,00 | 15.669.640 | 30,56 | 30,19 | KECAMATAN MARDINGDINC |
| 36 | | 7 | 01 | 001 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 353.345.222 | | | 100 | 87.801.282 | 2 | 39.823.583 | 169,00 | 109.088.475 | 100,00 | 124,24 | 169,00 | 109.088.475 | 20,00 | 30,87 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 25 | 4.800.000 | | | 5 | 1.000.000 | | | 5,00 | 983.210 | 100,00 | 98,32 | 5,00 | 983.210 | 20,00 | 20,48 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 125 | 67.045.222 | | | 50 | 18.503.282 | 1 | 12.636.933 | 6,00 | 27.224.233 | 12,00 | 147,13 | 6,00 | 27.224.233 | 4,80 | 40,61 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 001 | 2.06 | 003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 20 | 5.000.000 | | | 5 | 2.000.000 | | | 5,00 | 1.989.382 | 100,00 | 99,47 | 5,00 | 1.989.382 | 25,00 | 39,79 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 10 | 7.500.000 | | | 2 | 2.500.000 | | 1.794.800 | 2,00 | 2.499.800 | 100,00 | 99,99 | 2,00 | 2.499.800 | 20,00 | 33,33 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 955 | 269.000.000 | | | 170 | 63.798.000 | 1 | 25.391.850 | 151,00 | 76.391.850 | 88,82 | 119,74 | 151,00 | 76.391.850 | 15,81 | 28,40 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 001 | 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 100 | 18.000.000 | | | 100 | 8.000.000 | | 10.121.776 | 0,00 | 10.121.776 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 10.121.776 | 0,00 | 56,23 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 001 | 2.07 | 005 | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | 6 | 18.000.000 | | | 3 | 8.000.000 | 1 | 10.121.776 | 1,00 | 10.121.776 | 0,00 | 1,27 | 1,00 | 10.121.776 | 16,67 | 56,23 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 001 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 277.620.000 | | | 100 | 57.940.000 | 11 | 17.112.812 | 101,00 | 51.708.991 | 101,00 | 89,25 | 101 | 51.708.991 | 101,00 | 18,63 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60 | 52.800.000 | | | 12 | 12.000.000 | 2 | 2.132.812 | 11,00 | 6.768.991 | 91,67 | 56,41 | 11,00 | 6.768.991 | 18,33 | 12,82 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 001 | 2.08 | 003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 32.160.000 | | | 12 | 1.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 240 | 192.660.000 | | | 45 | 44.940.000 | 9 | 14.980.000 | 90,00 | 44.940.000 | 75,00 | 100,00 | 90,00 | 44.940.000 | 37,50 | 23,33 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 001 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 67.500.000 | | | 100 | 32.099.752 | 1 | 19.028.572 | 1,00 | 44.996.076 | 75,00 | 140,18 | 1,00 | 44.996.076 | 1,00 | 66,66 | KECAMATAN MARDINDING |
| | | 7 | 01 | 001 | 2.09 | 002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Ken | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 5 | 47.500.000 | | | 1 | 32.099.752 | 1 | 19.028.572 | 1,00 | 44.996.076 | 75,00 | 140,18 | 1,00 | 44.996.076 | 20,00 | 94,73 | KECAMATAN MARDINGDINC |
| 36 | | 7 | 01 | 001 | 2.09 | 009 | | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Unit | 2 | 20.000.000 | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MARDINGDINC |
| 36 | Meningkatnya Pelay | 7 | 01 | 002 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBL | Indeks Kepuasan Masyrakat | Indeks | 95 | 522.000.000 | | | 83 | 65.726.138 | 9 | 66.666.100 | 9,00 | 78.734.300 | 10,84 | 120 | 9 | 78.734.300 | 9 | 15,08 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 002 | 2.01 | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan padakegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | 100 | 445.000.000 | | | 100 | 53.726.138 | 8 | 60.716.100 | 9,00 | 66.834.300 | 12,00 | 124,40 | 9 | 66.834.300 | 9,00 | 15,02 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 002 | 2.01 | 001 | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan deng | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 5 | 65.000.000 | | | 1 | 12.000.000 | 6 | 3.150.000 | 7,00 | 9.268.200 | 700,00 | 77,24 | 7,00 | 9.268.200 | 140,00 | 14,26 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 15 | 380.000.000 | | | 1 | 41.726.138 | 2 | 57.566.100 | 2,00 | 57.566.100 | 0,00 | 1,38 | 2,00 | 57.566.100 | 13,33 | 15,15 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 002 | 2.02 | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | % | 100 | 57.000.000 | | | 100 | 12.000.000 | 1 | 5.950.000 | 5,00 | 11.900.000 | 50,00 | 99,17 | 5 | 11.900.000 | 5,00 | 20,88 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 002 | 2.02 | 003 | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 60 | 57.000.000 | | | 12 | 12.000.000 | 1 | 5.950.000 | 5,00 | 11.900.000 | 41,67 | 99,17 | 5,00 | 11.900.000 | 8,33 | 20,88 | KECAMATAN MARDINDING |
| | | 7 | 01 | 002 | 2.03 | | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan SaranaPelayanan Umum | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | % | 100 | 10.000.000 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MARDINDING |
| | | 7 | 01 | 002 | 2.03 | 001 | | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang ter | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Laporan | 8 | 10.000.000 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MARDINDING |
| | | 7 | 01 | 002 | 2.04 | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat | % | 100 | 10.000.000 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MARDINDING |
| | | 7 | 01 | 002 | 2.04 | 001 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan No | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Laporan | 8 | 10.000.000 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | Meningkatnya Pelay | 7 | 01 | 003 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dikoordinasikan | Kegiatar | 29 | 53.932.544 | | | 6 | 9.576.272 | 12 | 22.562.500 | 15,00 | 24.049.465 | 250,00 | 251,14 | 15 | 24.049.465 | 51,72 | 44,59 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 003 | 2.01 | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | % | 100 | 53.932.544 | | | 100 | 9.576.272 | 12 | 22.562.500 | 15,00 | 24.049.465 | 15,00 | 251,14 | 15 | 24.049.465 | 15,00 | 44,59 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 003 | 2.01 | 003 | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecama | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 60 | 53.932.544 | | | 12 | 9.576.272 | 12 | 22.562.500 | 15,00 | 24.049.465 | 125,00 | 251,14 | 15,00 | 24.049.465 | 25,00 | 44,59 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | Meningkatnya Kuali | 7 | 01 | 004 | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Penegakan Perda dan Perkada | Perda dar | 10/10/10 | 60.000.000 | | | 2/2/2 | 12.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 004 | 2.01 | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | % | 100 | 55.000.000 | | | 100 | 12.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MARDINDING |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 7 | 01 | 004 | 2.01 | 001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indo | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 50.000.000 | | | 1 | 12.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MARDINDING |
| | | 7 | 01 | 004 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Ke | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | % | 100 | 5.000.000 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MARDINDING |
| | | 7 | 01 | 004 | 2.02 | 001 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bid | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan | 10 | 5.000.000 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 004 | 2.03 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | % | 100 | 10.000.000 | | | 100 | 6.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 004 | 2.03 | 002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Laporan | 10 | 5.000.000 | | | 2 | 6.000.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MARDINDING |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | 400 | 24.100.110 | 400,00 | 24.100.110 | | | | | | | KECAMATAN MARDINDING |
| | | | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | | 24.100.110 | 0,00 | 24.100.110 | | | | | | | KECAMATAN MARDINDING |
| | | | | | | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan d | | | | | | | | | 400 | 24.100.110 | 400,00 | 24.100.110 | | | | | | | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | Meningkatnya Pelay | 7 | 01 | 006 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintah desa yang dibina dan diawasi | Pemerinta | 12 | 6.000.000 | | | 12 | 15.476.110 | | 4.680.000 | 0,00 | 4.680.000 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 4.680.000 | 0,00 | 78 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 006 | 2.01 | | Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Peme | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | % | 100 | 6.000.000 | | | 100 | 15.476.110 | | 4.680.000 | 0,00 | 4.680.000 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 4.680.000 | 0,00 | 78,00 | KECAMATAN MARDINDING |
| 36 | | 7 | 01 | 006 | 2.01 | 003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam penyusunan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 48 | 6.000.000 | | | 12 | 15.476.110 | | 4.680.000 | 0,00 | 4.680.000 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 4.680.000 | 0,00 | 78,00 | KECAMATAN MARDINDING |
| 37 | | 7 | 01 | | | | KECAMATAN MERDEKA | | | 100 | 15.870.273.059 | | | 100 | 2.211.819.365 | | | 5202066,72 | 1.567.339.163,62 | 52.020,67 | 0,71 | 52.020,67 | 1.567.339.164 | 520,21 | 9,88 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | Meningkatnya Pelay | 7 | 01 | 001 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN | Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) | Indeks | 95 | 14.801.001.682 | | | 83 | 2.101.457.161 | | 742.570.107 | ########## | 2.212.879.934,62 | 150.510,70 | 1,05 | 12.492.387,81 | 2.212.879.934,62 | ########## | 14,95 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 001 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 13.402.313.095 | | | 100 | 1.909.110.275 | - | 535.769.131 | 51,00 | 1.794.666.604,00 | 0,51 | 0,94 | 51,00 | 1.794.666.604,00 | 0,51 | 13,39 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bul | 80 | 12.752.838.525 | | | 16 | 1.821.834.075 | | 488.152.651 | 48,00 | 1.697.190.124,00 | 3,00 | 0,93 | 48,00 | 1.697.190.124,00 | 0,60 | 13,31 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 001 | 2.02 | 003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 5 | 649.474.570 | | | 1 | 87.276.200 | | 47.616.480 | 3,00 | 97.476.480,00 | 3,00 | 1,12 | 3,00 | 97.476.480,00 | 0,60 | 15,01 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 001 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 133.786.400 | | | 100 | 16.500.000 | | 28.500.000 | 45,45 | 43.500.000,00 | 0,45 | 2,64 | 45,45 | 43.500.000,00 | 0,45 | 32,51 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 001 | 2.05 | 001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 1 | 11.000.000 | | | 0 | | | - | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 110 | 122.786.400 | | | 22 | 16.500.000 | | 28.500.000 | 20,00 | 43.500.000,00 | 0,91 | 2,64 | 20,00 | 43.500.000,00 | 0,18 | 35,43 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 001 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 540.126.238 | | | 100 | 79.795.506 | | 105.135.135 | 65,44 | 174.134.317,00 | 0,65 | 2,18 | 65,44 | 174.134.317,00 | 0,65 | 32,24 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | paket | 5 | 30.816.633 | | | 1 | 4.141.130 | | | 1,00 | 4.141.130,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4.141.130,00 | 0,20 | 13,44 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | paket | 5 | 133.570.990 | | | 1 | 17.949.230 | | 52.784.645 | 2,00 | 70.731.510,00 | 2,00 | 3,94 | 2,00 | 70.731.510,00 | 0,40 | 52,95 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 001 | 2.06 | 003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | paket | 5 | 54.130.072 | | | 1 | 7.273.983 | | | 1,00 | 7.273.983,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7.273.983,00 | 0,20 | 13,44 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | paket | 10 | 24.342.688 | | | 2 | 3.271.163 | | 1.200.490 | 1,00 | 3.271.163,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 3.271.163,00 | 0,10 | 13,44 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 180 | 16.073.856 | | | 36 | 2.160.000 | | 2.700.000 | 0,00 | 2.700.000 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 2.700.000 | 0,00 | 16,80 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1.500 | 281.192.000 | | | 300 | 45.000.000 | | 48.450.000 | 237,00 | 86.016.531,00 | 0,79 | 1,91 | 237,00 | 86.016.531,00 | 0,16 | 30,59 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 001 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 100 | 10.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 001 | 2.07 | 005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | unit | 1 | 10.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 001 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 435.886.511 | | | 100 | 58.574.300 | | 25.601.135 | 22,22 | 40.583.068,00 | 0,22 | 0,69 | 22,22 | 40.583.068,00 | 0,22 | 9,31 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60 | 196.458.240 | | | 12 | 26.400.000 | | 3.196.815 | 6,00 | 8.458.748,00 | 0,50 | 0,32 | 6,00 | 8.458.748,00 | 0,10 | 4,31 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 20 | 21.134.144 | | | 4 | 2.840.000 | | 2.840.000 | 0,00 | 2.840.000 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2.840.000 | 0,00 | 13,44 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 120 | 218.294.127 | | | 24 | 29.334.300 | | 19.564.320 | 8,00 | 29.284.320,00 | 0,33 | 1,00 | 8,00 | 29.284.320,00 | 0,07 | 13,42 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 001 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 278.889.438 | | | 2 | 37.477.080 | | 47.564.706 | ########## | 159.995.946 | 56.215.619,81 | 4,27 | 112.431.239,62 | 159.995.946 | ########## | 57,37 | KECAMATAN MERDEKA |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 7 | 01 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Ken | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinanya | unit | 5 | 163.967.961 | | | 1 | 22.033.966 | | 32.121.592 | 0,00 | 32.121.592 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 32.121.592 | 0,00 | 19,59 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 5 | 114.921.476 | | | 1 | 15.443.114 | | 15.443.114 | 0,00 | 15.443.114 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 15.443.114 | 0,00 | 13,44 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | Meningkatnya Pelay | 7 | 01 | 002 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBI | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 95 | 624.447.092 | | | 83 | 78.000.308 | | 9.324.000 | ########## | 106.353.336,00 | 225.542,32 | 1,36 | 18.720.012,50 | 106.353.336,00 | ######### | 17,03 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 002 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | 100 | 301.833.588 | | | 100 | 40.560.308 | | | 50,00 | 22.149.336,00 | 0,50 | 0,55 | 50,00 | 22.149.336,00 | 0,50 | 7,34 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 002 | 2.01 | 001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan deng | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 5 | 112.491.006 | | | 1 | 15.116.508 | | | 1,00 | 4.933.076,00 | 1,00 | 0,33 | 1,00 | 4.933.076,00 | 0,20 | 4,39 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 10 | 189.342.582 | | | 2 | 25.443.800 | | | 1,00 | 17.216.260 | 0,50 | 0,68 | 1,00 | 17.216.260 | 0,10 | 9,09 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 002 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | % | 100 | 278.613.504 | | | 8 | 37.440.000 | | 9.324.000 | ########## | 121.644.000,00 | 14.040.000,00 | 3,25 | 112.320.000,00 | 121.644.000,00 | ######### | 43,66 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 002 | 2.02 | 003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 60 | 278.613.504 | | | 12 | 37.440.000 | | 9.324.000 | 9,00 | 37.296.000,00 | 0,75 | 1,00 | 9,00 | 37.296.000,00 | 0,15 | 13,39 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 002 | 2.03 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dilimpahkan kepada Camat | % | 100 | 28.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 002 | 2.03 | 001 | Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang ter | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Dokumen | 48 | 8.000.000 | | | | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 002 | 2.03 | 002 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas Pelayanan Umum yang Meli | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta | unit | 4 | 20.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 002 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | % | 100 | 16.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 002 | 2.04 | 001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan N | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Dokumen | 1.500 | 4.000.000 | | | | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 002 | 2.04 | 002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 48 | 4.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 002 | 2.04 | 003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 48 | 8.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | Meningkatnya Pelay | 7 | 01 | 003 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kegiatan | 24 | 44.000.000 | | | | | | 20.000.000 | 0,00 | 20.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000 | 0,00 | 45,45 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 003 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | % | 100 | 8.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 3 | 2.01 | 001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pe | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga | 20 | 4.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 3 | 2.01 | 003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecama | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 20 | 4.000.000 | | | | | | 20.000.000 | 0,00 | 20.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000 | 0,00 | 500,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 3 | 2.05 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyara | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | % | 100 | 36.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 3 | 2.01 | 003 | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Dokumen | 48 | 36.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | Meningkatnya Kuali | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Perda/Per | 8/8/24 | 80.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | % | 100 | 56.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indo | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 24 | 48.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 002 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Laporan | 24 | 8.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan PeraturanDaerah dan Peraturan Kep | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | % | 100 | 24.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 001 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bid | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan | 24 | 24.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Meningkatnya Pelay | 7 | 01 | 005 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Urusan | 5 | 240.824.285 | | | 1 | 32.361.896 | | 35.272.506 | 0,00 | 35.272.506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.272.506 | 0,00 | 14,65 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 005 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala D | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | % | 100 | 240.824.285 | | | 1 | 32.361.896 | | 35.272.506 | 0,00 | 35.272.506 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 35.272.506 | 0,00 | 14,65 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 5 | 2.01 | 001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mem | Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | orang | 800 | 240.824.285 | | | 1 | 32.361.896 | | 35.272.506 | 0,00 | 35.272.506 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 35.272.506 | 0,00 | 14,65 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | Meningkatnya Pelay | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi | Pemerinta | 36 | 80.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pem | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | % | 100 | 80.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Dokumen | 72 | 8.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 36 | 36.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 37 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa danPendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 36 | 36.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 38 | | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | | | | KECAMATAN MEREK | | | | 15.051.550.075 | | | | 2.880.520.303 | 0 | 1.240.727.679 | | 2.919.131.780 | | 101,34 | | 2.919.131.780 | | 19,39 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 445 | 13.800.384.590 | | | 83 | 2.665.487.206 | 0 | 1.109.772.948 | 288,04 | 2.775.579.349 | 347,04 | 104,13 | 288,04 | 2.775.579.349 | 64,73 | 20,11 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 12.686.604.695 | | | 12 | 2.462.623.227 | 0 | 930.324.598 | 29,00 | 2.504.794.449 | 241,67 | 101,71 | 29,00 | 2.504.794.449 | 29,00 | 19,74 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/ Bu | 116 | 12.405.904.695 | | | 12 | 2.390.483.227 | | 889.284.598 | 9,00 | 2.430.164.449 | 75,00 | 101,66 | 9,00 | 2.430.164.449 | 7,76 | 19,59 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 01 | 2 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 116 | 280.700.000 | | | 96 | 72.140.000 | | 41.040.000 | 20,00 | 74.630.000 | 20,83 | 103,45 | 20,00 | 74.630.000 | 17,24 | 26,59 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 01 | 2,1 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 111.000.000 | | | 12 | 15.000.000 | 0 | 17.250.000 | 0,00 | 17.250.000 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 17.250.000 | 0,00 | 15,54 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 2 | 20.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 01 | 2,1 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 19 | 91.000.000 | | | 15 | 15.000.000 | | 17.250.000 | 0,00 | 17.250.000 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 17.250.000 | 0,00 | 18,96 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 01 | 2,1 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 445.679.895 | | | 12 | 53.532.879 | 0 | 59.684.150 | 208,00 | 94.962.400 | 1.733,33 | 177,39 | 208,00 | 94.962.400 | 208,00 | 21,31 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 01 | 2,1 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 17 | 4.090.380 | | | 13 | 818.076 | | | 13,00 | 766.950 | 100,00 | 93,75 | 13,00 | 766.950 | 76,47 | 18,75 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 01 | 2,1 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 116 | 290.981.125 | | | 41 | 12.485.125 | | | 41,00 | 12.336.000 | 100,00 | 98,81 | 41,00 | 12.336.000 | 35,34 | 4,24 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 01 | 2,1 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 151 | 15.259.770 | | | 101 | 3.051.954 | | | 101,00 | 3.041.900 | 100,00 | 99,67 | 101,00 | 3.041.900 | 66,89 | 19,93 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 01 | 2,1 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 13 | 14.105.540 | | | 2 | 1.897.724 | | 395.150 | 2,00 | 1.895.550 | 100,00 | 99,89 | 2,00 | 1.895.550 | 15,38 | 13,44 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 01 | 2,1 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1.706 | 121.243.080 | | | 106 | 35.280.000 | | 59.289.000 | 51,00 | 76.922.000 | 48,11 | 218,03 | 51,00 | 76.922.000 | 2,99 | 63,44 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintah Daearah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 100 | 80.000.000 | | | 3 | 45.711.100 | | 43.170.000 | 0,00 | 43.170.000 | 0,00 | 94,44 | 0,00 | 43.170.000 | 0,00 | 53,96 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 01 | 2,1 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 30 | 80.000.000 | | | 0 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 07 | 01 | 01 | 2,1 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan | Unit | 3 | | | | 3 | 45.711.100 | | 43.170.000 | 0,00 | 43.170.000 | 0,00 | 94,44 | 0,00 | 43.170.000 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 346.600.000 | | | 12 | 67.320.000 | | 40.535.000 | 26,04 | 83.700.000 | 217,01 | 124,33 | 26,04 | 83.700.000 | 26,04 | 24,15 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 01 | 2,1 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 54 | 49.000.000 | | | 12 | 7.800.000 | | 7.200.000 | 0,00 | 7.200.000 | 0,00 | 92,31 | 0,00 | 7.200.000 | 0,00 | 14,69 | KECAMATAN MEREK |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | | | | | | | 1.460.000 | | | | | | | | | |
| 38 | | 7 | 01 | 01 | 2,1 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 288 | 297.600.000 | | | 48 | 59.520.000 | | 31.875.000 | 25,00 | 76.500.000 | 52,08 | 128,53 | 25,00 | 76.500.000 | 8,68 | 25,71 | KECAMATAN MEREK |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 130.500.000 | | | 1 | 21.300.000 | | 18.809.200 | 25,00 | 31.702.500 | 2.500,00 | 148,84 | 25,00 | 31.702.500 | 25,00 | 24,29 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kenda | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 5 | 110.500.000 | | | 1 | 21.300.000 | | 18.809.200 | 0,50 | 31.702.500 | 50,00 | 148,84 | 0,50 | 31.702.500 | 10,00 | 28,69 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 4 | 20.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBL | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 445 | 467.850.000 | | | 92 | 73.570.000 | | 16.612.600 | 53,00 | 37.612.600 | 57,61 | 51,12 | 53,00 | 37.612.600 | 11,91 | 8,04 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 02 | 2 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | 100 | 130.250.000 | | | 1 | 26.050.000 | | 0 | 50,00 | 6.300.000 | 5.000,00 | 24,18 | 50,00 | 6.300.000 | 50,00 | 4,84 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 02 | 2 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan deng | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 154 | 106.250.000 | | | 150 | 26.050.000 | | | 150,00 | 6.300.000 | 100,00 | 24,18 | 150,00 | 6.300.000 | 97,40 | 5,93 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 02 | 2 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 12 | 24.000.000 | | | 3 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 02 | 2 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | % | 100 | 237.600.000 | | | 24 | 47.520.000 | | 16.612.600 | 3,00 | 31.312.600 | 12,50 | 65,89 | 3,00 | 31.312.600 | 3,00 | 13,18 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 02 | 2 | 03 | Peningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 48 | 237.600.000 | | | 8 | 47.520.000 | | 16.612.600 | 3,00 | 31.312.600 | 37,50 | 65,89 | 3,00 | 31.312.600 | 6,25 | 13,18 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 02 | 03 | 2.03 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan SaranaPelayanan Umum | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | % | 100 | 40.000.000 | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 02 | 03 | 2.03 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerahdan/atau Instansi Vertikal yang Ter | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Dokumen | 4 | 20.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 02 | 03 | 2.03 | 02 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Mel | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta | Unit | 4 | 20.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat | % | 100 | 60.000.000 | | | | 0 | | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Ne | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Dokumen | 30 | 20.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang TerkaitDengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 30 | 20.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan lain yang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 30 | 20.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah kegiatan pemberdayaan | Kegiatan | 311 | 40.000.000 | | | | 0 | | 20.000.000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | % | 100 | 40.000.000 | | | | | | 20.000.000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pe | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga | 20 | 20.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecama | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 291 | 20.000.000 | | | | | | 20.000.000 | 0,00 | 20.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000 | 0,00 | 100,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 03 | 2.05 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyara | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | % | 100 | 20.000.000 | | | | 0 | | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 03 | 2.05 | 01 | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Dokumen | 19 | 20.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Penegakan Perda, Perkada dan Kegiatan | Perda/ Pe | 13 | 202.750.000 | | | 20 | 37.350.000 | | 37.350.000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 04 | 2 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 194.750.000 | | | 1 | 37.350.000 | | 37.350.000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 04 | 2 | 01 | Sinergisitas dengan kepolisian negara RI TNI, dan Instansi Vertikal Di Wilayah K | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 9 | 186.750.000 | | | 1 | 37.350.000 | | 37.350.000 | 0,00 | 37.350.000 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 37.350.000 | 0,00 | 20,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 04 | 2 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Laporan | 8 | 8.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Ke | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | % | 100 | 8.000.000 | | | | 0 | | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bid | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan | 4 | 8.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan | Urusan | 1.302 | 520.565.485 | | | 1 | 104.113.097 | | 56.992.131 | 0,00 | 105.939.831 | 0,00 | 101,75 | 0,00 | 105.939.831 | 0,00 | 20,35 | KECAMATAN MEREK |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 7 | 01 | 05 | 2 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala D | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | % | 100 | 520.565.485 | | | 1 | 104.113.097 | | 56.992.131 | 0,00 | 105.939.831 | 0,00 | 101,75 | 0,00 | 105.939.831 | 0,00 | 20,35 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 05 | 2 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mem | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 1.302 | 520.565.485 | | | 2 | 104.113.097 | | 56.992.131 | 0,00 | 105.939.831 | 0,00 | 101,75 | 0,00 | 105.939.831 | 0,00 | 20,35 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi | Pemerinta | 152 | 20.000.000 | | | | 0 | | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pem | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | % | 100 | 20.000.000 | | | | 0 | | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 38 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamat | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 152 | 20.000.000 | | | | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MEREK |
| 39 | | 7 | 01 | | | | KECAMATAN MUNTE | KECAMATAN MUNTE | | | 12.890.414.281 | | | | 2.288.782.885 | - | 2.271.433.188 | 167,00 | 3.389.011.759 | 0,00 | 148,07 | 0,00 | 3.389.011.759 | 0,00 | 26,29 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 95 | 12.124.959.116 | | | 83 | 2.131.103.985 | 0 | 2.165.081.188 | 0,00 | 3.275.359.759 | 0,00 | 153,69 | 0,00 | 3.275.359.759 | 0,00 | 27,01 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Admisintrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 10.830.334.269 | | | 100 | 1.842.962.873 | 0 | 1.838.464.869 | 6,00 | 2.843.627.945 | 6,00 | 154,30 | 6,00 | 2.843.627.945 | 6,00 | 26,26 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bul | 76 | 10.378.354.269 | | | 12 | 1.759.262.873 | | 1.760.104.869 | 6,00 | 2.735.457.945 | 50,00 | 155,49 | 6,00 | 2.735.457.945 | 7,89 | 26,36 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 120 | 451.980.000 | | | 132 | 83.700.000 | | 78.360.000 | 0,00 | 108.170.000 | 0,00 | 129,24 | 0,00 | 108.170.000 | 0,00 | 23,93 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 106.768.000 | | | 100 | 25.536.000 | 0 | 25.536.000 | 0,00 | 51.072.000 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 51.072.000 | 0,00 | 47,83 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 4 | 30.000.000 | | | 0 | 0 | | - | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 23 | 76.768.000 | | | 38 | 25.536.000 | | 25.536.000 | 0,00 | 51.072.000 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 51.072.000 | 0,00 | 66,53 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 539.878.847 | | | 100 | 139.951.533 | 0 | 127.384.984 | 16,00 | 160.176.274 | 16,00 | 114,45 | 16,00 | 160.176.274 | 16,00 | 29,67 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 8.000.000 | | | 0 | 0 | | - | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 38 | 169.971.563 | | | 30 | 79.998.525 | | 16.309.532 | 15,00 | 25.525.822 | 50,00 | 31,91 | 15,00 | 25.525.822 | 39,47 | 15,02 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 21 | 21.042.684 | | | 13 | 6.134.008 | | 6.122.452 | 0,00 | 6122452 | 0,00 | 99,81 | 0,00 | 6122452 | 0,00 | 29,10 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 15 | 20.862.600 | | | 3 | 6.475.000 | | 6.075.000 | 1,00 | 12.150.000 | 33,33 | 187,64 | 1,00 | 12.150.000 | 6,67 | 58,24 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 3 | 18.000.000 | | | 0 | 0 | | 20.000.000 | 0,00 | 20.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000 | 0,00 | 111,11 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1107 | 302.002.000 | | | 307 | 47.344.000 | | 78.878.000 | 0,00 | 96.378.000 | 0,00 | 203,57 | 0,00 | 96.378.000 | 0,00 | 31,91 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 100 | 120.000.000 | | | 100 | 0 | 0 | 65.000.000 | 0,00 | 65.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000 | 0,00 | 54,17 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 43 | 65.000.000 | | | 0 | 0 | | 25.000.000 | 0,00 | 25.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000 | 0,00 | 38,46 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 9 | 55.000.000 | | | 0 | 0 | | 40.000.000 | 0,00 | 40.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000 | 0,00 | 72,73 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 350.780.000 | | | 100 | 66.600.000 | 0 | 57.182.535 | 14,00 | 87.435.740 | 14,00 | 131,28 | 14,00 | 87.435.740 | 14,00 | 24,93 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 108 | 93.960.000 | | | 12 | 17.400.000 | | 12.242.535 | 6,00 | 22.655.740 | 50,00 | 130,21 | 6,00 | 22.655.740 | 5,56 | 24,11 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 22 | 13.880.000 | | | 6 | 4.260.000 | | - | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 180 | 242.940.000 | | | 36 | 44.940.000 | | 44.940.000 | 8,00 | 64.780.000 | 22,22 | 144,15 | 8,00 | 64.780.000 | 4,44 | 26,67 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 177.198.000 | | | 100 | 56.053.579 | 0 | 51.512.800 | 1,00 | 68047800,00 | 1,00 | 121,40 | 1,00 | 68047800,00 | 1,00 | 38,40 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 5 | 137.700.000 | | | 1 | 35.510.000 | | 30.972.200 | 1,00 | 47507200,00 | 100,00 | 133,79 | 1,00 | 47507200,00 | 20,00 | 34,50 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 39.498.000 | | | 1 | 20.543.579 | | 20.540.600 | 0,00 | 20.540.600 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 20.540.600 | 0,00 | 52,00 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 95 | 339.889.165 | | | 83 | 63.147.540 | 0 | 23.500.000 | 130,00 | 30.800.000 | 156,63 | 48,77 | 130,00 | 30.800.000 | 136,84 | 9,06 | KECAMATAN MUNTE |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | 100 | 130.900.000 | | | 100 | 45.480.000 | 0 | 7.300.000 | 130,00 | 14.600.000 | 130,00 | 32,10 | 130,00 | 14.600.000 | 130,00 | 11,15 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 304 | 42.700.000 | | | 300 | 16.580.000 | | 7.300.000 | 130,00 | 14.600.000 | 43,33 | 88,06 | 130,00 | 14.600.000 | 42,76 | 34,19 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 14 | 88.200.000 | | | 2 | 28.900.000 | | - | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | % | 100 | 106.080.000 | | | 100 | 17.667.540 | 0 | 16.200.000 | 0,00 | 16.200.000 | 0,00 | 91,69 | 0,00 | 16.200.000 | 0,00 | 15,27 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 40 | 106.080.000 | | | 8 | 17.667.540 | | 16.200.000 | 0,00 | 16.200.000 | 0,00 | 91,69 | 0,00 | 16.200.000 | 0,00 | 15,27 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | % | 100 | 42.909.165 | | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta | Unit | 3 | 42.909.165 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | % | 100 | 60.000.000 | | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Dokumen | 8 | 20.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 40 | 20.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 4 | 20.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kegiatan | 28 | 40.000.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | % | 100 | 20.000.000 | | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga | 20 | 12.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 24 | 8.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 03 | 2.05 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | % | 100 | 20.000.000 | | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 03 | 2.05 | 01 | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Dokumen | 88 | 20.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA | Perda/ Pe | 10/10/10 | 75.080.000 | | | 6 | 22.840.000 | 0 | 11.370.000 | 0,00 | 11.370.000 | 0,00 | 49,78 | 0,00 | 11.370.000 | 0,00 | 15,14 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | % | 100 | 50.080.000 | | | 100 | 11.370.000 | 0 | 11.370.000 | 0,00 | 11.370.000 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 11.370.000 | 0,00 | 22,70 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 41 | 30.080.000 | | | 1 | 11.370.000 | | 11.370.000 | 0,00 | 11.370.000 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 11.370.000 | 0,00 | 37,80 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Laporan | 20 | 20.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | % | 100 | 25.000.000 | | | 100 | 11.470.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan | 20 | 25.000.000 | | | 4 | 11.470.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DISELENGGARAKAN KECAMATAN | Urusan | 5 | 247.446.000 | | | 1 | 51.491.360 | 0 | 51.358.000 | 0,00 | 51.358.000 | 0,00 | 99,74 | 0,00 | 51.358.000 | 0,00 | 20,76 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | % | 100 | 247.446.000 | | | 100 | 51.491.360 | 0 | 51.358.000 | 0,00 | 51.358.000 | 0,00 | 99,74 | 0,00 | 51.358.000 | 0,00 | 20,76 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 1001 | 247.446.000 | | | 1 | 51.491.360 | | 51.358.000 | 0,00 | 51.358.000 | 0,00 | 99,74 | 0,00 | 51.358.000 | 0,00 | 20,76 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | JUMLAH PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA DAN DIAWASI | Pemerinta | 110 | 63.040.000 | | | 22 | 20.200.000 | 0 | 20.124.000 | 0,00 | 20.124.000 | 0,00 | 99,62 | 0,00 | 20.124.000 | 0,00 | 31,92 | KECAMATAN MUNTE |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | % | 100 | 63.040.000 | | | 100 | 20.200.000 | 0 | 20.124.000 | 0,00 | 20.124.000 | 0,00 | 99,62 | 0,00 | 20.124.000 | 0,00 | 31,92 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Dokumen | 176 | 20.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN MUNTE |
| 39 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 110 | 43.040.000 | | | 22 | 20.200.000 | | 20.124.000 | 0,00 | 20.124.000 | 0,00 | 99,62 | 0,00 | 20.124.000 | 0,00 | 46,76 | KECAMATAN MUNTE |
| 40 | | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | | | | KECAMATAN NAMANTERAN | | | 95 | 17.927.437.993 | | | 83 | 2.186.343.136 | 0 | 933.255.935 | 100,00 | 2.186.926.611 | 1,20 | 1,00 | 100,00 | 2.186.926.611 | 1,05 | 0,12 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | indeks | 95 | 16.368.802.859 | | | 83 | 2.024.061.485 | 0 | 917.305.935 | 47,88 | 2.069.504.960 | 0,58 | 1,02 | 47,88 | 2.069.504.960 | 0,50 | 0,13 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 14.332.016.747 | | | 12 | 1.850.932.158 | | 761.517.265 | 72,54 | 1.814.515.837 | 6,04 | 0,98 | 72,54 | 1.814.515.837 | 0,73 | 0,13 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | orang/bular | 60 | 13.822.862.475 | | | 12 | 1.782.512.158 | | 697.109.165 | 10,00 | 1.726.457.737 | 0,83 | 0,97 | 10,00 | 1.726.457.737 | 0,17 | 0,12 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | dokumen | 136 | 509.154.272 | | | 88 | 68.420.000 | | 64.408.100 | 25,00 | 88.058.100 | 0,28 | 1,29 | 25,00 | 88.058.100 | 0,18 | 0,17 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 146.042.800 | | | 12 | 14.250.000 | | 6.405.500 | 50,00 | 20.655.500 | 4,17 | 1,45 | 50,00 | 20.655.500 | 0,50 | 0,14 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | unit | 4 | 40.000.000 | | | 0 | 0 | | 6.405.500 | 0,00 | 6.405.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.405.500 | 0,00 | 0,16 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | paket | 23 | 106.042.800 | | | 19 | 14.250.000 | | 0 | 19,00 | 14.250.000 | 1,00 | 1,00 | 19,00 | 14.250.000 | 0,83 | 0,13 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 605.341.714 | | | 12 | 74.300.527 | | 36.777.500 | 74,41 | 76.474.703 | 6,20 | 1,03 | 74,41 | 76.474.703 | 0,74 | 0,13 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | paket | 19 | 15.143.656 | | | 15 | 2.035.000 | | | 17,00 | 2.019.207 | 1,13 | 0,99 | 17,00 | 2.019.207 | 0,89 | 0,13 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | paket | 41 | 105.804.572 | | | 33 | 14.217.987 | | 4.375.600 | 31,00 | 14.152.895 | 0,94 | 1,00 | 31,00 | 14.152.895 | 0,76 | 0,13 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | paket | 15 | 18.827.546 | | | 11 | 2.530.040 | | | 11,00 | 2.527.301 | 1,00 | 1,00 | 11,00 | 2.527.301 | 0,73 | 0,13 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengggandaan yang disediakan | paket | 10 | 10.221.038 | | | 2 | 1.373.500 | | 1.349.900 | 2,00 | 2.723.300 | 1,00 | 1,98 | 2,00 | 2.723.300 | 0,20 | 0,27 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | laporan | 48 | 24.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 1.233 | 431.344.902 | | | 408 | 54.144.000 | 246 | 31.052.000 | 406,00 | 55.052.000 | 1,00 | 1,02 | 406,00 | 55.052.000 | 0,33 | 0,13 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 100 | 381.561.358 | | | 3 | 6.928.800 | | 50.182.228 | 22,22 | 55.122.228 | 7,41 | 7,96 | 22,22 | 55.122.228 | 0,22 | 0,14 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | unit | 1 | 300.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 15 | 51.561.358 | | | 3 | 6.928.800 | 1 | 7.418.428 | 3,00 | 12.358.428 | 1,00 | 1,78 | 3,00 | 12.358.428 | 0,20 | 0,24 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| | | | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | 42.763.800 | | | | | | | | | |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya | unit | 1 | 30.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 371.010.480 | | | 12 | 49.050.000 | | 24.529.200 | 43,10 | 59.745.800 | 3,59 | 1,22 | 43,10 | 59.745.800 | 0,43 | 0,16 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 156 | 70.323.120 | | | 12 | 9.450.000 | 3 | 1.964.200 | 12,00 | 7.480.800 | 1,00 | 0,79 | 12,00 | 7.480.800 | 0,08 | 0,11 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | laporan | 12 | 6.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | laporan | 179 | 294.687.360 | | | 35 | 39.600.000 | 16 | 22.565.000 | 35,00 | 52.265.000 | 1,00 | 1,32 | 35,00 | 52.265.000 | 0,20 | 0,18 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 532.829.760 | | | 4 | 28.600.000 | | 37.894.242 | 25,00 | 42.990.892 | 6,25 | 1,50 | 25,00 | 42.990.892 | 0,25 | 0,08 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kenda | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 12 | 212.829.760 | | | 4 | 28.600.000 | | 37.894.242 | 2,00 | 42.990.892 | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 42.990.892 | 0,17 | 0,20 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 4 | 320.000.000 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBL | Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) | Indeks | 445 | 581.216.800 | | | 83 | 60.500.000 | | 6.460.000 | 100,00 | 27.050.000 | 1,20 | 0,45 | 100,00 | 27.050.000 | 0,22 | 0,05 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | 100 | 195.529.440 | | | 1 | 20.900.000 | | | 30,00 | 4.860.000 | 30,00 | 0,23 | 30,00 | 4.860.000 | 0,30 | 0,02 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan deng | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | laporan | 204 | 155.529.440 | | | 200 | 20.900.000 | | | 120,00 | 4.860.000 | 0,60 | 0,23 | 120,00 | 4.860.000 | 0,59 | 0,03 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Peningkatkan Efektifitas kegiatan pemerintah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | dokumen | 8 | 40.000.000 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | % | 100 | 294.687.360 | | | 5 | 39.600.000 | | 6.460.000 | 58,33 | 22.190.000 | 11,67 | 0,56 | 58,33 | 22.190.000 | 0,58 | 0,08 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | laporan | 60 | 294.687.360 | | | 12 | 39.600.000 | | 6.460.000 | 7,00 | 22.190.000 | 0,58 | 0,56 | 7,00 | 22.190.000 | 0,12 | 0,08 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | % | 100 | 55.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Te | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | dokumen | 4 | 20.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Me | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta | Unit | 4 | 35.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | % | 100 | 36.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Ne | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | dokumen | 8 | 12.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | laporan | 8 | 12.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan lain yang | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | laporan | 8 | 12.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kegiatan | 20 | 80.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | % | 100 | 65.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pe | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | ga kemasy | 20 | 40.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecama | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | laporan | 20 | 25.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 03 | 2.05 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyara | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | % | 100 | 20.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 03 | 2.05 | 01 | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | dokumen | 40 | 20.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Tingkat Penegakan Perda dan Perkada | Perkada/K | 8/8/9 | 235.529.440 | | | 1 | 20.900.000 | | 9.490.000 | 0,00 | 9.490.000 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 9.490.000 | 0,00 | 0,04 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | % | 100 | 195.529.440 | | | 1 | 20.900.000 | | 9.490.000 | 0,00 | 9.490.000 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 9.490.000 | 0,00 | 0,05 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergisitas dengan kepolisian negara RI TNI, dan Instansi Vertikal Di Wilayah K | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | laporan | 5 | 155.529.440 | | | 1 | 20.900.000 | | 9.490.000 | 0,00 | 9.490.000 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 9.490.000 | 0,00 | 0,06 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 02 | Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | laporan | 4 | 40.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada | % | 100 | 40.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerahyang Tugas dan Fungsinya di Bida | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | laporan | 8 | 40.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | Urusan | 5 | 601.888.894 | | | 300 | 80.881.651 | | 0 | 100,00 | 80.881.651 | 0,33 | 1,00 | 100,00 | 80.881.651 | 20,00 | 0,13 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala D | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | % | 100 | 601.888.894 | | | 300 | 80.881.651 | | | 100,00 | 80.881.651 | 0,33 | 1,00 | 100,00 | 80.881.651 | 1,00 | 0,13 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mem | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | orang | 300 | 601.888.894 | | | 300 | 80.881.651 | | 0 | 300,00 | 80.881.651 | 1,00 | 1,00 | 300,00 | 80.881.651 | 1,00 | 0,13 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi | erintahan | 56 | 60.000.000 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 40 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pem | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | % | 100 | 60.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamat | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | laporan | 56 | 60.000.000 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| 41 | | 7 | 01 | | | | Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 5 | 01 | | | | KECAMATAN PAYUNG | | | 100 | 10.337.221.175 | | | 100 | 1.995.300.235 | 0 | 739.694.031 | 188,46 | 1.671.982.937 | 188,46 | 83,80 | 17,89 | 342.476.261 | 17,89 | 3,31 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) | Indeks | 95 | 9.776.599.200 | | | 83 | 1.903.900.096 | 0 | 670.200.031 | 105,18 | 1.568.881.937 | 126,72 | 82,40 | 18,67 | 342.476.261 | 19,65 | 3,50 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 8.881.286.815 | | | 100 | 1.723.143.363 | | 455.765.167 | 53,00 | 1.363.414.318 | 53,00 | 79,12 | 50,00 | 308.320.109 | 50,00 | 3,47 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bul | 60 | 8.343.536.815 | | | 13 | 1.596.563.363 | 3 | 407.605.167 | 32 | 1.238.094.318 | 50,00 | 77,55 | 13,00 | 288.080.109 | 21,67 | 3,45 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 60 | 537.750.000 | | | 12 | 126.580.000 | 50 | 48.160.000 | 86 | 125.320.000 | 50,00 | 99,00 | 13,00 | 288.080.109 | 21,67 | 53,57 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 75.000.000 | | | 100 | 17.487.800 | | 0 | 8,28 | 14.487.800 | 8,28 | 82,85 | 8,28 | 1.448.780 | 18,67 | 3,47 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 1 | 11.000.000 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 50,00 | #DIV/0! | 13,00 | 288.080.109 | 1.300,00 | 2.618,91 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 5 | 64.000.000 | | | 1 | 17.487.800 | | 0 | 2 | 14.487.800 | 50,00 | 82,85 | 13,00 | 288.080.109 | 260,00 | 450,13 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 454.587.385 | | | 100 | 96.974.247 | | 76.021.150 | 9,00 | 98.211.650 | 9,00 | 101,28 | 6,00 | 12.129.000 | 6,00 | 2,67 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 175 | 21.712.525 | | | 35 | 3.825.410 | | 0 | 35 | 3.784.000 | 50,00 | 98,92 | 13,00 | 288.080.109 | 7,43 | 1.326,79 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 4.385 | 238.848.570 | | | 877 | 36.710.761 | 6 | 4.204.400 | 16 | 12.549.400 | 50,00 | 34,18 | 13,00 | 288.080.109 | 0,30 | 120,61 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 70 | 28.562.190 | | | 200 | 10.096.422 | 5 | 978.000 | 17 | 11.039.500 | 50,00 | 109,34 | 13,00 | 288.080.109 | 18,57 | 1.008,61 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 10 | 7.440.000 | | | 2 | 3.403.654 | 2 | 3.397.600 | 2 | 3.397.600 | 50,00 | 99,82 | 13,00 | 288.080.109 | 130,00 | 3.872,04 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 10 | 13.464.100 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 50,00 | #DIV/0! | 13,00 | 288.080.109 | 130,00 | 2.139,62 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 740 | 144.560.000 | | | 148 | 42.938.000 | 160 | 67.441.150 | 160 | 67.441.150 | 50,00 | 157,07 | 13,00 | 288.080.109 | 1,76 | 199,28 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 100 | 20.000.000 | | | 0 | 0 | | 30.865.659 | 0,00 | 30.865.659 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 4 | 20.000.000 | | | 0 | 0 | 4 | 30.865.659 | 13,00 | 30.865.659 | 50,00 | #DIV/0! | 13,00 | 288.080.109 | 325,00 | 1.440,40 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 199.600.000 | | | 100 | 34.628.236 | | 9.605.955 | 43,00 | 28.627.909 | 43,00 | 82,67 | 40,00 | 10.865.872 | 40,00 | 5,44 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60 | 82.500.000 | | | 12 | 16.500.000 | | 1.845.955 | 9 | 10.523.909 | 50,00 | 63,78 | 13,00 | 288.080.109 | 21,67 | 349,19 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 20 | 14.200.000 | | | 4 | 2.920.000 | 4 | 2.900.000 | 4 | 2.900.000 | 50,00 | 99,32 | 13,00 | 288.080.109 | 65,00 | 2.028,73 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 102.900.000 | | | 12 | 15.208.236 | 4 | 4.860.000 | 12 | 15.204.000 | 50,00 | 99,97 | 13,00 | 288.080.109 | 21,67 | 279,96 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 146.125.000 | | | 100 | 31.666.450 | | 97.942.100 | 30,67 | 33.274.601 | 30,67 | 105,08 | 30,67 | 9.712.500 | 30,67 | 6,65 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 5 | 109.625.000 | | | 1 | 31.666.450 | | 23.562.100 | 1 | 33.274.601 | 50,00 | 105,08 | 13,00 | 288.080.109 | 260,00 | 262,79 | KECAMATAN PAYUNG |
| | | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | 74.380.000 | | | | | | | | | |
| 41 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 36.500.000 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 50,00 | #DIV/0! | 13,00 | 288.080.109 | 1.300,00 | 789,26 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) | Indeks | 95 | 192.106.592 | | | 83 | 54.593.250 | | 39.946.000 | 62,83 | 54.486.000 | 75,70 | 99,80 | 0,00 | 2.304.640.872 | 0,00 | 1.199,67 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | 100 | 118.606.592 | | | 100 | 32.273.250 | | 10.644.000 | 12,83 | 14.784.000 | 12,83 | 45,81 | 0,00 | 576.160.218 | 0,00 | 485,77 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 5 | 66.602.000 | | | 1 | 15.704.000 | | 0 | 1 | 4.140.000 | 50,00 | 26,36 | 13,00 | 288.080.109 | 260,00 | 432,54 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 8 | 52.004.592 | | | 1 | 16.569.250 | 1 | 10.644.000 | 1 | 10.644.000 | 50,00 | 64,24 | 13,00 | 288.080.109 | 162,50 | 553,95 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | % | 100 | 31.500.000 | | | 100 | 22.320.000 | | 29.302.000 | 50 | 39.702.000 | 50,00 | 177,88 | 0,00 | 288.080.109 | 0,00 | 914,54 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 60 | 31.500.000 | | | 12 | 22.320.000 | | 29.302.000 | 6 | 39.702.000 | 50,00 | 177,88 | 13,00 | 288.080.109 | 21,67 | 914,54 | KECAMATAN PAYUNG |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | % | 100 | 24.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.160.218 | 0,00 | 2.400,67 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Dokumen | 36 | 12.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 50,00 | #DIV/0! | 13,00 | 288.080.109 | 36,11 | 2.400,67 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta | Unit | 4 | 12.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 50,00 | #DIV/0! | 13,00 | 288.080.109 | 325,00 | 2.400,67 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang<br>Dilimpahkan kepada Camat | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | % | 100 | 18.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864.240.327 | 0,00 | 4.801,34 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Dokumen | 8 | 6.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 50,00 | #DIV/0! | 13,00 | 288.080.109 | 162,50 | 4.801,34 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 8 | 6.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 50,00 | #DIV/0! | 13,00 | 288.080.109 | 162,50 | 4.801,34 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 4 | 6.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 50,00 | #DIV/0! | 13,00 | 288.080.109 | 325,00 | 4.801,34 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kegiatan | 29 | 50.000.000 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864.240.327 | 0,00 | 1.728,48 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | % | 100 | 35.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.160.218 | 0,00 | 1.646,17 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga | 160 | 23.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 50,00 | #DIV/0! | 13,00 | 288.080.109 | 8,13 | 1.252,52 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 12.000.000 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 50,00 | #DIV/0! | 13,00 | 288.080.109 | 260,00 | 2.400,67 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 03 | 2.05 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | % | 100 | 15.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.080.109 | 0,00 | 1.920,53 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 03 | 2.05 | 01 | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Dokumen | 36 | 15.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 50,00 | #DIV/0! | 13,00 | 288.080.109 | 36,11 | 1.920,53 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Perda, Perkada, dan Kegiatan | Perda, Pe | 8/8/13 | 100.501.148 | | | 0/0/1 | 6.850.000 | | 4.300.000 | 0,00 | 4.300.000 | 0,00 | 62,77 | 0,00 | 864.240.327 | 0,00 | 859,93 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | % | 100 | 80.501.148 | | | 100 | 6.850.000 | | 4.300.000 | 0 | 4.300.000 | 0,00 | 62,77 | 0,00 | 576.160.218 | 0,00 | 715,72 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 256 | 60.501.148 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 50,00 | #DIV/0! | 13,00 | 288.080.109 | 5,08 | 476,16 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Laporan | 72 | 20.000.000 | | | 18 | 6.850.000 | | 4.300.000 | 0 | 4.300.000 | 50,00 | 62,77 | 13,00 | 288.080.109 | 18,06 | 1.440,40 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan<br>Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan<br>Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | % | 100 | 20.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.080.109 | 0,00 | 1.440,40 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan | 8 | 20.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 50,00 | #DIV/0! | 13,00 | 288.080.109 | 162,50 | 1.440,40 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | Urusan | 5 | 134.399.835 | | | 1 | 23.756.889 | | 19.248.000 | 80,26 | 38.315.000 | 8025,88 | 161,28 | 0,00 | 288.080.109 | 0,00 | 214,35 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | % | 100 | 134.399.835 | | | 100 | 23.756.889 | | 19.248.000 | 80,26 | 38.315.000 | 80,26 | 161,28 | 0,00 | 288.080.109 | 0,00 | 214,35 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 750 | 134.399.835 | | | 150 | 23.756.889 | | 19.248.000 | 150 | 38.315.000 | 50,00 | 161,28 | 13,00 | 288.080.109 | 1,73 | 214,35 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi | Pemerinta | 95 | 83.614.400 | | | 19 | 6.200.000 | | 6.000.000 | 0,00 | 6.000.000 | 0,00 | 96,77 | 0,00 | 864.240.327 | 0,00 | 1.033,60 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Pemerinta | 95 | 83.614.400 | | | 100 | 6.200.000 | | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0,00 | 96,77 | 0,00 | 864.240.327 | 0,00 | 1.033,60 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Dokumen | 10 | 25.658.000 | | | 2 | 6.200.000 | | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 50,00 | 96,77 | 13,00 | 288.080.109 | 130,00 | 1.122,77 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 32 | 20.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 50,00 | #DIV/0! | 13,00 | 288.080.109 | 40,63 | 1.440,40 | KECAMATAN PAYUNG |
| 41 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 32 | 37.956.400 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 50,00 | #DIV/0! | 13,00 | 288.080.109 | 40,63 | 758,98 | KECAMATAN PAYUNG |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | | 7 | 01 | | | | KECAMATAN SIMPANG EMPAT | | | | 23.320.791.686 | | 16.660.301.587 | | 2.984.457.359 | | | 298 | 2.773.569.648 | 266 | 41 | 265,53 | 19.433.871.235 | 876 | 0,00 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | indeks | 445 | 21.668.289.918 | 2.277 | 16.279.912.742 | 373 | 2.790.345.640 | 89 | 1.060.756.756 | 284,38 | 2.698.166.792 | 76,24 | 96,70 | 2.561,38 | 18.978.079.534 | 539,81 | 87,58 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 780 | 19.978.748.140 | 589 | 15.243.854.227 | 96 | 2.614.080.557 | | 893.275.586 | 20,38 | 2.447.207.479 | 21,23 | 125,47 | 609,38 | 17.691.061.706 | 78,13 | 88,55 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 01 | 2 | 01 | Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | bulan | 60 | 18.880.310.010 | 72 | 14.747.518.277 | 12 | 2.474.750.557 | 3 | 834.440.586 | 12,00 | 2.313.492.479 | 100,00 | 93,48 | 84,00 | 17.061.010.756 | 140,00 | 90,36 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 01 | 2 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | honorarium Pengelola Keuangan | orang bula | 720 | 1.098.438.130 | 517 | 496.335.950 | 84 | 139.330.000 | 66 | 58.835.000 | 82,00 | 133.715.000 | 97,62 | 95,97 | 599,00 | 630.050.950 | 83,19 | 57,36 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | bulan | 202 | 137.940.000 | 125 | 83.157.200 | 0 | 0 | 1 | 42.987.800 | 1,00 | 42.987.800 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 126.145.000 | 62,38 | 91,45 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Sarana dan Prasarana Displin Pegawai | unit | 1 | 37.000.000 | 1 | 9.000.000 | - | - | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9.000.000 | 100,00 | 24,32 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Astribut Perlengkapannya | stel | 200 | 100.940.000 | 124 | 74.157.200 | - | - | 1 | 42.987.800 | 1,00 | 42.987.800 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 117.145.000 | 62,50 | 116,05 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | bulan | 60 | 902.533.170 | 1.459 | 749.521.495 | 249 | 106.528.923 | 72 | 70.105.174 | 239,00 | 141.720.317 | 95,98 | 258,90 | 1.698,00 | 891.241.812 | 2.830,00 | 98,75 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jenis | 60 | 8.337.420 | 69 | 10.773.170 | 16 | 1.120.380 | 1 | 2.499.968 | 1,00 | 2.499.968 | 6,25 | 223,14 | 70,00 | 13.273.138 | 116,67 | 159,20 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | buah | 40 | 409.105.480 | 35 | 368.102.777 | 1 | 54.975.473 | 1 | 13.506.200 | 2,00 | 58.985.190 | 200,00 | 107,29 | 37,00 | 427.087.967 | 92,50 | 104,40 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | jenis | 70 | 14.777.678 | 282 | 64.297.393 | 20 | 1.985.820 | 1 | 6.566.632 | 1,00 | 6.566.632 | 5,00 | 330,68 | 283,00 | 70.864.025 | 404,29 | 479,53 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | jenis | 10 | 22.825.248 | 12 | 31.075.861 | 2 | 3.067.250 | 1 | 4.583.924 | 2,00 | 5.970.077 | 100,00 | 194,64 | 14,00 | 37.045.938 | 140,00 | 162,30 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Perjalanan Dinas | orang kali | 1165 | 447.487.344 | 1.061 | 275.272.294 | 210 | 45.380.000 | 68 | 42.948.450 | 233,00 | 67.698.450 | 110,95 | 149,18 | 1.294,00 | 342.970.744 | 111,07 | 76,64 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | unit | 11 | 53.680.000 | | 0 | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 39,27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebeleur | unit | 11 | 53.680.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | bulan | 60 | 283.868.315 | 102 | 94.368.650 | 28 | 38.146.140 | 15 | 18.166.200 | 23,00 | 30.029.200 | 82,14 | 117,80 | 125,00 | 124.397.850 | 208,33 | 43,82 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Telepon,Internet,Air dan Listrik | bulan | 60 | 151.808.640 | 16 | 14.800.000 | 12 | 20.400.000 | 5 | 7.101.200 | 6,00 | 10.459.200 | 50,00 | 51,27 | 22,00 | 25.259.200 | 36,67 | 16,64 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor | unit | 5 | 18.604.000 | 26 | 18.100.000 | 4 | 2.500.000 | 5 | 4.990.000 | 5,00 | 4.990.000 | 125,00 | 199,60 | 31,00 | 23.090.000 | 620,00 | 124,11 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honorarium Pegawai tidak Tetap | orang bula | 60 | 113.455.675 | 60 | 61.468.650 | 12 | 15.246.140 | 5 | 6.075.000 | 12,00 | 14.580.000 | 100,00 | 95,63 | 72,00 | 76.048.650 | 120,00 | 67,03 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara | unit | 5 | 311.520.293 | 2 | 109.011.170 | 0 | 31.590.020 | 1 | 36.221.996 | 1,00 | 36.221.996 | 0,00 | 114,66 | 3,00 | 145.233.166 | 60,00 | 46,62 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kend | Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Op[erasional atau Lapangan | unit | 5 | 235.080.293 | 1 | 105.299.170 | | 31.590.020 | 1 | 36.221.996 | 1,00 | 36.221.996 | 0,00 | 114,66 | 2,00 | 141.521.166 | 40,00 | 60,20 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | unit | 5 | 76.440.000 | 1 | 3.712.000 | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3.712.000 | 20,00 | 4,86 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBL | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 445 | 844.652.244 | 41 | 189.587.595 | 14 | 101.678.704 | | | 12,50 | 9.480.000 | 89,29 | 9,32 | 53,50 | 199.067.595 | 113,89 | 23,57 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintah yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan | Kegiatan | 20 | 408.385.364 | 7 | 117.062.595 | 2 | 54.878.704 | | 10.569.430 | 50,00 | 20.049.430 | 2.500,00 | 53,29 | 57,00 | 137.112.025 | 285,00 | 33,57 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan de | Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait | orang kali | 5 | 166.130.074 | 5 | 62.502.880 | 1 | 22.324.510 | | - | 1,00 | 9.480.000 | 100,00 | 42,46 | 6,00 | 71.982.880 | 120,00 | 43,33 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | kegiatan | 15 | 242.255.290 | 2 | 54.559.715 | 1 | 32.554.194 | | 10.569.430 | 0,00 | 10.569.430 | 0,00 | 32,47 | 2,00 | 65.129.145 | 13,33 | 26,88 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 02 | 2 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit | Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan | Urusan | 60 | 348.266.880 | 34 | 72.525.000 | 12 | 46.800.000 | | 48.140.000 | 0,00 | 48.140.000 | 0,00 | 102,86 | 34,00 | 120.665.000 | 56,67 | 34,65 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 02 | 2 | 01 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah | Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wlayah Kecamatan | kali | 60 | 348.266.880 | 34 | 72.525.000 | 12 | 46.800.000 | | 48.140.000 | 0,00 | 48.140.000 | 0,00 | 102,86 | 34,00 | 120.665.000 | 56,67 | 34,65 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang di Koordinasikan Pemeliharannya | unit | 12 | 60.000.000 | | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait d | Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | kali | 8 | 20.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Met | Jumlah Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayan Umum | unit | 4 | 40.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan Kepada Camat | Jumlah Layanan Perizinan, Non Perizinan dan Kewenangan Lainnya | urusan | 32 | 28.000.000 | | 0 | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Ne | Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | urusan | 8 | 4.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan | Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan | urusan | 20 | 8.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang | Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan | urusan | 4 | 16.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 162,50 | 0,00 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dikoordinasikan | kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 16.750.000 | 0,00 | 16.750.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16750000 | 0,00 | 0,00 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pe | Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | orang kali | | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecama | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan | kegiatan | | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | Perda/Per | 8/8/13 | 241.295.280 | 13 | 97.237.650 | 1 | 27.050.000 | | 16.750.000 | 0,00 | 16.750.000 | 0,00 | 61,92 | 13,00 | 113.987.650 | 0,00 | 47,24 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah Kegiatan dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | kegiatan | 8 | 201.295.280 | 13 | 97.237.650 | 1 | 27.050.000 | | 16.750.000 | 0,00 | 16.750.000 | 0,00 | 61,92 | 13,00 | 113.987.650 | 162,50 | 56,63 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergisitas dengan kepolisian negara RI TNI, dan Instansi Vertikal Di Wilayah K | Jumlah Koordinasi/Sinergisitas dengan kepolisian negara RI TNI, dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan | kegiatan | 5 | 197.655.280 | 1 | 82.362.650 | 1 | 27.050.000 | | 16.750.000 | 0,00 | 16.750.000 | 0,00 | 61,92 | 1,00 | 99.112.650 | 20,00 | 50,14 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat | Jumlah Kegiatan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat | kegiatan | 3 | 3.640.000 | 12 | 14.875.000 | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 14.875.000 | 400,00 | 408,65 | CAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Ke | Jumlah Perda dan Perkada yang Dikoordinasikan Penerapan dan Penegakannya | Perda dar | 64 | 40.000.000 | | 0 | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 25,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | CAMATAN SIMPANG EMPA |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bida | Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Praturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | kali | 8 | 40.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang Doselenggarakan Kecamatan | Urusan | 5 | 486.554.244 | 3 | 93.563.600 | 1 | 65.383.015 | | | 1,00 | 49.172.856 | 100,00 | 75,21 | 4,00 | 142.736.456 | 60,00 | 29,34 | KECAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala D | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Urusan | 5 | 486.554.244 | 3 | 93.563.600 | 1 | 65.383.015 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 75,21 | 3,00 | 93.563.600 | 60,00 | 19,23 | KECAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Mer | Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | kali | 5 | 486.554.244 | 3 | 93.563.600 | 1 | 65.383.015 | | | 1,00 | 49.172.856 | 100,00 | 75,21 | 4,00 | 142.736.456 | 80,00 | 29,34 | KECAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemrintahan Desa yang Dibina dan Diawasi | Pemerinta | 85 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 06 | 2 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Pemrintahan Desa yang Dibina dan Diawasi | Pemerinta | 85 | 80.000.000 | 0 | 0 | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 06 | 2 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Perda dan | 85 | 16.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 06 | 2 | 02 | Fasilkitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Difalitasi | Pemerinta | 36 | 32.000.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN SIMPANG EMPA |
| 42 | | 7 | 01 | 06 | 2 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Pemerinta | 36 | 32.000.000 | - | - | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN SIMPANG EMPA |
| 43 | | 7 | 01 | | | | KECAMATAN TIGA BINANGA | | | | 31.984.962.415 | | | | 4.191.531.594 | 321 | 2.086.244.784 | 706,00 | 3.976.252.087 | 0,00 | 94,86 | 0,00 | 3.976.252.087 | | 12,43 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | Meningkatnya pelay | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 90 | 25.029.928.900 | | | 90 | 3.266.293.807 | 309 | 1.403.806.666 | 570,00 | 3.152.553.969 | 633,33 | 96,52 | 570,00 | 3.152.553.969 | 633,33 | 12,60 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | bulan | 60 | 5.368.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 60 | 5.368.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | bulan | 780 | 22.804.148.543 | | | 156 | 3.064.414.715 | 15 | 1.222.350.927 | 156,00 | 2.870.304.440 | 100,00 | 93,67 | 156,00 | 2.870.304.440 | 20,00 | 12,59 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | orang bul | 60 | 20.613.762.341 | | | 12 | 2.770.071.267 | 3 | 1.061.040.927 | 12,00 | 2.566.644.440 | 100,00 | 92,66 | 12,00 | 2.566.644.440 | 20,00 | 12,45 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Honorarium Pengelola Keuangan | Dokumen | 720 | 2.190.386.203 | | | 144 | 294.343.448 | 12 | 161.310.000 | 144,00 | 303.660.000 | 100,00 | 103,17 | 144,00 | 303.660.000 | 20,00 | 13,86 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat kehadiran pegawai | bulan | 160 | 193.248.000 | | | | | 48 | 36.000.000 | 48,00 | 36.000.000 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 36.000.000 | 30,00 | 18,63 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut | paket | 160 | 193.248.000 | | | | | 48 | 36.000.000 | 48,00 | 36.000.000 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 36.000.000 | 30,00 | 18,63 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | bulan | 60 | 794.611.996 | | | 12 | 106.058.374 | 282 | 96.978.066 | 378,00 | 143.327.266 | 3.150,00 | 135,14 | 378,00 | 143.327.266 | 630,00 | 18,04 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik | paket | 60 | 5.588.106 | | | 12 | 750.928 | | 0 | 8,00 | 748.000 | 66,67 | 99,61 | 8,00 | 748.000 | 13,33 | 13,39 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | paket | 40 | 189.649.950 | | | 8 | 25.485.104 | 23 | 37.680.000 | 32,00 | 62.933.700 | 100,00 | 246,94 | 32,00 | 62.933.700 | 80,00 | 33,18 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga | paket | 70 | 12.088.373 | | | 14 | 1.624.432 | 4 | 3.112.000 | 18,00 | 4.701.500 | 128,57 | 289,42 | 18,00 | 4.701.500 | 25,71 | 38,89 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Pengggandaan | paket | 10 | 23.797.567 | | | 2 | 3.197.910 | 1 | 3.425.200 | 2,00 | 5.005.200 | 100,00 | 156,51 | 2,00 | 5.005.200 | 20,00 | 21,03 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Perjalanan Dinas | laporan | 1.165 | 558.120.000 | | | 233 | 75.000.000 | 254 | 52.760.866 | 318,00 | 69.938.866 | 136,48 | 93,25 | 318,00 | 69.938.866 | 27,30 | 12,53 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | paket | 4 | 5.368.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit | 58 | 80.520.000 | | | 0 | 0 | 1 | 16.500.000 | 1,00 | 16.500.000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 16.500.000 | 1,72 | 20,49 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel | unit | 48 | 5.368.000 | | | 0 | 0 | 1 | 16.500.000 | 1,00 | 16.500.000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 16.500.000 | 2,08 | 307,38 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan U | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | unit | 10 | 75.152.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | bulan | 60 | 581.395.299 | | | 12 | 60.028.718 | 9 | 13.887.673 | 27,00 | 44.452.263 | 225,00 | 74,05 | 27,00 | 44.452.263 | 45,00 | 7,65 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Telepon, Internet, Air dan Listrik | Laporan | 60 | 227.712.960 | | | 12 | 30.600.000 | 3 | 6.597.673 | 12,00 | 25.612.263 | 100,00 | 83,70 | 12,00 | 25.612.263 | 20,00 | 11,25 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor | Laporan | 15 | 166.386.811 | | | 3 | 4.260.000 | | 0 | 3,00 | 4.260.000 | 100,00 | 100,00 | 3,00 | 4.260.000 | 20,00 | 2,56 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honorarium Pegawai Tidak Tetap | Laporan | 60 | 187.295.528 | | | 12 | 25.168.718 | 6 | 7.290.000 | 12,00 | 14.580.000 | 100,00 | 57,93 | 12,00 | 14.580.000 | 20,00 | 7,78 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | unit | 102 | 570.637.061 | | | 2 | 35.792.000 | 2 | 18.090.000 | 8,00 | 41.970.000 | 400,00 | 117,26 | 8,00 | 41.970.000 | 7,84 | 7,35 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Ken | Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan | unit | 10 | 551.849.061 | | | 2 | 35.792.000 | 2 | 18.090.000 | 8,00 | 41.970.000 | 100,00 | 117,26 | 8,00 | 41.970.000 | 80,00 | 7,61 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel | unit | 20 | 2.684.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | unit | 24 | 5.368.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunar | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | unit | 24 | 5.368.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor da | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | unit | 24 | 5.368.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | Meningkatnya pelay | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUB | Indeks Kepuasan Masyarakat | indeks | 87 | 570.899.575 | | | 83 | 70.946.513 | 0 | 28.033.500 | 101,00 | 61.115.500 | 121,69 | 86,14 | 101,00 | 61.115.500 | 116,09 | 10,71 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di tingkat kecamatan | Kegiatan | 1.060 | 140.795.072 | | | 212 | 70.946.513 | 0 | 28.033.500 | 101,00 | 61.115.500 | 47,64 | 86,14 | 101,00 | 61.115.500 | 9,53 | 43,41 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 60 | 140.795.072 | | | 12 | 18.920.000 | | | 1,00 | 14.390.000 | 8,33 | 76,06 | 1,00 | 14.390.000 | 1,67 | 10,22 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 1.000 | 387.160.503 | | | 200 | 52.026.513 | | 28.033.500 | 100,00 | 46.725.500 | 50,00 | 89,81 | 100,00 | 46.725.500 | 10,00 | 12,07 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | urusam | 32 | 16.104.000 | | | | | 1 | 19.961.600 | 1,00 | 19.961.600 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 19.961.600 | 3,13 | 123,95 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Laporan | 200 | 5.368.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | persen | 100 | 5.368.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | laporan | 4 | 5.368.000 | | | | | 1 | 19.961.600 | 1,00 | 19.961.600 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 19.961.600 | 25,00 | 371,86 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan SaranaPelayanan Umum | Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dikoordinasikan pemeliharaannya | Unit | 8 | 10.736.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Dokumen | 4 | 5.368.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | unit | 4 | 5.368.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelakasanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Jumlah layanan perizinan, non perizinan dan kewenangan lainnya | urusan | 680 | 16.104.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Dokumen | 200 | 5.368.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan | Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Laporan | 400 | 5.368.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 80 | 5.368.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | Meningkatnya pelay | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kegiatan | 95 | 5.225.224.000 | | | 19 | 700.000.000 | 12 | 635.366.618 | 18,00 | 641.366.618 | | | 18,00 | 641.366.618 | 18,95 | 12,27 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dikoordinasikan | Kegiatan | 76 | 10.736.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga | 200 | 5.368.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 200 | 5.368.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan | Kegiatan | 70 | 5.214.488.000 | | | 14 | 700.000.000 | 12 | 635.366.618 | 18,00 | 641.366.618 | 128,57 | 91,62 | 18,00 | 641.366.618 | 25,71 | 12,30 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Lembaga | 200 | 5.368.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | paket | 70 | 4.741.556.830 | | | 14 | 637.169.000 | 12 | 635.366.618 | 12,00 | 635.366.618 | 85,71 | 99,72 | 12,00 | 635.366.618 | 17,14 | 13,40 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | laporan | 500 | 467.563.170 | | | 100 | 62.831.000 | | | 6,00 | 6.000.000 | 6,00 | 9,55 | 6,00 | 6.000.000 | 1,20 | 1,28 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | Meningkatnya Kuali | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Perda, Perkada dan kegiatan | Perda,Per | 10/10/10 | 181.138.592 | | | 2/2/2 | 23.620.000 | 0 | 6.024.000 | 8,00 | 21.460.000 | | | | 21.460.000 | | 11,85 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Kegiatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Kegiatan | 100 | 175.770.592 | | | 20 | 23.620.000 | 0 | 6.024.000 | 8,00 | 21.460.000 | 40,00 | 90,86 | 8,00 | 21.460.000 | 8,00 | 12,21 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 100 | 175.770.592 | | | 20 | 23.620.000 | | 6.024.000 | 8,00 | 21.460.000 | 40,00 | 90,86 | 8,00 | 21.460.000 | 8,00 | 12,21 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Perda dan Perkada yang dikoordinasikan Penerapan dan Penegakannya | Perda da | 8 | 5.368.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan | 8 | 5.368.000 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | Meningkatnya pelay | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | Urusan | 10 | 419.236.095 | | | 2 | 56.336.822 | | 0 | 1,00 | 55.742.000 | 50,00 | 98,94 | 1,00 | 55.742.000 | 10,00 | 13,30 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan | Urusan | 5 | 419.236.095 | | | 1 | 56.336.822 | | 0 | 1,00 | 55.742.000 | 100,00 | 98,94 | 1,00 | 55.742.000 | 20,00 | 13,30 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | orang | 5 | 419.236.095 | | | 1 | 56.336.822 | | | 1,00 | 55.742.000 | 100,00 | 98,94 | 1,00 | 55.742.000 | 20,00 | 13,30 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | Meningkatnya pelay | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi | Pemerinta | 100 | 558.535.255 | | | 20 | 74.334.452 | 0 | 13.014.000 | 8,00 | 44.014.000 | | | 8,00 | 44.014.000 | 8,00 | 7,88 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 06 | 2 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Pengawasaannya | Pemerinta | 95 | 558.535.255 | | | 19 | 74.334.452 | 0 | 13.014.000 | 8,00 | 44.014.000 | 42,11 | 59,21 | 8,00 | 44.014.000 | 8,42 | 7,88 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 06 | 2 | 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | dokumen | 95 | 553.167.255 | | | 19 | 74.334.452 | | 13.014.000 | 8,00 | 44.014.000 | 42,11 | 59,21 | 8,00 | 44.014.000 | 8,42 | 7,96 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 43 | | 7 | 01 | 06 | 2 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan | dokumen | 8 | 5.368.000 | | | 0 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGABINANGA |
| 44 | | | | | | | KECAMATAN TIGANDERKET | | | 100 | 14.928.347.955 | 18 | 2.698.435.123 | 100 | 2.881.289.591 | | | 65,64 | 1.891.212.088 | 65,64 | 65,64 | 65,64 | 1.891.212.088 | 65,64 | 12,67 | KECAMATAN TIGANDERKET |
| 44 | Meningkatnya Pelay | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 89 | 13.958.109.360 | 89 | 2.523.179.059 | 83 | 2.737.832.331 | 36 | 785.921.415 | 81,25 | 2.620.682.503 | 97,89 | 95,72 | 81,25 | 2.620.682.503 | 18,26 | 18,78 | KECAMATAN TIGANDERKET |
| 44 | | 7 | 01 | 01 | 1,02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 12.881.214.685 | 100 | 2.376.001.453 | 100 | 2.473.942.937 | 36 | 663.412.365 | 146,00 | 2.278.910.247 | 146,00 | 92,12 | 146,00 | 2.278.910.247 | 29,20 | 17,69 | KECAMATAN TIGANDERKET |
| 44 | | 7 | 01 | 01 | 1,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bula | 110 | 12.511.414.685 | 23 | 2.282.698.353 | 23 | 2.420.842.937 | 21 | 631.482.365 | 86,00 | 2.196.430.247 | 93,48 | 90,73 | 86,00 | 2.196.430.247 | 78,18 | 17,56 | KECAMATAN TIGANDERKET |
| 44 | | 7 | 01 | 01 | 1,02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 300 | 369.800.000 | 60 | 93.303.100 | 60 | 53.100.000 | 15 | 31.930.000 | 60,00 | 82.480.000 | 100,00 | 155,33 | 60,00 | 82.480.000 | 20,00 | 22,30 | KECAMATAN TIGANDERKET |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | | 7 | 01 | 01 | 1,05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 127.500.000 | 0 | 0 | 100 | 24.713.000 | | | 100,00 | 24.713.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 24.713.000 | 20,00 | 19,38 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 01 | 1,05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 130 | 127.500.000 | 0 | 0 | 30 | 24.713.000 | | 0 | 26,00 | 24.713.000 | 86,67 | 100,00 | 26,00 | 24.713.000 | 20,00 | 19,38 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 01 | 1,06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 362.094.675 | 100 | 52.144.735 | 100 | 79.995.666 | | 29.583.900 | 75,00 | 95.392.500 | 75,00 | 119,25 | 75,00 | 95.392.500 | 15,00 | 26,34 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 01 | 1,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 50 | 14.773.250 | 1 | 830.990 | 7 | 2.954.650 | | 0 | 7,00 | 2.946.400 | 100,00 | 99,72 | 7,00 | 2.946.400 | 14,00 | 19,94 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 01 | 1,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 145 | 73.908.670 | 4 | 11.159.320 | 23 | 16.358.465 | | 6.754.900 | 11,00 | 16.347.600 | 47,83 | 99,93 | 11,00 | 16.347.600 | 7,59 | 22,12 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 01 | 1,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 50 | 16.472.755 | 2 | 6.146.225 | 10 | 7.294.551 | | | 4,00 | 7.291.500 | 40,00 | 99,96 | 4,00 | 7.291.500 | 8,00 | 44,26 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 01 | 1,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 25 | 23.840.000 | 1 | 2.208.200 | 5 | 4.768.000 | | | 3,00 | 4.768.000 | 60,00 | 100,00 | 3,00 | 4.768.000 | 12,00 | 20,00 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 01 | 1,06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 5 | 18.100.000 | 0 | 0 | 12 | 3.620.000 | | 660.000 | 1,00 | 3.620.000 | 8,33 | 100,00 | 1,00 | 3.620.000 | 20,00 | 20,00 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 01 | 1,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1.500 | 215.000.000 | 1.250 | 31.800.000 | 300 | 45.000.000 | | 22.169.000 | 180,00 | 60.419.000 | 60,00 | 134,26 | 180,00 | 60.419.000 | 12,00 | 28,10 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 01 | 1,07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 100 | 180.000.000 | 100 | 30.924.265 | 100 | 66.818.728 | | | 100,00 | 66.771.800 | 100,00 | 99,93 | 100,00 | 66.771.800 | 20,00 | 37,10 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 01 | 1,07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | unit | 2 | 33.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 01 | 1,07 | 05 | Pengadaan Meubelair | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 190 | 62.000.000 | 10 | 9.924.265 | 67 | 31.156.928 | | 0 | 67,00 | 31.110.000 | 100,00 | 99,85 | 67,00 | 31.110.000 | 35,26 | 50,18 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 01 | 1,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | unit | 30 | 85.000.000 | 6 | 21.000.000 | 7 | 35.661.800 | | 0 | 7,00 | 35.661.800 | 100,00 | 100,00 | 7,00 | 35.661.800 | 23,33 | 41,96 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 01 | 1,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 277.300.000 | 100 | 35.838.766 | 100 | 63.470.000 | | 32.591.150 | 75,00 | 87.445.456 | 75,00 | 137,77 | 75,00 | 87.445.456 | 15,00 | 31,53 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 01 | 1,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60 | 24.800.000 | 12 | 13.784.716 | 12 | 14.760.000 | 3 | 2.246.150 | 13,00 | 13.535.456 | 108,33 | 91,70 | 13,00 | 13.535.456 | 21,67 | 54,58 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 01 | 1,08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 5 | 24.800.000 | 1 | 2.840.000 | 1 | 3.570.000 | 1 | 3.570.000 | 1,00 | 3.570.000 | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 3.570.000 | 20,00 | 14,40 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 01 | 1,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 60 | 227.700.000 | 12 | 19.214.050 | 12 | 45.140.000 | 3 | 26.775.000 | 12,00 | 70.340.000 | 100,00 | 155,83 | 12,00 | 70.340.000 | 20,00 | 30,89 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 01 | 1,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 130.000.000 | 100 | 28.269.840 | 100 | 28.892.000 | | 60.334.000 | 25,00 | 67.449.500 | 25,00 | 233,45 | 25,00 | 67.449.500 | 5,00 | 51,88 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 01 | 1,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Ken | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 2 | 130.000.000 | 2 | 28.269.840 | 2 | 28.892.000 | 2 | 60.334.000 | 4,00 | 67.449.500 | 50,00 | 233,45 | 4,00 | 67.449.500 | 40,00 | 51,88 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | Meningkatnya Pelay | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBI | Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) | Indeks | 89 | 183.000.000 | 81,25 | 6.400.000 | 81,25 | 13.900.000 | | 29.419.000 | 0,00 | 29.419.000 | 0,00 | 211,65 | 0,00 | 29.419.000 | 0,00 | 16,08 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 02 | 2,01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatar | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | 100 | 183.000.000 | 100 | 6.400.000 | 100 | 13.900.000 | | 29.419.000 | 0,00 | 29.419.000 | 0,00 | 211,65 | 0,00 | 29.419.000 | 0,00 | 16,08 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 02 | 2,01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Deng | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 5 | 57.000.000 | 1 | 6.400.000 | 1 | 13.900.000 | 1 | 13.899.000 | 1,00 | 13.899.000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 13.899.000 | 20,00 | 24,38 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 5 | 126.000.000 | 1 | 6.400.000 | 1 | 13.900.000 | 1 | 15.520.000 | 1,00 | 15.520.000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15.520.000 | 20,00 | 12,32 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | Meningkatnya Pelay | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kegiatan | 10 | 109.000.000 | 1 | 13.905.000 | 2 | 22.920.000 | | 5.000.000 | 73,25 | 21.790.000 | 3.662,74 | 95,07 | 73,25 | 21.790.000 | 732,55 | 19,99 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 03 | 2,01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | % | 100 | 91.000.000 | 100 | 13.905.000 | 100 | 22.920.000 | | 5.000.000 | 50,00 | 7.540.000 | 50,00 | 32,90 | 50,00 | 7.540.000 | 50,00 | 8,29 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pe | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | a Kemasya | 170 | 65.000.000 | 0 | 0 | 34 | 13.670.000 | | 0 | 34,00 | 7.540.000 | 100,00 | 55,16 | 34,00 | 7.540.000 | 20,00 | 11,60 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 03 | 2,01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecama | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 26.000.000 | 1 | 13.905.000 | 1 | 9.250.000 | | 5.000.000 | 1,00 | 14.250.000 | 25,00 | 154,05 | 1,00 | 14.250.000 | 20,00 | 54,81 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 03 | 2.05 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyara | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | % | 100 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 03 | 2.05 | 01 | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Dokumen | 5 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | Meningkatnya Pema | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | a dan Per | 10/10/5 | 166.000.000 | 2/2/1 | 154.951.064 | 2/2/1 | 50.735.000 | | 0 | 36.893,00 | 19.335.000 | 25,00 | 38,11 | 36.893,00 | 19.335.000 | 95,49 | 11,65 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 04 | 2,01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | % | 100 | 166.000.000 | 100 | 154.951.064 | 100 | 50.735.000 | | | 50,00 | 19.335.000 | 50,00 | 38,11 | 50,00 | 19.335.000 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 04 | 2,01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indo | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 65.000.000 | 0 | 110.911.064 | 1 | 43.235.000 | | | 1,00 | 16.335.000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 16.335.000 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Laporan | 5 | 101.000.000 | 1 | 44.040.000 | 1 | 7.500.000 | | | 1,00 | 3.000.000 | 100,00 | 40,00 | 1,00 | 3.000.000 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | urusan | 15 | 362.238.595 | 0 | 0 | 3 | 38.040.260 | | 46.508.050 | 1,00 | 66.834.050 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 66.834.050 | 6,67 | 18,45 | ECAMATAN TIGANDERKE |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | | 7 | 01 | 05 | 2,01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala D | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | % | 100 | 362.238.595 | 0 | 0 | 100 | 38.040.260 | | 46.508.050 | 25,00 | 66.834.050 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 66.834.050 | 25,00 | 18,45 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | Terciptanya generasi | 7 | 01 | 05 | 2,01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Mer | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | org | 1.500 | 162.238.595 | 0 | 0 | 300 | 11.814.260 | | 40.608.050 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | Terciptanya generasi | 7 | 01 | 05 | 2,01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | org | 850 | 100.000.000 | 0 | 0 | 170 | 5.900.000 | | 5.900.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | Pembinaan Kerukuna | 7 | 01 | 05 | 2,01 | 04 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Gol | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | org | 850 | 100.000.000 | 0 | 0 | 170 | 20.326.000 | | | 170,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan, dan Pengawasan | Kegiatan | 30 | 150.000.000 | 0 | 0 | 3 | 17.862.000 | | 17.062.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | | 7 | 01 | 06 | 2,01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pem | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | % | 100 | 150.000.000 | 0 | 0 | 100 | 17.862.000 | | 17.062.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | Terwujudnya Tata Ke | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Dokumen | 85 | 25.000.000 | 0 | 0 | 34 | 4.490.000 | 34 | 4.490.000 | 34,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | Terwujudnya Tata Ke | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 85 | 25.000.000 | 0 | 0 | 17 | 6.588.000 | 17 | 5.788.000 | 17,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | Terwujudnya Tata Ke | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 85 | 25.000.000 | 0 | 0 | 17 | 6.784.000 | 17 | 6.784.000 | 17,00 | 6.784.000 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 6.784.000 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | Meningkatnya Kualita | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Dokumen | 85 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | Meningkatnya Kualita | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 07 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Dokumen | 85 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 44 | Meningkatnya Kualita | 7 | 01 | 06 | 2,01 | 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangun | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Dokumen | 85 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ECAMATAN TIGANDERKE |
| 45 | | 7 | 01 | | | | Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 5 | 01 | | | | KECAMATAN TIGA PANAH | | | | 18.310.326.555 | | | | 3.563.289.723 | 19 | 1.295.089.600 | 164,50 | 3.444.693.419,00 | 0,00 | 96,67 | 164,50 | 3.444.693.419,00 | 0,00 | 18,81 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) | Indeks | 95 | 16.840.415.909 | | | 83 | 3.303.719.762 | 19 | 1.211.481.080 | 606,00 | 3.261.000.456 | 730,12 | 98,71 | 606,00 | 3.261.000.456,00 | 637,89 | 19,36 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | 100 | 15.616.561.900 | | | 100 | 3.007.125.343 | | 1.008.360.037 | 169,33 | 2.867.747.374 | 169,33 | 95,37 | 169,33 | 2.867.747.374,00 | 169,33 | 18,36 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bula | 150 | 15.188.581.900 | | | 30 | 2.909.385.343 | | 962.545.037 | 90,00 | 2.771.027.374 | 300,00 | 95,24 | 90,00 | 2.771.027.374 | 60,00 | 18,24 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 36 | 427.980.000 | | | 6 | 97.740.000 | | 45.815.000 | 10,00 | 96.720.000 | 166,67 | 98,96 | 10,00 | 96.720.000 | 27,78 | 22,60 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 144.500.000 | | | 100 | 26.000.000 | | 0 | 50,00 | 22.172.000,00 | 50,00 | 85,28 | 50,00 | 22.172.000,00 | 50,00 | 15,34 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 2 | 20.000.000 | | | 1 | 500.000 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 5 | 124.500.000 | | | 1 | 25.500.000 | | | 1,00 | 22.172.000 | 100,00 | 86,95 | 1,00 | 22.172.000 | 20,00 | 17,81 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 412.627.725 | | | 100 | 119.543.852 | | 47.925.293 | 289,67 | 91.028.015,00 | 289,67 | 76,15 | 289,67 | 91.028.015,00 | 289,67 | 22,06 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 5.759.556 | | | 1 | 1.070.142 | | 0 | 1,00 | 1.070.122 | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 1.070.122 | 20,00 | 18,58 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 10 | 79.460.577 | | | 2 | 45.933.300 | | 4.860.956 | 0,00 | 13.540.991 | 0,00 | 29,48 | 0,00 | 13.540.991 | 0,00 | 17,04 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 8 | 43.863.730 | | | 2 | 7.612.410 | | 4.439.187 | 0,00 | 7.671.752 | 0,00 | 100,78 | 0,00 | 7.671.752 | 0,00 | 17,49 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 10 | 18.339.862 | | | 2 | 3.370.000 | | 0 | 0,00 | 2.170.000 | 0,00 | 64,39 | 0,00 | 2.170.000 | 0,00 | 11,83 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 24 | 6.000.000 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 690 | 259.204.000 | | | 120 | 61.558.000 | 263 | 38.625.150 | 536,00 | 66.575.150 | 446,67 | 108,15 | 536,00 | 66.575.150 | 77,68 | 25,68 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 100 | 227.820.414 | | | 100 | 76.747.716 | 3 | 78.892.000 | 11,00 | 155.639.716,00 | 11,00 | 202,79 | 11,00 | 155.639.716,00 | 11,00 | 68,32 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 25 | 130.420.414 | | | 8 | 76.747.716 | | | 8,00 | 76.747.716 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 76.747.716 | 32,00 | 58,85 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 5 | 60.400.000 | | | 0 | 0 | 3 | 78.892.000 | 3,00 | 78.892.000 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 78.892.000 | 60,00 | 130,62 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 08 | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 2 | 37.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 299.434.050 | | | 12 | 43.320.000 | 15 | 14.277.500 | 35,00 | 41.700.500,00 | 291,67 | 96,26 | 35,00 | 41.700.500,00 | 35,00 | 13,93 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 60 | 75.680.000 | | | 12 | 13.560.000 | 3 | 1.697.500 | 12,00 | 6.800.500 | 100,00 | 50,15 | 12,00 | 6.800.500 | 20,00 | 8,99 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 19 | 14.170.000 | | | 0 | 0 | 6 | 5.140.000 | 6,00 | 5.140.000 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 5.140.000 | 31,58 | 36,27 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 66 | 209.584.050 | | | 12 | 29.760.000 | 6 | 7.440.000 | 17,00 | 29.760.000 | 141,67 | 100,00 | 17,00 | 29.760.000 | 25,76 | 14,20 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 139.471.820 | | | 100 | 30.982.851 | 1 | 62.026.250 | 2 | 82.712.851 | 2,00 | 266,96 | 2,00 | 82.712.851,00 | 2,00 | 59,30 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 5 | 124.471.820 | | | 1 | 30.982.851 | | 12.026.250 | 1,00 | 32.712.851 | 100,00 | 105,58 | 1,00 | 32.712.851 | 20,00 | 26,28 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 15.000.000 | | | 0 | 0 | 1 | 50.000.000 | 1,00 | 50.000.000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 50.000.000 | 100,00 | 333,33 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) | Indeks | 95 | 604.032.877 | | | 83 | 92.035.988 | | 35.523.000 | 52,00 | 60.193.400,00 | 62,65 | 65,40 | 52,00 | 60.193.400,00 | 54,74 | 9,97 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemerintahan Yang Diselenggarakan Di Tingkat Kecamatan | % | 100 | 291.472.877 | | | 100 | 42.435.988 | | 13.323.000 | 50,00 | 25.593.400,00 | 50,00 | 60,31 | 50,00 | 25.593.400,00 | 50,00 | 8,78 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 5 | 208.472.877 | | | 1 | 29.935.988 | | 0 | 1,00 | 12.270.400 | 100,00 | 40,99 | 1,00 | 12.270.400 | 20,00 | 5,89 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 10 | 83.000.000 | | | 0 | 12.500.000 | | 13.323.000 | 0,00 | 13.323.000 | 0,00 | 106,58 | 0,00 | 13.323.000 | 0,00 | 16,05 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | Urusan | 60 | 221.560.000 | | | 100 | 49.600.000 | | 22.200.000 | 18,67 | 34.600.000,00 | 18,67 | 69,76 | 18,67 | 34.600.000,00 | 31,11 | 15,62 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 60 | 221.560.000 | | | 12 | 49.600.000 | | 22.200.000 | 4,00 | 34.600.000 | 33,33 | 69,76 | 4,00 | 34.600.000 | 6,67 | 15,62 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | % | 100 | 55.000.000 | | | 100 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Dokumen | 4 | 20.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta | Unit | 4 | 35.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | % | 100 | 36.000.000 | | | 100 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Dokumen | 8 | 12.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 8 | 12.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 8 | 12.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | Kegiatan | 11 | 120.000.000 | | | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | % | 100 | 80.000.000 | | | 100 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | a Kemasya | 60 | 40.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 30 | 40.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 03 | 2.05 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | % | 100 | 40.000.000 | | | 100 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 03 | 2.05 | 01 | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Dokumen | 4 | 40.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Perda, Perkada, dan Kegiatan | rkada, dar | 10/10/10 | 295.604.800 | | | 0/0/1 | 63.080.800 | | 36.395.520 | 0,00 | 36.395.520 | 0,00 | 57,70 | 0,00 | 36.395.520,00 | 0,00 | 12,31 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | % | 100 | 258.604.800 | | | 100 | 63.080.800 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 136.900.800 | | | 1 | 33.840.000 | | 36.395.520 | 0,00 | 36.395.520 | 0,00 | 107,55 | 0,00 | 36.395.520 | 0,00 | 26,59 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Laporan | 10 | 121.704.000 | | | 2 | 29.240.800 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | % | 100 | 37.000.000 | | | 100 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan | 7 | 37.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | Urusan | 100 | 348.772.969 | | | 1 | 104.453.173 | | 7.720.000 | 0,00 | 83.134.043 | 0,00 | 79,59 | 0,00 | 83.134.043,00 | 0,00 | 23,84 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | % | 100 | 348.772.969 | | | 100 | 104.453.173 | | 7.720.000 | 0,00 | 83.134.043 | 0,00 | 79,59 | 0,00 | 83.134.043,00 | 0,00 | 23,84 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 1.250 | 348.772.969 | | | 350 | 104.453.173 | | 7.720.000 | 1,00 | 83.134.043 | 0,29 | 79,59 | 1,00 | 83.134.043 | 0,08 | 23,84 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi | erintahan | 26 | 101.500.000 | | | 0 | 0 | | 3.970.000 | 0,00 | 3.970.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.970.000,00 | 0,00 | 3,91 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | % | 100 | 101.500.000 | | | 100 | 0 | | 3.970.000 | 0,00 | 3.970.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.970.000,00 | 0,00 | 3,91 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Dokumen | 104 | 36.500.000 | | | 0 | 0 | 1 | 3.970.000 | 1,00 | 3.970.000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3.970.000 | 0,96 | 10,88 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 104 | 23.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 104 | 21.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 45 | | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamat | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Dokumen | 104 | 21.000.000 | | | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| 46 | | **8** | | | | | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | 53.306.345.930 | 102 | 5.941.029.267 | 4 | 9.543.284.270 | | | | 4.863.099.062 | | 51,0 | | 10.804.128.329 | | 20,3 | Bakesbangpol |
| 46 | | **8** | **01** | | | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | 53.306.345.930 | | 5.941.029.267 | | 9.543.284.270 | | | | 4.863.099.062 | | 51,0 | | 10.804.128.329 | | 20,3 | Bakesbangpol |
| 46 | | **8** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Indeks Kepuasan Masyarakat** | | | 26.661.772.579 | 92 | 4.925.567.391 | 103 | 4.886.776.527 | | | | 2.695.851.276 | | 55,2 | | 7.621.418.667 | | 28,6 | Bakesbangpol |
| 46 | | **8** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Bulan** | 23.716.487.339 | 24 | 4.787.928.213 | 2 | 4.490.362.563 | | | | 2.462.380.893 | | 54,8 | | 7.250.309.106 | | 30,6 | Bakesbangpol |
| 46 | | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Bulan | 22.601.187.339 | 12 | 4.074.243.213 | 1 | 4.267.302.563 | | | | 2.407.580.893 | | 56,4 | | 6.481.824.106 | | 28,7 | Bakesbangpol |
| 46 | | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD | Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | dokumen | 1.115.300.000 | 12 | 713.685.000 | 1 | 223.060.000 | | | | 54.800.000 | | 24,6 | | 768.485.000 | | 68,9 | Bakesbangpol |
| 46 | | **8** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **paket** | 157.920.000 | 0 | 0 | 47 | 31.584.000 | | | | 31.584.000 | | 100,0 | | 31.584.000 | | 20,0 | Bakesbangpol |
| 46 | | 8 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta atributkelengkapanya | Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapanya | 75 | paket | 157.920.000 | | | 47 | 31.584.000 | | | | 31.584.000 | | 100,0 | | 31.584.000 | | 20,0 | Bakesbangpol |
| 46 | | **8** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **paket** | 2.177.065.240 | 49 | 74.947.148 | 48 | 205.809.964 | | | | 102.680.339 | | 49,9 | | 177.627.487 | | 8,2 | Bakesbangpol |
| 46 | | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor | Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan Kantor | 5 | paket | 1.148.532.620 | 2 | 960.000 | 1 | 1.003.440 | | | | 490.000 | | 48,8 | | 1.450.000 | | 0,1 | Bakesbangpol |
| 46 | | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 31 | paket | 125.000.000 | 12 | 20.160.200 | 31 | 25.000.000 | | | | 7.944.300 | | 31,8 | | 28.104.500 | | 22,5 | Bakesbangpol |
| 46 | | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga | 60 | paket | 6.527.620 | 12 | 994.000 | 12 | 1.305.524 | | | | 1.290.000 | | 98,8 | | 2.284.000 | | 35,0 | Bakesbangpol |
| 46 | | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket Barang Cetakan dan Pengggandaan yang disediakan | 10 | paket | 35.000.000 | 9 | 5.281.300 | 2 | 7.000.000 | | | | 2.800.000 | | 40,0 | | 8.081.300 | | 23,1 | Bakesbangpol |
| 46 | | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Undangan | 2 | dokemen | 9.000.000 | 2 | 1.410.000 | 1 | 1.800.000 | | | | 900.000 | | 50,0 | | 2.310.000 | | 25,7 | Bakesbangpol |
| 46 | | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan KonsultasiSKPD | jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD | 5 | laporan | 853.005.000 | 12 | 46.141.648 | 1 | 169.701.000 | | | | 89.256.039 | | 52,6 | | 135.397.687 | | 15,9 | Bakesbangpol |
| 46 | | **8** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah D** | **Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Unit** | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0,0 | | 0 | | 0,0 | Bakesbangpol |
| 46 | | 8 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan peralatan dan mesin | Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan | 5 | unit | 20.000.000 | | | | | | | | 0 | | 0,0 | | 0 | | 0,0 | Bakesbangpol |
| 46 | | **8** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah** | **Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **laporan** | 342.700.000 | 15 | 25.501.530 | 2 | 109.500.000 | | | | 75.958.044 | | 69,4 | | 101.459.574 | | 29,6 | Bakesbangpol |
| 46 | | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 5 | laporan | 95.100.000 | 9 | 10.921.530 | 1 | 19.020.000 | | | | 8.098.044 | | 42,6 | | 19.019.574 | | 20,0 | Bakesbangpol |

| No | Sasaran | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output) | Satuan | Target Renstra pada Akhir Periode Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 5 | laporan | 247.600.000 | 6 | 14.580.000 | 1 | 90.480.000 | | | | 67.860.000 | | 75,0 | | 82.440.000 | | 33,3 | Bakesbangpol |
| 46 | | **8** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintal** | **Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Unit** | 247.600.000 | 4 | 37.190.500 | 4 | 49.520.000 | | | | 23.248.000 | | 46,9 | | 60.438.500 | | 24,4 | Bakesbangpol |
| 46 | | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraa | Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 4 | unit | 247.600.000 | 4 | 37.190.500 | 4 | 49.520.000 | | | | 23.248.000 | | 46,9 | | 60.438.500 | | 24,4 | Bakesbangpol |
| 46 | | **8** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAK** | **Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional** | | | 8.017.594.530 | 2 | 56.539.000 | 2 | 927.621.250 | | | | 470.126.210 | | 50,7 | | 526.665.210 | | 6,6 | Bakesbangpol |
| 46 | | **8** | **01** | **02** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidan** | **Terlaksananya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | | | 8.017.594.530 | 2 | 56.539.000 | 2 | 927.621.250 | | | | 470.126.210 | | 50,7 | | 526.665.210 | | 6,6 | Bakesbangpol |
| 46 | | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, I | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan yang | 12 | dokumen | 7.117.594.530 | 2 | 56.539.000 | 1 | 727.621.250 | | | | 454.373.210 | | 62,4 | | 510.912.210 | | 7,2 | Bakesbangpol |
| 46 | | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, | Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 10 | dokumen | 900.000.000 | | | 1 | 200.000.000 | | | | 15.753.000 | | 7,9 | | 15.753.000 | | 1,8 | Bakesbangpol |
| 46 | | **8** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LE** | **Pembinaan Partai Politik** | | | 6.217.594.530 | 100 | 958.922.876 | 1 | 1.243.518.906 | | | | 992.144.876 | | 79,8 | | 1.951.067.752 | | 31,4 | Bakesbangpol |
| 46 | | **8** | **01** | **03** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidan** | **Terlaksananya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahaan, Perwakilan dan partai politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik** | | | 6.217.594.530 | 100 | 958.922.876 | 1 | 1.243.518.906 | | | | 992.144.876 | | 79,8 | | 1.951.067.752 | | 31,4 | Bakesbangpol |
| 46 | | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Po | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. Serta pemantauan situasi politik didaerah | 400 | orang | 6.217.594.530 | 100 | 958.922.876 | 1 | 1.243.518.906 | | | | 992.144.876 | | 79,8 | | 1.951.067.752 | | 31,4 | Bakesbangpol |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | **8** | **01** | **04** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISA** | **Persentase LSM yang aktif** | | | 474.790.880 | 0 | 0 | 1 | 98.958.176 | | | | 0 | | 0,0 | | 0 | | 0,0 | Bakesbangpol |
| 46 | | **8** | **01** | **04** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidan** | **Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | | | 474.790.880 | 0 | 0 | 1 | 98.958.176 | | | | 0 | | 0,0 | | 0 | | 0,0 | Bakesbangpol |
| 46 | | 8 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, I | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaharan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasf Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 12 | dokumen | 474.790.880 | | | 1 | 98.958.176 | | | | 0 | | 0,0 | | 0 | | 0,0 | Bakesbangpol |
| 46 | | **8** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANA** | **Jumlah Pertemuan dan Sosialisasi** | | | 9.498.593.411 | 0 | 0 | 0 | 1.899.209.411 | | | | 578.104.700 | | 30,4 | | 578.104.700 | | 6,1 | Bakesbangpol |
| 46 | | **8** | **01** | **05** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidar** | **Terlaksananya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya** | | | 9.498.593.411 | 0 | 0 | 0 | 1.899.209.411 | | | | 578.104.700 | | 30,4 | | 578.104.700 | | 6,1 | Bakesbangpol |
| 46 | | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Bud | Jumlah Dokumen Program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 15 | dokumen | 725.000.000 | | | | 145.000.000 | | | | 95.512.000 | | 65,9 | | 95.512.000 | | 13,2 | Bakesbangpol |
| 46 | | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah | 300 | orang | 7.973.593.411 | | | | 1.594.209.411 | | | | 454.233.700 | | 28,5 | | 454.233.700 | | 5,7 | Bakesbangpol |
| 46 | | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya da | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah | 300 | orang | 800.000.000 | | | | 160.000.000 | | | | 28.359.000 | | 17,7 | | 28.359.000 | | 3,5 | Bakesbangpol |
| 46 | | **8** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN** | **Jumlah Pertemuan Forkopimda dan Forkopimcam** | | | 2.436.000.000 | 0 | 0 | 0 | 487.200.000 | | | | 126.872.000 | | 26,0 | | 126.872.000 | | 5,2 | Bakesbangpol |
| 46 | | **8** | **01** | **06** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewa** | **Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | | | 2.436.000.000 | 0 | 0 | 0 | 487.200.000 | | | | 126.872.000 | | 26,0 | | 126.872.000 | | 5,2 | Bakesbangpol |
| 46 | | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelij | Jumlah orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah | 300 | orang | 2.436.000.000 | | | | 487.200.000 | | | | 126.872.000 | | 26,0 | | 126.872.000 | | 5,2 | Bakesbangpol |

# LAMPIRAN II

# PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Dinas Pendidikan** | | | **348.673.197.031,00** | | | | | | | | **382.350.896.294,00** | **Dinas Pendidikan** |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **348.673.197.031,00** | | | | | | | | **382.350.896.294,00** | **Dinas Pendidikan** |
| **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | **348.673.197.031,00** | | | | | | | | **382.350.896.294,00** | **Dinas Pendidikan** |
| 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat | 87 Indeks | 271.290.743.031,00 | | | | | | | - | 298.449.639.934,00 | Dinas Pendidikan |
| **1** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **270.148.629.031,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN** | **-** | **297.207.639.934,00** | **Dinas Pendidikan** |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 4119 Orang/bulan | 269.643.309.031,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | | 296.607.639.934,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 500 Dokumen | 505.320.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | | 600.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| **1** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100 %** | **80.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Karo** | **-** | **100.000.000,00** | **Dinas Pendidikan** |
| 1 | 01 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 3000 Dokumen | 80.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Karo | | 100.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| **1** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **-** | **-** | **288.554.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **-** | **-** | **342.000.000,00** | **Dinas Pendidikan** |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 10.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | - | | 15.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | - | | 60.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 30.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | - | | 40.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | - | | 60.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 1.440.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | - | | 2.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 10.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | - | | 15.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 137.114.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | - | | 150.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| **1** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **-** | **-** | **735.140.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **-** | **-** | **760.000.000,00** | **Dinas Pendidikan** |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 Laporan | 73.800.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | - | | 80.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | 20.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | - | | 30.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 641.340.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | - | | 650.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| **1** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **-** | **-** | **38.420.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **-** | **-** | **40.000.000,00** | **Dinas Pendidikan** |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 38.420.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | - | | 40.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase Pengelolaan Pendidikan | 62,28 % | 77.352.454.000,00 | | | | | | | - | 83.860.256.360,00 | Dinas Pendidikan |
| **1** | **01** | **02** | **2.01** | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | **Rata- rata Capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | **100 %** | **44.345.089.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **-** | **-** | **44.396.095.000,00** | **Dinas Pendidikan** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 5 Ruang | 400.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 500.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 0 Ruang | - | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 0 Ruang | - | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 5 Unit | 1.200.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 600.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 09 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | 250.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 300.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 10 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 3 Ruang | 159.164.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 160.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 11 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 4 Ruang | 450.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 450.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 14 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 5 Paket | 560.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 500.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 0 Paket | - | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 0 Peserta Didik | - | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 0 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 22 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 5 Paket | 350.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 650.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 380 Peserta Didik | 180.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 400.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 350 Orang | 350.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 375.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 286 Satuan Pendidikan | 39.578.295.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 39.578.295.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 30 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 300 Orang | 41.030.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 45.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 38 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 286 Dokumen | 10.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 11.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 50 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 286 Satuan Pendidikan | 66.600.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 66.800.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 51 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 6 Ruang | 750.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 760.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| **1** | **01** | **02** | **2.02** | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah** | **-** | **-** | **28.794.755.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **-** | **-** | **35.114.755.000,00** | **Dinas Pendidikan** |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1 Ruang | 250.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 650.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 3 Ruang | - | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 650.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Ruang | 250.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 700.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 06 | Pembangunan Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 1 Ruang | 250.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 650.000.000,00 | Dinas Pendidikan |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 5 Unit | 950.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 650.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang | 750.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 400.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 21 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 3 Unit | 350.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 700.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 25 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 80 Paket | 350.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 400.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 1000 Peserta Didik | - | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 750.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 34 | Perlengkapan Belajar Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 6 Paket | - | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 700.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 35 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 10 Paket | 500.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 650.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 1530 Peserta Didik | 150.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 350.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 300 Orang | 235.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 275.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 68 Satuan Pendidikan | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 650.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 69 Satuan Pendidikan | 24.099.755.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 26.099.755.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 43 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 21000 Orang | 20.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 30.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 51 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 68 Dokumen | 20.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 30.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 58 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 4790 Satuan Pendidikan | 70.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 80.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 59 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 2 Ruang | 500.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 700.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| **1** | **01** | **02** | **2.03** | | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | **-** | **-** | **3.671.360.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **-** | **-** | **3.751.531.360,00** | **Dinas Pendidikan** |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 4 Unit | 400.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 440.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 100 Peserta Didik | - | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 30.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 50 Satuan Pendidikan | 30.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 30.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 170 Satuan Pendidikan | 3.171.360.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP PAUD | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 3.174.531.360,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 19 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | 180 Orang | 70.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 77.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| **1** | **01** | **02** | **2.04** | | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **-** | **-** | **541.250.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **-** | **-** | **597.875.000,00** | **Dinas Pendidikan** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 11 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia | 6 Paket | 75.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 85.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 20 Satuan Pendidikan | 20.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 22.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 5 Satuan Pendidikan | 346.250.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 380.875.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 18 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 20 Orang | 20.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 22.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 46 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 100 Peserta Didik | 80.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 88.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | - | - | 20.000.000,00 | | | | | | | - | 30.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| **1** | **01** | **03** | **2.01** | | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan** | **-** | **-** | **20.000.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **-** | **-** | **30.000.000,00** | **Dinas Pendidikan** |
| 1 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | 5 Dokumen | 20.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 30.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | - | - | 10.000.000,00 | | | | | | | - | 11.000.000,00 | Dinas Pendidikan |
| **1** | **01** | **05** | **2.02** | | **Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | **-** | **-** | **10.000.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **-** | **-** | **11.000.000,00** | **Dinas Pendidikan** |
| 1 | 01 | 05 | 2.02 | 03 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 73 Dokumen | 10.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | - | | 11.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | | | | **Dinas Kesehatan** | | | **153.808.963.524,00** | | | | | | | | **170.272.862.334,00** | **Dinas Kesehatan** |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **153.808.963.524,00** | | | | | | | | **170.272.862.334,00** | **Dinas Kesehatan** |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | **153.808.963.524,00** | | | | | | | | **170.272.862.334,00** | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | 94.031.746.584,00 | | | | | | | - | 111.981.798.534,00 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **-** | **-** | **84.358.037,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas** | **-** | **85.000.000,00** | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 84.358.037,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | | PD.06 | Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas | | 85.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **-** | **-** | **92.726.948.867,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pegawai Dinas Kesehatan** | **-** | **110.685.088.534,00** | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1076 Orang/bulan | 92.044.071.917,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pegawai Dinas Kesehatan | | 110.685.088.534,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 682.876.950,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pegawai Dinas Kesehatan | | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **200.879.680,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas** | **-** | **192.150.000,00** | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 38.773.460,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | | PD.06 | Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas | | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 8.218.720,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | | PD.06 | Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas | | 10.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 25.976.500,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | | PD.06 | Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas | | 25.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 7.150.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | | PD.06 | Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas | | 7.150.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan | 120.761.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | | PD.06 | Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas | | 150.000.000,00 | Dinas Kesehatan |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **-** | **-** | **999.560.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas** | **-** | **999.560.000,00** | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas | | 50.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 949.560.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas | | 949.560.000,00 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **-** | **-** | **20.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Barang Milik Daerah (Mobil, Ambulance, Sepeda Motor)** | **-** | **20.000.000,00** | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | 20.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Barang Milik Daerah (Mobil, Ambulance, Sepeda Motor) | | 20.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan/persentase balita stunting/Persentase puskesmas menyelenggarakan UKP serta UKM esensial dan pengembangan<br>Rasio Puskesmas per 1.000 penduduk/Rasio pustu pew<br>1.000 penduduk/Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk | 100/25/100 %<br>0.04/0.5/0.0<br>1 rasio | 59.033.066.440,00 | | | | | | | - | 57.050.177.800,00 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **02** | **2.01** | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **16.003.448.501,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat dan Tenaga Kesehatan** | **-** | **19.385.000.000,00** | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | 1 Unit | 350.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Munte, Gunung Saribu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 100.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 06 | Pengembangan Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 1 Unit | 486.110.683,00 | - Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 10.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | 2 Unit | 200.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Barusjahe, Tanjung Barus<br>- Kab. Karo, Naman Teran, Kutarayat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 100.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 200 Unit | 2.550.847.818,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 5.000.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 150 Unit | 234.100.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 22 | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | 1 Unit | 2.710.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 10.000.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 23 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 19 Paket | 9.332.390.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 4.000.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 26 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | 19 Paket | 140.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 175.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **42.964.480.639,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Masyarakat dan Tenaga Kesehatan** | **-** | **37.611.600.000,00** | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7373 Orang | 100.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 7038 Orang | 712.460.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 0 | Dinas Kesehatan |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 20 Orang | 830.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 830.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 31426 Orang | 1.175.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 125399 Orang | 1.300.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 125399 Orang | 360.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 300.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 34586 Orang | 100.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1000 Orang | 200.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5013 Orang | 890.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 900.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 131 Orang | 100.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 100.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 6451 Orang | 1.000.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 1.000.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 12587 Orang | 350.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 350.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | 20 Dokumen | 500.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 500.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 20 Dokumen | 2.291.742.795,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 1.500.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 20 Dokumen | 400.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 400.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20 Dokumen | 930.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 50 Dokumen | 140.940.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 20 Dokumen | 73.900.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 90.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 85 Orang | 10.800.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 10.800.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 20 Dokumen | 878.280.638,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 1.000.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 20 Dokumen | 25.481.320.139,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), PENDAPATAN BAGI HASIL | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 25.500.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 27 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | 550 Orang | 10.800.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 10.800.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 19 Dokumen | 4.768.977.067,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 5.000.000.000,00 | Dinas Kesehatan |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 20 Dokumen | 10.260.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 20.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 41 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 1287 Orang | 350.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 100.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi** | **53 %** | **32.522.800,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Tenaga Kesehatan, lintas Sektoral** | **-** | **20.097.800,00** | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 20 Dokumen | 32.522.800,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Tenaga Kesehatan, lintas Sektoral | | 20.097.800,00 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **02** | **2.04** | | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota** | **100 %** | **32.614.500,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Rumah Sakit di Kabupaten Karo** | **-** | **33.480.000,00** | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | 02 | 02 | 2.04 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | 5 Unit | 6.480.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Rumah Sakit di Kabupaten Karo | | 6.480.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.04 | 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | 19 Unit | 26.134.500,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Rumah Sakit di Kabupaten Karo | | 27.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase tenaga Kesehatan sesuai standar<br>Persentase tenaga Kesehatan sesuai standar | 100 %<br>100 % | 210.800.000,00 | | | | | | | - | 700.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **03** | **2.01** | | **Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota** | **Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota** | **95.5 %** | **10.800.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Tenaga Kesehatan di Kabupaten Karo** | **-** | **50.000.000,00** | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | 02 | 03 | 2.01 | 01 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 20 Dokumen | 10.800.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Tenaga Kesehatan di Kabupaten Karo | | 50.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **03** | **2.02** | | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | **Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | **79 %** | **150.000.000,00** | | | #N/A | PP.01 | PD.03 | **Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas** | **-** | **550.000.000,00** | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | 02 | 03 | 2.02 | 02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 38 Orang | 100.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | #N/A | PP.01 | PD.03 | Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas | | 500.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 03 | 2.02 | 03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 20 Dokumen | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | #N/A | PP.01 | PD.03 | Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas | | 50.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **03** | **2.03** | | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **10 %** | **50.000.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas** | **-** | **100.000.000,00** | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | 02 | 03 | 2.03 | 01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 1706 Orang | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas | | 100.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 04 | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase sarana dan produk farmasi dan makanana minuman memenuhi persyaratan<br>Persentase Sarana farmasi memenuhi persyaratan/persentase makanan yang memenuhi persyaratan | 67 %<br>94/66 % | 369.436.000,00 | | | | | | | - | 369.436.000,00 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **04** | **2.01** | | **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | **Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | **94 %** | **101.958.000,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Apotek, Toko Obat, Toko alat Kesehatan, Optik, Toko obat tradisional** | **-** | **101.958.000,00** | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | 02 | 04 | 2.01 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 20 Dokumen | 101.958.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | | PD.03 | Apotek, Toko Obat, Toko alat Kesehatan, Optik, Toko obat tradisional | | 101.958.000,00 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **04** | **2.03** | | **Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga** | **Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga** | **94 %** | **116.360.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Produsen Pangan Industri Rumah Tangga** | **-** | **116.360.000,00** | **Dinas Kesehatan** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| 1 | 02 | 04 | 2.03 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 20 Dokumen | 116.360.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Produsen Pangan Industri Rumah Tangga | | 116.360.000,00 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **04** | **2.06** | | **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** | **Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** | **13 %** | **151.118.000,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Produk dan Produsen Pangan Industri Rumah Tangga** | **-** | **151.118.000,00** | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | 02 | 04 | 2.06 | 01 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | 20 Unit | 151.118.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | | PD.03 | Produk dan Produsen Pangan Industri Rumah Tangga | | 151.118.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Rasio posyandu per. 1.000 balita | 9,3 rasio | 163.914.500,00 | | | | | | | - | 171.450.000,00 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **05** | **2.01** | | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **50.2 %** | **92.464.500,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat, Kader Kesehatan, Lintas Sektoral** | **-** | **100.000.000,00** | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | 02 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 20 Dokumen | 92.464.500,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat, Kader Kesehatan, Lintas Sektoral | | 100.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **-** | **-** | **71.450.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat dan Tenaga Kesehatan** | **-** | **71.450.000,00** | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20 Dokumen | 71.450.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat dan Tenaga Kesehatan | | 71.450.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | **Rumah Sakit Umum Daerah** | | | **45.170.793.780,00** | | | | | | | | **45.046.853.780,00** | **Rumah Sakit Umum Daerah** |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **45.170.793.780,00** | | | | | | | | **45.046.853.780,00** | **Rumah Sakit Umum Daerah** |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | **45.170.793.780,00** | | | | | | | | **45.046.853.780,00** | **Rumah Sakit Umum Daerah** |
| 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 43.934.484.281,00 | | | | | | | - | 43.934.484.281,00 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| **1** | **02** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **22.120.503.140,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pegawai RSUD Kabupaten Karo** | **-** | **22.120.503.140,00** | **Rumah Sakit Umum Daerah** |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 219 Orang/bula | 21.804.423.140,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | | PD.06 | Pegawai RSUD Kabupaten Karo | | 21.804.423.140,00 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 36 Dokumen | 316.080.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | | PD.06 | Pegawai RSUD Kabupaten Karo | | 316.080.000,00 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **3.602.710.000,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pegawai RSUD Kabupaten Karo** | **-** | **3.602.710.000,00** | **Rumah Sakit Umum Daerah** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 120 Laporan | 428.400.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pegawai RSUD Kabupaten Karo | | 428.400.000,00 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 48 Laporan | 3.174.310.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pegawai RSUD Kabupaten Karo | | 3.174.310.000,00 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| **1** | **02** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **55.271.141,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pegawai RSUD Kabupaten Karo** | **-** | **55.271.141,00** | **Rumah Sakit Umum Daerah** |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | 55.271.141,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pegawai RSUD Kabupaten Karo | | 55.271.141,00 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD** | **100 %** | **18.156.000.000,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pegawai RSUD Kabupaten Karo** | **-** | **18.156.000.000,00** | **Rumah Sakit Umum Daerah** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 18.156.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | | PD.06 | Pegawai RSUD Kabupaten Karo | | 18.156.000.000,00 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian Indikator SPM Rumah Sakit/ Persentase Prasarana Rumah Sakit sesuai standar/ Persentase Sarana Rumah Sakit Sesuai Standar | 90/95/90 %/%/% | 1.236.309.499,00 | | | | | | | - | 1.112.369.499,00 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| **1** | **02** | **02** | **2.01** | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota** | **100 %** | **952.369.499,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **952.369.499,00** | **Rumah Sakit Umum Daerah** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 9 Unit | 952.369.499,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 952.369.499,00 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **283.940.000,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **160.000.000,00** | **Rumah Sakit Umum Daerah** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 10 Dokumen | 10.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 10.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 300 Dokumen | 273.940.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 150.000.000,00 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
| | | | | | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** | | | **149.316.659.878,00** | | | | | | | | **52.876.169.000,00** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **149.316.659.878,00** | | | | | | | | **52.876.169.000,00** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** |
| **1** | **03** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | **149.316.659.878,00** | | | | | | | | **52.876.169.000,00** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** |
| 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 10.422.414.289,00 | | | | | | | - | 10.576.435.386,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| **1** | **03** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **6.659.499.986,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **ASN Dinas PUTR Kab.Karo** | **-** | **6.849.613.686,00** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 742 Orang/bulan | 6.137.744.986,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN Dinas PUTR Kab.Karo | | 6.327.858.686,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 521.755.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | ASN Dinas PUTR Kab.Karo | | 521.755.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| **1** | **03** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **750.814.483,00** | | | PN.06 | | PD.06 | **Dinas PUTR Kab.Karo** | **-** | **955.501.700,00** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 3.281.164,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Dinas PUTR Kab.Karo | | 3.300.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 42 Paket | 301.800.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Dinas PUTR Kab.Karo | | 301.800.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 27 Paket | 18.977.319,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Dinas PUTR Kab.Karo | | 20.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 27.876.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Dinas PUTR Kab.Karo | | 30.401.700,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 900 Laporan | 398.880.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Dinas PUTR Kab.Karo | | 600.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| **1** | **03** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 %** | **1.500.000.000,00** | | | PN.06 | | PD.06 | **Dinas PUTR Kab.Karo** | **-** | **1.000.000.000,00** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** |
| 1 | 03 | 01 | 2.07 | 03 | Pengadaan Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 1 Unit | 1.500.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Dinas PUTR Kab.Karo | | 1.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| **1** | **03** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **921.492.720,00** | | | PN.06 | | PD.06 | **Dinas PUTR Kab.Karo** | **-** | **1.021.320.000,00** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 63.900.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Dinas PUTR Kab.Karo | | 100.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 19.450.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Dinas PUTR Kab.Karo | | 54.560.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 838.142.720,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Dinas PUTR Kab.Karo | | 866.760.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **1** | **03** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **590.607.100,00** | | | PN.06 | | PD.06 | **Dinas PUTR Kab.Karo** | **-** | **750.000.000,00** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit | 112.030.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Dinas PUTR Kab.Karo | | 50.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 19 Unit | 478.577.100,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Dinas PUTR Kab.Karo | | 700.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik<br>Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | 51 %<br>51.11 % | 13.141.082.000,00 | | | | | | | - | 12.096.512.614,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| **1** | **03** | **02** | **2.02** | | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **13.141.082.000,00** | | | PN.04 | | PD.05 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **12.096.512.614,00** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 03 | Pembangunan Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun | 1 Bendung | 1.000.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 300.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 4.2 KM | 8.435.082.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 8.100.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 15 | Rehabilitasi Bendung Irigasi | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi | 1 Bendung | 1.000.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 440.512.614,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 8 KM | 2.656.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 3.156.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 35 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | PP.02 | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 100.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase penduduk berakses air minum | 68.71 % | 7.805.371.000,00 | | | | | | | - | 700.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| **1** | **03** | **03** | **2.01** | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **7.805.371.000,00** | | | PN.04 | | PD.05 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **700.000.000,00** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 25 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 100.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 26 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | 0 Liter/Detik | - | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 28 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | 0 Liter/Detik | - | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 32 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 1700 SR | 7.755.371.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | #N/A | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 600.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tinggal bersanitasi | 75.08 % | 6.352.938.000,00 | | | | | | | - | 2.600.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| **1** | **03** | **05** | **2.01** | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **6.352.938.000,00** | | | PN.04 | | PD.05 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **2.600.000.000,00** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** |
| 1 | 03 | 05 | 2.01 | 22 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun | 400 M³/Hari | 6.202.938.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 2.500.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 05 | 2.01 | 40 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 4 Orang | 100.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 100.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 05 | 2.01 | 41 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | 63 % | 7.350.000.000,00 | | | | | | | - | 4.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| **1** | **03** | **06** | **2.01** | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **7.350.000.000,00** | | | #N/A | | PD.05 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **4.000.000.000,00** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** |
| 1 | 03 | 06 | 2.01 | 24 | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan | 150 Sistem Drainase Perkotaan | 300.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | #N/A | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 1.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 06 | 2.01 | 28 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi | 800 Sistem Drainase Perkotaan | 3.500.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | #N/A | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 1.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 06 | 2.01 | 29 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun | 650 Sistem Drainase Perkotaan | 1.300.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | #N/A | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 1.200.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 06 | 2.01 | 30 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | #N/A | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 100.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 06 | 2.01 | 31 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara | 8000 Sistem Drainase Perkotaan | 2.200.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 700.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Gedung Pemerintah dalam kondisi baik | 63 % | 400.000.000,00 | | | | | | | - | 1.400.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| **1** | **03** | **08** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | **100 %** | **400.000.000,00** | | | PN.04 | | PD.05 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **1.400.000.000,00** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** |
| 1 | 03 | 08 | 2.01 | 18 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala | 1 Bangunan Gedung | 100.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 600.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 08 | 2.01 | 21 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 800.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 09 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan | 25 % | 1.638.800.000,00 | | | | | | | - | 100.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| **1** | **03** | **09** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **1.638.800.000,00** | | | PN.04 | | PD.05 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **100.000.000,00** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** |
| 1 | 03 | 09 | 2.01 | 08 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata | 1 Kawasan | 1.638.800.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 100.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 66 % | 101.556.054.589,00 | | | | | | | - | 20.603.221.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| **1** | **03** | **10** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | **100 %** | **101.556.054.589,00** | | | PN.04 | | PD.05 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **20.603.221.000,00** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 29 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 100.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 30 | Pengawasan Penyeleng garaan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya | 1 KM | 100.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 100.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 31 | Penggantian Jembatan | Jumlah Jembatan yang Diganti | 1 Jembatan | 414.627.393,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 1.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 32 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 18 KM | 29.354.619.653,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 7.421.101.848,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 33 | Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | 40 KM | 60.444.757.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 3.229.355.216,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 38 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | 2 Jembatan | 600.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 300.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 39 | Rehabilitasi Jembatan | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | 1 Jembatan | 300.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | #N/A | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 600.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 40 | Pembangunan Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dibangun | 1 Jembatan | 2.000.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 1.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 43 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 1 KM | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 200.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 44 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 0,7 KM | 1.200.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 2.652.763.936,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 46 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 38 KM | 6.992.050.543,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.02 | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 4.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 11 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Meningkatnya SDM tenaga terampil konstruksi | 100 Orang | 100.000.000,00 | | | | | | | - | 100.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| **1** | **03** | **11** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** | **100 %** | **100.000.000,00** | | | #N/A | | PD.05 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **100.000.000,00** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** |
| 1 | 03 | 11 | 2.01 | 10 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi | 50 Orang | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | #N/A | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 50.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 11 | 2.01 | 16 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | 50 Orang | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 50.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1 | 03 | 12 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Ketaatan terhadap RTRW | 77 % | 550.000.000,00 | | | | | | | - | 700.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| **1** | **03** | **12** | **2.01** | | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota** | **100 %** | **50.000.000,00** | | | PN.04 | | PD.05 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **50.000.000,00** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** |
| 1 | 03 | 12 | 2.01 | 12 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi | 50 Orang | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 50.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| **1** | **03** | **12** | **2.02** | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **200.000.000,00** | | | PN.04 | | PD.05 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **500.000.000,00** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** |
| 1 | 03 | 12 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 500.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| **1** | **03** | **12** | **2.04** | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **300.000.000,00** | | | PN.04 | | PD.05 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **150.000.000,00** | **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** |
| 1 | 03 | 12 | 2.04 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
| | | | | | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan** | | | **5.710.615.298,00** | | | | | | | | **7.854.694.873,00** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan** |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **5.560.615.298,00** | | | | | | | | **7.799.694.873,00** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan** |
| **1** | **04** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | **5.560.615.298,00** | | | | | | | | **7.799.694.873,00** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 1 | 04 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Reformasi Birokrasi | 77,37 Indeks | 4.119.751.298,00 | | | | | | | - | 4.494.694.873,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| **1** | **04** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **3.744.669.307,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.06 | **Dinas Perkimtan Kab. Karo** | **-** | **4.125.862.683,00** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan** |
| 1 | 04 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | 3.200.773.807,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Dinas Perkimtan Kab. Karo | | 3.527.577.633,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| 1 | 04 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 543.895.500,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | #N/A | PP.04 | PD.06 | Dinas Perkimtan Kab. Karo | | 598.285.050,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| **1** | **04** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja sub. kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **251.185.991,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.06 | **Dinas Perkimtan Kab. Karo** | **-** | **266.404.590,00** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan** |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 33 Paket | 58.928.692,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | #N/A | PP.04 | PD.06 | Dinas Perkimtan Kab. Karo | | 54.921.561,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 23 Paket | 12.661.991,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | #N/A | PP.04 | PD.06 | Dinas Perkimtan Kab. Karo | | 13.928.190,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 3.755.308,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | #N/A | PP.01 | PD.06 | Dinas Perkimtan Kab. Karo | | 4.130.839,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| 1 | 04 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 600 Laporan | 175.840.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | #N/A | PP.04 | PD.06 | Dinas Perkimtan Kab. Karo | | 193.424.000,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| **1** | **04** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja sub. kegiatan pada kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 %** | **42.930.000,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.06 | **Dinas Perkimtan Kab. Karo** | **-** | **47.223.000,00** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan** |
| 1 | 04 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 28.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | #N/A | PP.04 | PD.06 | Dinas Perkimtan Kab. Karo | | 30.800.000,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| 1 | 04 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 15 Laporan | 14.930.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | #N/A | PP.04 | PD.06 | Dinas Perkimtan Kab. Karo | | 16.423.000,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| **1** | **04** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja sub. kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 %** | **80.966.000,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.06 | **Dinas Perkimtan Kab. Karo** | **-** | **55.204.600,00** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan** |
| 1 | 04 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | 80.966.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | #N/A | PP.04 | PD.06 | Dinas Perkimtan Kab. Karo | | 55.204.600,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| 1 | 04 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100 % | 239.964.000,00 | | | | | | | - | 305.000.000,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| **1** | **04** | **02** | **2.03** | | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota** | **100 %** | **239.964.000,00** | | | #N/A | PP.02 | PD.05 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **305.000.000,00** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan** |
| 1 | 04 | 02 | 2.03 | 01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 1 Unit Rumah | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.02 | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 55.000.000,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 1 | 04 | 02 | 2.03 | 04 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | 1 Unit Rumah | 189.964.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.02 | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 250.000.000,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| 1 | 04 | 05 | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | 99 % | 1.200.900.000,00 | | | | | | | - | 3.000.000.000,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| **1** | **04** | **05** | **2.01** | | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | **Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | **100 %** | **1.200.900.000,00** | | | #N/A | PP.02 | PD.05 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **3.000.000.000,00** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan** |
| 1 | 04 | 05 | 2.01 | 02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 12 Lokasi | 1.200.900.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.02 | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 3.000.000.000,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **150.000.000,00** | | | | | | | | **55.000.000,00** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan** |
| **2** | **10** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | **150.000.000,00** | | | | | | | | **55.000.000,00** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan** |
| 2 | 10 | 04 | | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1 Kasus | 125.000.000,00 | | | | | | | - | 27.500.000,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| **2** | **10** | **04** | **2.01** | | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **125.000.000,00** | | | #N/A | PP.02 | PD.05 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **27.500.000,00** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan** |
| 2 | 10 | 04 | 2.01 | 01 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.02 | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 0 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| 2 | 10 | 04 | 2.01 | 02 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2 Berita Acara | 25.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.02 | PD.05 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 27.500.000,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| 2 | 10 | 05 | | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | - | - | 25.000.000,00 | | | | | | | - | 27.500.000,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| **2** | **10** | **05** | **2.01** | | **Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **-** | **-** | **25.000.000,00** | | | #N/A | PP.02 | PD.05 | **-** | **-** | **27.500.000,00** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan** |
| 2 | 10 | 05 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.02 | PD.05 | - | | 27.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| | | | | | **Satuan Polisi Pamong Praja** | | | **13.037.575.027,00** | | | | | | | | **14.339.982.530,00** | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **13.037.575.027,00** | | | | | | | | **14.339.982.530,00** | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| **1** | **05** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | **13.037.575.027,00** | | | | | | | | **14.339.982.530,00** | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 12.127.879.877,00 | | | | | | | - | 13.339.317.865,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN** | **100 % 100 %** | **4.454.715.581,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Satpol PP Kab. Karo** | **-** | **4.900.187.139,00** | **Satuan Polisi Pamong Praja** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 480 Orang/bulan | 4.274.835.581,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Satpol PP Kab. Karo | | 4.702.319.139,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 75 Dokumen | 179.880.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Satpol PP Kab. Karo | | 197.868.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan<br>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga** | **100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %** | **168.880.296,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Satpol PP Kab. Karo** | **-** | **184.418.326,00** | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 15.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Satpol PP Kab. Karo | | 15.150.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 25.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Satpol PP Kab. Karo | | 27.500.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 5.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Satpol PP Kab. Karo | | 5.500.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 5.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Satpol PP Kab. Karo | | 5.500.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 140 Laporan | 118.880.296,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Satpol PP Kab. Karo | | 130.768.326,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Tersedianya Mebel** | **100 %** | **10.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Satpol PP Kab. Karo** | **-** | **11.000.000,00** | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Unit | 10.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Satpol PP Kab. Karo | | 11.000.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | **100 %<br>100 %<br>100 %** | **7.494.284.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Satpol PP Kab. Karo** | **-** | **8.243.712.400,00** | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | 20.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Satpol PP Kab. Karo | | 22.000.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 10.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Satpol PP Kab. Karo | | 11.000.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 58 Laporan | 7.464.284.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Satpol PP Kab. Karo | | 8.210.712.400,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | 50 %<br>85 % | 799.695.150,00 | | | | | | | - | 879.664.665,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **02** | **2.01** | | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan<br>Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan<br>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia<br>Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota<br>Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam** | **100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %** | **741.019.150,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **815.121.065,00** | **Satuan Polisi Pamong Praja** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 320 Dokumen | 20.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 22.000.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 60 Dokumen | 28.676.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 31.543.600,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berkaitan Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 300 Orang | 20.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 22.000.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 06 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 24 Dokumen | 11.200.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 12.320.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 15 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 466 laporan | 88.800.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 97.680.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 18 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | 633 Unit | 572.343.150,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 629.577.465,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **02** | **2.02** | | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | **Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP<br>Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota<br>Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | **100 %<br>100 %<br>100 %** | **54.676.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **60.143.600,00** | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| 1 | 05 | 02 | 2.02 | 10 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 12 Laporan | 27.676.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 30.443.600,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 02 | 2.02 | 11 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | 10 Laporan | 15.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 16.500.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 02 | 2.02 | 12 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 132 Laporan | 12.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 13.200.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **02** | **2.03** | | **Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda** | **100 %** | **4.000.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)** | **-** | **4.400.000,00** | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| 1 | 05 | 02 | 2.03 | 06 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | 2 Laporan | 4.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) | | 4.400.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 04 | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota<br>Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 51 %<br>80 % | 110.000.000,00 | | | | | | | - | 121.000.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **04** | **2.01** | | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran<br>Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran<br>Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal<br>Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota<br>Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar** | **100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %** | **55.000.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **60.500.000,00** | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 6.050.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2 Laporan | 5.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 6.050.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 03 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 6.050.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 04 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 6.050.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 05 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 6.050.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 07 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | 100 Orang | 5.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 6.050.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 08 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | 10 Desa/Kelurahan | 5.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 6.050.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 17 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | 1 Unit | 5.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 6.050.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 18 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | 2 Dokumen | 5.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 6.050.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 19 | Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga | 200 Keluarga | 5.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 6.050.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **04** | **2.02** | | **Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran** | **Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dan Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran** | **100 % 100 %** | **11.000.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **12.100.000,00** | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| 1 | 05 | 04 | 2.02 | 01 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 6.050.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 04 | 2.02 | 02 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 6.050.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **04** | **2.03** | | **Investigasi Kejadian Kebakaran** | **Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran** | **100 %** | **5.500.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **6.050.000,00** | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| 1 | 05 | 04 | 2.03 | 01 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 6.050.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **04** | **2.04** | | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** | **Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana** | **100 % 100 % 100 %** | **16.500.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **18.150.000,00** | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| 1 | 05 | 04 | 2.04 | 01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | 1000 Orang | 5.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 6.050.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1 | 05 | 04 | 2.04 | 02 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | 10 Desa/Kelurahan | 5.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 6.050.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 04 | 2.04 | 03 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 6.050.000,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **1** | **05** | **04** | **2.05** | | **Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia** | **Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal<br>Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal<br>Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia<br>Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis** | **100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %** | **22.000.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **24.200.000,00** | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| 1 | 05 | 04 | 2.05 | 01 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia | 1 Laporan | 5.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 6.050.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 | 05 | 04 | 2.05 | 02 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 6.050.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 | 05 | 04 | 2.05 | 04 | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal | 1 Laporan | 5.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 6.050.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 | 05 | 04 | 2.05 | 05 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis | 1 Unit | 5.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 6.050.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | | | | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | | | **5.123.363.629,00** | | | | | | | | **6.071.741.814,00** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **5.123.363.629,00** | | | | | | | | **6.071.741.814,00** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| **1** | **05** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | **5.123.363.629,00** | | | | | | | | **6.071.741.814,00** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 4.887.201.432,00 | | | | | | | | - | 5.276.741.814,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **3.806.260.196,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.06 | **PNS dan CPNS BPBD Kab. Karo** | **-** | **3.949.285.814,00** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 29 Orang/bulan | 3.699.900.196,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | PNS dan CPNS BPBD Kab. Karo | | 3.832.621.814,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 106.360.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | PNS dan CPNS BPBD Kab. Karo | | 116.664.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **407.736.556,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai dan gedung kantor BPBD Kab. Karo** | **-** | **537.856.000,00** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 3.998.828,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Pegawai dan gedung kantor BPBD Kab. Karo | | 4.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 40 Paket | 52.353.580,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Pegawai dan gedung kantor BPBD Kab. Karo | | 48.850.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 13 Paket | 8.429.438,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Pegawai dan gedung kantor BPBD Kab. Karo | | 7.606.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 43.430.710,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Pegawai dan gedung kantor BPBD Kab. Karo | | 45.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 300 Dokumen | 1.800.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Pegawai dan gedung kantor BPBD Kab. Karo | | 5.400.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 84.494.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Pegawai dan gedung kantor BPBD Kab. Karo | | 96.640.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 213.230.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Pegawai dan gedung kantor BPBD Kab. Karo | | 330.360.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **510.056.680,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai dan gedung kantor BPBD Kab. Karo** | **-** | **544.300.000,00** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 27.428.680,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Pegawai dan gedung kantor BPBD Kab. Karo | | 28.960.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 482.628.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Pegawai dan gedung kantor BPBD Kab. Karo | | 515.340.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **163.148.000,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.06 | **Barang milik daerah pada BPBD Kab. Karo** | **-** | **245.300.000,00** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit | 153.880.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Barang milik daerah pada BPBD Kab. Karo | | 231.920.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | 9.268.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Barang milik daerah pada BPBD Kab. Karo | | 13.380.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 03 | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Menghadapi Bencana | 0,53 Indeks | 236.162.197,00 | | | | | | | - | 795.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **03** | **2.01** | | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota** | **100 %** | **100.000.000,00** | | | PN.05 | PP.02 | PD.05 | **Warga negara yang tinggal di dearah rawan bencana Kab. Karo** | **-** | **200.000.000,00** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| 1 | 05 | 03 | 2.01 | 03 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.05 | PP.02 | PD.05 | Warga negara yang tinggal di dearah rawan bencana Kab. Karo | | 200.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **03** | **2.02** | | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **100 %** | **90.000.000,00** | | | PN.05 | PP.02 | PD.05 | **Aparatur dan warga negara yang tinggal di dearah rawan bencana Kab. Karo** | **-** | **500.000.000,00** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 06 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 1 Kawasan | 15.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.05 | PP.02 | PD.05 | Aparatur dan warga negara yang tinggal di dearah rawan bencana Kab. Karo | | 50.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 16 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 35 Kawasan | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.05 | PP.02 | PD.05 | Aparatur dan warga negara yang tinggal di dearah rawan bencana Kab. Karo | | 400.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 17 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | 1 laporan | 25.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.05 | PP.02 | PD.05 | Aparatur dan warga negara yang tinggal di dearah rawan bencana Kab. Karo | | 50.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **03** | **2.03** | | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatanPelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **100 %** | **25.000.000,00** | | | PN.05 | PP.02 | PD.05 | **Aparatur dan warga negara korban bencana di Kab. Karo yang dicari, diselamatkan dan dievakuasi** | **-** | **40.000.000,00** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 10 Orang | 10.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.05 | PP.02 | PD.05 | Aparatur dan warga negara korban bencana di Kab. Karo yang dicari, diselamatkan dan dievakuasi | | 20.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 09 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 10 Orang | 15.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.05 | PP.02 | PD.05 | Aparatur dan warga negara korban bencana di Kab. Karo yang dicari, diselamatkan dan dievakuasi | | 20.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **03** | **2.04** | | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kegiatan** | **100 %** | **21.162.197,00** | | | PN.05 | PP.02 | PD.05 | **Masyarakat Kab. Karo** | **-** | **55.000.000,00** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 02 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.05 | PP.02 | PD.05 | Masyarakat Kab. Karo | | 50.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 10 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan | 1 Kegiatan | 11.162.197,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.05 | PP.02 | PD.05 | Masyarakat Kab. Karo | | 5.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | | **Dinas Sosial** | | | **3.609.534.820,00** | | | | | | | | **4.910.235.600,00** | **Dinas Sosial** |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **3.609.534.820,00** | | | | | | | | **4.910.235.600,00** | **Dinas Sosial** |
| **1** | **06** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | **3.609.534.820,00** | | | | | | | | **4.910.235.600,00** | **Dinas Sosial** |
| 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 3.075.249.612,00 | | | | | | | - | 3.238.045.000,00 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **2.595.840.844,00** | | | PN.03 | PP.01 | PD.06 | **Pegawai Dinas Sosial Kab.Karo** | **-** | **2.726.578.596,00** | **Dinas Sosial** |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 18 Orang/bula | 2.472.400.844,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.01 | PD.06 | Pegawai Dinas Sosial Kab.Karo | | 2.588.928.596,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 123.440.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.01 | PD.06 | Pegawai Dinas Sosial Kab.Karo | | 137.650.000,00 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **167.118.358,00** | | | PN.03 | PP.01 | PD.06 | **Dinas Sosial Kab.Karo** | **-** | **203.830.964,00** | **Dinas Sosial** |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 3.489.163,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.01 | PD.06 | Dinas Sosial Kab.Karo | | 4.500.000,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 23.840.285,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Dinas Sosial Kab.Karo | | 25.508.264,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 7.419.700,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.01 | PD.06 | Dinas Sosial Kab.Karo | | 8.191.800,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 17.100.210,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.01 | PD.06 | Dinas Sosial Kab.Karo | | 21.641.900,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 260 Dokumen | 1.560.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.01 | PD.06 | Dinas Sosial Kab.Karo | | 2.700.000,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | 9.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.01 | PD.06 | Dinas Sosial Kab.Karo | | 6.400.000,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 187 Laporan | 104.709.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.01 | PD.06 | Dinas Sosial Kab.Karo | | 134.889.000,00 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **210.150.000,00** | | | PN.03 | PP.01 | PD.06 | **Dinas Sosial Kab.Karo** | **-** | **216.510.000,00** | **Dinas Sosial** |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 20.400.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.01 | PD.06 | Dinas Sosial Kab.Karo | | 26.760.000,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 8.190.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.01 | PD.06 | Dinas Sosial Kab.Karo | | 8.190.000,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 181.560.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.01 | PD.06 | Dinas Sosial Kab.Karo | | 181.560.000,00 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **102.140.410,00** | | | PN.03 | PP.01 | PD.06 | **Dinas Sosial Kab.Karo** | **-** | **91.125.440,00** | **Dinas Sosial** |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | 102.140.410,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.01 | PD.06 | Dinas Sosial Kab.Karo | | 91.125.440,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 02 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 58 % | 25.000.000,00 | | | | | | | - | 160.000.000,00 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **02** | **2.03** | | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **25.000.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **160.000.000,00** | **Dinas Sosial** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Lembaga | 25.000.000,00 | - Kab. Karo, Berastagi, R a y a | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 160.000.000,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 03 | | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 57,69 % | 8.195.300,00 | | | | | | | - | 12.444.000,00 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **03** | **2.01** | | **Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal** | **100 %** | **8.195.300,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **12.444.000,00** | **Dinas Sosial** |
| 1 | 06 | 03 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang | 8.195.300,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 12.444.000,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 57,69 % | 173.580.853,00 | | | | | | | - | 1.142.824.400,00 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **04** | **2.01** | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | **100 %** | **154.676.453,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **392.824.400,00** | **Dinas Sosial** |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 03 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 45 Orang | 63.367.493,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 280.000.000,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | 16.576.960,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 0 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 09 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 300 Orang | 50.732.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 89.920.000,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 12 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 22 Orang | 24.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 22.904.400,00 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **04** | **2.02** | | **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | **100 %** | **18.904.400,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **750.000.000,00** | **Dinas Sosial** |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 14 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 18.904.400,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 750.000.000,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 05 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase keakuratan data program perlindungan kesejahteraan sosial | 58,59 % | 106.456.000,00 | | | | | | | - | 150.000.000,00 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **05** | **2.02** | | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **106.456.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **150.000.000,00** | **Dinas Sosial** |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 590 Orang | 106.456.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 150.000.000,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 06 | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 100 % | 92.127.655,00 | | | | | | | - | 81.996.800,00 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **06** | **2.01** | | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | **100 %** | **92.127.655,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **81.996.800,00** | **Dinas Sosial** |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 01 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 120 Orang | 19.070.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 19.112.000,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 02 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 120 Orang | 73.057.655,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kabupaten Karo | | 62.884.800,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 07 | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 128.925.400,00 | | | | | | | - | 124.925.400,00 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **07** | **2.01** | | **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | **100 %** | **128.925.400,00** | | | PN.03 | PP.01 | PD.06 | **Taman Makam Pahlawan,Monumen Nasional dan Tugu Juang** | **-** | **124.925.400,00** | **Dinas Sosial** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 1 | 06 | 07 | 2.01 | 02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 4 Makam | 128.925.400,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.01 | PD.06 | Taman Makam Pahlawan,Monumen Nasional dan Tugu Juang | | 124.925.400,00 | DINAS SOSIAL |
| | | | | | **Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** | | | **4.723.834.352,00** | | | | | | | | **4.926.449.627,00** | **Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **4.723.834.352,00** | | | | | | | | **4.926.449.627,00** | **Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** |
| **2** | **07** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | **3.891.708.054,00** | | | | | | | | **4.355.079.627,00** | **Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** |
| 2 | 07 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 3.673.008.054,00 | | | | | | | - | 4.060.079.627,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **07** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **3.069.155.886,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.03 | **Aparatur Sipil Negara** | **-** | **3.402.929.945,00** | **Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** |
| 2 | 07 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 19/12 Orang/bulan | 2.944.835.886,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.03 | Aparatur Sipil Negara | | 3.223.609.945,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 07 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 124.320.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | | PD.06 | Aparatur Sipil Negara | | 179.320.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **07** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **286.832.168,00** | | | #N/A | | PD.06 | **Aparatur Sipil Negara** | **-** | **336.689.682,00** | **Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 5.995.440,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | | PD.06 | Aparatur Sipil Negara | | 5.394.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 42 Paket | 48.661.640,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | | PD.06 | Aparatur Sipil Negara | | 50.566.140,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 22 Paket | 8.998.699,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | | PD.06 | Aparatur Sipil Negara | | 9.998.699,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 8 Paket | 18.730.843,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | | PD.06 | Aparatur Sipil Negara | | 20.730.843,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 204.445.546,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Aparatur Sipil Negara | | 250.000.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **07** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **205.380.000,00** | | | PN.06 | | PD.06 | **Aparatur Sipil Negara** | **-** | **206.820.000,00** | **Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 23.820.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | | PD.06 | Aparatur Sipil Negara | | 25.820.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 07 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 181.560.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | | PD.06 | Aparatur Sipil Negara | | 181.000.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **2** | **07** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **111.640.000,00** | | | PN.06 | PP.03 | PD.06 | **Aparatur Sipil Negara** | **-** | **113.640.000,00** | **Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 38.420.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.03 | PD.06 | Aparatur Sipil Negara | | 38.420.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | 48.270.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Aparatur Sipil Negara | | 48.270.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 07 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 35 Unit | 24.950.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | | PD.06 | Aparatur Sipil Negara | | 26.950.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 07 | 03 | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | - | - | 140.000.000,00 | | | | | | | - | 140.000.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **07** | **03** | **2.01** | | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | **-** | **-** | **140.000.000,00** | | | #N/A | PP.01 | PD.01 | **-** | **-** | **140.000.000,00** | **Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** |
| 2 | 07 | 03 | 2.01 | 01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 32 Orang | 140.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.01 | PD.01 | - | | 140.000.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 07 | 05 | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama | 55 % | 78.700.000,00 | | | | | | | - | 155.000.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **07** | **05** | **2.01** | | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **18.500.000,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.01 | **Perusahaan dan Pekerja** | **-** | **35.000.000,00** | **Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** |
| 2 | 07 | 05 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 1 Laporan | 18.500.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.01 | Perusahaan dan Pekerja | | 35.000.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **07** | **05** | **2.02** | | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **60.200.000,00** | | | #N/A | | PD.01 | **Perusahaan dan Pekerja** | **-** | **120.000.000,00** | **Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** |
| 2 | 07 | 05 | 2.02 | 01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 1 Perkara | 60.200.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | | PD.01 | Perusahaan dan Pekerja | | 70.000.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 07 | 05 | 2.02 | 04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | 2 Lembaga | - | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.01 | Perusahaan dan Pekerja | | 50.000.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **17** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | **832.126.298,00** | | | | | | | | **571.370.000,00** | **Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** |
| 2 | 17 | 03 | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | - | - | 15.550.000,00 | | | | | | | - | 0 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **2** | **17** | **03** | **2.01** | | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | **-** | **-** | **15.550.000,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.01 | **-** | **-** | **0** | **Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | 10 Unit Usaha | 15.550.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.01 | - | | 0 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 17 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | koperasi aktif<br>koperasi aktif | 65 %<br>64,51 % | 571.370.000,00 | | | | | | | - | 471.370.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **17** | **05** | **2.01** | | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **571.370.000,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.01 | **SDM Koperasi** | **-** | **471.370.000,00** | **Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 132 Orang | 571.370.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | #N/A | PP.04 | PD.01 | SDM Koperasi | | 471.370.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 17 | 07 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase peningkatan UMKM yang naik kelas<br>Persentase peningkatan UMKM yang naik kelas | 31,82 %<br>0,483 % | 245.206.298,00 | | | | | | | - | 100.000.000,00 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| **2** | **17** | **07** | **2.01** | | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | **100 %** | **245.206.298,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.01 | **Usaha Mikro** | **-** | **100.000.000,00** | **Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 02 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | 20 Unit Usaha | 100.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.01 | Usaha Mikro | | 0 | DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 15 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | 5 Orang | 145.206.298,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.01 | Usaha Mikro | | 100.000.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | | | | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** | | | **14.417.522.822,00** | | | | | | | | **14.497.928.001,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **14.417.522.822,00** | | | | | | | | **14.497.928.001,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| **2** | **08** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | **6.177.990.228,00** | | | | | | | | **6.302.962.647,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 08 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat(IKM)<br>Indeks Pelayanan Publik | 89 Indeks<br>89 Indeks | 5.177.720.248,00 | | | | | | | - | 5.360.692.667,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| **2** | **08** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah** | **100 %** | **4.415.026.662,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **ASN DP3AP2KB Kab.Karo** | **-** | **4.472.907.161,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 39 Orang/bulan | 4.103.986.662,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | | PD.03 | ASN DP3AP2KB Kab.Karo | | 4.245.059.081,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 311.040.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | | PD.03 | ASN DP3AP2KB Kab.Karo | | 227.848.080,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| **2** | **08** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah** | **100 %** | **328.986.086,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **ASN DP3AP2KB Kab.Karo** | **-** | **388.715.695,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 2.750.760,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | ASN DP3AP2KB Kab.Karo | | 2.750.760,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 140.521.626,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | ASN DP3AP2KB Kab.Karo | | 161.535.035,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 11.809.700,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | ASN DP3AP2KB Kab.Karo | | 16.879.500,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 1.560.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | ASN DP3AP2KB Kab.Karo | | 1.560.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 172.344.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | ASN DP3AP2KB Kab.Karo | | 205.990.400,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| **2** | **08** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **100 %** | **243.120.000,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Tenaga honorer dan DP3AP2KB Kab.Karo** | **-** | **271.027.811,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 25.800.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | Tenaga honorer dan DP3AP2KB Kab.Karo | | 24.420.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 217.320.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | Tenaga honorer dan DP3AP2KB Kab.Karo | | 246.607.811,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **2** | **08** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | **100 %** | **190.587.500,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **DP3AP2KB Kab.Karo** | **-** | **228.042.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit | 186.327.500,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | DP3AP2KB Kab.Karo | | 220.942.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | 4.260.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | | PD.03 | DP3AP2KB Kab.Karo | | 7.100.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 08 | 02 | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Indeks Pembangunan Gender<br>Indeks Pembangunan Gender | 96,45 %<br>96,45 % | 112.569.980,00 | | | | | | | - | 114.569.980,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| **2** | **08** | **02** | **2.01** | | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenagnan Kabupaten/Kota** | **100 %** | **65.919.980,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Perencanaan OPD/Kecamatan Kab.Karo** | **-** | **67.919.980,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 31.269.980,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | Perencanaan OPD/Kecamatan Kab.Karo | | 31.269.980,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 04 | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 42 Perangkat Daerah | 34.650.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | Perencanaan OPD/Kecamatan Kab.Karo | | 36.650.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| **2** | **08** | **02** | **2.02** | | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum,sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **100 %** | **46.650.000,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Perencanaan OPD/Kecamatan Kab.Karo** | **-** | **46.650.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | 01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 46.650.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | Perencanaan OPD/Kecamatan Kab.Karo | | 46.650.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 08 | 03 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | 100 % | 208.194.183,00 | | | | | | | - | 148.194.183,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| **2** | **08** | **03** | **2.01** | | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/kota** | **100 %** | **47.219.200,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Perempuan dan anak, masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **47.219.200,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 47.219.200,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | | PD.03 | Perempuan dan anak, masyarakat Kabupaten Karo | | 47.219.200,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **2** | **08** | **03** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatanPenyediaan Layanan rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Krekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** | **100 %** | **100.974.983,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Perempuan dan anak, masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **100.974.983,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 Layanan | 100.974.983,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | | PD.03 | Perempuan dan anak, masyarakat Kabupaten Karo | | 100.974.983,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| **2** | **08** | **03** | **2.03** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **60.000.000,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Perempuan dan anak, masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **0** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | 03 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik | 50 Orang | 60.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | Perempuan dan anak, masyarakat Kabupaten Karo | | 0 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 08 | 04 | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Rasio KDRT<br>Rasio KDRT | 0,01 %<br>0,01 rasio | 156.350.000,00 | | | | | | | - | 156.350.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| **2** | **08** | **04** | **2.01** | | **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota<br>Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak anak TIngkat Kabupaten/ Kota** | **100 %<br>100 %** | **48.950.000,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Masyarakat ,Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo** | **-** | **48.950.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 08 | 04 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Dokumen | 48.950.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat ,Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo | | 48.950.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| **2** | **08** | **04** | **2.02** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/ Kota<br>Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %<br>100 %** | **107.400.000,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Masyarakat ,Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo** | **-** | **107.400.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 08 | 04 | 2.02 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Perangkat Daerah | 50.450.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat ,Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo | | 50.450.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 08 | 04 | 2.02 | 03 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 56.950.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat ,Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo | | 56.950.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 08 | 06 | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Cakupan Penegakan Hukum dari TingkatPenyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak<br>Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 80 %<br>80 % | 366.275.017,00 | | | | | | | - | 366.275.017,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| **2** | **08** | **06** | **2.01** | | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatanPelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | **100 %** | **72.900.000,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Lembaga Pemerintah,Non Pemintah,Dunia Usaha,masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **72.900.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 72.900.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | Lembaga Pemerintah,Non Pemintah,Dunia Usaha,masyarakat Kabupaten Karo | | 72.900.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| **2** | **08** | **06** | **2.02** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **293.375.017,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Perempuan dan anak, masyarakat Kabupaten Karo** | **-** | **293.375.017,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | 01 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 400 Orang | 65.250.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | Perempuan dan anak, masyarakat Kabupaten Karo | | 65.250.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | 74.596.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | | PD.03 | Perempuan dan anak, masyarakat Kabupaten Karo | | 74.596.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 40 Layanan | 153.529.017,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | | PD.03 | Perempuan dan anak, masyarakat Kabupaten Karo | | 153.529.017,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 08 | 07 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Jejaring Perlindungan Anak | 43 PATBM/Desa | 156.880.800,00 | | | | | | | - | 156.880.800,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| **2** | **08** | **07** | **2.01** | | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **156.880.800,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Masyarakat,Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah,dunia usaha Kab.Karo** | **-** | **156.880.800,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | 04 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | 150 Orang | 156.880.800,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat,Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah,dunia usaha Kab.Karo | | 156.880.800,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| **2** | **14** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | **8.239.532.594,00** | | | | | | | | **8.194.965.354,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 14 | 02 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (Paramater dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan/Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, yang melakukan pendidikan kependudukan/Ratio Akseptor KB | 63/7/69,06 % | 194.448.594,00 | | | | | | | - | 178.681.354,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **2** | **14** | **02** | **2.01** | | **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**<br>**Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pemanduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian kualitas penduduk** | **100 %**<br>**100 %** | **55.523.594,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Masyarakat,Lembaga Pemerintah/Non pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo** | **-** | **39.756.354,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 18 | Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal | 1 Kegiatan | 25.523.594,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat,Lembaga Pemerintah/Non pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo | | 9.756.354,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 23 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 12 Kegiatan | 30.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | #N/A | | Masyarakat,Lembaga Pemerintah/Non pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo | | 30.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| **2** | **14** | **02** | **2.02** | | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**<br>**Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %**<br>**100 %** | **138.925.000,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Masyarakat,Lembaga Pemerintah/Non pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo** | **-** | **138.925.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | 1 Dokumen | 43.200.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat,Lembaga Pemerintah/Non pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo | | 43.200.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 09 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 12 Laporan | 95.725.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat,Lembaga Pemerintah/Non pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo | | 95.725.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 14 | 03 | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)<br>Laju Pertumbuhan Pendudukan/Tahun | 13,24 %<br>1,35 % | 5.018.784.000,00 | | | | | | | - | 4.989.984.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| **2** | **14** | **03** | **2.01** | | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatanPelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal** | **100 %** | **1.145.750.000,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Masyarakat,Lembaga Pemerintah/Non pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo** | **-** | **1.116.950.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 10 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 12 Laporan | 654.750.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat,Lembaga Pemerintah/Non pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo | | 625.950.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 11 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 12 Laporan | 341.000.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat,Lembaga Pemerintah/Non pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo | | 341.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 12 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 4 Dokumen | 150.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat,Lembaga Pemerintah/Non pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo | | 150.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| **2** | **14** | **03** | **2.02** | | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | **100 %** | **1.223.400.000,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Kab.Karo** | **-** | **1.223.400.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 689 Orang | 685.400.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | PN.02 | | PD.03 | Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Kab.Karo | | 685.400.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 05 | Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 269 Organisasi | 538.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | PN.02 | | PD.03 | Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Kab.Karo | | 538.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| **2** | **14** | **03** | **2.03** | | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **1.500.634.000,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Masyarakat,Lembaga Pemerintah/Non pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo** | **-** | **1.500.634.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 12 Laporan | 32.400.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat,Lembaga Pemerintah/Non pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo | | 32.400.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 1694 Orang | 700.397.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat,Lembaga Pemerintah/Non pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo | | 700.397.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 06 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | 1 Unit | 730.662.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN INTERVENSI STUNTING | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat,Lembaga Pemerintah/Non pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo | | 730.662.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 08 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 49 Laporan | 37.175.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat,Lembaga Pemerintah/Non pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo | | 37.175.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| **2** | **14** | **03** | **2.04** | | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan emberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | **100 %** | **1.149.000.000,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Masyarakat,Lembaga Pemerintah/Non pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo** | **-** | **1.149.000.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 02 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | 12 Dokumen | 1.059.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat,Lembaga Pemerintah/Non pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo | | 1.059.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 06 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 265 Kampung | 90.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat,Lembaga Pemerintah/Non pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo | | 90.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |
| 2 | 14 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga<br>Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | 34,84 %<br>34,84 % | 3.026.300.000,00 | | | | | | | - | 3.026.300.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **2** | **14** | **04** | **2.01** | | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **100 %** | **3.026.300.000,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Bina Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga Remaja (BKR) Bina Keluarga Lansia (BKL),PIK-R,UPPKS Kab.Karo** | **-** | **3.026.300.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB** |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 18 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia | 1 Unit | 440.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | PN.02 | | PD.03 | Bina Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga Remaja (BKR) Bina Keluarga Lansia (BKL),PIK-R,UPPKS Kab.Karo | | 440.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 24 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | 351 Orang | 2.211.300.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | PN.02 | | PD.03 | Bina Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga Remaja (BKR) Bina Keluarga Lansia (BKL),PIK-R,UPPKS Kab.Karo | | 2.211.300.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 28 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk | 40 Kelompok | 375.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | | PD.03 | Bina Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga Remaja (BKR) Bina Keluarga Lansia (BKL),PIK-R,UPPKS Kab.Karo | | 375.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB |
| | | | | | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** | | | **7.463.574.565,00** | | | | | | | | **274.068.684.936,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **7.014.070.245,00** | | | | | | | | **273.097.352.936,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| **2** | **09** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | **7.014.070.245,00** | | | | | | | | **273.097.352.936,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| 2 | 09 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 6.553.480.862,00 | | | | | | | - | 7.620.130.436,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| **2** | **09** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **6.013.653.439,00** | | | PN.02 | PP.03 | PD.06 | **ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** | **-** | **6.699.767.698,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 54 Orang/bulan | 5.837.270.940,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.03 | PD.06 | ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | | 6.473.370.808,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 176.382.499,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.03 | PD.06 | ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | | 226.396.890,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| **2** | **09** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Sub kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **218.440.311,00** | | | PN.02 | PP.03 | PD.06 | **ASN dinas ketahanan Pangan dan Perikanan** | **-** | **512.562.738,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 2.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.03 | PD.06 | ASN dinas ketahanan Pangan dan Perikanan | | 2.750.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 50.946.465,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.03 | PD.06 | ASN dinas ketahanan Pangan dan Perikanan | | 141.080.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 16.635.709,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.03 | PD.06 | ASN dinas ketahanan Pangan dan Perikanan | | 36.354.342,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 28.194.196,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.03 | PD.06 | ASN dinas ketahanan Pangan dan Perikanan | | 17.108.396,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 120.663.941,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.03 | PD.06 | ASN dinas ketahanan Pangan dan Perikanan | | 315.270.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **2** | **09** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **12 Bulan** | **242.330.112,00** | | | PN.02 | PP.03 | PD.06 | **ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** | **-** | **270.800.000,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| 2 | 09 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 43.070.112,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.03 | PD.06 | ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | | 45.000.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 2 | 09 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 11 Laporan | 15.660.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.06 | ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | | 19.560.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 2 | 09 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 183.600.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.03 | PD.06 | ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | | 206.240.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| **2** | **09** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Sub kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 %** | **79.057.000,00** | | | PN.02 | PP.03 | PD.06 | **ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** | **-** | **137.000.000,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| 2 | 09 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 38.420.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.03 | PD.06 | ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | | 92.000.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 2 | 09 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | 40.637.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.03 | PD.06 | ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | | 45.000.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 2 | 09 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Kemandirian Pangan | 4 Unit | - | | | | | | | - | 153.972.500,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| **2** | **09** | **02** | **2.01** | | **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata - Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **-** | | | PN.01 | PP.03 | PD.01 | **Masyarakat Kab.Karo** | **-** | **153.972.500,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| 2 | 09 | 02 | 2.01 | 03 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | 0 Unit | - | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Masyarakat Kab.Karo | | 153.972.500,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 2 | 09 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Ketersediaan Pangan Ketersediaan Pangan Utama | 20 Persen 46,74 Persen | 358.989.383,00 | | | | | | | - | 265.223.250.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| **2** | **09** | **03** | **2.01** | | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | **Rata - rata Cpaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | **100 %** | **36.831.542,00** | | | PN.01 | PP.03 | PD.01 | **Masyarakat Kab.Karo** | **-** | **84.700.000,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | 16 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 Dokumen | 36.831.542,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Masyarakat Kab.Karo | | 84.700.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| **2** | **09** | **03** | **2.02** | | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | **Rata - Rata Capaian Kinerja Sub kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | **100 %** | **214.000.000,00** | | | #N/A | PP.03 | PD.05 | **Masyarakat Kab.Karo** | **-** | **265.000.000.000,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| 2 | 09 | 03 | 2.02 | 03 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 19 Ton | 214.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.03 | PD.05 | Masyarakat Kab.Karo | | 265.000.000.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| **2** | **09** | **03** | **2.04** | | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | **Rata - rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | **100 %** | **108.157.841,00** | | | PN.01 | PP.03 | PD.01 | **Masyarakat Kab.Karo** | **-** | **138.550.000,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| 2 | 09 | 03 | 2.04 | 01 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 1 Dokumen | 45.157.841,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Masyarakat Kab.Karo | | 66.550.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 2 | 09 | 03 | 2.04 | 02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 Laporan | 63.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Masyarakat Kab.Karo | | 72.000.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 2 | 09 | 05 | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (PSAT) | 99,32 Persen | 101.600.000,00 | | | | | | | - | 100.000.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| **2** | **09** | **05** | **2.01** | | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Sub kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **101.600.000,00** | | | #N/A | PP.03 | PD.01 | **Masyarakat Kab.Karo** | **-** | **100.000.000,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| 2 | 09 | 05 | 2.01 | 07 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 20 Dokumen | 101.600.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.03 | PD.01 | Masyarakat Kab.Karo | | 100.000.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **449.504.320,00** | | | | | | | | **971.332.000,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| **3** | **25** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | **449.504.320,00** | | | | | | | | **971.332.000,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| 3 | 25 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Persentase Produksi Perikanan Budidaya | 72,13 Persen | 85.632.305,00 | | | | | | | - | 152.916.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **03** | **2.01** | | **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **Rata - Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **0 %** | **40.532.305,00** | | | PN.01 | PP.03 | PD.01 | **Masyarakat Kab.Karo** | **-** | **152.916.000,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| 3 | 25 | 03 | 2.01 | 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | 25 Unit | 40.532.305,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Masyarakat Kab.Karo | | 152.916.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **03** | **2.02** | | **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata - Rata Capaian Kinerja Indkator Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabuaten/Kota** | **100 %** | **45.100.000,00** | | | PN.01 | PP.03 | PD.01 | **Masyarakat Kab.Karo** | **-** | **0** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| 3 | 25 | 03 | 2.02 | 01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | 20 Orang | 45.100.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Masyarakat Kab.Karo | | 0 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 3 | 25 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Persentase Produksi Perikanan Budidaya | 85,6 Persen | 323.979.625,00 | | | | | | | - | 750.916.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **04** | **2.02** | | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | **Rata - Rata Capaian Indikator Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | **100 %** | **128.697.755,00** | | | PN.01 | PP.03 | PD.01 | **Masyarakat Kab.Karo** | **-** | **360.916.000,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| 3 | 25 | 04 | 2.02 | 01 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | 5 Kelompok | 105.065.155,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Masyarakat Kab.Karo | | 273.000.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 3 | 25 | 04 | 2.02 | 04 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 20 Kelompok | 23.632.600,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Masyarakat Kab.Karo | | 87.916.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **04** | **2.04** | | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **Rata - Rata Capaian Kinerja Indkator Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **100 %** | **195.281.870,00** | | | PN.01 | PP.03 | PD.01 | **Masyarakat Kab.Karo** | **-** | **390.000.000,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Unit | 164.812.230,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Masyarakat Kab.Karo | | 300.000.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 04 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 1 Dokumen | 30.469.640,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Masyarakat Kab.Karo | | 90.000.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 3 | 25 | 06 | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 143 Usaha | 39.892.390,00 | | | | | | | - | 67.500.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **06** | **2.03** | | **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **Rata - Rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **100 %** | **39.892.390,00** | | | PN.01 | PP.03 | PD.01 | **Masyarakat Kab.Karo** | **-** | **67.500.000,00** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan** |
| 3 | 25 | 06 | 2.03 | 02 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 2 Pelaku Usaha | 39.892.390,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Masyarakat Kab.Karo | | 67.500.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN |
| | | | | | **Dinas Lingkungan Hidup** | | | **21.477.128.706,00** | | | | | | | | **14.636.068.053,31** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **21.477.128.706,00** | | | | | | | | **14.636.068.053,31** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| **2** | **11** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | **21.477.128.706,00** | | | | | | | | **14.636.068.053,31** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 2 | 11 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 9.192.132.072,00 | | | | | | | - | 13.273.788.053,31 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **3.763.715.180,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.05 | **Dinas Lingkungan Hidup** | **-** | **4.620.676.487,00** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 Orang/bulan | 3.530.375.180,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.05 | Dinas Lingkungan Hidup | | 4.372.362.062,00 | Dinas Lingkungan Hidup |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 233.340.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.05 | Dinas Lingkungan Hidup | | 248.314.425,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **200.787.800,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.05 | **Dinas Lingkungan Hidup** | **-** | **309.357.010,00** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 45 Paket | 40.413.500,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.05 | Dinas Lingkungan Hidup | | 39.593.685,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 20 Paket | 4.386.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.05 | Dinas Lingkungan Hidup | | 5.552.550,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 23 Paket | 65.596.500,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.05 | Dinas Lingkungan Hidup | | 124.143.375,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 272 Laporan | 90.391.800,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.05 | Dinas Lingkungan Hidup | | 140.067.400,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **399.849.787,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.05 | **Dinas Lingkungan Hidup** | **-** | **477.923.264,00** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 44.909.787,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.05 | Dinas Lingkungan Hidup | | 68.475.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 21 Laporan | 7.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.05 | Dinas Lingkungan Hidup | | 16.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 347.940.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.05 | Dinas Lingkungan Hidup | | 393.448.264,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **4.827.779.305,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.05 | **Dinas Lingkungan Hidup** | **-** | **7.865.831.292,31** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 171 Unit | 4.827.779.305,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.05 | Dinas Lingkungan Hidup | | 7.865.831.292,31 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | - | - | 7.000.000,00 | | | | | | | - | 25.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **02** | **2.01** | | **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota** | **-** | **-** | **7.000.000,00** | | | PN.05 | | PD.05 | **Masyarakat Kab. Karo** | **-** | **25.000.000,00** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 2 | 11 | 02 | 2.01 | 02 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | 10 Dokumen | 7.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.05 | | PD.05 | Masyarakat Kab. Karo | | 25.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Peningkatan Pengelolaan RTH | 1 Lokasi | 18.700.000,00 | | | | | | | - | 19.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **04** | **2.01** | | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati** | **100 %** | **18.700.000,00** | | | PN.05 | | PD.05 | **1,3 Ha** | **-** | **19.000.000,00** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 1,3 Ha | 18.700.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.05 | | PD.05 | 1,3 Ha | | 19.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, | 100 % | 55.000.000,00 | | | | | | | - | 55.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **06** | **2.01** | | **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota** | **100 %** | **55.000.000,00** | | | PN.05 | | PD.05 | **Masyarakat Kab. Karo** | **-** | **55.000.000,00** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.05 | | PD.05 | Masyarakat Kab. Karo | | 35.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 05 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 100 Badan Usaha | 20.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.05 | | PD.05 | Masyarakat Kab. Karo | | 20.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| 2 | 11 | 09 | | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Terlaksananya pemberian penghargaan tentang lingkungan hidup | ada ada | 237.000.000,00 | | | | | | | - | 240.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **09** | **2.01** | | **Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota** | **100 %** | **237.000.000,00** | | | PN.05 | | PD.05 | **Sekolah Sekolah di Kab.Karo** | **-** | **240.000.000,00** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 2 | 11 | 09 | 2.01 | 01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 50 Entitas | 237.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.05 | | PD.05 | Sekolah Sekolah di Kab.Karo | | 240.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 11 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani | 84 Persen | 11.967.296.634,00 | | | | | | | - | 1.023.280.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **11** | **2.01** | | **Pengelolaan Sampah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Sampah** | **100 %** | **11.967.296.634,00** | | | PN.05 | | PD.05 | **Kebersihan Kab.Karo** | **-** | **1.023.280.000,00** | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 04 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 6 Kelompok | 250.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.05 | | PD.05 | Kebersihan Kab.Karo | | 220.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 07 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 1 Unit | 852.536.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | PN.05 | | PD.05 | Kebersihan Kab.Karo | | 803.280.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 20 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 75 Ton | 10.864.760.634,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK | PN.05 | | PD.05 | Kebersihan Kab.Karo | | 0 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | **4.649.803.975,00** | | | | | | | | **5.347.274.572,00** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **4.649.803.975,00** | | | | | | | | **5.347.274.572,00** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| **2** | **12** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | **4.649.803.975,00** | | | | | | | | **5.347.274.572,00** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 2 | 12 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 3.740.122.560,00 | | | | | | | - | 4.301.140.945,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **3.029.878.511,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Disdukcapil** | **-** | **3.484.360.288,00** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | 2.871.658.511,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disdukcapil | | 3.302.407.288,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 17 Dokumen | 158.220.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disdukcapil | | 181.953.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **137.574.049,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Disdukcapil** | **-** | **158.210.157,00** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100 Paket | 4.395.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disdukcapil | | 5.054.250,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 33 Paket | 33.990.445,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disdukcapil | | 39.089.012,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 24 Paket | 3.888.114,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disdukcapil | | 4.471.331,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 29.238.490,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disdukcapil | | 33.624.264,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 2.160.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disdukcapil | | 2.484.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 45 Laporan | 63.902.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disdukcapil | | 73.487.300,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 %** | **489.680.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Disdukcapil** | **-** | **563.132.000,00** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 17.220.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disdukcapil | | 19.803.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Laporan | 8.600.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disdukcapil | | 9.890.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 324 Laporan | 463.860.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disdukcapil | | 533.439.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 %** | **82.990.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Disdukcapil** | **-** | **95.438.500,00** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | 82.990.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disdukcapil | | 95.438.500,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 02 | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%) / Kepemilikan Kartu Identitas Anak | 100/60 % | 790.050.000,00 | | | | | | | - | 908.557.500,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **02** | **2.01** | | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **100 %** | **790.050.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat** | **-** | **908.557.500,00** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 02 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 12 Dokumen | 750.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat | | 862.500.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 04 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 12 Laporan | 40.050.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat | | 46.057.500,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 03 | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Rasio bayi berakte kelahiran (%) / Rasio pasangan berakte nikah (%) | 100 / 100 % | 63.058.220,00 | | | | | | | - | 72.516.953,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **03** | **2.01** | | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil** | **100 %** | **63.058.220,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat** | **-** | **72.516.953,00** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 2 | 12 | 03 | 2.01 | 01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 12 Dokumen | 31.558.220,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat | | 36.291.953,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 03 | 2.01 | 02 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | 12 Layanan | 31.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat | | 36.225.000,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK | Sudah Sudah/Belum | 16.507.195,00 | | | | | | | - | 18.983.274,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **04** | **2.01** | | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | **-** | **-** | **16.507.195,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat** | **-** | **18.983.274,00** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | 01 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | 12 Dokumen | 16.507.195,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat | | 18.983.274,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Ketersediaan Database Nasional Skala Provinsi | Ada Ada/Tidak Ada | 40.066.000,00 | | | | | | | - | 46.075.900,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **05** | **2.01** | | **Penyusunan Profil Kependudukan** | **Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan** | **100 %** | **40.066.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat** | **-** | **46.075.900,00** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 2 | 12 | 05 | 2.01 | 02 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | 1 Dokumen | 40.066.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat | | 46.075.900,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | | | | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | **8.606.806.810,00** | | | | | | | | **8.646.500.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **8.606.806.810,00** | | | | | | | | **8.646.500.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |
| **2** | **13** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | **8.606.806.810,00** | | | | | | | | **8.646.500.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |
| 2 | 13 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakt (IKM) | 89 Indeks | 4.375.188.793,00 | | | | | | | - | 4.359.500.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **2** | **13** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **3.920.816.520,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **ASN DPMD Kabupaten Karo** | **-** | **3.900.000.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 27 Orang/bulan | 3.723.656.520,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | ASN DPMD Kabupaten Karo | | 3.700.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 50 Dokumen | 197.160.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | ASN DPMD Kabupaten Karo | | 200.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **2** | **13** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **121.888.572,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **ASN DPMD Kabupaten Karo** | **-** | **124.500.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 2.250.080,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | ASN DPMD Kabupaten Karo | | 2.500.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 42.705.590,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | ASN DPMD Kabupaten Karo | | 43.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 13.205.552,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | ASN DPMD Kabupaten Karo | | 13.500.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 10.331.350,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | ASN DPMD Kabupaten Karo | | 11.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 5.352.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | ASN DPMD Kabupaten Karo | | 5.500.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | 48.044.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | ASN DPMD Kabupaten Karo | | 49.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **2** | **13** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **213.250.800,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **ASN DPMD Kabupaten Karo** | **-** | **215.000.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 19.380.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | ASN DPMD Kabupaten Karo | | 20.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 12.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | ASN DPMD Kabupaten Karo | | 13.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 181.870.800,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | ASN DPMD Kabupaten Karo | | 182.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **2** | **13** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **119.232.901,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **ASN DPMD Kabupaten Karo** | **-** | **120.000.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | 119.232.901,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | ASN DPMD Kabupaten Karo | | 120.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13 | 04 | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | PERSENTASE DESA YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU / JUMLAH LEMBAGA EKONOMI DESA | 100/220 %/Lembaga | 3.777.148.400,00 | | | | | | | - | 3.790.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **2** | **13** | **04** | **2.01** | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **Rata-rata Capaian Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **100 %** | **3.777.148.400,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Desa/Perangkat Desa/Masyarakat Desa Kabupaten Karo** | **-** | **3.790.000.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 12 Dokumen | 3.398.550.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Desa/Perangkat Desa/Masyarakat Desa Kabupaten Karo | | 3.400.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 490 Dokumen | 47.902.225,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Desa/Perangkat Desa/Masyarakat Desa Kabupaten Karo | | 50.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 260 Dokumen | 118.635.925,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Desa/Perangkat Desa/Masyarakat Desa Kabupaten Karo | | 120.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 231 Orang | 48.800.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Desa/Perangkat Desa/Masyarakat Desa Kabupaten Karo | | 50.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 20 Dokumen | 86.590.450,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Desa/Perangkat Desa/Masyarakat Desa Kabupaten Karo | | 90.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 14 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 115 Orang | 76.669.800,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Desa/Perangkat Desa/Masyarakat Desa Kabupaten Karo | | 80.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2 | 13 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | PERSENTASE TERBENTUKNYA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA | 75 % | 454.469.617,00 | | | | | | | - | 497.000.000,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **2** | **13** | **05** | **2.01** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota** | **100 %** | **454.469.617,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Desa/Masyarakat Desa Kabupaten Karo** | **-** | **497.000.000,00** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 9 Lembaga | 74.986.175,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Desa/Masyarakat Desa Kabupaten Karo | | 80.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 9 Dokumen | 49.999.930,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Desa/Masyarakat Desa Kabupaten Karo | | 50.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 10 Laporan | 30.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Desa/Masyarakat Desa Kabupaten Karo | | 35.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 17 Laporan | 30.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Desa/Masyarakat Desa Kabupaten Karo | | 32.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 14 Dokumen | 269.483.512,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Desa/Masyarakat Desa Kabupaten Karo | | 300.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | | | | **Dinas Perhubungan** | | | **20.327.334.729,00** | | | | | | | | **21.978.191.970,00** | **Dinas Perhubungan** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **20.327.334.729,00** | | | | | | | | **21.978.191.970,00** | **Dinas Perhubungan** |
| **2** | **15** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | **20.327.334.729,00** | | | | | | | | **21.978.191.970,00** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP) | 89 %<br>89 Indeks | 17.794.287.335,00 | | | | | | | - | 18.465.911.970,00 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100 %** | **7.500.000,00** | | | PN.04 | PP.04 | PD.06 | **Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Termonitornya Pelaksanaan Kegiatan Sehingga Ketercapaian Indikator Kinerja dapat diukur Ketercapaiannya** | **-** | **8.000.000,00** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 7.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | PP.04 | PD.06 | Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Termonitornya Pelaksanaan Kegiatan Sehingga Ketercapaian Indikator Kinerja dapat diukur Ketercapaiannya | | 8.000.000,00 | Dinas Perhubungan |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **2** | **15** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **5.507.406.285,00** | | | PN.04 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Karo** | **-** | **6.113.551.970,00** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 51 Orang/bulan | 5.293.854.315,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Karo | | 5.900.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 213.551.970,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Karo | | 213.551.970,00 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100 %** | **49.500.000,00** | | | PN.04 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Karo** | **-** | **52.000.000,00** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 92 Paket | 49.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Karo | | 52.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **332.411.050,00** | | | PN.04 | PP.04 | PD.06 | **Dinas Perhubungan Kabupaten Karo** | **-** | **350.500.000,00** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 2.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | PP.04 | PD.06 | Dinas Perhubungan Kabupaten Karo | | 2.500.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 45 Paket | 32.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | PP.04 | PD.06 | Dinas Perhubungan Kabupaten Karo | | 35.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 30 Paket | 15.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | PP.04 | PD.06 | Dinas Perhubungan Kabupaten Karo | | 17.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | 58.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | PP.04 | PD.06 | Dinas Perhubungan Kabupaten Karo | | 62.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 24 Dokumen | 3.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | PP.04 | PD.06 | Dinas Perhubungan Kabupaten Karo | | 4.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 230 Laporan | 221.911.050,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | PP.04 | PD.06 | Dinas Perhubungan Kabupaten Karo | | 230.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 %** | **58.000.000,00** | | | PN.04 | PP.04 | PD.06 | **Dinas Perhubungan Kabupaten Karo** | **-** | **89.000.000,00** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | PP.04 | PD.06 | Dinas Perhubungan Kabupaten Karo | | 80.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 8.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | PP.04 | PD.06 | Dinas Perhubungan Kabupaten Karo | | 9.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **11.494.460.000,00** | | | PN.04 | PP.04 | PD.06 | **Dinas Perhubungan Kabupaten Karo** | **-** | **11.505.860.000,00** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | 10.715.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | PP.04 | PD.06 | Dinas Perhubungan Kabupaten Karo | | 10.725.400.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | 15.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | PP.04 | PD.06 | Dinas Perhubungan Kabupaten Karo | | 16.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 764.460.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | PP.04 | PD.06 | Dinas Perhubungan Kabupaten Karo | | 764.460.000,00 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **345.010.000,00** | | | PN.04 | PP.04 | PD.06 | **Kendaraan Dinas di Dinas Perhubungan** | **-** | **347.000.000,00** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 40.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | PP.04 | PD.06 | Kendaraan Dinas di Dinas Perhubungan | | 40.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 Unit | 305.010.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | PP.04 | PD.06 | Kendaraan Dinas di Dinas Perhubungan | | 307.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Rasio Konektivitas Kabupaten / Kinerja Lalu Lintas Kabupaten | 95/0,28 Rasio/Indeks | 2.504.047.394,00 | | | | | | | - | 3.475.280.000,00 | Dinas Perhubungan |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **2** | **15** | **02** | **2.01** | | **Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** | **100 %** | **30.000.000,00** | | | PN.04 | PP.02 | PD.05 | **Tersediannya Data Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** | **-** | **35.000.000,00** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 02 | 2.01 | 04 | Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | PP.02 | PD.05 | Tersediannya Data Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | 35.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **100 %** | **597.615.926,00** | | | #N/A | PP.02 | PD.05 | **Pengguna Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **-** | **1.180.000.000,00** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 01 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | 20 Unit | 127.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.02 | PD.05 | Pengguna Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | 300.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 03 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 20 Unit | 40.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | PP.02 | PD.05 | Pengguna Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | 80.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 150 Unit | 430.115.926,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | PP.02 | PD.05 | Pengguna Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | 800.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | **2.03** | | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | **100 %** | **30.931.468,00** | | | PN.04 | PP.02 | PD.05 | **Meningkatnya Pelayanan di Terminal Penumpang Tipe c** | **-** | **36.000.000,00** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 02 | 2.03 | 07 | Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) | 1 Unit | 15.931.468,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | PP.02 | PD.05 | Meningkatnya Pelayanan di Terminal Penumpang Tipe c | | 18.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 2.03 | 11 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | 1 Unit | 15.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | PP.02 | PD.05 | Meningkatnya Pelayanan di Terminal Penumpang Tipe c | | 18.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | **2.04** | | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir** | **100 %** | **85.000.000,00** | | | PN.04 | PP.02 | PD.05 | **Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir** | **-** | **100.000.000,00** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 02 | 2.04 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 85.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | PP.02 | PD.05 | Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | 100.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | **2.05** | | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **100 %** | **33.000.000,00** | | | PN.04 | PP.02 | PD.05 | **Terlaksananya Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor bagi Masyarakat** | **-** | **40.000.000,00** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 08 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 3 Laporan | 20.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | PP.02 | PD.05 | Terlaksananya Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor bagi Masyarakat | | 25.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 10 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 2 Laporan | 13.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | PP.02 | PD.05 | Terlaksananya Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor bagi Masyarakat | | 15.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | **2.06** | | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **100 %** | **1.622.500.000,00** | | | PN.04 | PP.02 | PD.05 | **Terlaksananya Kelancaran Lalu Lintas** | **-** | **1.943.280.000,00** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 6 Laporan | 1.411.900.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | PP.02 | PD.05 | Terlaksananya Kelancaran Lalu Lintas | | 1.500.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 15 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 60.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | PP.02 | PD.05 | Terlaksananya Kelancaran Lalu Lintas | | 70.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 16 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | 30 Dokumen | 135.600.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | PP.02 | PD.05 | Terlaksananya Kelancaran Lalu Lintas | | 353.280.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | 17 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | 1 Laporan | 15.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | PP.02 | PD.05 | Terlaksananya Kelancaran Lalu Lintas | | 20.000.000,00 | Dinas Perhubungan |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| **2** | **15** | **02** | **2.08** | | **Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** | **100 %** | **37.000.000,00** | | | PN.04 | PP.02 | PD.05 | **Kelengkapan Persyaratan Perusahaan Angkutan Umum dalam Penyelenggaraan LLAJ** | **-** | **60.000.000,00** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 02 | 2.08 | 03 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | 2 Laporan | 12.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | PP.02 | PD.05 | Kelengkapan Persyaratan Perusahaan Angkutan Umum dalam Penyelenggaraan LLAJ | | 15.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 2.08 | 04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 3 Laporan | 15.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | PP.02 | PD.05 | Kelengkapan Persyaratan Perusahaan Angkutan Umum dalam Penyelenggaraan LLAJ | | 25.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 2.08 | 07 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 6 Laporan | 10.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | PP.02 | PD.05 | Kelengkapan Persyaratan Perusahaan Angkutan Umum dalam Penyelenggaraan LLAJ | | 20.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | **2.09** | | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **42.000.000,00** | | | PN.04 | PP.02 | PD.05 | **Tersediannya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang** | **-** | **45.000.000,00** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 02 | 2.09 | 03 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 19 Unit | 42.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | PP.02 | PD.05 | Tersediannya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang | | 45.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | **2.14** | | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **16.000.000,00** | | | PN.04 | PP.02 | PD.05 | **Terlaksananya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **-** | **23.000.000,00** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 02 | 2.14 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 8.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | PP.02 | PD.05 | Terlaksananya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 11.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 2.14 | 03 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Unit | 8.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | PP.02 | PD.05 | Terlaksananya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 12.000.000,00 | Dinas Perhubungan |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **2** | **15** | **02** | **2.16** | | **Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **10.000.000,00** | | | PN.04 | PP.02 | PD.05 | **Terlaksananya Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **-** | **13.000.000,00** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 02 | 2.16 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 10.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | PP.02 | PD.05 | Terlaksananya Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 13.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Rasio Konektivitas Kabupaten | 0,28 Indeks | 29.000.000,00 | | | | | | | - | 37.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **03** | **2.08** | | **Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal** | **100 %** | **14.000.000,00** | | | PN.04 | PP.02 | PD.05 | **Terlaksananya Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal** | **-** | **20.000.000,00** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 03 | 2.08 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen | 14.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | PP.02 | PD.05 | Terlaksananya Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal | | 20.000.000,00 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **03** | **2.09** | | **Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **15.000.000,00** | | | PN.04 | PP.02 | PD.05 | **Tersediannya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **-** | **17.000.000,00** | **Dinas Perhubungan** |
| 2 | 15 | 03 | 2.09 | 02 | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | PP.02 | PD.05 | Tersediannya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 17.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | | | **Dinas Komunikasi dan Informatika** | | | **7.455.272.737,00** | | | | | | | | **6.930.420.800,00** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **7.455.272.737,00** | | | | | | | | **6.930.420.800,00** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| **2** | **16** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | **7.268.775.361,00** | | | | | | | | **6.038.923.424,00** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 2 | 16 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | 5.235.066.329,00 | | | | | | | - | 5.065.214.392,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **16** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **-** | **-** | **2.870.058.688,00** | | | PN.04 | | PD.06 | **Pegawai Dinas Kominfo** | **-** | **2.883.471.251,00** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 280 Orang/bulan | 2.699.718.688,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | | PD.06 | Pegawai Dinas Kominfo | | 2.734.614.001,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 170.340.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | | PD.06 | Pegawai Dinas Kominfo | | 148.857.250,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **2** | **16** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **-** | **-** | **366.363.941,00** | | | PN.04 | | PD.06 | **Kabupaten Karo** | **-** | **204.763.901,00** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 30 Paket | 69.233.991,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | | PD.06 | Kabupaten Karo | | 20.897.951,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 51.729.950,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | | PD.06 | Kabupaten Karo | | 51.729.950,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1080 Dokumen | 5.400.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | | PD.06 | Kabupaten Karo | | 5.400.000,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 7 Laporan | 20.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | | PD.06 | Kabupaten Karo | | 10.000.000,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 Laporan | 220.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | | PD.06 | Kabupaten Karo | | 116.736.000,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **16** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **-** | **-** | **1.918.643.700,00** | | | PN.04 | | PD.06 | **Kabupaten Karo** | **-** | **1.942.479.740,00** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 1.528.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | | PD.06 | Kabupaten Karo | | 1.556.336.040,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | 10.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | | PD.06 | Kabupaten Karo | | 5.500.000,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 380.643.700,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | | PD.06 | Kabupaten Karo | | 380.643.700,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **16** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **-** | **-** | **80.000.000,00** | | | PN.04 | | PD.06 | **Kabupaten Karo** | **-** | **34.499.500,00** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 80.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.04 | | PD.06 | Kabupaten Karo | | 34.499.500,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Indeks SPBE<br>Indeks SPBE | 2.7 Indeks<br>2,7 Indeks | 907.903.717,00 | | | | | | | - | 345.903.717,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **16** | **02** | **2.01** | | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota<br>Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %<br>100 %** | **907.903.717,00** | | | PN.04 | | PD.05 | **Kabupaten Karo** | **-** | **345.903.717,00** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 150 Dokumen | 414.999.867,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | | PD.05 | Kabupaten Karo | | 114.999.867,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 06 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 250 Dokumen | 356.638.550,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | | PD.05 | Kabupaten Karo | | 99.980.000,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 07 | Layanan Hubungan Media | Jumlah Layanan Hubungan Media | 30 Layanan | 27.093.300,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.04 | | PD.05 | Kabupaten Karo | | 21.751.850,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | 8000 Dokumen | 109.172.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.04 | | PD.05 | Kabupaten Karo | | 109.172.000,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | - | - | 1.125.805.315,00 | | | | | | | - | 627.805.315,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **16** | **03** | **2.01** | | **Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **-** | **-** | **56.560.775,00** | | | PN.04 | | PD.05 | **Kabupaten Karo** | **-** | **56.560.775,00** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 2 | 16 | 03 | 2.01 | 01 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Domain | 60.500,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.04 | | PD.05 | Kabupaten Karo | | 60.500,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 03 | 2.01 | 02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 6.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.04 | | PD.05 | Kabupaten Karo | | 6.500.000,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 03 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 10 Unit | 50.000.275,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.04 | | PD.05 | Kabupaten Karo | | 50.000.275,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **16** | **03** | **2.02** | | **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **-** | **-** | **1.069.244.540,00** | | | PN.04 | | PD.05 | **Kabupaten Karo** | **-** | **571.244.540,00** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 02 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 1 Dokumen | 46.771.690,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.04 | | PD.05 | Kabupaten Karo | | 46.771.690,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 04 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 49.992.850,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.04 | | PD.05 | Kabupaten Karo | | 49.992.850,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | 1 Dokumen | 20.999.450,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.04 | | PD.05 | Kabupaten Karo | | 20.999.450,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | 1 Unit | 96.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.04 | | PD.05 | Kabupaten Karo | | 96.000.000,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 08 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | 1 Layanan | 96.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.04 | | PD.05 | Kabupaten Karo | | 96.000.000,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City | 1 Dokumen | 220.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.04 | | PD.05 | Kabupaten Karo | | 20.000.000,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 71.736.400,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.04 | | PD.05 | Kabupaten Karo | | 71.736.400,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | 1 Dokumen | 448.471.010,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.04 | | PD.05 | Kabupaten Karo | | 150.471.010,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 12 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE | 1 Dokumen | 19.273.140,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.04 | | PD.05 | Kabupaten Karo | | 19.273.140,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **20** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | **115.000.000,00** | | | | | | | | **845.000.000,00** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 2 | 20 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Indeks SPBE<br>Indeks SPBE | 3 Indeks<br>2,7 Indeks | 115.000.000,00 | | | | | | | - | 845.000.000,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **20** | **02** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**<br>**Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota** | **100 %**<br>**100 %** | **115.000.000,00** | | | | | | **Kabupaten Karo** | **-** | **845.000.000,00** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 19 Dokumen | 45.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.04 | | PD.05 | Kabupaten Karo | | 400.000.000,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 90 Orang | 20.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.04 | | PD.05 | Kabupaten Karo | | 90.000.000,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.04 | | PD.05 | Kabupaten Karo | | 355.000.000,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **21** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | **71.497.376,00** | | | | | | | | **46.497.376,00** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 2 | 21 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | - | - | 71.497.376,00 | | | | | | | - | 46.497.376,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **21** | **02** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **-** | **-** | **71.497.376,00** | | | PN.04 | | PD.05 | **Kabupaten Karo** | **-** | **46.497.376,00** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 2 | 21 | 02 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 3 Laporan | 71.497.376,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.04 | | PD.05 | Kabupaten Karo | | 46.497.376,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | | | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | | | **6.011.245.462,00** | | | | | | | | **7.029.770.765,00** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **6.011.245.462,00** | | | | | | | | **7.029.770.765,00** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **2** | **18** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | **6.011.245.462,00** | | | | | | | | **7.029.770.765,00** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| 2 | 18 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 5.197.295.462,00 | | | | | | | - | 5.633.620.765,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **4.308.656.349,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **ASN** | **-** | **4.589.983.952,00** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 Orang/bulan | 4.182.626.349,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN | | 4.456.033.952,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 126.030.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN | | 133.950.000,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **295.459.113,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **ASN dan THL** | **-** | **444.156.813,00** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 80 Paket | 5.146.640,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN dan THL | | 5.146.640,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 46 Paket | 50.218.045,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN dan THL | | 77.073.256,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 23 Paket | 16.118.968,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN dan THL | | 21.087.477,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 21.407.460,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN dan THL | | 74.649.440,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 202.568.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN dan THL | | 266.200.000,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **554.760.000,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **ASN dan THL** | **-** | **561.060.000,00** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 24.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN dan THL | | 24.500.000,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 20 Laporan | 14.200.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN dan THL | | 14.200.000,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 516.060.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN dan THL | | 522.360.000,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah** | **100 %** | **38.420.000,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **ASN dan THL** | **-** | **38.420.000,00** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 38.420.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN dan THL | | 38.420.000,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN | 84 investor | 57.694.950,00 | | | | | | | - | 200.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **02** | **2.02** | | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** | **Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** | **100 %** | **57.694.950,00** | | | #N/A | PP.03 | PD.02 | **Stakeholder** | **-** | **200.000.000,00** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| 2 | 18 | 02 | 2.02 | 04 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 57.694.950,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.03 | PD.02 | Stakeholder | | 200.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| 2 | 18 | 03 | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN | 84 investor | 102.305.050,00 | | | | | | | - | 400.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **03** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **102.305.050,00** | | | PN.01 | PP.03 | PD.02 | **Stakeholder** | **-** | **400.000.000,00** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.01 | PP.03 | PD.02 | Stakeholder | | 200.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | 03 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota | 1 Dokumen | 52.305.050,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.01 | PP.03 | PD.02 | Stakeholder | | 200.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 04 | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan | 1400 izin | 173.950.000,00 | | | | | | | - | 316.150.000,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **04** | **2.01** | | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | **Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **173.950.000,00** | | | PN.01 | PP.03 | PD.02 | **Stakeholder** | **-** | **316.150.000,00** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | 10.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.01 | PP.03 | PD.02 | Stakeholder | | 100.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 06 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 1400 Pelaku Usaha | 114.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.01 | PP.03 | PD.02 | Stakeholder | | 114.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 08 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | 555 Kegiatan Usaha | 49.950.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.01 | PP.03 | PD.02 | Stakeholder | | 102.150.000,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN | 84 investor | 480.000.000,00 | | | | | | | - | 480.000.000,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **05** | **2.01** | | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **480.000.000,00** | | | PN.01 | PP.03 | PD.02 | **Stakeholder** | **-** | **480.000.000,00** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 04 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 7 Kegiatan Usaha. | 106.394.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.01 | PP.03 | PD.02 | Stakeholder | | 0 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 05 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 150 Pelaku Usaha | 281.105.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.01 | PP.03 | PD.02 | Stakeholder | | 387.499.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 06 | Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 50 Kegiatan Usaha | 92.501.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.01 | PP.03 | PD.02 | Stakeholder | | 92.501.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | | | | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** | | | **18.755.199.189,00** | | | | | | | | **17.554.375.133,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **981.898.350,00** | | | | | | | | **836.898.350,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| **2** | **19** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | **756.308.345,00** | | | | | | | | **611.308.345,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| 2 | 19 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase Organisasi Pemuda yang aktif | 47 % | 50.000.000,00 | | | | | | | - | 50.000.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **2** | **19** | **02** | **2.01** | | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** | **100 %** | **50.000.000,00** | | | PN.03 | PP.01 | PD.03 | **Pemuda/i** | **-** | **50.000.000,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 04 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | 50 Orang | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.01 | PD.03 | Pemuda/i | | 50.000.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| 2 | 19 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah Prestasi Olahraga | 18 cabang olahraga | 706.308.345,00 | | | | | | | - | 561.308.345,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| **2** | **19** | **03** | **2.01** | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **50.000.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **atlet pelajar** | **-** | **55.000.000,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| 2 | 19 | 03 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | 1 Unit | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | atlet pelajar | | 55.000.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| **2** | **19** | **03** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Kejuaran Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **106.308.345,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Atlet** | **-** | **106.308.345,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| 2 | 19 | 03 | 2.02 | 02 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 106.308.345,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Atlet | | 106.308.345,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| **2** | **19** | **03** | **2.03** | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** | **100 %** | **400.000.000,00** | | | #N/A | PP.01 | PD.03 | **Atlet** | **-** | **200.000.000,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| 2 | 19 | 03 | 2.03 | 03 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan | 200 Orang | 400.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.01 | PD.03 | Atlet | | 200.000.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| **2** | **19** | **03** | **2.04** | | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | **100 %** | **150.000.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Atlet** | **-** | **200.000.000,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| 2 | 19 | 03 | 2.04 | 04 | Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi | Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan | 9 Organisasi | 150.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Atlet | | 200.000.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | **225.590.005,00** | | | | | | | | **225.590.005,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| 2 | 22 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi | 26 karya budaya | 62.539.215,00 | | | | | | | - | 62.539.215,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| **2** | **22** | **02** | **2.01** | | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **62.539.215,00** | | | PN.01 | PP.03 | PD.01 | **Masyarakat** | **-** | **62.539.215,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| 2 | 22 | 02 | 2.01 | 02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 80 Orang | 62.539.215,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Masyarakat | | 62.539.215,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| 2 | 22 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya | 11 kali | 93.050.790,00 | | | | | | | - | 93.050.790,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **2** | **22** | **03** | **2.01** | | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **93.050.790,00** | | | PN.01 | PP.03 | PD.01 | **masyarakat pelaku seni** | **-** | **93.050.790,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| 2 | 22 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 90 Orang | 93.050.790,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.01 | PP.03 | PD.01 | masyarakat pelaku seni | | 93.050.790,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| 2 | 22 | 05 | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan<br>Jumlah Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan | 20 Cagar Budaya<br>12 Cagar Budaya | 70.000.000,00 | | | | | | | - | 70.000.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| **2** | **22** | **05** | **2.01** | | **Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | **100 %** | **70.000.000,00** | | | PN.01 | PP.03 | PD.01 | **Masyarakat dan cagar budaya** | **-** | **70.000.000,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| 2 | 22 | 05 | 2.01 | 01 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan | 2 Objek | 70.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Masyarakat dan cagar budaya | | 70.000.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **17.773.300.839,00** | | | | | | | | **16.717.476.783,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| **3** | **26** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | **17.773.300.839,00** | | | | | | | | **16.717.476.783,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| 3 | 26 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 7.310.482.839,00 | | | | | | | - | 7.544.658.783,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| **3** | **26** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **5.494.158.997,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Disbudporapar** | **-** | **5.728.334.941,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| 3 | 26 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 43 Orang/bulan | 5.206.518.997,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disbudporapar | | 5.440.694.941,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| 3 | 26 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 287.640.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disbudporapar | | 287.640.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| **3** | **26** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **424.310.550,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Disbudporapar** | **-** | **424.310.550,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 45 Paket | 73.132.331,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disbudporapar | | 73.132.331,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 36.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disbudporapar | | 36.000.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 45.997.300,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disbudporapar | | 45.997.300,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 4.988.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disbudporapar | | 4.988.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| 3 | 26 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 264.192.919,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disbudporapar | | 264.192.919,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **3** | **26** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **1.140.770.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Disbudporapar** | **-** | **1.140.770.000,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| 3 | 26 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 75.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disbudporapar | | 75.000.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| 3 | 26 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 24.950.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disbudporapar | | 24.950.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| 3 | 26 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1.040.820.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disbudporapar | | 1.040.820.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| **3** | **26** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **251.243.292,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Disbudporapar** | **-** | **251.243.292,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| 3 | 26 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit | 242.493.292,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disbudporapar | | 242.493.292,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| 3 | 26 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 8 Unit | 8.750.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Disbudporapar | | 8.750.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| 3 | 26 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 1101000 orang | 7.531.761.000,00 | | | | | | | - | 7.531.761.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| **3** | **26** | **02** | **2.03** | | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | **100 %** | **7.531.761.000,00** | | | PN.01 | PP.03 | PD.01 | **Wisatawan nusantara dan mancanegara** | **-** | **7.531.761.000,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 | 04 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | 4 Unit | 7.531.761.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Wisatawan nusantara dan mancanegara | | 7.531.761.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| 3 | 26 | 03 | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 1101000 orang | 1.517.635.000,00 | | | | | | | - | 217.635.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| **3** | **26** | **03** | **2.01** | | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **100 %** | **1.517.635.000,00** | | | #N/A | PP.03 | PD.01 | **Wisatawan nusantara dan mancanegara** | **-** | **217.635.000,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 1 Kegiatan | 1.517.635.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.03 | PD.01 | Wisatawan nusantara dan mancanegara | | 217.635.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| 3 | 26 | 05 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi | 160 orang | 1.413.422.000,00 | | | | | | | - | 1.423.422.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| **3** | **26** | **05** | **2.01** | | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | **100 %** | **1.363.422.000,00** | | | PN.01 | PP.03 | PD.01 | **SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif** | **-** | **1.368.422.000,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 09 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata | 500 Orang | 1.313.422.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.01 | PP.03 | PD.01 | SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif | | 1.313.422.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 10 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | 50 Orang | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.01 | PP.03 | PD.01 | SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif | | 55.000.000,00 | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| **3** | **26** | **05** | **2.02** | | **Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif** | **100 %** | **50.000.000,00** | | | PN.01 | PP.03 | PD.01 | **pelaku ekonomi kreatif** | **-** | **55.000.000,00** | **Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata** |
| 3 | 26 | 05 | 2.02 | 01 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | 100 Orang | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.01 | PP.03 | PD.01 | pelaku ekonomi kreatif | | 55.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |
| | | | | | **Dinas Perpustakaan dan Arsip** | | | **5.099.039.868,00** | | | | | | | | **6.213.000.000,00** | **Dinas Perpustakaan dan Arsip** |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | **5.099.039.868,00** | | | | | | | | **6.213.000.000,00** | **Dinas Perpustakaan dan Arsip** |
| **2** | **23** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | **4.984.039.868,00** | | | | | | | | **5.923.000.000,00** | **Dinas Perpustakaan dan Arsip** |
| 2 | 23 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 4.697.573.784,00 | | | | | | | - | 5.193.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| **2** | **23** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **4.161.760.834,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo** | **-** | **4.620.000.000,00** | **Dinas Perpustakaan dan Arsip** |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 37 Orang/bulan | 4.053.760.834,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo | | 4.500.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 108.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo | | 120.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| **2** | **23** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata Rata capaian kinerja Indikator Sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **172.274.600,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo** | **-** | **192.000.000,00** | **Dinas Perpustakaan dan Arsip** |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 948.600,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo | | 1.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 60.751.023,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo | | 70.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 15.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo | | 15.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 24 Dokumen | 5.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo | | 6.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | 90.574.977,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo | | 100.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| **2** | **23** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata rata Capaian Kinerja Indikator Sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 %** | **347.111.880,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo** | **-** | **363.000.000,00** | **Dinas Perpustakaan dan Arsip** |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 Laporan | 7.675.400,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo | | 8.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Laporan | 12.050.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo | | 15.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 25 Laporan | 327.386.480,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo | | 340.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| **2** | **23** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata rata capaian Kinerja Indikator Sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **16.426.470,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo** | **-** | **18.000.000,00** | **Dinas Perpustakaan dan Arsip** |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 Unit | 16.426.470,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo | | 18.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 2 | 23 | 02 | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan | 24.02 Indeks | 286.466.084,00 | | | | | | | - | 730.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| **2** | **23** | **02** | **2.01** | | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **155.001.447,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat** | **-** | **430.000.000,00** | **Dinas Perpustakaan dan Arsip** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) | 1 Layanan | 26.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat | | 30.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 10 Perpustakaan | 5.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat | | 100.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 Orang | 30.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat | | 100.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 07 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi | 1 Layanan | 44.001.447,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat | | 100.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 08 | Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan | 685 Eksemplar | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat | | 100.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| **2** | **23** | **02** | **2.02** | | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat daerah kabupaten/kota** | **100 %** | **131.464.637,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat** | **-** | **300.000.000,00** | **Dinas Perpustakaan dan Arsip** |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 01 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan | 4 Lokus | 48.966.084,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat | | 100.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 03 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | 100 Orang | 32.498.553,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat | | 100.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 1 Perpustakaan | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat | | 100.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| **2** | **24** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | **115.000.000,00** | | | | | | | | **290.000.000,00** | **Dinas Perpustakaan dan Arsip** |
| 2 | 24 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 85 % | 65.000.000,00 | | | | | | | - | 170.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| **2** | **24** | **02** | **2.01** | | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota** | **100 %** | **30.000.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **SKPD Kab Karo** | **-** | **100.000.000,00** | **Dinas Perpustakaan dan Arsip** |
| 2 | 24 | 02 | 2.01 | 01 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | 250 Berkas | 15.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | SKPD Kab Karo | | 50.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 2 | 24 | 02 | 2.01 | 02 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | 300 Berkas | 15.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | | PD.03 | SKPD Kab Karo | | 50.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| **2** | **24** | **02** | **2.03** | | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | **Rata rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota** | **100 %** | **35.000.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **SKPD Kab Karo** | **-** | **70.000.000,00** | **Dinas Perpustakaan dan Arsip** |
| 2 | 24 | 02 | 2.03 | 01 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 10 Pengguna | 35.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | SKPD Kab Karo | | 70.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 2 | 24 | 03 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 85 % | 50.000.000,00 | | | | | | | - | 120.000.000,00 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| **2** | **24** | **03** | **2.01** | | **Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun** | **rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun** | **100 %** | **50.000.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **SKPD Kab Karo** | **-** | **120.000.000,00** | **Dinas Perpustakaan dan Arsip** |
| 2 | 24 | 03 | 2.01 | 01 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 1000 Arsip | 35.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | SKPD Kab Karo | | 70.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
| 2 | 24 | 03 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan | 1000 Berkas | 15.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | SKPD Kab Karo | | 50.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
| | | | | | **Dinas Pertanian** | | | **26.248.394.440,00** | | | | | | | | **26.248.394.440,00** | **Dinas Pertanian** |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **26.248.394.440,00** | | | | | | | | **26.248.394.440,00** | **Dinas Pertanian** |
| **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | **26.248.394.440,00** | | | | | | | | **26.248.394.440,00** | **Dinas Pertanian** |
| 3 | 27 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85 Indeks | 18.193.980.278,00 | | | | | | | - | 18.193.980.278,00 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah** | **100 %** | **17.350.222.266,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **ASN Dinas Pertanian Kab.Karo** | **-** | **17.350.222.266,00** | **Dinas Pertanian** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 148 Orang/bulan | 15.747.302.266,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN Dinas Pertanian Kab.Karo | | 15.747.302.266,00 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 1.602.920.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN Dinas Pertanian Kab.Karo | | 1.602.920.000,00 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **365.757.892,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **ASN Dinas Pertanian Kab.Karo** | **-** | **365.757.892,00** | **Dinas Pertanian** |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 32.684.780,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN Dinas Pertanian Kab.Karo | | 32.684.780,00 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 28 Paket | 48.723.865,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN Dinas Pertanian Kab.Karo | | 48.723.865,00 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 28 Paket | 10.382.247,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN Dinas Pertanian Kab.Karo | | 10.382.247,00 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 28 Paket | 35.107.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN Dinas Pertanian Kab.Karo | | 35.107.000,00 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 238.860.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN Dinas Pertanian Kab.Karo | | 238.860.000,00 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **367.020.000,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **ASN Dinas Pertanian Kab.Karo** | **-** | **367.020.000,00** | **Dinas Pertanian** |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 288 Laporan | 90.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN Dinas Pertanian Kab.Karo | | 90.000.000,00 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 277.020.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN Dinas Pertanian Kab.Karo | | 277.020.000,00 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah** | **100 %** | **110.980.120,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **ASN Dinas Pertanian Kab.Karo** | **-** | **110.980.120,00** | **Dinas Pertanian** |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 60 Unit | 96.290.120,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN Dinas Pertanian Kab.Karo | | 96.290.120,00 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 26 Unit | 14.690.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | ASN Dinas Pertanian Kab.Karo | | 14.690.000,00 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produktivitas komoditi pertanian | 92,77 Persen | 531.315.400,00 | | | | | | | - | 531.315.400,00 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **02** | **2.01** | | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | **100 %** | **231.315.400,00** | | | PN.01 | PP.03 | PD.01 | **Kelompok Tani** | **-** | **231.315.400,00** | **Dinas Pertanian** |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 0 Laporan | - | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Kelompok Tani | | 0 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 1 Laporan | 231.315.400,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Kelompok Tani | | 231.315.400,00 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **02** | **2.02** | | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | **100 %** | **300.000.000,00** | | | PN.01 | PP.03 | PD.01 | **Kelompok Tani** | **-** | **300.000.000,00** | **Dinas Pertanian** |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 | 02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 0 Dokumen | - | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Kelompok Tani | | 0 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 | 03 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Kelompok Tani | | 300.000.000,00 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **02** | **2.06** | | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain** | **100 %** | **-** | | | PN.01 | PP.03 | PD.01 | **Kelompok Tani** | **-** | **0** | **Dinas Pertanian** |
| 3 | 27 | 02 | 2.06 | 03 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | 0 Ekor | - | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Kelompok Tani | | 0 | Dinas Pertanian |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Produktivitas Komoditi Pertanian | 92,77 Kw/ha | 6.437.928.000,00 | | | | | | | - | 6.437.928.000,00 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **03** | **2.01** | | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian** | **100 %** | **49.750.000,00** | | | PN.01 | PP.04 | PD.01 | **Kelompok Tani** | **-** | **49.750.000,00** | **Dinas Pertanian** |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 1 Laporan | 49.750.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.01 | PP.04 | PD.01 | Kelompok Tani | | 49.750.000,00 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **03** | **2.02** | | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian** | **100 %** | **6.388.178.000,00** | | | PN.04 | PP.02 | PD.01 | **Kelompok Tani** | **-** | **6.388.178.000,00** | **Dinas Pertanian** |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 6 Unit | 1.174.778.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | PN.04 | PP.02 | PD.01 | Kelompok Tani | | 1.174.778.000,00 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 2 Unit | 3.777.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.03 | PD.01 | Kelompok Tani | | 3.777.000.000,00 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi | 7 Unit | 1.436.400.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | PN.04 | PP.02 | PD.01 | Kelompok Tani | | 1.436.400.000,00 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **03** | **2.04** | | **Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum** | **0 %** | **-** | | | PN.01 | | PD.01 | **Kelompok Tani** | **-** | **0** | **Dinas Pertanian** |
| 3 | 27 | 03 | 2.04 | 02 | Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum | Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola | 0 Ha | - | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | PN.01 | | PD.01 | Kelompok Tani | | 0 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 04 | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Jumlah HPR yang divaksin | 70 Persen | 610.815.762,00 | | | | | | | - | 610.815.762,00 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **04** | **2.01** | | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam daerah Kabupaten/Kota** | **100 %** | **610.815.762,00** | | | PN.01 | PP.03 | PD.01 | **Hewan Penular rabies** | **-** | **610.815.762,00** | **Dinas Pertanian** |
| 3 | 27 | 04 | 2.01 | 08 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 1 Laporan | 610.815.762,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Hewan Penular rabies | | 610.815.762,00 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penaggulangan OPT | 2,51 Persen | - | | | | | | | - | 0 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **05** | **2.01** | | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | **100 %** | **-** | | | PN.01 | PP.03 | PD.01 | **Kelompok Tani** | **-** | **0** | **Dinas Pertanian** |
| 3 | 27 | 05 | 2.01 | 01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 0 Ha | - | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Kelompok Tani | | 0 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 07 | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Cakupan Bina Kelompok Tani | 7,1 Persen | 474.355.000,00 | | | | | | | - | 474.355.000,00 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **07** | **2.01** | | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **100 %** | **474.355.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.01 | **Kelompok Tani** | **-** | **474.355.000,00** | **Dinas Pertanian** |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 3 Unit | 273.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | PN.02 | PP.01 | PD.01 | Kelompok Tani | | 273.500.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 20 Unit | 200.855.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.01 | Kelompok Tani | | 200.855.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| | | | | | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** | | | **14.662.947.129,00** | | | | | | | | **11.079.500.000,00** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **14.662.947.129,00** | | | | | | | | **11.079.500.000,00** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** |
| **3** | **29** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | | | **2.363.753.894,00** | | | | | | | | **2.257.000.000,00** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** |
| 3 | 29 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 indeks | 2.363.753.894,00 | | | | | | | - | 2.257.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **29** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah** | **100 %** | **260.000.000,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.06 | **-** | **-** | **263.000.000,00** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** |
| 3 | 29 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 260.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | - | | 263.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **29** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **446.793.894,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.06 | **Disperindag** | **-** | **281.000.000,00** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 3 | 29 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 80.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Disperindag | | 80.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 29 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 10.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Disperindag | | 6.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 29 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 80.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Disperindag | | 90.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 29 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 276.793.894,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Disperindag | | 105.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **29** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 %** | **1.566.960.000,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.06 | **Disperindag** | **-** | **1.647.000.000,00** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** |
| 3 | 29 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 71.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Disperindag | | 97.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 29 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.495.960.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.04 | PP.04 | PD.06 | Disperindag | | 1.550.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **29** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **90.000.000,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.06 | **-** | **-** | **66.000.000,00** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** |
| 3 | 29 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit | 90.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | - | | 66.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | **6.298.592.569,00** | | | | | | | | **5.917.500.000,00** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** |
| 3 | 30 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 indeks | 5.258.874.145,00 | | | | | | | - | 5.355.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah** | **100 %** | **5.253.874.145,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.06 | **Disperindag** | **-** | **5.300.000.000,00** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** |
| 3 | 30 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 52 Orang/bulan | 5.253.874.145,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Disperindag | | 5.300.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **5.000.000,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.06 | **Disperindag** | **-** | **55.000.000,00** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** |
| 3 | 30 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 5.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | #N/A | PP.04 | PD.06 | Disperindag | | 55.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 30 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase sarana perdagangan yang terkelola dengan baik | 47,06 % | 700.000.000,00 | | | | | | | - | 185.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | **03** | **2.01** | | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | **Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | **100 %** | **700.000.000,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.01 | **Disperindag** | **-** | **185.000.000,00** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** |
| 3 | 30 | 03 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Unit | 700.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.01 | Disperindag | | 185.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 30 | 05 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Peningkatan nilai eksport | 6199 miliar | 289.713.894,00 | | | | | | | - | 325.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupeten/Kota** | **100 %** | **289.713.894,00** | | | #N/A | PP.03 | PD.01 | **Disperindag** | **-** | **325.000.000,00** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | 02 | Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 20 Pelaku Usaha | 219.713.894,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.03 | PD.01 | Disperindag | | 250.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | 03 | Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | 20 Pelaku Usaha | 70.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.03 | PD.01 | Disperindag | | 75.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 30 | 06 | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase alat ukur sarana perdagangan yang ditera dan tera ulang | 100 % | 50.004.530,00 | | | | | | | - | 52.500.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **3** | **30** | **06** | **2.01** | | **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | **Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasann** | **100 %** | **50.004.530,00** | | | PN.01 | PP.03 | PD.01 | **Disperindag** | **-** | **52.500.000,00** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 50 Unit | 25.004.530,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Disperindag | | 26.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | 50 Orang | 25.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.01 | PP.03 | PD.01 | Disperindag | | 26.500.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **31** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | **6.000.600.666,00** | | | | | | | | **2.905.000.000,00** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** |
| 3 | 31 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | persentase pertumbuhan industri/ikm | 3,93 % | 6.000.600.666,00 | | | | | | | - | 2.905.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **31** | **02** | **2.01** | | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | **Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | **100 %** | **6.000.600.666,00** | | | #N/A | PP.03 | PD.01 | **Disperindag** | **-** | **2.905.000.000,00** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 1 Dokumen | 207.080.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.03 | PD.01 | Disperindag | | 105.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1 Dokumen | 5.793.520.666,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | #N/A | PP.03 | PD.01 | Disperindag | | 2.800.000.000,00 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | | **Sekretariat Daerah** | | | **25.695.129.533,00** | | | | | | | | **26.145.772.833,00** | **Sekretariat Daerah** |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **25.695.129.533,00** | | | | | | | | **26.145.772.833,00** | **Sekretariat Daerah** |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | **25.695.129.533,00** | | | | | | | | **26.145.772.833,00** | **Sekretariat Daerah** |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 23.324.241.203,00 | | | | | | | - | 23.806.742.203,00 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah** | **100 %** | **11.639.444.330,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pemerintah Kabupaten Karo** | **-** | **11.639.444.330,00** | **Sekretariat Daerah** |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 78 Orang/bulan | 11.205.834.330,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 11.205.834.330,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 433.610.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | #N/A | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 433.610.000,00 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah** | **100 %** | **3.638.561.287,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pemerintah Kabupaten Karo** | **-** | **3.988.561.287,00** | **Sekretariat Daerah** |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1200 Paket | 120.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 120.000.000,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 36 Paket | 380.193.109,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 380.193.109,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 8.077.400,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 8.077.400,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 100.704.050,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 100.704.050,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2000 Laporan | 1.119.568.900,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 1.319.568.900,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 800 Laporan | 1.910.017.828,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | #N/A | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 2.060.017.828,00 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | **100 %** | **100.000.000,00** | | | #N/A | | PD.06 | **Pemerintah Kabupaten Karo** | **-** | **100.000.000,00** | **Sekretariat Daerah** |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 100.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | #N/A | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 100.000.000,00 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan penyediaanjasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **100 %** | **2.551.239.529,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pemerintah Kabupaten Karo** | **-** | **2.551.239.529,00** | **Sekretariat Daerah** |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5 Laporan | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 50.000.000,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 1.064.500.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 1.064.500.000,00 | Sekretariat Daerah |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 20 Laporan | 159.039.529,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 159.039.529,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.277.700.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 1.277.700.000,00 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | **100 %** | **2.063.401.900,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pemerintah Kabupaten Karo** | **-** | **2.195.902.900,00** | **Sekretariat Daerah** |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | 192.600.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 192.600.000,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 24 Unit | 641.557.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 641.557.000,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 391.500.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | #N/A | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 427.000.000,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 20 Unit | 837.744.900,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 934.745.900,00 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | **2.11** | | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah** | **100 %** | **756.074.849,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pemerintah Kabupaten Karo** | **-** | **756.074.849,00** | **Sekretariat Daerah** |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 652.074.849,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 652.074.849,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 2 Paket | 104.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 104.000.000,00 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | **2.12** | | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah** | **100 %** | **2.176.088.800,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pemerintah Kabupaten Karo** | **-** | **2.176.088.800,00** | **Sekretariat Daerah** |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 12 Paket | 1.022.544.400,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 1.022.544.400,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 12 Paket | 853.544.400,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 853.544.400,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 12 Paket | 300.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 300.000.000,00 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | **2.13** | | **Penataan Organisasi** | **rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan penataan organisasi** | **100 %** | **263.790.508,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pemerintah Kabupaten Karo** | **-** | **263.790.508,00** | **Sekretariat Daerah** |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 2 Dokumen | 73.718.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 73.718.000,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 2 Dokumen | 80.929.290,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 80.929.290,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 04 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 2 Dokumen | 68.287.218,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 68.287.218,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 40.856.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 40.856.000,00 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | **2.14** | | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan** | **100 %** | **135.640.000,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pemerintah Kabupaten Karo** | **-** | **135.640.000,00** | **Sekretariat Daerah** |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 01 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 3 Laporan | 30.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 30.000.000,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 10 Laporan | 65.640.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 65.640.000,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 3 Laporan | 40.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 40.000.000,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 02 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tinggi Kategori Tinggi Kategori | 1.228.161.000,00 | | | | | | | - | 1.311.961.000,00 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **02** | **2.01** | | **Administrasi Tata Pemerintahan** | **rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan** | **100 %** | **779.200.000,00** | | | #N/A | | PD.06 | **Pemerintah Kabupaten Karo** | **-** | **863.000.000,00** | **Sekretariat Daerah** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 30 Dokumen | 93.570.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 103.000.000,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 50 Dokumen | 81.750.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | #N/A | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 90.000.000,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 60 Dokumen | 603.880.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 670.000.000,00 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **02** | **2.02** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat** | **100 %** | **111.603.100,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pemerintah Kabupaten Karo** | **-** | **111.603.100,00** | **Sekretariat Daerah** |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 12 Dokumen | 28.516.850,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 28.516.850,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 12 Dokumen | 33.086.250,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 33.086.250,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tranibium Lingtas | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 50.000.000,00 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **02** | **2.03** | | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | **rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum** | **100 %** | **337.357.900,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pemerintah Kabupaten Karo** | **-** | **337.357.900,00** | **Sekretariat Daerah** |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 604 Dokumen | 136.507.900,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 136.507.900,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 7 Kasus | 130.850.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 130.850.000,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 50 Dokumen | 70.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 70.000.000,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Jumlah Paket tender dengan Jumlah Permohonan Tender<br>Jumlah Paket tender dengan Jumlah Permohonan Tender / Laporan Teid | 220 Paket 220 / 6,75 Paket / Nilai | 1.142.727.330,00 | | | | | | | - | 1.027.069.630,00 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **03** | **2.01** | | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian** | **100 %** | **373.716.700,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pemerintah Kabupaten Karo** | **-** | **258.059.000,00** | **Sekretariat Daerah** |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 1 Dokumen | 106.520.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 106.520.000,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 3 Laporan | 209.357.700,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 93.700.000,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | 1 Dokumen | 57.839.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 57.839.000,00 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **03** | **2.02** | | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | **rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan** | **100 %** | **71.450.000,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pemerintah Kabupaten Karo** | **-** | **71.450.000,00** | **Sekretariat Daerah** |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 14.400.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 14.400.000,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 1 Laporan | 22.050.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 22.050.000,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 110 Laporan | 35.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 35.000.000,00 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **03** | **2.03** | | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa** | **100 %** | **606.613.630,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pemerintah Kabupaten Karo** | **-** | **606.613.630,00** | **Sekretariat Daerah** |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 200 Dokumen | 440.513.630,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 440.513.630,00 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 1 Dokumen | 79.800.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 79.800.000,00 | Sekretariat Daerah |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 200 Orang | 86.300.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.05 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 86.300.000,00 | Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **03** | **2.04** | | **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | **rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam** | **100 %** | **90.947.000,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pemerintah Kabupaten Karo** | **-** | **90.947.000,00** | **Sekretariat Daerah** |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 1 Dokumen | 45.950.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 45.950.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 1 Dokumen | 44.997.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Kabupaten Karo | | 44.997.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** | | | **41.529.784.579,00** | | | | | | | | **41.251.639.559,00** | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **41.529.784.579,00** | | | | | | | | **41.251.639.559,00** | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| **4** | **02** | | | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | **41.529.784.579,00** | | | | | | | | **41.251.639.559,00** | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 4 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 24.645.973.669,00 | | | | | | | - | 25.195.900.649,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **3.294.702.963,00** | | | PN.06 | | PD.06 | **Sekretariat DPRD Kab Karo** | **-** | **3.289.109.943,00** | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | 3.030.982.963,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | | PD.06 | Sekretariat DPRD Kab Karo | | 3.025.389.943,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 263.720.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | | PD.06 | Sekretariat DPRD Kab Karo | | 263.720.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100 %** | **428.780.000,00** | | | PN.06 | | PD.06 | **ASN Sekretariat DPRD** | **-** | **359.780.000,00** | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | 9.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | PN.06 | | PD.06 | ASN Sekretariat DPRD | | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 60.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | | PD.06 | ASN Sekretariat DPRD | | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 24 Orang | 359.780.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | PN.06 | | PD.03 | ASN Sekretariat DPRD | | 359.780.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **1.659.166.788,00** | | | PN.06 | | PD.06 | **Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD** | **-** | **1.487.166.788,00** | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 29.984.952,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD | | 29.984.952,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 256.758.499,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL | PN.06 | | PD.06 | Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD | | 256.758.499,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 285.795.784,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL | #N/A | | PD.06 | Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD | | 113.795.784,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 42.349.553,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD | | 42.349.553,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 32.400.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.06 | | PD.06 | Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD | | 32.400.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 297.680.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.06 | | PD.06 | Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD | | 297.680.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 90 Laporan | 714.198.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | PN.06 | | PD.06 | Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD | | 714.198.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 %** | **334.018.000,00** | | | #N/A | | PD.06 | **Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD** | **-** | **349.018.000,00** | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 3 Unit | 20.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | #N/A | | PD.06 | Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD | | 200.000.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 19 Unit | 314.018.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.06 | | PD.06 | Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD | | 149.018.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **1.291.540.000,00** | | | PN.06 | | PD.06 | **Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD** | **-** | **1.291.540.000,00** | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 157.200.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | | PD.06 | Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD | | 157.200.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 100.590.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | | PD.06 | Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD | | 100.590.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.033.750.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | PN.06 | | PD.06 | Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD | | 1.033.750.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **556.300.000,00** | | | PN.06 | | PD.06 | **Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD** | **-** | **556.300.000,00** | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 369.250.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | PN.06 | | PD.06 | Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD | | 369.250.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | 187.050.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD | | 187.050.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **01** | **2.15** | | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | **100 %** | **16.271.465.918,00** | | | #N/A | | PD.06 | **Pimpinan dan Anggota DPRD** | **-** | **16.063.465.918,00** | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 40 Orang/Bulan | 15.558.665.918,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | | PD.06 | Pimpinan dan Anggota DPRD | | 15.558.665.918,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 1 Paket | 472.800.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.06 | Pimpinan dan Anggota DPRD | | 294.800.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 40 Orang | 240.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | | PD.06 | Pimpinan dan Anggota DPRD | | 210.000.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **01** | **2.16** | | **Layanan Administrasi DPRD** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Layanan Administrasi DPRD** | **100 %** | **810.000.000,00** | | | #N/A | | PD.06 | **Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD** | **-** | **1.799.520.000,00** | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 01 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | 1 Dokumen | 180.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | #N/A | | PD.06 | Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD | | 27.520.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | 12 Paket | 630.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD | | 1.772.000.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 4 | 02 | 02 | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota, Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Ada Ada/ Tidak | 16.883.810.910,00 | | | | | | | - | 16.055.738.910,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **02** | **2.01** | | **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | **100 %** | **2.721.926.500,00** | | | PN.06 | | PD.06 | **Sekretariat DPRD Kab Karo** | **-** | **2.721.926.500,00** | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 2 Dokumen | 24.330.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | | PD.06 | Sekretariat DPRD Kab Karo | | 24.330.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 200 Dokumen | 2.479.460.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Sekretariat DPRD Kab Karo | | 2.479.460.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | 1 Dokumen | 17.600.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | | PD.06 | Sekretariat DPRD Kab Karo | | 17.600.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 6 Dokumen | 193.676.500,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | | PD.06 | Sekretariat DPRD Kab Karo | | 193.676.500,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 05 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | 1 Dokumen | 6.860.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | | PD.06 | Sekretariat DPRD Kab Karo | | 6.860.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **02** | **2.02** | | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran** | **100 %** | **293.270.000,00** | | | PN.06 | | PD.06 | **Sekretariat DPRD Kab Karo** | **-** | **293.270.000,00** | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 1 Dokumen | 67.070.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | | PD.06 | Sekretariat DPRD Kab Karo | | 67.070.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 02 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 1 Dokumen | 66.370.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Sekretariat DPRD Kab Karo | | 66.370.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 Dokumen | 52.680.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Sekretariat DPRD Kab Karo | | 52.680.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 04 | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 1 Dokumen | 43.300.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Sekretariat DPRD Kab Karo | | 43.300.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | 1 Dokumen | 10.450.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | | PD.06 | Sekretariat DPRD Kab Karo | | 10.450.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 Dokumen | 53.400.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | | PD.06 | Sekretariat DPRD Kab Karo | | 53.400.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **02** | **2.03** | | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | **100 %** | **243.177.500,00** | | | PN.06 | | PD.06 | **Sekretariat DPRD Kab Karo** | **-** | **243.177.500,00** | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 1 Laporan | 35.578.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Sekretariat DPRD Kab Karo | | 35.578.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 27.512.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | | PD.06 | Sekretariat DPRD Kab Karo | | 27.512.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 03 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 1 Laporan | 45.120.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Sekretariat DPRD Kab Karo | | 45.120.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 1 Laporan | 34.702.500,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Sekretariat DPRD Kab Karo | | 34.702.500,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 05 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 1 Laporan | 34.825.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Sekretariat DPRD Kab Karo | | 34.825.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 06 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1 Dokumen | 18.280.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | PN.06 | | PD.06 | Sekretariat DPRD Kab Karo | | 18.280.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 07 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | 1 Dokumen | 18.640.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | Sekretariat DPRD Kab Karo | | 18.640.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 08 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen | 28.520.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | PN.06 | | PD.06 | Sekretariat DPRD Kab Karo | | 28.520.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **02** | **2.04** | | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD** | **100 %** | **3.391.475.760,00** | | | #N/A | | PD.06 | **DPRD Kab Karo** | **-** | **2.693.475.760,00** | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 02 | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 200 Dokumen | 1.439.554.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL | #N/A | | PD.06 | DPRD Kab Karo | | 1.241.554.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 04 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 12 Orang | 360.070.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | DPRD Kab Karo | | 360.070.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 12 Orang | 384.070.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | DPRD Kab Karo | | 384.070.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 07 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 Dokumen | 17.650.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | PN.06 | | PD.06 | DPRD Kab Karo | | 17.650.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 08 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 12 Dokumen | 1.190.131.760,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | DPRD Kab Karo | | 690.131.760,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **02** | **2.05** | | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **100 %** | **1.327.767.000,00** | | | PN.06 | | PD.06 | **DPRD Kab Karo** | **-** | **1.327.767.000,00** | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | 01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | 180 Laporan | 273.275.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | PN.06 | | PD.06 | DPRD Kab Karo | | 273.275.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | 02 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 2 Dokumen | 18.142.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | DPRD Kab Karo | | 18.142.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | 03 | Pelaksanaan Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 3 Dokumen | 1.036.350.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | DPRD Kab Karo | | 1.036.350.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **02** | **2.06** | | **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | **100 %** | **9.560.000,00** | | | PN.06 | | PD.06 | **DPRD Kab Karo** | **-** | **9.560.000,00** | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 4 | 02 | 02 | 2.06 | 02 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 Laporan | 9.560.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | DPRD Kab Karo | | 9.560.000,00 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **02** | **2.08** | | **Fasilitasi Tugas DPRD** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD** | **100 %** | **8.896.634.150,00** | | | PN.06 | | PD.06 | **DPRD Kab Karo** | **-** | **8.766.562.150,00** | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 300 Dokumen | 8.512.064.500,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | | PD.06 | DPRD Kab Karo | | 8.381.992.500,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 02 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 1 Laporan | 12.810.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | DPRD Kab Karo | | 12.810.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 12 Dokumen | 49.337.650,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | DPRD Kab Karo | | 49.337.650,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 04 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 12 Dokumen | 322.422.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | | PD.06 | DPRD Kab Karo | | 322.422.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | | | | | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** | | | **8.618.424.434,00** | | | | | | | | **8.535.155.225,00** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **8.618.424.434,00** | | | | | | | | **8.535.155.225,00** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| **5** | **01** | | | | **PERENCANAAN** | | | **8.081.557.948,00** | | | | | | | | **8.042.155.225,00** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| 5 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 5.449.327.078,00 | | | | | | | - | 5.433.770.860,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| **5** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **4.663.269.692,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Bappedalitbang** | **-** | **4.691.082.187,00** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang/bulan | 4.471.521.877,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Bappedalitbang | | 4.499.334.372,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 191.747.815,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Bappedalitbang | | 191.747.815,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| **5** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **580.267.386,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **ASN Bappedalitbang** | **-** | **534.688.673,00** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 688.673,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | ASN Bappedalitbang | | 688.673,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 45.805.970,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Bappedalitbang | | 41.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 13.000.135,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Bappedalitbang | | 13.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 29.995.350,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Bappedalitbang | | 30.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10 Laporan | 29.070.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Bappedalitbang | | 30.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 160 Laporan | 461.707.258,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | ASN Bappedalitbang | | 420.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| **5** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **127.590.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Bappedalitbang** | **-** | **129.000.000,00** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 14.400.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Bappedalitbang | | 15.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | 20.690.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Bappedalitbang | | 21.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 24 Laporan | 92.500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Bappedalitbang | | 93.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **5** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **78.200.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Bappedalitbang** | **-** | **79.000.000,00** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 78.200.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Bappedalitbang | | 79.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaaran Pembangunan Daerah | 100 % | 1.336.183.259,00 | | | | | | | - | 1.433.384.365,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| **5** | **01** | **02** | **2.01** | | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **100 %** | **1.091.767.841,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Kabupaten Karo** | **-** | **1.020.604.770,00** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 1 Berita Acara | 35.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Kabupaten Karo | | 36.487.039,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | 40.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Kabupaten Karo | | 42.950.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 1 Berita Acara | 133.145.990,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Kabupaten Karo | | 143.167.731,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | 07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 4 Dokumen | 883.621.851,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | | PD.06 | Kabupaten Karo | | 798.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| **5** | **01** | **02** | **2.02** | | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **100 %** | **165.365.418,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Perangkat Daerah** | **-** | **209.190.915,00** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| 5 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen | 165.365.418,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Perangkat Daerah | | 209.190.915,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| **5** | **01** | **02** | **2.03** | | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **100 %** | **79.050.000,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Perangkat Daerah** | **-** | **203.588.680,00** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| 5 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 4 Laporan | 79.050.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Perangkat Daerah | | 203.588.680,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 03 | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaaran Pembangunan Daerah | 100 % | 1.296.047.611,00 | | | | | | | - | 1.175.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| **5** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatanKoordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **100 %** | **488.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Perangkat Daerah dan masyarakat** | **-** | **438.000.000,00** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 4 Dokumen | 61.100.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Perangkat Daerah dan masyarakat | | 70.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 7 Laporan | 73.800.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Perangkat Daerah dan masyarakat | | 100.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 4 Dokumen | 124.700.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Perangkat Daerah dan masyarakat | | 90.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 7 Laporan | 228.400.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Perangkat Daerah dan masyarakat | | 178.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| **5** | **01** | **03** | **2.02** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | **100 %** | **526.211.166,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Perangkat Daerah dan masyarakat** | **-** | **495.000.000,00** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 4 Dokumen | 236.880.347,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Perangkat Daerah dan masyarakat | | 250.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 6 Laporan | 15.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Perangkat Daerah dan masyarakat | | 20.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 6 Laporan | 150.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Perangkat Daerah dan masyarakat | | 100.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 4 Dokumen | 45.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Perangkat Daerah dan masyarakat | | 45.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 3 Laporan | 35.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Perangkat Daerah dan masyarakat | | 35.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | 3 Laporan | 44.330.819,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Perangkat Daerah dan masyarakat | | 45.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| **5** | **01** | **03** | **2.03** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **100 %** | **281.836.445,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.06 | **Perangkat Daerah dan masyarakat** | **-** | **242.000.000,00** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 4 Dokumen | 105.836.445,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Perangkat Daerah dan masyarakat | | 56.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 3 Laporan | 90.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Perangkat Daerah dan masyarakat | | 100.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 4 Dokumen | 43.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Perangkat Daerah dan masyarakat | | 43.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 3 Laporan | 43.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Perangkat Daerah dan masyarakat | | 43.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| **5** | **05** | | | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | **536.866.486,00** | | | | | | | | **493.000.000,00** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| 5 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Indeks Daya Saing Daerah | 3,5 Indeks | 536.866.486,00 | | | | | | | 4Indeks | 493.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| **5** | **05** | **02** | **2.01** | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | **100 %** | **162.263.581,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.06 | **Perangkat Daerah dan masyarakat** | **-** | **113.000.000,00** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| 5 | 05 | 02 | 2.01 | 12 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | 6 Laporan | 162.263.581,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Perangkat Daerah dan masyarakat | | 113.000.000,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| **5** | **05** | **02** | **2.04** | | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | **100 %** | **374.602.905,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Perangkat Daerah dan masyarakat** | **-** | **380.000.000,00** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** |
| 5 | 05 | 02 | 2.04 | 01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 2 Dokumen | 374.602.905,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Perangkat Daerah dan masyarakat | | 380.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| | | | | | **Badan Keuangan dan Aset Daerah** | | | **288.423.215.797,00** | | | | | | | | **288.423.215.797,00** | **Badan Keuangan dan Aset Daerah** |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **288.423.215.797,00** | | | | | | | | **288.423.215.797,00** | **Badan Keuangan dan Aset Daerah** |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | **288.423.215.797,00** | | | | | | | | **288.423.215.797,00** | **Badan Keuangan dan Aset Daerah** |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 4.668.242.782,00 | | | | | | | - | 4.668.242.782,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | **02** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **3.734.381.052,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai BKAD** | **-** | **3.734.381.052,00** | **Badan Keuangan dan Aset Daerah** |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 43 Orang/bula | 3.327.701.052,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Pegawai BKAD | | 3.327.701.052,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 406.680.000,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Pegawai BKAD | | 406.680.000,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | **02** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **509.301.730,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai BKAD** | **-** | **509.301.730,00** | **Badan Keuangan dan Aset Daerah** |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 6.570.105,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Pegawai BKAD | | 6.570.105,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 90.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Pegawai BKAD | | 90.000.000,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 33.248.234,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | | PD.06 | Pegawai BKAD | | 33.248.234,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 41.106.141,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Pegawai BKAD | | 41.106.141,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 250 Laporan | 338.377.250,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Pegawai BKAD | | 338.377.250,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan penyediaanJasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **315.500.000,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai BKAD** | **-** | **315.500.000,00** | **Badan Keuangan dan Aset Daerah** |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 19.200.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Pegawai BKAD | | 19.200.000,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | 12.740.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Pegawai BKAD | | 12.740.000,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 283.560.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Pegawai BKAD | | 283.560.000,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | **02** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **109.060.000,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai BKAD** | **-** | **109.060.000,00** | **Badan Keuangan dan Aset Daerah** |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | 109.060.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Pegawai BKAD | | 109.060.000,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | WTP Opini BPK | 283.033.329.384,00 | | | | | | | - | 283.033.329.384,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | **02** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah** | **100 %** | **2.050.617.534,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo** | **-** | **2.050.617.534,00** | **Badan Keuangan dan Aset Daerah** |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 209.805.829,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 209.805.829,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 203.219.750,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 203.219.750,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 46 Dokumen | 161.560.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 161.560.000,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 46 Dokumen | 310.960.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 310.960.000,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen | 512.955.955,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 512.955.955,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen | 552.616.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 552.616.000,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 4 Dokumen | 8.500.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 8.500.000,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 13 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 60 Orang | 91.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 91.000.000,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | **02** | **02** | **2.02** | | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **100 %** | **373.494.901,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo** | **-** | **373.494.901,00** | **Badan Keuangan dan Aset Daerah** |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 8000 Dokumen | 101.283.278,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 101.283.278,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 12 Dokumen | 60.437.250,00 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 60.437.250,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 23 Dokumen | 64.614.373,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 64.614.373,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 160 Orang | 147.160.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 147.160.000,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | **02** | **02** | **2.03** | | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah** | **100 %** | **570.382.468,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo** | **-** | **570.382.468,00** | **Badan Keuangan dan Aset Daerah** |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 2 Dokumen | 69.166.848,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 69.166.848,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 2 Laporan | 82.760.192,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 82.760.192,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 48 Laporan | 153.477.765,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 153.477.765,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 181.151.399,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 181.151.399,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 60 Orang | 83.826.264,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 83.826.264,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | **02** | **02** | **2.04** | | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **100 %** | **280.038.834.481,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kro dan pemerintahan Desa** | **-** | **280.038.834.481,00** | **Badan Keuangan dan Aset Daerah** |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 259 Laporan | 269.319.923.300,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kro dan pemerintahan Desa | | 269.319.923.300,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 4 Laporan | 3.299.572.202,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kro dan pemerintahan Desa | | 3.299.572.202,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 10 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 259 Laporan | 7.419.338.979,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kro dan pemerintahan Desa | | 7.419.338.979,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | WTP Opini BPK | 721.643.631,00 | | | | | | | - | 721.643.631,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| **5** | **02** | **03** | **2.01** | | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan pengelolaan barang milik daerah** | **100 %** | **721.643.631,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo** | **-** | **721.643.631,00** | **Badan Keuangan dan Aset Daerah** |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 4 Dokumen | 65.382.385,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 65.382.385,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 200 Laporan | 232.335.741,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 232.335.741,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 273.583.948,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 273.583.948,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 2 Laporan | 72.682.262,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 72.682.262,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 60 Orang | 77.659.295,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 77.659.295,00 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | | | | **Badan Pendapatan Daerah** | | | **10.074.899.201,00** | | | | | | | | **13.366.373.536,00** | **Badan Pendapatan Daerah** |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **10.074.899.201,00** | | | | | | | | **13.366.373.536,00** | **Badan Pendapatan Daerah** |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | **10.074.899.201,00** | | | | | | | | **13.366.373.536,00** | **Badan Pendapatan Daerah** |
| 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 83 Indeks | 7.483.990.539,00 | | | | | | | - | 7.530.373.536,00 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata- rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **6.395.343.536,00** | | | PN.02 | | PD.06 | **ASN** | **-** | **6.395.343.536,00** | **Badan Pendapatan Daerah** |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 434 Orang/bulan | 6.198.063.536,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | | PD.06 | ASN | | 6.198.063.536,00 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 197.280.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | | PD.06 | ASN | | 197.280.000,00 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata- rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **533.617.003,00** | | | PN.02 | | PD.06 | **ASN dan THL** | **-** | **580.000.000,00** | **Badan Pendapatan Daerah** |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 9 Paket | 80.618.606,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | | PD.06 | ASN dan THL | | 120.000.000,00 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 115.180.397,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | | PD.06 | ASN dan THL | | 120.000.000,00 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | 337.818.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | | PD.06 | ASN dan THL | | 340.000.000,00 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata- rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **475.740.000,00** | | | PN.02 | | PD.06 | **ASN dan THL** | **-** | **475.740.000,00** | **Badan Pendapatan Daerah** |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 19.200.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | | PD.06 | ASN dan THL | | 19.200.000,00 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 11 Laporan | 32.100.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | | PD.06 | ASN dan THL | | 32.100.000,00 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 424.440.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | | PD.06 | ASN dan THL | | 424.440.000,00 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata- rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **79.290.000,00** | | | PN.02 | | PD.06 | **ASN dan THL** | **-** | **79.290.000,00** | **Badan Pendapatan Daerah** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | 79.290.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | | PD.06 | ASN dan THL | | 79.290.000,00 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 591097430 00 Rp | 2.590.908.662,00 | | | | | | | - | 5.836.000.000,00 | Badan Pendapatan Daerah |
| **5** | **02** | **04** | **2.01** | | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **Rata- rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan pengelolaan pendapatan daerah** | **100 %** | **2.590.908.662,00** | | | PN.02 | | PD.04 | **Wajib pajak daerah** | **-** | **5.836.000.000,00** | **Badan Pendapatan Daerah** |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 01 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | 3 Dokumen | 144.565.215,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.04 | Wajib pajak daerah | | 200.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 17 Laporan | 107.590.300,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.04 | Wajib pajak daerah | | 500.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 300 Laporan | 73.300.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.04 | Wajib pajak daerah | | 100.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 31 Laporan | 391.282.915,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.04 | Wajib pajak daerah | | 400.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | 4472 Obyek Pajak | 732.897.150,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.04 | Wajib pajak daerah | | 800.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | 12 Dokumen | 36.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.04 | Wajib pajak daerah | | 36.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 12 Dokumen | 1.105.273.082,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | | PD.04 | Wajib pajak daerah | | 3.800.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | | | | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** | | | **6.569.944.936,00** | | | | | | | | **7.226.939.429,00** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **6.569.944.936,00** | | | | | | | | **7.226.939.429,00** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| **5** | **03** | | | | **KEPEGAWAIAN** | | | **5.384.694.296,00** | | | | | | | | **5.923.163.725,00** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| 5 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 4.539.534.296,00 | | | | | | | - | 4.993.487.725,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah** | **100 %** | **4.223.763.821,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN BKPSDM** | **-** | **4.646.140.203,00** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Orang/bula n | 4.041.483.821,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN BKPSDM | | 4.445.632.203,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 120 Dokumen | 182.280.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN BKPSDM | | 200.508.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **205.000.475,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN BKPSDM** | **-** | **225.500.522,00** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 51 Paket | 30.263.391,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN BKPSDM | | 33.289.730,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 18.617.084,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN BKPSDM | | 20.478.792,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 145 Laporan | 156.120.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN BKPSDM | | 171.732.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 %** | **65.940.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN BKPSDM** | **-** | **72.534.000,00** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 19.200.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN BKPSDM | | 21.120.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 48 Laporan | 46.740.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN BKPSDM | | 51.414.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **44.830.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN BKPSDM** | **-** | **49.313.000,00** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 38.420.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN BKPSDM | | 42.262.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 8 Unit | 6.410.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN BKPSDM | | 7.051.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase Keterisian Jabatan/Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ Jumlah Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin aparatur | 100/11/17 %/%/ASN | 845.160.000,00 | | | | | | | - | 929.676.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **02** | **2.01** | | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | **100 %** | **334.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Pemerintah Kabupaten Karo** | **-** | **367.400.000,00** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 04 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN | 1 Laporan | 210.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Pemerintah Kabupaten Karo | | 231.000.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 124.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Pemerintah Kabupaten Karo | | 136.400.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **02** | **2.02** | | **Mutasi dan Promosi ASN** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Mutasi dan Promosi ASN** | **100 %** | **276.160.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Pemerintah Kabupaten Karo** | **-** | **303.776.000,00** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 150 Dokumen | 237.780.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Pemerintah Kabupaten Karo | | 261.558.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 1000 Dokumen | 38.380.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Pemerintah Kabupaten Karo | | 42.218.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **02** | **2.03** | | **Pengembangan Kompetensi ASN** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN** | **100 %** | **150.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Pemerintah Kabupaten Karo** | **-** | **165.000.000,00** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 05 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | 1 Dokumen | 95.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Pemerintah Kabupaten Karo | | 104.500.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 2.03 | 13 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | Jumlah ASN Fungsional yang Dibina | 80 Orang | 55.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Pemerintah Kabupaten Karo | | 60.500.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **5** | **03** | **02** | **2.04** | | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | **100 %** | **85.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Pemerintah Kabupaten Karo** | **-** | **93.500.000,00** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Pemerintah Kabupaten Karo | | 27.500.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 20 Laporan | 40.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Pemerintah Kabupaten Karo | | 44.000.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 2.04 | 10 | Evaluasi Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN | 20 Laporan | 20.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Pemerintah Kabupaten Karo | | 22.000.000,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **04** | | | | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | **1.185.250.640,00** | | | | | | | | **1.303.775.704,00** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| 5 | 04 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | 11/8,36 %/% | 1.185.250.640,00 | | | | | | | - | 1.303.775.704,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **04** | **02** | **2.01** | | **Pengembangan Kompetensi Teknis** | **Rata-rata capaian kinerja Indikator sub kegaitan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis** | **100 %** | **109.124.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Pemerintah Kabupaten Karo** | **-** | **120.036.400,00** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| 5 | 04 | 02 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | 15 Orang | 109.124.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Pemerintah Kabupaten Karo | | 120.036.400,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **04** | **02** | **2.02** | | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | **100 %** | **1.076.126.640,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Pemerintah Kabupaten Karo** | **-** | **1.183.739.304,00** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| 5 | 04 | 02 | 2.02 | 07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 86 Laporan | 1.076.126.640,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Pemerintah Kabupaten Karo | | 1.183.739.304,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | | | | **Inspektorat Daerah** | | | **8.473.896.432,00** | | | | | | | | **8.927.033.671,00** | **Inspektorat Daerah** |
| **6** | | | | | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **8.473.896.432,00** | | | | | | | | **8.927.033.671,00** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** |
| **6** | **01** | | | | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | **8.473.896.432,00** | | | | | | | | **8.927.033.671,00** | **INSPEKTORAT DAERAH** |
| 6 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | 6.059.515.447,00 | | | | | | | - | 6.538.902.686,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| **6** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **-** | **-** | **5.144.578.108,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai Inspektorat Daerah** | **-** | **5.613.699.687,00** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 41 Orang/bulan | 4.909.738.108,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Inspektorat Daerah | | 5.378.859.687,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 234.840.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Inspektorat Daerah | | 234.840.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| **6** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **-** | **-** | **206.912.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Karo** | **-** | **206.912.000,00** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | 206.912.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Karo | | 206.912.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| **6** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **-** | **-** | **417.128.739,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Karo** | **-** | **417.128.739,00** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 37 Paket | 59.234.790,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Karo | | 59.234.790,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 38 Paket | 65.228.199,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Karo | | 65.228.199,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 4.115.750,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Karo | | 4.115.750,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 1.800.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Karo | | 1.800.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 49.850.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Karo | | 49.850.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | 236.900.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Karo | | 236.900.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| **6** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **-** | **-** | **157.036.600,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Karo** | **-** | **167.302.260,00** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 24.380.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Karo | | 24.380.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 30.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Karo | | 30.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 102.656.600,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Karo | | 112.922.260,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| **6** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **-** | **-** | **133.860.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Kendaraan Dinas Inspektorat Daerah** | **-** | **133.860.000,00** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | 133.860.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Kendaraan Dinas Inspektorat Daerah | | 133.860.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | - | - | 1.959.810.805,00 | | | | | | | - | 1.933.560.805,00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN |
| **6** | **01** | **02** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **-** | **-** | **1.633.444.805,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo** | **-** | **1.607.194.805,00** | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 150 Laporan | 113.596.295,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 113.596.295,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 50 Laporan | 370.565.600,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 370.565.600,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 10 Laporan | 134.478.500,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 134.478.500,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 2 Laporan | 26.250.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 0 | INSPEKTORAT DAERAH |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 256 Laporan | 478.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 478.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 06 | Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 5 Kesepakatan | 235.695.500,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 235.695.500,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 24 Dokumen | 274.858.910,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo | | 274.858.910,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| **6** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | **-** | **-** | **326.366.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Organisasi Perangkat Daerah** | **-** | **326.366.000,00** | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 24 Laporan | 135.124.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Organisasi Perangkat Daerah | | 135.124.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 12 Laporan | 191.242.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Organisasi Perangkat Daerah | | 191.242.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 03 | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | - | - | 454.570.180,00 | | | | | | | - | 454.570.180,00 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |
| **6** | **01** | **03** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | **-** | **-** | **-** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Organisasi Perangkat Daerah** | **-** | **0** | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 0 Rekomendasi | - | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Organisasi Perangkat Daerah | | 0 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 0 Rekomendasi | - | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Organisasi Perangkat Daerah | | 0 | INSPEKTORAT DAERAH |
| **6** | **01** | **03** | **2.02** | | **Pendampingan dan Asistensi** | **-** | **-** | **454.570.180,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Organisasi Perangkat Daerah** | **-** | **454.570.180,00** | **Pendampingan dan Asistensi** |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 48 perangkat daerah | 179.902.180,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Organisasi Perangkat Daerah | | 179.902.180,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 46 perangkat daerah | 114.668.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Organisasi Perangkat Daerah | | 114.668.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 50 Kegiatan | 100.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Organisasi Perangkat Daerah | | 100.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 03 | 2.02 | 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 48 perangkat daerah | 60.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Organisasi Perangkat Daerah | | 60.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | | | | | **Kecamatan Kabanjahe** | | | **6.562.482.004,00** | | | | | | | | **7.546.898.301,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **6.562.482.004,00** | | | | | | | | **7.546.898.301,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **6.562.482.004,00** | | | | | | | | **7.546.898.301,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 6.489.276.482,00 | | | | | | | - | 7.462.667.953,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **12 Bulan** | **5.462.255.377,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai Kecamatan Kabanjahe** | **-** | **6.281.593.683,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 Orang/bulan | 5.111.615.377,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Kabanjahe | | 5.878.357.683,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 350.640.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Kabanjahe | | 403.236.000,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **12 Bulan** | **116.921.105,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai Kecamatan Kabanjahe** | **-** | **134.459.270,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 3.483.340,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Kabanjahe | | 4.005.841,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 45 Paket | 55.294.320,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Kabanjahe | | 63.588.468,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 16 Paket | 8.390.345,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Kabanjahe | | 9.648.896,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 9.197.100,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Kabanjahe | | 10.576.665,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 218 Laporan | 40.556.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Kabanjahe | | 46.639.400,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **12 Bulan** | **796.550.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai Kecamatan Kabanjahe** | **-** | **916.032.500,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 18.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Kabanjahe | | 20.700.000,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 3.530.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Kabanjahe | | 4.059.500,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 775.020.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Kabanjahe | | 891.273.000,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara** | **26 Unit** | **113.550.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai Kecamatan Kabanjahe** | **-** | **130.582.500,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | 113.550.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Kabanjahe | | 130.582.500,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 27.718.970,00 | | | | | | | - | 31.868.814,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **2 Kegiatan** | **26.055.105,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai Kecamatan Kabanjahe** | **-** | **29.955.370,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | 13.920.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Kabanjahe | | 16.000.000,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2 Dokumen | 12.135.105,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Kabanjahe | | 13.955.370,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **1 Laporan** | **1.663.865,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai Kecamatan Kabanjahe** | **-** | **1.913.444,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 1.663.865,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Kabanjahe | | 1.913.444,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19 Kegiatan | 19.350.000,00 | | | | | | | - | 22.525.500,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dikoordinasikan**<br>**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **1 Kegiatan**<br>**1 Kegiatan** | **19.350.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe** | **-** | **22.525.500,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 19.350.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe | | 22.525.500,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 2/2/2 Perda/Perkada/Kegiatan | 2.320.000,00 | | | | | | | - | 2.668.000,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Jumlah kegiatan dalam upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **2 Kegiatan** | **2.320.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe** | **-** | **2.668.000,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 2.320.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe | | 2.668.000,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | 2 Urusan | 21.816.552,00 | | | | | | | - | 25.018.034,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **13 Urusan** | **21.816.552,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe** | **-** | **25.018.034,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang | 21.816.552,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe | | 25.018.034,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina dan Diawasi | 8 Pemerintahan Desa | 2.000.000,00 | | | | | | | - | 2.150.000,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **8 Pemerintahan Desa** | **2.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe** | **-** | **2.150.000,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 8 Laporan | 2.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe | | 2.150.000,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| | | | | | **Kelurahan Kampung Dalam** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **1.035.000.000,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **1.035.000.000,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **1.035.000.000,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19 Kegiatan | 900.000.000,00 | | | | | | | - | 1.035.000.000,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan<br>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **22 Kegiatan<br>22 Kegiatan** | **900.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe** | **-** | **1.035.000.000,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 7 Unit | 641.600.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe | | 737.840.000,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas / Ormas | 258.400.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe | | 297.160.000,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| | | | | | **Kelurahan Gung Negeri** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **1.035.999.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **1.035.999.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **1.035.999.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19 Kegiatan | 900.000.000,00 | | | | | | | - | 1.035.999.999,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan<br>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **22 Kegiatan<br>22 Kegiatan** | **900.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe** | **-** | **1.035.999.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 4 Unit | 584.018.059,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe | | 672.620.767,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas / Ormas | 315.981.941,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe | | 363.379.232,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| | | | | | **Kelurahan Padang Mas** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **1.034.999.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **1.034.999.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **1.034.999.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19 Kegiatan | 900.000.000,00 | | | | | | | - | 1.034.999.999,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan<br>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **22 Kegiatan<br>22 Kegiatan** | **900.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe** | **-** | **1.034.999.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 5 Unit | 729.170.598,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Padang Mas | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe | | 838.546.187,00 | Kecamatan Kabanjahe |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas / Ormas | 170.829.402,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Padang Mas | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe | | 196.453.812,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| | | | | | **Kelurahan Lau Cimba** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **1.030.990.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **1.030.990.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **1.030.990.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19 Kegiatan | 900.000.000,00 | | | | | | | - | 1.030.990.999,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan<br>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **22 Kegiatan<br>22 Kegiatan** | **900.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe** | **-** | **1.030.990.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 4 Unit | 622.043.647,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe | | 715.350.194,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas / Ormas | 277.956.353,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe | | 315.640.805,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| | | | | | **Kelurahan Gung Leto** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **1.030.399.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **1.030.399.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **1.030.399.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19 Kegiatan | 900.000.000,00 | | | | | | | - | 1.030.399.999,00 | Kecamatan Kabanjahe |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan<br>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **22 Kegiatan<br>22 Kegiatan** | **900.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe** | **-** | **1.030.399.999,00** | **Kecamatan Kabanjahe** |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 3 Unit | 568.400.204,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe | | 649.060.234,00 | KELURAHAN GUNG LETO |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas / Ormas | 331.599.796,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Sekecamatan Kabanjahe | | 381.339.765,00 | KELURAHAN GUNG LETO |
| | | | | | **Kecamatan Berastagi** | | | **5.387.710.586,00** | | | | | | | | **5.302.588.076,00** | **Kecamatan Berastagi** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **5.387.710.586,00** | | | | | | | | **5.302.588.076,00** | **Kecamatan Berastagi** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **5.387.710.586,00** | | | | | | | | **5.302.588.076,00** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks<br>95.23 Indeks | 5.181.931.893,00 | | | | | | | - | 4.902.588.076,00 | Kecamatan Berastagi |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **4.332.128.076,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN dan Non ASN Kantor Camat Berastagi** | **-** | **4.057.208.076,00** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 36 Orang/bulan | 4.057.208.076,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN dan Non ASN Kantor Camat Berastagi | | 4.057.208.076,00 | Kecamatan Berastagi |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 274.920.000,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN dan Non ASN Kantor Camat Berastagi | | 0 | Kecamatan Berastagi |
| **7** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah`````````** | **100 %** | **31.500.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN dan Non ASN Kantor Camat Berastagi** | **-** | **35.000.000,00** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 42 Paket | 31.500.000,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN dan Non ASN Kantor Camat Berastagi | | 35.000.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **139.990.484,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN dan Non ASN Kantor Camat Berastagi** | **-** | **148.000.000,00** | **Kecamatan Berastagi** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 5.813.330,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN dan Non ASN Kantor Camat Berastagi | | 6.000.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2750 Paket | 62.587.120,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN dan Non ASN Kantor Camat Berastagi | | 65.000.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 5.092.218,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN dan Non ASN Kantor Camat Berastagi | | 6.000.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 4.504.300,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN dan Non ASN Kantor Camat Berastagi | | 5.000.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 5.000.000,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN dan Non ASN Kantor Camat Berastagi | | 6.000.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 56.993.516,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN dan Non ASN Kantor Camat Berastagi | | 60.000.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 %** | **18.233.333,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kantor Camat Berastagi** | **-** | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Unit | 18.233.333,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kantor Camat Berastagi | | 0 | Kecamatan Berastagi |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada Subkegiatanpada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **589.440.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN dan Non ASN Kantor Camat Berastagi** | **-** | **591.740.000,00** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 18.700.000,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN dan Non ASN Kantor Camat Berastagi | | 20.000.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 5.000.000,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN dan Non ASN Kantor Camat Berastagi | | 6.000.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 565.740.000,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN dan Non ASN Kantor Camat Berastagi | | 565.740.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada Subkegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **70.640.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kantor Camat Berastagi** | **-** | **70.640.000,00** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 70.640.000,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kantor Camat Berastagi | | 70.640.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 95.515.363,00 | | | | | | | - | 120.000.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan** | **100 %** | **61.515.363,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN dan Non ASN Kantor Camat Berastagi** | **-** | **75.000.000,00** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 Laporan | 15.000.000,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN dan Non ASN Kantor Camat Berastagi | | 25.000.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2 Dokumen | 46.515.363,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN dan Non ASN Kantor Camat Berastagi | | 50.000.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | **100 %** | **34.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN dan Non ASN Kantor Camat Berastagi** | **-** | **45.000.000,00** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 34.000.000,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN dan Non ASN Kantor Camat Berastagi | | 45.000.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19 Kegiatan | 11.600.000,00 | | | | | | | - | 200.000.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **100 %** | **11.600.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kantor Camat dan Masyarakat Kecamatan Berastagi** | **-** | **200.000.000,00** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | 11.600.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kantor Camat dan Masyarakat Kecamatan Berastagi | | 200.000.000,00 | Kecamatan Berastagi |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 2/2/2 Perda/Perkada/Kegiatan | 26.163.330,00 | | | | | | | - | 0 | Kecamatan Berastagi |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **100 %** | **26.163.330,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Berastagi** | **-** | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 26.163.330,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Berastagi | | 0 | Kecamatan Berastagi |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | 2 Urusan | 72.500.000,00 | | | | | | | - | 80.000.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **100 %** | **72.500.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat dan Anggota Paskibra Kecamatan Berastagi** | **-** | **80.000.000,00** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 150 Orang | 72.500.000,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat dan Anggota Paskibra Kecamatan Berastagi | | 80.000.000,00 | Kecamatan Berastagi |
| | | | | | **Kelurahan Tambak Lau Mulgap II** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19 Kegiatan | 900.000.000,00 | | | | | | | - | 0 | Kecamatan Berastagi |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **100 %** | **900.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Berastagi** | **-** | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 4 Unit | 695.500.000,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Tambak Lau Mulgap II | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Berastagi | | 0 | Kecamatan Berastagi |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 6 Pokmas / Ormas | 204.500.000,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Tambak Lau Mulgap II | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Berastagi | | 0 | Kecamatan Berastagi |
| | | | | | **Kelurahan Tambak Lau Mulgap I** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19 Kegiatan | 900.000.000,00 | | | | | | | - | 0 | Kecamatan Berastagi |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **100 %** | **900.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Berastagi** | **-** | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 4 Unit | 764.207.100,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Tambak Lau Mulgap I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Berastagi | | 0 | Kecamatan Berastagi |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 6 Pokmas / Ormas | 135.792.900,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Tambak Lau Mulgap I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Berastagi | | 0 | Kecamatan Berastagi |
| | | | | | **Kelurahan Gundaling II** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19 Kegiatan | 900.000.000,00 | | | | | | | - | 0 | Kecamatan Berastagi |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **100 %** | **900.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Berastagi** | **-** | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 4 Unit | 681.261.200,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Gundaling II | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Berastagi | | 0 | Kecamatan Berastagi |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 6 Pokmas / Ormas | 218.738.800,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Gundaling II | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Berastagi | | 0 | Kecamatan Berastagi |
| | | | | | **Kelurahan Gundaling I** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 19 Kegiatan | 900.000.000,00 | | | | | | | - | 0 | Kecamatan Berastagi |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **100 %** | **900.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Berastagi** | **-** | **0** | **Kecamatan Berastagi** |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 4 Unit | 698.000.000,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Berastagi | | 0 | KELURAHAN GUNDALING I |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 6 Pokmas / Ormas | 202.000.000,00 | - Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Berastagi | | 0 | KELURAHAN GUNDALING I |
| | | | | | **Kecamatan Barusjahe** | | | **2.767.422.783,00** | | | | | | | | **2.763.652.479,00** | **Kecamatan Barusjahe** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.767.422.783,00** | | | | | | | | **2.763.652.479,00** | **Kecamatan Barusjahe** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **2.767.422.783,00** | | | | | | | | **2.763.652.479,00** | **Kecamatan Barusjahe** |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 87 Indeks | 2.622.038.503,00 | | | | | | | - | 2.626.152.182,00 | Kecamatan Barusjahe |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **2.436.310.424,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **ASN Kecamatan Barusjahe** | **-** | **2.449.193.235,00** | **Kecamatan Barusjahe** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 24 Orang/bula | 2.368.150.424,00 | - Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | ASN Kecamatan Barusjahe | | 2.376.922.735,00 | Kecamatan Barusjahe |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 68.160.000,00 | - Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | | PD.06 | ASN Kecamatan Barusjahe | | 72.270.500,00 | Kecamatan Barusjahe |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **61.370.059,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kecamatan Barusjahe** | **-** | **81.067.117,00** | **Kecamatan Barusjahe** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 14 Paket | 1.320.342,00 | - Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Barusjahe | | 1.866.189,00 | Kecamatan Barusjahe |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 33 Paket | 13.653.485,00 | - Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Barusjahe | | 14.524.285,00 | Kecamatan Barusjahe |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 20 Paket | 2.681.332,00 | - Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Barusjahe | | 2.687.743,00 | Kecamatan Barusjahe |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 2.482.900,00 | - Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Barusjahe | | 2.482.900,00 | Kecamatan Barusjahe |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | 41.232.000,00 | - Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Barusjahe | | 59.506.000,00 | Kecamatan Barusjahe |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **89.888.020,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kecamatan Barusjahe** | **-** | **64.454.300,00** | **Kecamatan Barusjahe** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 13.168.020,00 | - Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Barusjahe | | 16.500.000,00 | Kecamatan Barusjahe |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1.420.000,00 | - Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Barusjahe | | 2.840.000,00 | Kecamatan Barusjahe |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 75.300.000,00 | - Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | | PD.06 | ASN Kecamatan Barusjahe | | 45.114.300,00 | Kecamatan Barusjahe |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **34.470.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kecamatan Barusjahe** | **-** | **31.437.530,00** | **Kecamatan Barusjahe** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 34.470.000,00 | - Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Barusjahe | | 31.437.530,00 | Kecamatan Barusjahe |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 87 Indeks | 70.212.600,00 | | | | | | | - | 57.401.548,00 | Kecamatan Barusjahe |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **100 %** | **41.484.600,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Barusjahe** | **-** | **33.221.548,00** | **Kecamatan Barusjahe** |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 16.517.600,00 | - Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Barusjahe | | 12.720.400,00 | Kecamatan Barusjahe |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2 Dokumen | 24.967.000,00 | - Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Barusjahe | | 20.501.148,00 | Kecamatan Barusjahe |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **100 %** | **28.728.000,00** | | | #N/A | | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Barusjahe** | **-** | **24.180.000,00** | **Kecamatan Barusjahe** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 28.728.000,00 | - Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Barusjahe | | 24.180.000,00 | Kecamatan Barusjahe |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 6 kegiatan | 16.641.000,00 | | | | | | | - | 10.340.800,00 | Kecamatan Barusjahe |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **100 %** | **16.641.000,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Barusjahe** | **-** | **10.340.800,00** | **Kecamatan Barusjahe** |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 16.641.000,00 | - Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Barusjahe | | 10.340.800,00 | Kecamatan Barusjahe |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 2/2/3 Perda/Perkada/Kegiatan | 5.000.000,00 | | | | | | | - | 10.000.000,00 | Kecamatan Barusjahe |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **100 %** | **5.000.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat Kecamatan Barusjahe** | **-** | **10.000.000,00** | **Kecamatan Barusjahe** |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | - Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kecamatan Barusjahe | | 10.000.000,00 | Kecamatan Barusjahe |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | 1 Urusan | 36.492.280,00 | | | | | | | - | 30.717.838,00 | Kecamatan Barusjahe |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **100 %** | **36.492.280,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Barusjahe** | **-** | **30.717.838,00** | **Kecamatan Barusjahe** |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 150 Orang | 36.492.280,00 | - Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Barusjahe | | 30.717.838,00 | Kecamatan Barusjahe |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang di Bina Dan Di awasi | 19 Pemerintahan Desa | 17.038.400,00 | | | | | | | - | 29.040.111,00 | Kecamatan Barusjahe |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **100 %** | **17.038.400,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Barusjahe** | **-** | **29.040.111,00** | **Kecamatan Barusjahe** |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 38 Dokumen | 8.519.000,00 | - Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Barusjahe | | 13.890.111,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 38 Dokumen | 8.519.400,00 | - Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Barusjahe | | 15.150.000,00 | KECAMATAN BARUSJAHE |
| | | | | | **Kecamatan Tiga Panah** | | | **2.914.356.555,00** | | | | | | | | **3.529.525.173,00** | **Kecamatan Tiga Panah** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.914.356.555,00** | | | | | | | | **3.529.525.173,00** | **Kecamatan Tiga Panah** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **2.914.356.555,00** | | | | | | | | **3.529.525.173,00** | **Kecamatan Tiga Panah** |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 2.709.336.705,00 | | | | | | | - | 3.269.459.250,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **2.524.385.349,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kecamatan Tigapanah** | **-** | **3.100.520.531,00** | **Kecamatan Tiga Panah** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang/bula | 2.429.305.349,00 | - Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Tigapanah | | 3.017.960.531,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 95.080.000,00 | - Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Tigapanah | | 82.560.000,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **82.301.356,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.06 | **ASN SKPD Kecamatan Tigapanah** | **-** | **82.474.779,00** | **Kecamatan Tiga Panah** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1.144.670,00 | - Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.04 | PD.06 | ASN SKPD Kecamatan Tigapanah | | 1.067.514,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 16.521.200,00 | - Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.04 | PD.06 | ASN SKPD Kecamatan Tigapanah | | 18.498.855,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 5.722.486,00 | - Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.04 | PD.06 | ASN SKPD Kecamatan Tigapanah | | 7.612.410,00 | Kecamatan Tiga Panah |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 3.493.000,00 | - Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.04 | PD.06 | ASN SKPD Kecamatan Tigapanah | | 3.370.000,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6 Laporan | 1.494.000,00 | - Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.04 | PD.06 | ASN SKPD Kecamatan Tigapanah | | 1.500.000,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 233 Laporan | 53.926.000,00 | - Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.04 | PD.06 | ASN SKPD Kecamatan Tigapanah | | 50.426.000,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **67.140.000,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.06 | **ASN SKPD Kecamatan Tigapanah** | **-** | **63.640.000,00** | **Kecamatan Tiga Panah** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 19.200.000,00 | - Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.04 | PD.06 | ASN SKPD Kecamatan Tigapanah | | 13.560.000,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 3.000.000,00 | - Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.04 | PD.06 | ASN SKPD Kecamatan Tigapanah | | 5.140.000,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 44.940.000,00 | - Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.04 | PD.06 | ASN SKPD Kecamatan Tigapanah | | 44.940.000,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **35.510.000,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Tigapanah** | **-** | **22.823.940,00** | **Kecamatan Tiga Panah** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 35.510.000,00 | - Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Tigapanah | | 22.823.940,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 102.788.000,00 | | | | | | | - | 110.240.400,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **100 %** | **62.788.000,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.03 | **Masyarakat Kecamatan Tigapanah** | **-** | **62.720.400,00** | **Kecamatan Tiga Panah** |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 22.788.000,00 | - Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.03 | Masyarakat Kecamatan Tigapanah | | 41.720.400,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2 Dokumen | 40.000.000,00 | - Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.03 | Masyarakat Kecamatan Tigapanah | | 21.000.000,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | **100 %** | **40.000.000,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Tigapanah** | **-** | **47.520.000,00** | **Kecamatan Tiga Panah** |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 40.000.000,00 | - Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Tigapanah | | 47.520.000,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 11 kegiatan | 15.891.300,00 | | | | | | | - | 10.000.000,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **100 %** | **15.891.300,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Tigapanah** | **-** | **10.000.000,00** | **Kecamatan Tiga Panah** |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 15.891.300,00 | - Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Tigapanah | | 10.000.000,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 2/2/2 Perda/Perkada/Kegiatan | 26.340.550,00 | | | | | | | - | 50.901.200,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **100 %** | **26.340.550,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Tigapanah** | **-** | **50.901.200,00** | **Kecamatan Tiga Panah** |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 11.999.750,00 | - Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Tigapanah | | 26.560.400,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 2 Laporan | 14.340.800,00 | - Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Tigapanah | | 24.340.800,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | 1 Urusan | 50.000.000,00 | | | | | | | - | 62.924.323,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **100 %** | **50.000.000,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Tigapanah** | **-** | **62.924.323,00** | **Kecamatan Tiga Panah** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 200 Orang | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Tigapanah | | 62.924.323,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi | 26 Pemerintahan Desa | 10.000.000,00 | | | | | | | - | 26.000.000,00 | Kecamatan Tiga Panah |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **100 %** | **10.000.000,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Tigapanah** | **-** | **26.000.000,00** | **Kecamatan Tiga Panah** |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 58 Dokumen | 10.000.000,00 | - Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Tigapanah | | 26.000.000,00 | KECAMATAN TIGA PANAH |
| | | | | | **Kecamatan Merek** | | | **2.870.811.923,00** | | | | | | | | **2.888.260.015,00** | **Kecamatan Merek** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.870.811.923,00** | | | | | | | | **2.888.260.015,00** | **Kecamatan Merek** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **2.870.811.923,00** | | | | | | | | **2.888.260.015,00** | **Kecamatan Merek** |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 2.724.053.082,00 | | | | | | | - | 2.711.576.918,00 | Kecamatan Merek |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **2.538.547.151,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kantor Camat Merek** | **-** | **2.533.320.939,00** | **Kecamatan Merek** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bula | 2.469.307.151,00 | - Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kantor Camat Merek | | 2.481.180.939,00 | Kecamatan Merek |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 69.240.000,00 | - Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kantor Camat Merek | | 52.140.000,00 | Kecamatan Merek |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **68.095.931,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kantor Camat Merek** | **-** | **86.135.979,00** | **Kecamatan Merek** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 818.076,00 | - Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kantor Camat Merek | | 818.076,00 | Kecamatan Merek |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 15.448.030,00 | - Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kantor Camat Merek | | 58.196.225,00 | Kecamatan Merek |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 Paket | 1.999.999,00 | - Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kantor Camat Merek | | 3.051.954,00 | Kecamatan Merek |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 2.861.240,00 | - Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kantor Camat Merek | | 3.051.954,00 | Kecamatan Merek |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Laporan | 46.968.586,00 | - Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kantor Camat Merek | | 21.017.770,00 | Kecamatan Merek |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **81.900.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kantor Camat Merek** | **-** | **69.820.000,00** | **Kecamatan Merek** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 7.200.000,00 | - Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kantor Camat Merek | | 10.300.000,00 | Kecamatan Merek |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 74.700.000,00 | - Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kantor Camat Merek | | 59.520.000,00 | Kecamatan Merek |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **35.510.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kantor Camat Merek** | **-** | **22.300.000,00** | **Kecamatan Merek** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 35.510.000,00 | - Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kantor Camat Merek | | 22.300.000,00 | Kecamatan Merek |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | - | 33.188.400,00 | | | | | | | - | 67.570.000,00 | Kecamatan Merek |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **-** | **-** | **16.902.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Merek** | **-** | **20.050.000,00** | **Kecamatan Merek** |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 16.902.000,00 | - Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Merek | | 20.050.000,00 | Kecamatan Merek |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **"Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan"** | **100 %** | **16.286.400,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Merek** | **-** | **47.520.000,00** | **Kecamatan Merek** |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 8 Laporan | 16.286.400,00 | - Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Merek | | 47.520.000,00 | Kecamatan Merek |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 6 kegiatan | 61.276.000,00 | | | | | | | - | 5.000.000,00 | Kecamatan Merek |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **100 %** | **61.276.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Merek** | **-** | **5.000.000,00** | **Kecamatan Merek** |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 3 Laporan | 61.276.000,00 | - Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Merek | | 5.000.000,00 | Kecamatan Merek |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | 1 Urusan | 52.294.441,00 | | | | | | | - | 104.113.097,00 | Kecamatan Merek |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **100 %** | **52.294.441,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Merek** | **-** | **104.113.097,00** | **Kecamatan Merek** |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 250 Orang | 52.294.441,00 | - Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Merek | | 104.113.097,00 | KECAMATAN MEREK |
| | | | | | **Kecamatan Munte** | | | **2.394.076.754,00** | | | | | | | | **2.394.076.754,00** | **Kecamatan Munte** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.394.076.754,00** | | | | | | | | **2.394.076.754,00** | **Kecamatan Munte** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **2.394.076.754,00** | | | | | | | | **2.394.076.754,00** | **Kecamatan Munte** |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat<br>Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks<br>84,00 Indeks | 2.277.477.509,00 | | | | | | | - | 2.277.477.509,00 | Kecamatan Munte |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **2.111.308.250,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kecamatan Munte** | **-** | **2.111.308.250,00** | **Kecamatan Munte** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/bula | 2.028.868.250,00 | - Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Munte | | 2.028.868.250,00 | Kecamatan Munte |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 82.440.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Munte | | 82.440.000,00 | Kecamatan Munte |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **63.079.259,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kecamatan Munte** | **-** | **63.079.259,00** | **Kecamatan Munte** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1.927.005,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Munte | | 1.927.005,00 | Kecamatan Munte |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 15.018.270,00 | - Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Munte | | 15.018.270,00 | Kecamatan Munte |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 4.119.084,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Munte | | 4.119.084,00 | Kecamatan Munte |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 4.714.900,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Munte | | 4.714.900,00 | Kecamatan Munte |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 37.300.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Munte | | 37.300.000,00 | Kecamatan Munte |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **67.580.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kecamatan Munte** | **-** | **67.580.000,00** | **Kecamatan Munte** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 19.800.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Munte | | 19.800.000,00 | Kecamatan Munte |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 2.840.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Munte | | 2.840.000,00 | Kecamatan Munte |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 44.940.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Munte | | 44.940.000,00 | Kecamatan Munte |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **35.510.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kecamatan Munte** | **-** | **35.510.000,00** | **Kecamatan Munte** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 35.510.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Munte | | 35.510.000,00 | Kecamatan Munte |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indek Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 56.668.000,00 | | | | | | | - | 56.668.000,00 | Kecamatan Munte |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **"Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan"** | **100 %** | **32.382.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Munte** | **-** | **32.382.000,00** | **Kecamatan Munte** |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 17.382.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Munte | | 17.382.000,00 | Kecamatan Munte |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Munte | | 15.000.000,00 | Kecamatan Munte |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **100 %** | **24.286.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Munte** | **-** | **24.286.000,00** | **Kecamatan Munte** |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 24.286.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Munte | | 24.286.000,00 | Kecamatan Munte |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 7 Kegiatan | 15.817.440,00 | | | | | | | - | 15.817.440,00 | Kecamatan Munte |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **100 %** | **15.817.440,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Munte** | **-** | **15.817.440,00** | **Kecamatan Munte** |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 92.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Munte | | 92.000,00 | Kecamatan Munte |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 15.725.440,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Munte | | 15.725.440,00 | Kecamatan Munte |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 2/2/2 Perda/Perkada/Kegiatan | 12.524.000,00 | | | | | | | - | 12.524.000,00 | Kecamatan Munte |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**<br>**Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **100 %**<br>**100 %** | **12.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Munte** | **-** | **12.000.000,00** | **Kecamatan Munte** |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 12.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Munte | | 12.000.000,00 | Kecamatan Munte |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **7** | **01** | **04** | **2.02** | | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**<br>**Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **100 %**<br>**100 %** | **524.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Munte** | **-** | **524.000,00** | **Kecamatan Munte** |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 Laporan | 524.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Munte | | 524.000,00 | Kecamatan Munte |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan kecamatan | 1 Urusan | 22.589.805,00 | | | | | | | - | 22.589.805,00 | Kecamatan Munte |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **100 %** | **22.589.805,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Munte** | **-** | **22.589.805,00** | **Kecamatan Munte** |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 0 Orang | 22.589.805,00 | - Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Munte | | 22.589.805,00 | Kecamatan Munte |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina dan Diawasi | 22 Pemerintahan Desa | 9.000.000,00 | | | | | | | - | 9.000.000,00 | Kecamatan Munte |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **100 %** | **9.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kecamatan Munte** | **-** | **9.000.000,00** | **Kecamatan Munte** |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Munte | | 6.000.000,00 | KECAMATAN MUNTE |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Munte | | 3.000.000,00 | KECAMATAN MUNTE |
| | | | | | **Kecamatan Juhar** | | | **2.915.395.290,00** | | | | | | | | **5.824.099.454,00** | **Kecamatan Juhar** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.915.395.290,00** | | | | | | | | **5.824.099.454,00** | **Kecamatan Juhar** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **2.915.395.290,00** | | | | | | | | **5.824.099.454,00** | **Kecamatan Juhar** |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 2.785.109.575,00 | | | | | | | - | 5.409.933.739,00 | Kecamatan Juhar |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah** | **100 %** | **2.553.628.522,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **ASN Kecamatan** | **-** | **4.993.856.956,00** | **Kecamatan Juhar** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 27 Orang/bulan | 2.477.188.522,00 | - Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | | PD.03 | ASN Kecamatan | | 4.721.351.356,00 | Kecamatan Juhar |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 76.440.000,00 | - Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | ASN Kecamatan | | 272.505.600,00 | Kecamatan Juhar |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **-** | **-** | **94.111.053,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **-** | **-** | **236.086.383,00** | **Kecamatan Juhar** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 15 Paket | 1.267.997,00 | - Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | - | | 2.678.400,00 | Kecamatan Juhar |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 22.351.465,00 | - Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | - | | 54.473.583,00 | Kecamatan Juhar |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 3.383.996,00 | - Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | - | | 8.138.880,00 | Kecamatan Juhar |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 4.947.595,00 | - Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | - | | 11.543.040,00 | Kecamatan Juhar |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 2.160.000,00 | - Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | - | | 3.732.480,00 | Kecamatan Juhar |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 400 Laporan | 60.000.000,00 | - Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | - | | 155.520.000,00 | Kecamatan Juhar |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **100 %** | **103.900.000,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **ASN Kecamatan** | **-** | **125.904.000,00** | **Kecamatan Juhar** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12.000.000,00 | - Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | ASN Kecamatan | | 31.104.000,00 | Kecamatan Juhar |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Laporan | 1.420.000,00 | - Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | ASN Kecamatan | | 4.320.000,00 | Kecamatan Juhar |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 90.480.000,00 | - Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | ASN Kecamatan | | 90.480.000,00 | Kecamatan Juhar |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | **100 %** | **33.470.000,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **ASN Kecamatan** | **-** | **54.086.400,00** | **Kecamatan Juhar** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 33.470.000,00 | - Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | | PD.03 | ASN Kecamatan | | 54.086.400,00 | Kecamatan Juhar |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 87 Indeks | 96.292.000,00 | | | | | | | - | 273.567.513,00 | Kecamatan Juhar |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan** | **100 %** | **57.412.000,00** | | | PN.03 | | PD.03 | **ASN Kecamatan** | **-** | **128.000.793,00** | **Kecamatan Juhar** |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 Laporan | 20.412.000,00 | - Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.03 | ASN Kecamatan | | 66.534.912,00 | Kecamatan Juhar |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2 Dokumen | 37.000.000,00 | - Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.03 | ASN Kecamatan | | 61.465.881,00 | Kecamatan Juhar |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan** | **100 %** | **38.880.000,00** | | | PN.03 | | PD.03 | **ASN Kecamatan** | **-** | **145.566.720,00** | **Kecamatan Juhar** |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5 Laporan | 38.880.000,00 | - Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.03 | ASN Kecamatan | | 145.566.720,00 | Kecamatan Juhar |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | 1 Urusan | 33.993.715,00 | | | | | | | - | 140.598.202,00 | Kecamatan Juhar |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah** | **100 %** | **33.993.715,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **ASN Kecamatan** | **-** | **140.598.202,00** | **Kecamatan Juhar** |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 250 Orang | 33.993.715,00 | - Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | | PD.03 | ASN Kecamatan | | 140.598.202,00 | KECAMATAN JUHAR |
| | | | | | **Kecamatan Tiga Binanga** | | | **2.632.816.633,00** | | | | | | | | **3.031.048.188,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.632.816.633,00** | | | | | | | | **3.031.048.188,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **2.632.816.633,00** | | | | | | | | **3.031.048.188,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 2.499.709.552,00 | | | | | | | - | 2.868.130.399,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **2.232.486.366,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai Kecamatan Tigabinanga** | **-** | **2.574.383.697,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang/bula n | 2.089.086.366,00 | - Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Tigabinanga | | 2.392.883.697,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 42 Dokumen | 143.400.000,00 | - Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Tigabinanga | | 181.500.000,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100 %** | **84.861.279,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai Kecamatan Tigabinanga** | **-** | **93.347.405,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 901.113,00 | - Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Tigabinanga | | 991.224,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 30.582.124,00 | - Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Tigabinanga | | 33.640.336,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1.949.318,00 | - Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Tigabinanga | | 2.144.249,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1.897.724,00 | - Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Tigabinanga | | 2.087.496,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 233 Laporan | 49.531.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Tigabinanga | | 54.484.100,00 | Kecamatan Tiga Binanga |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 %** | **1.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai Kecamatan Tigabinanga** | **-** | **2.000.000,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1.000.000,00 | - Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Tigabinanga | | 2.000.000,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **136.361.907,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai Kecamatan Tigabinanga** | **-** | **148.899.297,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 23.953.907,00 | - Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Tigabinanga | | 26.349.297,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 1.420.000,00 | - Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Tigabinanga | | 1.562.000,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 110.988.000,00 | - Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Tigabinanga | | 120.988.000,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **45.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai Kecamatan Tigabinanga** | **-** | **49.500.000,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 45.000.000,00 | - Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Tigabinanga | | 49.500.000,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85 Indeks | 57.437.081,00 | | | | | | | - | 79.680.789,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **100 %** | **35.837.081,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Tigabinanga** | **-** | **55.920.789,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 20.304.521,00 | - Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Tigabinanga | | 22.334.973,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3 Dokumen | 15.532.560,00 | - Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Tigabinanga | | 33.585.816,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **100 %** | **21.600.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Tigabinanga** | **-** | **23.760.000,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 21.600.000,00 | - Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Tigabinanga | | 23.760.000,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 2/2/2 Perda/Perkada/Kegiatan | 12.000.000,00 | | | | | | | - | 13.200.000,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **100 %** | **12.000.000,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.03 | **Masyarakat Kecamatan Tigabinanga** | **-** | **13.200.000,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 5 Laporan | 12.000.000,00 | - Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.02 | PP.04 | PD.03 | Masyarakat Kecamatan Tigabinanga | | 13.200.000,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | 2 Urusan | 51.670.000,00 | | | | | | | - | 56.837.000,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **100 %** | **51.670.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Tigabinanga** | **-** | **56.837.000,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 200 Orang | 51.670.000,00 | - Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Tigabinanga | | 56.837.000,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi | 20 Pemerintah Desa | 12.000.000,00 | | | | | | | - | 13.200.000,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **100 %** | **12.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Tigabinanga** | **-** | **13.200.000,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 19 Dokumen | 10.000.000,00 | - Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Tigabinanga | | 11.000.000,00 | KECAMATAN TIGA BINANGA |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | 2.000.000,00 | - Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Tigabinanga | | 2.200.000,00 | KECAMATAN TIGA BINANGA |
| | | | | | **Kelurahan Tiga Binanga** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **912.020.000,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **912.020.000,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **900.000.000,00** | | | | | | | | **912.020.000,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | - | 900.000.000,00 | | | | | | | - | 912.020.000,00 | Kecamatan Tiga Binanga |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **-** | **-** | **900.000.000,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kelurahan Tigabinanga** | **-** | **912.020.000,00** | **Kecamatan Tiga Binanga** |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | 779.800.000,00 | - Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kelurahan Tigabinanga | | 779.800.000,00 | KELURAHAN TIGA BINANGA |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 6 Pokmas / Ormas | 120.200.000,00 | - Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kelurahan Tigabinanga | | 132.220.000,00 | KELURAHAN TIGA BINANGA |
| | | | | | **Kecamatan Lau Baleng** | | | **2.341.452.471,00** | | | | | | | | **2.341.472.471,00** | **Kecamatan Lau Baleng** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.341.452.471,00** | | | | | | | | **2.341.472.471,00** | **Kecamatan Lau Baleng** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **2.341.452.471,00** | | | | | | | | **2.341.472.471,00** | **Kecamatan Lau Baleng** |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 2.243.406.535,00 | | | | | | | - | 2.243.426.535,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **2.047.668.007,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kecamatan Lau Baleng** | **-** | **2.047.668.007,00** | **Kecamatan Lau Baleng** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 18 Orang/bula | 1.965.168.007,00 | - Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Lau Baleng | | 1.965.168.007,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 82.500.000,00 | - Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Lau Baleng | | 82.500.000,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **78.728.528,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kecamatan Lau Baleng** | **-** | **78.748.528,00** | **Kecamatan Lau Baleng** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 28 Paket | 2.634.667,00 | - Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Lau Baleng | | 2.634.667,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 25 Paket | 17.154.727,00 | - Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Lau Baleng | | 17.174.727,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 15 Paket | 3.346.334,00 | - Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Lau Baleng | | 3.346.334,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 20 Paket | 2.732.800,00 | - Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Lau Baleng | | 2.732.800,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 354 Laporan | 52.860.000,00 | - Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Lau Baleng | | 52.860.000,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **82.540.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kecamatan Lau Baleng** | **-** | **82.540.000,00** | **Kecamatan Lau Baleng** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 21.000.000,00 | - Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Lau Baleng | | 21.000.000,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | 1.420.000,00 | - Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Lau Baleng | | 1.420.000,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 48 Laporan | 60.120.000,00 | - Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Lau Baleng | | 60.120.000,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **34.470.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kecamatan Lau Baleng** | **-** | **34.470.000,00** | **Kecamatan Lau Baleng** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 34.470.000,00 | - Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Lau Baleng | | 34.470.000,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 52.742.669,00 | | | | | | | - | 52.742.669,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **100 %** | **29.742.669,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Lau Baleng** | **-** | **29.742.669,00** | **Kecamatan Lau Baleng** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 14.392.800,00 | - Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Lau Baleng | | 14.392.800,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2 Dokumen | 15.349.869,00 | - Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Lau Baleng | | 15.349.869,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **100 %** | **23.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Lau Baleng** | **-** | **23.000.000,00** | **Kecamatan Lau Baleng** |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 23.000.000,00 | - Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Lau Baleng | | 23.000.000,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 6 kegiatan | 12.334.417,00 | | | | | | | - | 12.334.417,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **100 %** | **12.334.417,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Lau Baleng** | **-** | **12.334.417,00** | **Kecamatan Lau Baleng** |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 12.334.417,00 | - Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Lau Baleng | | 12.334.417,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 2/2/3 Perda/Perkada/Kegiatan | 1.150.000,00 | | | | | | | - | 1.150.000,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| **7** | **01** | **04** | **2.02** | | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **100 %** | **1.150.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat Kecamatan Lau Baleng** | **-** | **1.150.000,00** | **Kecamatan Lau Baleng** |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 Laporan | 1.150.000,00 | - Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kecamatan Lau Baleng | | 1.150.000,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | 1 Urusan | 31.818.850,00 | | | | | | | - | 31.818.850,00 | Kecamatan Lau Baleng |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **100 %** | **31.818.850,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Lau Baleng** | **-** | **31.818.850,00** | **Kecamatan Lau Baleng** |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 200 Orang | 31.818.850,00 | - Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Lau Baleng | | 31.818.850,00 | KECAMATAN LAU BALENG |
| | | | | | **Kecamatan Mardinding** | | | **2.240.250.764,00** | | | | | | | | **2.240.250.764,00** | **Kecamatan Mardinding** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.240.250.764,00** | | | | | | | | **2.240.250.764,00** | **Kecamatan Mardinding** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **2.240.250.764,00** | | | | | | | | **2.240.250.764,00** | **Kecamatan Mardinding** |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks<br>89 Indeks | 2.117.833.694,00 | | | | | | | - | 2.117.833.694,00 | Kecamatan Mardinding |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **1.955.116.446,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kantor Camat Mardingding** | **-** | **1.955.116.446,00** | **Kecamatan Mardinding** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 18 Orang/bulan | 1.886.716.446,00 | - Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kantor Camat Mardingding | | 1.886.716.446,00 | Kecamatan Mardinding |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 68.400.000,00 | - Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kantor Camat Mardingding | | 68.400.000,00 | Kecamatan Mardinding |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **71.887.248,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat dan ASN** | **-** | **71.887.248,00** | **Kecamatan Mardinding** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 21 Paket | 1.224.663,00 | - Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat dan ASN | | 1.224.663,00 | Kecamatan Mardinding |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1119 Paket | 15.562.320,00 | - Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | | PD.06 | Masyarakat dan ASN | | 15.562.320,00 | Kecamatan Mardinding |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 64 Paket | 2.031.667,00 | - Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | | PD.06 | Masyarakat dan ASN | | 2.031.667,00 | Kecamatan Mardinding |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1220 Paket | 2.370.598,00 | - Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat dan ASN | | 2.370.598,00 | Kecamatan Mardinding |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6 Laporan | 1.480.000,00 | - Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat dan ASN | | 1.480.000,00 | Kecamatan Mardinding |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | 49.218.000,00 | - Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat dan ASN | | 49.218.000,00 | Kecamatan Mardinding |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined** | **100 % undefined undefined** | **55.320.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat dan ASN** | **-** | **55.320.000,00** | **Kecamatan Mardinding** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 9.000.000,00 | - Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat dan ASN | | 9.000.000,00 | Kecamatan Mardinding |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 1.380.000,00 | - Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat dan ASN | | 1.380.000,00 | Kecamatan Mardinding |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 44.940.000,00 | - Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat dan ASN | | 44.940.000,00 | Kecamatan Mardinding |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **35.510.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN** | **-** | **35.510.000,00** | **Kecamatan Mardinding** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 35.510.000,00 | - Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN | | 35.510.000,00 | Kecamatan Mardinding |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 71.537.470,00 | | | | | | | - | 71.537.470,00 | Kecamatan Mardinding |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **100 %** | **39.813.270,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat** | **-** | **39.813.270,00** | **Kecamatan Mardinding** |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 Laporan | 12.338.777,00 | - Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat | | 12.338.777,00 | Kecamatan Mardinding |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3 Dokumen | 27.474.493,00 | - Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | | PD.06 | Masyarakat | | 27.474.493,00 | Kecamatan Mardinding |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **100 %** | **31.724.200,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat** | **-** | **31.724.200,00** | **Kecamatan Mardinding** |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 24 Laporan | 31.724.200,00 | - Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat | | 31.724.200,00 | Kecamatan Mardinding |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 2/2/3 Perda/Perkada/Kegiatan | 3.480.000,00 | | | | | | | - | 3.480.000,00 | Kecamatan Mardinding |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **100 %** | **2.000.000,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat** | **-** | **2.000.000,00** | **Kecamatan Mardinding** |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | - Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat | | 2.000.000,00 | Kecamatan Mardinding |
| **7** | **01** | **04** | **2.02** | | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **100 %** | **1.480.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat** | **-** | **1.480.000,00** | **Kecamatan Mardinding** |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 6 Laporan | 1.480.000,00 | - Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat | | 1.480.000,00 | Kecamatan Mardinding |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan | 1 Urusan | 35.431.600,00 | | | | | | | - | 35.431.600,00 | Kecamatan Mardinding |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **100 %** | **35.431.600,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat** | **-** | **35.431.600,00** | **Kecamatan Mardinding** |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 400 Orang | 35.431.600,00 | - Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat | | 35.431.600,00 | Kecamatan Mardinding |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah pemerintah desa yang dibina dan diawasi | 12 pemerintahan desa | 11.968.000,00 | | | | | | | - | 11.968.000,00 | Kecamatan Mardinding |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** | **100 %** | **11.968.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat** | **-** | **11.968.000,00** | **Kecamatan Mardinding** |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 24 Dokumen | 5.984.000,00 | - Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat | | 5.984.000,00 | KECAMATAN MARDINDING |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 12 Dokumen | 5.984.000,00 | - Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat | | 5.984.000,00 | KECAMATAN MARDINDING |
| | | | | | **Kecamatan Payung** | | | **2.094.521.409,00** | | | | | | | | **2.031.517.885,00** | **Kecamatan Payung** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.094.521.409,00** | | | | | | | | **2.031.517.885,00** | **Kecamatan Payung** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **2.094.521.409,00** | | | | | | | | **2.031.517.885,00** | **Kecamatan Payung** |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 1.978.272.065,00 | | | | | | | - | 1.906.864.170,00 | Kecamatan Payung |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **1.780.775.049,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **ASN Kecamatan Payung** | **-** | **1.715.537.363,00** | **Kecamatan Payung** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 15 Orang/bulan | 1.709.375.049,00 | - Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | ASN Kecamatan Payung | | 1.668.707.363,00 | Kecamatan Payung |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 71.400.000,00 | - Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Payung | | 46.830.000,00 | Kecamatan Payung |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **54.637.016,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kecamatan Payung** | **-** | **61.436.807,00** | **Kecamatan Payung** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 15 Paket | 3.383.008,00 | - Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Payung | | 4.342.505,00 | Kecamatan Payung |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 600 Paket | 9.799.530,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Payung | | 20.769.714,00 | Kecamatan Payung |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 84 Paket | 5.698.328,00 | - Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Payung | | 5.712.438,00 | Kecamatan Payung |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1283 Paket | 2.612.150,00 | - Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Payung | | 2.612.150,00 | Kecamatan Payung |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 1.500.000,00 | - Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Payung | | 1.860.000,00 | Kecamatan Payung |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 Laporan | 31.644.000,00 | - Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Payung | | 26.140.000,00 | Kecamatan Payung |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **99.690.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kecamatan Payung** | **-** | **100.640.000,00** | **Kecamatan Payung** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 22.200.000,00 | - Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Payung | | 16.500.000,00 | Kecamatan Payung |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 2.190.000,00 | - Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Payung | | 2.840.000,00 | Kecamatan Payung |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 75.300.000,00 | - Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Payung | | 81.300.000,00 | Kecamatan Payung |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 Unit** | **43.170.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kecamatan Payung** | **-** | **29.250.000,00** | **Kecamatan Payung** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 38.170.000,00 | - Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Payung | | 20.125.000,00 | Kecamatan Payung |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 5.000.000,00 | - Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Payung | | 9.125.000,00 | Kecamatan Payung |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 87 Indeks | 51.399.940,00 | | | | | | | - | 57.317.548,00 | Kecamatan Payung |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **100 %** | **27.305.000,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Payung** | **-** | **36.221.548,00** | **Kecamatan Payung** |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 12.310.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Payung | | 15.720.400,00 | Kecamatan Payung |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 14.995.000,00 | - Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Payung | | 20.501.148,00 | Kecamatan Payung |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **100 %** | **19.096.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Payung** | **-** | **19.096.000,00** | **Kecamatan Payung** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 19.096.000,00 | - Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Payung | | 19.096.000,00 | Kecamatan Payung |
| **7** | **01** | **02** | **2.04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **100 %** | **4.998.940,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Payung** | **-** | **2.000.000,00** | **Kecamatan Payung** |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 1 Laporan | 4.998.940,00 | - Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Payung | | 2.000.000,00 | Kecamatan Payung |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 Kegiatan | 23.987.100,00 | | | | | | | - | 23.987.100,00 | Kecamatan Payung |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **100 %** | **23.987.100,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Payung** | **-** | **23.987.100,00** | **Kecamatan Payung** |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 5.000.000,00 | - Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Payung | | 5.000.000,00 | Kecamatan Payung |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | 18.987.100,00 | - Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Payung | | 18.987.100,00 | Kecamatan Payung |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penegakan Perda dan Perkada Penegakan Perda dan Perkada | 100 % 2/2/2 Perda/Perkada/Kegiatan | 11.980.000,00 | | | | | | | - | 11.980.000,00 | Kecamatan Payung |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**<br>**Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **100 %**<br>**100 %** | **11.980.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat Kecamatan Payung** | **-** | **11.980.000,00** | **Kecamatan Payung** |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 11.980.000,00 | - Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kecamatan Payung | | 11.980.000,00 | Kecamatan Payung |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | 1 Urusan | 20.882.304,00 | | | | | | | - | 26.879.967,00 | Kecamatan Payung |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **100 %** | **20.882.304,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Payung** | **-** | **26.879.967,00** | **Kecamatan Payung** |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 150 Orang | 20.882.304,00 | - Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Payung | | 26.879.967,00 | Kecamatan Payung |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi | 8 Pemerintahan Desa | 8.000.000,00 | | | | | | | - | 4.489.100,00 | Kecamatan Payung |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **"Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa"** | **100 %** | **8.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Payung** | **-** | **4.489.100,00** | **Kecamatan Payung** |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 38 Dokumen | 8.000.000,00 | - Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Payung | | 4.489.100,00 | KECAMATAN PAYUNG |
| | | | | | **Kecamatan Simpang Empat** | | | **2.949.635.300,00** | | | | | | | | **2.851.497.856,00** | **Kecamatan Simpang Empat** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.949.635.300,00** | | | | | | | | **2.851.497.856,00** | **Kecamatan Simpang Empat** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **2.949.635.300,00** | | | | | | | | **2.851.497.856,00** | **Kecamatan Simpang Empat** |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | 2.808.122.346,00 | | | | | | | - | 2.709.984.902,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **-** | **-** | **2.618.287.249,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.06 | **Kantor Camat SImpang Empat** | **-** | **2.520.149.805,00** | **Kecamatan Simpang Empat** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 24 Orang/bula | 2.534.137.249,00 | - Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Kantor Camat SImpang Empat | | 2.435.999.805,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 84.150.000,00 | - Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Kantor Camat SImpang Empat | | 84.150.000,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **-** | **-** | **74.125.097,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.06 | **Kantor Camat SImpang Empat** | **-** | **74.125.097,00** | **Kecamatan Simpang Empat** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 36 Paket | 1.206.902,00 | - Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Kantor Camat SImpang Empat | | 1.206.902,00 | Kecamatan Simpang Empat |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 602 Paket | 16.383.995,00 | - Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Kantor Camat SImpang Empat | | 16.383.995,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 2.103.100,00 | - Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Kantor Camat SImpang Empat | | 2.103.100,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 3.229.100,00 | - Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Kantor Camat SImpang Empat | | 3.229.100,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 204 Laporan | 51.202.000,00 | - Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Kantor Camat SImpang Empat | | 51.202.000,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **-** | **-** | **80.200.000,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.06 | **Kantor Camat SImpang Empat** | **-** | **80.200.000,00** | **Kecamatan Simpang Empat** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 14.400.000,00 | - Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Kantor Camat SImpang Empat | | 14.400.000,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 5.680.000,00 | - Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Kantor Camat SImpang Empat | | 5.680.000,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 60.120.000,00 | - Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Kantor Camat SImpang Empat | | 60.120.000,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **-** | **-** | **35.510.000,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.06 | **Kantor Camat SImpang Empat** | **-** | **35.510.000,00** | **Kecamatan Simpang Empat** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 35.510.000,00 | - Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Kantor Camat SImpang Empat | | 35.510.000,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | - | 76.368.000,00 | | | | | | | - | 76.368.000,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **-** | **-** | **30.768.000,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.06 | **Kantor Camat SImpang Empat** | **-** | **30.768.000,00** | **Kecamatan Simpang Empat** |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 Laporan | 15.768.000,00 | - Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Kantor Camat SImpang Empat | | 15.768.000,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | - Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Kantor Camat SImpang Empat | | 15.000.000,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **-** | **-** | **45.600.000,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.06 | **Kantor Camat SImpang Empat** | **-** | **45.600.000,00** | **Kecamatan Simpang Empat** |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 45.600.000,00 | - Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Kantor Camat SImpang Empat | | 45.600.000,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | - | 11.150.000,00 | | | | | | | - | 11.150.000,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **-** | **-** | **11.150.000,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.06 | **Kantor Camat SImpang Empat** | **-** | **11.150.000,00** | **Kecamatan Simpang Empat** |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 11.150.000,00 | - Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Kantor Camat SImpang Empat | | 11.150.000,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | - | - | 53.994.954,00 | | | | | | | - | 53.994.954,00 | Kecamatan Simpang Empat |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **-** | **-** | **53.994.954,00** | | | #N/A | PP.04 | PD.06 | **Kantor Camat SImpang Empat** | **-** | **53.994.954,00** | **Kecamatan Simpang Empat** |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 300 Orang | 53.994.954,00 | - Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | #N/A | PP.04 | PD.06 | Kantor Camat SImpang Empat | | 53.994.954,00 | KECAMATAN SIMPANG EMPAT |
| | | | | | **Kecamatan Kutabuluh** | | | **2.464.188.157,00** | | | | | | | | **3.393.741.859,00** | **Kecamatan Kutabuluh** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.464.188.157,00** | | | | | | | | **3.393.741.859,00** | **Kecamatan Kutabuluh** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **2.464.188.157,00** | | | | | | | | **3.393.741.859,00** | **Kecamatan Kutabuluh** |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 2.325.293.157,00 | | | | | | | - | 3.194.741.859,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **2.108.018.759,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **Kecamatan Kutabuluh** | **-** | **2.996.503.319,00** | **Kecamatan Kutabuluh** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 18 Orang/bula n | 2.029.898.759,00 | - Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Kutabuluh | | 2.906.503.319,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 78.120.000,00 | - Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Kutabuluh | | 90.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **69.454.398,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **Kecamatan Kutabuluh** | **-** | **95.378.540,00** | **Kecamatan Kutabuluh** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 1.396.670,00 | - Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Kutabuluh | | 2.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 23 Paket | 19.589.657,00 | - Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Kutabuluh | | 10.378.540,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 13 Paket | 5.354.121,00 | - Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Kutabuluh | | 4.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 1.641.950,00 | - Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Kutabuluh | | 4.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 222 Laporan | 41.472.000,00 | - Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Kutabuluh | | 75.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 %** | **50.000.000,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **Kecamatan Kutabuluh** | **-** | **14.920.000,00** | **Kecamatan Kutabuluh** |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 50.000.000,00 | - Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Kutabuluh | | 14.920.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **56.950.000,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **Kecamatan Kutabuluh** | **-** | **60.940.000,00** | **Kecamatan Kutabuluh** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 17.940.000,00 | - Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Kutabuluh | | 14.400.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Laporan | 9.250.000,00 | - Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Kutabuluh | | 1.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 29.760.000,00 | - Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Kutabuluh | | 45.540.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **40.870.000,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **Kecamatan Kutabuluh** | **-** | **27.000.000,00** | **Kecamatan Kutabuluh** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | 40.870.000,00 | - Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Kutabuluh | | 27.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 83.220.000,00 | | | | | | | - | 114.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **"Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan"** | **100 %** | **35.220.000,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **Kecamatan Kutabuluh** | **-** | **87.000.000,00** | **Kecamatan Kutabuluh** |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 Laporan | 15.120.000,00 | - Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Kutabuluh | | 37.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12 Dokumen | 20.100.000,00 | - Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Kutabuluh | | 50.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **100 %** | **48.000.000,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **Kecamatan Kutabuluh** | **-** | **27.000.000,00** | **Kecamatan Kutabuluh** |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 48.000.000,00 | - Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Kutabuluh | | 27.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 2 Kegiatan | 4.800.000,00 | | | | | | | - | 5.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **100 %** | **4.800.000,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **Kecamatan Kutabuluh** | **-** | **5.000.000,00** | **Kecamatan Kutabuluh** |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan | 4.800.000,00 | - Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Kutabuluh | | 5.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Perda dan Perkada<br>Jumlah Penegakan Perda Dan Perkada<br>Penegakan Perda dan Perkada | 2 Perda dan Perkada<br>2 Perda Dan Perkada<br>2/2/2 Perda/Perkada/Kegiatan | 6.200.000,00 | | | | | | | - | 20.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **100 %** | **6.200.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Kecamatan Kutabuluh** | **-** | **20.000.000,00** | **Kecamatan Kutabuluh** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan | 6.200.000,00 | - Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Kecamatan Kutabuluh | | 20.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan | 1 Urusan | 35.075.000,00 | | | | | | | - | 50.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **100 %** | **35.075.000,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **Kecamatan Kutabuluh** | **-** | **50.000.000,00** | **Kecamatan Kutabuluh** |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 650 Orang | 35.075.000,00 | - Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Kutabuluh | | 50.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi | 16 Pemerintah Desa | 9.600.000,00 | | | | | | | - | 10.000.000,00 | Kecamatan Kutabuluh |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **100 %** | **9.600.000,00** | | | PN.06 | PP.04 | PD.06 | **Kecamatan Kutabuluh** | **-** | **10.000.000,00** | **Kecamatan Kutabuluh** |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan | 9.600.000,00 | - Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.06 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Kutabuluh | | 10.000.000,00 | KECAMATAN KUTABULUH |
| | | | | | **Kecamatan Dolat Rayat** | | | **1.897.943.427,00** | | | | | | | | **2.016.522.642,00** | **Kecamatan Dolat Rayat** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **1.897.943.427,00** | | | | | | | | **2.016.522.642,00** | **Kecamatan Dolat Rayat** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **1.897.943.427,00** | | | | | | | | **2.016.522.642,00** | **Kecamatan Dolat Rayat** |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 1.816.191.720,00 | | | | | | | - | 1.934.859.077,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **1.623.978.483,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kecamatan Dolat Rayat** | **-** | **1.751.013.801,00** | **Kecamatan Dolat Rayat** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 15 Orang/bulan | 1.562.778.483,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Dolat Rayat | | 1.681.773.801,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 92 Dokumen | 61.200.000,00 | - Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Dolat Rayat | | 69.240.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **56.799.326,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kecamatan Dolat Rayat** | **-** | **50.815.276,00** | **Kecamatan Dolat Rayat** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 27 Paket | 9.618.675,00 | - Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Dolat Rayat | | 7.887.375,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 14 Paket | 2.054.671,00 | - Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Dolat Rayat | | 1.999.901,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 4.565.980,00 | - Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Dolat Rayat | | 2.500.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 216 Laporan | 40.560.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Dolat Rayat | | 38.428.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **102.533.990,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kecamatan Dolat Rayat** | **-** | **114.280.000,00** | **Kecamatan Dolat Rayat** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 24.393.990,00 | - Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Dolat Rayat | | 19.800.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 2.840.000,00 | - Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Dolat Rayat | | 4.000.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 75.300.000,00 | - Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Dolat Rayat | | 90.480.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **32.879.921,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **ASN Kecamatan Dolat Rayat** | **-** | **18.750.000,00** | **Kecamatan Dolat Rayat** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 32.879.921,00 | - Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | ASN Kecamatan Dolat Rayat | | 18.750.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 40.976.000,00 | | | | | | | - | 35.184.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **100 %** | **24.776.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat** | **-** | **18.984.000,00** | **Kecamatan Dolat Rayat** |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 9.826.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat | | 9.000.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 14.950.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat | | 9.984.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **100 %** | **16.200.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat** | **-** | **16.200.000,00** | **Kecamatan Dolat Rayat** |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6 Laporan | 16.200.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat | | 16.200.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 5 kegiatan | 15.000.000,00 | | | | | | | - | 15.000.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **100 %** | **15.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat** | **-** | **15.000.000,00** | **Kecamatan Dolat Rayat** |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6 Laporan | 15.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat | | 15.000.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Penegakan Perda Dan Perkada | 2 Perda Dan Perkada | 500.000,00 | | | | | | | - | 12.000.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| **7** | **01** | **04** | **2.02** | | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **100 %** | **500.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat** | **-** | **12.000.000,00** | **Kecamatan Dolat Rayat** |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 12 Laporan | 500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat | | 12.000.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan | 1 Urusan | 24.275.707,00 | | | | | | | - | 9.479.565,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan** | **100 %** | **24.275.707,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat** | **-** | **9.479.565,00** | **Kecamatan Dolat Rayat** |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 200 Orang | 24.275.707,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat | | 9.479.565,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi | 7 Pemerintahan Desa | 1.000.000,00 | | | | | | | - | 10.000.000,00 | Kecamatan Dolat Rayat |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **100 %** | **1.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat** | **-** | **10.000.000,00** | **Kecamatan Dolat Rayat** |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 14 Dokumen | 500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat | | 5.000.000,00 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 14 Dokumen | 500.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat | | 5.000.000,00 | KECAMATAN DOLAT RAYAT |
| | | | | | **Kecamatan Merdeka** | | | **2.395.006.885,00** | | | | | | | | **3.563.231.400,00** | **Kecamatan Merdeka** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.395.006.885,00** | | | | | | | | **3.563.231.400,00** | **Kecamatan Merdeka** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **2.395.006.885,00** | | | | | | | | **3.563.231.400,00** | **Kecamatan Merdeka** |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 93 Indeks | 2.222.748.623,00 | | | | | | | - | 3.328.525.512,00 | Kecamatan Merdeka |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **2.068.983.039,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.06 | **Kecamatan Merdeka** | **-** | **3.065.747.794,00** | **Kecamatan Merdeka** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Prioritas | | | | | | |
| U | B | P | K | SK | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | Target | Pagu Indikatif | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 16 Orang/bulan | 1.964.251.599,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 2.914.934.520,00 | Kecamatan Merdeka |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 104.731.440,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 150.813.274,00 | Kecamatan Merdeka |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **75.588.625,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.06 | **Kecamatan Merdeka** | **-** | **123.486.635,00** | **Kecamatan Merdeka** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 4.969.356,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 7.155.873,00 | Kecamatan Merdeka |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 11.775.095,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 31.016.269,00 | Kecamatan Merdeka |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 8.728.779,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 12.569.443,00 | Kecamatan Merdeka |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 3.925.395,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 5.652.570,00 | Kecamatan Merdeka |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 36 Dokumen | 2.190.000,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 3.732.480,00 | Kecamatan Merdeka |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 300 Laporan | 44.000.000,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 63.360.000,00 | Kecamatan Merdeka |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **51.736.200,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.06 | **Kecamatan Merdeka** | **-** | **101.216.390,00** | **Kecamatan Merdeka** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 13.500.000,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 45.619.200,00 | Kecamatan Merdeka |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 3.408.000,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 4.907.520,00 | Kecamatan Merdeka |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 24 Laporan | 34.828.200,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 50.689.670,00 | Kecamatan Merdeka |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **26.440.759,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.06 | **Kecamatan Merdeka** | **-** | **38.074.693,00** | **Kecamatan Merdeka** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 26.440.759,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 38.074.693,00 | Kecamatan Merdeka |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 85.339.810,00 | | | | | | | - | 136.784.532,00 | Kecamatan Merdeka |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **100 %** | **33.139.810,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.06 | **Kecamatan Merdeka** | **-** | **70.088.212,00** | **Kecamatan Merdeka** |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 18.139.810,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 26.121.326,00 | Kecamatan Merdeka |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 43.966.886,00 | Kecamatan Merdeka |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | **100 %** | **48.600.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.06 | **Kecamatan Merdeka** | **-** | **64.696.320,00** | **Kecamatan Merdeka** |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 48.600.000,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 64.696.320,00 | Kecamatan Merdeka |
| **7** | **01** | **02** | **2.03** | | **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum** | **100 %** | **3.600.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.06 | **Kecamatan Merdeka** | **-** | **2.000.000,00** | **Kecamatan Merdeka** |
| 7 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen | 3.600.000,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 2.000.000,00 | Kecamatan Merdeka |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 6 kegiatan | 21.284.177,00 | | | | | | | - | 2.000.000,00 | Kecamatan Merdeka |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **100 %** | **21.284.177,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.06 | **Kecamatan Merdeka** | **-** | **2.000.000,00** | **Kecamatan Merdeka** |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 2.250.000,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 1.000.000,00 | Kecamatan Merdeka |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5 Laporan | 19.034.177,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 1.000.000,00 | Kecamatan Merdeka |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 2/2/6 Perda/Perkada/Kegiatan | 17.000.000,00 | | | | | | | - | 20.000.000,00 | Kecamatan Merdeka |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **100 %** | **14.000.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.06 | **Kecamatan Merdeka** | **-** | **14.000.000,00** | **Kecamatan Merdeka** |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 12.000.000,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 12.000.000,00 | Kecamatan Merdeka |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12 Laporan | 2.000.000,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 2.000.000,00 | Kecamatan Merdeka |
| **7** | **01** | **04** | **2.02** | | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **Jumlah Perda dan Perkada yang dikoordinasikan Penerapan dan Penegakannya<br>Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **2 perda dan perkada 100 %** | **3.000.000,00** | | | PN.02 | PP.04 | PD.06 | **Kecamatan Merdeka** | **-** | **6.000.000,00** | **Kecamatan Merdeka** |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 6 Laporan | 3.000.000,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 6.000.000,00 | Kecamatan Merdeka |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | 1 Urusan | 28.834.275,00 | | | | | | | - | 55.921.356,00 | Kecamatan Merdeka |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **100 %** | **28.834.275,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.06 | **Kecamatan Merdeka** | **-** | **55.921.356,00** | **Kecamatan Merdeka** |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 200 Orang | 28.834.275,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 55.921.356,00 | Kecamatan Merdeka |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi | 9 Pemerintahan Desa | 19.800.000,00 | | | | | | | - | 20.000.000,00 | Kecamatan Merdeka |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **100 %** | **19.800.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.06 | **Kecamatan Merdeka** | **-** | **20.000.000,00** | **Kecamatan Merdeka** |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 18 Dokumen | 1.800.000,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 2.000.000,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 9 Dokumen | 9.000.000,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 9.000.000,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 9 Dokumen | 9.000.000,00 | - Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.06 | Kecamatan Merdeka | | 9.000.000,00 | KECAMATAN MERDEKA |
| | | | | | **Kecamatan Namanteran** | | | **2.490.253.266,00** | | | | | | | | **3.930.773.208,00** | **Kecamatan Namanteran** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.490.253.266,00** | | | | | | | | **3.930.773.208,00** | **Kecamatan Namanteran** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **2.490.253.266,00** | | | | | | | | **3.930.773.208,00** | **Kecamatan Namanteran** |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 2.323.441.590,00 | | | | | | | - | 3.604.682.240,00 | Kecamatan Namanteran |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **2.144.634.533,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Pegawai Kecamatan Naman Teran** | **-** | **3.328.010.769,00** | **Kecamatan Namanteran** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/bula | 2.051.394.533,00 | - Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Naman Teran | | 3.209.781.009,00 | Kecamatan Namanteran |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 88 Dokumen | 93.240.000,00 | - Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Pegawai Kecamatan Naman Teran | | 118.229.760,00 | Kecamatan Namanteran |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **83.751.017,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Kecamatan Naman Teran** | **-** | **140.992.271,00** | **Kecamatan Namanteran** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 15 Paket | 2.117.336,00 | - Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Naman Teran | | 3.516.480,00 | Kecamatan Namanteran |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 33 Paket | 17.054.685,00 | - Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Naman Teran | | 24.568.682,00 | Kecamatan Namanteran |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 11 Paket | 3.035.996,00 | - Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Naman Teran | | 4.371.909,00 | Kecamatan Namanteran |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 1.647.000,00 | - Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Naman Teran | | 2.373.408,00 | Kecamatan Namanteran |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100 Laporan | 5.368.000,00 | - Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Naman Teran | | 6.000.000,00 | Kecamatan Namanteran |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 457 Laporan | 54.528.000,00 | - Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Naman Teran | | 100.161.792,00 | Kecamatan Namanteran |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **59.546.040,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Kecamatan Naman Teran** | **-** | **86.258.400,00** | **Kecamatan Namanteran** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 11.036.040,00 | - Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Naman Teran | | 16.329.600,00 | Kecamatan Namanteran |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | 3.570.000,00 | - Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Naman Teran | | 1.500.000,00 | Kecamatan Namanteran |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 35 Laporan | 44.940.000,00 | - Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Naman Teran | | 68.428.800,00 | Kecamatan Namanteran |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **35.510.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Kendaraan Dinas Kecamatan Naman Teran** | **-** | **49.420.800,00** | **Kecamatan Namanteran** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | 35.510.000,00 | - Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Kendaraan Dinas Kecamatan Naman Teran | | 49.420.800,00 | Kecamatan Namanteran |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 61.628.370,00 | | | | | | | - | 114.544.000,00 | Kecamatan Namanteran |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **100 %** | **29.244.370,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Kecamatan Naman Teran** | **-** | **46.115.200,00** | **Kecamatan Namanteran** |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 200 Laporan | 13.798.370,00 | - Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Naman Teran | | 36.115.200,00 | Kecamatan Namanteran |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 15.446.000,00 | - Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Naman Teran | | 10.000.000,00 | Kecamatan Namanteran |
| **7** | **01** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | **100 %** | **32.384.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Kecamatan Naman Teran** | **-** | **68.428.800,00** | **Kecamatan Namanteran** |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 32.384.000,00 | - Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Naman Teran | | 68.428.800,00 | Kecamatan Namanteran |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 5 Kegiatan | 13.845.500,00 | | | | | | | - | 20.000.000,00 | Kecamatan Namanteran |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **100 %** | **13.845.500,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Kecamatan Naman Teran** | **-** | **20.000.000,00** | **Kecamatan Namanteran** |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 5.000.000,00 | - Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Naman Teran | | 10.000.000,00 | Kecamatan Namanteran |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5 Laporan | 8.845.500,00 | - Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Naman Teran | | 10.000.000,00 | Kecamatan Namanteran |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penegakan Perda dan Perkada | 2/2/2 Perda/Perkada/Kegiatan | 18.369.275,00 | | | | | | | - | 39.783.475,00 | Kecamatan Namanteran |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **100 %** | **14.701.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Kecamatan Naman Teran** | **-** | **36.115.200,00** | **Kecamatan Namanteran** |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 14.701.000,00 | - Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Kecamatan Naman Teran | | 36.115.200,00 | Kecamatan Namanteran |
| **7** | **01** | **04** | **2.02** | | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada** | **100 %** | **3.668.275,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Kecamatan Naman Teran** | **-** | **3.668.275,00** | **Kecamatan Namanteran** |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 Laporan | 3.668.275,00 | - Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Kecamatan Naman Teran | | 3.668.275,00 | Kecamatan Namanteran |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | 1 Urusan | 60.968.531,00 | | | | | | | - | 139.763.493,00 | Kecamatan Namanteran |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **100 %** | **60.968.531,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Kecamatan Naman Teran** | **-** | **139.763.493,00** | **Kecamatan Namanteran** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 300 Orang | 60.968.531,00 | - Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Naman Teran | | 139.763.493,00 | Kecamatan Namanteran |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang di Bina Dan Diawasi | 14 Pemerintahan Desa | 12.000.000,00 | | | | | | | - | 12.000.000,00 | Kecamatan Namanteran |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **100 %** | **12.000.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Kecamatan Naman Teran** | **-** | **12.000.000,00** | **Kecamatan Namanteran** |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 12.000.000,00 | - Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Kecamatan Naman Teran | | 12.000.000,00 | KECAMATAN NAMANTERAN |
| | | | | | **Kecamatan Tiganderket** | | | **2.584.195.668,00** | | | | | | | | **2.755.989.591,00** | **Kecamatan Tiganderket** |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **2.584.195.668,00** | | | | | | | | **2.755.989.591,00** | **Kecamatan Tiganderket** |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | **2.584.195.668,00** | | | | | | | | **2.755.989.591,00** | **Kecamatan Tiganderket** |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 2.462.107.408,00 | | | | | | | - | 2.545.989.591,00 | Kecamatan Tiganderket |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **2.266.707.398,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pegawai Kantor Camat Tiganderket** | **-** | **2.284.989.591,00** | **Kecamatan Tiganderket** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 21 Orang/bulan | 2.184.227.398,00 | - Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pegawai Kantor Camat Tiganderket | | 2.201.829.591,00 | Kecamatan Tiganderket |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 82.480.000,00 | - Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pegawai Kantor Camat Tiganderket | | 83.160.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **71.840.010,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pegawai Kantor Camat Tiganderket** | **-** | **120.000.000,00** | **Kecamatan Tiganderket** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 29 Paket | 2.200.000,00 | - Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pegawai Kantor Camat Tiganderket | | 5.500.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 260 Paket | 14.867.059,00 | - Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pegawai Kantor Camat Tiganderket | | 20.000.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 37 Paket | 3.720.951,00 | - Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pegawai Kantor Camat Tiganderket | | 7.500.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 409 Paket | 4.252.000,00 | - Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pegawai Kantor Camat Tiganderket | | 6.500.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 1.960.000,00 | - Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pegawai Kantor Camat Tiganderket | | 5.500.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 260 Laporan | 44.840.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pegawai Kantor Camat Tiganderket | | 75.000.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **93.560.000,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pegawai Kantor Camat Tiganderket** | **-** | **101.000.000,00** | **Kecamatan Tiganderket** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 Laporan | 17.500.000,00 | - Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pegawai Kantor Camat Tiganderket | | 17.600.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 5.720.000,00 | - Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pegawai Kantor Camat Tiganderket | | 7.500.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 70.340.000,00 | - Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pegawai Kantor Camat Tiganderket | | 75.900.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **30.000.000,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pegawai Kantor Camat Tiganderket** | **-** | **40.000.000,00** | **Kecamatan Tiganderket** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 30.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pegawai Kantor Camat Tiganderket | | 40.000.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 Indeks | 29.552.000,00 | | | | | | | - | 53.000.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **100 %** | **29.552.000,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Masyarakat Tiganderket** | **-** | **53.000.000,00** | **Kecamatan Tiganderket** |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 Laporan | 15.552.000,00 | - Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Masyarakat Tiganderket | | 18.000.000,00 | Kecamatan Tiganderket |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 14.000.000,00 | - Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Masyarakat Tiganderket | | 35.000.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan | 2 Kegiatan | 26.000.000,00 | | | | | | | - | 45.000.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **100 %** | **26.000.000,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Masyarakat Tiganderket** | **-** | **45.000.000,00** | **Kecamatan Tiganderket** |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 34 Lembaga Kemasyarakatan | 14.000.000,00 | - Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Masyarakat Tiganderket | | 20.000.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan | 12.000.000,00 | - Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Masyarakat Tiganderket | | 25.000.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Penegakan Perda Dan Perkada | 2/2/2 Perda/Perkada/Kegiatan | 13.200.000,00 | | | | | | | - | 29.000.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **100 %** | **13.200.000,00** | | | PN.02 | | PD.03 | **Masyarakat Tiganderket** | **-** | **29.000.000,00** | **Kecamatan Tiganderket** |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 13.200.000,00 | - Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | | PD.03 | Masyarakat Tiganderket | | 29.000.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan | 3 Urusan | 36.336.260,00 | | | | | | | - | 73.000.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **100 %** | **36.336.260,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Masyarakat Tiganderket** | **-** | **73.000.000,00** | **Kecamatan Tiganderket** |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 300 Orang | 24.960.260,00 | - Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Masyarakat Tiganderket | | 55.000.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 170 Orang | 11.376.000,00 | - Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Masyarakat Tiganderket | | 18.000.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah Pemerintahan Desa Yang di Bina Dan Di awasi | 17 Pemerintahan Desa | 17.000.000,00 | | | | | | | - | 10.000.000,00 | Kecamatan Tiganderket |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **100 %** | **17.000.000,00** | | | PN.03 | | PD.06 | **Pemerintah Desa** | **-** | **10.000.000,00** | **Kecamatan Tiganderket** |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 17 Dokumen | 17.000.000,00 | - Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | | PD.06 | Pemerintah Desa | | 10.000.000,00 | KECAMATAN TIGANDERKET |
| | | | | | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | **39.158.138.866,00** | | | | | | | | **42.518.902.356,00** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| **8** | | | | | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | **39.158.138.866,00** | | | | | | | | **42.518.902.356,00** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| **8** | **01** | | | | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | **39.158.138.866,00** | | | | | | | | **42.518.902.356,00** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| 8 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 Indeks | 4.525.144.244,00 | | | | | | | - | 4.525.144.244,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **4.164.342.125,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah** | **-** | **4.164.342.125,00** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 42 Orang/bulan | 3.934.902.125,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | | 3.934.902.125,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 229.440.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | | 229.440.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| **8** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **170.602.119,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah** | **-** | **170.602.119,00** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 18 Paket | 26.658.065,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | | 26.658.065,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 799.022,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | | 799.022,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 10.053.560,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | | 10.053.560,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 1.800.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | | 1.800.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36 Laporan | 131.291.472,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | | 131.291.472,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **140.680.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah** | **-** | **140.680.000,00** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 19.020.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | | 19.020.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 14.200.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | | 14.200.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 107.460.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | | 107.460.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **49.520.000,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah** | **-** | **49.520.000,00** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | 49.520.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | | 49.520.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional | 11 Kegiatan | 1.158.858.330,00 | | | | | | | - | 1.158.858.330,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **02** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **100 %** | **1.158.858.330,00** | | | PN.03 | PP.04 | PD.06 | **Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah** | **-** | **1.158.858.330,00** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |

| Kode Rekening | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | | Target | Pagu Indikatif | |
| U | B | P | K | SK | | | | | | | Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Daerah | | | | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 4 Dokumen | 1.080.881.474,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | | 1.080.881.474,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 5 Dokumen | 77.976.856,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.03 | PP.04 | PD.06 | Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | | 77.976.856,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Pembinaan Partai Politik | 35 parpol | 30.900.946.892,00 | | | | | | | - | 34.261.710.382,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **03** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** | **100 %** | **30.900.946.892,00** | | | #N/A | PP.01 | PD.03 | **Meningkatnya kualitas masyarakat** | **-** | **34.261.710.382,00** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 9 Dokumen | 30.900.946.892,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | #N/A | PP.01 | PD.03 | Meningkatnya kualitas masyarakat | | 34.261.710.382,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 05 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Jumlah Pertemuan dan Sosialisasi | 9 kegiatan | 2.096.539.400,00 | | | | | | | - | 2.096.539.400,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **05** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya** | **100 %** | **2.096.539.400,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Meningkatnya kualitas masyarakat** | **-** | **2.096.539.400,00** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 3 Dokumen | 128.691.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Meningkatnya kualitas masyarakat | | 128.691.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 300 Orang | 1.807.848.400,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Meningkatnya kualitas masyarakat | | 1.807.848.400,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 300 Orang | 160.000.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Meningkatnya kualitas masyarakat | | 160.000.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 06 | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Jumlah pertemuan Forkopimda dan Forkopimcam | 4 kegiatan | 476.650.000,00 | | | | | | | - | 476.650.000,00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **06** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | **Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | **100 %** | **476.650.000,00** | | | PN.02 | PP.01 | PD.03 | **Meningkatnya kualitas masyarakat** | **-** | **476.650.000,00** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 300 Orang | 476.650.000,00 | - Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PN.02 | PP.01 | PD.03 | Meningkatnya kualitas masyarakat | | 476.650.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | | | | | | **1.371.794.761.424,00** | | | | | | | | **1.603.759.584.040,31** | |